

Rising to the Challenge



Catatan untuk Pembaca Laporan

Tabel dan grafik pada laporan ini memaparkan data numerik dengan standar bahasa Inggris. Sedangkan pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar bahasa Inggris dan Indonesia sesuai konteksnya.

Semua satuan ukuran nikel dalam matte dan mineral lainnya dalam laporan ini adalah metrik ton, dimana satu metrik ton sama dengan 2.204,62 pon dan disajikan sebagai "ton".

Peringatan atas pernyataan-pernyataan mengenai masa depan

Dalam dokumen ini mungkin terdapat rencana, proyeksi, strategi dan tujuan Perseroan tertentu, yang bukan merupakan pernyataan fakta historis dan perlu dipahami sebagai pernyataan mengenai masa depan berdasarkan hukum yang berlaku. Pernyataan mengenai masa depan tergantung pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan keadaan dan hasil aktual Perseroan di masa depan berbeda dari yang diharapkan atau diindikasikan. Tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil yang diantisipasi oleh Perseroan, atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan mengenai masa depan, akan tercapai.

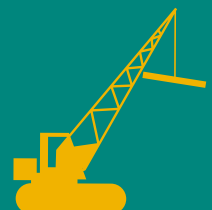
Note to the Readers of the Report

In all tables and graphs presenting numerical data, the English standard is used. Where numerical values are presented in text format, English and Indonesian standards are used respectively.

All measurements of nickel in matte and other mined materials are reported in metric tonnes, with one metric ton being equal to 2,204.62 pounds, and represented as "tonnes".

Caution regarding forward-looking statements

This document may contain certain plans, projections, strategies and objectives of the Company that are not statements of historical fact and would be treated as forward-looking statements under applicable law. Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual events, and the Company's future results, to be different than expected or indicated by such statements. No assurance can be given that the results anticipated by the Company, or indicated by such forward-looking statements, will be achieved.





Pabrik Pengolahan kami di Sorowako
Our Processing Plant in Sorowako

Keberlanjutan Tema

Theme Journey

2011



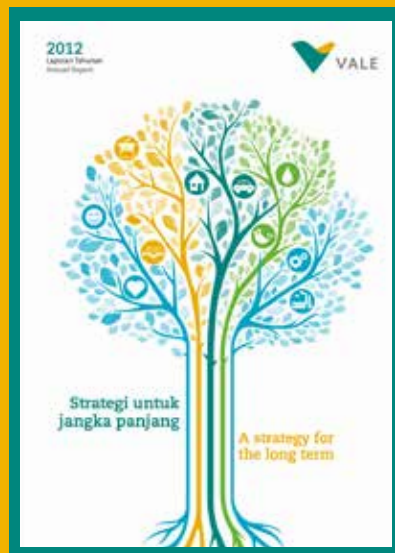
Usaha yang terus berkembang

Growing Stronger Sustainably

Kami harus tumbuh dengan berkelanjutan agar dapat memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham dengan tetap berpegang pada nilai-nilai perusahaan kami. Itu sebabnya kami terus berinvestasi agar dapat meningkatkan produksi dengan biaya yang lebih kompetitif.

We must grow sustainably in order to deliver excellent returns to our shareholders in a way that ensures we hold true to our corporate values. That is why we continue to invest so that we can increase production with more competitive costs.

2012



Strategi untuk Jangka Panjang

A Strategy for the Long Term

Kami membangun perusahaan untuk jangka panjang dan memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham dan manfaat bagi komunitas sekitar kami. Yang kami lakukan untuk meraihnya:

- Peningkatan produksi
- Efisiensi dengan inovasi dan keterlibatan
- Menurunkan biaya
- Investasi pada proses, sumber daya manusia dan masyarakat sekitar

We are building our company for the long term and delivering excellent returns to our shareholders and providing benefits to our communities. What we're doing to get there:

- Production increase
- Efficiency through innovation and engagement
- Cost reduction
- Investing in processes, people and communities

2013



Mengelola Perubahan. Memanfaatkan Peluang.

Managing Change. Capitalizing on Opportunity

Banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis kami; kondisi pasar, peraturan perundang-undangan bahkan kekuatan alam yang di luar kendali manusia.

Investasi yang kami keluarkan harus membuat kami siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Kami menaikkan kapasitas produksi dan menerapkan inovasi praktik-praktik kerja terbaik; siap memanfaatkan peluang untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh pemangku kepentingan.

Many external factors affect our business; market condition, rules and regulation and even natural forces that are not in our control.

Investment that we spent must prepare us to face challenges and capitalize opportunities. We increased capacity and applying innovative work practices; ready to capitalize opportunities and bring prosperity to all of our valued stakeholders.

2014



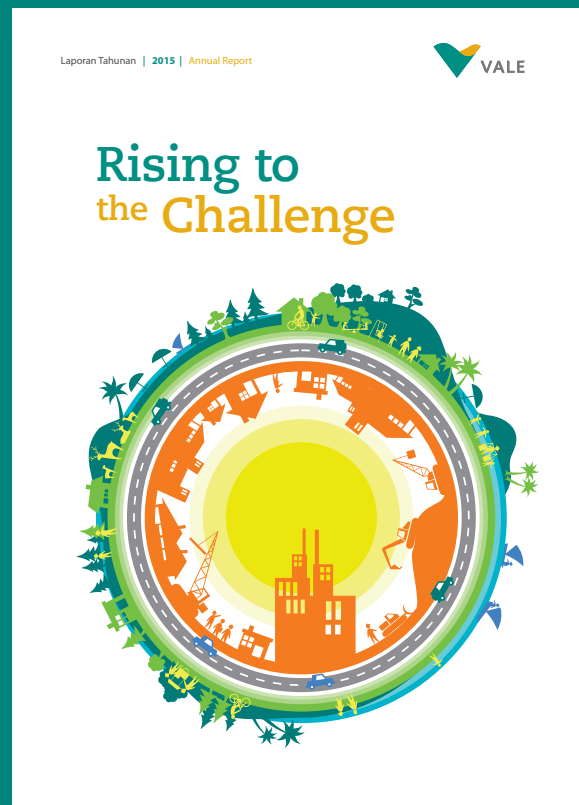
Melangkah Pasti dengan Keunggulan Operasional untuk Meraih Kemajuan Bersama

Growing Together through Operational Excellence

Kami menjadi perusahaan pertama yang menandatangani amandemen Kontrak Karya. Kami juga mencapai rekor produksi tertinggi dan menyelesaikan proyek-proyek penghematan biaya.

We became the first company to sign a Contract of Work amendment. We achieved record high production and completed cost reduction projects.

2015



Rising to the Challenge

Harga nikel mencapai yang terendah dalam 13 tahun terakhir. Namun biaya produksi kami juga turun berkat efisiensi operasi dan terutama konversi HSFO ke batu bara serta turunnya harga minyak dunia. Kami juga kembali mencetak rekor produksi tertinggi.

Nickel price at the lowest in the last 13 years. However our production costs also declined driven by operational efficiency and particularly the HSFO conversion to coal as well as the declining world oil prices. We again made another record high production.

Daftar Isi Contents

2015 Rising to the Challenge

Keberlanjutan Tema	2
Theme Journey	
Daftar Isi	4
Contents	
Penjelasan Tema	6
Rising to the Challenge	
Ikhtisar Kinerja 2015	14
2015 Performance Highlights	
Ikhtisar Keberlanjutan 2015	16
2015 Sustainability Highlights	



18 Tentang Perusahaan About the Company

Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan	20
The Name and Full Address of the Company	
Riwayat Singkat Perusahaan	23
A Brief History of the Company	
Identitas Perseroan	24
Company Identity	
Sejarah Perseroan	25
Company History	
Jejak Langkah	26
Milestones	
Bidang Usaha	30
Line of Business	
Fasilitas	31
Facilities	
Proses Penambangan	32
Mine Process	
Dari Bijih menjadi Nikel dalam Matte	33
From Ore to Nickel in Matte	
Area Usaha	34
Business Area	
Cadangan Mineral	36
Mineral Reserves	
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Kami	38
Our Vision, Mission and Values	
Peristiwa Penting 2015	40
2015 Event Highlights	
Penghargaan dan Sertifikasi 2015	52
2015 Awards and Certifications	
Struktur Organisasi	54
Organizational Structure	
Pejabat Senior Perseroan	56
Corporate Senior Management	



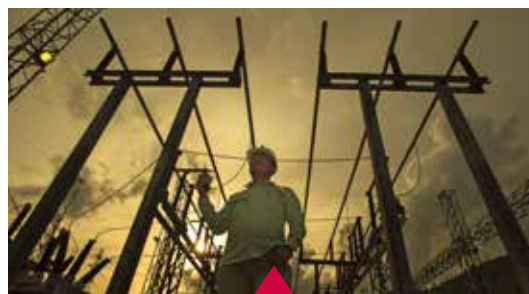
Struktur Pemegang Saham Utama dan Pengendali	64
Structure of Majority and Controlling Shareholders	
Profil Pemegang Saham	66
Shareholder Profile	
Ikhtisar Saham	68
Share Highlights	
Data Pemeringkat Efek	72
Securities Rating Data	
Sekretaris Perusahaan	72
Corporate Secretary	
Penasihat Hukum	72
Legal Counsel	
Data Biro Administrasi Efek/pihak yang mengadministrasikan saham Perseroan	73
Share Administration/Registrar	
Data Akuntan Independen/Eksternal	73
Independent/External Accountant Data	
Profil Dewan Komisaris	74
Board of Commissioners Profile	
Profil Direksi	84
Board of Directors Profile	

88 Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report

98 Laporan Direksi Board of Directors' Report

112 Kinerja Keuangan dan saham 2015 2015 Financial and Share Highlights

Ikhtisar Keuangan	112
Financial Highlights	



114 Pembahasan dan Analisa Manajemen Management's Discussion and Analysis

Tinjauan Operasi Perusahaan	116
The Company's Operating Review	
Tinjauan Usaha Ulasan Pasar Nikel Pada 2015	117
Business Review Review of the Nickel Market in 2015	
Posisi Keuangan	134
Financial Position	

Hasil dan Rasio Keuangan	148	Dasar Pelaksanaan Kebijakan bagi Tata Kelola Perusahaan yang Baik	221
Financial Returns and Ratios		Policy Implementation Basis for Good Corporate Governance	
Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal	152	Kebijakan Tata Kelola	223
Capital Structure and Capital Structure Policy		Governance Policy	
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal	154	Nilai-Nilai Perusahaan	224
Material Commitment for Capital Investment		Corporate Values	
Investasi Barang Modal dan Berkelanjutan	154	Kode Etika dan Perilaku	225
Capital and Sustaining Investments		Code Of Ethics and Conducts	
Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan	157	Sistem Whistleblower	226
Material Information and Facts Subsequent to the Accountant's Report Date		Whistleblower System	
Pandangan Tahun 2016	157	Rapat Umum Pemegang Saham	227
2016 Outlook		General Meeting of Shareholders	
Perbandingan Antara Target dengan Pencapaian Tahun 2015	159	Tata Cara Pembayaran Dividen	234
Comparison of 2015 Target to Actual		Dividend Payment Procedures	
Target Tahun 2016	160	Dewan Komisaris	236
2016 Target		Board of Commissioners	
Aspek Pemasaran atas Produk Perseroan	160	Komisaris Independen	247
Marketing Aspect to the Company's Product		Independent Commissioners	
Kebijakan Dividen	161	Penilaian Terhadap Dewan Komisaris	249
Dividend Policy		Evaluation of the Board of Commissioners	
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	162	Komite Tata Kelola Perusahaan	249
Realization of Initial Public Offering ("IPO") Funds		Corporate Governance Committee	
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang/Modal	162	Komite Audit	254
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition or Debt/Capital Restructuring		Audit Committee	
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	169	Direksi	260
Information on Material Transaction which Contains Conflict of Interest and/or Affiliate Transaction		Board of Directors	
Perubahan Peraturan Perundangundangan yang Signifikan	173	Penilaian terhadap Direksi	272
Significant Changes to Regulations		Assessment of the Board of Directors	
Peraturan Kementerian ESDM Tentang Tata Cara Evaluasi	175	Sekretaris Perusahaan	274
Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara		Corporate Secretary	
MEMR Regulation on Evaluation Procedures for Issuance of Mineral and Coal Mining Business Licences		Internal Audit	281
Peraturan Kementerian ESDM Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha dan Daerah Tertentu	177	Internal Audit	287
MEMR Regulation on Income Tax Facility for Capital Investment in Certain Business and Area		Akuntan Publik Independen	287
Perubahan Kebijakan Akuntansi	177	Independent Public Accountants	287
Changes in Accounting Policies		Sistem Pengendalian Internal	291
Informasi Keuangan yang Mengandung Peristiwa Bersifat Langka dan Luar Biasa	178	Internal Control System	299
Financial Information which Contains an Extraordinary and Rare Event		Manajemen Risiko	300
Proyek-proyek Pengembangan	180	Risk Management	303
Projects Development		Perkara Penting	305
		Important Case	324
		Akses terhadap Informasi dan Data Perseroan	
		Access to the Company's Information and Data	
		Kode Etik dan Perilaku	
		Code of Ethics and Conduct	
		Sistem Whistleblower	
		The Whistleblower System	
		Laporan Komite Audit	
		Audit Committee Report	

182 Penunjang Usaha

Business Support

Sumber Daya Manusia	184
Human Resources	
Teknologi Informasi	206
Information Technology	



214 Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Pernyataan Tata Kelola Perusahaan	216
Statement of Corporate Governance	
Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik	217
Good Corporate Governance Assessment	
Langkah-Langkah Perbaikan menuju Praktik Terbaik dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)	218
Actions Towards the Best GCG Practices	

326 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

358 Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan

Responsibility for the 2015 Annual Report

360 Laporan Keuangan

Financial Statements

439 Referensi silang Peraturan Bapepam-LK No X.K.6

Cross Reference of BAPEPAM-LK Regulation No X.K.6



Rising to the Challenge



Tahun 2015 merupakan salah satu tahun yang penuh tantangan dalam sejarah Perseroan. Para produsen nikel berjuang menghadapi harga nikel yang sangat rendah, di mana hampir setengah dari industri berada di bawah tekanan arus kas yang negatif. Situasi rendahnya harga nikel yang berkepanjangan, relatif di bawah biaya-biaya industri tersebut, belum pernah terjadi sejak era 1990-an. Pada saat yang bersamaan, harapan para pemangku kepentingan semakin dinamis, dengan munculnya beberapa aturan yang mempengaruhi operasi kami.

Setiap saat, kami senantiasa siap menghadapi tantangan tersebut.

Kami mengatasi rendahnya harga nikel dengan menurunkan biaya kami secara signifikan.

Di saat yang sama, kami juga berhasil melampaui rekor produksi tertinggi yang dicapai tahun sebelumnya dengan mencatat rekor produksi baru sebesar 81.177 ton nikel dalam matte.

Dengan segala tantangan yang kami hadapi, kami tetap mempertahankan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai utama di perusahaan kami. Kami akan terus diakui sebagai produsen nikel berkelanjutan yang terkemuka.

Walaupun banyak tantangan yang kami hadapi, kami masih bisa menandai tahun 2015 sebagai *year of resilience and excellence*. Dan kami siap menyongsong tahun-tahun yang akan datang dengan segala dinamika yang akan terjadi, apakah itu berupa berlanjutnya tekanan harga atau membaiknya kondisi pasar.

2015 ranks among the most challenging years in the history of the Company. Across the industry, nickel producers have battled extremely low nickel prices, with approximately half the industry under negative cash flow pressure. Such prolonged low prices, relative to industry costs, have not been seen since the 1990s. At the same time, stakeholder expectations are increasingly dynamic, with a range of regulatory developments affecting our operations.

At every instant, we have risen to this challenge.

We have responded to the extremely low nickel prices by significantly reducing our costs.

At the same time, we have exceeded last year's record high production, reaching a new record of 81,177 tonnes of nickel in matte.

Through all this, we have maintained commitment to our values. We continue to be recognized as a leader in sustainable nickel production.

In this way, despite the many difficulties faced, we still celebrate 2015 as a year of resilience and excellence. In rising to the challenge, we are ready for whatever the future may bring, be it continued pressure or improved market conditions.



We did it again

81,177 tonnes

Our highest ever nickel production

For the second straight year, we have reached a new highest ever nickel production.





81.177 ton

Produksi nikel tertinggi kami

Dalam dua tahun berturut-turut, kami berhasil mencapai produksi nikel tertinggi dalam sejarah.

Cost reduction initiatives

Di tengah sangat rendahnya harga nikel, inisiatif pengurangan biaya merupakan kunci yang sangat penting di tahun 2015.

Bersamaan dengan peningkatan produksi, tingkat konversi dari proyek konversi batu bara Tahap 1 juga bertambah. Selain itu, kami juga telah berhasil melakukan uji coba proyek konversi batu bara Tahap 2, yang akan mendukung penghematan biaya dan meringankan dampak fluktuasi harga bahan bakar di masa yang akan datang.

Bersamaan dengan langkah-langkah pengendalian biaya lainnya, kami berhasil mengurangi biaya secara signifikan sehingga kami bisa melewati tahun 2015 dengan kondisi yang paling menantang bagi kami.

In light of the extremely low nickel price, cost reduction initiatives were of critical importance in 2015.

While simultaneously increasing production, we also increased the conversion rate from our coal conversion Phase 1 project. Furthermore, we successfully commenced trials on our coal conversion Phase 2 project, which will help to reduce costs and mitigate against future fuel price fluctuations.

Combined with other cost containment measures, we were able to significantly reduce costs, helping us to weather the storm in what has been one of our most challenging years ever.



Aktivitas pemeliharaan tungku pengering
Dryer maintenance activities

Our unwavering commitment

Sekali lagi, komitmen kami dalam pelestarian lingkungan diakui oleh Pemerintah. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, kami dianugerahi penghargaan Aditama untuk pengelolaan lingkungan “terbaik dari yang terbaik”.

Di tahun 2015 kami meresmikan teknologi Lamella Gravity Settlers, yang pertama kalinya diterapkan untuk tambang nikel di Indonesia. Ini adalah puncak dari beberapa tahun percobaan kami untuk mengembangkan mekanisme pengolahan air tambang secara lebih efisien.

Ini adalah perwujudan komitmen kami untuk menegakkan nilai-nilai perusahaan meskipun kami tengah menghadapi kondisi ekonomi yang sangat tidak menguntungkan.

Once again, our commitment to environmental protection has been recognized by the government. For the second straight year, we received the Aditama award for “best of the best” environmental management.

In 2015, we commissioned our new Lamella Gravity Settlers, which is the first time this technology has been applied to nickel mines in Indonesia. This step is the culmination of several years of trials to develop a more efficient mechanism of treating our mine water.

This demonstrates our commitment to upholding our corporate values despite adverse market conditions.

Sistem pengolahan kami yang baru menggunakan teknologi terkini untuk lebih meningkatkan kualitas air dari area-area pertambangan kami.

Our newly installed water treatment system uses a novel technology to further improve the water quality from our mining areas.



Fasilitas Lamella Gravity Settlers (LGS)
Lamella Gravity Settlers (LGS) facility

Ikhtisar Kinerja 2015

2015 Performance Highlights



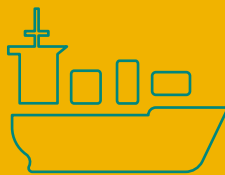
Produksi Nikel dalam Matte Nickel in matte production

101.5%

dari target
from target

101.6%

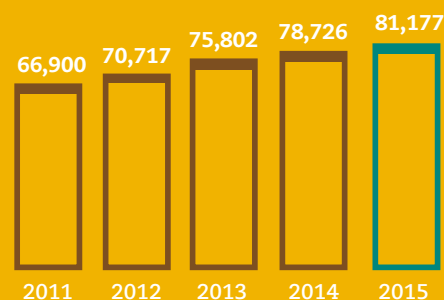
dari 2014
from 2014



Pengiriman nikel matte Nickel matte deliveries

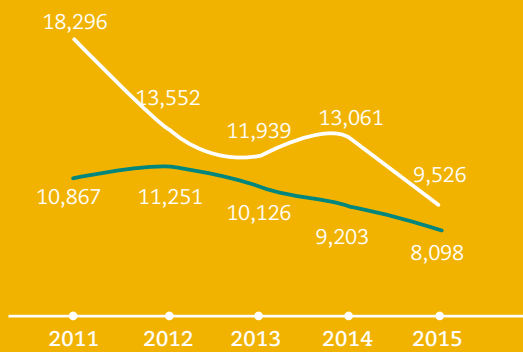
Produksi nikel dalam matte tahunan Annual nickel in matte production

Annual nickel in matte production



Harga realisasi rata-rata

Average realized price



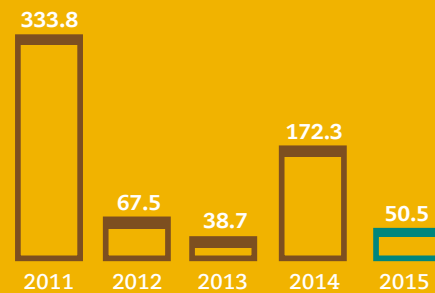
■ Harga realisasi rata-rata (AS\$/ton)
Average realized price (US\$/tonne)

■ Beban pokok pendapatan/unit pengiriman (AS\$/ton)
Cost of revenue/delivered unit (US\$/tonne)

8,098
US\$/metric tonne

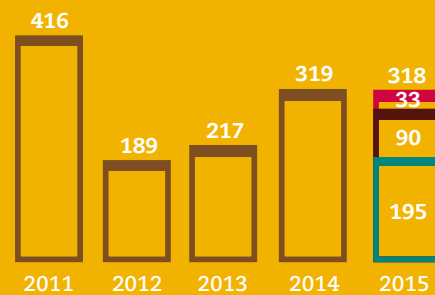
Laba tahun berjalan

Profit for the year



Resilient cash position

in US\$ million



■ Kas dan setara kas
Cash and cash equivalents
 ■ Investasi jangka pendek
Short-term investments
 ■ Kas yang dibatasi penggunaannya
Restricted cash

Ikhtisar Keberlanjutan 2015

2015 Sustainability Highlights



**Biru
Blue**

Capaian PROPER
PROPER Achievement

Aditama

**Penghargaan diraih
untuk kedua kalinya**

Award won for the second time



10%↓

Beban pokok produksi
Decrease in production costs

480

ton / tonnes

Pengurangan pemakaian sulfur pada proses produksi

Of sulfur use reduction in the production process

100%

Menggunakan biodiesel terpasang untuk mengurangi emisi, melanjutkan penggunaan B10 sejak triwulan terakhir 2014 dan mulai menggunakan B15 sejak Triwulan III 2015

Use of installed biodiesel to reduce emissions, continuing the use of B10 since last quarter of 2014, and began using B15 since third quarter of 2015



Tentang Perusahaan

About the Company



Daftar Isi Contents



Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan The Name and Full Address of the Company	20	Proses Penambangan Mine Process	32
Riwayat Singkat Perusahaan A Brief History of the Company	23	Dari Bijih menjadi Nikel dalam Matte From Ore to Nickel in Matte	33
Identitas Perseroan Company Identity	24	Area Usaha Business Area	34
Sejarah Perseroan Company History	25	Cadangan Mineral Mineral Reserves	36
Jejak Langkah Milestones	26	Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Kami Our Vision, Mission and Values	38
Bidang Usaha Line of Business	30	Peristiwa Penting 2015 2015 Event Highlights	40
Fasilitas Facilities	31	Penghargaan dan Sertifikasi 2015 2015 Awards and Certifications	52



Fasilitas Tanur Pereduksi
Reduction Kiln Facility

Struktur Organisasi Organizational Structure	54	Penasihat Hukum Legal Counsel	72
Pejabat Senior Perseroan Corporate Senior Management	56	Data Biro Administrasi Efek/pihak yang mengadministrasikan saham Perseroan Share Administration/Registrar	73
Struktur Pemegang Saham Utama dan Pengendali Structure of Majority and Controlling Shareholders	64	Data Akuntan Independen/Eksternal Independent/External Accountant Data	73
Profil Pemegang Saham Shareholder Profile	66	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	74
Ikhtisar Saham Share Highlights	68	Profil Direksi Board of Directors Profile	84
Data Pemeringkat Efek Securities Rating Data	72		
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	72		

Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan

The Name and Full Address of the Company

Nama Name	PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale; Perseroan the Company)
Alamat Address	<p>Kantor Pusat Corporate Office Efektif sejak 1 April 2016, kantor pusat PT Vale Indonesia Tbk pindah ke: The corporate office of PT Vale Indonesia Tbk moved to effective from April 1, 2016:</p> <p>The Energy Building, 31st floor SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia</p> <p>Sebelum tanggal 1 April 2016, kantor pusat PT Vale Indonesia Tbk di: Prior to April 1, 2016 the corporate office of PT Vale Indonesia Tbk had been located at:</p> <p>Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Indonesia</p> <p>T: +62-21-524 9000 F: +62-21-524 9020 W: www.vale.com/indonesia E: ptvi.corpsec@vale.com</p> <p>Pabrik Pengolahan Processing Plant Sorowako 92984 South Sulawesi Indonesia</p> <p>Kantor Perwakilan Makassar Makassar Representative Office Jl. Somba Opu PO Box 1143 Makassar 90001 South Sulawesi Indonesia</p>
Tanggal Pendirian Date of Incorporation	25 Juli 1968 July 25, 1968

Bentuk Badan Hukum Legal Entity	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	
Kegiatan Usaha yang dijalankan dan produk yang dihasilkan Business activities that are conducted and the finished product	Menambang bijih nikel dan memprosesnya menjadi nikel dalam matte To mine nickel ores and process into nickel in matte	
Jumlah Karyawan Number of employees	3.107 karyawan tetap pada 31 Desember 2015 3,107 permanent employees as of December 31, 2015	
Bursa Efek Stock exchange	Terdaftar pada 16 Mei 1990 di Bursa Efek Indonesia Listed on May 16, 1990 at the Indonesia Stock Exchange	
Kode Saham Share Code	INCO.JK	
Modal Dasar Authorized Capital	39.745.354.880 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham 39,745,354,880 shares with par value Rp25 per share	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	9.936.338.720 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham ditempatkan dan disetor penuh 9,936,338,720 shares with par value Rp25 per share issued and fully paid	
Aset Total Total Assets	AS\$2.289.161 pada 31 Desember 2015 US\$2,289,161 as at December 31, 2015	
Data Anak Perusahaan Subsidiary Data	Tidak memiliki anak perusahaan Does not have any subsidiaries	
Pemegang Saham Shareholders	Vale Canada Limited (VCL)	58.73%
	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	20.09%
	Publik Public	20.49%
	Vale Japan Limited	0.55%
	Sumitomo Corporation	0.14%

Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan

The Name and Full Address of the Company

Dasar Hukum Pendirian Legal Basis for Establishment

Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968 yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (RI) dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara RI No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan akta No. 121 tanggal 29 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 29 Juni 2015. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015.

The Company was established by Deed No. 49 dated July 25, 1968, drawn up before Eliza Pondaag, a public notary in Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968, and published in Supplement No. 93 to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968. These Articles of Association have been amended several times with the latest amendment made by Deed No. 121, dated June 29, 2015, drawn up before Leolin Jayayanti S.H., a public notary in Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on June 29, 2015. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0938647.AH.01.02 Year 2015 dated July 3, 2015, and obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0948078 Year 2015 dated July 3, 2015.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir Business Activities Based on the latest Articles of Association

Menjalankan usaha di bidang pertambangan nikel dan bijih-bijih yang bersangkutan lainnya, mineral-mineral, bahan-bahan logam dan hasil-hasil tambang lainnya, termasuk mengolah, memasarkan dan pengangkutannya. Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan segala usaha eksplorasi, penggalian, pengolahan, penyimpanan, dan operasi pada semua tahapan berkenaan dengan nikel dan bijih-bijih yang bertalian, mineral-mineral, bahan-bahan logam dan hasil-hasil tambang lainnya;
- memasarkan dan menjual produk atau produk-produk sampingan dari kegiatan tersebut, termasuk mengekspornya atas biaya Perseroan atau dari biaya pihak ketiga dengan mengindahkan izin-izin, bila ada, yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang sepanjang izin-izin demikian belum diberikan oleh Kontrak Karya;
- mengimpor segala yang diperlukan untuk mewujudkan kegiatan tersebut dengan mengindahkan izin-izin, bila ada, yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang sepanjang izin-izin demikian belum diberikan kepada Perseroan oleh Kontrak Karya

The Company conducts business in the field of the mining of nickel and other associated ores, minerals, metals and other mining products, including the manufacture, trade, and transport of the same.

In order to achieve the purposes and objectives referred to above, the Company engages in business activities as follows:

- undertaking all kinds of exploration, mining, processing, storage, and operations in all stages for nickel and associated ores, minerals, metals and mineral products;
- marketing and selling the products or by-products of the activities mentioned above, including the export at the Company's expense or on account of third parties with regards to the cost of licenses, if any, as required by the authorities, to the extent such licenses are not already covered by the Contract of Work;
- importing all that is necessary for the realization of the aforementioned activities with regards to licenses, if any, as required by authorities to the extent such licenses are not already covered by the Contract of Work.

Riwayat Singkat Perusahaan

A Brief History of the Company

Didirikan pada bulan Juli 1968, PT Vale merupakan perusahaan yang mendapat lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, pengolahan dan produksi nikel. sebagai kontraktor tunggal Pemerintah Indonesia di areal Kontrak Karya (KK), memiliki hak eksklusif di beberapa wilayah yang telah ditentukan di Sulawesi untuk melakukan eksplorasi, pengembangan, penambangan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan dan penjualan nikel maupun mineral lain terkait nikel yang terdapat di areal KK.

Saat ini, kami beroperasi di pulau Sulawesi di bawah perjanjian Kontrak Karya (KK) dengan Pemerintah Indonesia pada areal Kontrak Karya seluas hampir 118.435 hektar.

Wilayah awal diperoleh pada 27 Juli 1968 untuk areal seluas 6,6 juta hektar di bagian timur dan tenggara Sulawesi. Luas konsesi kami kemudian berkurang menjadi 2,9% akibat serangkaian pelepasan areal konsesi, terakhir kalinya saat ditandatangani hasil renegosiasi KK pada 17 Oktober 2014.

KK awal berlaku hingga 31 Maret 2008. Melalui Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan yang ditandatangani pada bulan Januari 1996, KK tersebut telah diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025.

Pada bulan Oktober 2014, PT Vale dan Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan setelah renegosiasi KK dan berubahnya beberapa ketentuan di dalamnya.

Established in July 1968, PT Vale is a company with a license from the Government of Indonesia to explore, mine, process and produce nickel. As sole contractor of the Government in the areas covered by the CoW, has been granted exclusive rights in specified areas on the Island of Sulawesi to explore, develop, mine, process, store, transport and sell all nickel and nickel-containing minerals in any form and all minerals found in association with nickel in the CoW areas.

We currently operate in Sulawesi Island under a Contract of Work (CoW) agreement with the Indonesian Government. Our CoW area is nearly 118,435 hectares in total.

The original area of 6.6 million hectares, covering the eastern and southeastern arms of Sulawesi, was granted on July 27, 1968. The concession area has been reduced to 2.9% of the original size under a series of relinquishments, the last of which when CoW renegotiation signed on October 17, 2014.

The original CoW was valid until March 31, 2008. It was modified and extended by the Agreement on Modification and Extension signed in January 1996 and is now valid until December 28, 2025.

In October 2014, PT Vale and the Government of Indonesia reached an agreement after renegotiating its CoW and changing of several contract provisions.






Identitas Perseroan

Company Identity

Paragraf berikut menjelaskan makna logo Perseroan.

The following paragraph will explain our corporate identity.



	<p>WARNA: Hijau melambangkan alam dan lembah. Kuning melambangkan pengolahan kekayaan mineral menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p>COLOR: The green represents nature and valleys. The yellow alludes to the mineral wealth that we transform into the essential components for everyday life.</p>
	<p>V: Bentuk V mengacu pada huruf "V" (seperti dalam Vale, kemenangan dan nilai).</p>	<p>V: The V shape refers to the letter "V" (as in Vale, victory and value).</p>
	<p>HATI: Hati adalah sintesis dari gambar Perusahaan: sebuah organisasi global yang unik didorong oleh semangat karyawannya.</p>	<p>HEART: The heart is the synthesis of the Company image: a unique global organization driven by the passion of its employees.</p>
	<p>INFINITY: Kurva pada bagian atas simbol adalah infinity, sebagai ekspresi dari upaya berkelanjutan kami mengejar cara yang sempurna untuk menyelesaikan sesuatu.</p>	<p>INFINITY: The curves on the upper part of the symbol suggest infinity, an expression of our ongoing pursuit of the perfect way to get things done.</p>
	<p>PENEMUAN: Ujung emas di dalam simbol melambangkan semangat penemuan yang mendorong kami untuk terus mencari mineral dan mengubahnya menjadi hal yang esensial untuk kebutuhan hidup masyarakat.</p>	<p>DISCOVERY: The golden tip of the symbol evinces the spirit of discovery that fuels our drive to discover minerals and convert them into those essentials on which people rely.</p>

Sejarah Perseroan

Company History

PT Vale mempunyai sejarah yang membanggakan di Indonesia. Diawali dengan eksplorasi di wilayah Sulawesi bagian timur pada tahun 1920-an. Kegiatan eksplorasi, kajian dan pengembangan tersebut terus dilanjutkan pada periode kemerdekaan dan selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

PT Vale (yang saat itu bernama PT International Nickel Indonesia) didirikan pada bulan Juli 1968. Kemudian di tahun tersebut PT Vale dan Pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya (KK) yang merupakan lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan dan pengolahan bijih nikel.

Sejak saat itu PT Vale memulai pembangunan smelter di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Melalui Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan yang ditandatangani pada bulan Januari 1996, KK tersebut telah diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025.

Pada bulan Oktober 2014, PT Vale dan Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan setelah renegotiasi KK dan berubahnya beberapa ketentuan di dalamnya termasuk pelepasan areal KK menjadi seluas hampir 118.435 hektar.

Ini berarti luasan areal KK telah berkurang hingga hanya 1,8% dari luasan awal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada saat penandatanganan KK tahun 1968 seluas 6,6 juta hektar di bagian timur dan tenggara Sulawesi akibat serangkaian pelepasan areal KK.

PT Vale has a proud history in Indonesia. It all begins with exploration in the eastern part of Sulawesi in the 1920s. Exploration activities, research, and development, continued in the period of independence and under the leadership of President Sukarno.

PT Vale (which then was called PT International Nickel Indonesia) was established in July 1968. Later that year PT Vale and the Indonesian government signed the Contract of Work (CoW), as licensed by the Government of Indonesia for the exploration, mining and processing of nickel ore.

Moving forward, PT Vale recently started the construction of the smelter in Sorowako, East Luwu District, South Sulawesi.

Through the Amendment and Extension Agreement signed in January 1996, the CoW has been amended and extended with period of validity until December 28, 2025.

In October 2014, PT Vale and the Indonesian Government reached an agreement after renegotiation the CoW, altering some provisions including the designation of the CoW area to 118,435 hectares.

This means the CoW area has been reduced to 1.8% of the initial area provided by the Indonesian Government at the time of CoW signing in 1968 covering 6.6 million hectares in the east and southeast Sulawesi due to series of releases of CoW area.



Tim survei eksplorasi
Exploration survey team



Pabrik peleburan PT Vale di dekat Soroako, Sulawesi Selatan. Sejak awal berdirinya PT Vale tidak pernah mengekspor bijih tanpa pengolahan
PT Vale's smelter near Soroako, South Sulawesi. Since its inception, PT Vale has not exported unprocessed ore

Jejak Langkah

Milestones

1968

Persetujuan Anggaran Dasar pembentukan PT International Nickel Indonesia (PT Inco) dimana 61% sahamnya dimiliki Inco Limited. Penandatanganan Kontrak Karya antara PT Inco dan Pemerintah Indonesia untuk konsesi berjangka 30 tahun sejak dimulainya produksi komersial.

The Articles of Association approved the establishment of PT International Nickel Indonesia (PT Inco), with 61% of the Company's shares owned by Inco Limited. The CoW is signed between PT Inco and the Indonesian government for a 30-year period from the start of first commercial production.

1970

Sebanyak 50 ton sampel pertama dari bijih Sulawesi dikirim ke fasilitas penelitian Inco di Port Colborne, Ontario, Kanada. Percobaan di fasilitas peleburan reduksi baru menunjukkan bahwa bahan dari Sorowako bisa diolah.

The first bulk sample of Sulawesi ore amounting to 50 tonnes is delivered to Inco's research facilities in Port Colborne, Ontario, Canada. A new reduction smelting plant demonstrates that the Sorowako material can be successfully processed.

1973

Pembangunan fasilitas pengolahan pyrometalurgi satu-lini di Sorowako.

Construction of a single pyrometallurgical processing line in Sorowako.

1974

Keputusan untuk mengganti sumber energi dari bahan bakar fosil menjadi pembangkitan listrik tenaga air. Kapasitas fasilitas peleburan ditingkatkan tiga kali lipat untuk mengurangi biaya per unit serta mengimbangi kapasitas pembangkit listrik tenaga air.

The decision is made to shift from fossil fuels to hydroelectric power generation. The smelter is enlarged to three times its original size to reduce unit cost and match the capacity of the hydroelectric plant.

1976

Sekitar 10.000 tenaga kerja Indonesia dan 1.000 pekerja asing dikerahkan untuk membangun fasilitas pengolahan nikel dan pembangkit listrik tenaga air bersama dengan jalan, fasilitas di kota, fasilitas pelabuhan, bandar udara dan infrastruktur lain yang diperlukan.

Around 10,000 Indonesians and 1,000 expatriates are employed to build the nickel processing facility and the power generating plant, as well as roads, town facilities, port facilities, airports and other required infrastructure.

1977

Presiden Soeharto berkunjung ke Sorowako dan meresmikan fasilitas penambangan dan pengolahan nikel.

President Soeharto visits Sorowako and officially launches the nickel mining and processing facilities.



1978

PT Inco memulai produksi komersial.

PT Inco initiates commercial production.

1999

Proyek Perluasan Lini Produksi Keempat, termasuk area Balambano, dengan kapasitas 93 megawatts (MW).

Fourth Line Expansion Project includes the Balambano area with capacity of 93 megawatts (MW).



1988

Produksi meningkat dari 36.000 ton menjadi 45.300 ton per tahun.

Production expands from 36,000 tonnes to 45,300 tonnes annually.

2000

Produksi meningkat 30% menjadi 59.000 ton nikel dalam matte.

Production is increased by 30% to 59,000 tonnes of nickel in matte.

1990

Inco Limited menjual 20% kepemilikan sahamnya di PT Inco kepada publik dan dicatatkan di bursa saham Indonesia. Inco Limited masih memegang 58,19% saham PT Inco.

Inco Limited sells to the public 20% of its shares in PT Inco, which is listed on the Indonesian Stock Exchange. Inco Limited continues to own 58.19% of PT Inco's shares.

2003

Pengembangan areal tambang PT Inco yang baru di Petea (sebelah timur Danau Matano, bersebelahan dengan areal East Block).

A new mining area in Petea is developed (east of Lake Matano, adjacent to PT Inco's East Block).

1996

Penandatanganan perubahan dan perpanjangan Kontrak Karya untuk periode 30 tahun, yaitu hingga 2025.

The CoW is modified to encompass another 30-year period, to 2025.

Jejak Langkah

Milestones

2007

Perseroan mencatat rekor produksi tahunan tertinggi sebesar 76.748 ton nikel matte.

The Company records the highest annual production volume of 76,748 tonnes of nickel in matte.

2011

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karebbe diresmikan dan mulai beroperasi. PLTA senilai AS\$410 juta ini mampu menghasilkan rata-rata 90 MW listrik dan menambah total kapasitas pembangkit listrik tenaga air menjadi rata-rata 365 MW, sehingga memberikan peluang strategis untuk peningkatan volume produksi.

Pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT International Nickel Indonesia Tbk menjadi PT Vale Indonesia Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 27 September 2011. Dimana selanjutnya PT Vale mendapatkan persetujuan dari masing-masing Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun yang sama. Perubahan nama ini sejalan dengan evolusi Perseroan untuk lebih selaras dengan kegiatan Vale lainnya yang telah beroperasi di seluruh dunia. Hal ini sekaligus mencerminkan posisi Vale sebagai bagian dari perusahaan penambangan terbesar kedua di dunia.

The Karebbe Hydroelectric Power Generating Plant (HEPP) is inaugurated and fully commissioned. The HEPP is valued at US\$410 million and will generate 90 MW of electric power and produce total hydro generation capacity to 365 MW, providing opportunity to increase production volume.

The shareholders approved the change of Company's name from PT International Nickel Indonesia Tbk to PT Vale Indonesia Tbk through the General Meeting of Shareholders on September 27, 2011. Subsequently in the same year, PT Vale obtains approval of the name change from the respective Minister of Law and Human Rights, Ministry of Energy and Natural Resources, and Investment Coordinating Board. This name change is in line with the Company's evolution to be aligned with other Vale operations worldwide, thus reflecting its position as part of the world's second-largest mining company.



2012

PT Vale mencatat rekor produksi triwulanan tertinggi sepanjang sejarahnya pada triwulan IV 2012 sebesar 21.306 ton nikel dalam matte.

PT Vale records an all-time-high quarterly production in the fourth quarter of the year – a record of 21,306 tonnes of nickel in matte.

2013

PT Vale telah memasuki tahap pertama Proyek Konversi Batu bara, yaitu mengganti HSFO dengan batu bara serbuk untuk dimasukkan ke dalam tanur pengering. Selain karena batu bara lebih hemat, batu bara juga merupakan sumber daya lokal, sehingga penggunaannya dapat lebih meningkatkan kontribusi PT Vale bagi perekonomian Indonesia.

PT Vale implements the first phase of the Coal Conversion Project, replacing HSFO with pulverized coal to be inserted in the dryer. Besides being more cost-efficient, coal is also a locally sourced resource that further enhances the contribution of PT Vale to the Indonesian economy.

2014

PT Vale dan Pemerintah Indonesia menandatangani amendemen Kontrak Karya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

PT Vale kembali mencatat rekor produksi tahunan tertinggi sebesar 78.726 ton nikel dalam matte.

PT Vale and the Government of Indonesia sign an amendment of the CoW in accordance with the mandate of Law No. 4 of 2009.

PT Vale records the highest ever production of 78,726 tonnes of nickel in matte per annum.

2015

PT Vale kembali mencatat rekor produksi tahunan tertinggi sebesar 81.177 ton nikel dalam matte.

PT Vale records the highest ever production of 81,177 tonnes of nickel in matte per annum.

Bidang Usaha

Line of Business

PT Vale mengoperasikan salah satu operasi tambang dan pengolahan nikel laterit terpadu terbesar di dunia yang berlokasi di dekat Sorowako di Pulau Sulawesi, Indonesia.

PT Vale operates one of the world's largest integrated mining operations with the processing of nickel laterite, located near Sorowako on the island of Sulawesi, Indonesia.

Operasi bisnis kami terdiri dari penambangan dan pengolahan bijih nikel menjadi produk nikel dalam matte yang semuanya dijual berdasarkan perjanjian penjualan jangka panjang dengan Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM). Perjanjian penjualan tersebut mengatur bahwa 80% dari produksi tahunan kami dibeli oleh VCL dan 20% lainnya oleh SMM berdasarkan formula harga *London Metal Exchange* dan seluruhnya dikapalkan ke Jepang.

Didorong oleh keanekaragaman mutu bijih dalam wilayah konsesi kami, perencanaan, pengujian, dan pencampuran sumber daya bijih yang seksama tentu diperlukan untuk memastikan dan mempertahankan pasokan yang konsisten bagi pabrik pengolahan. Bijih dari tambang melalui berbagai proses penyaringan dan menjadi produk yang kami sebut *screening station product* (SSP - produk stasiun penyaringan), yang mengandung nikel, besi magnesia, mineral-mineral silika, kerikil dan sejumlah kecil kobalts. Di pabrik pengolahan, SSP ini dimasukkan melalui sebuah tromol yang secara mekanis membuang sebagian material, untuk kemudian dipanaskan dengan proses kalsinasi dan dilebur sehingga diperoleh produk nikel dalam matte yang mengandung sekitar 78% nikel dan 20% sulfur.

Our business operations consist of mining and processing of nickel ore into nickel in matte product, which is sold under a long-term sales agreement with Vale Canada Limited (VCL) and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM). The sales agreement stipulates that 80% of our annual production is purchased by VCL and 20% by SMM based on a London Metal Exchange price formula and entirely shipped to Japan.

Driven by the diversity of ore quality within our concession area, planning, testing, and blending ore resources is required to ensure and maintain a consistent supply for processing plant. Ore from the mine after the screening process is called screening station product (SSP), and it contains nickel, iron magnesia, silica minerals, gravel and small amount of cobalt. At the processing plant, SSP is fed through drums to mechanically remove most material, and then heated in a calcination process and finally merged in order to obtain nickel in matte of about 78% nickel and 20% sulphur.

Fasilitas

Facilities

Pabrik pengolahan kami di Sorowako memiliki tiga tungku pengering, lima tanur pereduksi berbahan bakar minyak, empat tanur listrik, dan tiga converter Pierce-Smith. Kami telah membangun dan memelihara infrastruktur pendukung yang mencakup fasilitas pelabuhan dan jalan untuk mengangkut dan mengapalkan produk akhir kami serta terminal bahan bakar minyak di Mangkasa Point yang didukung dengan pompa bahan bakar minyak bertekanan tinggi dan dihubungkan dengan pipa-pipa 12-inci ke tangki penyimpanan bahan bakar minyak di wilayah pabrik kami.

Kami telah membangun dan memelihara kota modern dengan fasilitas yang lengkap mencakup rumah sakit, sekolah dari TK sampai SLTA, fasilitas perbankan, kantor pos, kantor polisi, layanan transportasi bis, pasar swalayan dan pusat perbelanjaan, pasar, masjid, gereja, bandara, dan fasilitas olah raga dan rekreasi. Kota ini juga dilengkapi dengan sistem air minum dan pembuangan air kotor.

Kami juga memiliki dan mengoperasikan tiga fasilitas pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas rata-rata 365 megawatt (MW). Selain itu, kami juga memiliki fasilitas pembangkit listrik termal yang terdiri dari lima unit generator diesel Mirrless Blackstone 6 MW, 23 unit generator diesel Caterpillar 1 MW, dan satu unit generator turbin uap 24 MW di Sorowako. Saat ini kami lebih banyak menggunakan energi dari PLTA dan lebih selektif menggunakan pembangkit listrik bertenaga BBM. Dengan demikian dapat mengurangi biaya energi kami secara keseluruhan.

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air yang dimiliki oleh PT Vale dibangun dan dioperasikan sesuai dengan keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975. Keputusan ini mencakup kapasitas pembangkit listrik Larona, Balambano dan Karebbe.

Our processing plant in Sorowako has three furnace dryers, five oil-fired reduction kilns, four electric furnaces and three Pierce-Smith converters. We have built and maintain the support infrastructure that includes port facilities and roads to transport and ship our final products, as well as fuel terminals in Mangkasa Point, which are equipped with high-pressure fuel pumps and connected with 12-inch pipes to fuel storage tanks in the refining area.

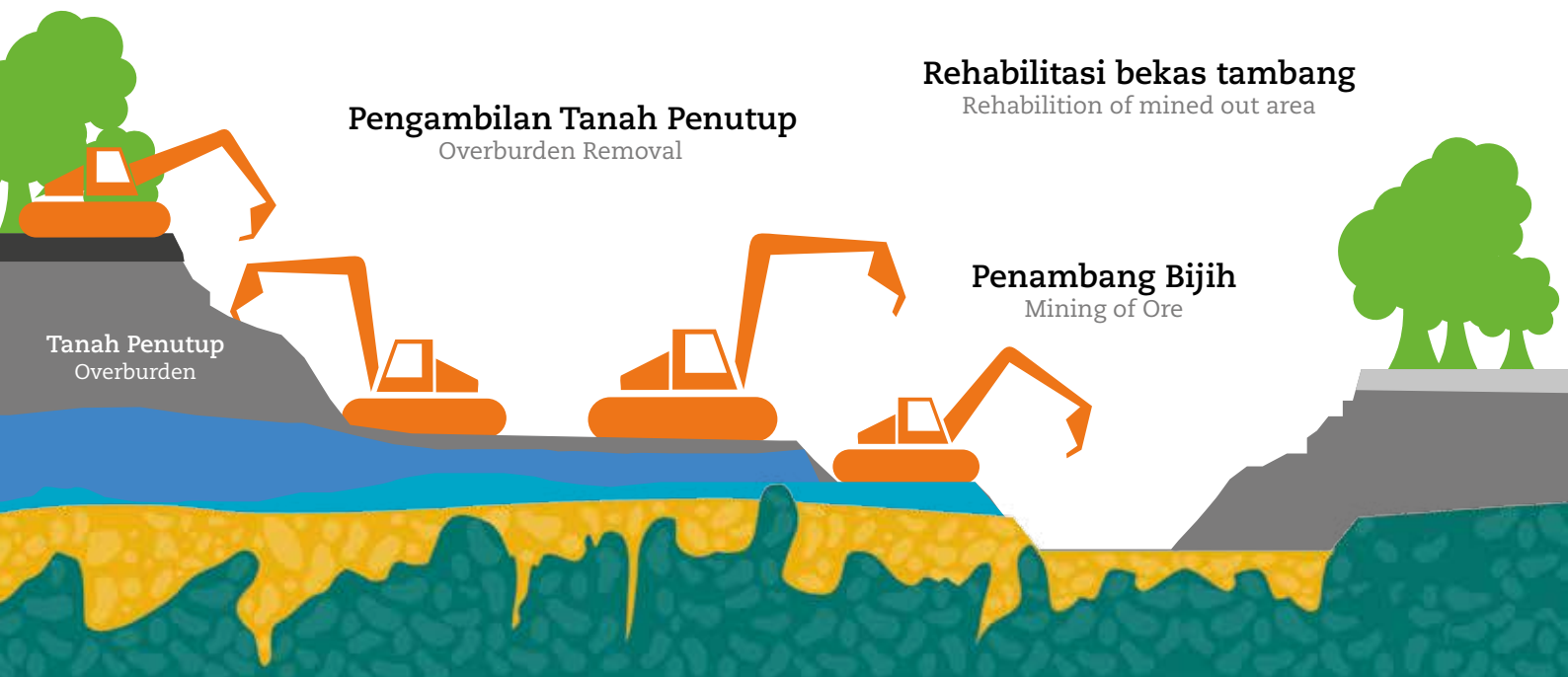
We also have built and maintain a modern city with full facilities including hospitals, schools from kindergarten to high school, banking facilities, post office, police station, bus service, other transportation, supermarkets and shopping centers, markets, mosques, churches, airport, and sport and recreation facilities. The city is also equipped with a water and sewerage system.

We also own and operate three hydroelectric power-generating facilities with an average total capacity of 365 megawatts (MW). In addition, Vale also has additional power generating units consisting of five Mirrless Blackstone 6 MW diesel generators, 23 Caterpillar 1 MW diesel generators, and one 24 MW steam turbine generator at Sorowako. Currently, we use more energy from hydropower and are more selective with use of fuel-powered electricity generation. Thus, we can reduce our overall energy costs.


The hydroelectric generating facility owned by PT Vale was constructed and operates in accordance with decision of the Government of Indonesia in 1975. This decision covers power generation capacity at Larona, Balambano and Karebbe.

Proses Penambangan

Mine Process



 **Batuan Dasar**
Bedrock / Bluezone

 **Bijih Saprolit**
Saprolite Ore

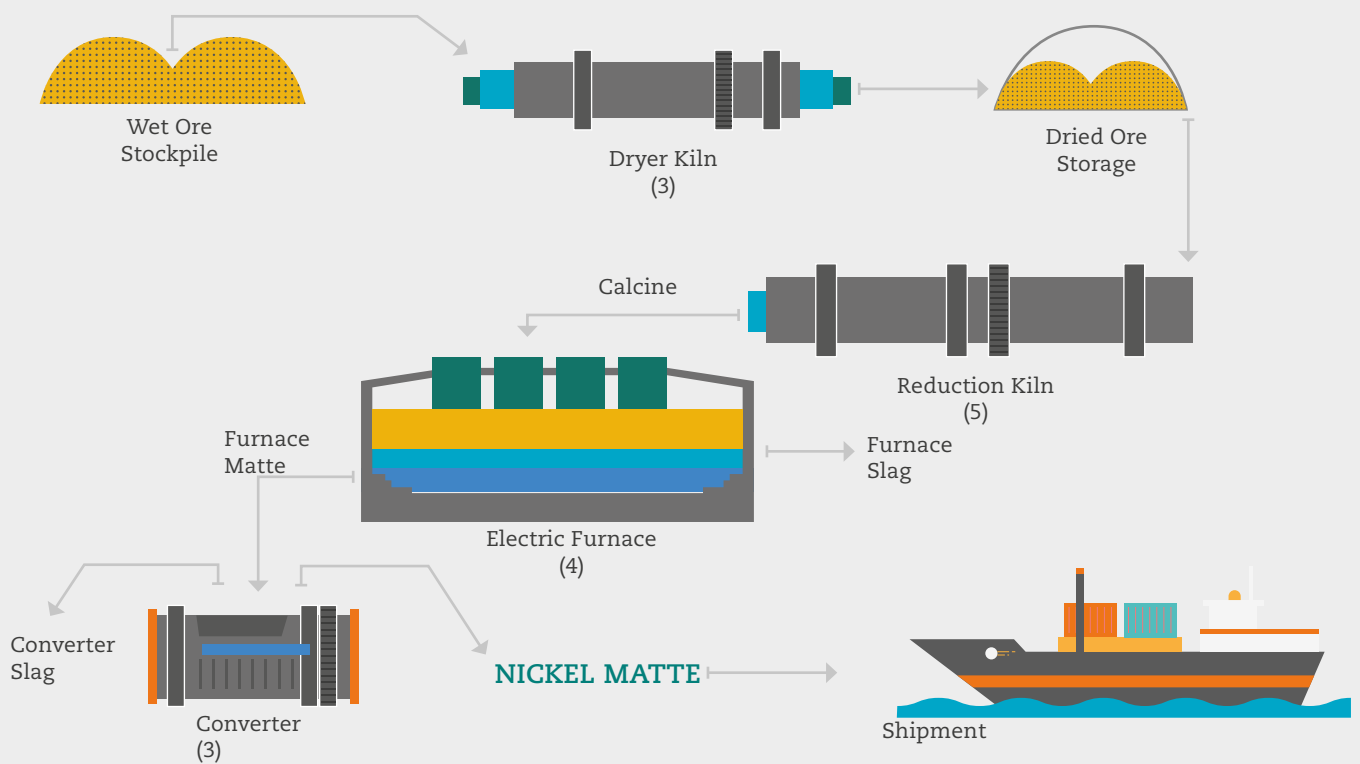
 **Transisi**
Transition

 **Bijih Limonit**
Limonite Ore

 **Tanah Penutup**
Overburden

Dari Bijih menjadi Nikel dalam Matte

From Ore to Nickel in Matte



Area Usaha

Business Area

Berikut adalah luasan wilayah Kontrak Karya PT Vale setelah kesepakatan renegotiasi di Oktober 2014:

The following is the area of PT Vale CoW after renegotiation agreement in October 2014:

Propinsi	Wilayah KK CoW area	Hektar Hectare (ha)	Province
Sulawesi Tengah	Bahodopi	22,699	Central Sulawesi
Sulawesi Selatan	Sorowako	70,984	South Sulawesi
Sulawesi Tenggara	Pomalaa Suasua	20,286 4,466	Southeast Sulawesi
Jumlah		118,435	Total



Cadangan Mineral

Mineral Reserves

Tabel dan catatan berikut memperlihatkan perhitungan Cadangan Mineral yang Terbukti dan Terkira terkait data per 31 Desember 2015 dan 2014.

The following table and notes show estimates of Proven and Probable Mineral Reserves related to data as of December 31, 2015 and 2014.

	Per 31 Desember 2015 As of December 31, 2015		Per 31 Desember 2014 As of December 31, 2014	
	Mt (DKP)	% grade	Mt (DKP)	% grade
Cadangan Mineral (dalam jutaan ton) Mineral Reserves (in million tonnes)				
Terbukti Proven	96.9	1.80	108.0	1.80
Terkira Probable	22.3	1.73	17.4	1.75
Total Terbukti dan Terkira Total Proven and Probable	119.3	1.78	125.4	1.79

CATATAN:

- (1) Keterbukaan informasi mengenai sumber daya mineral dan cadangan mineral merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Vale Base Metal menggunakan Instrumen Nasional 43-101 (NI 43-101) sebagai standar untuk perhitungan dan pelaporan sumber daya mineral dan cadangan mineral. NI 43-101 ini memenuhi peraturan SEC serta diterima secara internasional oleh pasar dan lembaga keuangan lain di luar Amerika Serikat. NI 43-101 berdasarkan Definisi Standar dari *Canadian Institute of Mining* (CIM) mengklasifikasikan sumber daya mineral dan cadangan mineral ke dalam beberapa kategori.

PT Vale sebagai salah satu unit bisnis dari Vale Base Metal harus mematuhi standar peraturan CIM dalam pelaporan sumber daya mineral dan cadangan mineralnya.

Di dalam Panduan Industri SEC No. 7 cadangan mineral didefinisikan sebagai bagian dari endapan mineral yang secara ekonomis dan secara hukum dapat ditambang atau diproduksi pada saat penentuan cadangan ditetapkan. SEC menyatakan bahwa suatu endapan mineral tidak bisa dinyatakan "ekonomis dan secara hukum dapat ditambang" tanpa didukung oleh studi kelayakan akhir.

- (2) Perseroan, sesuai ketentuan NI 43-101 dan Panduan Industri SEC No. 7, mengklasifikasikan cadangan menjadi dua kategori di dalam keterbukaan publik, yaitu cadangan mineral terbukti dan cadangan mineral terkira.

CIM mendefinisikan cadangan mineral terkira sebagai bagian dari sumber daya mineral terunjuk yang diperkirakan dapat ditambang secara ekonomis berdasarkan studi pra kelayakan. Studi ini harus mencakup informasi yang memadai mengenai faktor-faktor

NOTES:

- (1) Disclosure of mineral resources and mineral reserves comply with all applicable laws and regulations of the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Vale Base Metals adopted National Instrument 43-101 (NI 43-101) as its standard for estimating and reporting mineral resources and mineral reserves. NI 43-101 satisfies SEC rules and is internationally accepted by markets and financial institutions in other jurisdictions. NI 43-101, in accordance with Canadian Institute of Mining (CIM) Definition Standards, provides the classification of mineral resources and mineral reserves estimates into various categories.

PT Vale, as a business unit of Vale Base Metals, must be consistent in its use of CIM standards to report its mineral resources and mineral reserves.

In SEC Industry Guide 7, a mineral reserve is defined as part of a mineral deposit which could be economically and legally extracted or produced at the time of the reserve determination. The SEC indicated that a deposit cannot be designated as "economically and legally extracted" unless supported by a final feasibility study.

- (2) The Company, in accordance with NI 43-101 and SEC Industry Guide 7 rules, recognizes two mineral reserves categories in its public disclosure: proven mineral reserves and probable mineral reserves.

CIM defines "probable" mineral reserve as the economically mineable part of an indicated resource demonstrated by at least a preliminary feasibility study. This study must include adequate information on mining, processing, metallurgical,

penambangan, pengolahan, metalurgi, ekonomi dan faktor-faktor terkait lainnya yang menunjukkan, pada saat pelaporan, bahwa penambangan dapat dibenarkan secara ekonomi.

Cadangan mineral terbukti adalah bagian yang dapat ditambang secara ekonomis dari sumber daya mineral terukur yang dinyatakan setidaknya oleh studi pra kelayakan. Studi ini harus mencakup informasi yang memadai mengenai faktor-faktor penambangan, pengolahan, metalurgi, ekonomi dan faktor-faktor lainnya yang pada saat pelaporan, penambangan dapat dibenarkan secara ekonomi.

Vale Base Metal memiliki sistem pertanggungjawaban berlapis untuk mendokumentasikan informasi pendukung dalam perhitungan sumberdaya mineral dan cadangan mineral. Perhitungan sumber daya mineral dan cadangan mineral disiapkan dan disertifikasi oleh *Operational Responsible Person* (RPs) dan selanjutnya dikaji dan disertifikasi oleh Vale Base Metal Corporate Qualified Persons (QPs).

Berdasarkan pedoman dari Vale Base Metal, pernyataan mengenai cadangan mineral harus didukung oleh sekurang-kurangnya:

- Rencana penambangan dan Laporan Teknis tahunan atau pernyataan teknis dan data pendukung untuk mineral yang ditambang dari infrastruktur tambang yang ada (biasanya didanai oleh biaya operasi atau modal jangka panjang);
- Studi Kelayakan Pendahuluan (atau setara) untuk mineralisasi baru di daerah *brownfields* yang terbentuk di luar tetapi masih di dalam akses yang wajar dan menggunakan infrastruktur yang ada (konstruksi biasanya didanai dengan menggunakan modal proyek khusus), dan
- Studi Kelayakan (atau setara) untuk mineralisasi baru di daerah *greenfields* yang memerlukan infrastruktur tambahan baru yang juga mencakup pembangunan fasilitas pengolahan mineral yang baru.

(3) Evaluasi keuangan dilakukan untuk mengevaluasi nilai ekonomi cadangan mineral. Evaluasi keuangan ini memperhitungkan seluruh biaya produksi, biaya penjualan dan biaya modal. Informasi mengenai perkiraan harga nikel, kurs mata uang asing dan tingkat diskon diberikan oleh Vale S.A.

(4) Perhitungan cadangan mineral dan sumber daya mineral untuk Kegiatan Sorowako Operation (SO) yang meliputi Sorowako Project Area (SPA), Sorowako Outer Area (SOA) dan Bahodopi Mining Block 1.

economic, and other relevant factors that demonstrate, at the time of reporting, that economic extraction can be justified.

“Proven” mineral reserve is the economically mineable part of a measured mineral resource demonstrated by at least a preliminary feasibility study. This study must include adequate information on mining, processing, metallurgical, economic, and other relevant factors that demonstrate, at the time of reporting, that economic extraction is justified.

Vale Base Metals establishes a layered responsibility system for documenting the information supporting the mineral resources and mineral reserves estimates. Mineral resources and mineral reserves estimates are prepared and certified by Operational Responsible Persons (RPs) and are subsequently reviewed and certified by the Vale Base Metals Corporate Qualified Persons (QPs).

Based on Vale Base Metals Guidelines, mineral reserves declaration must be supported by at least:

- A mine plan and an annual Technical Report or technical statement and supporting files for mineralization that is to be exploited from existing mine infrastructure (typically funded with operating costs or sustaining capital);
- A Preliminary Feasibility Study (or equivalent) for new brownfields area mineralization occurring beyond but within reasonable access of and using existing infrastructure (construction typically funded using dedicated project capital); and
- A Feasibility Study (or equivalent) for new mineralization in a greenfields area that requires additional new standalone infrastructure which may also include the construction of new mineral processing facilities.

(3) Financial evaluation is performed to evaluate mineral reserve economic value. All costs, including production, sales and capital costs, are considered in the financial evaluation. Forecast of nickel price, foreign exchange rate and discount rate is provided by Vale S.A.

(4) These estimates of mineral reserves and mineral resources for the Company’s Sorowako Operation (SO) which includes Sorowako Project Area (SPA), Sorowako Outer Area (SOA) and Bahodopi Mining Block 1.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Kami

Our Vision, Mission and Values

Visi Vision

Menjadi perusahaan sumber daya alam nomor satu di Indonesia yang menggunakan standar global dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam.

To be Indonesia's number one natural resources company in creating long-term value, through excellence and passion for people and the planet, according to global standards.



Misi Mission

Mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan.

To transform natural resources into prosperity and sustainable development.





Nilai-Nilai Our Values

Dewan Komisaris dan Direksi PT Vale telah menyetujui nilai-nilai Perseroan sebagai berikut:
The Board of Commissioners and Board of Directors have approved the following Company values:

Kehidupan adalah hal yang terpenting Life matters most	Keselamatan jiwa lebih penting daripada keuntungan materi semata.	Life is more important than results and material goods.
Menghargai karyawan Value our people	Membimbing dan membuka peluang bagi perkembangan individu, memberikan penghargaan terhadap prestasi seseorang tanpa memandang latar belakang mereka, mendukung keberagaman dan mengakui aspirasi serta kebutuhan individu.	Nurture and enable personal growth, reward accomplishments regardless of individual background, promote diversity, and recognize individual aspirations and needs.
Menjaga kelestarian bumi Prize our planet	Komitmen terhadap pengembangan masyarakat, lingkungan dan ekonomi dalam berbagai keputusan bisnis.	Commitment to social, environmental and economic development in business decisions.
Melakukan hal yang benar Do what is right	Mendukung kepercayaan yang didasarkan pada komunikasi yang terbuka dan jelas, bertindak adil, penuh integritas dan tunduk terhadap aturan hukum.	Promote trust-based, open and dear communication, acting fairly, with integrity and in compliance with the law.
Bersama-sama menjadi lebih baik Improve together	Berjuang untuk terjalannya kerja sama, peningkatan dan inovasi yang terus-menerus, penegakan disiplin kerja untuk meningkatkan nilai-nilai jangka panjang.	Strive for collaboration, continuous improvement, innovation and discipline in the way we work to generate long-term value.
Mewujudkan tujuan Make it happen	Suka tantangan, kemampuan beradaptasi, bangga atas prestasi dan apa yang telah dilakukan dalam membentuk dunia.	Thrill for challenges, ability to adapt, pride in results and shaping the world

Peristiwa Penting 2015

2015 Event Highlights

Januari / January

PT Vale serahkan 6 paket CSR di Kolaka

PT Vale mengalokasikan dana CSR 2014 untuk mendukung pengembangan visi kawasan tanaman pangan. Wilayah yang ditargetkan menjadi lumbung padi dan kedelai di Kolaka adalah Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada. Potensi area persawahan di Lamedai mencapai 1.500 hektar, meskipun hingga kini baru sekitar 700 hektar sawah produktif yang digarap oleh petani.

PT Vale handed over CSR programs in Kolaka

PT Vale allocated CSR funding in 2014 to support the regency's vision to be a major food crops region. The area that is targeted for rice and soybeans fields in Kolaka is Lamedai Village of Tanggetada District, which covers an area of 1,500 hectares. Half of the area, about 700 hectares, has been actively cultivated by the local farmers.



ATS gelar seminar dan lokakarya mutu perguruan tinggi

Akademi Teknik Sorowako (ATS) menggelar seminar nasional bertema "Pengelolaan Perguruan Tinggi yang Bermutu Menuju ASEAN Economic Community" dan lokakarya "Penyusunan Format Akreditasi Perguruan Tinggi" menjawab berlakunya ASEAN Economic Community atau *freedom of movement for skilled and talented labors* pada tahun ini untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan dan pengelolaan lembaganya. Kegiatan ini diikuti pimpinan dan perwakilan 30 perguruan tinggi swasta se-Sulawesi Selatan (anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia).

ATS holds a seminar and workshop on quality higher education

The Academy of Engineering Sorowako (ATS) held a national seminar entitled "Management of Quality Higher Education Towards the ASEAN Economic Community" and a workshop on "Preparation of Higher Education Accreditation Forms" in response to the application of ASEAN Economic Community or Freedom of Movement for Skilled and Talented Labor to improve the quality standards of education and management of the institution. This event was attended by managers of 30 private colleges and universities throughout South Sulawesi (member of the Association of Indonesian Private University or Aptisi).



Februari / February

Peneliti internasional teliti Danau Towuti

PT Vale bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memberikan dukungan kepada Brown University Amerika Serikat, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) mencanangkan penelitian "The Towuti Drilling Project". Penelitian selama dua bulan tersebut merupakan bentuk kolaborasi ilmiah internasional yang melibatkan lebih dari 40 ilmuwan dari 8 negara untuk merekonstruksi perubahan iklim tropis jangka panjang di Pasifik barat dalam rangka memahami evolusi iklim tropis Pasifik, ekosistem, dan geologi Danau Towuti, di Kabupaten Luwu Timur.

International researchers study Towuti Lake

PT Vale and East Luwu Regency Government are supporting Brown University USA and the Institute of Technology Bandung (ITB) in conducting a two-month study of "The Towuti Drilling Project", a collaboration of more than 40 international scientists from 8 countries to reconstruct climate change in the long-term tropical western Pacific in order to better understand the evolution of the tropical Pacific climate, ecosystems, and the geology of Towuti Lake, in East Luwu Regency.



PT Vale terima penghargaan khusus SBA 2015

PT Vale meraih Penghargaan Khusus (*Special Recognition Awards*) dalam penganugerahan Sustainable Business Award yang diadakan 25 Februari 2015 lalu di Jakarta. Dalam keikutsertaannya yang ke-empat, PT Vale mendapat predikat *Outstanding Energy Management in the Mining Sector*. Terutama karena penggunaan sumber energi terbarukan dalam 90% operasinya.

PT Vale won a special recognition award in SBA 2015

PT Vale won a Special Recognition Award in the conferring of the Sustainable Business Awards held last February 25, 2015 in Jakarta. In its fourth participation, PT Vale received the title for Outstanding Energy Management in the Mining Sector, mainly for utilization of renewable energy resources in 90% of the Company's operations.



Peristiwa Penting 2015

Event Highlights 2015

Maret / March

PT Vale implementasikan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SKMP)

Mendukung Peraturan Menteri ESDM No.38 Tahun 2014 tentang keselamatan kerja PT Vale mengadakan acara sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), dihadiri manajemen PT Vale, para pimpinan perusahaan kontraktor, dan perwakilan kantor ESDM tingkat kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui sosialisasi ini keselamatan kerja diupayakan menjadi budaya kerja para pelaku industri pertambangan.

PT Vale implements SMKP

Supporting the Minister of Energy and Mineral Resources Decision No.38 of 2014 on Mining Safety Management System (SMKP), PT Vale held a socialization of SMKP that was attended by PT Vale's management, members of management of contracting companies and representatives of local and provincial offices of the Departments of Energy and Mineral Resources. A safety culture was reinforced during this event.



PT Vale dan KPP Pratama Palopo sosialisasikan mekanisme perpajakan baru

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo, bekerja sama dengan PT Vale, mengadakan sosialisasi perpajakan kepada rekanan PT Vale terkait isi Amandemen Kontrak Karya PT Vale yang ditandatangani pada 17 Oktober 2014, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menyatakan bahwa status PT Vale sebagai pemungut PPN akan berakhir pada 31 Maret 2015. Sosialisasi tersebut diikuti ratusan perwakilan kontraktor rekanan PT Vale dalam pengadaan barang dan jasa.

PT Vale and Palopo Tax Office socialized new taxation policies

Pratama Palopo Tax Office in cooperation with PT Vale held a socialization on taxation with PT Vale's partners following the revision in the Amendment of PT Vale's Contract of Work, signed on October 17, 2014, specifically on collection of Value Added Tax (VAT), which details expiration of PT Vale's role as VAT collector on March 31, 2015. The event was attended by hundreds of representatives of PT Vale's suppliers of goods and services.



April

Procurement PT Vale sosialisasikan aplikasi Contractor Man Power Usage

Procurement Support - PCW PT Vale meluncurkan aplikasi sistem informasi *Contractor Man Power (CMP)*, aplikasi CMP ini dikembangkan untuk memfasilitasi kontraktor dalam proses pelaporan penggunaan tenaga kerja mingguan secara lebih efisien dan akurat. Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini, dilakukan sosialisasi yang diikuti 100-an perwakilan kontraktor lokal dan nasional yang bekerja di PT Vale.

PT Vale Procurement socialized Contractor Man Power Usage application

PT Vale's Procurement Support - PCW launched an information system application called Contractor Man Power (CMP). CMP was developed to facilitate contractors in the process of reporting weekly man power usage in a more efficient and accurate way. In order to optimize the use of this application, socialization was held followed by more than one hundred representatives of PT Vale's local and national contractors.



PT Vale memulai pelatihan anti korupsi

PT Vale menggelar Pelatihan Kepatuhan Anti Korupsi (*Anti-Corruption Compliance Training*) oleh Vale Rio de Janeiro bagi eksekutif dan kepala departemen di PT Vale, pelatihan ini dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan perusahaan terkait gratifikasi, upaya-upaya anti korupsi, transparansi, dan pemberian fasilitas bagi para pemangku kepentingan perusahaan.

Materi yang disampaikan antara lain *overview* program anti korupsi Vale global, risiko-risiko yang dihadapi bisnis Vale, tindakan terhadap penyuapan, undang-undang anti korupsi yang relevan dengan Vale dan PT Vale, topik mengenai donasi, investasi, dan *sponsorship*. Dalam pelatihan tersebut juga diberikan presentasi tentang PT Vale Anti-Corruption Policy Manual dan PT Vale Whistleblower System.

PT Vale started anti-corruption compliance program

PT Vale held Anti-Corruption Compliance Training by Vale Rio de Janeiro trainers for executives and heads of departments for promoting policies related to gratuities, anti-corruption efforts, transparency and provision of facilities for the company's.

The training covered the topics on Global Vale Anti-Corruption Compliance Program, risks facing by Vale's business, zero tolerance for bribery, anti-corruption laws relevant to Vale and PT Vale, donations, community investment and sponsorships. In addition, the training on PT Vale's Anti-Corruption Policy Manual and the company's Whistleblower System were also presented.



Peristiwa Penting 2015

Event Highlights 2015

April

PT Vale salah satu peserta terbaik pada Indogreen Forestry Expo ke-7

PT Vale menerima penghargaan sebagai salah satu peserta pameran terbaik dalam *event* Indogreen Forestry Expo (IFE) di Jakarta. Berfokus pada tema "Gotong Royong Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Energi Terbarukan", *event* yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ditujukan untuk mempromosikan pemanfaatan hutan secara bijak, penurunan deforestasi, pemanfaatan CSR, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

PT Vale one of the best exhibitors at the 7th Indogreen Forestry Expo

PT Vale received an award as one of the best exhibitors at the Indogreen Forestry Expo (IFE) event held in Jakarta. Focusing on the theme "Mutual Cooperation to Achieve Food Sovereignty and Renewable Energy", the event that was initiated by the Ministry of Environment and Forestry is intended to promote the best practice of forest management, decreasing deforestation, CSR implementation and the development of science and technology in forestry.



Mei / May

Kunjungan Gubernur Sulawesi Selatan ke PT Vale

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo beserta beberapa Anggota Komisi IX DPR RI, Muspida Kabupaten Luwu Timur, SKPD Luwu Timur, perwakilan Walikota Palopo, dan Wakil Bupati Luwu Utara berkunjung ke PT Vale Indonesia - Sorowako. Kunjungan Gubernur Sulawesi Selatan ini juga dalam rangka menghadiri HUT Luwu Timur ke 12.

The Governor of South Sulawesi visited PT Vale

South Sulawesi Governor Syahrul Yasin Limpo, along with members of Commission IX of the House of Representatives, East Luwu officials, representatives of Palopo Mayor and Deputy Regent of North Luwu Regent visited PT Vale Indonesia – Sorowako. In this trip, the Governor congratulated on the 12th anniversary of East Luwu.



Mei / May

PT Vale adakan program kesehatan gigi siswa SD di Mahalona

Sekitar 500 siswa dari delapan sekolah dasar Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, mendapat pemeriksaan kesehatan gigi di Posyandu Mahalona, 28-29 Mei 2015. Kegiatan ini bagian dari Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) yang diselenggarakan bersama PT Vale, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Universitas Hasanuddin dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Sulawesi Selatan.

PT Vale held dental examinations for elementary school students at Mahalona

Approximately 500 students from eight elementary schools in Mahalona Village, Towuti District participated in dental health examinations at Mahalona clinic last May 28-29, 2015. This event was part of the Integrated Community Development Program (PTPM), which was co-managed by PT Vale, East Luwu government, Hasanuddin University and Indonesian Dental Association of South Sulawesi branch.



PT Vale presentasikan AMDAL proyek HPAL Pomalaa

Akhir Mei silam, PT Vale menggelar presentasi AMDAL Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara kepada para pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah. Kegiatan digelar di Jakarta (26 Mei) dan Kolaka (28 Mei). Pada presentasi di Kolaka PT Vale diwakili oleh *Manager Project* Dani Widjaja, *Director Communications and External Affairs* Basrie Kamba, *Project Coordinator Environment & Regulatory* Karyanto, *Supervisor of Pomalaa Operation* Hasmir, *Coordinator Rehabilitation and Environment* Guntur Sambernyowo, *Operational Readiness & COW Technical Specialist* I Wayan G. T. Prenata, *MRMR Geologist* Arifin, dan tim konsultan dari Greenchip. Presentasi juga dihadiri pakar lingkungan, perwakilan masyarakat, dan LSM. Kegiatan juga disertai sesi dengar pendapat untuk menjadi masukan dalam dokumen revisi dan persetujuan AMDAL.

PT Vale presented the AMDAL for Pomalaa's HPAL project

At the end of May 2015, PT Vale held a presentation of Block Pomalaa's Environment Impact Analysis (AMDAL), Southeast Sulawesi to national and local government officials. The event took place on May 26 in Jakarta and May 28 in Kolaka. During the presentation in Kolaka, PT Vale was represented by Project Manager Dani Widjaja, Communications and External Affairs Director Basrie Kamba, Project Coordinator Environment & Regulatory Karyanto, Supervisor of Pomalaa Operation Hasmir, Coordinator Rehabilitation and Environment Guntur Sambernyowo, Operational Readiness & COW Technical Specialist I Wayan G. T. Prenata, MRMR Geologist Arifin and consultant team from Greenchip. The presentation was also attended by environmental experts, community representatives and NGOs. The event also followed with a comment session to gain input to revise and approve the AMDAL.

Peristiwa Penting 2015

Event Highlights 2015

Mei / May

Media Nasional Kunjungi Operasi Tambang PT Vale

Secara regular setiap tahun Tim Communications PT Vale mengundang media nasional untuk meliput berbagai kegiatan operasional PT Vale Indonesia Tbk. Selain sebagai salah satu upaya engagement dengan media, kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk memberi informasi ke publik terkait performa dan kegiatan PT Vale. Tahun 2015 ini, sekitar 15 media nasional (cetak, *online*, dan TV) berkunjung ke lokasi operasi PT Vale di Sorowako pada 26-28 Mei 2015. Awak media nasional yang berkunjung ke Sorowako mewakili The Jakarta Post, Harian Kompas, Koran Tempo, Koran Sindo, Kontan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Majalah Jakarta Globe, Majalah Tambang, Kantor Berita Antara, detik.com, Metro TV, TV One, Kompas TV, Berita Satu TV, dan Bloomberg TV. Pada kesempatan itu juga hadir media lokal yaitu dari Harian Ujungpandang Ekspres, Harian Rakyat Sulsel, dan luwuterkini.com.

National media visited PT Vale's mining operation

Every year, PT Vale's Communication Team invites the national media to cover various operational activities of PT Vale Indonesia Tbk. Besides being an effort to engage with the media, the visit was also intended to provide information for public related to information on PT Vale's performance and activities. This year, more than 15 national media (print, online, and TV) visited PT Vale's operations in Sorowako on May 26-28, 2015. National media crews who visited Sorowako represented The Jakarta Post, Kompas daily, Koran Tempo, Koran Sindo, Kontan daily, Bisnis Indonesia daily, Investor Daily, Jakarta Globe magazine, Majalah Tambang, Antara news agency, detik.com, Metro TV, TV One, Kompas TV, Berita Satu TV, and Bloomberg TV. The visit was also attended by local media crews from the Ujungpandang Ekspres daily, Harian Rakyat Sulsel, and luwuterkini.com.



Juni / June

PT Vale emiten terbaik bidang Pertambangan versi Majalah Bloomberg

Juni 2015, PT Vale menerima penghargaan dari Majalah Bloomberg. Majalah Bloomberg Businessweek Indonesia yang merupakan bagian dari Majalah Bloomberg Businessweek Internasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, memilih PT Vale Indonesia Tbk sebagai "Emiten Terbaik 2015" untuk sektor Pertambangan. Penilaian itu didasarkan atas kinerja PT Vale terutama yang berkenaan dengan laporan finansial dan pantauan terhadap saham PT Vale.

PT Vale received Best Listed Company in Mining category according to Bloomberg Magazine

PT Vale received an award from Bloomberg magazine on June 2015. Bloomberg Businessweek Indonesia magazine, which is part of Bloomberg Businessweek International based in New York, selected PT Vale Indonesia Tbk as "The Best Issuer 2015" for the Mining sector. The assessment was based on the company's performance in particularly with regards to its financial reporting and monitoring of its shares.



Juni / June

PT Vale terbaik II Kategori Mineral dalam RKAB Award 2014

PT Vale mendapat predikat Terbaik II Kategori Mineral dalam acara Malam Penganugerahan RKAB dan LAKIP Award 2014 yang diadakan oleh Ditjen Mineral dan Batubara, pada 5 Juni 2015 di Hotel Trans Bali. Posisi terbaik I dipegang PT Newmont Nusa Tenggara dan posisi terbaik III PT Kasongan Bumi Kencana. Mewakili PT Vale untuk menerima penghargaan ini adalah Basrie Kamba, Direktur Communications and External Affairs.

PT Vale the 2nd best in RKAB Award 2014

PT Vale was presented with the 2nd Best predicate in Mineral category during the awarding event of RKAB and LAKIP Award 2014, organized by the Directorate General of Mineral and Coal, on June 5, 2015, at the Hotel Trans Bali. The 1st place was obtained by PT Newmont Nusa Tenggara and the third by PT Kasongan Bumi Kencana. Representing PT Vale to accept this award was Basrie Kamba, Director of Communications and External Affairs.



Peristiwa Penting 2015

Event Highlights 2015

Agustus / August

Sosialisasi Pembinaan Pajak 2015

Sekarangnya 200 perwakilan kontraktor rekanan PT Vale mengikuti sosialisasi Tahun Pembinaan Pajak di gedung Ontaeluwu, Selasa 25 Agustus 2015. Selain sosialisasi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malili juga membuka Klinik Pajak hingga Kamis, 27 Agustus 2015. Sosialisasi terkait pencaangan 2015 sebagai Tahun Pembinaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pihak-pihak yang bisa merasakan manfaat dari program tersebut adalah orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP), WP yang belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta WP yang telah menyampaikan SPT tetapi belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Socialization of Tax Development Year 2015

At least 200 representatives of PT Vale's contractors attended the socialization of Tax Development Year at Ontaeluwu Hall, on Tuesday, August 25, 2015. In addition to socialization, the Pratama Palopo Tax Office (KPP) and the Office of Tax Counseling and Consultation Services (KP2KP) of Malili also opened a tax clinic until Thursday, August 27, 2015. The Directorate General of Taxation has proclaimed 2015 as the Year of Tax Development. The parties who could benefit from the program are individuals or entities that have not been registered as tax payers, taxpayers who had never reported their tax (submitting SPT) and taxpayers who report with irrelevant information.



Penganugerahan Penghargaan PMDM Award

Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), sebagai bagian dari Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) PT Vale, sudah mulai menampakkan hasil. Hal itu tidak lepas dari kontribusi para pelaku program, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat. Untuk itu, sebuah bentuk apresiasi digagas oleh Tim Koordinasi PTPM dalam bentuk PMDM Award yang digelar untuk pertama kali pada 2015. PMDM Award diberikan kepada pelaku program di empat wilayah terdampak operasi PT Vale. Ada 64 nominator yang masuk dalam delapan kategori PMDM Award. Penganugerahan PMDM Award dilaksanakan pada 22 Agustus 2015, bertepatan dengan peluncuran BP3K Model di Kecamatan Nuha, yang dihadiri Plt. Bupati Luwu Timur Irman Yasin Limpo, Muspida Luwu Timur, dan Presiden Direktur PT Vale Nico Kanter beserta jajaran Direksi. BP3K Model merupakan salah satu wujud kemitraan antara PT Vale dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam kerangka Program Pertanian Berkelanjutan.

Conferment of PMDM Award

As part of the Integrated Community Development Program (PTPM) of PT Vale, the Community Action Plan (PMDM) has started to show results. This realization is part of the contribution from the program organizer, community leaders, and beneficiaries. To that end, a form of appreciation was initiated by the PTPM Coordinating Team in the form PMDM Award that was held for the first time in 2015. The PMDM Award was given to program organizers in four areas affected by the operation of PT Vale. There were 64 nominees who were selected in eight categories of the PMDM Award. The PMDM Award conferment was held on August 22, 2015, to coincide with the launch of the Model BP3K in Nuha District, which was attended by the Acting Regent of East Luwu Irman Yasin Limpo, Muspida East Luwu, and President Director of PT Vale Nico Kanter, as well as the Board of Directors. Model BP3K is one manifestation of the partnership between PT Vale and East Luwu Regency Government in the framework of Sustainable Agriculture Programs.



September / September

PT Vale terima penghargaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS

PT Vale Indonesia Tbk menerima penghargaan kategori Platinum dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas prestasinya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja. Penghargaan diberikan dalam peringatan Hari AIDS Sedunia dan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2015, di Jakarta, Kamis, 10 September 2015. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menakertrans Hanif Dhakiri kepada Roimon Barus, Kepala Teknik Tambang PT Vale. Menurut Menteri, penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas inovasi dan pencapaian PT Vale dalam upaya menurunkan angka penyebaran infeksi HIV dan AIDS.

PT Vale received an award for HIV-AIDS prevention and control

PT Vale Indonesia Tbk was awarded the Platinum category by the Ministry of Manpower and Transmigration for the Company's achievements in the prevention and monitoring of HIV and AIDS in the workplace. The award was given during the commemoration event of World AIDS Day and National Month of Occupational Health and Safety (K3) 2015 in Jakarta, on Thursday, September 10, 2015. The award was handed over by the Minister Hanif Dhakiri to Roimon Barus, PT Vale's Head of Mining Engineering. According to the minister, this award is given in appreciation of PT Vale's innovation and achievement in an effort to curb the spread of HIV and AIDS infection.



PT Vale kembali terima Aditama dan trophi pengelolaan lingkungan pertambangan

Meski kondisi bisnis pertambangan sedang lesu, namun upaya-upaya pengelolaan lingkungan PT Vale tetap mengacu pada standar tertinggi. Hal ini tercermin dengan diterimanya piagam dan trofi penghargaan "Pengelolaan Lingkungan Pertambangan" 2015 oleh PT Vale pada 17 September 2015 lalu di Jakarta. Penghargaan kategori Perusahaan Tambang Pemegang Kontrak Karya ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir. Bambang Gatot MM kepada Direktur Legal dan Corporate Secretary PT Vale Ratih Amri yang mewakili manajemen PT Vale.

PT Vale awarded Aditama and a Trophy for Environmental Management

The sluggish market condition of the mining industry does not reduce PT Vale's environmental management. The Company won the award and trophy of "Mining Environmental Management" in 2015 on September 17, 2015, in Jakarta. The award, in the category of Mining Company - Contract of Work Holders, was presented by the General Director of Mineral and Coal of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Bambang Gatot to PT Vale's Director of Legal and Corporate Secretary Ratih Amri, who was represented PT Vale's management.



Peristiwa Penting 2015

Event Highlights 2015

Oktober / October

PT Vale salah satu perusahaan paling berkelanjutan di Asia

Dalam dua tahun berturut-turut PT Vale Indonesia Tbk tercatat dalam 100 besar perusahaan yang paling berkelanjutan di Asia. Daftar tersebut dirilis oleh Channel NewsAsia, stasiun TV terkemuka yang berbasis di Singapura, di tengah perhelatan CSR Asia Summit di Kuala Lumpur, Malaysia pada 7 Oktober 2015. Setelah pada 2014 ditempatkan pada posisi 34, tahun 2015 ini peringkat PT Vale meningkat menjadi 25. Pada kategori 3 Besar Berdasar Negara, PT Vale menduduki posisi kedua setelah PT Unilever Indonesia. Posisi ketiga ditempati PT Bukit Asam.

PT Vale one of the most sustainable companies in Asia

For two consecutive years, PT Vale Indonesia Tbk was listed in the top 100 companies in Asia with the highest sustainability performance. The list was released by Channel NewsAsia, a leading TV broadcaster based in Singapore, during the CSR Asia Summit in Kuala Lumpur, Malaysia on October 7, 2015. Positioned at 34 in 2014, PT Vale's ranking improved to 25 in 2015. In the Top 3 by Country category, PT Vale came second after PT Unilever Indonesia while the third position held by PT Bukit Asam.



Desember / December

Penghargaan Laporan Berkelanjutan 2015

PT Vale menerima penghargaan di ajang Sustainability Reporting Awards (SRA) 2015 yang diselenggarakan oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR).

Penganugerahan penghargaan dari Dewan Juri SRA 2015 berupa *“Commendation for Best Disclosure on Efficient and Environmentally Friendly Operations”* dilakukan pada 15 Desember 2015 di Hotel Mulia, Jakarta. Di ajang itu, PT Vale diwakili oleh General Manager Business Development & Corporate Specialist Steven Brown yang menerima piagam penghargaan dari Ketua Dewan Juri SRA 2015 Sarwono Kusumaatmaja.



Sustainability Report Award 2015

PT Vale received an award at the Sustainability Reporting Award (SRA) 2015 event, organized by the National Center for Sustainability Reporting (NCSR).

Conferment of the award by the Jury of SRA 2015 *“Commendation for Best Disclosure on Efficient and Environmentally Friendly Operations”* was conducted on December 15, 2015 at Hotel Mulia, Jakarta. PT Vale was represented by General Manager Business Development & Corporate Specialist, Steven Brown, and received a certificate of appreciation from the Chairman of SRA 2015 Jury, Sarwono Kusumaatmaja.

Penghargaan dan Sertifikasi 2015

2015 Awards and Certifications

January 15, 2015

Indonesia's Top 50 Companies dari Koran SINDO
Indonesia's Top 50 Companies from SINDO Newspaper

February 12, 2015

Penghargaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Award dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Occupational Health and Safety Award From the
Governor of South Sulawesi

February 25, 2015

*Special Recognition Award untuk Outstanding Energy
Management in the Mining Sector dari Sustainability
Business Award*

Special Recognition Award for Outstanding Energy
Management in the Mining Sector from the
Sustainability Business Award

February 26, 2015

Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar Pertama dari
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo Sulawesi
Selatan

Largest Taxpayer Award from the Palopo Pratama Tax
Office of South Sulawesi

April 17, 2015

Booth Terbaik I untuk kategori Peserta BUMN dan
Swasta dalam Sulteng Expo 2015
Best Booth for the State Owned Enterprise and Private
Enterprise Participant in the 2015 Sulteng Expo

June 5, 2015

Predikat Terbaik II RKAB Award Kontrak Karya 2014 yang
diadakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Second Best in the 2014 Contract of Work RKAB Award
which was organized by the Directorate General of
Minerals and Coal of the Ministry of Energy and Natural
Resources



June 19, 2015

Emiten Terbaik 2015 bidang Pertambangan dari Majalah Bloomberg Businessweek Indonesia
Best Public Company of 2015 in the Mining Category from the Bloomberg Businessweek Indonesia Magazine

June 21, 2015

Stand Terbaik CSR dalam Pekan Lingkungan Indonesia 2015 yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Best CSR Stand in the 2015 Indonesia's Environmental Week, organized by the Ministry of Environmental and Forestry Affairs

September 10, 2015

Penghargaan Kategori Platinum dalam Pencegahan & Penanggulangan HIV – AIDS di Tempat Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Platinum Category Award in HIV – AIDS Prevention and Eradication in the Work Place from the Ministry of Manpower and Transmigration

September 17, 2015

Penghargaan Aditama dan Trofi Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Kategori Perusahaan Tambang Pemegang Kontrak Karya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Aditama Award and Mining Environment Management Trophy in the Contract of Work Holder Mining Company from the Ministry of Energy and Mineral Resources

October 7, 2015

100 Besar Perusahaan Paling Berkelanjutan di Asia dari Channel NewsAsia bersama partnernya CSR Asia dan Sustainalytics
Top 100 Most Sustainable Company in Asia from Channel NewsAsia with its partners CSR Asia and Sustainalytics

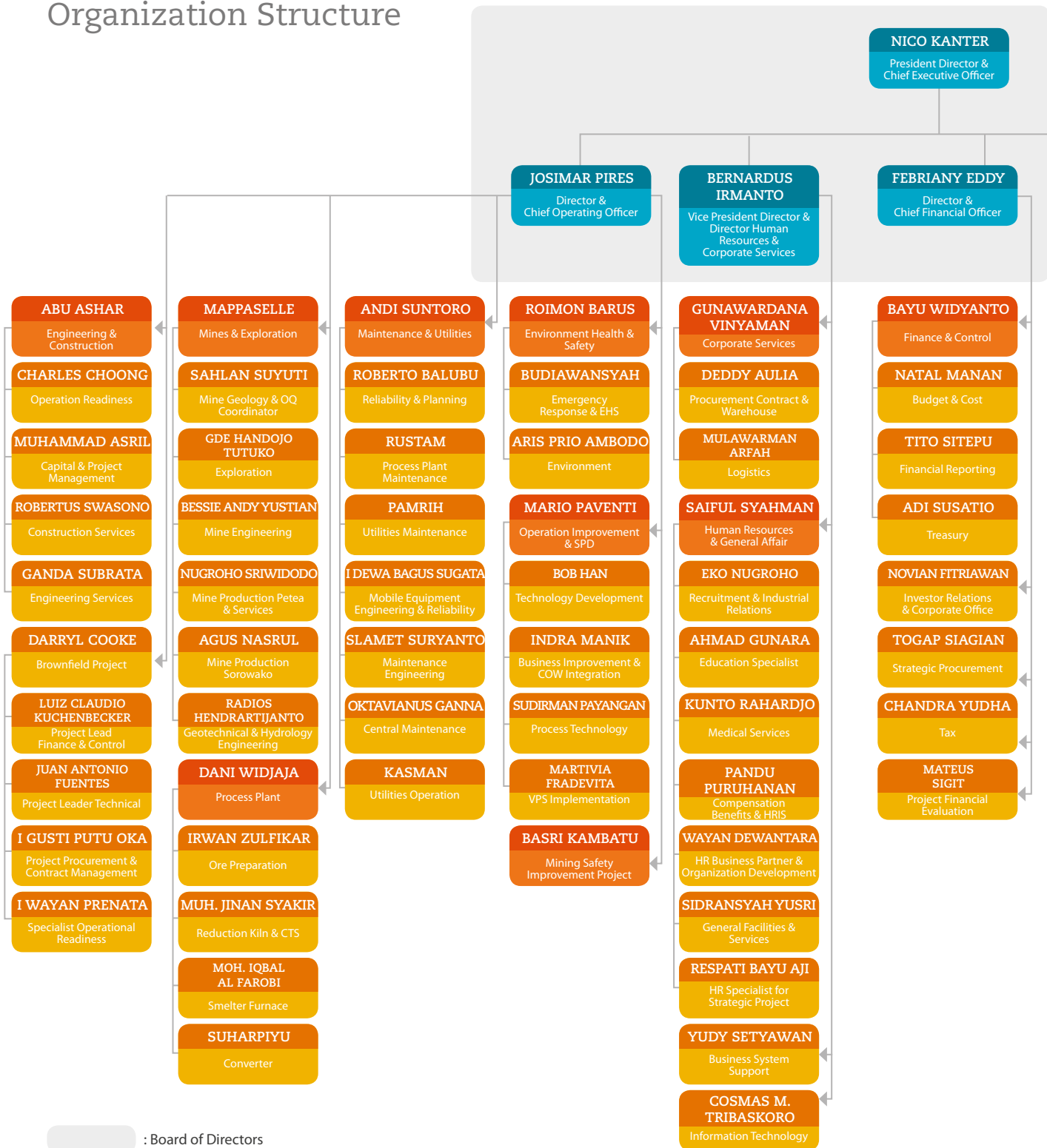
December 15, 2015

Penghargaan *Commendation for Best Disclosure on Efficient and Environmentally Friendly Operations* di ajang *Sustainability Reporting Award* yang diselenggarakan *National Center for Sustainability Reporting (NCSR)*
Commendation Award for Best Disclosure on Efficient and Environmentally Friendly Operations in the Sustainability Reporting Award event, organized by the National Center for Sustainability Reporting (NCSR)



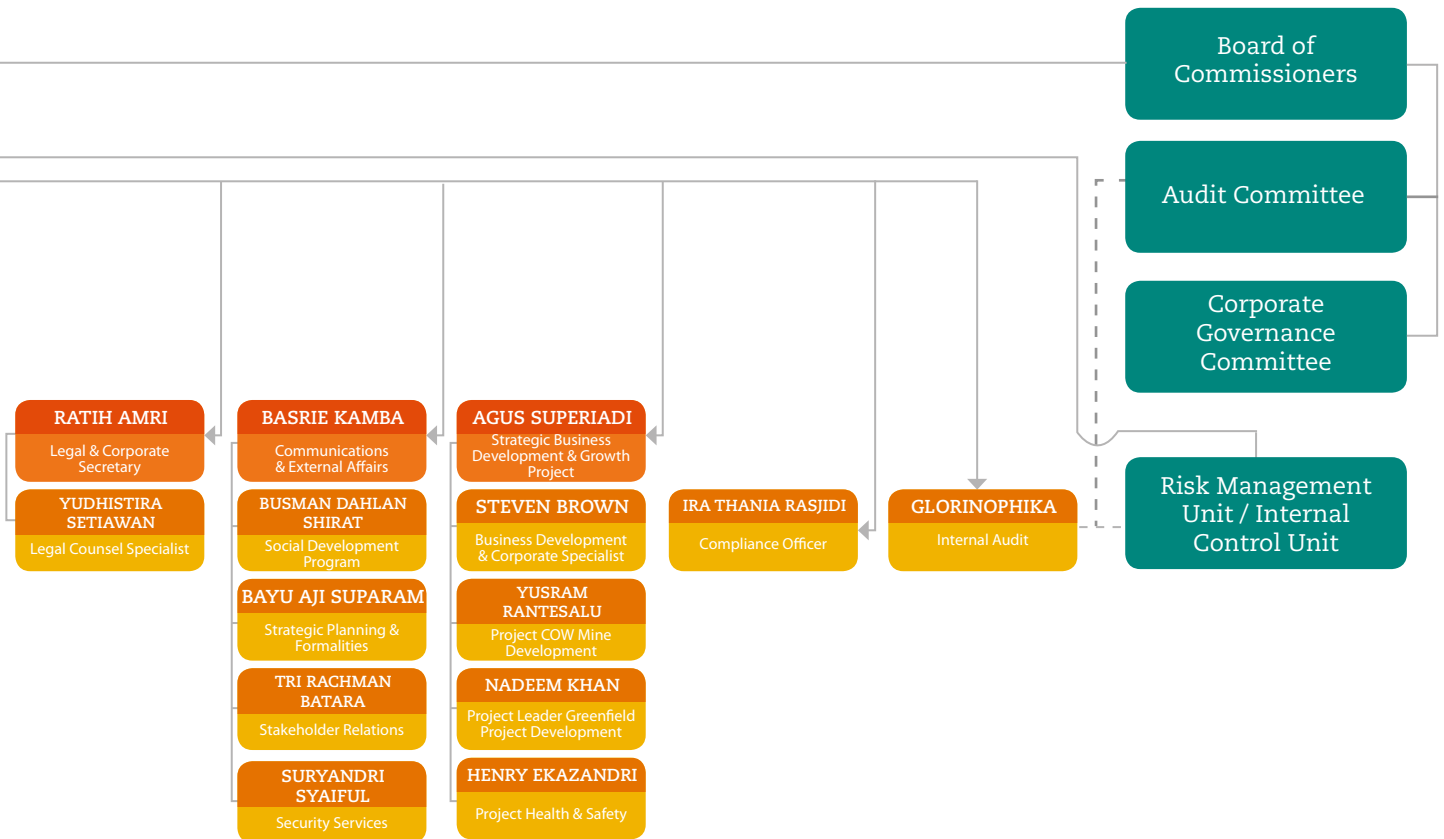
Struktur Organisasi

Organization Structure



- : Board of Directors
- : Member of Board of Directors
- : Director
- : Senior Manager

Per 31 Desember 2015 | As of December 31, 2015



Pejabat Senior Perseroan

Corporate Senior Management



Agus Superiadi

Director of Strategic Business Development and Growth Projects

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung tahun 1996

Bergabung dengan PT Vale tahun 1997 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- Senior General Manager Mines and Exploration sejak tahun 2010 hingga 2013
- Senior General Manager Environment, Health, Safety and Strategic Business Development sejak tahun 2013 hingga 2015
- Kepala Teknik Tambang sejak tahun 2011 hingga 2015
- Director of Strategic Business Development and Growth Projects sejak tahun 2015 hingga sekarang

Earned bachelor in Geology Engineering degree from Bandung Institute of Technology in 1996.

Joined PT Vale in 1997 and held key positions including:

- Senior General Manager Mines and Exploration from 2010 to 2013
- Senior General Manager Environment, Health, Safety and Strategic Business Development from 2013 to 2015
- Kepala Teknik Tambang from 2011 to 2015
- Director of Strategic Business Development and Growth Projects from 2015 to now



Basrie Kamba

Director of Communications & External Affairs

Memperoleh gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia tahun 2006.

Bergabung dengan PT Vale tahun 2011 dan menempati posisi kunci, yaitu:

- Director of Communications & External Affairs sejak tahun 2011 hingga sekarang

Earned Master of Political Science degree from University of Indonesia in 2006.

Joined PT Vale in 2011 and held key position:

- Director of Communications & External Affairs in 2011 to now



Ratih Amri

**Director of Legal and
Corporate Secretary**

Memperoleh gelar Master of International Business Law dari University of Leiden, Belanda tahun 2000.

Bergabung dengan PT Vale tahun 2005 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- Corporate Legal Counsel sejak tahun 2005 hingga 2007
- Director of Legal sejak tahun 2007 hingga 2011
- Director of Legal and Corporate Secretary sejak tahun 2011 hingga sekarang

Earned Master of International Business Law degree from University of Leiden, Netherlands in 2000.

Joined PT Vale in 2005 and held key positions including:

- Corporate Legal Counsel from 2005 to 2007
- Director of Legal from 2007 to 2011
- Director of Legal and Corporate Secretary from 2011 to now



Glorinophika

**Senior Manager of Internal
Audit**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi tahun 2002 dan gelar Master of Human Resource Psychology di tahun 2014, keduanya dari Universitas Indonesia.

Bergabung dengan PT Vale tahun 2003 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- Internal Auditor sejak tahun 2005 hingga 2009
- Senior Auditor sejak tahun 2009 hingga 2014
- Senior Manager of Internal Audit sejak tahun 2014 hingga sekarang

Earned Bachelor of Economics major in Accounting in 2002 and Master of Human Resource Psychology in 2014 from University of Indonesia.

Joined PT Vale in 2003 and held key positions including:

- Internal Auditor from 2005 to 2009
- Senior Auditor from 2009 to 2014
- Senior Manager of Internal Audit from 2014 to now

Pejabat Senior Perseroan

Corporate Senior Management



Ira Thania Rasjidi

Compliance Officer

Memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun 1999 dan Master of Law tahun 2003, keduanya dari Universitas Padjadjaran.

Bergabung dengan PT Vale tahun 2015 dan menempati posisi kunci, yaitu:

- Compliance Officer sejak tahun 2015 hingga sekarang

Earned Law degree in 1999 and Master of Law in 2003, both were from Padjadjaran University.

Joined PT Vale in 2015 and held key position:

- Compliance Officer since 2015 to now



Abu Ashar

Director of Engineering & Construction

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Hasanuddin tahun 1992.

Bergabung dengan PT Vale tahun 1992 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- Manager Procurement & Contract Admin Services sejak tahun 2005 hingga 2010
- General Manager Procurement, Contract Services and Warehouse sejak tahun 2010 hingga 2012
- Senior General Manager Corporate Services sejak tahun 2012 hingga 2015
- Director of Engineering & Construction sejak tahun 2015 hingga sekarang

Earned Mechanical Engineering degree from Hasanuddin University in 1992.

Joined PT Vale in 1992 and held key positions including:

- Manager of Procurement & Contract Admin Services from 2005 to 2010
- General Manager Procurement, Contract Services and Warehouse from 2010 to 2012
- Senior General Manager Corporate Services from 2012 to 2015
- Director of Engineering & Construction from 2015 to now



Mappaselle

Director of Mines & Exploration

Memperoleh gelar Sarjana Kimia dari Universitas Hasanuddin tahun 1987.

Bergabung dengan PT Vale tahun 1990 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- Senior General Manager General Facilities & Services sejak tahun 2010 hingga 2011
- Senior General Manager Operation Supports sejak tahun 2011 hingga 2012
- Senior General Manager Process Plant sejak tahun 2012 hingga 2015
- Director of Mines & Exploration sejak tahun 2015 hingga sekarang

Earned Chemical degree from Hasanuddin University in 1987.

Joined PT Vale in 1990 and held key positions including:

- Senior General Manager General Facilities & Services from 2010 to 2011
- Senior General Manager Operation Supports from 2011 to 2012
- Senior General Manager Process Plant from 2012 to 2015
- Director of Mines & Exploration from 2015 to now



Andi Suntoro

Director of Maintenance & Utilities

Menyelesaikan pendidikan Diploma III dari Politeknik Universitas Brawijaya tahun 1987 dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia tahun 1998 melalui program beasiswa PT INCO.

Bergabung dengan PT Vale tahun 1989 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- Process Plant Engineering General Manager sejak tahun 1998 hingga 2005
- Utilities Senior General Manager sejak tahun 2005 hingga 2010
- Process Plant Maintenance & Utilities Senior General Manager sejak tahun 2010 hingga 2015
- Director of Maintenance & Utilities sejak tahun 2015 hingga sekarang

Finished Diploma III from Polytechnic Brawijaya University in 1987 and earned Electrical Engineering degree from University of Indonesia in 1998 through PT INCO scholarship program.

Joined PT Vale in 1989 and held key positions including:

- General Manager of Process Plant Engineering from 1998 to 2005
- Senior General Manager of Utilities from 2005 to 2010
- Senior General Manager of Process Plant Maintenance & Utilities from 2010 to 2015
- Director of Maintenance & Utilities from 2015 to now

Pejabat Senior Perseroan

Corporate Senior Management



Roimon Barus

Director Environment, Health & Safety

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Metalurgi dari Universitas Indonesia tahun 1988.

Bergabung dengan PT Vale tahun 1989 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- General Manager of Process Technology sejak tahun 2004 hingga 2009
- Senior General Manager of Process Plant sejak tahun 2009 hingga 2012
- Senior General Manager of Engineering, Technology Development and Support sejak tahun 2012 hingga 2015
- Director of Environment, Health & Safety sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Earned Bachelor in Metallurgy Engineering from University of Indonesia in 1988.

Joined PT Vale in 1989 and held key positions including:

- General Manager of Process Technology from 2004 to 2009
- Senior General Manager of Process Plant from 2009 to 2012
- Senior General Manager of Engineering, Technology Development and Support from 2012 to 2015
- Director of Environment, Health & Safety from 2015 to now



Mario Paventi

Director of Operation Improvement & Strategic Project Development

Memperoleh gelar Bachelor in Science dari Concordia University tahun 1986, gelar Master in Mining Engineering tahun 1990 dan gelar Ph.D. in Mining Engineering tahun 1996, keduanya dari McGill University.

Bergabung dengan PT Vale tahun 1990 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- General Manager Operation and Maintenance Improvement Program (OMIP) di Process Plant and Mining sejak tahun 2011 hingga 2012
- Senior General Manager Operational Excellence Department sejak tahun 2012 hingga 2014
- Senior General Manager Research and Development Projects sejak tahun 2014 hingga 2015
- Director of Operation Improvement & Strategic Project Development sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Earned Bachelor in Science from Concordia University in 1986, Master in Mining Engineering in 1990 and Ph.D. in Mining Engineering in 1996, both from McGill University.

Joined PT Vale in 1990 and held key positions including:

- General Manager Operation and Maintenance Improvement Program (OMIP) in Process Plant and Mining from 2011 to 2012
- Senior General Manager Operational Excellence Department from 2012 to 2014
- Senior General Manager Research and Development Projects from 2014 to 2015
- Director of Operation Improvement & Strategic Project Development since 2015 to now



Dani Widjaja

Director of Process Plant

Memperoleh gelar Diplom-Ingenieur in Mechanical Engineering dari Technische Universitaet Braunschweig, tahun 1993.

Bergabung dengan PT Vale tahun 1998 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- Deputy Director Karebbe HEPP Project sejak tahun 2009 hingga 2010
- Director, Indonesia Growth Project sejak tahun 2012 hingga 2015
- Director of Process Plant sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Earned Diplom-Ingenieur in Mechanical Engineering from Technische Universitaet Braunschweig in 1993.

Joined PT Vale in 1998 and held key positions including:

- Deputy Director Karebbe HEPP Project from 2009 to 2010
- Director, Indonesia Growth Project from 2012 to 2015
- Director of Process Plant from 2015 to now



Basri Kambatu

Manager Mining Safety Improvement Project

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Universitas Veteran Republik Indonesia tahun 1991 dan gelar Master of Management dari Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2011.

Bergabung dengan PT Vale tahun 1995 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- Manager Dispatch System and Mine Training sejak tahun 1999 hingga 2004
- Manager Mine Operation sejak tahun 2004 hingga 2013
- Manager of Mines and Exploration sejak tahun 2013 hingga 2015
- Manager Mining Safety Improvement Project sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Earned Mining Engineering degree from Veteran Republik Indonesia University in 1991 and Master of Management from Hasanuddin University in 2011.

Joined PT Vale in 1995 and held key positions including:

- Manager Dispatch System and Mine Training from 1999 to 2004
- Manager Mine Operation from 2004 to 2013
- Manager of Mines and Exploration from 2013 to 2015
- Manager Mining Safety Improvement Project from 2015 to now

Pejabat Senior Perseroan

Corporate Senior Management



Bayu Widyanto

Director of Finance and Control

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 2003.

Bergabung dengan PT Vale tahun 2010 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- Investor Relations tahun 2011
- Senior Manager Project Financial Evaluation sejak tahun 2011 hingga 2014
- Director of Finance and Control sejak tahun 2014 hingga sekarang

Earned Bachelor of Economics degree major in Accounting from Gadjah Mada University in 2003.

Joined PT Vale in 2010 and held key positions including:

- Investor Relations in 2011
- Senior Manager Project Financial Evaluation from 2011 to 2014
- Director of Finance and Control from 2014 to now



Gunawardana Vinyaman

Director of Corporate Service

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen Strategis dari MMA – Institut Pertanian Bogor tahun 2004.

Bergabung dengan PT Vale tahun 2004 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- General Manager Logistic sejak tahun 2008 hingga 2012
- General Manager Procurement Contract and Warehouse sejak tahun 2012 hingga 2013
- Senior General Manager Operation Support sejak tahun 2013 hingga 2015
- Director of Corporate Service sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Earned Civil Engineering degree from Brawijaya University in 1994 and Master of Strategic Management from MMA – Bogor Institute of Agriculture in 2004.

Joined PT Vale in 2004 and held key positions including:

- General Manager Logistic from 2008 to 2012
- General Manager Procurement Contract and Warehouse from 2012 to 2013
- Senior General Manager Operation Support from 2013 to 2015
- Director of Corporate Service from 2015 to now



Saiful Syahman

**Director of Human Resources
and General Affairs**

Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia tahun 1986 dan gelar MSc in Demography dari Florida State University tahun 1991.

Bergabung dengan PT Vale tahun 2014 dan menempati posisi kunci sebagai:

- Director of Human Resources and General Affairs sejak tahun 2014 hingga 2015

Earned Political Science degree from University of Indonesia in 1986 and Master of Science in Demography from Florida State University in 1991.

Joined PT Vale in 2014 and held key position:

- Director of Human Resources and General Affairs from 2014 to 2015

Struktur Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Structure of Majority and Controlling Shareholders

Entitas induk Perseroan adalah Vale Canada Limited dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A. (Vale), sebuah perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.

PT Vale's parent company is Vale Canada Limited, and the ultimate controlling entity is Vale S.A. (Vale), a public company incorporated under the laws of the Federal Republic of Brazil.

Terhitung sejak 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2015, tidak terdapat perubahan dalam susunan pemegang saham utama Perseroan. Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

There is no change in major shareholder composition from December 31, 2014, to December 31, 2015. The list of shareholders is as follows:

Pemegang Saham Utama Major Shareholder	31 Desember 2015 December 31, 2015	31 Desember 2014 December 31, 2014
Vale Canada Limited	58.73%	58.73%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	20.09%	20.09%
Publik Public	20.49%	20.49%
Vale Japan Limited	0.55%	0.55%
Sumitomo Corporation	0.14%	0.14%

Pemegang saham pengendali Vale adalah Valepar yang memiliki 33,7% saham Vale. Valepar sendiri adalah *special-purpose company* yang dibentuk berdasarkan hukum Republik Federal Brasil dengan tujuan tunggal sebagai pemegang saham Vale dan tidak memiliki aktivitas bisnis lainnya.

Vale's controlling shareholder is Valepar, which holds a 33.7% stake in Vale. Valepar itself is a special-purpose company formed under the laws of the Federal Republic of Brazil for the sole purpose of becoming a shareholder of Vale, and it does not conduct any other business activities.

Pemegang saham mayoritas Valepar adalah Litel participações S.A. (Litel) yang memiliki 49,0% saham Valepar.

Valepar's majority shareholder is Litel participações S.A, (Litel), which owns 49.0% stake in Valepar.

Pemegang saham mayoritas Litel adalah BB Carteria Ativa yang memiliki 78,4% saham Litel. BB Carteria Ativa adalah suatu dana investasi Brasil.

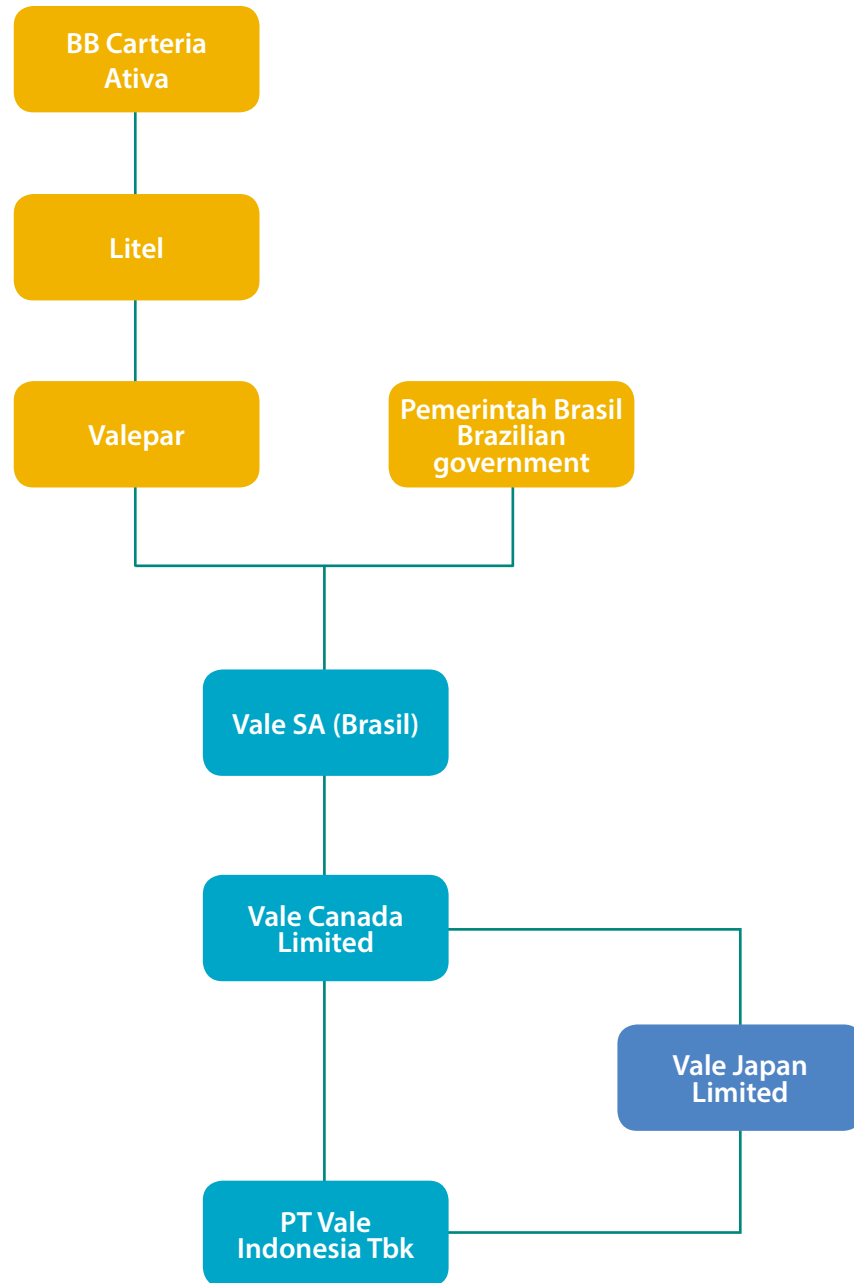
Litel's majority shareholder is BB Carteria Ativa, which holds 78.4% stake. BB Carteria Ativa is a Brazilian investment fund.

Selain itu Pemerintah Brasil juga memiliki 12 saham emas (*golden shares*) Vale yang memberikan wewenang veto bagi Pemerintah untuk perubahan beberapa hal seperti perubahan nama, lokasi kantor pusat serta tujuan perusahaan yang terkait dengan aktivitas pertambangan.

The Brazilian government also owns 12 golden shares in Vale, which give it veto powers over certain actions, such as changes to the company name, the location of its headquarters and the corporate purpose as it relates to mining activities.

Struktur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

This structure can be visualized as follows:



Profil Pemegang Saham

Shareholder Profile

RENTANG KEPEMILIKAN SAHAM

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah pemegang saham, dikategorikan berdasarkan rentang jumlah saham yang dimiliki pada tahun 2015 dan 2014.

SHARE RANGE

The table below shows the number of PT Vale shareholders, categorized by range of shares owned, for 2015 and 2014.

Rentang Kepemilikan Saham Range of Share Owned	2015		2014	
	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders
1 - 1,000	1,452,502	2,273	1,351,947	2,019
1,001 - 5,000	22,159,268	6,431	20,995,836	6,034
5,001 - 10,000	16,330,722	1,994	14,130,560	1,719
10,001 - 100,000	124,708,075	3,695	102,577,129	3,049
100,001 - 1,000,000	262,029,058	847	228,641,288	702
>1,000,000	9,509,659,095	239	9,568,641,960	250
	9,936,338,720	15,479	9,936,338,720	13,773

KEPEMILIKAN SAHAM

Berikut 20 Pemegang saham terbesar PT Vale pada tahun 2015 dan 2014:

SHARE HOLDINGS

The 20 largest shareholders of PT Vale for 2015 and 2014 are shown below:

	2015			2014		
	Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Number of Shares	%	Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Number of Shares	%
1	VALE CANADA LIMITED	5,835,607,960	58.73%	VALE CANADA LIMITED	5,835,607,960	58.73%
2	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD	1,996,281,680	20.09%	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD	1,996,281,680	20.09%
3	BPJS KETENAGAKERJAAN-JHT	96,856,000	0.97%	SSB ATB1 PLATINUM ASIA FUND-2144604127	167,117,417	1.68%
4	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	75,075,600	0.76%	BPJS KETENAGAKERJAAN-JHT	96,856,000	0.97%
5	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD, SICAV-ASIAN SPECIAL SIT	74,506,000	0.75%	BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FUND-2039844119	72,289,000	0.73%
6	BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FD BOARD-2039844119	67,171,200	0.68%	HONKY HARJO	59,274,000	0.60%
7	HONKY HARJO	59,999,000	0.60%	VALE JAPAN LIMITED	54,083,720	0.54%
8	VALE JAPAN LIMITED	54,083,720	0.54%	PT AIA FINL - UL EQUITY	46,601,400	0.47%
9	HSBC-FUND SERVICES, HITS(ASIA)LTD AS TR OF FIDELITY GLOBAL INVESTMENT FUND-ASIA PACIFIC EQUITY FUND	47,329,500	0.48%	SMARTLINK RUPIAH EQUITY FUND	46,060,700	0.46%
10	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD SICAV, FD FDS PAC FD	45,928,400	0.46%	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	40,699,200	0.41%
11	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	43,664,100	0.44%	BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INF	36,331,927	0.37%
12	BPJS KETENAGAKERJAAN - JKK	31,449,700	0.32%	BPJS KETENAGAKERJAAN - JKK	31,449,700	0.32%
13	THE BANK OF NEW YORK MELLON DR	30,842,600	0.31%	SSB Q4EQ S/A PLATINUM INTERNATIONAL FUND-2144606892	25,787,811	0.26%
14	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FUNDS ASIAN EQUITY POOL	30,641,000	0.31%	ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, PT-49454000	25,392,500	0.26%
15	BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INF	29,931,627	0.30%	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS	24,636,200	0.25%

	2015			2014		
	Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Number of Shares	%	Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Number of Shares	%
16	THE BANK OF NEW YORK MELLON DR	29,562,150	0.30%	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.	24,182,050	0.24%
17	SSB WTAU S/A WISDOMTREE EMERGING MRKTS SC DIV FUND-2144614648	26,309,500	0.26%	BPJS KETENAGAKERJAAN - BPJS	23,782,700	0.24%
18	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS	25,411,800	0.26%	REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	23,319,200	0.23%
19	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.	24,709,550	0.25%	SSL 3BR7 S/A PENSION PROTECTION FUND-2144610564	21,005,100	0.21%
20	BPJS KETENAGAKERJAAN - BPJS	23,782,700	0.24%	THE NORTHERN TRUST CO S/A SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY	18,827,800	0.19%

KOMISARIS ATAU DIREKTUR YANG MEMILIKI SAHAM

Tidak ada saham PT Vale dimiliki oleh anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama dan pada akhir 2015.

IKHTISAR PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Perseroan tidak menyelenggarakan program kepemilikan saham untuk karyawan dan manajemen.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

PT Vale menyebarkan pengumuman tentang kegiatan-kegiatan dan informasi perseroan termasuk hasil laporan keuangan per triwulan lewat IDX E-Reporting dan situs Internetnya, distribusi jejaring surat elektronik kami dan lewat situs kami di www.vale.com/indonesia.

Pemegang saham maupun anggota masyarakat lain yang tertarik untuk mendapatkan informasi tambahan tentang PT Vale kami persilahkan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat yang tertera di bagian dalam sampul belakang laporan ini.

COMMISSIONER OR DIRECTOR SHAREHOLDINGS

There were no shares of PT Vale owned by Commissioners or Directors in and at the end of 2015.

EMPLOYEE/MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP / MSOP)

The Company does not provide a stock ownership program for employees or management.

FOR MORE INFORMATION

PT Vale regularly publishes announcements on corporate events and information in addition to its quarterly financial results. These releases appear through IDX E-Reporting and website, email distribution lists, as well as our website at www.vale.com/indonesia.

Shareholders and other members of the public who are interested may obtain additional information about PT Vale and are invited to contact the Corporate Secretary at the address shown on inside front back of this report.

Ikhtisar Saham

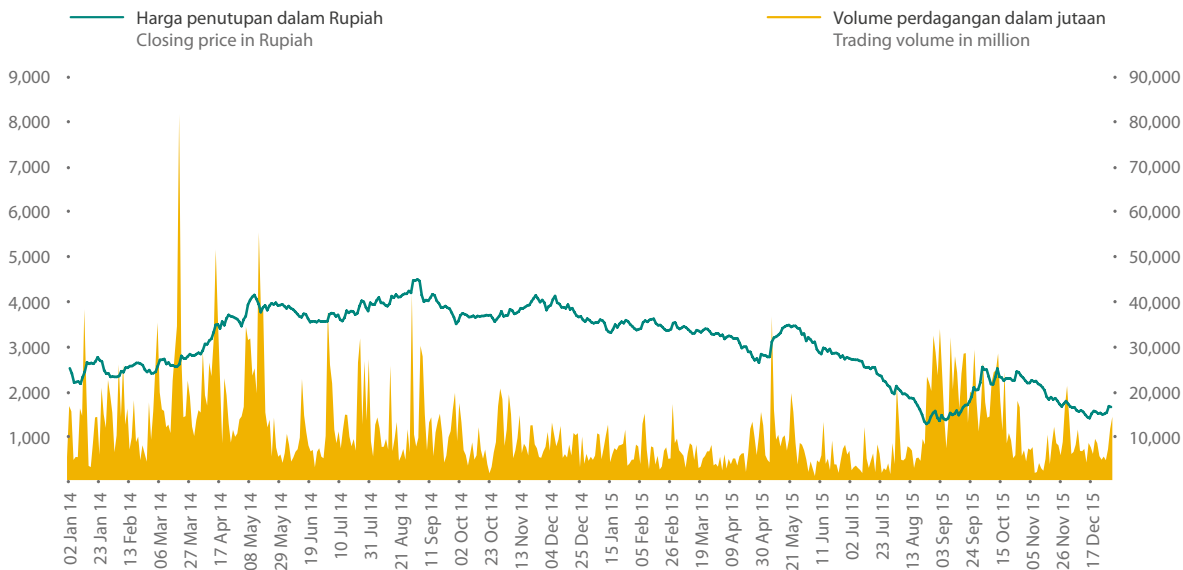
Share Highlights

KINERJA SAHAM

Grafik di bawah ini memperlihatkan kinerja saham yang terdiri dari harga penutupan serta volume transaksi harian di bursa saham selama 2014 dan 2015.

SHARE PERFORMANCE

The following graph shows share performance of closing prices and trading volumes in 2014 and 2015.



Tabel berikut menyajikan kinerja saham yang terdiri dari harga saham tertinggi, terendah dan penutupan serta volume transaksi bulanan selama 2015.

The following table shows share performance, including highest, lowest and closing prices, as well as monthly trading volumes in 2015.

No	Bulan Month	Harga (Reguler) Price (Regular)			Peredaran Saham di Pasar Reguler Shares Traded in Regular Market			IHSI Individual Index	Jumlah Saham Tercatat Total Shares Registered	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization	
		Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Akhir Closing	Volume	Nilai Value	Frekuensi Frequency			Rp miliar Rp billion	AS\$ ribuan US\$ thousand
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Unit)	Rp miliar Rp billion	(x)				
2015											
1	Januari January	3,695	3,285	3,450	149,168,300	521,620,998,000	49,229	1,408.16	9,936,338,720	34,280,368,584,000	2,715,277
2	Februari February	3,675	3,350	3,525	134,232,700	468,536,723,500	42,690	1,438.78	9,936,338,720	35,025,593,988,000	2,722,972
3	Maret March	3,565	3,230	3,235	128,816,400	434,074,025,500	40,992	1,320.41	9,936,338,720	32,144,055,759,200	2,456,745
4	April	3,275	2,605	2,795	144,571,600	420,409,137,500	35,137	1,140.82	9,936,338,720	27,772,066,722,400	2,146,716
5	Mei May	3,545	2,740	3,120	203,195,500	664,750,167,000	48,160	1,273.47	9,936,338,720	31,001,376,806,400	2,346,634
6	Juni June	3,280	2,675	2,710	101,481,300	291,831,967,500	37,229	1,106.12	9,936,338,720	26,927,477,931,200	2,019,763
7	Juli July	2,745	1,960	1,960	80,463,900	195,152,167,000	25,336	800.00	9,936,338,720	19,475,223,891,200	1,444,642
8	Agustus August	2,135	1,190	1,545	240,539,600	388,510,326,500	46,223	630.61	9,936,338,720	15,351,643,322,400	1,094,435
9	September	2,220	1,265	2,185	456,981,700	736,116,580,000	73,225	891.84	9,936,338,720	21,710,900,103,200	1,481,265
10	Oktober October	2,700	2,135	2,235	322,519,400	757,784,586,000	86,355	912.25	9,936,338,720	22,207,717,039,200	1,628,251
11	November	2,280	1,645	1,645	164,346,000	307,770,945,500	43,153	671.43	9,936,338,720	16,345,277,194,400	1,181,017
12	Desember December	1,695	1,340	1,635	154,807,600	239,670,304,500	34,071	667.35	9,936,338,720	16,245,913,807,200	1,177,752
	Harga/Price 2015	3,695	1,190	1,635							
	Total				2,281,124,000	5,426,227,928,500	561,800				

No	Bulan Month	Harga (Reguler) Price (Regular)			Peredaran Saham di Pasar Reguler Shares Traded in Regular Market			IHSI Individual Index	Jumlah Saham Tercatat Total Shares Registered	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization	
		Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Akhir Closing	Volume	Nilai Value	Frekuensi Frequency			Rp miliar Rp billion	AS\$ ribuan US\$ thousand
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Unit)	Rp miliar Rp billion	(x)				
2014											
1	Januari January	2,800	2,115	2,305	265,916,200	658,399,648,000	28,273	940.81	9,936,338,720	22,903,260,749,600	1,873,324
2	Februari February	2,650	2,230	2,390	253,691,700	625,040,063,000	26,209	975.51	9,936,338,720	23,747,849,540,800	2,041,245
3	Maret March	2,850	2,390	2,820	462,593,200	1,235,301,914,500	42,666	1,151.02	9,936,338,720	28,020,475,190,400	2,457,074
4	April	3,745	2,815	3,550	414,387,200	1,387,530,445,000	44,784	1,448.98	9,936,338,720	35,274,002,456,000	3,058,793
5	Mei May	4,240	3,430	3,915	420,876,400	1,643,997,747,500	57,585	1,597.96	9,936,338,720	38,900,766,088,800	3,350,337
6	Juni June	3,965	3,525	3,555	166,683,200	620,265,737,500	27,784	1,451.02	9,936,338,720	35,323,684,149,600	2,951,264
7	Juli July	4,025	3,525	4,025	277,778,900	1,041,273,034,500	40,893	1,642.86	9,936,338,720	39,993,763,348,000	3,450,415
8	Agustus August	4,185	3,785	4,180	240,898,000	965,485,231,000	51,336	1,706.12	9,936,338,720	41,533,895,849,600	3,544,755
9	September	4,575	3,710	3,750	290,591,100	1,202,890,778,500	64,533	1,530.61	9,936,338,720	37,261,270,200,000	3,051,201
10	Oktober October	3,825	3,455	3,790	210,628,300	771,480,906,500	63,389	1,546.94	9,936,338,720	37,658,723,748,800	3,116,928
11	November	4,175	3,625	3,985	195,836,600	758,469,898,500	53,929	1,626.53	9,936,338,720	39,596,309,799,200	3,246,664
12	Desember December	4,145	3,525	3,625	164,227,500	632,766,789,000	47,975	1,479.59	9,936,338,720	36,019,227,860,000	2,902,670
Harga Price 2014		4,575	2,115	3,625							
Total					3,364,108,300	11,542,902,193,500	549,356				

HARGA SAHAM

Tabel dan grafik di bawah ini menunjukkan pergerakan harga saham PT Vale per triwulan dan rata-rata volume transaksi harian pada tahun 2015 dan 2014.

SHARE PRICE

The following table and graphic show the quarterly changes in PT Vale's share price and average daily trading volumes in 2015 and 2014.

	Triwulan Quarter	Terendah Lowest	Tertinggi Highest	Penutupan Closing	Jumlah Saham Yang Diperdagangkan Volume Trading (Ribuan/Thousand)
2015	1	3,230	3,695	3,235	412,218
	2	2,605	3,545	2,710	449,248
	3	1,190	2,745	2,185	777,985
	4	1,340	2,700	1,635	641,673
2014	1	2,115	2,850	2,820	982,201
	2	2,815	4,240	3,555	1,001,947
	3	3,525	4,575	3,750	809,268
	4	3,455	4,175	3,625	570,692

Ikhtisar Saham

Share Highlights

KAPITALISASI PASAR

Tabel di bawah ini menunjukkan kapitalisasi pasar pada akhir tahun:

Nilai Pasar Market Capitalization	Rp juta Rp million	AS\$ ribu US\$ thousand	Kurs Rate
31 Desember 2015 / December 31, 2105	16,245,913	1,177,581	Rp13,796 per US\$1
31 Desember 2014 / December 31, 2104	36,019,228	2,902,670	Rp12,409 per US\$1

MARKET CAPITALIZATION

The following table shows market capitalization at end of the year:

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Perseroan didasarkan pada ketersediaan kas serta jumlah saldo laba ditahan, setelah dilakukan penyisihan untuk modal kerja, keperluan pembayaran hutang dan belanja barang modal.

DIVIDEND POLICY

PT Vale's dividend policy is to make payments based on available cash and, up to the amount of retained earnings, after prudently making provision for working capital, debt service requirements and capital expenditures.

SEJARAH DIVIDEN

Berikut ini ringkasan dividen yang dibayarkan dalam lima tahun terakhir.

DIVIDEND HISTORY

Below is a summary of dividends paid in the last five years.

Tahun Year	Dividen Dividend	Tanggal Pembayaran Payment Date	Jumlah Dividen / Dividend Amount			Rasio Pembayaran Payout Ratio
			Total (US\$)	Per share (US\$)	Per share (Rp)	
2015	15 Interim / Interim	-	-	-	-	
	14 Akhir / Final	-	-	-	-	
2014	14 Interim / Interim	17 Des Dec		0.01007	123,81	
	13 Akhir / Final	-		-	-	
2013	13 Interim / Interim	18 Des Dec		0.00252	30,14	
	12 Akhir / Final	31 Mei May		0.00252	24,60	
2012	12 Interim / Interim	27 Des Dec		0.00252	24,31	
	11 Akhir / Final	1 Jun Jun		0.0086	79,70	
2011	11 Interim / Interim	21 Nop Nov		0.0100	89,40	
	10 Akhir / Final	20 Mei May		0.0146	125,06	

Dividen dinyatakan dalam dolar AS. Bagi pemegang saham Indonesia, dividen dibayarkan dalam Rupiah yang nilainya setara dengan dividen yang dinyatakan dalam dollar AS berdasarkan tarif kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pencatatan dividen. Dividen bagi pemegang saham asing dibayarkan dalam dollar AS.

Dividends are declared in U.S. dollars. Indonesian shareholders are paid in Indonesian Rupiah based on the Bank Indonesia's mid exchange rate on the recorded date. Foreign shareholders are paid in U.S. dollars.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Saat ini, PT Vale memiliki 9.936.338.720 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kronologi pencatatan saham adalah sebagai berikut:

SHARE LISTING CHRONOLOGY

Currently, PT Vale has 9,936,338,720 shares registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Below is a summary of the listing history of Company shares.

Tanggal Date	Nama Name	Saham yang ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid shares	Nilai nominal Par value	Modal ditempatkan dan disetor penuh issued and fully paid capital	Modal Dasar Authorized Capital	
16 Mei 1990 /May 16, 1990	PT International Nickel Indonesia	248,408,468	Rp1,000	Rp248,408,468,000	Rp1,092,600,000,000	
14 Apr. 2000 /Apr. 14, 2000	PT International Nickel Indonesia Tbk.	248,408,468	Rp1,000	Rp248,408,468,000	Rp993,633,872,000	Authorized capital adjustment
3 Agt 2004 /Aug 3, 2004	PT International Nickel Indonesia Tbk	993,633,872	Rp250	Rp248,408,468,000	Rp993,633,872,000	Stock Split 1: 4
15 Jan 2008 /Jan 15, 2008	PT International Nickel Indonesia Tbk	9,936,338,720	Rp25	Rp248,408,468,000	Rp993,633,872,000	Stock Split 1:10
24 Jan 2013 /Jan 24, 2013	PT Vale Indonesia Tbk	9,936,338,720	Rp25	Rp248,408,468,000	Rp993,633,872,000	New Name of Vale Indonesia

AKSI KORPORASI

Tidak terdapat aksi korporasi yang mempengaruhi jumlah saham sejak tanggal 15 Januari 2008 di mana saham Perseroan dipecah dengan rasio 1:10

CORPORATE ACTIONS

No corporate actions affecting the number of the Company's shares have taken place since January 15, 2008, where at which the Company split the shares 1:10

PENJELASAN/ALASAN BILA PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN MENGALAMI SUSPENSI

Pada periode pelaporan ini saham Perseroan tidak mengalami suspensi.

EXPLANATION / REASON FOR THE SUSPENSION OF THE COMPANY'S SHARES

The Company's shares did not experience suspension during this reporting period.

IKHTISAR MENGENAI OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI YANG MASIH BEREDAR DALAM 2 TAHUN BUKU TERAKHIR

Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk maupun obligasi konversi.

HIGHLIGHTS OF BONDS, SHARIA BONDS OR CONVERTIBLE BONDS THAT ARE STILL OUTSTANDING IN THE LAST TWO YEARS

The Company has no outstanding bonds, sharia bonds (sukuk) or convertible bonds during this reporting period.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Perseroan tidak menerbitkan maupun mencatatkan efek lainnya.

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTINGS

The Company has no listed or any other securities during this reporting period.

Data Pemeringkat Efek Securities Rating Data

Perseroan tidak menerbitkan efek selain saham sehingga tidak ada data pemeringkat efek yang menyediakan jasa bagi Perseroan.

As PT Vale has neither bonds nor other securities, there is no debt specific ratings data.

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan adalah penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui kontak berikut:

Corporate Secretary acts as a liaison between the Company and its shareholders and stakeholders. The Corporate Secretary can be contacted through:

Efektif sejak 1 April 2016, Sekretaris Perusahaan PT Vale Indonesia Tbk pindah ke:
The Energy Building, 31st floor
SCBD Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Indonesia

Effective from April 1, 2016 Corporate Secretary has moved to:
The Energy Building, 31st floor
SCBD Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Indonesia

Sebelum tanggal 1 April 2016, Sekretaris Perusahaan PT Vale Indonesia Tbk berada di:
Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
T: +62-21-524 9000
F: +62-21-524 9020
E: ptvi.corpsec@vale.com

Prior to April 1, 2016, the Corporate Secretary of PT Vale Indonesia Tbk was located at:
Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
P: + 62-21-524 9000
F: + 62-21-524 9020
E: ptvi.corpsec@vale.com

Penasihat Hukum Legal Counsel

Penasihat hukum yang menyediakan jasa konsultasi legal bagi Perseroan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

The following law firm provided legal consulting services to the Company in 2015:

Mochtar Karuwin Komar
Wisma Metropolitan II 14th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920 Indonesia
T: +62-21-571 1130
F: +62 21 571 1162, 570 1686
www.mkklaw.net

Mochtar Karuwin Komar
Wisma Metropolitan II, 14th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920 Indonesia
P: +62-21-571 1130
F: +62 21 571 1162, 570 1686
www.mkklaw.net

Perseroan membayar sejumlah kompensasi atas jasa-jasa yang diberikan dan mencatat seluruh pembayaran sebagai biaya profesional di bawah beban usaha dalam laporan keuangan tahun berjalan.

The Company paid for the services rendered, and recorded the payment in its financial statement for the year under operating expenses.

Secara keseluruhan, biaya profesional yang dibayarkan kepada auditor, penasihat hukum dan penyedia jasa lainnya adalah sebesar AS\$2,2 juta pada tahun 2015.

The professional fees paid to auditors, legal counsel and other service providers in 2015 totaled US\$2.2 million.

Data Biro Administrasi Efek/ pihak yang mengadministrasikan saham Perseroan

Share Administration/Registrar

Perseroan menyediakan jasa administrasi efek secara *in-house* bagi para pemegang sahamnya. Biro tersebut dapat dihubungi melalui kontak berikut:

The Company provides in-house share administration services for its shareholders. The registrar can be contacted through:

Efektif sejak 1 April 2016, Administrasi Saham PT Vale Indonesia Tbk pindah ke:
The Energy Building, 31st floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Indonesia

Effective from April 1, 2016, the Share Administration of PT Vale Indonesia Tbk moved to:
The Energy Building, 31st floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Indonesia

Sebelum tanggal 1 April 2016, Administrasi Saham PT Vale Indonesia Tbk berada di
Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 Indonesia

Prior to April 1, 2016, the Share Administration of PT Vale Indonesia Tbk located at:
Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 Indonesia

T: +62-21-524 9000
F: +62-21-524 9030
E: ptvi.shareadmin@vale.com

P: + 62-21-524 9000
F: + 62-21-524 9030
E: ptvi.shareadmin@vale.com

Perseroan mengeluarkan biaya operasional untuk memastikan bahwa fungsi administrasi efek ini berjalan dengan baik. Namun Perseroan tidak memisahkan biaya ini karena jumlahnya tidak material.

The Company allocates sufficient resources to ensure that the share registrar functions properly. However, the Company does not list these expenses separately, as the overall amounts are immaterial.

Data Akuntan Independen/Eksternal

Independent/External Accountant Data

Berikut adalah daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang mengaudit Perseroan dalam 6 tahun terakhir:

The following is a list of the Public Accounting Firms (KAP) and Public Accountants who audited the Company's financial data over the past 6 years:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Registered Public Accountants	Akuntan Publik Public Accountant
2010	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Dwi Wahyu Daryoto, Ak., CPA
2011	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Dwi Wahyu Daryoto, Ak., CPA
2012	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA
2013	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA
2014	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Jongky Titus Lazuardi, S.E., CPA
2015	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Jongky Titus Lazuardi, S.E., CPA

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Jennifer Maki

Presiden Komisaris
President Commissioner

Kewarganegaraan: Kanada
Citizenship: Canada
Lahir / Born: 1970

Jennifer Maki diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak Rapat Umum Pemegang Saham 23 November 2007 dan sebagai Presiden Komisaris sejak RUPS Luar Biasa pada tanggal 25 September 2014.

Jennifer Maki was appointed as Commissioner at the General Meeting of Shareholders on November 23, 2007 and appointed Chairman at the Extraordinary General Meeting on September 25, 2014.

Ibu Maki adalah Direktur Eksekutif Vale S.A. untuk Base Metals sejak November 2014. Sebelum menjabat posisinya saat ini, Ibu Maki menjabat sebagai Executive Vice President dan Chief Financial Officer di Base Metals yang bertanggung jawab atas urusan keuangan secara keseluruhan di Vale Canada Limited.

Ms. Maki has been the Executive Director of Base Metals for Vale since November 2014. Prior to taking her current position, Ms. Maki served as Executive Vice-President and Chief Financial Officer of Base Metals, during which time she was responsible for the overall financial affairs of Vale Canada Limited.

Sebelumnya di Vale Canada beliau menjabat sebagai Vice President dan Treasurer di Vale Canada, Assistant Comptroller untuk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan tanggung jawab utama mengawasi penyiapan laporan keuangan untuk keterbukaan kepada publik dan pelaporan wajib kepada regulator, serta sebagai Assistant Comptroller untuk Analisa dan Perencanaan Keuangan, bertanggung jawab atas perencanaan keuangan, analisa hasil keuangan dan aspek pengawasan korporat dari program-program investasi modal Vale Canada.

Her previous positions in Vale Canada include Vice-President and Treasurer at Vale Canada; Assistant Comptroller for Accounting and Financial Reporting, with primary responsibility for overseeing the preparation of financial statements for public disclosure and mandatory reporting to regulators; and Assistant Comptroller for Analysis and Financial Planning, responsible for financial planning, analysis of financial results and corporate oversight of capital investment programs of Vale Canada.

Sebelum bergabung dengan Vale Canada pada tahun 2003, Ibu Maki bekerja selama 10 tahun di PricewaterhouseCoopers LLP dalam berbagai posisi dengan tanggung jawab yang terus meningkat. Beliau memiliki gelar sarjana Ilmu Bisnis dari Queens University dan ijazah pasca sarjana dari Institute of Chartered Accountants.

Prior to joining Vale Canada in 2003, Ms. Maki had worked for 10 years at PricewaterhouseCoopers LLP in a variety of positions with increasing responsibility. She has a Bachelor's Degree in Business from Queen's University and a postgraduate diploma from the Institute of Chartered Accountants.



Arief T. Surowidjojo

Arief T. Surowidjojo diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pertama kali pada 20 April 2009 dan kemudian sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen pada 27 September 2011. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengangkatan kembali beliau selaku Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen pada April 2014. Beliau juga menjadi Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Perseroan (Komisi GCG).

Bapak Surowidjojo adalah pendiri dan partner senior di firma hukum Lubis Ganie dan Surowidjojo. Beliau memiliki lebih dari 39 tahun pengalaman dalam bidang hukum korporat dan telah menerbitkan banyak buku, makalah dan artikel mengenai hukum dan tata kelola.

Selain menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan saat ini Bapak Surowidjojo juga menjabat sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT ABM Investama Tbk.

Selain menjadi pengajar senior pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pendiri Indonesia Jentera School of Law, Bapak Surowidjojo juga aktif sebagai pendiri dan/atau anggota sejumlah badan pada Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Transparansi International Indonesia, Yayasan WWF Indonesia, Yayasan Masyarakat Transparansi Indonesia dan Yayasan Putera Sampoerna.

Arief T. Surowidjojo menamatkan pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1977. Pada tahun 1984, beliau meraih gelar magister dalam bidang Transaksi Bisnis Internasional dari School of Law, University of Washington, Seattle.

Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
Vice President Commissioner and Independent
Commissioner

Kewarganegaraan: Indonesia
Citizenship: Indonesia
Lahir / Born: 1953

Arief T. Surowidjojo was appointed as Independent Commissioner on April 20, 2009, and then as Vice-President Commissioner and Independent Commissioner on September 27, 2011. His reappointment as Vice-President Commissioner and Independent Commissioner was approved at the Annual General Meeting of Shareholders in April 2014. He is also a Member of the Corporate Governance Committee.

Mr. Surowidjojo is the founder and senior partner of Lubis Ganie and Surowidjojo law firm. He has more than 39 years of experience in corporate law and has published many books, papers and articles on law and governance.

In addition to serving as Vice President Commissioner and Independent Commissioner Mr. Surowidjojo also currently is Independent Commissioner, Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee at PT ABM Investama Tbk.

In addition to being a senior lecturer at the Faculty of Law of the University of Indonesia and the founder of Indonesia Jentera School of Law, Mr. Surowidjojo also active as the founder and/or member of a number of bodies, namely Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Transparency International Indonesia, WWF Indonesia, Yayasan Masyarakat Transparansi Indonesia dan Putera Sampoerna Foundation.

Arief T. Surowidjojo earned his Bachelor's Degree from the Faculty of Law, The University of Indonesia in 1977. In 1984, he received a Master's degree in International Business Transactions from the School of Law, University of Washington, Seattle.



Andrea Marques De Almeida

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan: Portugis
Citizenship: Portuguese
Lahir / Born: 1971

Andrea Marques de Almeida ditunjuk sebagai Komisaris PT Vale Indonesia Tbk pertama kali pada 29 Juni 2015. Beliau adalah Direktur Keuangan Base Metals sejak bulan Juni 2015, bertanggung jawab untuk seluruh aspek keuangan Vale Base Metals.

Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Direktur pada Departemen Corporate Risk Management di Vale SA sejak 2010 dan bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi manajemen resiko di perusahaan. Antara tahun 1993 hingga 2010 beliau bertugas di berbagai posisi di Tim Manajemen Keuangan dan Risiko Vale. Sejak tahun 2012 hingga October 2015 beliau juga menjabat sebagai Direksi Steamship Mutual P&I Club dan bertugas untuk menganalisis dan menyetujui strategi underwriting dan manajemen resiko Club.

Ibu Almeida memiliki gelar Production Engineering dari Universidade Federal do Rio de Janeiro, serta gelar MBA in Finance dari IBMEC – Rio de Janeiro dan MBA in Management dari Universidade do Estado de São Paulo. Beliau juga menjalani pendidikan di Wharton Executive Education dan Institut Teknologi Massachusetts – Sloan School of Management.

Andrea Marques De Almeida was first appointed as Commissioner of PT Vale Indonesia Tbk on June 29, 2015. She is the Finance Director of Base Metals since June 2015, responsible for the overall financial affairs of Vale Base Metals.

Previously she served as the Corporate Risk Management Department Director of Vale SA since 2010 and oversaw the risk management function for the whole company. From 1993 until 2010 she worked in many different positions on the Finance and Risk Management Team of Vale. From May 2012 until October 2015 she was concurrently part of the Board of Directors of Steamship Mutual P&I Club, analysing and approving the underwriting and risk management strategies of the Club.

Ms. Almeida holds a degree in Production Engineering from Universidade Federal do Rio de Janeiro, an MBA in Finance from IBMEC – Rio de Janeiro and MBA in Management from Universidade do Estado de São Paulo. She also went to Wharton Executive Education and Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management.



Mark Travers

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan: Kanada
Citizenship: Canada
Lahir / Born: 1966

Mark Travers diangkat menjadi Komisaris Perseroan untuk pertama kalinya pada 27 Agustus 2009 dan kembali diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 April 2014. Beliau juga menjadi anggota Komite Tata Kelola Perseroan.

Mark Travers was first appointed as Commissioner of the Company on August 27, 2009 and was most recently re-appointed on April 1, 2014 at the Annual General Meetings of Shareholders of the Company. He is also a member of the Company's Corporate Governance Committee.

Bapak Travers saat ini adalah Executive Vice President, Legal and Sustainability, Vale Base Metals dimana beliau mengawasi seluruh aspek legal dan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja terkait Base Metals.

Mr. Travers is currently the Executive Vice-President, Legal and Sustainability, Vale Base Metals, where he oversees all legal and environmental, health and safety matters involving Base Metals.

Beliau bergabung dengan Vale Canada pada bulan Juni 2001 sebagai Assistant General Counsel. Beliau diangkat menjadi Associate General Counsel pada bulan Januari 2005 dan ditunjuk sebagai Deputy General Counsel, Asia-Pasifik pada bulan September 2007. Pada bulan Mei 2008, Bapak Travers ditunjuk sebagai General Counsel Vale Canada. Pada tahun 2012 hingga kini, Bapak Travers menjabat sebagai Executive Vice President, Legal, Vale Base Metals. Di bulan Desember 2015 beliau juga bertanggung jawab atas perihal lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum bergabung dengan Inco Limited, Mark Travers adalah seorang pengacara korporasi di biro hukum privat di Toronto, Kanada.

He joined Vale in June 2001 as Assistant General Counsel. Mr. Travers was appointed as the Associate General Counsel in January 2005 and was appointed as the Deputy General Counsel, Asia-Pacific in September 2007. In May 2008, Mr. Travers was appointed as General Counsel of Vale Canada. From 2012 to the present, Mr. Travers has served and continues to serve as the Executive Vice-President, Legal of Vale Base Metals. In December 2015 he assumed responsibility for environmental, health and safety matters. Prior to joining Vale, Mark Travers was a corporate lawyer in private practice in Toronto, Canada.

Beliau memiliki gelar Bachelor of Arts (Honors) dari University of Western Ontario dan Joint Master of Business Administration dan Bachelor of Laws degree dari York University's Osgoode Hall Law School di Toronto, Kanada.

He has a Bachelor of Arts (Honors) from the University of Western Ontario and a Joint Master of Business Administration and Bachelor of Laws Degree from York University's Osgoode Hall Law School in Toronto, Canada.



Robert Morris

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan: Kanada
Citizenship: Canada
Lahir / Born: 1963

Robert Morris diangkat sebagai Komisaris PT Vale Indonesia Tbk pertama kali pada tanggal 30 September 2015.

Robert Morris adalah Wakil Presiden Eksekutif Penjualan dan Pemasaran bisnis Base Metals di Vale S.A. Tanggung jawab beliau mencakup pula pengawasan arus produk dan logistik serta pengelolaan jaringan kantor penjualan global. Kepemimpinannya yang kuat mendukung pencapaian sasaran Base Metals dan berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan.

Dengan pengalaman internasional yang luas, Robert telah menjabat berbagai posisi senior di Vale sejak tahun 2005 di Jerman, Jepang dan Toronto. Sebelum bergabung dengan Vale, Robert menempati berbagai posisi manajemen di New York, Belgia dan Shanghai.

Selain gelar di bidang Ekonomi dari University of Calgary, Robert juga memiliki beberapa sertifikat manajemen dari MIT, INSEAD dan IMD. Robert juga menjadi Ketua Nickel Institute, sebuah organisasi global yang mewakili Industri Nikel dalam ilmu pengetahuan, kebijakan publik dan pengembangan pasar.

Robert Morris was first appointed as Commissioner of PT Vale Indonesia Tbk on September 30, 2015.

Robert Morris is Executive Vice President of Sales and Marketing for the Base Metals business of Vale S.A. His role also includes oversight for product flow and logistics and the management of a network of global sales offices. His strong leadership supports Base Metals' execution against targets and contributes to sustainable, profitable growth.

With extensive international experience, Robert has held numerous senior positions with Vale since 2005 in Germany, Japan and Toronto. Prior to joining Vale, Robert held management positions in New York, Belgium and Shanghai.

In addition to his Degree in Economics earned at the University of Calgary, Robert has earned several management certificates from MIT, INSEAD and IMD. Robert is also the Chairman of the Nickel Institute, a global organization that represents the Nickel Industry in science, public policy and market development.



Stuart Harshaw

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan: Kanada
Citizenship: Canada
Lahir / Born: 1967

Stuart Harshaw diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada 25 September 2014.

Stuart Harshaw was appointed as Commissioner of the Company on September 25, 2014.

Sejak 1 Januari 2016 Bapak Harshaw diangkat menjadi Direktur, Ontario Operations di mana beliau bertanggung jawab atas enam tambang, pabrik, peleburan dan pemurnian.

Since January 1, 2016 Mr. Harshaw has been appointed to the position of Director, Ontario Operations, where he is responsible for six mines, mill, smelter and refineries

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Vice-President of Marketing and Sales untuk Asia Pasifik di Vale Base Metal. Pada posisi tersebut, beliau bertanggung jawab terhadap seluruh penjualan logam dasar (Base Metals) ke dalam wilayah Asia Pasifik, termasuk Cina, Jepang, Taiwan dan Indonesia. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab untuk operasi pemurnian di wilayah Asia, yaitu di Matsusaka, Jepang; Kaohsiung, Taiwan dan; Dalian, Cina. Sejak bergabung dengan Vale Kanada pada tahun 1990, Bapak Harshaw telah menjabat berbagai posisi di bidang Teknik, Operasional dan Pemasaran.

Previously he served as Vice-President of Marketing and Sales for Asia Pacific at Vale Base Metals. In this position, he was responsible for all sales of base metals into the Asia-Pacific region, including China, Japan, Taiwan and Indonesia. In addition, he was also responsible for refining operations in the Asia region, namely in Matsusaka, Japan; Kaohsiung, Taiwan; and Dalian, China. Since joining Vale Canada in 1990, Mr. Harshaw has held various positions in Engineering, Operations and Marketing.

Bapak Harshaw memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Metalurgi dari Queen's University dan gelar MBA dari Laurentian University, (keduanya di Ontario, Canada).

Mr. Harshaw earned his Bachelor of Science Degree in Metallurgical Engineering from Queen's University and an MBA from Laurentian University, (both in Ontario, Canada).



Akira Nozaki

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan: Jepang
Citizenship: Japan
Lahir / Born: 1960

Akira Nozaki diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 September 2015. Sebelumnya beliau telah menjadi Komisaris Perseroan untuk pertama kalinya sejak September 2013 hingga September 2014.

Akira Nozaki was appointed as Commissioner of the Company on September 30, 2015 at the Extraordinary General Meetings of Shareholders of the Company. He had previously served as Commissioner of the Company for the first time from September 2013 to September 2014.

Akira Nozaki menjabat sebagai Direktur, Executive Officer dan General Manager dari Non-Ferrous Metal Division di Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("Sumitomo") sejak Juni 2015. Pada posisi tersebut, beliau bertanggung jawab terhadap strategi dan kinerja manajemen serta pengembangan usaha Divisi.

Akira Nozaki is currently the Director, Executive Officer and General Manager of Non-Ferrous Metals Division of Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("Sumitomo"), a position that he has held since June 2015. In this role, he is responsible for strategy and operation and business development of the Division.

Beliau telah menjabat berbagai posisi manajemen proyek dan operasi dalam bidang tembaga, nikel dan katalis di Sumitomo, serta pernah menjabat sebagai General Manager pada Nickel Sales and Raw Materials Department dan kemudian sebagai Deputy General Manager of Administration Department di Sierra Gorda Project (Chile) Division dan General Manager Corporate Planning Department sebelum akhirnya menjabat posisi saat ini.

He has held various operations and project management positions in the field of copper, nickel and catalyst in Sumitomo, and served as a General Manager of Nickel Sales and Raw Materials Department succeeded by Deputy General Manager of Administration Department of Sierra Gorda Project (Chile) Division and General Manager of Corporate Planning Department prior to assuming his current position.

Bapak Nozaki memiliki gelar BA dari Waseda University, dan bergabung dengan Sumitomo pada tahun 1984.

Mr. Nozaki has a BA from Waseda University, and joined Sumitomo in 1984.



Nobuhiro Matsumoto

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan: Jepang
Citizenship: Japan
Lahir / Born: 1963

Nobuhiro Matsumoto diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada 25 September 2014 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Nobuhiro Matsumoto was appointed as Commissioner of the Company on September 25, 2014 at the Extraordinary General Meetings of Shareholders of the Company.

Bapak Matsumoto menjabat sebagai General Manager of Administration Department, Non-Ferrous Metal Division di Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. sejak Juni 2014. Pada posisi tersebut, beliau bertanggung jawab terhadap strategi dan kinerja manajemen serta pengembangan usaha *Non-Ferrous Metals* (logam bukan besi).

Mr. Matsumoto has served as General Manager of the Administration Department, Non-Ferrous Metal Division at Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. since June 2014. In this position, he is responsible for strategy and performance management, as well as business development of non-ferrous metals.

Selama karirnya di Sumitomo, beliau telah menjabat berbagai posisi antara lain R&D, manajemen proyek dan operasi dalam bidang logam bukan besi, terutama nikel. Beliau pernah pula menjabat sebagai Plant Manager pada Coral Bay Nickel Corporation di Filipina, kemudian sebagai Plant Manager di Niihama Nickel Refinery Jepang sebelum akhirnya menjabat posisi saat ini.

He has held various positions in R & D, project management and operations in the field of non-ferrous metals, especially nickel, during his career at Sumitomo. He also served as Plant Manager at Coral Bay Nickel Corporation in the Philippines, as well as Plant Manager at Niihama Nickel Refinery in Japan before he held the current position.

Bapak Matsumoto memperoleh gelar Masters of Engineering di bidang Metalurgi dari Kyushu Institute of Technology Jepang, dan bergabung dengan Sumitomo pada tahun 1987.

Mr. Matsumoto holds a Masters of Engineering degree in Metallurgy from Japan's Kyushu Institute of Technology and joined Sumitomo in 1987.



Irwandy Arif

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan: Indonesia
Citizenship: Indonesia
Lahir / Born: 1951

Irwandy Arif pertama kali diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada 16 April 2010. Rapat Umum Pemegang Saham pada April 2014 menyetujui pengangkatan kembali beliau selaku Komisaris Independen Perseroan. Beliau juga menjadi Ketua Komite Audit sejak April 2014.

Irwandy Arif was appointed as Independent Commissioner of the Company on April 16, 2010. In April 2014, the General Meeting of Shareholders approved his reappointment as Independent Commissioner. He is also the Chairman of the Audit Committee, since April 2014.

Bapak Arif lulus dari Departemen Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1976. Beliau mendapat gelar Ph.D. dari Ecole des Mines de Nancy, Perancis pada tahun 1991.

Mr. Arif graduated from the Department of Mining Engineering at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1976. He received his Ph.D. from the Ecole des Mines de Nancy, France in 1991.

Sejak tahun 1977, beliau telah menjadi dosen di Departemen Teknik Pertambangan, Fakultas Ilmu Bumi dan Teknologi Mineral di ITB.

Since 1977, he has been a lecturer in the Department of Mining Engineering, Faculty of Earth Sciences and Mineral Technology at Institut Teknologi Bandung (ITB).

Bapak Arif di Organisasi Profesi memangku jabatan sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) tahun 2006-2012. Juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Mineral – KADIN 2015-2020.

Mr. Arif also served as Chairman of the Association of Indonesian Mining Professionals (PERHAPI) from 2006 – 2012, and also served as Chairman of the Standing Committee on Minerals – Chamber of Commerce from 2015 to 2020.

Di Industri Pertambangan, beliau adalah Komisaris Independen perusahaan tambang batu bara PT Golden Energy Mines (GEMS) Tbk., PT Indexim Coalindo dan anggota Komite Audit PT Adaro Energy Tbk. dan PT Tobabara Sejahtera Tbk.

Within the mining industry, he is an Independent Commissioner of coal mining companies PT Golden Energy Mines (GEMS) Tbk., PT Indexim Coalindo and member of the Audit Committee of PT Adaro Energy Tbk. and PT Tobabara Sejahtera Tbk.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Aneka Tambang Tbk, Dekan Fakultas Ilmu Bumi dan Teknologi Mineral di ITB, Ketua Internal Audit ITB, dan Ketua Komisi Internal dan Ketua Komisi Anggaran di Majelis Wali Amanat ITB.

Previously, he served as Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Aneka Tambang Tbk, Dean of the School of Earth Sciences and Mineral Technology at ITB, Chairman of Internal Audit at ITB, and as Chairman of the Internal Committee, as well as Chairman of the Budget Committee of the Board of Trustees at ITB.

Bapak Arif memiliki pengalaman yang luas dalam bidang pertambangan antara lain di bidang peningkatan produktivitas tambang, stabilitas lereng, dan aspek timbunan (*stockpile*). Beliau juga telah memimpin beberapa studi kelayakan untuk perusahaan-perusahaan batu bara dan mineral.

Mr. Arif has extensive experience in the mining field, with specialties in productivity improvement, slope stability, and stockpile aspects. He has led several feasibility studies for coal and mineral companies.



Idrus A. Paturusi

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan: Indonesia
Citizenship: Indonesia
Lahir / Born: 1950

Idrus A. Paturusi diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak 25 April 2012. Rapat Umum Pemegang Saham pada April 2014 menyetujui pengangkatan kembali beliau selaku Komisaris Independen Perseroan.

Idrus A. Paturusi was appointed as Independent Commissioner of the Company on 25 April 2012. The General Meeting of Shareholders approved his reappointment as Independent Commissioner in April 2014.

Dr. Paturusi bergabung dengan Universitas Hasanuddin, Makassar sebagai staf senior di Laboratorium Bedah, Fakultas Kedokteran, tahun 1978. Sejak tahun 2002 hingga 2006 beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan sejak tahun 2006 hingga 2014 menjabat sebagai Rektor Universitas Hasanuddin. Tulisan-tulisan dan karya tulis beliau mengenai kedokteran, kesehatan dan penanganan bencana telah banyak dipublikasikan secara nasional.

Dr. Paturusi joined Hasanuddin University, Makassar as a senior staff at the Laboratory of Surgery, Faculty of Medicine in 1978. From 2002 to 2006 he served as Dean of the Faculty of Medicine, and from 2006 to 2014 served as Rector of the Hasanuddin University. His writings on medicine, health and disaster management have been published nationally.

Selama lebih dari 10 tahun, beliau menjabat sebagai Koordinator Brigade Tanggap Bencana untuk wilayah timur Indonesia dan berpartisipasi membantu tim-tim medis pada berbagai aktivitas tanggap bencana di Indonesia dan luar negeri, termasuk Pakistan, Afganistan, Iran, Jepang, Aceh, Yogyakarta, Nias, Padang dan Papua. Pada tahun 1998 beliau ditunjuk sebagai Kepala Advance Crisis Center Team di RS Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Makassar. Dr. Paturusi juga dipercaya sebagai ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia mulai tahun 2012 hingga 2014 dan juga sebagai Presiden *The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAHIL)* untuk periode 2013 sampai dengan 2015.

For more than 10 years, he served as Coordinator for Disaster Response Brigade to the eastern region of Indonesia and participated in assisting medical teams in various disaster response activities in Indonesia and abroad, including Pakistan, Afghanistan, Iran, Japan, Aceh, Yogyakarta, Nias, Padang, and Papua. In 1998, he was appointed as Head of the Crisis Centre Advance Team at Dr. Wahidin Sudiro Husodo Hospital in Makassar. Dr. Paturusi is also trusted as the chairman of the Rector Council of Indonesia State Universities from 2012 to 2014, and also as President of The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAHIL) for the period 2013 to 2015.

Dr. Paturusi adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar. Beliau kemudian mengambil spesialisasi bedah tulang dan ortopedi di Universitas Indonesia, serta gelar *doctoral* di bidang ortopedi di Universitas Hasanudin dan Hiroshima University. Beliau juga menjalani berbagai pelatihan bedah ortopedi di Perancis dan Singapura.

Dr. Paturusi graduated from the Faculty of Medicine at Hasanuddin University, Makassar. He later specialized in orthopedic surgery at the University of Indonesia and earned doctoral degrees in the field of orthopedics at Hasanuddin University and Hiroshima University. He also underwent orthopedic surgery training in France and Singapore.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Nico Kanter

Presiden Direktur
President Director

Kewarganegaraan: Indonesia
Citizenship: Indonesia
Lahir / Born: 1958

Nicolas (Nico) Kanter kembali dipercaya menjadi Presiden Direktur Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 1 April 2014 setelah diangkat menjadi Presiden Direktur Perseroan untuk pertama kali pada RUPS Luar Biasa tanggal 27 September 2011. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Vale sejak 17 April 2009.

Sebelum bergabung dengan PT Vale, Bapak Kanter menjabat sebagai Head of Country, BP Indonesia sejak tahun 2007, dimana beliau mengawasi dan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan seluruh operasi BP di Indonesia. Sebelum itu, beliau adalah Executive Vice President, Sumber Daya Manusia dan Hubungan di BP.

Bapak Kanter mengawali karir di BP Indonesia sejak tahun 1984 sebagai penasihat hukum. Sejak tahun 1987 hingga 1999 beliau berkarir sebagai pimpinan di berbagai departemen termasuk Pembelian, Keuangan, Perencanaan & Pengendalian, Pemasaran & Komersial, HR dan VP Public & Government Affairs.

Setelah itu beliau menjabat sebagai Human Resources Manager pada tahun 1996 hingga 1999. Beliau menjabat sebagai Senior Vice President Human Resources & General Support di Vico Indonesia (diakuisisi oleh BP) pada tahun 2001 sampai 2002, dan sejak 2003 ditugaskan di BP Asia Pacific & Middle East (Hong Kong) sebagai Executive Assistant bagi Group Vice President Upstream.

Nico Kanter meraih gelar magister dalam bidang Hukum dari Universitas Indonesia dan gelar master dalam Administrasi Bisnis (Bisnis Internasional) dari University of Southern California, Amerika Serikat.

Nicolas (Nico) Kanter was re-appointed as President Director of the Company at the Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2014, after his first appointment as President Director on September 27, 2011. Previously, he served as an Independent Commissioner of PT Vale from April 17, 2009.

Prior to joining PT Vale, Mr. Kanter served as Head of Country, BP Indonesia from 2007, where he supervised, and was responsible for, integrating the entire BP operation in Indonesia. Before this, he had been the Executive Vice-President, Human Resources and Relations at BP.

Mr. Kanter started his career at BP Indonesia in 1984 as a legal adviser. From 1987 to 1999 he worked as head of various departments including Purchasing, Finance, Control & Planning, Marketing & Commercial, HR and VP Public & Government Affairs.

After this, he served as Human Resources Manager from 1996 to 1999. Mr. Kanter served as Senior Vice-President of Human Resources and General Support at Vico Indonesia (acquired by BP) from 2001 to 2002, and since 2003, he was commissioned by BP Asia Pacific and Middle East (Hong Kong) as the Executive Assistant to the Group Vice President Upstream.

Nico Kanter earned a Master's Degree in Law from the University of Indonesia and a Masters in Business Administration, in International Business, from the University of Southern California, USA.



Bernardus Irmanto

Wakil Presiden Direktur
Vice President Director

Kewarganegaraan: Indonesia
Citizenship: Indonesia
Lahir / Born: 1975

Bernardus Irmanto diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada 16 Februari 2011 setelah sebelumnya menjadi Direktur pada 28 Oktober 2010. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 1 April 2014 beliau ditunjuk kembali untuk jabatan yang sama.

Bapak Irmanto bergabung dengan PT Vale pada bulan Agustus 2004 sebagai Analis Sistem Senior. Sejak itu beliau telah memegang posisi dengan tanggung jawab yang terus meningkat di departemen TI. Pada Februari 2007 beliau menjabat sebagai General Manager TI hingga diangkat sebagai General Manager yang bertanggung jawab atas shared services operations PT Vale pada Mei 2009.

Sebelum bergabung dengan PT Vale, Bapak Irmanto telah memegang berbagai posisi dengan tanggung jawab yang terus meningkat di Newmont Nusa Tenggara, Fujitsu Asia Pacific Pty. Ltd., Bali Camp, University of New South Wales dan PT Freeport Indonesia.

Beliau meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Komputer dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1997, dan gelar Magister dalam bidang Ilmu dan Teknik Komputer dari University of New South Wales di Sydney, Australia, pada tahun 2003. Selain itu Bapak Irmanto juga sedang menyelesaikan program global executive MBA dari University of California Los Angeles – National University of Singapore.

Bernardus Irmanto was appointed as Vice-President Director on February 16, 2011, after having been named as a Director on October 28, 2010. He was reappointed as Vice-President Director at the General Meeting of Shareholders on April 1, 2014.

Mr. Irmanto joined PT Vale in August 2004 as a Senior Systems Analyst. Since then, he has held positions with increasing responsibility in the IT department. In February 2007, he was appointed as General Manager of IT until assigned as a General Manager who was responsible for PT Vale's shared services operations in May 2009.

Prior to joining PT Vale, Mr. Irmanto held various positions with increasing responsibility in Newmont Nusa Tenggara, Fujitsu Asia Pacific Pty. Ltd., Bali Camp, University of New South Wales and PT Freeport Indonesia.

He earned a Bachelor's degree in Computer Science from the University of Gadjah Mada in Yogyakarta in 1997, and a Master's degree in Computer Science and Engineering from University of New South Wales in Sydney, Australia in 2003. Furthermore, Mr. Irmanto currently is also completing a global executive MBA program from the University of California Los Angeles – National University of Singapore.



Josimar Pires

Direktur
Director

Kewarganegaraan: Brazil
Citizenship: Brazil
Lahir / Born: 1961

Josimar Pires diangkat sebagai Direktur PT Vale pada 27 September 2011. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Chief Operating Officer untuk Perseroan. Beliau bergabung dengan Vale pada bulan Januari 2009 sebagai General Manager untuk Tambang Mangan.

Josimar Pires was appointed as Director of PT Vale on September 27, 2011. Beforehand, he served as Chief Operating Officer of the Company. He joined Vale in January 2009 as General Manager of Manganese Mine.

Bapak Pires telah memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman profesional di dalam industri pertambangan. Beliau telah bekerja untuk beberapa perusahaan besar dan menangani berbagai proyek-proyek prestisius di tambang mineral dan industri semen. Sebelum bergabung dengan PT Vale, beliau menjabat sebagai General Manager Perencanaan Tambang di Carajas Iron Ore di Vale, Brazil, sejak Oktober 2009.

Mr. Pires has more than 25 years of professional experience in the mining industry. He has worked for several major companies and handled a variety of prestigious projects in the mineral mining and cement industries. Before joining PT Vale, he served as General Manager of Mine Planning at Vale Iron Ore Operation in Carajas, Brazil from October 2009.

Sebelumnya, beliau bekerja untuk Votorantim Metais Niquel selama empat tahun. Beliau memiliki pengetahuan yang luas dalam pengelolaan kompleks tambang dan metalurgi, operasi tambang, perencanaan tambang, geostatistik, pengolahan mineral dan metalurgi.

Previously, he worked for Votorantim Metais Niquel for four years. Mr. Pires has extensive knowledge in the management of mining and metallurgical complexes, mining operations, mine planning, geostatistics, mineral processing and metallurgy.

Bapak Pires memiliki beberapa gelar di bidang pertambangan dan manajemen pertambangan serta keuangan. Beliau juga menjabat sebagai Professor of Mining Engineering di Escola de Minas de Ouro Preto pada tahun 1986 hingga 1992.

Mr. Pires earned several degrees in the fields of mining and mining management, as well as finance. He also served as Professor of Mining Engineering at Escola de Minas de Ouro Preto in Brazil from 1986 to 1992.



Febriany Eddy

Direktur
Director

Kewarganegaraan: Indonesia
Citizenship: Indonesia
Lahir / Born: 1977

Febriany Eddy pertama kali diangkat menjadi Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 23 April 2013. Pada April 2014 pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali beliau sebagai Direktur Perseroan.

Febriany Eddy was appointed as Director for the first time at the General Meeting of Shareholders on April 23, 2013. In April 2014, the shareholders approved her reappointment as Director.

Ibu Febriany bergabung dengan PT Vale Indonesia Tbk pada September 2007 sebagai Manajer Pengawasan Pembiayaan Proyek dan Evaluasi Keuangan, dimana beliau terlibat dalam kegiatan operasional yang berfokus pada peningkatan efisiensi biaya, evaluasi dan pengaturan pembiayaan proyek dan perencanaan yang strategis.

Ms. Febriany joined PT Vale Indonesia Tbk in September 2007 as Manager of Capital Projects Control and Financial Evaluation, in which she had significant operational involvement on generating cost efficiencies, evaluating and managing capital projects, and supporting strategic planning.

Pada Oktober 2010, Ibu Febriany dipindahtugaskan ke kantor regional Vale Base Metal Asia Pasifik dan Afrika di Brisbane, Australia. Beliau bertanggung jawab terhadap operasional Vale Base Metal di Indonesia, Jepang, Cina, Taiwan dan Afrika.

In October 2010, Ms. Febriany was transferred to the regional office of Vale Base Metals Asia Pacific and Africa based in Brisbane, Australia. Her responsibility covered Base Metals operations in Indonesia, Japan, China, Taiwan and Africa.

Pada April 2013 beliau bergabung kembali di PT Vale Indonesia Tbk sebagai Direktur, Chief Financial Officer hingga sekarang.

She returned to PT Vale Indonesia Tbk in April 2013 as Director, Chief Financial Officer until today.

Ibu Febriany memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dalam bidang akuntansi, audit, uji tuntas keuangan, evaluasi keuangan, pengawasan pembiayaan proyek dan manajemen kinerja operasional.

Ms. Febriany has more than sixteen years of experience in accounting, auditing, financial due diligence, financial evaluation, capital projects control and operational performance management.

Sebelum bergabung dengan PT Vale Indonesia Tbk, ibu Febriany bekerja untuk PricewaterhouseCoopers di Jakarta selama lima setengah tahun dan di Amsterdam, Belanda, selama satu setengah tahun. Ibu Febriany terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan dan proyek-proyek internasional di uji tuntas keuangan.

Prior to joining PT Vale Indonesia Tbk, Ms. Febriany worked at PricewaterhouseCoopers for five and a half years in Jakarta and one and a half years in Amsterdam, The Netherlands. Ms. Febriany was engaged in various international projects in financial due diligence.

Ibu Febriany memiliki gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia dan MBA dari UCLA Anderson School of Management dan National University of Singapore serta bersertifikat akuntan publik.

Ms. Febriany earned a Bachelor of Economics majoring in Accounting from Universitas Indonesia and an MBA from UCLA Anderson School of Management and National University of Singapore, and she is a Certified Public Accountant.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report



Dalam keadaan harga nikel terus menurun, PT Vale mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk mengurangi dampak dari situasi tersebut dengan tetap fokus pada strategi jangka panjang Perseroan.

In the face of a steadily declining nickel price, PT Vale took swift and adequate measures to mitigate the situation while remaining firm in our long term strategy.

2 tahun berturut-turut
For the second straight year

Penghargaan Aditama dalam bidang kinerja lingkungan pada 2 tahun berturut-turut merupakan pencapaian yang besar dan menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap komitmen kami untuk menjaga pelestarian bumi.

The Aditama award, which recognizes the best of the best environmental performance, was awarded to PT Vale for the second straight year. This is a major achievement and provides important recognition of our commitment to protecting our planet.





Jennifer Maki
Presiden Komisaris
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Dear shareholders,

Atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan bangga kami menyampaikan laporan mengenai kinerja PT Vale yang tetap relatif tinggi dibandingkan dengan pelaku industri lainnya selama tahun yang penuh tantangan ini.

Pasar nikel terus menurun pada tahun 2015, namun PT Vale telah merespons dengan keuletan dan komitmen terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi. Hal ini tercermin dari pencapaian tingkat produksi tertinggi disertai dengan penurunan biaya produksi yang signifikan selama dua tahun berturut-turut. Secara global, PT Vale merupakan salah satu perusahaan unggulan dalam industri nikel yang saat ini, pada umumnya, mengalami kinerja yang kurang baik.

Dalam keadaan harga nikel terus menurun, PT Vale mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk mengurangi dampak dari situasi tersebut dengan tetap fokus pada strategi jangka panjang Perseroan. Perseroan menanggapi tantangan ini dengan meningkatkan produktivitas aset Perseroan, dan menyesuaikan rencana kerjanya dengan mempertimbangkan harga nikel yang jauh di bawah estimasi awal. Penyesuaian-penyesuaian ini dilakukan tanpa mengabaikan nilai-nilai Perseroan. Walaupun dalam kondisi harga nikel yang rendah, Perseroan mampu terus menghasilkan arus kas dan mempertahankan posisi keuangan yang sehat.

Namun, Dewan Komisaris juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya kecelakaan fatal yang terjadi pada salah satu karyawan kontraktor Perseroan di tahun 2015.

Akhirnya, Dewan Komisaris mengapresiasi Perseroan atas pencapaiannya yang ditandai dengan penerimaan berbagai penghargaan yang di antaranya berkaitan dengan laporan keberlanjutan, kinerja lingkungan, dan program pengembangan masyarakat. Penghargaan Aditama *best of the best* dalam bidang kinerja lingkungan pada dua tahun berturut-turut merupakan

On behalf of all members of the Board of Commissioners (BOC), we are proud to present this report on PT Vale's continued high performance relative to the industry in what was a very challenging year.

The nickel market continued to decline in 2015, but PT Vale responded with resilience and a commitment to greater productivity and efficiency. This is reflected in achieving a record high production and significantly reduced production costs for the last two years. Looking globally, PT Vale was one of the few bright spots in a nickel market plagued by weak performance.

In the face of a steadily declining nickel price, PT Vale took swift and adequate measures to mitigate the situation while remaining firm in our long term strategy. The Company responded to this by improving the productivity of existing assets and revising our work plan in light of the nickel price that was far below original estimates. These changes were made without compromising our company values. Despite the low nickel price environment, the Company can continue to generate cash flow and maintain a financially healthy position.

However, the Board of Commissioners also expresses its concern in relation to the one fatality that occurred involving a contractor employee in 2015.

Finally, the Board of Commissioners commends the Company for its achievement in receiving numerous awards for sustainability reporting, environmental performance and community development programs. The Aditama award, which recognizes the best of the best environmental performance, was awarded to PT Vale for the second straight year. This is a major

pencapaian yang besar dan menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap komitmen kami untuk menjaga pelestarian bumi.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Mengingat kondisi yang penuh tantangan pada tahun 2015, Dewan Komisaris memberikan penghargaan kepada Direksi dan seluruh karyawan atas kinerja secara bersama-sama maupun secara individual.

Sebagaimana dimuat dalam laporan Direksi pada laporan tahunan ini, Perseroan mampu mencapai beberapa target utama pada tahun 2015. Namun, tidak semua target dapat dicapai, terutama disebabkan penurunan tajam harga nikel. PT Vale mencapai target produksi untuk tahun ini, yang juga merupakan tingkat produksi tertinggi yang dicapai dalam sejarah Perseroan meskipun menghadapi beberapa tantangan operasional yang tak terduga. Dewan Komisaris juga menghargai upaya pengurangan biaya, sehingga Perseroan mampu melampaui target penurunan biaya produksi.

Dewan Komisaris menyesali terjadinya satu kecelakaan fatal terhadap karyawan kontraktor dalam tahun 2015. Kecelakaan tersebut merupakan tragedi yang sangat disayangkan dan Dewan Komisaris menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Dewan Komisaris menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sebagai prioritas tertinggi oleh karena itu penilaian kinerja Direksi sangat dipengaruhi oleh kejadian ini. Dewan Komisaris mencatat bahwa Perseroan telah melakukan investigasi yang mendalam dan membuat rencana tindak lanjut untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Investigasi dan rencana perbaikan ini telah diselesaikan.

Setiap tahun, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing anggota Direksi. Penjelasan yang lebih lengkap mengenai proses penilaian ini dan hasilnya diuraikan pada bagian Tata Kelola Perusahaan dari laporan ini. Secara ringkas, Direksi dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang sama, namun terdapat bobot penilaian yang berbeda sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Hasil penilaian Direksi dipaparkan dalam tabel di bawah ini, yang menunjukkan bahwa Perseroan dapat mencapai sebagian dari target-targetnya. Target

achievement and provides important recognition of our commitment to protecting our planet.

ASSESSMENT OF DIRECTOR PERFORMANCE

Given the highly challenging conditions in 2015, the Board of Commissioners (BOC) would like to acknowledge the Board of Directors (BOD) and all employees for their collective and individual performance.

As noted in the Board of Directors' report in this annual report, the Company was able to achieve some key targets in 2015. Not all targets were achieved, however, primarily because of a sharp decline in the nickel price. PT Vale achieved its targeted production level, which was the highest production level in its history despite certain unforeseen operational challenges. The BOC also appreciates the cost reduction efforts, with the Company exceeding its targeted reduction in production costs.

Regrettably, the BOC notes that a fatal accident occurred during 2015 involving a contractor employee. This is a very unfortunate tragedy and the BOC extends its condolences to the employee's family. The BOC places the highest priority on health and safety and the Directors' performance evaluations were significantly affected by this event. The BOC notes that a thorough investigation was done by the Company and a follow-up action plan implemented to prevent such occurrences in the future. This investigation and action plan have been completed.

Each year, the BOC evaluates the individual performance of each Director. A complete description of this process and its results is provided in the Corporate Governance section of this report. In summary, the Directors are all evaluated for a common set of criterias; however, each Director has a unique weighting scores allocated according to his or her field of responsibility. The key scores for the BOD are shown in the table below, which shows that the Company was able to achieve many of its targets. The main exceptions were EBITDA and cash flow, which were affected by the low nickel price, and

utama yang tidak tercapai adalah arus kas dan EBITDA, yang disebabkan oleh turunnya harga nikel, dan keselamatan dan kesehatan karyawan, karena telah terjadi kecelakaan fatal sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bobot penilai yang dialokasikan bagi masing-masing anggota Direksi diuraikan pada bagian Tata Kelola Perusahaan dari laporan ini.

health and safety, which was impacted by the fatality mentioned above.

The weighting scores allocation for each Director is provided in the Corporate Governance section of this report.

Target Direksi	Nilai (maks. 5) Score (out of 5)	Director Target
Mencapai semua indikator Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	2	Achieve all environment, health and safety (EHS) targets
Mencapai target unit cash cost	5	Achieve target for unit cash cost
Mencapai target free cash flows	2	Achieve target for free cash flows
Mencapai target EBITDA	2	Achieve target for EBITDA
Mencapai target produksi	4	Achieve production target
Implementasi GCG	3	Implementation of GCG practices
Produktivitas, kinerja dan kesejahteraan karyawan	4	Employee productivity, performance and welfare
Praktik bisnis yang berkelanjutan dalam bidang lingkungan hidup, penggunaan tenaga dan interaksi sosial	4	Sustainable business practices in the field of environment, employment and social interactions
Implementasi proyek-proyek strategis	3	Implementation of strategic projects

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah memberi dukungan yang optimal, sehingga Dewan Komisaris telah dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik. Saat ini terdapat dua komite di bawah Dewan Komisaris: Komite Audit dan Komite Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Committee*, atau Komite CG). Peranan Komite Audit mencakup pengawasan dan perlindungan integritas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan dan manajemen risiko. Peranan Komite CG mencakup remunerasi dan nominasi, serta pengkajian sistem Tata Kelola Perseroan. Kedua komite menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya dari Komite CG dalam memantau tindak lanjut dari pelaksanaan roadmap menuju pratek tata kelola terbaik yang sesuai dengan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dari ASEAN *Capital Market Forum*, Bank Dunia, dan Prinsip Tata Kelola dari *Organisation for Economic Co-*

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners holds the view that committees under the BOC have provided optimal support to allow the BOC to carry out its supervisory duties and function appropriately. Currently, there are two committees under the BOC: the Audit Committee and the Corporate Governance (CG) Committee. The Audit Committee's role includes supervising and protecting the integrity of the Board's financial reporting, compliance with regulatory requirements and risk management. The CG Committee's role includes remuneration and nomination as well as reviewing the governance systems of the company. Both committees are directly responsible to the BOC in the execution of their duties.

The BOC appreciates the efforts of the CG Committee in following up the roadmap towards best practice in GCG in line with the ASEAN Corporate Governance scorecard of the ASEAN Capital Market Forum, the World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Principles of

Operation and Development ("OECD") dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006 (secara keseluruhan, "Pedoman Umum GCG Indonesia"), yang dibuat pada tahun 2014. Komite CG meningkatkan jumlah frekuensi pertemuan pada tahun 2015, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi Komite CG. Dalam menjalankan fungsinya, Komite CG melakukan komunikasi yang regular dengan mitra kerjanya yaitu Sekretaris Perseroan.

Komite Audit juga meningkatkan frekuensi pertemuannya guna meningkatkan efektivitas dalam menjalankan fungsinya. Selain dari pertemuan formal, Komite Audit juga melakukan komunikasi yang regular dengan mitra-mitra kerjanya. Mitra kerja Komite Audit terdiri dari Ketua Unit Audit Internal, Ketua Unit Manajemen Risiko dan Ketua Unit Pengendalian Internal. Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengendalian Internal dibentuk pada tahun 2015 di bawah jajaran Direksi, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan praktek tata kelola yang baik di Perseroan.

EVALUASI KINERJA GCG

Dewan Komisaris memberikan penghargaan atas upaya Direksi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam hal GCG di PT Vale. Perbaikan tersebut telah dipaparkan kepada Dewan Komisaris, dan tindak lanjutnya akan dipantau secara berkala.

Direksi dan Sekretaris Perusahaan berinisiatif untuk melakukan kajian atas praktik tata kelola perusahaan di Perseroan dengan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) mengenai praktik tata kelola perusahaan sepanjang tahun 2015. Berdasarkan penilaian mandiri kinerja GCG cukup baik dan memenuhi harapan.

Dewan Komisaris terus memantau pembuatan Kode Etik yang baru secara aktif. Kami melihat ini sebagai landasan yang penting bagi Perseroan, dengan menuntut dan mempertahankan integritas tertinggi dalam semua tindakan.

Peningkatan kinerja GCG yang telah dan sedang dilakukan akan menjadi landasan yang penting bagi pertumbuhan kami pada masa mendatang. Dewan

Corporate Governance, and the Code of Good Corporate Governance as defined by the National Committee on Governance Policies (KNKG) in 2006 (collectively, "General Guidance for GCG Indonesia"), that was set in 2014. The CG Committee increased its meeting frequency in 2015 to provide better support to the Board of Commissioners. As in previous years, the CG Committee worked with its counterpart, the Corporate Secretary, to ensure regular communication occurred.

The Audit Committee has also increased its meeting frequency to improve its support to the Board of Commissioners. Apart from the formal Audit Committee meetings, Audit Committee members also maintained regular contact with key counterparts. These counterparts included the head of Internal Audit as its key working partner within PT Vale, and also the Head of Risk Management and the Internal Control unit. These latter two counterparts, reporting to the Board of Directors, were formed in 2015 as a means of improving corporate governance practices within the Company.

ASSESSMENT OF GCG PERFORMANCE

The Board of Commissioners acknowledges the efforts made by the Directors in their continued improvements in good corporate governance (GCG) at PT Vale. The improvements have been presented to the Board of Commissioners, and follow-up actions will be carefully monitored.

The Board of Directors and Corporate Secretary initiated a review of the Company's 2015 corporate governance practices by conducting a self assessment. Based on the self assessment results, the Company's GCG practices have been good and as expected.

The Board of Commissioners has been actively monitoring the roll-out of the new Code of Conduct. We see this as an important cornerstone of the Company by demanding and maintaining the highest integrity in all our actions.

The recent and ongoing improvements in good corporate governance (GCG) practices will form a critical foundation for the coming years of growth. The Board of

Komisaris memuji langkah-langkah yang diambil oleh PT Vale selama tahun 2015 untuk merevisi berbagai piagam dan dokumen GCG, dan membuat unit manajemen risiko dan pengendalian internal di bawah Direksi. Hal-hal ini dilakukan untuk lebih memastikan kepatuhan dan pelaksanaan praktik-praktik GCG terbaik.

Selain daripada itu, pada tahun 2015 PT Vale telah merekrut seorang *compliance officer* (pejabat kepatuhan) untuk lebih meningkatkan program kepatuhan perusahaan kami. Pejabat kepatuhan tersebut melapor kepada Presiden Direktur, namun juga memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Pada awalnya, peran ini difokuskan untuk anti-korupsi dan suap, untuk pelaksanaan kode etik yang baru. Pada tahun 2015 Direksi juga menambah pilihan saluran dan metode pelaporan *whistleblower*.

ULASAN MENGENAI SDM

Dewan Komisaris sangat senang dengan kualitas pegawai di semua tingkat di PT Vale. Masa depan kita yang cerah tergantung pada hal tersebut.

Dewan Komisaris memantau upaya-upaya untuk meningkatkan sistem SDM di tahun 2015. Peningkatan ini merupakan langkah penting ke depan, dan peningkatan tersebut mendukung upaya seluruh perusahaan untuk mengurangi biaya dan beroperasi lebih efisien.

ULASAN PROGRAM CSR

Dewan Komisaris bangga dengan program-program sosial dan dampak positifnya di masyarakat. Dewan Komisaris dapat melihat perubahan-perubahan mendasar yang telah dilakukan untuk program-program sosial tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini telah menyelaraskan program kami dengan kebutuhan yang nyata di masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Dewan Komisaris memuji keputusan untuk menggunakan pedoman G4 dari *Global Reporting Initiative* dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan di tahun 2015. Peningkatan dalam pengungkapan dan transparansi merupakan sebuah hal yang penting untuk pemegang saham dan kepada masyarakat pada umumnya.

Commissioners commends the steps taken by PT Vale throughout 2015 to revise the various charters and other GCG documents, and to establish the risk management and internal control units under the Board of Directors. These improvements were made to ensure compliance and to ensure that best practices are applied.

Importantly, in 2015 PT Vale recruited a compliance officer to further bolster our corporate compliance program. The compliance officer reports to the President Director but also has communication channels directly with the BOC. Initially, this role has focused on anti-corruption and bribery, following the implementation of our new Code of Conduct. In 2015 the Company also added a variety of new methods for accessing and reporting through the whistleblower channel.

REVIEW OF HUMAN RESOURCES

The Board of Commissioners is pleased by the quality of our people at all levels of PT Vale. Our bright future depends on this.

The BOC has monitored efforts made in 2015 to upgrade our human resources systems. This upgrade is an important step forward, and the improvements support our Company-wide efforts to reduce costs and be more efficient.

REVIEW OF CSR PROGRAM

The Board of Commissioners is proud of our social programs and their positive impact in the community. The BOC recognizes the fundamental changes that have been made to our social programs over the past few years. This has aligned our programs with real community needs and brought greater community buy-in.

The BOC applauds the decision to adopt the G4 guidelines from the Global Reporting Initiative in the Company's 2015 Sustainability Report. This increased level of disclosure and transparency is of high importance to shareholders and to society in general.

Salah satu tujuan strategis kami adalah untuk menjaga posisi kami sebagai pemimpin dalam produksi nikel berkelanjutan. Dewan Komisaris yakin bahwa kami dapat menjadi teladan untuk para pemain baru dalam industri nikel Indonesia.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris dengan bangga mendukung arahan Perusahaan dan prospek bisnis yang disusun oleh Dewan Direksi yang menekankan peningkatan dalam kesehatan dan keselamatan kerja serta peningkatan produktivitas aset. Secara umum, perekonomian Indonesia masih baik mengingat ekonomi global, dan pembaruan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada saat ini merupakan pertanda yang baik untuk kepercayaan investor.

Dewan Komisaris terus memandang PT Vale sebagai salah satu aset nikel terbaik di dunia saat ini berdasarkan catatan produksinya, biaya tunai per unit yang sangat baik, dan potensi untuk pertumbuhan. Kami juga memiliki kepastian regulasi setelah perubahan dalam Kontrak Karya pada tahun 2014.

Direksi Perseroan telah memaparkan prospek bisnis yang kuat untuk menangani tantangan-tantangan penting yang kita hadapi dalam jangka pendek. Dewan Komisaris mencatat bahwa pandangan positif ini didukung oleh empat faktor utama:

- Produksi yang tinggi sekitar 80.000 ton;
- Harga nikel yang stabil;
- Biaya produksi yang kompetitif; dan
- Peluang pertumbuhan yang sangat baik di masa mendatang.

PT Vale telah membuktikan dapat mempertahankan tingkat produksi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun banyak tantangan operasional, Perseroan mampu membukukan rekor tingkat produksi tertinggi di tahun 2015 dan Dewan Komisaris yakin pada kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan tren ini.

One of our strategic objectives is to maintain our position as a leader in sustainable nickel production. The BOC is confident that we are successfully in maintaining this position, and hopes that we can be a good example to follow for the many new players in the Indonesian nickel industry.

VIEW OF THE BUSINESS OUTLOOK AS PREPARED BY THE DIRECTORS

The Board of Commissioners is pleased to support the direction of the Company and the business outlook prepared by the Board of Directors that emphasizes improving health and safety and increased productivity of our assets. The Indonesian economy in general continues to perform relatively well considering the global situation, and the reforms being implemented by the current government bode well for investor confidence.

The BOC continues to consider PT Vale to be one of the best nickel assets in the world today, based on its strong production record, excellent unit cash costs and good potential for growth. We also have good regulatory certainty following the amendment of our Contract of Work in 2014.

The Directors' business outlook reflects the very challenging environment that is expected to continue in the coming years. The BOC believes that the Company is well-placed, relative to the industry, to overcome the challenges ahead. This review is underpinned by four key factors:

- Continued strong production of approximately 80,000 tonnes;
- Steady nickel price at current low levels;
- Competitive production costs; and
- Good growth opportunities in the future.

PT Vale has proven in recent years that it can maintain its high production levels. Despite many operational challenges, the Company was able to post another record-high production level in 2015 and the BOC is confident in the company's ability to continue this high level of performance.

Dewan Komisaris selalu memantau pasar nikel dan tren masa depan harga nikel. Dewan Komisaris mendukung penuh prospek bisnis Direksi yang berhati-hati untuk harga stabil nikel selama tahun 2016. Asumsi ini didukung secara luas oleh analis pasar nikel.

The BOC carefully monitors the nickel market and the future trends in the price of nickel. The BOC fully supports the Directors' cautious business outlook for a stable low price of nickel through 2016. This assumption is widely supported by nickel market analysts.

Dewan Komisaris sangat senang dengan keberhasilan inisiatif pengurangan biaya di tahun 2015 dan mengharapkan perusahaan untuk terus mencari cara untuk beroperasi secara lebih efisien.

The BOC has been very pleased with the successful cost-reduction initiatives of 2015 and expects the Company to continue seeking ways to operate more efficiently.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 31 Maret 2015, para pemegang saham setuju untuk menerima pengunduran diri Bapak Peter Poppinga sebagai Komisaris. Karena mendapat penugasan baru dari Vale S.A. Bapak Poppinga digantikan oleh Ibu Andrea Marques De Almeida pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2015.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

At the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on March 31, 2015, the shareholders voted to accept the resignation of Peter Poppinga as Commissioner as he received a new assignment from Vale S.A. Mr. Poppinga was replaced by Andrea Marques De Almeida at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on June 29, 2015.

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Kevin Graham dan Mikinobu Ogata sebagai Komisaris. Kevin Graham mengundurkan diri sebagai Komisaris mengikuti pengunduran dirinya dari Vale Canada Limited. Sementara itu Mikinobu Ogata mengundurkan diri setelah mendapat penugasan baru dari Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Para pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Robert Morris dan Akira Nozaki, masing-masing sebagai anggota baru Dewan Komisaris, efektif sejak penutupan RUPSLB sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2016.

On September 30, 2015, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) to approve and ratify the resignation of Kevin Graham and Mikinobu Ogata as Commissioners. Kevin Graham resigned as the Commissioner following his resignation from Vale Canada Limited. Meanwhile, Mikinobu Ogata resigned after receiving a new assignment from Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. The shareholders also approved the appointment of Robert Morris and Akira Nozaki, each as new members of the Board of Commissioners, effective as of the closing of the EGMS until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2016.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris pada saat ini adalah sebagai berikut:

As a result, the current composition of the BOC is as follows:

Presiden Komisaris	Jennifer Maki	President Commissioner
Wakil-Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	Arief T. Surowidjo	Vice-President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	Andrea Marques De Almeida	Commissioner
Komisaris	Stuart Alan Harshaw	Commissioner
Komisaris	Nobuhiro Matsumoto	Commissioner
Komisaris	Robert Morris	Commissioner
Komisaris	Akira Nozaki	Commissioner
Komisaris	Mark Travers	Commissioner
Komisaris Independen	Irwandy Arif	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Idrus Paturusi	Independent Commissioner

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Peter Poppinga, Kevin Graham dan Mikinobu Ogata atas dedikasi dan komitmennya kepada Perseroan selama masa baktinya.

Semua anggota Dewan Komisaris telah menandatangani pernyataan yang menegaskan independensinya serta mengungkapkan keadaan apapun yang dapat dianggap sebagai konflik kepentingan untuk setiap tindakan yang diambil oleh BOC.

APRESIASI

Terakhir, Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang tinggi atas kerja keras Direksi dan seluruh karyawan Perseroan atas kerja kerasnya pada tahun yang penuh tantangan ini. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain atas dukungan dan kepercayaannya dalam visi jangka panjang kami.

All members of the Board of Commissioners have signed a statement confirming their independence and disclosing any conditions that may be considered a conflict of interest to any actions taken by the BOC.

The Board of Commissioners would like to thank to Peter Poppinga, Kevin Graham and Mikinobu Ogata for his dedication and commitment to the Company during their tenures.

APPRECIATION

Finally, the Board of Commissioners expresses its greatest appreciation for the hard work of the Board of Directors and all employees of the company for their perseverance in a very challenging year. The Board of Commissioners also extends its appreciation to the shareholders and other stakeholders for their support and trust in our long term vision.

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



Jennifer Maki
Presiden Komisaris
President Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors' Report

“
Keberhasilan merealisasikan inisiatif-inisiatif penghematan biaya untuk menurunkan biaya produksi secara signifikan sekaligus meningkatkan produksi merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Keberhasilan ini membantu kami melewati tahun yang sangat sulit ini.

The success in realizing some important cost reduction initiatives to significantly reduce production costs and at the same time increasing production is a remarkable achievement. These have helped us navigate through this very challenging year.

”

16%

Penurunan biaya tunai per unit tahun 2015 dibandingkan tahun 2014.

2015 unit cash cost reduction from 2014.



Nico Kanter

Presiden Direktur

President Director

Laporan Direksi

Board of Directors' Report

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Dear shareholders,

Direksi mengucapkan terima kasih kepada para karyawan dan para pemangku kepentingan atas usahanya bersama-sama menghadapi tantangan di tahun 2015. Dalam sejarah panjang kami, kami telah menghadapi banyak tantangan bersama-sama, dan tahun 2015 merupakan salah satu tahun yang paling sulit dalam beberapa tahun belakangan ini. Mengingat industri nikel yang berkembang pesat di Indonesia, dan terjadinya penurunan drastis dalam harga nikel global, kami telah mengambil langkah-langkah besar guna menjaga Perseroan untuk tetap kompetitif.

Kami telah menghadapi tantangan tersebut dengan menekankan disiplin atas biaya, sementara tetap mengejar peningkatan produksi.

Kami bangga telah mencapai tingkat produksi nikel tertinggi kami sebanyak 81.177 ton nikel dalam matte. Jumlah ini mengalahkan rekor produksi kami tahun lalu, hal ini menunjukkan konsistensi kami dalam mencapai produksi yang tinggi. Peningkatan produksi ini tercapai karena perbaikan praktek-praktek operasi dan perawatan kami yang memungkinkan kami meningkatkan produktifitas aset kami. Keberhasilan ini di tengah kondisi pasar yang sulit merupakan suatu prestasi tersendiri.

Upaya karyawan kami tidak berhenti disini. Kami juga sangat bangga dengan keberhasilan merealisasikan inisiatif-inisiatif penghematan biaya, yang memungkinkan kami menurunkan biaya produksi secara signifikan. Keberhasilan kami menurunkan biaya sekaligus juga meningkatkan produksi merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, dan membantu kami melewati masa yang sangat sulit ini. Semua daya upaya ini telah memungkinkan kami menutup tahun 2015 dengan arus kas dan posisi keuangan yang kuat.

The Board of Directors would like to thank our employees and stakeholders for their efforts in rising to the challenges in 2015. In our long history we have faced many challenges together and 2015 ranks among the most difficult years in recent memory. With a rapidly evolving nickel industry in Indonesia, and a drastic decline in the global nickel price, we have taken huge steps forward to remain competitive.

We have responded to the challenge by exerting discipline over costs, while still pursuing increased production.

We are proud to have reached our highest ever nickel production of 81,177 tonnes of nickel in matte. This beats last year's record production, demonstrating our consistency in delivering high production. The increase was achieved mainly through improved operating and maintenance practices, which increased the productivity of our assets. It is an achievement having accomplished that in the midst of difficult market.

The efforts of our employees did not end there. We are also very proud to have realized some important cost-reduction initiatives, which were able to significantly reduce our production costs. That we were able to reduce costs at the same time as increasing production is an amazing achievement, and has helped us navigate through this very challenging period. All of these efforts allowed us to close the year with strong cash flows and a strong balance sheet.

KENDALA PADA 2015

Tantangan utama di tahun 2015 adalah harga nikel yang sangat rendah, yang mempengaruhi seluruh industri nikel secara global. Harga rata-rata tahunan pada tahun 2015 adalah AS\$11.823 per ton Ni, menurun 30% dari tahun 2014. Pada harga ini, sekitar setengah dari pelaku industri di pasar global berada di bawah tekanan arus kas negatif. Harga rendah yang berkepanjangan selama tahun 2015 relatif terhadap biaya industri ini belum terlihat sejak tahun 1990-an.

Dengan harga nikel serendah itu, mempertahankan arus kas yang baik sepanjang tahun merupakan tantangan yang sangat besar, terutama pada semester kedua.

Sektor nikel di Indonesia mengalami perubahan besar pada tahun 2015, yang mengubah dinamika pemangku kepentingan kami. Pada saat ini telah muncul beberapa pemain baru di sektor pengolahan nikel, termasuk investor besar maupun kecil. Perubahan dinamika ini telah meningkatkan tuntutan dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan kepada Perseroan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, terus berubahnya peraturan memberikan tantangan tersendiri, karena Perseroan perlu bereaksi cepat untuk memastikan kepatuhan. Pada saat yang bersamaan, kami juga memperkenalkan kode etik dan kebijakan kepatuhan anti korupsi yang baru, guna menyempurnakan kepatuhan Perseroan sejalan dengan perkembangan peraturan. Hal ini memerlukan komunikasi aktif untuk mendapatkan penerimaan yang baik dari berbagai pemangku kepentingan.

KEBIJAKAN STRATEGIS

PT Vale telah berhasil menghadapi tantangan yang diuraikan di atas dengan menerapkan beberapa kebijakan strategis. Kebijakan-kebijakan ini konsisten dengan apa yang telah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya, tetapi dengan penekanan khusus pada sektor-sektor yang paling relevan dengan kondisi saat ini.

CHALLENGES FACED IN 2015

The main challenge in 2015 was the very low nickel price, which has affected the entire global nickel industry. The average annual price in 2015 was US\$ 11,823 per ton Ni, a 30% decline from 2014. At that price, approximately half the global industry was under negative cash flow pressure. The prolonged low prices observed in 2015 relative to industry costs have not been seen since the 1990s.

With such a low nickel price, it was a major challenge to maintain good cash flow throughout the year, particularly in the second half.

Indonesia's nickel sector went through a major shift in 2015, which is changing our stakeholder dynamics. There are now several new players in the nickel processing sector, including both large and small investors. This new landscape has increased stakeholder expectations towards the Company.

As in previous years, regulatory changes continued to pose a challenge, with the Company needing to react quickly to ensure compliance. At the same time, we continued to roll out our new Code of Conduct and anti-corruption compliance policy, which was necessary to maintain compliance of our corporate practices in line with developments in the regulations. This has required careful engagement to ensure acceptance of several of our stakeholders.

STRATEGIC POLICIES

PT Vale has risen to the challenges outlined above by implementing several strategic policies. These policies are consistent with what we have been doing in previous years, but with special emphasis on those areas that are most relevant to the current environment.

Sektor penting untuk tahun 2015 adalah:

- Produktivitas
- Pengurangan biaya
- Kepemimpinan dan sumber daya manusia
- Tata kelola
- Kesehatan dan keselamatan kerja serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Seperti disebutkan sebelumnya, produksi pada tahun 2015 mencapai rekor tertinggi. Strategi peningkatan produksi ini sangat penting dalam kondisi harga nikel yang rendah ini, karena membantu mengurangi biaya tetap per unit, sehingga meningkatkan profitabilitas. Strategi produktivitas kami termasuk memaksimalkan utilisasi aset yang ada, melalui beberapa inisiatif *debottle-necking* dan pada saat yang bersamaan dengan hati-hati menilai kebutuhan investasi untuk menjaga kesinambungan operasi Perseroan dan peluang pertumbuhan.

Pengurangan biaya merupakan sektor yang sangat sukses di tahun 2015. Seiring dengan menurunnya harga nikel, kami pun mengelola biaya kami dengan sangat berhati-hati. Strategi biaya kami adalah selalu mengupayakan agar biaya tunai per unit kami berada pada kelompok terendah di antara para produsen nikel global lainnya. Hal ini membutuhkan inovasi dan usaha secara terus-menerus. Setelah keberhasilan operasional proyek konversi batu bara Tahap 1 di tahun 2014, kami dapat melihat tingkat pemanfaatan batu bara yang lebih tinggi lagi pada tahun 2015, yang menghasilkan penghematan biaya sebesar kurang lebih AS\$28 juta. Kami juga telah memulai uji coba dari proyek konversi batu bara tahap 2, dengan memasang sistem *dual-burner* baru pada salah satu tanur reduksi. Sampai saat ini hasil uji coba ini menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan tingkat konversi yang sangat baik, yaitu kurang lebih 60%. Kami terus mengusahakan tingkat konversi yang lebih tinggi di sisa masa percobaan, dan kemudian akan mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan hal yang sama pada empat tanur reduksi lainnya. Kami tetap optimis proyek ini memiliki potensi besar untuk mengurangi biaya operasi lebih lanjut dan untuk mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga minyak di kemudian hari.

The key strategic areas for 2015 were:

- Productivity
- Cost reduction
- Leadership and human resources
- Governance
- Health & safety and corporate social responsibility (CSR)

As noted earlier, production in 2015 reached a record high. This strategy is critical in these low nickel price conditions, as it dilutes fixed costs, thus improving profitability. Our productivity strategy includes maximizing the utilization of our existing assets through a series of *debottle-necking* initiatives, while also carefully assessing sustaining and growth investment opportunities.

Cost reduction was an area of great success in 2015. As nickel prices declined, we carefully managed our costs. Our strategy is to maintain our unit cash costs to be in the first quartile of all global nickel producers. This requires constant innovation and effort. Following the successful first year of operation of the coal conversion Phase 1 project in 2014, we witnessed an even higher coal utilization rate in 2015, which resulted in total cost savings of approximately US\$28 million. We have also commenced a trial of the coal conversion phase 2 project, with one new dual-burner system installed on one kiln. The progress of the trial so far has shown promising results with a conversion rate of around 60%. We continue to pursue even higher conversion rates in the remaining trial period, and will then assess the possibility to replicate this on the remaining four kilns. We remain optimistic that this project has great potential to further reduce our operating costs and to mitigate our risk against fluctuating fuel prices in the future.

Kami juga melakukan upaya-upaya yang keras dalam menegosiasikan kembali kontrak dengan pemasok guna mengurangi biaya lebih lanjut. Selain itu, kami juga membatasi pengeluaran biaya diskresi, dan melakukan *hiring freeze*.

Semua upaya-upaya di atas telah memungkinkan kami untuk menurunkan biaya tunai per unit nikel dalam matte kami sebesar kurang lebih 16% atau AS\$1.274 per ton pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Walaupun harga nikel turun drastis, operasi kami tetap dapat menghasilkan arus kas operasi sekitar AS\$134 juta. Kami menutup tahun 2015 dengan arus kas dan posisi keuangan yang kuat.

Perseroan kami sangat mengandalkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sangat menekankan pentingnya strategi kepemimpinan dan sumber daya manusia. Strategi kepemimpinan dilaksanakan untuk melanjutkan komitmen Perseroan terhadap pengembangan kepemimpinan lokal. Saat ini, tiga dari empat anggota Direksi Perseroan berkebangsaan Indonesia dan rencana suksesi multi-tahunan kami telah dirancang dengan tujuan agar dikemudian hari seluruh anggota Direksi dapat berkebangsaan Indonesia. Untuk mendukung pengembangan sumberdaya, kami telah melakukan beberapa perubahan pada struktur manajemen di tahun 2015, melalui pengayaan pekerjaan dan rotasi yang memungkinkan kami untuk memberikan kesempatan kepada pegawai-pegawai kami untuk berkembang. Di tengah tantangan menurunkan biaya, kami tetap mempertahankan komitmen kami dalam pengembangan sumberdaya manusia, dengan mengupayakan *in-house training* dan upaya-upaya lainnya untuk mengoptimalkan program pelatihan kami.

Pada tahun 2015, kami melanjutkan usaha perbaikan dalam tata kelola yang dimulai pada tahun 2014. Strategi ini merupakan strategi multi tahunan yang dimulai dengan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan dan membuat rencana kerja untuk perbaikannya. Sebagai tambahan, kami merujuk pada penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan guna memperkaya *roadmap* yang dibuat pada tahun 2014. Kami melanjutkan penerapan Kode Etik dan

We have also made a concerted effort to renegotiate contracts with suppliers to reduce costs. In addition, we have carefully managed discretionary spending, and have implemented a hiring freeze.

All of the above efforts have allowed us to reduce our unit cash cost per ton of nickel in matte by approximately 16% or US\$1,274 per ton in 2015 compared to 2014. Despite the significantly lower nickel price, our operation still generated operational cash of around US\$134 million. We close the year with strong cash flows and a strong balance sheet.

Our Company is dependent on high-quality people. To this end, the Company places great emphasis on its leadership and human resources strategy. The leadership strategy is to continue the company's commitment to develop local leadership. Currently, three of the four Company Directors are Indonesian nationals, with a view to having a fully national Board of Directors in our corporate succession plan. To support the development of our people, we have made several changes to the management structure in 2015, by promoting job enrichment and rotation which has helped us provide opportunities for our people to grow. Despite the pressure to reduce all costs, we have maintained our commitment to employee development by focusing more on in-house training and other optimizations to our training programs.

In 2015, we continued the governance improvements that commenced in 2014. This is part of a multi-year strategy which began with an assessment of areas for improvement and the development of a roadmap for improvements. In addition, we also referred to the ASEAN Corporate Governance Scorecard from the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) to identify areas that required improvements to enrich roadmap prepared in 2014. We have continued the roll-out of our new Code of Conduct and anti-corruption compliance policy, with all employees undertaking

kebijakan kepatuhan anti-korupsi kami yang baru, dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pegawai mengenai hal ini. Kami juga telah memperbarui beberapa dokumen tata kelola yang penting, termasuk Anggaran Dasar perusahaan, Piagam Sekretaris Perusahaan, Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan, Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi. Pada tahun 2015 kami juga menambah pilihan saluran dan metode pelaporan *whistleblower*. Direksi juga mengangkat Pejabat Kepatuhan, membentuk Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengendalian Internal yang bekerja langsung dibawah arahan Direksi guna memperkuat praktek tata kelola yang lebih baik.

Perseroan menempatkan kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan dan orang-orang di sekitarnya sebagai prioritas tertinggi. Selain itu kami menganggap bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan jangka panjang dari bisnis kami, dan juga bagi komunitas dan lingkungan hidup dimana kami melakukan usaha.

PERBANDINGAN ANTARA HASIL YANG DICAPAI DENGAN YANG DITARGETKAN

Kinerja keuangan pada tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh harga nikel yang menurun. Walaupun kondisi pasar sangat lemah, Direksi dapat melaporkan beberapa pencapaian, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Produksi mencapai 81.177 ton Ni, yang merupakan produksi tahunan tertinggi dalam sejarah perseroan. Tingkat produksi ini sesuai dengan target produksi tahun 2015.

Pendapatan sebesar AS\$789,7 juta, 25% di bawah target, disebabkan oleh harga nikel yang lebih rendah.

Meskipun laba 74% lebih rendah dari target, didorong oleh harga nikel yang lebih rendah, biaya produksi kami berkurang dan membantu memberikan keuntungan di tahun 2015, sebuah prestasi mengagumkan mengingat kondisi pasar nikel yang sangat sulit.

training in this area. We also renewed several key governance documents, including the Articles of Association, the Charter of Corporate Secretary, the Charter of Corporate Governance Committee, the Charter of the Board of Commissioners and the Charter of the Board of Directors. In 2015 we also added a variety of new methods for accessing and reporting via the whistleblower channel. We also hired a Compliance Officer and formed the Risk Management and Internal Control Units working under the direction of the Board of Directors to enhance better corporate governance practices.

The Company holds the health and safety of our employees and all people as its highest priority. In addition to that, we consider corporate social responsibility (CSR) as vital to the long-term viability of our business, the community and the environment in which we operate.

COMPARISON OF RESULTS AND TARGETS

Financial performance in 2015 was strongly influenced by the declining nickel price. Given the severely depressed market conditions, the Directors are pleased to report some strong results, as outlined below:

Production of 81,177 tonnes of Ni was our highest ever annual production, meeting the target level for 2015.

Revenues of US\$789.7 million were 25% below target, due to the lower nickel price.

Although profit was 74% lower than target, driven by the lower nickel price, reduced production costs helped us deliver a profitable 2015, an admirable achievement given the circumstances.

Biaya produksi 10% lebih baik dibandingkan target.

Production costs were 10% better than target.

Belanja modal pada tahun 2015 adalah 28% lebih baik dibandingkan dengan target, karena peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan proyek modal berkelanjutan dan penundaan beberapa proyek yang non-esensial seiring dengan rendahnya harga nikel, dan juga dipengaruhi oleh lambatnya perizinan yang diperlukan.

Our capital expenditures in 2015 were 28% better than target, due to higher efficiency in delivering sustaining capital projects and deferral of some non-essential projects in response to the low nickel price, and also influenced by some permitting delays.

Sebagai tambahan dari hasil-hasil tersebut di atas, Perseroan juga memperoleh sejumlah penghargaan di bidang praktik-praktik tata kelola perusahaan, lingkungan hidup, dan program pengembangan masyarakat. Pada khususnya, Perseroan menerima penghargaan Aditama kategori *best of the best* untuk kinerja lingkungan, dan peringkat PROPER Biru.

In addition to the above results, the Company also received numerous awards for corporate governance practices, environmental performance and community development programs. Specifically, the Company received the best of the best Aditama award for environmental performance, and also a Blue PROPER rating.

PENERAPAN GCG

Perseroan memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan standar tertinggi dari Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG). GCG merupakan kunci penting untuk mempertahankan kinerja, transparansi dan akuntabilitas di mata para pemegang saham dan masyarakat luas.

IMPLEMENTATION OF GCG

The Company is strongly committed in implementing the highest standards of good corporate governance (GCG). GCG is the key in maintaining good performance, transparency and accountability to our shareholders and the public.

Perseroan mengadopsi berbagai standar maupun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, seperti ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dari ASEAN *Capital Market Forum*, Bank Dunia, dan Prinsip Tata Kelola dari *Organisation for Economic Co-Operation and Development* ("OECD") dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006.

The Company adopts various standards and principles of good corporate governance, such as the ASEAN *Corporate Governance scorecard* of the ASEAN *Capital Market Forum*, the World Bank and Organisation for Economic Co-Operation and Development ("OECD") Principles of Corporate Governance, and the Code of Good Corporate Governance as defined by the National Committee on Governance Policies (KNKG) in 2006.

Selain itu, sebagai anak perusahaan dari Vale Canada Limited, dengan pemegang saham pengendali akhir adalah Vale S.A. (sebuah perusahaan tambang terkemuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil dan telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di New York *Stock Exchange*), maka PT Vale juga harus mengadopsi berbagai aturan dan norma yang berlaku di Grup Vale Global. Beberapa diantaranya adalah Kebijakan Kepatuhan Anti-Korupsi, Kode Etik dan Perilaku, Norma (Kebijakan) Pengadaan dan Sistem *Whistleblower*.

In addition, as a subsidiary of Vale Canada Limited, with the ultimate shareholder being Vale S.A. (a leading mining Company incorporated under the laws of the Federal Republic of Brazil and a public Company listed on the New York Stock Exchange), PT Vale is adopting various rules and norms introduced by the Vale Global Group. Among them are the Anti-Corruption Policy, the Code of Ethics and Conduct, Procurement Norms and the Whistleblower System.

Peraturan GCG terus berkembang secara pesat, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan untuk melaksanakan rekomendasi yang terkandung dalam Tata Kelola Perusahaan Indonesia oleh OJK.

Menanggapi hal ini, dan sebagai bagian dari upaya perbaikan terus-menerus kami, PT Vale telah menerapkan beberapa perbaikan pada tahun 2015.

Kami telah melakukan revisi besar dalam dokumen tata kelola utama kami, termasuk:

- Amandemen Piagam Sekretaris Perusahaan
- Amandemen Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan
- Amandemen Piagam Dewan Komisaris
- Amandemen Piagam Direksi
- Amandemen Anggaran Dasar

Pejabat kepatuhan kami yang baru ditunjuk dan diangkat pada bulan Agustus 2015. Pejabat tersebut melapor kepada Presiden Direktur dengan tambahan jalur komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris. Peran ini sangat penting dalam program GCG kami, terutama untuk inisiatif anti-korupsi dan suap. Pejabat kepatuhan telah mengkaji praktik yang ada dan mempersiapkan program kerja menuju praktik terbaik. Pejabat kepatuhan juga meluncurkan pelatihan yang ditargetkan untuk pemenuhan kesadaran persyaratan anti-korupsi dan bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi di lapangan. Kami mencapai cakupan 100% dari karyawan tingkat senior dan manajerial selama kuartal keempat 2015, dengan karyawan yang tersisa ditargetkan selesai di tahun 2016.

Pada 2015 kami memperbarui dan membuat beberapa perbaikan pada sistem *whistleblower* yang diperkenalkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 kami juga menambah pilihan saluran dan metode pelaporan *whistleblower*, dimana sekarang pelaporan dapat dilakukan melalui nomor telephone bebas pulsa, alamat email, faksimili, alamat surat PO BOX dan *website*.

GCG regulations continue to rapidly evolve, as part of the government's endeavor to improve good corporate governance practices and to implement the recommendations contained in OJK's Indonesian Corporate Governance Roadmap (or Tata Kelola Perusahaan Indonesia).

In response to this, and as part of our continuous improvement efforts, PT Vale has implemented several improvements in 2015.

We have undertaken a major revision of our key governance documents, including:

- Amendment of the Charter of Corporate Secretary
- Amendment of the Charter of Corporate Governance Committee
- Amendment of the Charter of Board of Commissioners
- Amendment of the Charter of Board of Directors
- Amendment of the Articles of Association

Our newly appointed compliance officer was put in place in August 2015, reporting to the President Director with an additional line of direct communication to the Board of Commissioners. The role is vital to our GCG program, particularly for our anti-corruption and bribery initiatives. The compliance officer has reviewed our current practices and prepared a roadmap to achieve best practices. The compliance officer has also rolled out targeted training to ensure awareness of anti-corruption requirements and how to address issues faced in the field. We achieved coverage of 100% of senior and managerial level employees during the fourth quarter of 2015, with remaining employees targeted for completion by 2016.

In 2015 we upgraded and made several improvements to the *whistleblower* system introduced a year earlier. In 2015 we also added variety of new methods for accessing and reporting via the *whistleblower* channel, where the reporting can now be performed by way of a toll-free telephone number, email address, fax, PO BOX mailing address and website.

Disamping itu, kami juga membentuk Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengendalian Internal yang bekerja langsung dibawah arahan Direksi guna memperkuat praktek tata kelola yang lebih baik.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN LAYANAN KORPORASI

Seperti disebutkan di atas, keberhasilan Perseroan tergantung pada karyawannya. Mengembangkan dan mempertahankan manusia berkaliber tinggi merupakan prioritas Perseroan.

Pada 2015, ada beberapa pencapaian penting di bidang sumber daya manusia dan layanan korporasi. Fokus utama sepanjang tahun itu adalah untuk memodernisasi beberapa sistem yang sudah tua yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk mengotomatisasi banyak layanan yang di masa lalu memerlukan pemeliharaan dan waktu staf yang sangat banyak.

Sejak diakreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) pada tanggal 21 Mei 2013, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PT Vale Indonesia, Tbk sebagai LSP Pihak ke-1, telah mendaftarkan 923 unit standar kompetensi ke Kementerian Tenaga Kerja. Selanjutnya, LSP PT Vale diberikan kewenangan untuk melakukan asesmen dan mensertifikasi 81 kelompok jabatan karyawan Non-Staff untuk 723 standar kompetensi. Hingga akhir tahun 2015, sebanyak 843 karyawan telah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Saat ini, LSP PT Vale memiliki 185 Asesor, 5 Master Asesor, 4 Lead Asesor dan 18 Asesor Lisensi yang kesemuanya disertifikasi oleh BNSP.

K3L DAN CSR

Lingkungan, kesehatan dan keselamatan (K3L) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan tema yang selalu ada di dalam seluruh strategi bisnis kami. Kami menilai bidang-bidang tersebut sebagai pembeda utama dalam bisnis kami di Indonesia. Dengan banyaknya perkembangan baru dalam nikel yang berlangsung di negara ini, kami bertujuan untuk memimpin jalan dalam praktek pertambangan yang baik dan pembangunan berkelanjutan.

In addition, we also formed the Risk Management and Internal Control Units working under the direction of the Board of Directors to enhance better corporate governance practices.

HUMAN RESOURCES AND CORPORATE SERVICES

As noted above, the Company's success depends on its employees. Developing and retaining high-caliber people is a Company priority.

In 2015, there were several key achievements in the field of human resources and corporate services. The main focus throughout the year was to modernize some of the older systems that have been in use for many years. This allowed the Company to automate many services that in the past required high maintenance and staff time.

Since being accredited by BNSP (National Professional Certification Board) on May 21, 2013, the Professional Certification Agency (LSP) PT Vale Indonesia, Tbk has registered 923 competency standards with the Ministry of Labour. Furthermore, LSP PT Vale was given authority to assess and certify 81 office employees and 723 non-staff employees for standard competencies. As of the end of 2015, as many as 843 employees have received competency certification. Currently, LSP PT Vale has 185 Assessors, five Master Assessors, four Lead Assessors and 18 Licensed Assessors, all of whom were certified by BNSP.

EHS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Environment, health and safety and corporate social responsibility (CSR) are constant themes throughout our business strategy. We see these areas as a key differentiator for our business in Indonesia. With many new nickel developments underway in the country, we aim to lead the way in good mining practices and sustainable development.

Pada tahun 2015, Perusahaan terus berfokus pada kesehatan dan keselamatan. Tingkat cedera (TRIFR) kami menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, TRIFR kami ada pada level 0.62, kurang dari setengah tingkat cedera lima tahun yang lalu 1.62 pada tahun 2011. Meskipun trend cedera kami turun, namun kami sangat menyangkan sebuah kecelakaan fatal di tahun 2015, sebuah kejadian yang sangat disesalkan. Kami telah melakukan investigasi secara menyeluruh, bukan hanya dari insiden tersebut, namun juga lebih luas di seluruh organisasi. Hal ini menghasilkan beberapa perubahan yang penting dan pendekatan yang baru dalam kesehatan dan keselamatan. Kejadian ini menekankan pentingnya program pencegahan kecelakaan fatal yang secara khusus ditujukan untuk bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan dengan risiko cedera serius. Program ini akan terus berlanjut di tahun 2016.

Dalam pelaporan keberlanjutan, dengan senang kami menerima penghargaan untuk pengungkapan publik dari acara Sustainable Reports Award. Selain itu, kami telah berkomitmen untuk melakukan pelaporan publik yang sejalan dengan pedoman pelaporan G4 dari *Global Reporting Initiative* (GRI). Laporan Keberlanjutan 2015 kami akan menjadi laporan berkelanjutan pertama kami yang sesuai dengan pedoman tersebut, dan merupakan salah satu komitmen kami untuk keberlanjutan dan tata kelola.

Walaupun kondisi pasar melemah, kami tetap menunjukkan komitmen kami terhadap lingkungan hidup. Kinerja lingkungan kami tetap diakui sebagai parameter dalam industri nikel. Untuk tahun kedua berturut-turut, kami menerima penghargaan Aditama yang bergengsi dan trofi untuk kinerja lingkungan terbaik. Peringkat PROPER kami adalah Biru yang diterima empat tahun secara berturut-turut, menunjukkan kepatuhan menyeluruh kepada seluruh peraturan lingkungan. Kami juga meresmikan sistem pengolahan air baru, yang dikenal sebagai *lamella gravity settler*, yang menggunakan teknologi khusus dengan kemampuan menyediakan mekanisme pembersihan air yang lebih efisien dari daerah pertambangan kami. Teknologi ini baru pertama kali ini diterapkan di tambang nikel di Indonesia.

In 2015, the Company continued to focus on health and safety. Our Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR) reduced year over year. In 2015 our TRIFR was 0.62, less than half the rate experienced five years ago of 1.62 in 2011. Despite this trend, PT Vale experienced a fatality during the year, an occurrence we deeply regret. We have conducted a thorough investigation, not just of the incident itself, but more broadly across our organization. This has resulted in several important changes and a refreshed approach to health and safety. The tragedy highlights the importance of our fatality prevention program, targeted specifically at areas and activities with risk of serious injuries. This program will continue in 2016.

In sustainability reporting, we were pleased to receive an award for public disclosure from the Sustainable Reports Awards. Furthermore, we have now committed to public reporting in line with G4 reporting guidelines from the Global Reporting Initiative (GRI). Our 2015 Sustainability Report will be our first report in accordance with these guidelines, and is part of our commitment to both sustainability and governance.

Despite adverse market conditions, we continued to demonstrate our commitment to environmental protection. Our environmental performance continues to be recognized as a benchmark in the nickel industry. For the second straight year, we were awarded the prestigious Aditama award and trophy for best environmental performance. Our PROPER rating was blue for the fourth straight year, indicating full compliance to all environmental regulations. We also commissioned a new water treatment system, known as a lamella gravity settler, which uses a novel technology to provide a more efficient cleaning mechanism for water from our mining areas. This is the first time this technology has been applied to nickel mines in Indonesia.

Di tahun 2015 kami melanjutkan pelaksanaan program-program sosial yang pertama kali dirumuskan pada 2013 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Kami telah dapat menunjukkan bahwa program sosial baru tersebut berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan lokal kami. Beberapa program utama yang dilaksanakan pada tahun 2015 mencakup program pertanian berkelanjutan, program pelatihan bagi pendidikan anak usia dini, pelayanan kesehatan bagi masyarakat pesisir, program bisnis rumah mandiri, dan penyediaan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang rentan. Rincian lebih lanjut diuraikan dalam laporan keberlanjutan kami yang terpisah.

PROSPEK USAHA

Kami percaya bahwa tahun 2016 masih akan menjadi tahun sulit bagi Perseroan dan bagi industri nikel secara keseluruhan. Namun, kami tetap optimis menghadapi tantangan ke depan ini karena selama lebih dari empat dekade kami beroperasi, kami telah membuktikan bahwa kami berhasil melalui beberapa tahun penuh tantangan dengan baik. Sebagai Perseroan, kami telah menunjukkan bahwa kami memahami tekanan dan realitas yang kami hadapi dan mampu meresponnya dengan cepat dan tepat.

Produksi

Setelah mencapai rekor produksi tertinggi pada tahun 2015, PT Vale bertujuan untuk mempertahankan produksi yang tinggi ini pada tahun 2016, terutama melalui perbaikan operasional yang berkelanjutan di pabrik pengolahan dan di pertambangan.

Pendapatan

Pendapatan dipengaruhi oleh produksi dan harga nikel. Sebagaimana disebutkan di atas, target produksi tetap tinggi, namun perkiraan harga di tahun 2016 akan stabil pada level yang cukup rendah. Walaupun pasokan nikel global menurun, kami tetap berhati-hati terhadap perkembangan pasar nikel, dan dengan demikian bekerja pada asumsi bahwa harga nikel akan tetap stabil pada level yang cukup rendah. Oleh karenanya, kami memperkirakan pendapatan tahun 2016 akan tetap tertekan.

In 2015, we continued the implementation of the new social programs that were first conceptualized in 2013 and implemented in 2014. We have now demonstrated that the new social program is sustainable and meets the needs of our local stakeholders. Some of the key programs implemented in 2015 include our sustainable agriculture program, training programs for early childhood educators, health services for coastal communities, self-sufficient home business program, and provision of health care access for vulnerable communities. Further details are provided in our separate sustainability report.

BUSINESS OUTLOOK

We believe that 2016 will be another hard year for our Company and for the nickel industry as a whole. We believe we can overcome it. For more than four decades we have been operating, we have proven we have successfully overcome some of the tough years. We have demonstrated as a company that we understand the pressures and realities we face, and that we can respond quickly and accordingly.

Production

After achieving a record-high production in 2015, PT Vale is aiming to maintain this high production in 2016, primarily through continued operational improvements in the process plant and in mining.

Revenues

Revenues are influenced by both production and nickel price. As mentioned above, production targets remain high, but the 2016 forecast is for a stable nickel price. While global nickel supply is slowing, we remain cautious on the nickel market, and thus are working on the assumption that the nickel price will remain flat at today's low level. Consequently, we expect revenues to face continued pressure in 2016.

Biaya

Harga komoditas turun secara signifikan selama tahun 2015, membawa penghematan biaya untuk PT Vale. Hal ini kemungkinan akan berlanjut di tahun 2016, memberikan kesempatan bagi Perusahaan untuk mempertahankan kinerja biaya tahun 2015 yang baik. Inisiatif pengurangan biaya lain akan terus dilakukan pada tahun 2016, setelah pelaksanaan yang sangat sukses di tahun 2015.

Proyek Pertumbuhan

Dengan pasar nikel yang masih di bawah tekanan berat, kami akan meninjau strategi pertumbuhan dengan sangat berhati-hati untuk memastikan kami bisa mendapatkan nilai investasi yang terbaik, dan pada saat yang bersamaan tetap memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan komitmen Kontrak Karya. Perusahaan tetap berkomitmen penuh untuk melaksanakan rencana pertumbuhan kami, namun sambil menunggu izin yang diperlukan, kami mempelajari cara-cara untuk menjadi lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan proyek-proyek untuk mendapatkan nilai yang terbaik bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Prospek Usaha Jangka Panjang

PT Vale tetap optimis bahwa prospek usaha akan menjadi lebih cerah lagi dalam jangka panjang. Pada 2015, kami telah membuktikan bahwa kami dapat mengatasi kondisi pasar yang sangat terpuruk. Dengan Kontrak Karya kami yang telah diubah pada tahun 2014, kami beroperasi sesuai dengan undang-undang pertambangan tahun 2009, yang memberikan kepastian jangka panjang untuk operasi kami. Kami juga memiliki potensi pertumbuhan yang besar, dan telah menunjukkan kemampuan kami untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi secara konsisten.

Secara ringkas, Direksi meyakini bahwa strategi usaha Perseroan saat ini sebagaimana telah dijelaskan di atas akan terus meningkatkan nilai Perseroan kepada pemegang saham.

Costs

Commodity prices fell significantly during 2015, which provided a cost saving for PT Vale. This will likely continue in 2016, providing an opportunity for the Company to maintain the good cost performance it delivered in 2015. Other cost reduction initiatives will continue in 2016, following a very successful year of implementation in 2015.

Growth Projects

With the nickel market still under severe pressure, we will carefully review our growth strategy to ensure we are able to get the best value from our investments, while still meeting our stakeholder expectations and the undertakings in our Contract of Work. The Company remains fully committed to our growth plans, however, while awaiting the necessary permits we are assessing ways to be more efficient and effective in executing projects to gain the best possible value for shareholders and other stakeholders.

Long Term Business Outlook

PT Vale remains optimistic that the business prospects are even brighter in the long-term. In 2015, we have proven that we can withstand even the most severe market conditions. With our Contract of Work having been amended in 2014, we are operating in line with the 2009 mining law, which brings long-term certainty to our operations. We also have great growth potential, and have demonstrated our ability to consistently attain high production rates.

In summary, the Board of Directors are confident that the current business strategies outlined above will continue to deliver value for all stakeholders.

Komposisi Anggota Direksi

Tidak ada perubahan Direksi pada tahun 2015. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, para pemegang saham memutuskan untuk menyetujui pengangkatan kembali Bapak Josimar Pires sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.

Kami sampaikan bahwa Bapak Josimar Pires telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Direksi Perseroan pada tanggal 4 Januari 2016 karena mendapat penugasan baru dari Vale S.A. Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi akan terdiri dari 3 Direktur hingga RUPST menerima pengunduran diri Bapak Josimar dan menunjuk Direktur baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Bapak Josimar Pires tersebut. Direksi menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan komitmen Bapak Josimar Pires selama masa baktinya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris, karyawan, pemegang saham, masyarakat sekitar lokasi operasi kami dan pemerintah pusat maupun daerah setempat serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung kami dalam menghadapi tantangan di tahun 2015.

Composition of the Board of Directors

There were no changes to the Board of Directors in 2015. During the Annual General Meeting of Shareholders, the shareholders voted to approve the re-appointment of Josimar Pires as Director of the Company, effective as of the close of the meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2017.

We reported that Mr. Josimar Pires has tendered his resignation from the Board of Directors of the Company on January 4, 2016 as he received a new assignment from Vale S.A. In accordance to the Company's Articles of Association, the Board of Directors consists of three directors until the AGMS accept Mr. Josimar's resignation and appoint new director to fill in the vacant position left by Mr. Josimar Pires. The Board of Directors would like to thank to Mr. Josimar Pires for his dedication and commitment during his tenure.

We would like to thank the Board of Commissioners, employees, shareholders, our operating sites, the central and regional governments and all parties that helped support us during the challenges of 2015.

7 Maret 2016
March 7, 2016



Nico Kanter
Presiden Direktur
President Director

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Hasil-hasil operasional Results of operations (dalam ribuan AS dollar kecuali jika dinyatakan lain) (in thousands of US dollars except as otherwise indicated)						Tahun berakhir 31 Desember 2015 Year ended December 31, 2015
Keterangan	2015	2014	2013	2012	2011	Description
Produksi nikel dalam matte (ton)	81,177	78,726	75,802	70,717	66,900	Nickel in matte production (tonnes)
Pengiriman nikel matte (ton)	82,907	79,477	77,198	71,379	67,916	Nickel matte deliveries (tonnes)
Harga realisasi rata-rata (dollar per ton)	9,526	13,061	11,939	13,552	18,296	Average realized price (dollar per metric tonne)
Ringkasan Informasi Keuangan						Summary of Financial Information
Pendapatan	789,745	1,038,082	921,638	967,327	1,242,555	Revenue
Beban pokok pendapatan	(671,389)	(731,420)	(781,744)	(800,622)	(727,194)	Cost of revenue
Laba bruto	118,356	306,662	139,894	166,705	515,361	Gross profit
Pendapatan lainnya	1,357	913	455	564	857	Other income
Beban usaha	(11,562)	(14,464)	(13,041)	(12,613)	(28,981)	Operating expenses
Beban lainnya	(28,400)	(43,666)	(57,171)	(47,748)	(29,527)	Other expenses
Laba usaha	79,751	249,445	70,137	106,908	457,710	Operating profit
Biaya keuangan	(9,923)	(12,514)	(14,678)	(15,485)	(5,388)	Finance costs
Laba sebelum pajak penghasilan	69,828	236,931	55,459	91,423	452,322	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(19,327)	(64,660)	(16,807)	(23,929)	(118,559)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	50,501	172,271	38,652	67,494	333,763	Profit for the year
Saham ditempatkan dan disetorkan (dalam ribuan)	9,936,339	9,936,339	9,936,339	9,936,339	9,936,339	Fully paid and issued shares (in thousands)
Jumlah saham yang diperdagangkan (dalam ribuan)	2,281,124	3,364,108	2,081,042	2,204,687	1,958,013	Number of shares traded (in thousands)
Modal kerja bersih	451,462	413,044	388,595	399,225	603,256	Net working capital
Rata-rata modal kerja tahunan	432,253	400,820	393,910	501,241	579,033	Average yearly working capital
Jumlah aset	2,289,161	2,334,190	2,281,119	2,333,080	2,421,362	Total assets
Belanja barang modal kas	106,390	76,846	140,487	146,965	208,651	Cash capital expenditures
Jumlah liabilitas	455,204	548,837	566,853	611,646	652,193	Total liabilities
Jumlah pinjaman bank bersih	146,077	182,596	219,115	255,634	292,153	Total net bank borrowings
Jumlah ekuitas	1,833,957	1,785,353	1,714,266	1,721,434	1,769,169	Total equity
EBITDA ^(a)	214,692	371,846	203,390	215,547	546,900	EBITDA ^(a)
Harga saham pada akhir tahun (Rp) (nilai penuh)	1,635	3,625	2,650	2,350	3,200	Share price at year-end (Rp) (full amount)
Kurs Rupiah/AS\$ pada akhir tahun (nilai penuh)	13,796	12,409	12,198	9,822	9,059	Rupiah/US\$ mid rate at year-end (full amount)
Karyawan tetap pada akhir tahun (orang)	3,107	3,122	3,183	3,161	3,210	Permanent employees at year-end (people)
Rasio Profitabilitas						Profitability Ratios
Laba bruto/pendapatan	0.15	0.30	0.15	0.17	0.41	Gross profit/revenue
Laba tahun berjalan/pendapatan	0.06	0.17	0.04	0.07	0.27	Profit for the year/revenue
Laba tahun berjalan/jumlah aset	0.02	0.07	0.02	0.03	0.14	Profit for the year/total assets
Laba tahun berjalan/ekuitas	0.03	0.10	0.02	0.04	0.19	Profit for the year/equity
Tingkat pengembalian rata-rata modal (%) ^(b)	4%	12%	3%	5%	23%	Return on average capital employed (%) ^(b)

Hasil-hasil operasional Results of operations (dalam ribuan AS dollar kecuali jika dinyatakan lain) (in thousands of US dollars except as otherwise indicated)						Tahun berakhir 31 Desember 2015 Year ended December 31, 2015
Keterangan	2015	2014	2013	2012	2011	Description
Laba per saham (AS\$/saham)	0.005	0.017	0.004	0.007	0.034	Earnings per share (US\$/share)
Rasio Likuiditas						Liquidity Ratios
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	4.04	2.98	3.30	3.41	4.40	Current assets/current liabilities
(Aset lancar - liabilitas jangka pendek)/ Jumlah aset	0.20	0.18	0.17	0.17	0.25	(Current assets - current liabilities)/ Total assets
Analisa Struktur Modal dan Rasio Hutang						Capital Structure Analysis and Financial Leverage Ratios
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0.25	0.31	0.33	0.36	0.37	Total liabilities/total equity
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0.20	0.24	0.25	0.26	0.27	Total liabilities/total assets
Jumlah pinjaman bank bersih/jumlah aset	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	Total net bank borrowings/total assets
Jumlah pinjaman bank bersih/jumlah ekuitas	0.08	0.10	0.13	0.15	0.17	Total net bank borrowings/total equity
Jumlah pinjaman bank bersih/EBITDA	0.68	0.49	1.08	1.19	0.53	Total net bank borrowings/EBITDA
Jumlah pinjaman bank bersih/jumlah nilai perusahaan	0.13	0.07	0.10	0.10	0.09	Total net bank borrowings/enterprise value
Arus kas dari operasi/jumlah pinjaman bank	0.92	1.77	1.21	0.31	1.10	Operating cash flow/total net bank borrowings
Pinjaman bank bersih/(arus kas dari operasi dikurangi pembayaran dividen selama tahun berjalan)	1.09	0.82	1.01	(8.17)	3.74	Total net bank / (operating cash flow minus dividends paid during the year)
Rasio Dividen						Dividend Ratios
Dividen/sumber dana untuk pembayaran dividen	N/A	0.58	1.28	1.64	0.73	Dividends/profits for the year
Dividen per saham/harga saham	N/A	0.03	0.02	0.05	0.07	Dividends per share/share price
Cash Flow Coverage Ratios						Cash Flow Coverage Ratios
Arus kas dari operasi/penjualan	0.17	0.31	0.29	0.08	0.26	Operating cash flow/revenue
Arus kas dari operasi/belanja barang modal	1.22	4.09	1.93	0.54	1.54	Operating cash flow/capital expenditures
Arus kas dari operasi/dividen yang diumumkan untuk tahun berjalan	N/A	3.23	10.62	3.16	1.74	Operating cash flow/dividends declared for the respective year
Capital Market Analysis Ratios						Capital Market Analysis Ratios
Kapitalisasi pasar (AS\$ juta) ^(c)	1,177	2,903	2,159	2,377	3,510	Market capitalization (US\$ million) ^(c)
Nilai perusahaan (AS\$ juta) ^(c)	1,129	2,783	2,178	2,461	3,403	Enterprise value (US\$ million) ^(c)
Harga terhadap nilai buku (kali) ^(d)	0.64	1.63	1.26	1.38	1.98	Price to book value (times) ^(d)
Rasio harga saham terhadap laba Perseroan (kali)	23	17	56	35	10	Price to earning ratio (times)

(a) EBITDA = laba sebelum pajak + beban keuangan + penyusutan, deplesi dan amortisasi + selisih kurs. Sejak tahun 2011, biaya keuangan termasuk beban akresi untuk provisi penghentian peroperasian aset

(b) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi dengan rata-rata modal tahunan yang digunakan (total ekuitas+total hutang)

(c) Nilai perusahaan = kapitalisasi pasar + jumlah hutang - kas dan setara kas; Kapitalisasi pasar = jumlah saham x harga saham (Rp)/nilai tukar

(d) Harga saham akhir tahun dalam dollar dibagi ekuitas per saham (jumlah ekuitas/jumlah saham yang diterbitkan)

(a) EBITDA = Profit before tax + finance costs + depreciation, depletion and amortization + currency translation adjustments. Starting in 2011, finance costs included the accretion expenses for asset retirement provisions.

(b) Profits before income tax divided by yearly average capital employed (total equity+total debt)

(c) Enterprise value = market capitalization + total debt - cash and cash equivalents; Market capitalization = number of shares x share price (Rp)/exchange rate

(d) Share price at year-end in dollars divided by equity per share (total equity/total issued shares)

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis



Daftar Isi Contents



Tinjauan Operasi Perusahaan The Company's Operating Review	116	Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Subsequent to the Accountant's Report Date	157
Tinjauan Usaha ¹ Ulasan Pasar Nikel Pada 2015 Business Review ¹ Review of the Nickel Market in 2015	117	Pandangan Tahun 2016 2016 Outlook	157
Posisi Keuangan Financial Position	134	Perbandingan Antara Target dengan Pencapaian Tahun 2015 Comparison of 2015 Target to Actual	159
Hasil dan Rasio Keuangan Financial Returns and Ratios	148	Target Tahun 2016 2016 Target	160
Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal Capital Structure and Capital Structure Policy	152	Aspek Pemasaran atas Produk Perseroan Marketing Aspect to the Company's Product	160
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Investment	154	Kebijakan Dividen Dividend Policy	161
Investasi Barang Modal dan Berkelanjutan Capital and Sustaining Investments	154	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Initial Public Offering ("IPO") Funds	162



Fasilitas Power Switch Yard untuk distribusi listrik
Power Switch Yard Facility for power distribution

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition or Debt/Capital Restructuring
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transaction which Contains Conflict of Interest and/or Affiliate Transaction

Perubahan Peraturan Perundangundangan yang Signifikan
Significant Changes to Regulations

Peraturan Kementerian ESDM Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
MEMR Regulation on Evaluation Procedures for Issuance of Mineral and Coal Mining Business Licences

162

Peraturan Kementerian ESDM Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha dan Daerah Tertentu

MEMR Regulation on Income Tax Facility for Capital Investment in Certain Business and Area

169

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

Informasi Keuangan yang Mengandung Peristiwa Bersifat Langka dan Luar Biasa

173

Financial Information which Contains an Extraordinary and Rare Event

175

Proyek-proyek Pengembangan
Projects Development

177

177

178

180

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis



Pabrik Pengolahan kami di Sorowako
Our Processing Plant in Sorowako

Pembahasan dan Analisa Manajemen mengenai Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale atau Perseroan) dan catatan terkait dalam Laporan Tahunan ini, yang dinyatakan dalam dolar AS dan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

TINJAUAN OPERASI PERUSAHAAN

Perseroan beroperasi hanya dalam satu segmen usaha dan geografis, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia.

Bisnis Perseroan sangat dipengaruhi oleh harga nikel, karena pendapatan Perseroan terkait langsung dengan harga komoditas nikel di London Metal Exchange ("LME"). Melemahnya harga nikel sepanjang tahun 2015 memberikan tantangan dan tekanan pada pendapatan Perseroan.

The following Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations should be read in conjunction with the PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale or the Company) financial statements and related notes included in this Annual Report, which are expressed in US dollars and prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

THE COMPANY'S OPERATING REVIEW

The Company operates in only one business segment in one geography: nickel mining and processing in Indonesia.

The nickel price is fundamental to the Company's operations as our revenue potential is directly connected to the London Metal Exchange ("LME") commodity price for nickel. A weakening nickel price in 2015 placed significant pressure and challenges on revenue.

Namun demikian, tahun 2015 merupakan tahun yang luar biasa bagi PT Vale. Penjualan Perseroan mencapai 82.907 ton nikel matte, 4% lebih tinggi dari tahun 2014 dan mencatat pencapaian produksi tertinggi sebesar 81.177 ton, melampaui rekor sebelumnya yaitu 78.726 ton pada tahun 2014.

TINJAUAN USAHA¹ ULASAN PASAR NIKEL PADA 2015

Nikel adalah logam yang diperjualbelikan dan tercatat di LME dan Shanghai Futures Exchange ("SHFE"). Sebagian besar produk nikel dihargai berdasarkan diskon atau premium atas harga LME, tergantung pada fisik produk nikel dan karakteristik teknis. Produk Perseroan dikenal sebagai nikel "primer" di dalam industri, yaitu nikel yang diproduksi dari bijih nikel sebagai bahan utama (dibandingkan dengan nikel "sekunder" yang merupakan daur ulang dari material yang mengandung nikel).

Pasar nikel global sangat kompetitif. Kompetisi pada pasar nikel terutama didasari oleh kualitas, reabilitas pasokan dan harga. Produksi baja nirkarat adalah penggerak utama permintaan nikel global, yang secara rata-rata mewakili 67% konsumsi nikel global. Produsen baja nirkarat dapat menggunakan produk nikel dengan rentang kandungan nikel yang luas, termasuk nikel "sekunder". Pilihan penggunaan nikel primer dan nikel sekunder pada umumnya bergantung pada harga relatif dan ketersediaan.

Pada tahun 2015, harga nikel mengalami penurunan dan persediaan nikel meningkat karena melemahnya permintaan di China yang mengakibatkan turunnya produksi baja nirkarat.

Meskipun pasar nikel tidak menunjukkan perbaikan pada tahun 2015, telah terdapat contoh nyata tambang yang ditutup, dimana tambang tersebut telah mencapai akhir masa produktif.

Pasokan nikel mengalami penurunan pada tahun 2015, terutama produksi Nickel Pig Iron ("NPI") China. NPI adalah produk nikel berkadar nikel rendah yang dibuat di China yang berasal dari bijih lateritic yang diimpor, dan sangat cocok untuk digunakan dalam produksi baja

Nevertheless, 2015 was a remarkable year for PT Vale. The Company sales achieved 82,907 tonnes of nickel in matte, a 4% increase over 2014 and achieved record production of 81,177 tonnes, surpassing the previous record of 78,726 tonnes set in 2014.

BUSINESS REVIEW¹ REVIEW OF THE NICKEL MARKET IN 2015

Nickel is an exchange-traded metal, listed on the LME and on the Shanghai Futures Exchange ("SHFE"). Most nickel products are priced according to a discount or premium to the LME price, depending primarily on the nickel product's physical and technical characteristics. Our finished nickel products represent what is known in the industry as "primary" nickel, meaning nickel produced principally from nickel ores (as opposed to "secondary" nickel, which is recovered from recycled nickel-containing material).

The global nickel market is highly competitive. Competition in the nickel market is based primarily on quality, reliability of supply and price. Stainless steel production is a major driver of global nickel demand, which represents, on average, 67% of global nickel consumption. Stainless steel producers can use nickel products with a wide range of nickel content, including "secondary" nickel. The choice between primary and secondary nickel is largely based on their relative price and availability.

In 2015, nickel prices declined and exchange inventories increased due to weakening demand in China which resulted in a decline in stainless steel production.

Although the nickel market did not improve in 2015, the industry did see instances of mine closures, as mines reached the end of their productive lives.

Nickel supply in 2015 declined, particularly Chinese Nickel Pig Iron (NPI) production. NPI is a low-grade nickel product made in China from imported lateritic ores, and is primarily suited to use in stainless steel production. Specifically, Chinese NPI production

¹ Sumber/source: Macquarie, Wood Mackenzie, The Wall Street Journal, Metal Bulletin

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

nirkarat. Secara spesifik, produksi NPI China turun dari 449 kiloton pada tahun 2014 menjadi 361 kiloton pada tahun 2015. Penyebab turunnya produksi NPI terkait dengan dua hal yaitu tekanan harga serta rendahnya kualitas bijih Filipina yang banyak diimpor ke China sejak Pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel.

declined from 449 kilotonnes in 2014 to 361 kilotonnes in 2015. The reason behind NPI production decline are related to both price as well as lower quality Philippine ore forms the majority of ore imports into China since the Government of Indonesia banned nickel ore exports.

HARGA DAN PERSEDIAAN NIKEL

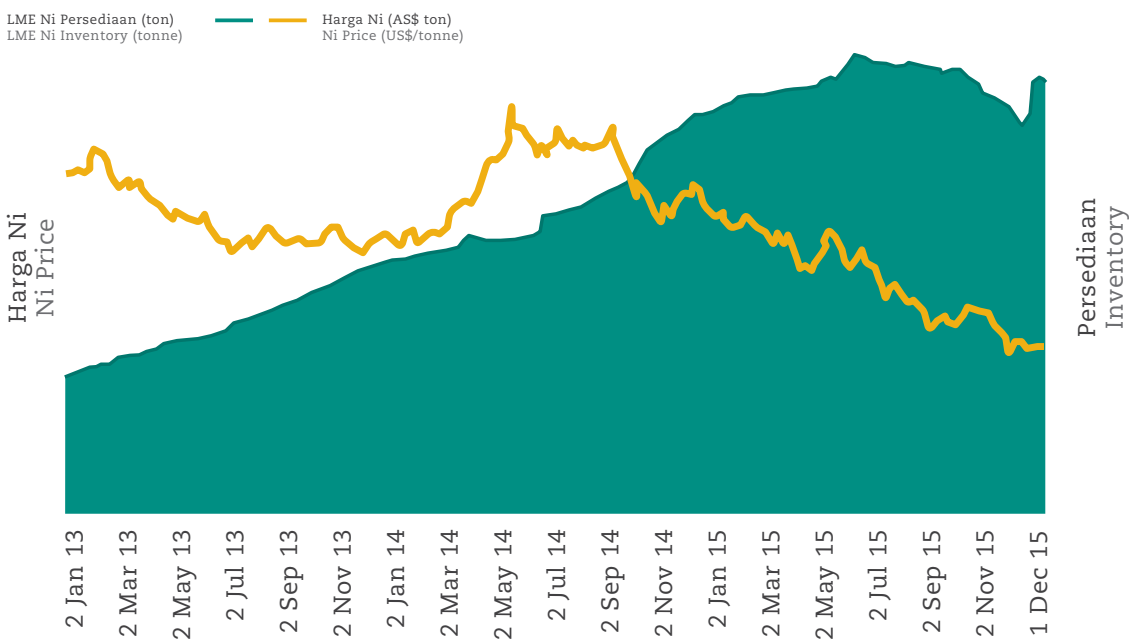
Harga rata-rata nikel LME pada tahun 2015 sebesar AS\$11.807 per ton, 30% lebih rendah dari tahun 2014 yang sebesar AS\$16.867 per ton. Harga nikel LME mencapai titik terendahnya di level AS\$8.160 per ton pada bulan November 2015. Persediaan LME dan SHFE ditutup pada akhir tahun 2015, harga penutupan nikel LME tahun 2015 berada pada tingkat harga AS\$8.665 per ton di level 493.041 ton (dimana 444.702 ton-nya merupakan persediaan LME yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 yang hanya sebesar 412.702 ton). Kenaikan persediaan nikel LME dan penurunan harga nikel LME dipicu oleh melambannya pertumbuhan akan permintaan nikel. Melambatnya perekonomian China menjadi penyebab utama rendahnya permintaan nikel.

NICKEL PRICE AND STOCKS

The LME cash nickel price averaged US\$11,807 per metric ton in 2015, a decrease of 30% from the 2014 level of US\$16,867 per tonne. The LME nickel price reached its lowest point of US\$8,160 per tonne in November 2015. The LME nickel price closed 2015 at the level of US\$8,665 per tonne. LME and SHFE stocks finished the year at 493,041 tonnes (of which 444,702 tonnes was on the LME, an increase from 412,702 tonnes at the end of 2014). The increase in LME nickel stocks and the decrease in the LME nickel price were triggered by lower growth of nickel demand. The main contributor to sluggish nickel demand growth was the economic slowdown in China.

Harga dan Persediaan LME (2013 – 2015)

LME Price and Stock (2013 – 2015)



82,907

Rekor pengiriman nikel dalam matte tertinggi pada tahun 2015; kenaikan sebesar 4% dari 2014.

The highest nickel matte deliveries ever in 2015, an increase of 4% from 2014.

PRODUKSI DAN PENGIRIMAN

Produksi nikel dalam matte tahun 2015 sebesar 81.177 ton merupakan rekor produksi tertinggi dalam sejarah Perseroan. Dibandingkan produksi tahun 2014 sebesar 78.726 ton, terdapat peningkatan 2.451 ton atau sebesar 3%.

Kenaikan produksi ini disebabkan karena peningkatan pengoperasian tanur listrik yang menghasilkan calcine throughput yang lebih tinggi, serta lebih tingginya kadar nikel yang diproses.

Pengiriman nikel matte, yang juga merupakan rekor tertinggi, naik menjadi 82.907 ton pada 2015 dari 79.477 ton pada 2014; atau lebih tinggi sebesar 4%.

Silakan lihat tabel produksi dan pengiriman di bawah ini.

Produksi dan pengiriman	2015	2014	Variance (\$)	Variance %	Production and deliveries
Produksi nikel dalam matte (ton)	81,177	78,726	2,451	3%	Nickel in matte production (tonne)
Pengiriman nikel matte (ton)	82,907	79,477	3,430	4%	Nickel matte deliveries (tonne)
Harga realisasi rata-rata (AS\$/ton)	9,526	13,061	(3,535)	-27%	Average realized price (US\$/tonne)

PENDAPATAN

Pendapatan tahun 2015 menurun menjadi AS\$789,7 juta AS\$248,3 juta atau 24% lebih rendah dari pendapatan tahun 2014 yang sebesar AS\$1.038,1 juta. Harga realisasi rata-rata nikel Perseroan pada tahun 2015 adalah AS\$9.526 per ton, turun 27% dari AS\$13.061 per ton di tahun 2014.

Penurunan ini karena harga nikel di LME yang turun bahkan terendah dalam 13 tahun terakhir.

Berikut adalah tabel yang memuat Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun 2015 dan 2014.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2015	2014	Variance (\$)	Variance %	Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
(Dalam ribuan AS\$)					(US\$ in thousands)
Pendapatan	789,745	1,038,082	(248,337)	-24%	Revenue
Beban pokok pendapatan	671,389	731,420	(60,031)	-8%	Cost of revenue
Laba bruto	118,356	306,662	(188,306)	-61%	Gross profit
Pendapatan lainnya	(1,357)	(913)	(444)	49%	Other income
Beban usaha	11,562	14,464	(2,902)	-20%	Operating expenses
Beban lainnya	28,400	43,666	(15,266)	-35%	Other expenses
Laba usaha	79,751	249,445	(169,694)	-68%	Operating profit
Biaya keuangan	9,923	12,514	(2,591)	-21%	Finance costs
Laba sebelum pajak penghasilan	69,828	236,931	(167,103)	-71%	Profit before income tax

PRODUCTION AND DELIVERIES

Nickel in matte production in 2015 reached 81,177 tonnes, the highest production record in the Company's history. It represents a 2,451 tonnes or 3% increase over the 2014 production of 78,726 tonnes.

The increased production was attributable in large part to improve operation of the electric furnaces resulting in higher calcine throughput with additional benefits provided by higher nickel grades.

Nickel matte deliveries were also the highest ever, rising to 82,907 metric tonnes in 2015 from 79,477 metric tonnes in 2014, an increase of 4%.

Please refer to the table below for production and deliveries.

REVENUE

Our 2015 revenue decreased to US\$789.7 million, down US\$248.3 million or 24% from 2014 revenue of US\$1,038.1 million. The Company's average realized price in 2015 was US\$9,526 per tonne, down 27% from US\$13,061 per tonne in 2014.

The decrease was mainly driven by the decrease in nickel price on the LME, which was the lowest in the last 13 years.

The following table includes the Company's Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for 2015 and 2014.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2015	2014	Variance (\$)	Variance %	Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Beban pajak penghasilan	19,327	64,660	(45,333)	-70%	Income tax expense
Laba tahun berjalan	50,501	172,271	(121,770)	-71%	Profit for the year
Rugi komprehensif lain	1,897	1,125	772	69%	Total other comprehensive loss
Laba komprehensif tahun berjalan	48,604	171,146	(122,542)	-72%	Total comprehensive income for the year
EBITDA	214,692	371,846	(157,154)	-42%	EBITDA

BEBAN POKOK PENDAPATAN

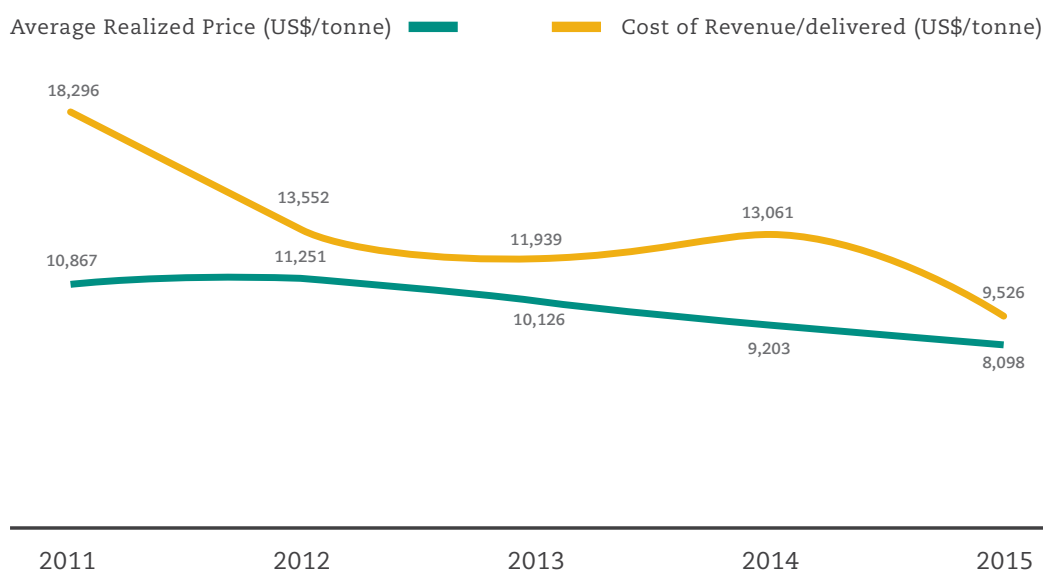
Beban pokok pendapatan Perseroan turun 8%, dari AS\$731,4 juta pada tahun 2014 menjadi AS\$671,4 juta di tahun 2015. Masih terdapat selisih positif antara harga realisasi rata-rata dengan beban pokok pendapatan untuk setiap ton nikel dalam matte yang diproduksi Perseroan sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut. Dari grafik yang sama terlihat bahwa beban pokok pendapatan per unit penjualan Perseroan semakin turun sejak 5 tahun terakhir.

Beban pokok pendapatan untuk setiap metrik ton nikel dalam matte yang diproduksi Perseroan tahun ini merupakan rekor terendah dalam kurun waktu 5 tahun. Pencapaian ini dimungkinkan karena keberhasilan Perseroan dalam mengeksekusi strategi pengendalian biaya yang ketat. Menjaga efisiensi biaya secara terus menerus dan berkelanjutan selalu menjadi bagian dari strategi Perseroan.

COST OF REVENUE

The Company's cost of revenue decreased by 8%, from US\$731.4 million in 2014 to US\$671.4 million in 2015. There is still a positive difference between the average realized price and the cost of revenue for each metric tonnes of nickel in matte produced by the Company, as illustrated in the graph below. The same graph shows that the Company's cost of revenue per unit of sales has decreased considerably in the last five years.

The cost of revenue for each tonne of nickel in matte produced by the Company this year is the lowest in 5 years. This is the result of the successful execution of our strategy to control costs tightly. It has always been in our strategy to be cost efficient continuously and sustainably.



Beban pokok pendapatan untuk setiap metrik ton nikel matte yang dijual Perseroan tahun ini merupakan yang terendah sejak 2011.

The cost of revenue for each tonne of nickel matte delivered this year is the lowest since 2011.

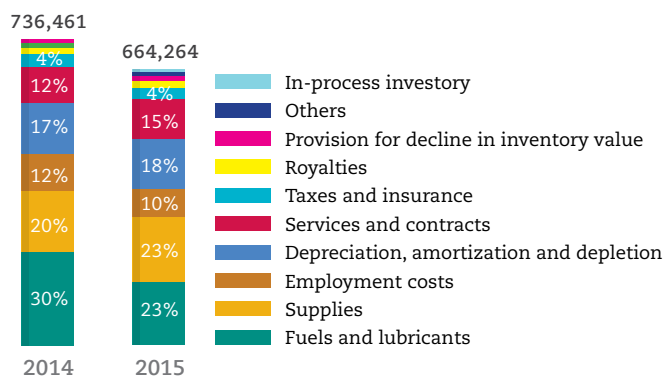
Beban Pokok Pendapatan	2015	2014	Variance (\$)	Variance %	Cost of Revenue
(Dalam ribuan A\$)					US\$ in thousands)
Bahan bakar minyak dan pelumas	153,043	223,070	(70,027)	-31%	Fuels and lubricants
Bahan pembantu	154,740	150,515	4,225	3%	Supplies
Penyusutan, amortasi dan deplesi	121,368	122,153	(785)	-1%	Depreciation, amortization and depletion
Biaya karyawan	67,498	88,798	(21,300)	-24%	Employment costs
Jasa dan kontrak	97,773	89,521	8,252	9%	Services and contracts
Pajak dan asuransi	26,271	27,645	(1,374)	-5%	Taxes and insurance
Royalti	15,795	15,784	11	0%	Royalties
Penyisihan penurunan nilai persediaan	12,940	-	12,940	-	Provision for decline in inventory value
Lainnya	10,621	14,112	(3,431)	-25%	Others
Perubahan persediaan dalam proses	4,215	4,863	(648)	-13%	Change in in-process inventories
Beban pokok produksi	664,264	736,461	(72,197)	-10%	Cost of production
Perubahan persediaan barang jadi	7,125	(5,041)	12,166	-241%	Change in finished goods inventories
Beban pokok pendapatan	671,389	731,420	(60,031)	-8%	Cost of revenue

Komponen biaya terbesar Perseroan terdiri dari biaya bahan bakar, bahan pembantu, depresiasi, amortisasi dan deplesi, jasa dan kontrak serta pembayaran gaji dan pemberian manfaat karyawan. Biaya-biaya ini mewakili hampir 90% dari total beban pokok produksi Perseroan di tahun 2015 dan 2014.

Our most significant costs are fuels, supplies, depreciation, amortization and depletion, services and contracts, and employee payments and benefits. These cost comprise close to 90% of our total production costs in 2015 and 2014.

Beban Pokok Produksi

Cost of Production



Silakan lihat pembahasan Beban Pokok Produksi berikut ini untuk penjelasan lebih lanjut dari kecenderungan tingkat biaya selama 2015.

Please refer to the Cost of Production discussion below for further explanation of the trends in costs during 2015.

BEBAN POKOK PRODUKSI

Beban pokok produksi mengalami penurunan sebesar A\$72,2 juta atau 10% menjadi A\$664,3 juta pada tahun 2015 dari A\$736,5 juta pada tahun 2014. Penurunan beban pokok produksi ini terutama disebabkan karena penurunan biaya bahan bakar minyak dan karyawan.

COST OF PRODUCTION

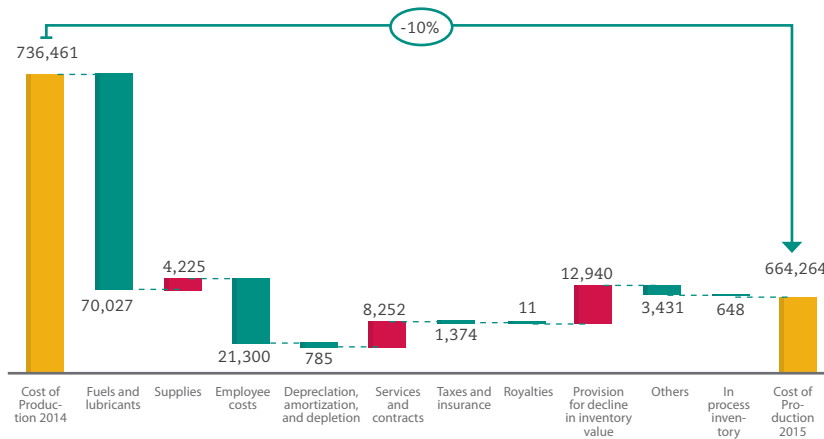
The cost of production fell by US\$72.2 million or 10% to US\$664.3 million in 2015 from US\$736.5 million in 2014. The decrease was mainly due to lower fuel and employment costs.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Pergerakan biaya produksi berdasarkan kategori dari tahun 2014 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut (dalam ribuan AS\$):

The changes in production costs from 2014 to 2015, by category are as follows (US\$ in thousands):



Bahan bakar minyak. Biaya bahan bakar minyak merupakan komponen terbesar beban pokok produksi, mewakili sekitar 23% dari total beban pokok produksi pada tahun 2015, turun dari 30% pada tahun 2014.

Fuel. Fuel is the largest component of the production cost, representing approximately 23% of the total production cost in 2015, down from 30% in 2014.

Minyak bakar bersulfur tinggi (High Sulphur Fuel Oil – HSFO) terutama digunakan untuk pengoperasian pabrik pengolahan dan minyak diesel (HSD) digunakan untuk pengoperasian armada tambang dan pembangkit listrik termal.

High Sulphur Fuel Oil (“HSFO”) is primarily used to operate our processing plant, and High Speed Diesel (HSD) is used to fuel our mining fleet and thermal power generators.

HSFO berkontribusi sekitar 66% dari biaya bahan bakar pada tahun 2015, mengalami penurunan secara signifikan dari 73% pada tahun 2014. Sementara itu, HSD berkontribusi sekitar 31% dari biaya bahan bakar pada tahun 2015, dibandingkan dengan 25% pada tahun 2014.

HSFO accounted for about 66% of our fuel cost in 2015, a significant decrease from 73% in 2014. Meanwhile, HSD accounted for approximately 31% of the fuel cost in 2015, compared to 25% in 2014.

Sisanya 3% adalah dari bahan bakar lainnya pada tahun 2015 dan 2% pada tahun 2014.

The remaining 3% is from other fuels in 2015. This compares to 2% from other fuels in 2014.

Biaya HSFO pada tahun 2015 menurun 38% atau AS\$60,7 juta dibandingkan dengan tahun 2014 terutama disebabkan karena lebih rendahnya harga rata-rata HSFO per barel dari AS\$58,40 di 2015 dibandingkan dengan harga rata-rata AS\$98,45 per barel pada 2014.

HSFO costs decreased by 38% or US\$60.7 million in 2015 compared to 2014 with an average HSFO price of US\$58.40 per barrel, down from the average price of US\$98.45 per barrel in 2014.

Harga HSFO Perseroan didasarkan pada indeks Platts di Singapura.

The Company’s HSFO price is based on the Platts index in Singapore.

Konsumsi HSFO pada tahun 2015 sebesar 1,7 juta barel, lebih tinggi 0,09 juta barel dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi dan konsumsi HSFO per ton nikel dari 20,89 barel pada tahun 2014 menjadi 21,34 barel di 2015.

Our HSFO consumption was 1.7 million barrels in 2015, higher by 0.09 million barrels over 2014. This was due to increase of production and HSFO consumption per tonne nickel from 20.89 barrels per tonne of nickel produced in 2014 to 21.34 barrels per tonne in 2015.

Peningkatan konsumsi HSFO per ton nikel dikarenakan program "Kiln enrichment" yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas operasi pabrik yang pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan produksi nikel.

The higher on HSFO consumption per tonne nickel was because of "Kiln enrichment" program that aims in improving stabilization of operation processing plant and at the end contributed to increased nickel production.

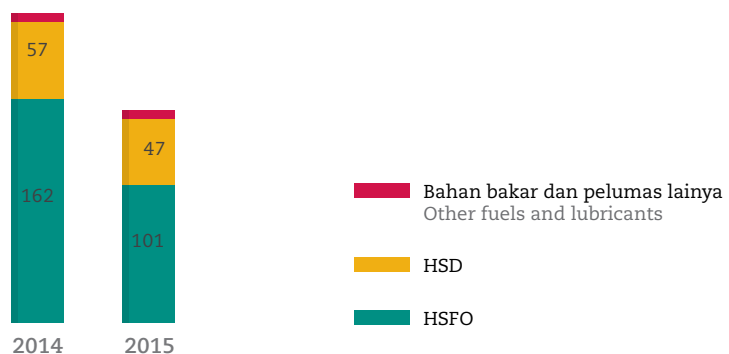
Biaya HSD juga mengalami penurunan 17% di 2015 dibanding 2014, terutama disebabkan oleh penurunan harga rata-rata HSD dari AS\$0,89 per liter di 2014 menjadi AS\$0,54 per liter di 2015. Namun demikian, konsumsi HSD meningkat menjadi 86,6 juta liter di 2015 dari 63,3 juta liter di 2014 terutama disebabkan oleh lebih tingginya konsumsi HSD oleh alat tambang. Selain itu penggunaan pembangkit listrik termal sebagai akibat dari turunnya ketinggian air danau yang berdampak pada turunnya pasokan listrik dari PLTA menjelang akhir tahun juga menjadi penyebab kenaikan konsumsi HSD.

HSD costs also decreased by 17% in 2015 compared to 2014, mainly due to a decrease in the average HSD price from US\$0.89 per litre in 2014 to US\$0.54 per litre in 2015. However, HSD consumption increased from 63.3 million litres in 2014 to 86.6 million litres in 2015 mainly due to higher mining fleet consumption. In addition, towards the end of 2015, HSD consumption was significantly increased to generate thermal power to compensate for lower water levels in the lake contributing to lower power generation from the hydro-dams.

Biaya bahan bakar dan pelumas

Fuels and lubricants cost

(dalam jutaan AS\$) (US\$, in million)

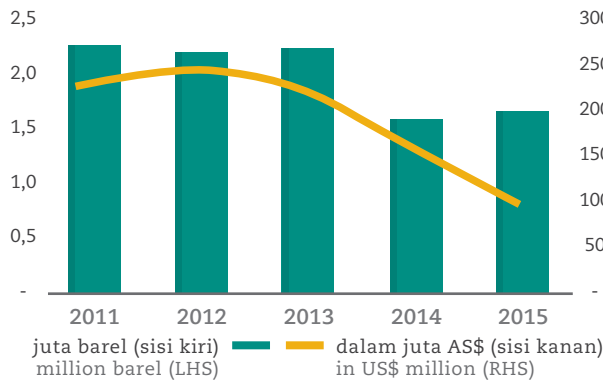


Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

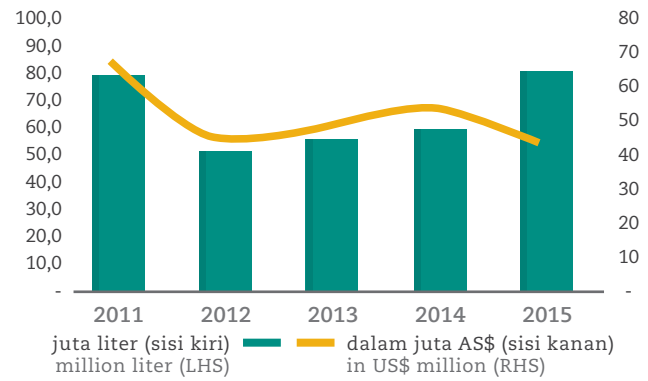
Biaya dan konsumsi HSFO

HSFO costs and consumption



Biaya dan konsumsi HSD

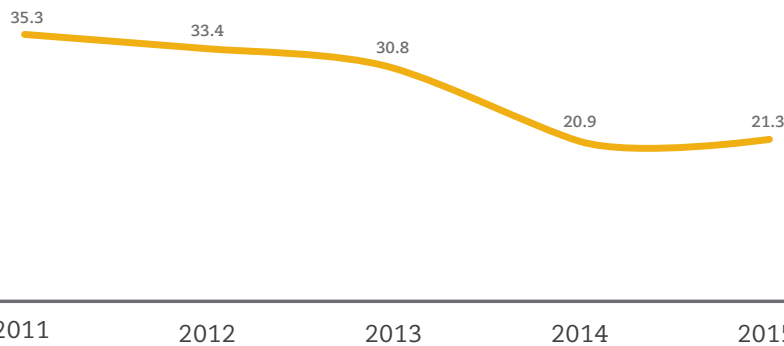
HSD costs and consumption



Konsumsi HSFO

HSFO Consumption

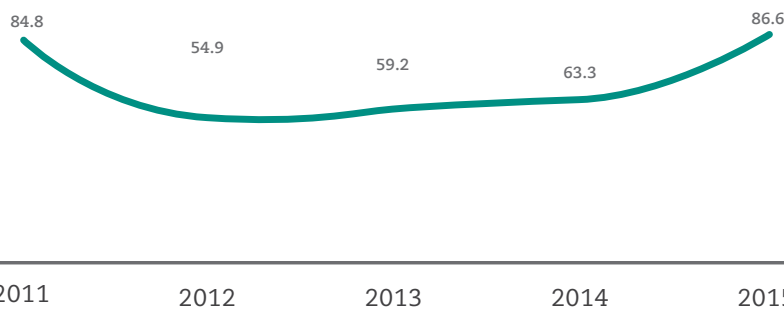
barrel per ton produksi nikel matte/barrel per ton nickel in matte produced



Konsumsi HSD

HSD Consumption

liter per ton nikel matte produksi/liter per ton nickel in matte produced



Biaya karyawan. Biaya ini menyumbang sekitar 10% dari total beban pokok produksi pada tahun 2015. Biaya karyawan mengalami penurunan sebesar 24% atau AS\$21,3 juta lebih rendah di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014.

Penurunan biaya karyawan ini terutama disebabkan tidak adanya akrual insentif bonus yang dibukukan terkait dengan kinerja Perseroan di tahun 2015 sebagai dampak negatif merosotnya harga nikel. Keputusan ini diambil oleh manajemen setelah menganalisa kinerja Perseroan pada tahun 2015. Selain itu melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah turut menekan biaya karyawan di tahun 2015.

Walaupun tingkat produksi lebih tinggi, jumlah karyawan pada tahun 2015 relatif konsisten pada tingkat yang sama seperti 2014.

Peningkatan produktivitas karyawan tersebut merupakan hasil dari penerapan disiplin yang efektif dalam mengelola jumlah karyawan.

Hal-hal lain yang juga mempengaruhi komponen biaya karyawan adalah perawatan medis di luar area dan lembur.

Pajak dan asuransi. Biaya pajak dan asuransi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5% atau AS\$1,4 juta dari tahun 2014, terutama disebabkan karena lebih rendahnya pembayaran retribusi air (water levy) ke pemerintah, sebagai dampak dari rendahnya harga nikel di tahun 2015.

Royalti. Biaya royalti di tahun 2015 konsisten dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh rendahnya harga nikel pada tahun 2015, walaupun volume penjualan meningkat. Tarif royalti baru berdasarkan KK tahun 2014 telah diterapkan sepenuhnya di tahun 2015. Sementara di tahun 2014, untuk periode bulan Januari – Mei 2014, royalti masih dibayarkan berdasarkan formula AS\$78/ton penjualan.

Sesuai dengan KK tahun 2014, tingkat royalti yang disepakati adalah 2% dari penjualan dan akan meningkat menjadi 3% jika harga rata-rata LME nikel lebih besar atau sama dengan AS\$21.000/ton pada bulan sebelumnya.

Employment cost. Employment costs accounted for approximately 10% of total production costs in 2015. Employment costs decreased by 24% or US\$21.3 million in 2015 compared to 2014.

The decrease in employment costs was primarily due to no bonus being accrued in 2015 as a result of the financial performance of the Company that was negatively impacted by weaker nickel prices. This decision was taken by management after reviewing the Company's performance in 2015. The decrease in employment costs was further aided by the depreciation of the Rupiah against the US Dollar.

Despite the higher production, employment levels in 2015 remained relatively consistent with levels in 2014.

This increase in employee productivity is a result of effective discipline in managing headcount.

Employment costs were also impacted by off-site medical treatment and overtime.

Taxes and insurance. Taxes and insurance in 2015 decreased by 5% or US\$1.4 million from 2014, mainly due to the lower water levy payment to the government, as a result of lower nickel prices in 2015.

Royalties. Royalty expenses in 2015 were consistent with 2014. This was due to lower nickel price in 2015 that offset the increase in sales volume. The new royalty formula based on 2014 CoW has been fully implemented in 2015. While in 2014, for the period of January to May 2014, royalty was still paid based on US\$78/tonne shipments.

In accordance with the 2014 CoW, the agreed royalty rate is 2% of sales and will increase to 3% if the average price of LME nickel is greater than or equal to US\$21,000/tonne in the previous month.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Kesepakatan pada amandemen Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia mengharuskan Perseroan untuk membayar royalti yang didasarkan pada persentase dari penjualan.

Bahan Pembantu. Porsi biaya bahan pembantu sekitar 23% dari total beban pokok produksi pada tahun 2015 dan merupakan komponen biaya produksi terbesar (2014: terbesar kedua). Komponen utama dari biaya bahan pembantu adalah bahan baku komoditas curah (yaitu batubara, sulfur, pasta elektroda dan silika), suku cadang, ban dan peralatan pembantu mekanikal. Biaya bahan pembantu pada tahun 2015 meningkat sebesar 3% atau AS\$4,2 juta dari tahun 2014.

Kenaikan biaya bahan pembantu pada tahun 2015 terutama diakibatkan peningkatan biaya suku cadang dan peralatan pembantu mekanikal yang terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan pemeliharaan alat tambang dan perlengkapan lain yang jatuh tempo untuk dilakukan pemeliharaan pada tahun 2015. Kenaikan biaya bahan pembantu ini senilai AS\$11,5 juta. Selain itu, terdapat kenaikan yang disebabkan karena lebih tingginya harga pasta elektroda dan sulfur dengan total nilai kurang lebih sebesar AS\$2,2 juta.

Kenaikan tersebut diatas diimbangi dengan penurunan bahan baku komoditas curah sebesar AS\$7,3 juta pada tahun 2015 yang terutama disebabkan oleh penurunan harga batubara, serta penurunan harga dan volume silika.

Depresiasi, amortisasi dan depleksi.

Depresiasi, amortisasi dan depleksi pada tahun 2015 mengalami penurunan 1% atau AS\$0,8 juta lebih rendah dibandingkan tahun 2014.

Silahkan lihat bagian Investasi Modal dan Berkelanjutan untuk diskusi lebih lanjut tentang proyek modal.

Jasa dan kontrak. Biaya jasa dan kontrak menyumbang 15% terhadap beban pokok produksi pada tahun 2015 (2014 : 12%).

Komponen utama dari jasa dan kontrak adalah jasa pemeliharaan dan mekanik, sewa peralatan dan jasa pertambangan, jasa tenaga kerja dan transportasi serta jasa konsultasi dan biaya perjalanan.

The agreement in the amendment to the Contract of Work with the Indonesian Government requires the Company to pay royalties based on a percentage of sales.

Supplies. Supplies accounted for about 23% of total production costs in 2015, representing the largest component in the cost of production (2014: the second-largest). The major components of supply costs are bulk commodities (coal, sulfur, electrode paste and silica), spare parts, tires, and other mechanical consumables for equipment. Supplies cost in 2015 was 3% higher US\$4.2 million from 2014.

The increase in supply costs for 2015 was mainly due to increased consumption of spare parts and mechanical consumables for equipment, driven primarily by an increase in mining and related equipment maintenance which was due for maintenance in 2015. This amounted to US\$11.5 million. In addition, the increase was also impacted by higher prices for electrode paste and sulphur with a total increase of approximately US\$2.2 million.

The above increase was partially offset by a decrease in bulk commodities of US\$7.3 million in 2015. This was mainly due to a decrease in coal prices, as well as a decrease in the price and volume of silica.

Depreciation, amortization and depletion.

Depreciation, amortization and depletion in 2015 decreased by 1% or US\$0.8 million over 2014.

Please refer to the Capital and Sustaining Investment section for further discussion of capital projects.

Services and contracts. Services and contracts accounted for 15% of our production costs in 2015 (2014 : 12%).

The major components were maintenance and mechanical services, mining equipment rental and services, labor and transportation services, consulting and travel expenses.



Fasilitas penyimpanan batubara
Coal storage facility

Jumlah biaya tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar AS\$8,2 juta dari tahun 2014. Peningkatan sebesar 9% ini terutama disebabkan oleh aktivitas pemeliharaan peralatan tambang yang lebih tinggi dan peningkatan frekuensi kegiatan pemeliharaan pada pabrik pengolahan. Disisi lain, biaya konsultasi serta jasa dan kontrak lain-lain menurun, sejalan dengan program penghematan yang kami lakukan sepanjang tahun 2015.

Penyisihan penurunan nilai persediaan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar AS\$12,9 juta dibukukan karena biaya perolehan persediaan diatas nilai realisasi bersih.

Lainnya. Penurunan beban produksi lainnya sebesar AS\$3,5 juta atau 25% dari tahun 2014, terutama terkait dengan penurunan biaya diskresi. Hal ini sebagai dampak peningkatan efisiensi biaya karena program penghematan yang dilakukan sepanjang tahun 2015 dan penurunan biaya yang bersifat diskresi.

Total costs in 2015 were up US\$8.2 million from 2014. The 9% increase is mainly due to higher maintenance services for mine equipment and an increase in the frequency of maintenance activities at the processing plant. It also takes into account lower costs for consulting as well as other lower contracts and services, in line with our austerity program carried out in 2015.

Provision for decline in inventory value.

Provision for decline in inventory of US\$12.9 million was to reflect nickel inventories at the lower of net realizable value and cost.

Others. A decrease in other production costs in the amount of US\$3.5 million or 25% compared to 2014. This was due to cost efficiency improvements arising from the austerity program carried out in 2015 and a reduction of discretionary expenses.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

LABA BRUTO

Laba bruto pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar AS\$188,3 juta atau 61% menjadi AS\$118,4 juta dari AS\$306,7 juta pada tahun 2014 yang terutama disebabkan karena turunnya harga realisasi rata-rata nikel sebesar 27%. Karena sebab yang sama, margin laba bruto juga turun dari 30% pada tahun 2014 menjadi 15% pada tahun 2015.

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Beban usaha. Beban usaha mengalami penurunan sebesar AS\$2,9 juta atau 20%, dari AS\$14,5 juta pada tahun 2014 menjadi AS\$11,6 juta pada tahun 2015.

Penyebab utama penurunan adalah lebih rendahnya beban lisensi dan royalti sebesar AS\$2 juta dari AS\$8,3 juta di tahun 2014 menjadi AS\$6,3 juta atau 24% lebih rendah di tahun 2015.

Beban lisensi dan royalti biaya dihitung sebesar 0,8% dari pendapatan.

Penyebab lainnya adalah penurunan beban jasa manajemen sebesar AS\$0,4 juta atau 48% menjadi AS\$0,4 juta pada tahun 2015, dibandingkan dengan AS\$0,8 juta pada tahun 2014.

Beban jasa manajemen dihitung berdasarkan biaya aktual, ditambah dengan biaya layanan sebesar 10%.

Beban lainnya. Beban lainnya terdiri dari biaya pengembangan proyek, rugi selisih kurs dan berbagai macam hal lainnya.

Pada tahun 2015, Perseroan mencatatkan beban lainnya sebesar AS\$28,4 juta, dibandingkan dengan AS\$43,7 juta pada tahun 2014. Silakan lihat tabel rincian beban lainnya di bawah ini.

Beban lainnya (Dalam ribuan AS\$)	2015	2014	Variance (\$)	Variance %	Other Expenses (US\$ in thousands)
Biaya Pengembangan Proyek	18,432	42,438	(24,006)	-57%	Project development costs
Rugi selisih kurs	13,573	248	13,325	5373%	Loss on currency translation adjustments
Lainnya, bersih	(3,605)	980	(4,585)	-468%	Others, net
Total	28,400	43,666	(15,266)	-35%	Total

Pembahasan lebih lanjut tentang biaya-biaya tersebut disampaikan berikut ini.

GROSS PROFIT

Gross profit in 2015 decreased by US\$188.3 million or around 61% to US\$118.4 million in 2015. This compares to US\$306.7 million in 2014 and is primarily due to the 27% decrease in the average realized nickel price. Therefore, gross profit margin also decreased from 30% in 2014 to 15% in 2015.

OTHER INCOME AND EXPENSES

Operating expense. Operating expenses decreased by US\$2.9 million or 20%, from US\$14.5 million in 2014 to US\$11.6 million in 2015.

The decrease was primarily due a decrease in license and royalty fees in the amount of US\$2 million from US\$8.3 million in 2014 to US\$6.3 million or 24% lower in 2015.

The license and royalty fee is calculated at 0.8% of revenue.

The other contributing factor was a decrease in management service fees in the amount of US\$0.4 million or 48% to US\$0.4 million in 2015, compared to US\$0.8 million in 2014.

The management service fees are calculated at actual cost, plus a service fee of 10%.

Other expenses. Other expenses consist of project development costs, loss on currency translation adjustments and other miscellaneous items.

In 2015, the Company recorded other expenses of US\$28.4 million, compared to US\$43.7 million in 2014. Please refer to the following table for a breakdown of other expenses.

Further discussion on each of these items is set out as follows.

Biaya pengembangan proyek. Biaya pengembangan proyek mengalami penurunan sebesar AS\$24 juta atau 57%, menjadi sebesar AS\$18,4 juta pada tahun 2015, dibandingkan dengan AS\$42,4 juta pada tahun 2014. Penurunan biaya terutama dikarenakan lebih rendahnya biaya studi untuk proyek ekspansi smelter dan konversi batubara. Studi kelayakan proyek ekspansi smelter tahap pertama telah diselesaikan di tahun 2014, dan biaya yang timbul di tahun 2015 adalah biaya untuk persiapan pelaksanaan proyek.

Biaya yang terkait dengan proyek konversi batubara selama tahun 2014 diperlakukan sebagai biaya pengembangan proyek, sedangkan biaya yang terjadi pada tahun 2015 sehubungan dengan pembelian aset berwujud diperlakukan sebagai biaya aset tetap dalam penyelesaian.

Rugi selisih kurs. Pada tahun 2015, PT Vale mencatat kerugian nilai tukar mata uang sebesar AS\$13,6 juta, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan kerugian sebesar AS\$0,3 juta pada tahun 2014. Hal ini disebabkan terutama karena kerugian translasi nilai tukar mata uang atas aset moneter dalam denominasi Rupiah. Rupiah terdepresiasi sebesar 11% terhadap AS Dolar di tahun 2015 sementara Perseroan memiliki aset moneter yang signifikan dalam denominasi Rupiah terutama piutang pajak.

Rupiah hanya mengalami depresiasi terhadap AS Dollar sebesar 2% pada tahun 2014.

Lainnya, bersih. Pada tahun 2015, PT Vale mencatat pendapatan bersih lainnya sebesar AS\$3,6 juta dibandingkan dengan beban bersih lainnya sebesar AS\$0,9 juta pada tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan klaim asuransi di tahun 2015 sebesar AS\$2,6 juta atas sebuah insiden di Tanur Listrik 2 yang terjadi pada bulan November 2011.

Selain itu terdapat juga pendapatan lainnya berupa imbalan bunga atas pengembalian pajak penghasilan pasal 21 tahun 2004 dan 2006 sebesar AS\$0,7 juta.

Project development costs. Project development costs decreased by US\$24.0 million or 57%, to US\$ 18.4 million in 2015, compared to US\$42.4 million in 2014. The decline in cost was experienced mainly in the smelter expansion and coal conversion project. The first phase of the feasibility study for the smelter expansion project was completed in 2014, and the costs incurred in 2015 were for the project's implementation preparation.

Costs that were associated with the coal conversion project during 2014 were treated as a project development cost, while the costs incurred in 2015 that were with respect to the purchase of tangible assets were treated as construction in progress costs.

Loss on currency translation adjustments.

In 2015, PT Vale recorded a loss on currency translation adjustments of US\$13.6 million, a significant increase compared to the loss of US\$0.3 million in 2014. This was mainly due to losses on currency translation for the Company's monetary assets denominated in Rupiah. The Rupiah depreciated by 11% against the US dollar in 2015, while the Company has significant monetary assets in Rupiahs, mainly for tax receivables.

The Rupiah depreciated by 2% against the US dollar in 2014.

Others, net. In 2015, PT Vale recorded other items in net income of US\$3.6 million compared to an others net loss of US\$0.9 million in 2014, mainly due to the receipt of insurance claims in 2015 amounting to US\$2.6 million for the incident at Electric Furnace 2 in November 2011.

In addition, other income from interest compensations on tax refunds for income tax article 21 for the fiscal year 2004 and 2006 of US\$0.7 million.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

BIAYA KEUANGAN

Biaya keuangan terdiri dari beban bunga, biaya jaminan, amortisasi biaya pinjaman atas pinjaman Senior Export Facilities Agreement ("SEFA") dan beban akresi untuk provisi atas penghentian pengoperasian aset. Biaya keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$2,6 juta atau 21% di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga atas pinjaman SEFA, sejalan dengan pokok pinjaman dan suku bunga LIBOR yang lebih rendah pada 2015 dibandingkan dengan 2014. Hal ini juga merefleksikan penurunan biaya jaminan yang belum diamortisasi.

Saldo beban bunga, biaya jaminan dan amortisasi biaya pinjaman atas pinjaman SEFA pada tahun 2015 adalah sebesar AS\$7,7 juta, dibandingkan dengan AS\$9,1 juta pada tahun 2014.

Penurunan biaya keuangan juga diakibatkan oleh penurunan beban akresi menjadi AS\$2,2 juta di 2015 dibandingkan dengan AS\$3,4 juta pada tahun 2014 yang terkait dengan provisi atas penghentian pengoperasian aset.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan. Beban pajak penghasilan mengalami penurunan menjadi AS\$19,3 juta pada tahun 2015, dari AS\$64,7 juta pada tahun 2014 terutama disebabkan karena penurunan beban pajak penghasilan kini sebesar AS\$45,0 juta.

Penurunan beban pajak penghasilan kini diimbangi dengan penurunan manfaat pajak penghasilan tangguhan sebesar AS\$3,1 juta. Rendahnya beban pajak penghasilan kini tahun 2015 sejalan dengan menurunnya penghasilan kena pajak tahun 2015.

LABA TAHUN BERJALAN

PT Vale mencatat laba tahun berjalan sebesar AS\$50,5 juta pada 2015, dibandingkan dengan AS\$172,3 juta pada 2014. Hasil yang lebih rendah pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh turunnya harga realisasi rata-rata nikel dalam matte.

FINANCE COST

Finance costs are comprised of interest expense, guarantee fees, the amortization of debt issuance costs for the Senior Export Facilities Agreement ("SEFA") loan, and accretion costs for the provision of asset retirement. The Company's finance costs decreased by US\$2.6 million or 21% in 2015 over 2014, mainly due to a decrease in interest expense on the SEFA loan, in line with a lower loan principal and LIBOR rates in 2015 compared to 2014. It also reflects a decrease in our unamortized guarantee fee.

The balance of interest expenses, guarantee fees and the amortization of debt issuance costs for the SEFA loan in 2015 amounted to US\$7.7 million, compared to US\$9.1 million in 2014.

This was further decreased by accretion costs falling to US\$2.2 million in 2015 compared to US\$3.4 million in 2014 related to the provision for asset retirement.

INCOME TAX EXPENSES

This category consists of both current and deferred income tax expenses. Income tax expenses decreased to US\$19.3 million in 2015, from US\$64.7 million in 2014 due to a decrease in the current income tax expense of US\$45.0 million.

This decrease in the current income tax was partially offset by a decrease in the deferred income tax benefit in the amount of US\$3.1 million. The low current income tax expense in 2015 is in line with the decline in taxable income in 2015.

PROFIT FOR THE YEAR

PT Vale recorded a profit for the year of US\$50.5 million in 2015, compared to US\$172.3 million in 2014. The lower result in 2015 was driven mainly by the decline in the average realized price of nickel in matte.

RUGI KOMPREHENSIF LAIN

Perseroan mencatat rugi komprehensif lain di tahun 2015 sebesar AS\$1,9 juta, lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar AS\$1,1 juta. Hal ini disebabkan karena penyesuaian perhitungan aktuaris atas liabilitas imbalan pasca kerja.

PENGHASILAN SEBELUM BUNGA, PAJAK, PENYUSUTAN DAN AMORTISASI (EBITDA)

EBITDA dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan ditambah dengan biaya keuangan, depresiasi, amortisasi dan deplesi serta menghilangkan dampak dari laba/rugi selisih kurs. Termasuk dalam biaya keuangan adalah biaya akresi untuk provisi atas penghentian pengoperasian aset. Perseroan mencatat EBITDA pada tahun 2015 sebesar AS\$214,7 juta, turun dari AS\$371,8 juta pada tahun 2014.

Sejalan dengan penurunan keuntungan Perseroan untuk tahun 2015, penurunan EBITDA didorong oleh harga rata-rata realisasi nikel dalam matte yang lebih rendah, walaupun volume penjualan lebih tinggi.

ARUS KAS UNTUK TAHUN BERJALAN

Silakan merujuk pada tabel berikut ini untuk pembahasan tentang arus kas.

OTHER COMPREHENSIVE LOSS

The Company recorded other comprehensive losses of US\$1.9 million in 2015, higher than the US\$1.1 million recorded in 2014. This was due to an adjustment on actuary calculations for post-employment benefit liabilities.

EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION AND AMORTIZATION (EBITDA)

EBITDA is equal to profit before income tax added by finance costs, depreciation, amortization and depletion, and removing the impact from gain/loss from currency translation adjustment. Included in finance costs is accretion expense for the provision for asset retirement. The Company recorded EBITDA of US\$214.7 million in 2015, a decrease from US\$371.8 million in 2014.

In line with the decrease in profit of the Company in 2015, the decrease in EBITDA was driven by the lower average realized price of nickel in matte, despite higher sale volumes.

CASH FLOWS FOR THE YEAR

Please refer to the table below for the discussion on cash flows.

Laporan arus kas	2015	2014	Variance (\$)	Variance %	Statements of Cash Flow
(Dalam ribuan AS\$)					(US\$ in thousands)
Arus kas bersih dari (digunakan untuk):					Net cash flows provided from (used in):
Aktivitas operasi	133,896	323,328	(189,432)	-59%	Operating activities
Aktivitas investasi	(196,544)	(76,846)	(119,698)	156%	Investing activities
Aktivitas pendanaan	(43,441)	(144,050)	(100,609)	-70%	Financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas	(106,089)	102,432	(208,521)	-204%	Net decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	302,256	200,020	102,236	51%	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(1,413)	(196)	(1,217)	621%	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir tahun	194,754	302,256	(107,502)	-36%	Cash and cash equivalents at the end of the year

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasional pada tahun 2015 adalah sebesar AS\$133,9 juta, turun 59% dibandingkan dengan AS\$323,3 juta pada tahun 2014.

Penurunan sebesar AS\$189,4 juta itu terutama karena: penerimaan pembayaran dari pelanggan yang lebih rendah sebesar AS\$207,0 juta; pengembalian pajak Perseroan yang lebih rendah sebesar AS\$3,9 juta; pembayaran pajak penghasilan Perseroan yang lebih tinggi sebesar AS\$16,0 juta; penempatan jaminan reklamasi sebesar AS\$16,6 juta; dan adanya pembayaran lainnya yang lebih tinggi sebesar AS\$9,5 juta. Penurunan ini diimbangi dengan pembayaran kepada karyawan yang lebih rendah sebesar AS\$10,8 juta; pembayaran kepada pemasok yang lebih rendah sebesar AS\$52,5 juta; dan penerimaan lainnya yang lebih tinggi sebesar AS\$0,4 juta.

Penurunan penerimaan dari pelanggan terjadi karena turunnya penjualan Perseroan akibat rendahnya harga nikel LME pada tahun 2015 walaupun volume penjualan tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan tahun 2014.

Pembayaran pajak penghasilan (PPh) Perseroan yang lebih tinggi pada tahun 2015 disebabkan oleh kenaikan angsuran PPh badan yang didasarkan pada penghasilan kena pajak tahun 2014 yang lebih tinggi.

Penurunan pembayaran ke karyawan disebabkan oleh lebih rendahnya biaya gaji yang terutama disebabkan karena depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS, lebih rendahnya jumlah karyawan, dan lebih rendahnya bonus.

Penurunan pembayaran kepada pemasok terutama disebabkan oleh rendahnya beban pokok produksi tunai ditambah dengan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar AS\$119,7 juta dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penempatan investasi jangka pendek berupa deposito berjangka sebesar AS\$90,2 juta, serta ditambah dengan peningkatan pembayaran atas pengeluaran barang

NET CASH FLOW PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash provided from operational activities in 2015 amounted to US\$133.9 million, a decrease of 59% compared to US\$323.3 million in 2014.

The decrease of US\$189.4 million was mainly due to; lower receipt of payments from customers of US\$207.0 million; lower tax refunds of US\$3.9 million; higher payment of the Company's income tax of US\$16.0 million; placement of a reclamation guarantee of US\$16.6 million; and higher other payments of US\$9.5 million. The decrease was offset by lower payments to employees of US\$10.8 million; lower payments to suppliers of US\$52.5 million; and higher other income in the amount of US\$0.4 million.

The decrease in receipts from our customers was due to the decrease in the Company's sales, resulting from lower LME nickel prices in 2015 despite the higher sales volume in 2015 compared to 2014.

The higher payments of corporate income tax in 2015 were mainly driven by an increase in installments required by the Government, based on the higher taxable income in 2014.

The decrease in payments to employees was due to lower salary costs, primarily as a result of the Rupiah's depreciation against the US dollar, lower headcount, and lower bonuses.

The decrease in payments to suppliers was mainly due to the lower cash cost of production, aided by the Rupiah's depreciation against the US dollar

NET CASH FLOW USED FOR INVESTING ACTIVITIES

Net cash flow used for investing activities increased significantly by US\$119.7 million from the prior year. This was due to the placement of short-term investments in the form of time deposits of US\$90.2 million. Also contributing was an increase in payments

modal sebesar AS\$29,5 juta atau 38% menjadi AS\$106,4 juta pada tahun 2015 dari AS\$76,8 juta pada tahun 2014.

Pembayaran barang modal yang lebih tinggi ini terutama untuk pembelian alat berat dan pengembangan tambang. Silakan lihat bagian Modal dan Investasi Berkelanjutan untuk pembahasan lebih lanjut tentang proyek modal.

ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar AS\$100,6 juta atau 70% menjadi AS\$43,4 juta pada tahun 2015, dibandingkan dengan AS\$144,1 juta pada tahun 2014.

Penurunan kas yang digunakan untuk pendanaan terutama berasal dari lebih kecilnya pembayaran dividen di tahun 2015 dibandingkan pembayaran sebesar AS\$99,6 juta di tahun 2014.

Penurunan lain sebesar AS\$1,1 juta terutama diakibatkan penurunan pembayaran bunga dan biaya jaminan utang karena semakin menurunnya sisa utang.

for capital expenditures of US\$29.5 million or 38% to US\$106.4 million in 2015 from US\$76.8 million in 2014.

The higher payments for the acquisition of fixed assets were mainly for the purchase of heavy equipment and mine development. Please refer to the Capital and Sustaining Investment section for further discussion on capital projects.

NET CASH FLOW USED FOR FINANCING ACTIVITIES

Cash flows used for financing activities decreased by US\$100.6 million or 70% to US\$43.4 million in 2015, compared to US\$144.1 million in 2014.

The decrease in cash used for financing was mainly as a result of significantly lower dividend payments in 2015, compared to payments of US\$99.6 million in 2014.

Other declines in the amount of US\$1.1 million were primarily due to a decrease in interest payments and debt guarantee fee due to the decrease of the remaining debt balance.

Rasio Pemanfaatan Arus Kas	2015	2014	Cash Flow Coverage Ratios
Pemanfaatan arus kas terhadap operasi (Arus kas dari operasi/pendapatan)	0.17	0.31	Operating cash flow coverage (Operating cash flow/revenue)
Pemanfaatan arus kas terhadap belanja barang modal (Arus kas dari operasi/penambahan aset tetap dalam penyelesaian selama tahun berjalan)	1.22	4.09	Capital expenditure coverage (Operating cash flow/capital expenditures during the year)
Pemanfaatan dividen (Arus kas dari operasi/dividen yang diumumkan pada tahun berjalan)	n/a	3.23	Dividend coverage (Operating cash flow/dividends declared for the respective year)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel rasio pemanfaatan arus kas di atas, pemanfaatan arus kas dari operasi di tahun 2015 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2014 seiring dengan penurunan pendapatan dan optimalisasi penggunaan kas.

Penurunan arus kas dari operasi dan biaya aset tetap dalam penyelesaian yang lebih tinggi pada tahun 2015 telah memberikan dampak penurunan rasio pemanfaatan arus kas terhadap belanja barang modal dibandingkan pada tahun 2014.

Pembayaran dividen yang dilakukan ditahun 2015 merupakan sisa pembayaran atas dividen tahun tahun sebelumnya. Tidak ada deklarasi dividen di tahun 2015.

As shown in the above table of cash flow coverage ratios, the 2015 operating cash flow coverage was smaller than in 2014, in line with the decrease in revenues and optimization of cash utilization.

The decrease in cash flow from operations and the higher capital expenditures in 2015 has resulted the decrease in the cash utilization ratio to capital expenditure in 2015 compared to 2014.

The dividend payment made in 2015 represents the small remaining payment for the previous years dividend. There was no dividend payment declaration in 2015.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

POSISI KEUANGAN

ASET

Total aset pada tahun 2015 menurun sebesar AS\$45,0 juta menjadi AS\$2.289 juta jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Komposisi aset lancar dan aset tidak lancar atas total aset pada tahun 2015 adalah masing-masing sebesar 26% dan 74%, tidak mengalami perubahan secara signifikan dari tahun 2014.

Silakan lihat pada tabel berikut yang menggambarkan komposisi aset lancar dan aset tidak lancar.

Aset	2015	%	2014	%	Variance (\$)	Variance (%)	Assets
(AS\$ dalam ribuan)				(US\$ in thousands)			
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS			
Kas dan setara kas	194,754	9%	302,256	13%	(107,502)	-36%	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	90,154	4%	-	0%	90,154	n/a	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	32,863	1%	16,389	1%	16,474	101%	Restricted cash
Piutang usaha - pihak-pihak berelasi	78,200	3%	92,706	4%	(14,506)	-16%	Trade receivables - related parties
Persediaan, bersih	104,066	5%	139,287	6%	(35,221)	-25%	Inventories, net
Pajak dibayar dimuka	91,137	4%	60,754	3%	30,383	50%	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	5,045	0%	5,745	0%	(700)	-12%	Prepayments & advances
Aset keuangan lancar lainnya	3,742	0%	4,297	0%	(555)	-13%	Other current financial assets
Jumlah aset lancar	599,961	26%	621,434	27%	(21,473)	-3%	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON - CURRENT ASSETS			
Pajak dibayar dimuka	72,554	3%	88,170	4%	(15,616)	-18%	Prepaid taxes
Piutang non-usaha pihak-pihak berelasi	263	0%	211	0%	52	25%	Non trade receivables - related parties
Aset tetap, bersih	1,603,302	70%	1,608,523	69%	(5,221)	0%	Fixed assets, net
Aset keuangan tidak lancar lainnya	13,081	1%	15,852	1%	(2,771)	-17%	Other non-current financial assets
Jumlah aset tidak lancar	1,689,200	74%	1,712,756	73%	(23,556)	-1%	Total non-current assets
JUMLAH ASET	2,289,161	100%	2,334,190	100%	(45,029)	-2%	TOTAL ASSETS

ASET LANCAR

Aset lancar Perseroan menurun sebesar AS\$21,5 juta, atau 3% dibandingkan dengan tahun 2014. Penyebab utama penurunan ini adalah penurunan kas dan setara kas sebesar AS\$107,5 juta, persediaan sebesar AS\$35,2 juta, piutang usaha - pihak-pihak berelasi sebesar AS\$14,5 juta, dan penurunan biaya dibayar dimuka serta aset keuangan lancar lainnya masing - masing sebesar AS\$0,7 juta dan AS\$0,6 juta.

Penurunan ini sebagian diimbangi oleh peningkatan investasi jangka pendek sebesar AS\$90,1 juta, pajak dibayar dimuka sebesar AS\$30,4 juta dan peningkatan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar AS\$16,5 juta.

FINANCIAL POSITION

ASSETS

Total assets in 2015 decreased by US\$45.0 million to US\$2,289 million compared to the previous year.

The composition of current and non-current assets in total assets in 2015 was respectively 26% and 74%, and did not change significantly compared to 2014.

Please refer to the following table that illustrates the composition of current and non-current assets.

CURRENT ASSETS

Current assets of the Company decreased by US\$21.5 million, or 3% compared to 2014. The main contributors to this decrease were the decrease in cash and cash equivalents of US\$107.5 million, inventories of US\$35.2 million, receivables - related parties of US\$14.5 million as well as advance payments and other current assets of US\$0.7 million and US\$0.6 million respectively.

These decreases were partially offset by increases in short term investments of US\$90.1 million, prepaid taxes of US\$30.4 million, and an increase in restricted cash of US\$16.5 million.

Kas dan setara kas

Akun ini terdiri dari kas dan rekening bank sebesar AS\$53,9 juta dan deposito berjangka yang tidak dibatasi dan akan jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan sebesar AS\$140,8 juta. Komposisi kas dan setara kas berdasarkan mata uang disajikan pada tabel berikut ini.

Kas dan setara Kas	2015	%	2014	%	Var (\$)	Var (%)	Cash and Cash Equivalent
(AS\$ dalam ribuan)							(US\$ in thousands)
Kas	13	0%	19	0%	(6)	-32%	Cash on hand
Bank							Cash in banks
Rp	7,013	4%	11,305	4%	(4,292)	-38%	Rp
AS\$	46,885	24%	90,909	30%	(44,024)	-48%	US\$
Jumlah Kas di bank	53,898	28%	102,214	34%	(48,316)	-47%	Total cash in banks
Deposito berjangka							Time deposits
Rp	5,629	3%	-	0%	5,629	n/a	Rp
AS\$	135,214	69%	200,023	66%	(64,809)	-32%	US\$
Jumlah deposito berjangka	140,843	72%	200,023	66%	(59,180)	-30%	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	194,754	100%	302,256	100%	(107,502)	-36%	Total cash and cash equivalents

Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di atas, kas dan setara kas menurun sebesar AS\$107,5 juta atau 36%, dari AS\$302,3 juta pada tahun 2014 menjadi AS\$194,8 juta pada tahun 2015.

Pada akhir tahun 2015, rata-rata suku bunga deposito dolar AS dan Rupiah masing-masing adalah 0,5% dan 8,1% sedangkan pada akhir tahun 2014 suku bunga dolar AS sebesar 0,3% dan tidak ada penempatan deposito dalam mata uang rupiah.

Penurunan pada kas dan setara kas ini dipicu oleh penurunan penerimaan kas dari aktivitas operasi Perseroan yang diakibatkan oleh penurunan penerimaan penjualan dari pelanggan akibat penurunan harga nikel LME, dan penempatan pada investasi jangka pendek (deposito berjangka dengan jatuh tempo lebih dari tiga bulan dan kurang dari 12 bulan).

Investasi jangka pendek

Akun investasi jangka pendek merupakan investasi pada deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari tiga bulan dan kurang dari 12 bulan. Penempatan pada investasi berjangka ini bertujuan memaksimalkan perolehan pendapatan bunga. Penempatan investasi ini dilakukan pada akhir tahun 2015 pada deposito berjangka dolar AS sebesar AS\$90,2 juta dengan rata-rata suku bunga 0,6%.

Cash and cash equivalents

This balance consists of cash on hand and in bank accounts amounting to US\$53.9 million and unrestricted time deposits with maturity date less than three months in the amount of US\$140.8 million. The composition of cash and cash equivalents by currency is presented in the following table.

As shown in the table above, our cash and cash equivalents decreased by US\$107.5 million or 36%, from US\$302.3 million in 2014 to US\$194.8 million in 2015.

At the end of 2015, the average deposit interest rates for the US dollar and the Rupiah, were respectively 0.5% and 8.1%, while at the end of 2014, the US dollar interest rate was 0.3% and there was no placement of deposits in Rupiahs.

The decline in cash and cash equivalents was triggered by a decrease in cash receipts from the operating activities of the Company as a result of decreased sales revenues from customers due to a decline in the LME nickel price, and placement of short-term investments (time deposits with maturity greater than three months and less than 12 months).

Short term investments

The short-term investment account represents investments in time deposits with maturities greater than three months and less than 12 months. Placement of these short-term investments was to maximize interest income. Placement of these investments was made at the end of 2015 in US dollar time deposits amounting to US\$90.2 million with an average interest rate of 0.6%.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis



Aktivitas penambangan
Mining activity

Kas yang dibatasi penggunaannya

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya sebesar AS\$32,9 juta pada akhir tahun 2015, meningkat sebesar AS\$16,5 juta dibandingkan dengan saldo pada akhir tahun 2014 sebesar AS\$16,4 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penempatan deposito berjangka sebagai jaminan untuk penerbitan bank garansi atas jaminan reklamasi Perseroan sebesar AS\$16,6 juta dimana pada tahun 2014 masih diperbolehkan untuk ditempatkan dalam bentuk cadangan akuntansi.

Akun kas yang dibatasi penggunaannya terdiri dari rekening pada MFUG Union Bank N.A. dan deposito berjangka yang dibatasi pada Bank Mandiri dan BRI.

Rekening pada MFUG Union Bank N.A. digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman (AS\$18,75 juta setiap angsuran pinjaman) dan bunga pinjaman yang dibayarkan dua kali setahun yaitu di bulan Februari dan Agustus setiap tahun sejak tahun 2012.

Rekening ini dibuka sebagai persyaratan persetujuan antara PT Vale, Mizuho Bank Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd terkait dengan fasilitas pinjaman SEFA untuk pendanaan proyek Karebbe.

Restricted cash

The restricted cash balance amounting to US\$32.9 million at the end of 2015, increased by US\$16.5 million compared to the 2014 balance of US\$16.4 million. This increase was due to the placement of time deposits as guarantee of the issuance of bank guarantees with respect to the reclamation guarantee of the Company in the amount of US\$16.6 million. The reclamation guarantee in 2014 was in the form of accounting reserve.

This account consists of an account with MFUG Union Bank N.A. and restricted time deposits in Bank Mandiri and BRI.

The account at MFUG Union Bank N.A. was intended to pay installment payments on the loan principal (US\$18.75 million for each loan installment) and interest expense payable semi-annually in the months of February and August each year, starting in 2012.

This account was established to fulfill our obligations based on the loan agreement requirements related to the SEFA loan between PT Vale, Mizuho Bank Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. for our Karebbe project.

Sedangkan penempatan deposito berjangka yang dibatasi pada Bank Mandiri dan BRI ditujukan sehubungan dengan jaminan reklamasi Perseroan seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Piutang usaha pihak-pihak berelasi

Saldo piutang usaha pihak-pihak berelasi pada 31 Desember 2015 tercatat lebih rendah 16% atau AS\$14,5 juta jika dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2014. Penurunan ini disebabkan oleh harga realisasi penjualan nikel yang lebih rendah sehingga jumlah piutang usaha pada akhir tahun 2015 menurun menjadi AS\$78,2 juta dibandingkan pada akhir tahun 2014 sebesar AS\$92,7 juta.

Seluruh produksi nikel dalam matte Perseroan dijual melalui kontrak penjualan jangka panjang, "harus ambil", dalam mata uang dolar AS dengan dua pemegang saham pendiri Perseroan yaitu VCL dan SMM. Sehingga semua piutang usaha Perseroan adalah kepada pihak-pihak berelasi yang memiliki kepentingan strategis jangka panjang terhadap kesuksesan yang berkelanjutan dari operasi Perseroan. Pada umumnya pembayaran piutang diterima dalam 30-60 hari dari sejak tanggal pengiriman.

VCL dan SMM memiliki sejarah pembayaran yang panjang dan tepat waktu sesuai dengan kontrak, dan belum pernah terjadi kegagalan maupun keterlambatan pembayaran yang berarti atas piutang yang telah jatuh tempo.

Seperti terlihat pada tabel berikut, rata-rata hari pembayaran piutang adalah 39 hari pada tahun 2015 dibandingkan 28 hari pada tahun 2014. Kenaikan 11 hari terutama disebabkan oleh peningkatan saldo rata-rata piutang usaha (2015: AS\$85,4 juta vs 2014: AS\$79,3 juta).

Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan No.04/M-Dag/Per/1/2015 kemudian peraturan No.26/M-Dag/Per/3/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan Letter of Credit ("L/C") untuk Ekspor Barang Tertentu, maka sejak bulan Mei 2015 Perseroan telah mulai mempergunakan L/C dalam ekspor nikel matte. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada jumlah hari penerimaan pembayaran diakibatkan waktu tambahan yang dibutuhkan dalam pencairan LC.

The placement of restricted time deposits at Bank Mandiri and BRI was related to the reclamation guarantee of the Company, as explained previously.

Trade receivables – related party

Trade receivables from related parties at December 31, 2015 were recorded 16% or US\$14.5 million lower compared to the balance at December 31, 2014. The decrease was mainly due to the lower realized nickel price, reducing the amount of receivables at the end of 2015 to US\$78.2 million, compared to US\$92.7 million at the end of 2014.

All of our nickel in matte is sold under long-term, "must-take" U.S. dollar-denominated sales contracts with our two largest shareholders, namely VCL and SMM. Accordingly, all of the Company's trade receivables are due to these related parties that have long-term strategic interests in the continuing success of the Company's operations. Normally our trade receivables are collected within 30 to 60 days from shipment date.

VCL and SMM have a long and punctual payment history under their respective sales contracts and neither has defaulted on nor has been materially late in respect of any payment due to the Company.

As shown in the following table, the days of sales outstanding stood at 39 days in 2015 compared to 28 days in 2014. The 11-day increase was mainly driven by an increase in the average trade receivables (2015: US\$85.4 million vs. 2014: US\$79.3 million)

In accordance with the regulation of the Minister of Trade No.04/M-Dag/Per/1/2015 then regulation No.26/M-Dag/Per/3/2015 on the Implementation of the Special Conditions on the Use of Letter of Credit ("L/C") for Certain Export Item, since May 2015, the Company has started to use L/C in the export of nickel matte. This has a direct impact on the number of days of receipt of payment due to the extra time required in the LC disbursement.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Rasio Siklus Operasi	2015	2014	Operating Cycle Ratios
Rata-rata saldo piutang usaha pada awal dan akhir tahun	85,453	79,304	Average of trade receivables balance at beginning and end of the year
Jumlah rata-rata hari untuk pengumpulan piutang (360/(pendapatan/rata-rata saldo piutang usaha))	39	28	Days of sales outstanding (360/(Revenue/average trade receivables balance))

Persediaan bersih

Nilai persediaan bersih pada akhir tahun 2015 sebesar AS\$104,1 juta atau menurun 25% dibandingkan posisi akhir tahun 2014 sebesar AS\$139,3 juta. Saldo persediaan tersebut terdiri dari bahan pembantu sebesar AS\$78,1 juta, dikurangi penyisihan untuk bahan pembantu usang sebesar AS\$1,6 juta, persediaan nikel dalam proses sebesar AS\$31,6 juta, persediaan barang jadi nikel matte sebesar AS\$8,9 juta, dan dikurangi penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar AS\$12,9 juta.

Penurunan total persediaan bersih disebabkan karena penyisihan penurunan nilai persediaan sebagai hasil dari uji nilai realisasi bersih persediaan nikel sebesar AS\$12,9 juta, lebih rendahnya persediaan nikel sebesar AS\$11,3 juta, serta lebih rendahnya persediaan bahan pembantu sebesar AS\$11,0 juta.

Di tahun 2015 Perseroan mencatat penyisihan penurunan nilai persediaan nikel sebesar AS\$12,9 juta, sehingga nilai persediaan barang jadi nikel pada akhir tahun 2015 merupakan ekspektasi dari nilai realisasi bersihnya.

Lebih rendahnya persediaan nikel dalam proses diakibatkan oleh pemanfaatan stasiun penyaringan yang lebih baik dan juga pada tanur listrik serta konverter matte sehingga berdampak pada penurunan nilai persediaan nikel dalam proses sebesar AS\$4,2 juta (2015: AS\$31,6 juta; 2014: AS\$35,8 juta), serta ditambah dengan penurunan persediaan nikel sebesar AS\$7,1 juta akibat perputaran waktu pengiriman penjualan.

Lebih rendahnya persediaan bahan pembantu didorong oleh harga komoditas bahan bakar yang lebih rendah dan didukung oleh kemampuan pengelolaan dan penggunaan persediaan yang lebih efektif dan efisien.

Inventories, net

Net inventory value at the end of 2015 amounted to US\$104.1 million, a decrease of 25% over 2014's value of US\$139.3 million. The inventory balance consists of supplies inventory of US\$78.1 million, less a provision for obsolete supplies of US\$1.6 million, inventories of nickel in-process of US\$31.6 million, inventories of finished nickel matte of US\$8.9 million, less a provision for a decline in inventory value of US\$12.9 million.

The decrease in total inventories, net was due to a decline in inventory value as a result of a net realizable value test of US\$12.9 million, lower nickel inventories of US\$11.3 million, and a lower supplies inventory of US\$11.0 million.

In 2015 the Company recorded a provision for decline in inventory value in the amount of US\$12.9 million, so the value of inventories of nickel by the end of 2015 is the expected net realizable value.

Lower nickel in-process inventories were due to better utilization of the screening station and furnace as well as the matte converter, resulting in a decrease in nickel in-process inventory of US\$4.2 million (2015: US\$31.6 million; 2014: US\$35.8 million), supported by a decrease in finished nickel inventories of US\$7.1 million due to the turnaround time of sales delivery.

Lower supplies inventory was driven by lower commodity fuel prices and supported by better inventory utilization.

Rasio Siklus Operasi	2015	2014	Operating Cycle Ratios
Rata-rata persediaan bahan pembantu, bersih (saldo awal dan akhir tahun – dalam ribuan AS\$)	81,947	93,361	Average supplies inventories, net (balance of beginning and ending of the year –US\$ thousands)
Jumlah persediaan bahan pembantu (360/(biaya bahan bakar dan bahan pembantu)/rata-rata saldo persediaan bahan pembantu)	96	90	Days of supplies inventories (360/(fuels & supplies expense)/average supplies inventories balance)

Kenaikan jumlah hari persediaan bahan pembantu dalam persediaan menjadi 96 hari pada tahun 2015 dari 90 hari pada tahun 2014 adalah karena saldo rata-rata persediaan bahan pembantu lebih rendah pada akhir tahun 2015 dibandingkan dengan akhir tahun 2014, diimbangi dengan penurunan biaya penggunaan bahan bakar dan pelumas serta bahan pembantu.

Semua persediaan dan aset tetap Perseroan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri berikut, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik dan gangguan usaha lainnya.

Perseroan menyediakan perlindungan asuransi terhadap aset Perseroan dan eksposur atas risiko gangguan usaha. Batasan nilai pertanggungan asuransi ini per 31 Desember 2015 adalah AS\$800 juta per kejadian (31 Desember 2014: AS\$800 juta), tunduk atas hal-hal yang dapat dikurangkan, batasan-batasan tertentu, serta syarat dan kondisi. Nilai aset dan gangguan usaha yang ditanggung oleh asuransi ini per 31 Desember 2015 adalah AS\$6.499 juta (31 Desember 2014: AS\$6.235 juta). Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu atas biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam matte sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksinya kembali. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

Pajak dibayar di muka – jangka pendek

Jumlah pajak dibayar di muka (bagian lancar dan tidak lancar) Perseroan pada akhir tahun 2015 adalah sebesar AS\$163,7 juta, lebih tinggi 10% atau AS\$14,8 juta dibandingkan jumlah pajak dibayar di muka pada akhir tahun 2014 yang sebesar AS\$148,9 juta, seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

The increase in days of supplies inventory to 96 days in 2015 from 90 days in 2014 was due to a lower average supplies balance at the end of 2015 compared to the end of 2014, offset by a larger decrease in our fuels and lubricants and supplies expense.

All of the Company's inventories and fixed assets were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by industrial risks, including but not limited to, earthquake, fire, mechanical or electrical breakdown and related business interruptions.

The Company maintains insurance coverage for the assets of the Company and its related exposure to business interruption. The policy limits of this insurance coverage were US\$800 million per occurrence as at December 31, 2015 (December 31, 2014: US\$800 million), subject to certain deductibles, sub-limits, terms and conditions. The assets and business interruption values covered by insurance as at December 31, 2015 were US\$6,499 million (December 31, 2014: US\$6,235 million). Supplies are insured at replacement cost; nickel in process at the cost of ore, raw materials and labor expended plus a proper proportion of overhead charges; while nickel in matte finished goods are insured at the regular net cash selling price or the cost of reproduction, whichever is higher. In management's opinion, the insurance is adequate to cover possible losses from such risks.

Prepaid taxes – current

Total prepaid taxes (current and non-current) of the Company at the end of 2015 of US\$163.7 million, were 10% or US\$14.8 million higher than prepaid taxes at the end of 2014 of US\$148.9 million as presented in the following table.

Pajak dibayar di muka	2015	%	2014	%	Var (\$)	Var (%)	Prepaid Tax
(Dalam ribuan AS\$)							(US\$ in thousands)
Lancar	91,137	56%	60,754	41%	30,383	50%	Current
Tidak lancar	72,554	44%	88,170	59%	(15,616)	-18%	Non-Current
Total	163,691	100%	148,924	100%	14,767	10%	Total

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Pajak dibayar di muka lancar pada akhir tahun 2015 adalah sebesar AS\$91,1 juta atau 50% lebih tinggi dari akhir tahun 2014. Silakan lihat tabel di bawah ini, yang menunjukkan pergerakan pajak dibayar di muka lancar.

The 2015 current prepaid taxes were US\$91.1 million, 50% higher than 2014. Please refer to the following table, which shows the movement of the current prepaid taxes.

Pajak dibayar di muka - lancar	2015	%	2014	%	Var (\$)	Var (%)	Prepaid Tax - current
(Dalam ribuan AS\$)							(US\$ in thousands)
Pajak Penghasilan Badan	-	0%	9,913	7%	(9,913)	-100%	Corporate Income Tax
Lainnya	91,137	56%	50,841	34%	40,296	79%	Others
Total	91,137	56%	60,754	41%	30,383	50%	Total

Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan PPN yang dapat dipulihkan sebesar AS\$10,8 juta dan AS\$29,5 juta dari sengketa pajak yang telah diputuskan dan direklasifikasi dari pajak dibayar dimuka tidak lancar (PPH 26 tahun 2006: AS\$13,8 juta; PPh Pasal 21 dan 23 tahun 2012: AS\$14,3 juta; dan pajak impor sebesar AS\$1,4 juta).

The increase was driven by an increase in VAT recoverable of US\$10.8 million and US\$29.5 million from a tax dispute that has been concluded and reclassified from non-current prepaid taxes (WHT article 26 year 2006: US\$13.8 million; WHT article 21 and 23 year 2012: US\$14.3 million; Import Tax: US\$1.4 million).

Peningkatan di atas diimbangi terutama oleh pengembalian atas Pajak Penghasilan Badan (PPH) tahun 2013 yang diterima di tahun 2015 sebesar AS\$9,8 juta.

The increase was offset mainly by a refund of 2013 Corporate Income Tax (CIT) which was received in 2015 in the amount of US\$9.8 million.

Biaya dibayar di muka dan uang muka

Saldo biaya dibayar di muka dan uang muka pada akhir tahun 2015 menurun sebesar AS\$0,7 juta atau 12%, jika dibandingkan saldo pada akhir tahun 2014 (2015: AS\$5,0 juta; 2014: AS\$5,7 juta). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran uang muka kepada kontraktor dan pemasok.

Prepayments and advances

Prepayments and advances decreased by US\$0.7 million or 12% as of December 31, 2015, compared to December 31, 2014 (2015: US\$5.0 million; 2014: US\$5.7 million). The decrease was mainly due to lower advances to contractors and suppliers.

Aset keuangan lancar lainnya

Aset keuangan lancar lainnya mengalami penurunan sebesar 13% atau AS\$0,6 juta pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014, penurunan ini terutama diakibatkan oleh penurunan piutang lancar karyawan senilai AS\$0,6 juta karena pembayaran dan penurunan nilai tukar Rupiah.

Other current financial assets

Other current financial assets decreased by 13% or US\$0.6 million in 2015 compared to the previous year. The decrease was mainly driven by a decrease in current employee receivables of US\$0.6 million due to repayments and a lower Rupiah exchange rate.

ASET TIDAK LANCAR

Akun ini terdiri dari pajak dibayar di muka - tidak lancar, piutang non-usaha pihak-pihak berelasi, aset tetap, dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

NON-CURRENT ASSETS

This account consists of prepaid taxes – non current, non-trade receivables related parties, fixed assets, and other non-current financial assets.

Pada akhir tahun 2015, aset tidak lancar turun sebesar AS\$23,6 juta atau 1% dibandingkan pada akhir tahun 2014. Penurunan ini terutama didorong oleh penurunan

At the end of 2015, non-current assets decreased by US\$23.6 million or 1% compared to 2014. The decrease was mainly driven by a decrease in non-current prepaid

pajak dibayar dimuka tidak lancar sebesar AS\$15,6 juta, penurunan aset tetap sebesar AS\$5,2 juta dan penurunan aset keuangan tidak lancar lainnya sebesar AS\$2,8 juta.

taxes of US\$15.6 million, a decrease in fixed assets of US\$5.2 million, and a decrease in other non-current financial assets of US\$2.8 million.

Pajak dibayar dimuka – tidak lancar

Saldo pajak dibayar dimuka tidak lancar pada akhir tahun 2015 sebesar AS\$72,6 juta atau 18% lebih rendah dibanding pada akhir tahun 2014.

Prepaid taxes – non-current

Non-current prepaid taxes at the end of 2015 were US\$72.6 million or 18% lower than at the end of 2014.

Perbandingan pajak dibayar dimuka jangka panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The comparison on non-current prepaid taxes is shown in the following table.

Pajak dibayar di muka - tidak lancar	2015	%	2014	%	Var (\$)	Var (%)	Prepaid Tax – non-current
(Dalam ribuan AS\$)							(US\$ in thousands)
Pajak Penghasilan Badan	28,976	17%	647	0%	28,329	4,379%	Corporate Income Tax
Lainnya	43,578	27%	87,523	59%	(43,945)	-50%	Others
Total	72,554	44%	88,170	59%	(15,616)	-18%	Total

Penurunan pajak dibayar dimuka tidak lancar terutama disebabkan oleh penurunan pajak dalam proses banding sebesar AS\$43,9 juta. Sebesar AS\$29,5 juta penurunan merupakan reklasifikasi ke pajak dibayar dimuka lancar karena sengketa pajak telah selesai. Penurunan ini diimbangi sebagian oleh peningkatan pajak dibayar dimuka karena lebih bayar pajak untuk pajak penghasilan Perseroan tahun 2015 sebesar AS\$28,3 juta.

The decrease in non-current prepaid taxes was mainly due to a decrease in the amount of tax subject to appeal process of US\$43.9 million, of which US\$29.5 million represented reclassification to current prepaid taxes as a result of the conclusion of several tax disputes. The decrease was partially offset by an increase in prepaid taxes for the Company's income tax overpayments for 2015 which amounted to US\$28.3 million.

Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah pajak dibayar dimuka tidak lancar yang masih dalam proses banding adalah sebesar AS\$43,6 juta yang terdiri dari:

- PPh badan tahun pajak 2004 dan 2006 masing-masing secara berurutan sebesar AS\$3,5 juta dan AS\$5,9 juta yang saat ini masih dalam proses Mutual Agreement Procedure ("MAP") antara otoritas pajak Kanada dengan Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"). Proses ini ditujukan untuk menilai lebih lanjut koreksi atas *Management Assistance Agreement* ("MAA") yang dianggap oleh Pemeriksa Pajak sebagai beban yang tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan PPh Badan Perseroan.
- PPh badan tahun 2008 sebesar AS\$1,9 juta masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

As of December 31, 2015, the non-current prepaid taxes still in the appeals process amounted to US\$43.6 million. This consists of:

- Corporate income tax for the 2004 and 2006 fiscal years amounting to US\$3.5 million and US\$5.9 million respectively, which is currently still in the Mutual Agreement Procedure ("MAP") process between the Canadian and Indonesian tax authorities in accordance with the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B"). This process aims to assess any further corrections to the Management Assistance Agreement ("MAA") which is considered by the Indonesian tax inspectors as an expense that cannot be deducted in the calculation of corporate income tax.
- The 2008 corporate income tax, which amounted to US\$1.9 million, is still in the reconsideration process at the Supreme Court.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

- Pajak dibayar dimuka tidak lancar yang masih dalam proses banding untuk tahun 2010 adalah sebesar AS\$27,2 juta yang terdiri dari SKPKB PPh badan sebesar AS\$19,7 juta, SKPKB PPh Pasal 26 sebesar AS\$6,7 juta, SKPKBT PPN sebesar AS\$0,6 juta, dan SKPKB PPh Pasal 23 sebesar AS\$0,1 juta.
- Pajak dibayar dimuka tidak lancar untuk tahun pajak 2011 yang masih dalam proses banding adalah sebesar AS\$4,4 juta yang terdiri dari koreksi PPh badan terkait dengan MAA sebesar AS\$2,7 juta dan biaya bunga serta biaya-biaya lain terkait pinjaman SEFA sebesar AS\$1,7 juta.
- Pajak dibayar dimuka jangka panjang untuk pajak tahun 2012 yang masih dalam proses banding adalah PPh badan sebesar AS\$0,6 juta.
- Non-current prepaid taxes in the appeal process for 2010 are in the amount of US\$27.2 million, consisting of underpayment of corporate income tax amounting to US\$19.7 million, underpayment of WHT Article 26 amounting to US\$6.7 million, additional tax underpayment of VAT amounting to US\$0.6 million, and the underpayment of WHT article 23 amounting to US\$0.1 million.
- Non-current prepaid taxes for the 2011 fiscal year still in the appeals process amount to US\$4.4 million consisting of a corporate income tax correction associated with the MAA of US\$2.7 million and interest expense and other costs related to SEFA loans of US\$1.7 million.
- Non-current prepaid taxes for the 2012 fiscal year still in the appeals process consists of corporate income tax amounting to US\$0.6 million.

Piutang non-usaha pihak-pihak berelasi

Akun Piutang non-usaha dari pihak-pihak berelasi mencerminkan porsi tidak lancar dari pinjaman yang diberikan kepada karyawan manajemen kunci pada akhir 2015.

Aset tetap, bersih

Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar AS\$5,2 juta dibandingkan pada periode sebelumnya (2015: AS\$1.603,3 juta vs 2014: AS\$1.608,5 juta), mencerminkan biaya penyusutan yang diakui sebesar AS\$121,4 juta dan diimbangi oleh penambahan aset tetap dalam penyelesaian sebesar AS\$110,0 juta dan penambahan aset untuk provisi atas penghentian pengoperasian aset sebesar AS\$6,2 juta.

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan langsung yang disebabkan oleh semua risiko industri, termasuk namun tidak terbatas terhadap gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik (termasuk gangguan usaha lainnya). Aset tetap diasuransikan sebesar biaya pengganti. Perseroan percaya bahwa pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

Silakan merujuk pada pembahasan proyek modal utama pada bagian "Modal dan Investasi Berkelanjutan" untuk informasi tentang peningkatan aset tetap dalam penyelesaian.

Non-trade receivables related parties

Non-trade receivables related parties reflect the non-current portion of loans given to key management personnel at the end of 2015.

Fixed assets, net

Fixed assets, net of accumulated depreciation, in 2015 decreased by US\$5.2 million compared to the prior year (2015: US\$1,603.3 million vs 2014: US\$1,608.5 million) reflecting a depreciation expense recognized during the year of US\$121.4 million, offset by the additions to fixed assets under constructions of US\$110.0 million and additional assets for provision for asset retirement obligations of US\$6.2 million.

Fixed assets are insured against the risk of direct physical loss or damage caused by all industrial risks; including but not limited to, earthquakes, fire and electrical or mechanical breakdown (including related business interruption). The fixed assets are insured at replacement cost. We believe that the insurance is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks.

Please refer to major capital projects discussion in the Capital and Sustaining Investment section for information about the increase in construction-in-progress.

Aset keuangan tidak lancar lainnya

Aset keuangan tidak lancar lainnya merupakan bagian jangka panjang dari pinjaman yang diberikan kepada karyawan Perseroan. Pada tahun 2015, saldo aset keuangan tidak lancar lainnya menurun sebesar AS\$2,8 juta, atau 17% yang mencerminkan angsuran pembayaran pinjaman dan pengaruh depresiasi mata uang Rupiah.

LIABILITAS

Liabilitas Perseroan di akhir tahun 2015 mengalami penurunan sebesar AS\$93,6 juta, atau 17% dibandingkan pada akhir tahun 2014. Penurunan ini diakibatkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, masing-masing sebesar AS\$59,9 juta dan AS\$33,7 juta.

Silakan lihat tabel berikut untuk daftar liabilitas.

Other non-current financial assets

Other non-current financial assets are part of long-term loans granted to employees of the Company. In 2015, other non-current financial assets decreased by US\$2.8 million, or 17%, which reflects the payment of the loan installments and the effect of the depreciation of the Rupiah.

LIABILITIES

The Company's liabilities at the end of 2015 decreased by US\$93.6 million, or 17% compared to 2014. The decrease was due to the decrease of current and non-current liabilities of US\$59.9 million and US\$33.7 million, respectively.

Please refer to the table for a description of liabilities.

Liabilitas	2015	%	2014	%	Var (\$)	Var (%)	Liabilities
(Dalam ribuan AS\$)							(US\$ in thousands)
LIABILITAS JANGKA PENDEK							CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak-pihak berelasi	8,712	2%	6,147	1%	2,565	42%	Trade payables - related parties
Utang usaha - pihak ketiga	76,924	17%	68,067	12%	8,857	13%	Trade payables - third parties
Akrual	16,802	4%	32,030	6%	(15,228)	-48%	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	5,600	1%	20,910	4%	(15,310)	-73%	Short-term employee benefit liabilities
Utang pajak	1,806	0%	41,845	8%	(40,039)	-96%	Taxes payable
Bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang	36,219	8%	35,979	7%	240	1%	Current portion of long-term bank borrowings
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	176	0%	346	0%	(170)	-49%	Share-based payment liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	2,260	0%	3,066	1%	(806)	-26%	Other current financial liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek	148,499	33%	208,390	38%	(59,891)	-29%	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG							NON - CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka panjang	109,858	24%	146,617	27%	(36,759)	-25%	Long-term bank borrowings
Liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang	14,383	3%	10,909	2%	3,474	32%	Long-term post-employment benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	124,780	27%	133,644	24%	(8,864)	-7%	Deferred tax liabilities, net
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	57,684	13%	49,277	9%	8,407	17%	Provision for asset retirement
Jumlah liabilitas jangka panjang	306,705	67%	340,447	62%	(33,742)	-10%	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	455,204	100%	548,837	100%	(93,633)	-17%	TOTAL LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Penurunan liabilitas jangka pendek pada akhir tahun 2015 jika dibandingkan dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar 29%, atau AS\$59,9 juta (2015: AS\$148,5 juta; 2014: AS\$208,4 juta).

Penurunan ini terutama berasal dari penurunan utang pajak sebesar AS\$40,0 juta, penurunan akrual sebesar

CURRENT LIABILITIES

Current liabilities at the end of 2015 decreased 29%, or US\$59.9 million, from the previous year (2015: US\$148.5 million vs 2014: US\$208.4 million).

The decrease was mainly due to a decrease in taxes payable of US\$40.0 million, an accrual decrease of

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

AS\$15,2 juta, penurunan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar AS\$15,3 juta, serta penurunan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan liabilitas atas pembayaran berbasis saham, masing-masing sebesar AS\$0,8 juta dan AS\$0,2 juta.

Penurunan ini sebagian diimbangi dengan peningkatan utang usaha - pihak ketiga sebesar AS\$8,8 juta, dan utang usaha - pihak-pihak berelasi dan bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang, masing-masing sebesar AS\$2,6 juta dan AS\$ 0,2 juta.

Utang usaha – pihak-pihak berelasi

Peningkatan saldo utang usaha - pihak-pihak berelasi pada akhir tahun 2015 sebesar AS\$2,6 juta dibandingkan akhir tahun 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya jasa manajemen yang diterima pada akhir tahun 2015 yang belum dibayar.

Utang usaha – pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga meningkat sebesar AS\$8,8 juta, atau 13% pada akhir tahun 2015 jika dibandingkan dengan saldo pada akhir tahun 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktifitas pemeliharaan peralatan tambang yang lebih tinggi, dan peningkatan frekuensi kegiatan pemeliharaan pada pabrik pengolahan.

Periode rata-rata pembayaran utang usaha kepada pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga meningkat dari 37 hari pada tahun 2014 menjadi 43 hari pada tahun 2015, terutama disebabkan oleh beban pokok pendapatan yang lebih rendah sebagai akibat peningkatan efisiensi operasi, dan lebih tingginya rata-rata saldo hutang usaha pada awal dan akhir tahun.

US\$15.2 million, a short-term employee benefits liabilities decrease of US\$15.3 million, as well as decreases in other current financial liabilities and share-based payment liabilities of US\$0.8 million and US\$0.2 million, respectively.

These decreases were partially offset by increases in trade payables – third parties of US\$8.8 million, and trade payables – related parties and current portion of long-term borrowings of US\$2.6 million and US\$0.2 million, respectively.

Trade payables – related parties

The trade payables – related parties increased by US\$2.6 million at the end of 2015 compared to 2014, mainly due to an increase in outstanding management service fees payable at the end of 2015.

Trade payables – third parties

Trade payables – third parties balance increased by US\$8.8 million, or 13% compared to 2014. This increase was mainly due to higher maintenance activities on the mining equipment, and a higher frequency of shutdown maintenance activities at the processing plant.

The average days of outstanding trade payables for related parties and third parties increased from 37 days in 2014 to 43 days in 2015, due to lower cost of revenue driven by higher operating efficiencies, and a higher average of trade payables balance at the beginning and end of the year.

Rasio Siklus Operasi	2015	2014	Operating Cycle Ratios
Rata-rata saldo hutang usaha pada awal dan akhir tahun (Dalam ribuan AS\$)	79,925	74,865	Average of trade payables balance at beginning and end of the year (US\$ in thousands)
Jumlah rata-rata hari saldo hutang usaha (360/(beban pokok pendapatan/rata-rata saldo hutang usaha))	43	37	Days of trade payable outstanding (360/(Cost of revenue/average trade payables balance))

Akrual

Akrual pada akhir tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 48%, atau AS\$15,2 juta dibandingkan pada akhir tahun 2014 (2015: AS\$16,8 juta; 2014: AS\$32,0 juta).

Accruals

2015 accruals decreased by 48%, or US\$15.2 million, compared to 2014 (2015: US\$16.8 million; 2014: US\$32.0 million)

Penurunan terbesar bersumber dari penurunan akrual barang dan jasa sebesar AS\$7,8 juta. Penurunan ini sejalan dengan program efisiensi biaya yang tengah dijalankan oleh Perseroan.

Penurunan berikutnya sebesar AS\$7,2 juta berasal dari akrual atas royalti, retribusi air, sewa tanah dan lain-lain. Penurunan ini terutama diakibatkan oleh penurunan pendapatan yang merupakan dasar pengali tarif royalti sesuai dengan Kontrak Karya.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada akhir tahun 2015 mengalami penurunan sebesar AS\$15,3 juta jika dibandingkan dengan akhir tahun 2014 (2015: AS\$5,6 juta; 2014: AS\$20,9 juta). Penurunan ini berkaitan dengan kebijakan pengetatan Perseroan yang berhubungan dengan gaji, upah dan liabilitas imbalan kerja lainnya.

Utang Pajak

Penurunan saldo utang pajak sebesar 96% atau sebesar AS\$40,0 juta pada akhir tahun 2015 jika dibandingkan dengan akhir tahun 2014, terutama disebabkan oleh perbedaan pembukuan atas hasil penghitungan PPh Badan tahun 2015 dan 2014. Untuk tahun pajak 2015, Perseroan membukukan kelebihan pembayaran PPh Badan sehingga diakui sebagai pajak dibayar dimuka. Sementara di tahun 2014, Perseroan membukukan kekurangan pembayaran PPh Badan sehingga diakui dan dicatat sebagai utang pajak.

Bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang

Saldo pada akhir tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1%, atau sebesar AS\$0,2 juta jika dibandingkan pada akhir tahun 2014, yang merupakan tambahan amortisasi atas biaya pinjaman. Jumlah pokok angsuran pinjaman SEFA yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek adalah AS\$37,5 juta. Silakan lihat bagian Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan, Peleburan Usaha, atau bagian Restrukturisasi Hutang/Modal untuk analisis rinci dan diskusi tentang fasilitas ini.

The largest decrease was derived from a decrease in the accrual of goods and services in the amount of US\$7.8 million. The decrease is in line with the cost efficiency program being implemented by the Company.

Another decrease of US\$7.2 million derived from the accrual of royalties, water levy, land rent, and others. The decrease was primarily due to a decrease in revenue which is the basis of the royalty calculations as per the Contract of Work.

Short-term employee benefits liabilities

Short-term employee benefit liabilities at the end of 2015 decreased by US\$15.3 million over 2014 (2015: US\$5.6 million; 2014: US\$20.9 million). The decrease was associated with the Company's tightening of salaries, wages and other employee benefit obligations.

Taxes payable

A decrease in the balance of tax payable of 96% or US\$40.0 million at the end of 2015 as compared to 2014 was mainly due to differences in accounting on corporate income tax calculations 2015 and 2014. For 2015, the Company booked corporate income tax overpayment and recognized under prepaid taxes. While for 2014, the Company booked corporate income tax underpayment which was recognized and recorded under taxes payable.

Current portion of long-term bank borrowings

The current portion of long-term bank borrowings at the end of 2015 increased by 1%, or US\$0.2 million, compared to 2014, due to the amortization of debt issuance costs. The amount of SEFA principal installments classified as short-term liabilities was US\$37.5 million. Please refer to the section Material Information for Investment, Expansion, Divestment, Mergers, Acquisitions, or a part of the Debt/Capital Restructuring for detailed analysis and discussion on this facility.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang pada akhir tahun 2015 mengalami penurunan 10%, atau sebesar AS\$33,7 juta (2015: AS\$306,7 juta; 2014: AS\$340,4 juta), yang terutama berasal dari penurunan pinjaman bank jangka panjang sebesar AS\$36,7 juta dan liabilitas pajak tangguhan sebesar AS\$8,9 juta.

Penurunan tersebut diimbangi dengan kenaikan provisi atas penghentian pengoperasian aset sebesar AS\$8,4 juta, serta kenaikan pada liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar AS\$3,5 juta.

Pinjaman bank jangka panjang

Pinjaman bank jangka panjang mencerminkan saldo penarikan pinjaman SEFA (*Senior Export Facility Agreement*) yang pertama dan kedua, biaya pinjaman ditanggung yang belum diamortisasi untuk premi *Nippon Export and Investment Insurance* (NEXI) dan biaya dimuka, dikurangi pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo pada porsi jangka pendek seperti dijelaskan sebelumnya. SEFA ditandatangani Perseroan pada tanggal 30 November 2009 dengan Mizuho Bank, Ltd. (sebelumnya bernama Mizuho Corporate Bank, Ltd.) sebagai *Facility Agent*, MUFG Union Bank, N.A. (sebelumnya bernama Union Bank, N.A.) sebagai *Collateral Agent* dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. dan Mizuho Bank, Ltd. sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("Pemberi Pinjaman"), dengan Vale S.A. (entitas pengendali utama tidak langsung Perseroan) bertindak sebagai Penjamin ("Penjamin").

Pinjaman bank ini merupakan pembiayaan untuk proyek Karebbe dengan tingkat bunga LIBOR ditambah 1,5% pertahun.

Pada tahun 2015 tingkat suku bunga berkisar antara 1,88% - 2,03% (2014: 1,83% - 1,89%).

Pada 2015, saldo pinjaman bank jangka panjang sebesar AS\$109,9 juta mengalami penurunan sebesar 25% atau AS\$36,7 juta dibandingkan pada saldo akhir tahun 2014 sebesar AS\$146,6 juta.

Penurunan saldo pinjaman jangka panjang ini terutama disebabkan pembayaran angsuran pinjaman pada tahun 2015.

NON-CURRENT LIABILITIES

The non-current liabilities at the end of 2015 decreased by 10%, or US\$33.7 million (2015: US\$306.7 million; 2014: US\$340.4 million), which was derived from a decrease in long-term bank borrowings of US\$36.7 million, and deferred tax liabilities of US\$8.9 million.

The decrease was offset by an increase in the provision for asset retirement of US\$8.4 million, and an increase in long-term employee benefit liabilities of US\$3.5 million.

Long-term bank borrowings

The long-term bank borrowings represent the first and second drawdown of the SEFA (*Senior Export Facility Agreement*), un-amortized deferred loan issuance costs for the *Nippon Export and Investment Insurance* (NEXI) premium and upfront fee, minus the current maturities portion of long-term bank borrowings as explained previously. SEFA was signed by the Company on November 30, 2009 with Mizuho Bank, Ltd. (formerly Mizuho Corporate Bank, Ltd.) as the *Facility Agent*, MUFG Union Bank, N.A. (formerly Union Bank, N.A.) as the *Collateral Agent* and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. and Mizuho Bank, Ltd as the *Mandated Lead Arrangers* ("Lender"), with Vale S.A. (indirect controlling entity of the Company) as the *Guarantor* (the "Guarantor").

The bank loan was used to finance the Karebbe project with a LIBOR interest rate plus 1.5% per annum.

In 2015, interest rates on this facility ranged between 1.88% - 2.03% (2014: 1.83% - 1.89%).

In 2015, long-term bank borrowings of US\$109.9 million decreased by 25%, or US\$36.7 million, compared to US\$146.6 million in 2014.

The decrease in the long-term bank borrowings was mainly due to loan repayments in 2015.

Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang

Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang terdiri dari manfaat pensiun dalam kaitannya dengan UU Ketenagakerjaan dan Tunjangan Kesehatan Pasca-Pensiun (PRMC).

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu DPLK Bumiputera.

Perseroan juga menyediakan imbalan layanan kesehatan pascakerja untuk pensiunan yang memenuhi syarat. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan kepada karyawan yang bekerja hingga mencapai usia pensiun dan dipekerjakan sebelum penandatanganan perjanjian kerja bersama pada bulan Januari 2011 dan memilih untuk mendaftar ke program ini. Aktuaris independen yang berkualitas menilai liabilitas ini setiap tahunnya. Mulai tahun 2014, Perseroan mengubah metode untuk mendanai program ini melalui program asuransi.

Liabilitas atas imbalan kerja per 31 Desember 2015 dan 2014 dihitung oleh PT. Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen. Saldo liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang pada akhir tahun 2015 naik sebesar AS\$3,5 juta jika dibandingkan saldo pada akhir tahun 2014 (2015: AS\$14,4 juta; 2014: AS\$10,9 juta).

Liabilitas pajak tangguhan, bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan, bersih pada akhir tahun 2015 adalah sebesar AS\$124,8 juta atau 7% lebih rendah sebesar AS\$8,9 juta jika dibandingkan dengan saldo pada akhir tahun 2014 sebesar AS\$133,6 juta.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh perbedaan fiskal atas penyusutan dan amortisasi aset sebesar AS\$8,3 juta dan penurunan akrual/provisi lain sebesar AS\$5,2 juta.

Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan atas perbedaan pada penyisihan untuk bahan pembantu usang dan penurunan nilai persediaan sebesar AS\$2,8 juta, provisi atas penghentian pengoperasian aset sebesar AS\$2,1 juta, dan liabilitas atas imbalan pasca kerja sebesar AS\$0,8 juta.

Long-term post-employment benefits liabilities

The long-term post-employment benefits liabilities consist of pension benefits in relation to the Labor Law and Post-Retirement Medical Care (PRMC) benefits.

The Company maintained a defined contribution pension plan which is managed by a Financial Institution Pension Fund (DPLK) appointed by the Company, namely DPLK Bumiputera.

The Company also provides post-retirement healthcare benefits to eligible retirees. The entitlement to these benefits is usually given to those employees remaining in service up to retirement age who were hired prior to the signing of the collective labor agreement in January 2011 and who opted to enroll in this program. A qualified independent actuary values this liability annually. Starting in 2014, the Company has changed its method to fund this program through an insurance program.

Employee benefits liabilities as of December 31, 2015 and 2014 were calculated by PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary. The balance of long-term post-employment benefit liabilities at the end of 2015 increased by US\$3.5 million compared to the balance at year-end of 2014 (2015: US\$14.4 million; 2014: US\$10.9 million).

Deferred tax liabilities, net

Deferred tax liabilities, net at the end of 2015 amounted to US\$124.8 million, US\$8.9 million or a 7% decrease compared to 2014 which amounted to US\$133.6 million.

This decrease is mainly due to the fiscal difference on asset depreciation and amortization amounting to US\$8.3 million and a decrease in other accruals/provisions in the amount of US\$5.2 million.

The decrease was offset by an increase in the difference in allowance for obsolete supplies and a decrease in inventories value in the amount of US\$2.8 million, a provision for asset retirement amounting to US\$2.1 million, and post-employment benefits liabilities amounting to US\$0.8 million.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Provisi atas penghentian pengoperasian aset mengacu pada kewajiban hukum atau konstruktif berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset berwujud jangka panjang yang dihasilkan dari akuisisi, konstruksi atau pengembangan dan/atau operasi normal dari aset jangka panjang.

Kenaikan provisi pada akhir tahun 2015 mencerminkan tambahan penyisihan tahun 2015 yang disebabkan karena perubahan estimasi arus kas masa depan dan beban akresi tambahan yang diakui oleh Perseroan untuk tahun 2015. Beban ini diakui sebagai bagian dari biaya keuangan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan.

EKUITAS

Sepanjang tahun 2015 harga nikel LME menurun tajam namun Perseroan mampu membukukan keuntungan sebesar AS\$50,5 juta yang tercermin pada peningkatan jumlah ekuitas pada akhir tahun 2015.

Peningkatan ini sedikit diimbangi dengan kerugian aktuaria dari program pensiun iuran pasti dan tunjangan kesehatan pasca-pensiun sebesar AS\$1,9 juta. Sehingga jumlah ekuitas pada akhir tahun 2015 sebesar AS\$1.834,0 juta atau meningkat sebesar AS\$48,6 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada akhir tahun 2014 sebesar AS\$1.785,4 juta.

HASIL DAN RASIO KEUANGAN

Hasil dan rasio keuangan PT Vale tetap menunjukkan posisi keuangan yang kuat pada tahun 2015 walaupun terdapat tantangan tingkat harga nikel yang relatif rendah.

Provision for asset retirement

The provision for asset retirement is provided for legal or constructive obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from an acquisition, construction or development and/or the normal operation of long-lived assets.

The higher provision at the end of 2015 reflects additional provisions made in 2015 due to changes in estimated future cash flow and a further accretion expense recognized by the Company in 2015. This expense was recognized as part of finance costs in the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income.

EQUITY

Throughout 2015, the LME nickel price dropped sharply, but the Company was able to record a profit of US\$50.5 million which was reflected in an increase in total equity at the end of 2015.

This increase was slightly offset by an actuarial loss from the defined contribution pension plan and post-retirement medical benefits of US\$1.9 million. The amount of equity at the end of 2015 amounted to US\$1,834.0 million, an increase of US\$48.6 million compared to equity of US\$1,785.4 million at the end of 2014.

FINANCIAL RETURNS AND RATIOS

PT Vale's financial returns and ratios remained strong in 2015 despite challenges in maintaining operational efficiencies and the relatively low level of nickel prices.

Rasio Profitabilitas (dalam %, kecuali Laba per Saham)	2015	2014	Disesuaikan Adjusted 2015*	Profitability Ratios (in %, except EPS)
Marjin laba kotor (Laba kotor/pendapatan)	15%	30%	38%	Gross profit margin (Gross profit/sales)
Marjin laba bersih (Laba bersih keseluruhan/pendapatan)	6%	17%	24%	Net profit margin (Profit for the year/sales)
Pengembalian Aset (Laba bersih keseluruhan/jumlah aset)	2%	7%	11%	Return on Assets (Profit for the year/total assets)
Pengembalian Ekuitas (Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas)	3%	10%	15%	Return on Equity (Profits for the year/total equity)
Pengembalian atas Rata-rata Modal yang Digunakan (Laba sebelum pajak/rata-rata dari jumlah pinjaman bersih dan total ekuitas pada awal dan akhir tahun)	4%	12%	19%	Return on Average Capital Employed (Profits before income tax/average of total net borrowings liabilities and total equity at the beginning and end of the year)
Laba bersih per saham (Laba tahun berjalan/ saham yang beredar) - AS\$/saham	0.005	0.017	0.026	Basic earnings per share (Total profits for the year/ outstanding shares) - US\$/share

* menggunakan asumsi harga realisasi rata-rata tahun 2014 | using 2014 average realized nickel price assumption

PROFITABILITAS

Rasio profitabilitas Perseroan disajikan pada tabel Rasio Profitabilitas. Rasio profitabilitas Perseroan pada tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014. Rasio profitabilitas yang lebih rendah ini terutama dipengaruhi oleh penurunan rata-rata harga realisasi nikel dalam matte sebesar 27% dibandingkan dengan tahun 2014. Apabila rasio profitabilitas Perseroan pada tahun 2015 dihitung menggunakan asumsi rata-rata harga realisasi nikel tahun 2014 sehingga menghilangkan dampak perbedaan harga realisasi rata-rata nikel, rasio tersebut menunjukkan peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan pada tahun 2015 telah berhasil meningkatkan keunggulan dalam menghasilkan margin.

Perseroan memiliki sejumlah 9.936.338.720 saham yang ditempatkan dan beredar. Laba bersih per saham adalah sebesar AS\$0,005 pada tahun 2015 dibandingkan dengan AS\$0,017 pada tahun 2014. Laba bersih Perseroan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 menunjukkan peningkatan pada perhitungan yang disesuaikan dengan menggunakan asumsi harga realisasi rata-rata nikel tahun 2014. Hal ini menguatkan pencapaian operasi Perseroan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tingkat keuntungan yang lebih tinggi.

PROFITABILITY

The Company's profitability ratios are shown in Profitability Ratios table. The Company's profitability ratios were lower in 2015 compared to 2014. The lower profitability ratios were mainly due to a decrease in the average realized price of nickel in matte of 27% compared to 2014. When the Company's profitability ratios in 2015 were calculated using price assumptions for the average realized nickel price in 2014, to eliminate the impact of differences in the average realized price of nickel, it showed an increase in 2015 compared to 2014. This demonstrates that in 2015 the Company managed to improve its performance in generating margins.

The Company has 9,936,338,720 shares issued and outstanding. Basic earnings per share were US\$0.005 in 2015 compared to US\$0.017 in 2014. The earnings per share in 2015 was higher than 2014 when it is calculated using the 2014 average realized nickel price. It reinforces the Company's achievement of improved operational efficiencies and effectiveness which lead to higher profit levels.

Rasio Likuiditas	2015	2014	Liquidity Ratio
Rasio lancar (Aset lancar/liabilitas jangka pendek)	4.04	2.98	Current ratio (Current assets/current liabilities)
Rasio modal kerja bersih terhadap total aset ((aset lancar - liabilitas jangka pendek)/total aset)	0.20	0.18	Net working capital to asset ratio (Current assets - current liabilities)/total assets)

LIKUIDITAS

Risiko likuiditas muncul pada situasi di mana Perseroan memiliki kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan terus memantau arus kas perkiraan dan aktual serta mencocokkan waktu jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan. Rasio likuiditas Perseroan disajikan pada tabel Rasio Likuiditas. Likuiditas Perseroan menunjukkan peningkatan pada tahun 2015 dibanding tahun 2014. Hal ini menunjukkan Perseroan memiliki ketersediaan kas dan setara kas yang cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek Perseroan.

LIQUIDITY

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. The Company's liquidity ratios are shown in the Liquidity Ratio table. The Company's liquidity increased in 2015 compared to 2014. It shows that the Company has sufficient cash and cash equivalents to fulfil company current liabilities.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Rasio lancar pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 4,04, meningkat sebesar 36% dibandingkan rasio tahun 2014. Peningkatan rasio lancar terutama dipengaruhi oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 29%. Penurunan liabilitas jangka pendek terutama dipengaruhi oleh penurunan akrual, penurunan hutang pajak, dan penurunan liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Silakan lihat bagian Aset Lancar dan Liabilitas Jangka Pendek - untuk analisa lebih lanjut tentang aset lancar dan liabilitas jangka pendek.

The current ratio at December 31, 2015 was 4.04, higher by 36% than the 2014 ratio. The increase is mainly due to current liabilities that are 29% lower. The decrease in current liabilities was primarily driven by lower accruals, lower taxes payable, and lower current post employment benefits. Please refer to – Current Assets and Current Liabilities – section for further analysis about current assets and current liabilities.

Rasio modal kerja bersih terhadap total aset berada di angka 0,20 untuk tahun 2015 dan 0,18 untuk 2014.

The net working capital to total assets ratio was 0.20 for 2015 and 0.18 for 2014.

Rasio Liabilitas	2015	2014	Financial Leverage Ratios
Rasio utang terhadap ekuitas (Total liabilitas/total ekuitas)	0.25	0.31	Debt to equity ratio (Total liabilities / total equity)
Rasio utang (Total liabilitas/total aset)	0.20	0.24	Debt ratio (Total liabilities / total assets)
Rasio utang tertentu (Total pinjaman bank bersih*/total aset)	0.06	0.08	Specific debt ratio (Total net bank borrowings*/total assets)
Rasio utang tertentu terhadap ekuitas (Total pinjaman bank bersih*/total ekuitas)	0.08	0.10	Specific debt to equity ratio (Total net bank borrowings*/total equity)
Utang terhadap EBITDA (Total pinjaman bank bersih*/total EBITDA)	0.68	0.49	Debt to EBITDA coverage (Total net bank borrowings*/total EBITDA)
Utang terhadap nilai Perseroan (Total pinjaman bank bersih*/nilai Perseroan)	0.13	0.07	Debt to enterprise value (Total net bank borrowings*/enterprise value)
Arus kas dari operasi terhadap utang (Arus kas dari operasi/total pinjaman bank bersih*)	0.92	1.77	Operating cash flow to debt coverage (Operating cash flow/total net bank borrowings*)
Total pinjaman bank bersih/(Arus kas dari operasi dikurangi dividen)	1.09	0.82	Total net bank borrowings*/(Operating cash flow minus dividends paid) coverage

* Pinjaman bank bersih termasuk biaya pinjaman | Net of total bank borrowings after including debt issuance cost

LEVERAGE KEUANGAN

Liabilitas Perseroan pada tahun 2015 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan liabilitas terutama dipengaruhi oleh penurunan akrual, penurunan hutang pajak, penurunan liabilitas imbalan kerja jangka pendek, penurunan pinjaman bank jangka panjang, dan penurunan liabilitas pajak tangguhan.

Rasio liabilitas Perseroan disajikan pada tabel Rasio Liabilitas. Pada tahun 2015, rasio hutang terhadap ekuitas adalah sebesar 0,25, lebih rendah dari rasio tahun 2014 yang sebesar 0,31. Rasio hutang pada tahun 2015 adalah sebesar 0,20, lebih rendah dari rasio 2014 yang sebesar 0,24. Penurunan rasio hutang terhadap ekuitas dan penurunan rasio hutang terutama dipengaruhi oleh penurunan tingkat pinjaman Perseroan.

FINANCIAL LEVERAGE

The Company's liabilities in 2015 decreased compared to 2014. The decrease in liabilities were driven by lower accruals, lower taxes payable, lower current post employment benefits, lower long term bank borrowing, and lower deferred tax liabilities.

The Company's leverage ratios are shown in the Financial Leverage Ratios table. The 2015 debt to equity ratio of 0.25 was lower than the ratio of 0.31 in 2014. The 2015 debt ratio was 0.20 which was lower than 0.24 in 2014. The decrease in debt to equity ratio and debt ratio are mainly driven by lower debt level.

Rasio hutang tertentu dan rasio hutang tertentu terhadap ekuitas untuk tahun 2015 yang masing-masing adalah sebesar 0,06 dan 0,08 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2014 yang masing-masing adalah sebesar 0,08 dan 0,10. Penurunan rasio hutang tertentu dan rasio hutang tertentu terhadap ekuitas terutama dipengaruhi oleh penurunan pinjaman bank karena adanya pembayaran angsuran pinjaman SEFA.

The specific debt ratio and specific debt to equity ratio in 2015 which were 0.06 and 0.08, respectively decreased from 0.08 and 0.10 in 2014, respectively. The decreases were mainly driven by lower bank borrowing as installment payments were made for the SEFA loan.

Rasio hutang terhadap EBITDA dan rasio hutang terhadap nilai perseroan pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2014. Rasio hutang terhadap EBITDA meningkat menjadi 0,68 pada tahun 2015 dari sebelumnya 0,49 pada tahun 2014. Meskipun jumlah pinjaman bank mengalami penurunan, penurunan rata-rata harga realisasi nikel yang signifikan mendorong peningkatan rasio hutang terhadap EBITDA. Rasio hutang terhadap nilai perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar 0,13, lebih besar dari tahun 2014 yang sebesar 0,07. Meskipun total pinjaman bank pada posisi 31 Desember 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014, di sisi lain penurunan harga saham dan melemahnya Rupiah terhadap dolar AS pada periode yang sama telah meningkatkan rasio hutang terhadap nilai perseroan.

Debt to EBITDA coverage and debt to enterprise value in 2015 increased compared to 2014. The debt to EBITDA coverage increased to 0.68 in 2015 from 0.49 in 2014. Although total bank borrowing decreased, the significant decrease in the average realized nickel price elevated the debt to EBITDA ratio. The debt to enterprise ratio in 2015 was 0.13, higher than the ratio in 2014 of 0.07. Despite the fact that total bank borrowing decreased as of December 31, 2015 compared to the same period in 2014, a lower share price and the weakening of the Indonesian Rupiah against the US dollar for the same period elevated the debt to enterprise ratio.

Rasio arus kas dari operasi terhadap hutang menunjukkan penurunan dari 1,77 pada tahun 2014 menjadi 0,92 pada tahun 2015. Rasio pinjaman bank bersih terhadap arus kas dari operasi dikurangi dividen menunjukkan peningkatan dari 0,82 di 2014 menjadi 1,09 di 2015. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan harga realisasi rata-rata nikel pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Meskipun demikian, Perseroan tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman bank sehingga posisi jumlah pinjaman bank pada 31 Desember 2015 menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama untuk tahun 2014.

Operating cash flow to debt coverage decreased from 1.77 in 2014 to 0.92 in 2015. Total net bank borrowings to operating cash flow minus dividends paid coverage increased from 0.82 in 2014 to 1.09 in 2015. It was mainly driven by a lower average realized nickel price in 2015 compared to 2014. Nevertheless, the Company continues to meet its obligation to pay its bank borrowings, hence the bank borrowing position at December 31, 2015 decreased compared to the same period in 2014.

Rasio Solvabilitas	2015	2014	Solvency Ratios
(Dalam ribuan AS\$)			(US\$ in thousands)
EBITDA	214,692	371,846	EBITDA
Total pinjaman bank bersih	146,077	182,596	Total Borrowings
Rasio solvabilitas (EBITDA/total pinjaman)	1.47	2.04	Solvency Ratio (EBITDA/total borrowings)

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

SOLVABILITAS

Rasio solvabilitas Perseroan disajikan pada tabel Rasio Solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur EBITDA perseroan dibandingkan dengan total pinjaman. Rasio ini memberikan ukuran sejauh mana perseroan akan terus memenuhi komitmen untuk membayar pinjaman jangka panjang.

Perseroan telah memenuhi kewajiban membayar cicilan pinjaman sebesar AS\$37,5 juta selama tahun 2015. Hal ini telah menurunkan jumlah pinjaman bersih pada 31 Desember 2015 menjadi AS\$146,1 juta dari sebelumnya AS\$182,6 juta untuk periode yang sama tahun 2014. Meskipun jumlah pinjaman bersih menurun, penurunan EBITDA pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 berpengaruh signifikan pada penurunan rasio solvabilitas dari 2,04 pada tahun 2014 menjadi 1,47 pada tahun 2015. Penurunan EBITDA terutama dipengaruhi oleh penurunan harga realisasi rata-rata nikel pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014.

KOLEKTIBILITAS

Seluruh piutang usaha Perseroan berasal dari dua pemegang saham terbesar yang juga pendiri Perseroan, yakni VCL dan SMM. VCL dan SMM memiliki kepentingan strategis jangka panjang terhadap keberhasilan operasi Perseroan yang berkelanjutan. Keduanya merupakan perusahaan tambang terbesar di dunia dengan kualitas kredit dan reputasi yang baik. Pada umumnya piutang usaha dibayar dalam jangka waktu 30 sampai 60 hari dari tanggal pengiriman. Sejak berdiri, Perseroan tidak pernah mengalami masalah dengan penerimaan piutang dan kami yakin bahwa hal ini akan terus berlanjut.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

STRUKTUR MODAL

Struktur modal Perseroan merupakan kombinasi dari pinjaman bank jangka panjang baik yang tercatat pada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dan ekuitas Perseroan.

SOLVENCY

The Company's solvency ratios are shown in the Solvency Ratios table. The solvency ratio measures the size of a company's EBITDA compared to its total borrowings. It provides a measurement of how likely a company is to continue meeting its long-term borrowing commitments.

The Company has fulfilled its obligation to pay borrowing installments of US\$37.5 million in 2015. This has decreased total net loans as of December 31, 2015 to US\$146.1 million from US\$182.6 million for the same period in 2014. Even though total net borrowing decreased, the decrease in EBITDA in 2015 compared to 2014 had a significant effect on the decrease of the solvency ratio from 2.04 in 2014 to 1.47 in 2015. The decrease in EBITDA was mainly driven by a lower average realized nickel price in 2015 compared to 2014.

COLLECTABILITY

All of our trade receivables are due from our two largest shareholders who are also our founders, VCL and SMM. VCL and SMM have a long-term strategic interest in the continuing success of our operations. Both are among the largest mining companies in the world with very good credit quality and good reputations. Normally our trade receivables are collected within 30 to 60 days of shipment. Since the inception of the Company, we have never experienced problems with receivable collections and we are confident that this will continue to be the case.

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

CAPITAL STRUCTURE

Our capital structure is the combination of long-term bank borrowings, both under current and non-current liabilities, and the equity of the Company.

Struktur Modal	2015	%	2014	%	Var (\$)	Var (%)	Capital Structure
(Dalam ribuan AS\$)							(US\$ in thousands)
Bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang	36,219	2%	35,979	2%	240	1%	Current portion of long-term bank borrowings
Pinjaman bank jangka panjang	109,858	6%	146,617	7%	(36,759)	-25%	Long-term bank borrowings
Ekuitas	1,833,957	93%	1,785,353	91%	48,604	3%	Equity
	1,980,034		1,967,949		12,085	1%	

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan struktur modal PT Vale disusun untuk mendanai operasional Perseroan dan strategi pertumbuhan serta pada saat yang sama menjaga neraca yang sehat. Mempertimbangkan ketidakpastian karena fluktuasi harga nikel, kami mengupayakan tingkat pemanfaatan neraca yang rendah sebagai persiapan dalam menghadapi dampak dari melemahnya arus kas pada saat siklus pasar menurun. Perseroan terus berusaha keras untuk menjaga Profil finansial yang konservatif yang kami percaya sesuai dengan industri Perseroan.

Faktor utama yang dipertimbangkan dalam struktur modal PT Vale adalah sebagai berikut:

- Risiko bisnis;
- Fleksibilitas finansial;
- Tingkat pertumbuhan; dan
- Kondisi pasar.

Dasar pemilihan kebijakan dan strategi penyusunan struktur modal, Perseroan mempertimbangkan risiko yang ada. Dalam pengelolaan struktur modal, Perseroan akan melakukan penyesuaian yang diperlukan ketika terdapat perubahan signifikan pada pasar dan kondisi ekonomi. Secara umum, Perseroan melakukan pengamatan dan pengkajian terhadap struktur modal dengan menggunakan rasio hutang terhadap ekuitas sebagai basis. Rasio ini dihitung dengan membagi Total Liabilitas dengan Ekuitas. Rasio hutang terhadap ekuitas kami masing-masing sebesar 0,25 dan 0,31 untuk 2015 dan 2014. Kami berkeyakinan bahwa Perseroan masih dapat mengelola struktur modalnya demikian juga pengelolaan atas risiko leverage. Lihat bagian Leverage Keuangan untuk diskusi lebih lanjut tentang leverage keuangan.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

PT Vale's capital structure policy is set to facilitate the financing of our operation and growth while maintaining a sound balance sheet. Considering the uncertainty due to fluctuation in the nickel price, we emphasize a low leverage balance sheet in order to prepare for the impact of weaker cash flows during down cycles. We always strive to maintain a conservative financial profile that we believe is appropriate for our industry.

The main factors that have been considered in PT Vale's capital structure are as follows:

- Business risks;
- Financial flexibility;
- Growth rate; and
- Market conditions.

The Company set its capital structure management policy basis and strategy against the risk. The Company manages capital structure and makes any necessary adjustment in view of significant changes in market and economic conditions. Generally, the Company monitors and assesses its capital structure using ratio of debt-to-equity as the basis. The ratio is calculated by dividing Total Liabilities by Equity. Our debt-to-equity ratios were 0.25 and 0.31 in 2015 and 2014 respectively. We believe that we are still able to manage our capital structure as well as leverage risk. Please refer to the Financial Leverage section for further discussion about financial leverage.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Selama tahun 2015 tidak ada ikatan material terkait investasi barang modal.

INVESTASI BARANG MODAL DAN BERKELANJUTAN

Investasi modal dan investasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga bisnis kami tetap tumbuh dan pada saat yang sama menjaga kesinambungan tingkat produksi. Substitusi sumber energi dan efisiensi, integritas aset, pengurangan biaya dan perbaikan lingkungan adalah poin penting dari program-program investasi modal dan investasi yang berkelanjutan pada tahun berjalan.

Perseroan berada di tengah pelaksanaan program investasi modal multi-tahun yang meliputi pengoptimalan operasional pabrik peleburan di Sorowako, terutama dengan pengurangan down time dalam proses-proses yang ada saat ini; penambahan armada tambang untuk mengoptimalkan operasi tambang; pemeliharaan integritas peralatan dan infrastruktur yang ada saat ini; serta penggantian alat berat untuk meningkatkan ketersediaan fisik aset kami. Nilai proyek-proyek tersebut adalah 77% dari investasi modal dan berkelanjutan untuk aset tetap dalam penyelesaian yaitu sebesar AS\$84,9 juta pada tahun 2015.

Investasi modal pada tahun berjalan didanai dari internal PT Vale. Sebagian besar dari belanja modal kami adalah dalam dolar AS, yang merupakan mata uang fungsional kami. Oleh karena itu, kami tidak terekspos terhadap risiko nilai tukar mata uang asing secara signifikan.

PENAMBAHAN ARMADA TAMBANG

Untuk meningkatkan dan memaksimalkan keluaran dari aktivitas penambangan, Perseroan melakukan penambahan armada untuk mendukung pengoperasian tambang di tahun 2015. AS\$27,6 juta telah dibelanjakan untuk penambahan armada tambang di tahun 2015.

PENGGANTIAN ALAT BERAT

Cakupan dari proyek penggantian alat berat ini adalah untuk mengganti alat berat yang ada yang telah mencapai akhir umur ekonomisnya. Peningkatan biaya

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL INVESTMENT

There was no material commitment for capital investment in 2015.

CAPITAL AND SUSTAINING INVESTMENTS

Capital and sustaining investments are required to grow our business as well as to sustain our current levels of production. Energy substitution and efficiency, asset integrity, cost reduction and environmental improvement are focal points of our current capital and sustaining investment program.

The Company is in the middle of a multi-year capital program, which includes optimizing the operation of our smelter in Sorowako, primarily by eliminating downtime in the current process; having additional mining fleet to optimize mining operations; preserving the existing equipment and infrastructure integrity; and replacement of heavy equipment to improve the physical availability of our assets. These projects constituted 77% of our 2015 capital and sustaining investments for construction-in-progress of US\$84.9 million.

The capital investments were funded by PT Vale's internal sources. A large portion of our capital expenditures are denominated in U.S. dollars, which is our functional currency. Therefore, we do not expect to have significant foreign currency exposure.

ADDITIONAL MINING FLEET

To increase and maximize mining output as part of the strategy to optimize nickel production, the Company added to its mining fleet to support mining operations in 2015. US\$27.6 million was spent on the additional mining fleet.

HEAVY EQUIPMENT REPLACEMENT

The scope of the heavy equipment replacement project is to replace existing heavy equipment that has reached the end of its economic life. Increasing maintenance

perawatan serta penurunan kinerja alat merupakan indikator utama untuk penggantian alat berat.

Pada 2015, AS\$27,3 juta telah dicatat di dalam akun aset tetap dalam penyelesaian untuk penggantian alat berat dengan AS\$1,1 juta khusus untuk restorasi alat berat.

PROYEK PENGEMBANGAN TAMBANG

Proyek pengembangan tambang dilakukan untuk membangun infrastruktur seperti jalan tambang utama, tanggul, penampungan *Low Grade Ore* (LGO) dan kolam penampungan untuk bukit tambang baru di 2015. Wilayah ini akan ditambang pada 2016 dan pembangunan infrastruktur harus diselesaikan sebelum kegiatan penambangan dimulai.

Pada 2015, AS\$8,8 juta telah dibelanjakan terkait dengan pengembangan tambang termasuk diantaranya pembangunan jalan tambang utama dan infrastruktur pendukung lainnya.

PROYEK INTEGRITAS ASET

Tujuan dari proyek integritas aset adalah untuk mempertahankan integritas infrastruktur yang ada, termasuk memperbaiki, mengganti suku cadang, penguatan struktur, dan merenovasi konstruksi kerangka baja pabrik, yang diklasifikasikan sebagai risiko besar dalam penilaian tahunan kami. Proyek ini mencakup berbagai struktur dan fasilitas mekanikal di Sorowako.

Proyek ini menunjukkan komitmen kami terhadap keberlanjutan operasional dan keselamatan karyawan dan kontraktor. Selama 2015, sebanyak AS\$6,3 juta telah dibelanjakan untuk proyek integritas aset.

PROYEK KONVERSI BATUBARA

Pada tahun 2008, Perseroan telah memulai 2 tahap proyek konversi batubara yang akan menggantikan HSFO dengan batubara serbuk di beberapa area operasi Perseroan dan termasuk juga peningkatan infrastruktur yang ada untuk penanganan material curah. Tujuan utama proyek tahap pertama adalah untuk mengkonversikan sumber energi pada tanur pengering dari HSFO menjadi batubara, termasuk peningkatan infrastruktur penanganan material curah. Tahap kedua meliputi konversi yang sama pada tanur pereduksi.

costs and decreases in physical availability are the main indicators for heavy equipment replacement.

In 2015, US\$27.3 million was recorded in our construction in progress account for this heavy equipment replacement with US\$1.1 million for refurbishment included.

MINE DEVELOPMENT

The mine development project is designed to build infrastructure such as a main haul road, dyke, Low Grade Ore (LGO) storage and pocket pond for new mineable hills in 2015. These areas will be mined in 2016 and the infrastructure must be completed prior to the mining process commencing.

In 2015, US\$8.8 million was spent related to mine development including construction of a main haul road and other supporting infrastructure.

ASSET INTEGRITY PROJECTS

The purpose of the asset integrity projects is to preserve the existing infrastructure integrity, including the repair, retrofit, structural strengthening and refurbishment of steel structures in our plant, which were classified as major hazards during an annual assessment. Various structural and mechanical facilities in the Sorowako operations were included in the scope.

These projects demonstrate our commitment to operational sustainability and the well-being of our employees and contractors. During 2015, a total of US\$6.3 million was spent on asset integrity projects.

COAL CONVERSION PROJECT

In 2008 we began the two-phase coal conversion project that will replace HSFO with pulverized coal in certain of our operations and involves the upgrade of our existing bulk commodity material handling infrastructure. The main objective of phase one is to convert the energy source in our dryers from HSFO to pulverized coal, including upgrading our existing bulk commodity material handling infrastructure. The second phase will involve conversion in the kilns. This project will provide PT Vale with the flexibility to use either

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Proyek ini akan memberikan fleksibilitas pada Perseroan untuk memilih menggunakan batubara atau HSFO, tergantung pada kondisi ekonomi mana yang lebih menguntungkan atas dua sumber energi tersebut.

Proyek tahap pertama telah diselesaikan untuk mencapai manfaat penuh pada tahun 2014. Tahap kedua untuk proyek ini dimulai di tahun 2015 setelah selama beberapa tahun berada pada tahap studi. Tahap kedua mulai diimplementasikan pada 2 tanur pereduksi sebelum secara bertahap dilakukan ke tanur pereduksi yang lain.

PROYEK TRANSPORTASI BATUBARA

Kami telah memulai fase kedua peningkatkan kapasitas penyimpanan batubara yaitu meningkatkan kapasitas penanganan batubara di Pelabuhan Balantang dengan kapasitas tampung sebesar 11.500 ton batubara untuk mendukung kebutuhan Proyek Konversi Batubara. Pada tahun 2015, sekitar AS\$3,1 juta dikeluarkan atas proyek ini yang digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan area penyimpanan batubara di Pelabuhan Balantang.

PELAPISAN ULANG TANUR PEREDUKSI

Tanur pereduksi merupakan salah satu bagian penting dalam pengolahan nikel yang mempunyai fungsi untuk mengeringkan, memanaskan, dan mengurangi bijih nikel yang sudah tercampur sulfida (nikel sulfida) sebelum dilebur dalam tanur listrik. Cakupan dari pelapisan ulang tanur pereduksi adalah untuk mengganti interior tanur, yaitu lapisan bata tahan api dan *lifters*, dengan bahan yang identik dan sejenis. Penghentian sementara pengoperasian tanur pereduksi untuk pemeliharaan diperlukan untuk mengakomodasi pelapisan ulang lapisan bata tahan api dan penggantian *lifters*.

Pada tahun 2015, sekitar AS\$3 juta dikeluarkan untuk proyek ini dan sebagian besar diperuntukkan untuk tanur pereduksi nomor 4.

PROYEK PENGELOLAAN LIMBAH TAMBANG

Proyek pengelolaan limbah tambang dilakukan untuk menjaga kualitas air yang mengalir dari area penampungan ke sungai dan danau (Matano dan Mahalona). PT Vale mengoperasikan 19 (sembilan belas) area penampungan di wilayah Sorowako dan Petea. Sebagian besar area penampungan memiliki titik

coal or HSFO depending on the prevailing economics associated with these fuel sources.

The first phase of the project was completed with full benefits realized in 2014. The second phase was initiated in 2015 after several years at the study stage. It begins with two reduction kilns and will gradually be implemented in the remainder of the reduction kilns.

COAL TRANSPORTATION PROJECT

We have started the second phase of upgrading our coal storage and coal handling capacity at Balantang Port to provide enough storage for 11,500 tonnes of coal as required to support our Coal Conversion Project. In 2015, about US\$3.1 million was spent on this project to improve coal storage in the Balantang port area.

REDUCTION KILN RELINING

The reduction kiln is a critical part of nickel processing. Its function is to dry, preheat, and reduce nickel ore (with sulphide) before it is smelted in an electric furnace. The scope of the reduction kiln relining is to replace the kiln interior, i.e. refractory lining and lifters. A shutdown for the rebuild of the kiln is required to accommodate the relining of the kiln shell refractory and replacement of expired lifters.

In 2015, about US\$3 million was spent for this project with the majority spent on reduction kiln 4.

MINE EFFLUENT

The mine effluent project was designed to maintain the quality of water that flows from the catchment areas to the rivers and lakes (Matano and Mahalona). PT Vale operates 19 catchment areas in the Sorowako and Petea area. Much of these catchment areas have monitoring points to monitor and control the quality of

pengamatan untuk mengamati dan mengendalikan kualitas Total Suspended Solid (TSS), konsentrasi chromium (CR6+), soluble nickel, pemisahan minyak dan kontrol pH untuk memenuhi ketentuan Pemerintah.

Pada tahun 2015, AS\$2,9 juta telah dibelanjakan pada proyek ini untuk membangun dan memperbaiki kolam sedimen, sistem pengairan, dan fasilitas penunjang.

PENELITIAN PENGEMBANGAN PROYEK

PT Vale terus mempelajari berbagai peluang untuk pertumbuhan, efisiensi, pengurangan biaya dan perbaikan lingkungan, sesuai dengan strategi kami dalam menumbuhkan bisnis nikel dan menjalankan mandat atas ijin operasi kami. Inisiatif utama yang sedang dievaluasi adalah Indonesia Growth Projects.

Rencana untuk mencapai peningkatan efisiensi operasional di peleburan Sorowako, termasuk Program Peningkatan Operasional dan Perawatan (OMIP), rencana pengembangan tambang dan Indonesia Growth Projects adalah basis dari rencana jangka panjang untuk mencapai target jangka panjang yaitu produksi nikel tahunan sebesar 110.000 - 120.000 ton. Biaya penelitian ini dibukukan sebagai biaya pengembangan proyek sebagai bagian dari akun beban lainnya dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain kami.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada informasi dan fakta material yang perlu diungkapkan setelah tanggal laporan akuntan.

PANDANGAN TAHUN 2016

Perekonomian China mengalami perlambatan terbukti dari penurunan pertumbuhan tahunan GDP serta Produksi Industri. Dengan tingkat konsumsi China yang hampir setengah dari produksi nikel global terutama pada manufaktur baja nirkarat, perlambatan China berdampak signifikan terhadap permintaan nikel. Proyeksi pertumbuhan China masih menunjukkan perlambatan ekonomi sehingga permintaan pada tahun 2016 tidak diekspektasi untuk menunjukkan peningkatan yang tinggi. Hal ini akan terus memberi tekanan pada harga nikel.

Total Suspended Solids (TSS), chromium concentrations (CR6+), soluble nickel, oil separation and pH controls to meet the Government standard.

In 2015, US\$2.9 million was spent for this project to construct and improve the sediment ponds, drainage system and supporting facilities.

PROJECT DEVELOPMENT STUDIES

PT Vale continues to study various opportunities for growth, efficiency, cost reduction and environmental improvement, consistent with our strategy to grow our nickel business and secure our license to operate. The major initiatives being evaluated are outlined in the Indonesian Growth Project.

The plan is to capture operational efficiency gains at our existing Sorowako smelter, including our Operational and Maintenance Improvement Program (OMIP), our growth mining plan and our Indonesian Growth Project. These are the basis for the long-term target of an annual production capacity of 110,000 -120,000 tonnes of nickel in matte. The costs of these studies are reported as project development costs as part of Other Expenses in our Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

There were no material information and facts subsequent to the accountant's report date identified.

2016 OUTLOOK

The Chinese economy is decelerating as evidenced by both a decline in annual growth in GDP as well as Industrial Production. With China consuming nearly half of global nickel production primarily in stainless steel manufacturing, Chinese deceleration has had a significant impact on nickel demand. Chinese growth projections continue to reflect a slowing economy and as such 2016 demand is not expected to exhibit much growth. This will continue to put pressure on the nickel price.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Dengan harga nikel pada bulan Desember 2015 yang cenderung di bawah biaya produksi bagi setengah dari industri, pasokan global diekspektasi akan turun sebagai akibat dari turunnya profitabilitas. Besarnya penurunan pasokan tidak dapat dipastikan, dan beberapa operasi nikel telah mengumumkan pengurangan produksi, terutama di China, dan/atau mengalihkan operasi hanya untuk pemeliharaan.

Pertumbuhan permintaan yang datar dan cenderung melemah serta berkurangnya pasokan diharapkan dapat menggerakkan pasar nikel menjadi defisit. Walaupun pasar diharapkan akan bergerak menjadi defisit, tingginya persediaan yang diperdagangkan menghambat perbaikan harga.

Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan rata-rata tahunan harga nikel di tahun 2016 akan lebih rendah daripada rata-rata tahunan harga nikel pada tahun 2015. Strategi Perseroan tetap berada pada tingkat biaya yang kompetitif untuk setiap kondisi harga nikel dengan fokus pada penurunan biaya dan meningkatkan efisiensi produksi.

Perseroan tetap berhati-hati dalam menghadapi tantangan yang ada di tahun 2016 terutama harga yang diperkirakan akan tetap rendah. Perseroan memiliki bijih nikel kelas dunia dan memiliki kemampuan mendayagunakan infrastruktur yang tersedia secara efektif dan efisien.

Strategi Perseroan dalam menghadapi tantangan yang ada di tahun 2016 adalah dengan meningkatkan efektivitas produksi dan efisiensi biaya produksi. Strategi Perseroan ini direfleksikan dalam dua area besar yaitu pengoptimalan produksi dan efisiensi biaya. Strategi pengoptimalan produksi dicapai melalui peningkatan produksi bijih dan peningkatan kinerja tanur pereduksi.

Strategi efisiensi biaya dilakukan dengan melakukan fleksibilitas sumber energi yang diperlukan dalam pengolahan bijih. Perseroan telah mengimplementasikan teknologi yang memungkinkan tanur pengering memiliki fleksibilitas dalam memilih antara batubara dan HSFO sebagai sumber energi, tergantung pada tingkat keekonomisan masing-masing. Pada tahun 2015, Perseroan telah memulai

With nickel prices in December 2015 trending below the cost of production for half of the industry, global supply is expected to decline as a result of profitability loss. The magnitude of supply reduction is uncertain, and a number of operations have made announcements on production cuts, particularly in China, and/or transitioning operations into care and maintenance.

Flat to weak growth in demand and some reduction in supply is expected to move the nickel market into a deficit. Even though the market is expected to move into a deficit the record high exchange inventories prevent price recovery.

As such, the Company expects the average annual nickel price in 2016 to be lower than the average annual nickel price in 2015. The company's strategy remains to be cost competitive in all price cycles by focusing on cost reductions and improving production efficiencies.

The Company remains cautious in the face of existing challenges in 2016; primarily the continued low nickel price. The Company has a world-class ore body and the ability to leverage existing infrastructure effectively and efficiently.

The Company's strategy in dealing with the challenges of 2016 is to increase the production effectiveness and cost of production efficiency. The strategy is reflected into two main areas – optimizing production and cost efficiency. Optimizing production will be achieved by increasing ore production and increasing the performance of the reduction kiln.

The cost efficiency strategy includes providing the flexibility to utilize varied sources of energy for ore processing. The Company has implemented technology that allows the dryer kiln the flexibility to switch between coal and HSFO as a source of energy, depending on the economics of each. In 2015, the Company began implementing the same flexibility in the reduction kiln. To support this increased flexibility,

fleksibilitas yang sama pada tanur pereduksi. Dalam rangka mendukung peningkatan fleksibilitas, Perseroan akan meningkatkan kapasitas tampung penanganan batubara pada Pelabuhan Balintang.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN PENCAPAIAN TAHUN 2015

PRODUKSI DAN PENGIRIMAN

Realisasi produksi Perseroan pada tahun 2015 sebesar 81.177 ton, 1,5% lebih tinggi daripada target sebesar 80.000 ton. Realisasi produksi yang lebih tinggi merupakan hasil kombinasi dari peningkatan kualitas kandungan nikel pada bijih yang ditambang dan peningkatan efektivitas produksi. Peningkatan produksi telah mendorong peningkatan realisasi penjualan Perseroan pada tahun 2015 menjadi 82.907 ton, 3,6% lebih tinggi dari target 80.000 ton. Lebih dari itu, produksi pada tahun 2015 mencerminkan rekor pencapaian produksi tinggi.

PENDAPATAN

Perseroan mencatat pendapatan sebesar AS\$789,7 juta pada tahun 2015, 24% lebih rendah dibandingkan target 2015. Realisasi pendapatan yang lebih rendah sebagai akibat dari penurunan harga realisasi rata-rata sebesar 27% pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Volume penjualan pada tahun 2015 yang lebih tinggi sebesar 4,3% pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, telah membantu mengurangi dampak penurunan harga terhadap penurunan pendapatan pada tahun 2015.

LABA

Perseroan telah berhasil menekan biaya produksi dan meningkatkan volume produksi. Meskipun demikian, tekanan penurunan harga yang signifikan telah menurunkan laba bersih 70% lebih rendah dari target.

BELANJA BARANG MODAL

Pada tahun 2015, belanja modal Perseroan naik secara signifikan menjadi AS\$110 juta jika dibandingkan dengan belanja modal Perseroan untuk tahun 2014 yang sebesar AS\$76 juta. Meskipun demikian, hasil ini masih sedikit di bawah target.

the Company will increase coal storage capacity at Balintang Port.

COMPARISON OF 2015 TARGET TO ACTUAL

PRODUCTION AND DELIVERIES

Our 2015 actual production of 81,177 tonnes was higher by 1.5% than our target of 80,000 tonnes. The higher actual production resulted from the combination of an increase in the quality of the nickel content in ore mined and increased production effectiveness. The higher production drove higher actual deliveries in 2015 of 82,907 tonnes, 3.6% higher than the targeted 80,000 tonnes. Moreover, 2015 production reflects a record high for the Company.

REVENUE

The Company recorded revenue of US\$789.7 million in 2015, 24% lower than the 2015 target. The lower actual revenue is a result of a 27% lower average realized nickel price in 2015 compared to 2014. Deliveries that were 4.3% higher in 2015 than 2014 helped reduce the impact of decreasing price to 2015 revenue.

PROFIT

The Company succeeded in reducing production costs and increasing production volume. However, the pressure from significant price decreases resulted in net profits 70% lower than target.

CAPITAL EXPENDITURE

In 2015, the Company's capital expenditure was significantly increased to US\$110 million compared to the Company's 2014 capital expenditure of US\$76 million. However, this result was slightly below the target.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

TARGET TAHUN 2016

PRODUKSI DAN PENGIRIMAN

Pada 2016, PT Vale tetap menargetkan kisaran produksi tahunan sekitar 80.000 ton nikel dalam matte. Dengan target produksi ini, kami berencana untuk mempertahankan tingkat pengiriman nikel dalam matte sesuai dengan tingkat produksi.

PENDAPATAN DAN LABA

Dengan antisipasi harga nikel yang masih akan berfluktuasi, tingkat pendapatan di tahun 2016 akan relatif sulit untuk diprediksi. Namun demikian, Perseroan tetap akan memaksimalkan tingkat produksi serta mengelola biaya supaya lebih efisien untuk mencapai pendapatan dan laba yang optimal.

BELANJA MODAL

Dengan kondisi harga nikel yang berada di level relatif rendah memasuki tahun 2016, kami menetapkan target belanja modal untuk tahun 2016 dengan lebih bijaksana dan hati-hati. Perseroan akan memprioritaskan belanja modal yang berhubungan erat dengan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L); produksi; inisiatif penghematan biaya; penegakan kepatuhan; dan keberlangsungan jangka panjang Perseroan. Kami menargetkan belanja modal pada tahun 2016 yaitu antara AS\$90 juta sampai AS\$100 juta. Hal ini tetap menunjukkan komitmen kuat kami untuk melakukan ekspansi di masa mendatang untuk memberikan hasil yang lebih baik bagi para pemegang saham.

STRUKTUR MODAL

Di tahun 2016, Perseroan tetap akan mempertahankan struktur modal yang ada saat ini, yang merupakan kombinasi dari pinjaman bank jangka panjang baik yang tercatat pada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dan ekuitas Perseroan.

ASPEK PEMASARAN ATAS PRODUK PERSEROAN

PT Vale memiliki perjanjian off-take jangka panjang dan "harus-ambil" dengan pemegang saham utama. Sebagai hasil dari perjanjian ini, maka tidak diperlukan adanya fungsi pemasaran pada Perseroan, sehingga tidak ada biaya marketing yang perlu dikeluarkan oleh PT Vale.

2016 TARGET

PRODUCTION AND DELIVERIES

In 2016, PT Vale is targeting production of around 80,000 tonnes of nickel in matte. With this production target, we plan to maintain nickel in matte deliveries similar to production levels.

REVENUE AND PROFIT

With the anticipation of further fluctuations in the nickel price, revenue in 2016 is relatively difficult to predict. Nevertheless, the Company intends to maximize production while managing costs to become more efficient and optimize revenue and profit.

CAPITAL EXPENDITURE

With the relatively low nickel price entering 2016, we are being prudent in setting a target for 2016 capital expenditures. We will prioritize capital expenditures related to the environment, health and safety; production; cost saving initiatives; compliance; and the long-term sustainability of the Company. We are targeting capital expenditures in 2016 of US\$90 million to US\$100 million. This still demonstrates our strong commitment to continue to expand in the future to bring a better return to our shareholders.

CAPITAL STRUCTURE

In 2016, PT Vale will keep capital structure as currently which is a combination from a long term loan has been recorded whether.

MARKETING ASPECT TO THE COMPANY'S PRODUCT

PT Vale has a long-term and "must-take" off-take agreement with its major shareholders. As a result of this arrangement, it is considered not necessary to have marketing function in the company, as such no marketing expenses are incurred by PT Vale.

PANGSA PASAR

Sebagai akibat dari perjanjian off-take jangka panjang dan “harus ambil” dengan pemegang saham, maka pasar PT Vale dianggap sebagai pasar kaptif. Namun demikian, proyeksi jangka panjang atas permintaan dan penawaran nikel mengindikasikan akan terjadi kekurangan pasokan pada tahun-tahun mendatang. Melihat pangsa pasar kami saat ini sekitar 4% dari produksi global, kami sedang mempersiapkan diri untuk melakukan ekspansi produksi dan operasi sehingga pada waktunya nanti PT Vale berada dalam posisi untuk mengambil keuntungan atas adanya kekurangan pasokan nikel.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan prospektus saham Perseroan tahun 1990 untuk keperluan penawaran umum perdana, kebijakan dividen Perseroan didasarkan pada ketersediaan kas setelah diperhitungkan dengan kebutuhan akan modal kerja, pembayaran pinjaman dan bunganya dan program-program investasi modal serta dengan memperhatikan saldo laba ditahan.

Kontrak Karya mengizinkan Perseroan mengumumkan dan membayar dividen kepada para pemegang saham baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya. Sesuai dengan itu para pemegang saham Indonesia akan dibayar dalam rupiah, dalam jumlah yang setara dengan dolar Amerika Serikat dan para pemegang saham asing akan dibayar dalam dolar Amerika Serikat.

Tabel berikut menyajikan distribusi dividen dalam lima tahun terakhir beserta rasio pembayarannya.

	2015	2014	2013	2012	2011	
Laba tahun berjalan (AS\$ juta)	50.5	172.3	38.7	67.5	333.8	Profit for the year (US\$ million)
Dividen yang dideklarasikan dari laba tahunan (AS\$ juta)	-	100.1	25.0	50.1	184.4	Dividends declared from annual earnings (US\$ million)
Dividen per lembar saham (AS\$)						Dividend per share (US\$)
• Interim	-	0.01007	0.00252	0.00252	0.01000	• Interim
• Final	N/A	-	-	0.00252	0.00860	• Final
• Total	-	0.01007	0.00252	0.00504	0.01860	• Total
Rasio pembayaran	0%	58%	65%	74%	55%	Payout ratio

MARKET SHARE

Due to the long-term and must-take off-take agreement with its shareholders, PT Vale's market is considered a captive market. Nevertheless, the long-run projections of nickel demand and supply indicate that there will be a shortage of supply in the near years. As our market share today is approximately 4% of global production, we are preparing ourselves to expand our production and operation so that when the time comes PT Vale is in position to take advantage of the shortage in nickel supply.

DIVIDEND POLICY

Pursuant to the 1990 Company's prospectus for the purpose of initial public offering, our dividend policy is to make payments based on available cash after taking into account provision for working capital, debt service requirements including interest, capital investment programs as well as the amount of retained earnings.

Our Contract of Work allows the Company to declare and pay dividends to both Indonesian and foreign shareholders in US dollars or any other foreign currencies. Accordingly, Indonesian shareholders will be paid in rupiah, in an amount equivalent to US dollars and foreign shareholders will be paid in US dollars.

The following table presents dividend distribution in the last five years and their payout ratio.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Di tahun 2015, dengan mempertimbangkan seluruh faktor sesuai dengan kebijakan dividen, Perseroan memutuskan untuk tidak mendeklarasikan dan melakukan pembayaran dividen interim. Perseroan akan menentukan pembayaran dividen final untuk 2015 saat RUPS pada tanggal 1 April 2016.

In 2015, after considering all factors as per our dividend policy, the Company decided not to declare and pay an interim dividend. The Company will decide on a final dividend payment for 2015 at its AGMS on April 1, 2016.

Berikut adalah ringkasan dividen yang dideklarasikan dan dibayar dalam lima tahun terakhir:

The following is a summary of dividends declared and paid in the last five years:

Tahun Year	Dividen Dividend	Tanggal Penetapan Declaration Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Jumlah Dividen Dividend Amount*	
				US\$/Saham Share	Rp/Saham Share
2014	14 Interim / Interim	11 November 11 November	17 Desember 17 December	0.01007	123.81
	13 Akhir / Final	-	-	-	-
2013	13 Interim / Interim	12 November 12 November	18 Desember 18 December	0.00252	30.14
	12 Akhir / Final	23 April 23 April	31 Mei May	0.00252	24.60
2012	12 Interim / Interim	13 November 13 November	27 Desember 27 December	0.00252	24.31
	11 Akhir / Final	25 April 25 April	1 Juni 1 June	0.0086	79.70
2011	11 Interim / Interim	12 Oktober 12 October	21 November 21 November	0.01	89.40
	10 Akhir / Final	13 April 13 April	20 Mei 20 May	0.0146	125.06
2010	10 Interim / Interim	15 September 15 September	22 Oktober 22 October	0.02	178.44
	09 Akhir / Final	-	-	-	-
	08 Akhir / Final	19 November 19 November	13 April 13 April	0.0141	128.17

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan tujuan penawaran umum perdana yaitu dalam rangka divestasi kepemilikan saham Perseroan dari Vale Canada Limited kepada publik, seluruh hasil dari Penawaran Umum Perdana pada tahun 1990 diserahkan kepada Vale Canada Limited.

REALIZATION OF INITIAL PUBLIC OFFERING ("IPO") FUNDS

In line with the purpose of the IPO, which was to divest the Company's shares owned by Vale Canada Limited to the public, all of the proceeds from the IPO in 1990 went to Vale Canada Limited.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER, ACQUISITION OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

KOMITMEN INVESTASI KK 2014

Kontrak Karya 2014 mengatur komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Komitmen investasi tersebut menggantikan kesanggupan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam KK 1996. Di bawah ini adalah komitmen investasi Perseroan berdasarkan KK 2014.

CoW 2014 INVESTMENT COMMITMENTS

The 2014 CoW outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy. Such investment commitments replaced the Company's undertakings as set out in the 1996 CoW. Below are the Company's investment commitments under the 2014 CoW.

KOMITMEN INVESTASI SULAWESI SELATAN

Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan suatu program investasi untuk memperluas kapasitas pengolahan dan pemurnian bijih di fasilitas Perseroan di Sorowako dan untuk meningkatkan produksi ("Indonesian Growth Project ("IGP") Sulawesi Selatan"). Perluasan ini akan dicapai melalui beberapa tahapan pengeluaran modal yang signifikan, antara lain dengan inisiatif sebagai berikut:

- (i) Pemutakhiran tungku pelebur (furnace) serta membangun kapasitas tanur pengering (dryer) dan tanur pereduksi (kiln) baru sesuai kebutuhan;
- (ii) Perluasan tambang (melalui pengembangan tambang baru di wilayah luar Sorowako (Sorowako outer area) dan Bahodopi Blok 1); dan
- (iii) Optimalisasi tambang (yang secara berkelanjutan mendukung keekonomian proyek).

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait IGP Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 12 bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

KOMITMEN INVESTASI SULAWESI TENGAH

Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan program investasi di Bahodopi, Sulawesi Tengah sesuai dengan Opsi #1 atau Opsi #2 sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Opsi #1 (komponen Tahap I dan Tahap II)

Tahap I:

- (i) Pembangunan suatu fasilitas Pengolahan dan Pemurnian hilir ("Fasilitas Hilir Bahodopi"); dan
 - (ii) Investasi infrastruktur (seperti pelabuhan, jalan, dll) ("Infrastruktur Bahodopi").
- (bersama-sama disebut sebagai "IGP Sulawesi Tengah").

Fasilitas Hilir Bahodopi akan memiliki kapasitas nominal untuk memproses sekitar 18.000 ton produk bernilai tambah lebih tinggi (seperti nikel oksida) per tahun. Selain itu, akan terdapat operasi penambangan di Bahodopi Blok 1 yang terkait dengan IGP Sulawesi Selatan.

SOUTH SULAWESI INVESTMENT COMMITMENTS

The Company commits to implement an investment program to expand the ore Processing and Refining capacity at the Company's facility in Sorowako and increase production (the "Indonesian Growth Project ("IGP") South Sulawesi"). The expansion will be achieved through a series of significant capital expenditures including, among other initiatives:

- (i) Upgrades to furnaces and the installation of new dryer and kiln capacity as necessary;
- (ii) Mine expansion (through the development of new mines in the Sorowako outer areas and Bahodopi Block 1); and
- (iii) Mine optimization (which sustainably supports the project economics).

The Company will start construction activity in relation to the IGP South Sulawesi within 12 months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

CENTRAL SULAWESI INVESTMENT COMMITMENTS

The Company commits to implement an investment program in Bahodopi, Central Sulawesi pursuant to either Option #1 or Option #2 as described below:

Option #1 (Phase I and Phase II components)

Phase I:

- (i) The construction of a downstream Processing and Refining facility (the "Bahodopi Downstream Facility"); and
 - (ii) Infrastructure investments (such as port, roads, etc) (the "Bahodopi Infrastructure").
- (together referred to as the "IGP Central Sulawesi").

The Bahodopi Downstream Facility will have nominal capacity to produce approximately 18,000 tonnes of a higher value-added product (such as nickel oxide) per year. Additionally, there will be a mining operation in Bahodopi Block 1 which is linked to IGP South Sulawesi.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait Infrastruktur Bahodopi dalam jangka waktu 18 bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait dengan IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait Fasilitas Hilir Bahodopi dalam jangka waktu 24 bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait dengan IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Tahap II:

Sebagai Tahap 2, Perseroan mengusulkan untuk membangun atau meningkatkan kapasitas fasilitas Pengolahan dan Pemurnian utama masa mendatang di Bahodopi untuk menghasilkan produk nikel (kemungkinan, ferronickel) ("Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi"). Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi dapat dipertimbangkan oleh Perseroan secara independen atau sebagai bagian dari suatu joint venture (dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pertambangan dan/atau pengolahan di Indonesia) sepanjang Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi tersebut mengolah bijih dari Bahodopi Blok 2 dan 3, Sulawesi Tengah.

Perseroan berkomitmen untuk menyerahkan kepada Pemerintah proposal investasi untuk Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi selambat-lambatnya 2020 dan untuk memulai pembangunan selambat-lambatnya 2023.

Opsi #2

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait Infrastruktur Bahodopi dalam jangka waktu 18 bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Perseroan berkomitmen untuk menyampaikan kepada Pemerintah suatu proposal investasi dan studi kelayakan awal, apabila diperlukan, untuk Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi dalam jangka waktu 24

The Company will start construction activity in relation to the Bahodopi Infrastructure within 18 months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Company will start construction activity in relation to the Bahodopi Downstream Facility within 24 months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

Phase II:

In Phase 2, the Company proposes to develop or expand the capacity of a future primary Processing and Refining facility in Bahodopi to produce a nickel product (potentially ferronickel) (the "Bahodopi Primary Processing and Refining Facility"). The Bahodopi Primary Processing and Refining Facility may be considered by the Company independently or as part of a joint venture (with a third party with mining and/or processing capacity in Indonesia) provided that the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility processes ore from Central Sulawesi Bahodopi Blocks 2 and 3.

The Company commits to submit to the Government an investment proposal for the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility no later than 2020 and to start construction by 2023.

Option #2

The Company will start construction activity in relation to the Bahodopi Infrastructure within 18 months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Company commits to submit to the Government an investment proposal and pre-feasibility study, if applicable, for the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility within 24 months of receiving all

bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi dapat dipertimbangkan oleh Perseroan secara independen atau sebagai bagian dari suatu *joint venture* (dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pertambangan dan/atau pengolahan di Indonesia) sepanjang Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi mengolah bijih dari Bahodopi Blok 2 dan 3, Sulawesi Tengah.

Apabila Perseroan memilih Opsi #2 ini, Perseroan tidak disyaratkan untuk berkomitmen terhadap pembangunan Fasilitas Hilir Bahodopi; namun, pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi akan dipercepat.

KOMITMEN INVESTASI SULAWESI TENGGARA

Perseroan berkomitmen terhadap pengembangan dan pembangunan (sebagai bagian dari usaha patungan dengan Sumitomo Metal Mining Co., Limited) suatu fasilitas Pengolahan dan Pemurnian *high pressure acid leach* ("HPAL"), bersama dengan infrastruktur pendukungnya, di Sulawesi Tenggara ("Fasilitas HPAL Pomalaa"). Fasilitas HPAL Pomalaa ini dimaksudkan untuk memiliki perkiraan kapasitas untuk menghasilkan minimal 15.000 ton (dalam bentuk produk *mixed sulfide precipitate*).

Perusahaan berkomitmen terhadap penyelesaian rekayasa dasar (*basic engineering*) terkait Fasilitas HPAL Pomalaa dalam jangka waktu 18 bulan setelah diterimanya semua perizinan/persetujuan, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Lebih lanjut, Perseroan berkomitmen untuk memulai kegiatan konstruksi di Pomalaa, mana yang lebih lama:

- (i) 12 bulan setelah diterimanya semua perizinan/persetujuan yang diperlukan; dan
- (ii) 12 bulan setelah selesainya rekayasa dasar (*basic engineering*), dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Bahodopi Primary Processing and Refining Facility may be considered by the Company independently or as part of a joint venture (with a third party with mining and/or processing capacity in Indonesia) provided that the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility processes ore from Central Sulawesi Bahodopi Blocks 2 and 3.

If the Company elects Option #2, it means that the Company is not required to commit to the development and construction of the Bahodopi Downstream Facility; instead, the development of the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility is accelerated.

SOUTHEAST SULAWESI INVESTMENT COMMITMENT

The Company is committed to the development and construction (as part of a joint venture with Sumitomo Metal Mining Co., Limited) of a high pressure acid leach ("HPAL") Processing and Refining facility, together with supporting infrastructure, in Southeast Sulawesi (the "Pomalaa HPAL Facility"). The Pomalaa HPAL Facility is intended to have an approximate capacity to produce at least 15,000 tonnes (in the form of a mixed sulfide precipitate product).

The Company commits to the completion of basic engineering in relation to the Pomalaa HPAL Facility within 18 months of receiving all requisite licenses/approvals, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Company further commits to start construction activity in Pomalaa by the later of:

- (i) 12 months of receiving all requisite licenses / approvals; and
- (ii) 12 months after completion of basic engineering, by considering the feasibility study and the environmental study.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Fasilitas HPAL Pomalaa dapat dipertimbangkan oleh Perseroan sebagai independen atau sebagai bagian dari suatu *joint venture* (dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pertambangan dan/atau pengolahan di Indonesia).

UPAYA PERBAIKAN

Dalam hal Perseroan tidak memenuhi komitmen investasi sebagaimana diuraikan di atas, upaya satu-satunya Pemerintah (sole remedy) atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Komitmen investasi Sulawesi Selatan: Perseroan setuju untuk melepaskan sebagian dari Sorowako (yaitu, sebagian dari Sorowako *outer area*) atau Blok 1 Bahodopi yang tidak dapat dijustifikasikan tanpa adanya IGP Sulawesi Selatan. Pemerintah dan Perseroan sepakat bahwa area pelepasan yang spesifik tersebut (Sorowako *outer area* atau Blok 1 Bahodopi) akan dinegosiasikan sesuai dengan proses yang akan disepakati kemudian;
- Komitmen investasi Sulawesi Tengah: Perusahaan setuju untuk melepaskan Blok 2 dan 3 Bahodopi;
- Komitmen investasi Sulawesi Tenggara: Perusahaan setuju untuk melepaskan Blok Pomalaa dan Blok Suasua.

PERJANJIAN PINJAMAN FASILITAS EKSPOR SENIOR (SEFA)

Pada tanggal 30 November 2009, Perseroan ("Peminjam") menandatangani SEFA dengan Mizuho Bank, Ltd. (sebelumnya bernama Mizuho Corporate Bank, Ltd.) sebagai *Facility Agent*, MUFG Union Bank, N.A. (sebelumnya bernama Union Bank, N.A.) sebagai *Collateral Agent* dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. dan Mizuho Bank, Ltd. sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("Pemberi Pinjaman"), dengan Vale S.A. (entitas pengendali utama Perseroan) bertindak sebagai penjamin ("Penjamin").

Fasilitas sebesar AS\$300 juta (terdiri dari pinjaman dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. sebesar AS\$200 juta dan Mizuho Bank, Ltd. sebesar AS\$100 juta) (nilai penuh) digunakan untuk membiayai Proyek Karebbe dengan estimasi biaya sebesar AS\$410 juta. Fasilitas ini dibebani tingkat bunga LIBOR ditambah 1,5% per tahun untuk tiap periode pembayaran bunga yang relevan,

The Pomalaa HPAL Facility may be considered by the Company as independent or as part of a joint venture (with a third party with mining and/or processing capacity in Indonesia).

REMEDIES

In the event that the Company does not fulfill the investment commitments as set out above, the sole remedies of the Government in this respect are as follows:

- South Sulawesi investment commitment: the Company agrees to relinquish a part of Sorowako (that is, a part of the Sorowako *outer area*) or Bahodopi Block 1 that cannot be justified without the IGP South Sulawesi. The Government and the Company agree that the specific relinquishment area (in the Sorowako *outer area* or Bahodopi Block 1) is to be negotiated pursuant to an agreed upon process;
- Central Sulawesi investment commitment: the Company agrees to relinquish Bahodopi Blocks 2 and 3;
- Southeast Sulawesi investment commitment: the Company agrees to relinquish the Pomalaa Block and the Suasua Block.

SENIOR EXPORT FACILITY AGREEMENT (SEFA)

On November 30, 2009, the Company (the "Borrower") entered into the SEFA with Mizuho Bank, Ltd. (formerly known as Mizuho Corporate Bank, Ltd.) as Facility Agent, MUFG Union Bank, N.A. (formerly known as Union Bank, N.A.) as Collateral Agent and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. and Mizuho Bank, Ltd., as Mandated Lead Arrangers (the "Lenders"), with Vale S.A. (the Company's ultimate parent entity) acting as the guarantor (the "Guarantor").

The facility of US\$300 million (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. of US\$200 million and from Mizuho Bank, Ltd. of US\$100 million) (full amount) was used to finance the Karebbe Project. This facility is subject to interest at LIBOR plus 1.5% per annum for the relevant interest period which started being paid on February 19, 2010. The principal will

yang telah dimulai dari tanggal 19 Februari 2010. Pokok utang akan dibayar dalam 16 kali semi-tahunan dan telah dimulai pada 19 Februari 2012.

Terhitung tanggal 31 Desember 2009, PT Vale telah membayar jasa di muka dan jasa agensi sebesar AS\$4,5 juta, premi asuransi NEXI sebesar AS\$5,7 juta, dan jasa lainnya sebesar AS\$0,2 juta. Nilai sejumlah tersebut telah dikapitalisasi sebagai pinjaman jangka panjang dan diamortisasi sampai akhir periode fasilitas SEFA.

Terhitung pada tanggal 31 Desember 2010, PT Vale telah menarik AS\$150 juta dari fasilitas SEFA. Per 31 Desember 2011, saldo pinjaman telah meningkat menjadi sebesar AS\$300 juta pada saat Perseroan menarik fasilitas kedua sebesar AS\$150 juta di bulan Maret 2011.

Berikut ini adalah jasa yang harus dibayarkan selama kredit SEFA oleh PT Vale:

- Biaya agensi pada *Facility Agent*, sebesar AS\$20.000 per tahun, dibayar setiap tanggal 30 November, sampai seluruh pinjaman dibayar penuh;
- Biaya jaminan pada pemberi garansi sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dibayar.

Fasilitas ini terikat pada persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain:

- Untuk menyerahkan kepada *Facility Agent* dalam jangka waktu masing-masing 180 hari dan 90 hari pada setiap akhir tahun dan setiap kuartal, laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan kuartalan yang tidak diaudit.
- Dana dari pinjaman digunakan hanya untuk membiayai konstruksi, pembangunan dan pengoperasian dari Proyek Karebbe.
- Memastikan paling tidak perlakuan pari passu dengan semua pinjaman senior lain yang dimiliki Penjamin baik yang tidak dijamin maupun yang bersifat *unsubordinated* yang ada saat ini maupun di masa datang (Peminjam dan Penjamin).
- Sehubungan dengan Periode Penilaian (setiap enam bulan), nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* (setiap perjanjian ekspor awal dan setiap perjanjian ekspor lainnya yang dibentuk oleh Peminjam dari waktu ke waktu) tidak kurang dari 110% *debt service* (bunga ditambah dengan pokok angsuran).

be repaid in 16 semi-annual installments that began February 19, 2012.

As of December 31, 2009, PT Vale had paid upfront and agency fees of US\$4.5 million, a NEXI insurance premium of US\$5.7 million, and other fees of US\$0.2 million. These amounts have been capitalized as long-term borrowing and amortized until the end of the SEFA facility period.

As of December 31, 2010, PT Vale had drawn down US\$150 million of the SEFA facility. As of December 31, 2011, the loan balance had increased to US\$300 million, as the Company withdrew its remaining facility of US\$150 million in March 2011.

The following fees are to be paid over the life of the SEFA loan by PT Vale:

- Agency fee to the Facility Agent, amounting to US\$20,000 per annum, on every November 30, until all loans have been paid in full;
- Guarantee fee to the guarantor of 1.5% per annum on the outstanding loan amount.

This facility is subject to certain covenants, among others:

- To furnish the Facility Agent within 180 days and 90 days from the end of each fiscal year and period, respectively, with PT Vale's audited financial statements with an unqualified opinion and the unaudited quarterly financial statements;
- Proceeds of the loan will be used solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe project;
- Gain pari passu ranking for all other present and future senior unsecured and unsubordinated indebtedness of the obligor;
- With respect to the measurement period (six months basis), the market value of the Designated Off-Take Agreement (each of the initial export agreements and each other export agreement from time-to-time designated by the borrower under the facility) will not be less than 110% of the debt service amount (interest plus principal installment) with respect to the measurement period;

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

- Selalu menjaga agar nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* tidak kurang dari 110% jumlah komitmen ditambah dengan jumlah pokok pinjaman dan jumlah debt service coverage.
- Peminjam akan memerintahkan JP Morgan Chase Bank, N.A. untuk mentransfer cicilan sebagai berikut:
 - Periode bulan kalender pertama bunga 20%;
 - Periode bulan kalender kedua bunga 40%;
 - Periode bulan kalender ketiga bunga 60%;
 - Periode bulan kalender keempat bunga 80%;
 - Periode bulan kalender kelima bunga 100%.
- Peminjam tidak akan memberikan hak atas penjaminan asetnya kepada Pemberi Pinjaman lain selain dari Pemberi Pinjaman yang disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan;
- Peminjam dan Penjamin, tanpa izin dari Pemberi Pinjaman, tidak akan mengkonsolidasikan atau melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain atau memindahkan keseluruhan atau bagian signifikan asetnya kepada pihak lain;
- Tidak diperbolehkan menghapus aset yang berkaitan dengan proyek Karebbe tanpa persetujuan terlebih dahulu;
- Penjamin akan menjaga beberapa rasio, seperti rasio Utang terhadap Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi ("EBITDA") yang telah disesuaikan dan rasio EBITDA yang telah disesuaikan terhadap Biaya Bunga, sebagai persyaratan posisi keuangan pada setiap akhir periode semester fiskal dari Penjamin.
- At all times the market value of the Designated Off-Take Agreement will not be less than 110% of the then sum of the commitments plus the outstanding principal amount of the loans outstanding and the debt service coverage amount;
- The borrower will instruct JP Morgan Chase Bank, N.A. to transfer the installment portion as follows:
 - in the first calendar month of the interest period 20%;
 - in the second calendar month of the interest period 40%;
 - in the third calendar month of the interest period 60%;
 - in the fourth calendar month of the interest period 80%;
 - in the fifth calendar month of the interest period 100%.
- The borrower will not create or permit to exist any lien on any collateral, except for the lien created by the Security Agreement;
- No obligor will, without the consent of the lenders, consolidate with or merge into any other corporation or convey or transfer all or substantially all of its assets to any other person;
- No disposal of assets related to the Karebbe project without prior consent;
- The Guarantor will maintain certain ratios, such as Debt to Adjusted Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ("EBITDA") ratio and Adjusted EBITDA to Interest Expense ratio, as financial covenants for each financial test period ending on last day of each fiscal semester of the Guarantor.

Kejadian wanprestasi akan timbul apabila: tidak membayar pokok pinjaman, tidak membayar biaya jasa atau bunga, gagal memenuhi persyaratan perjanjian, dan bangkrut atau tidak solven. Selama 2015 dan 2014, tidak terjadi kejadian wanprestasi.

Fasilitas ini dinyatakan dalam dolar AS demikian juga pendapatan Perseroan yang dinyatakan dalam dolar AS, sehingga tidak ada eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

An event of default will be triggered under the following circumstances: non-payment of principal, non-payment of fee or interest, failure to perform any covenant, involuntary proceedings and bankruptcy or insolvency. During 2015 and 2014, there was no occurrence of such event.

The facility is denominated in US Dollars and since the Company's revenue is also denominated in US Dollars, as such there was no significant exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

Pada tanggal 30 November 2015, Perjanjian Persetujuan atas SEFA ditandatangani untuk menyesuaikan, antara lain, persyaratan posisi keuangan dengan efek terbatas. Para pihak setuju bahwa Perjanjian Persetujuan ini terbatas pada penelaahan terhadap rasio Utang terhadap LBPDA yang telah disesuaikan dan rasio LBPDA yang telah disesuaikan terhadap Biaya Bunga untuk periode tes yang ditentukan.

On November 30, 2015, the Consent Agreement to SEFA (the "Consent") was signed to adjust, among others, the financial covenant with limited effect. The parties agree that the consent is limited to the review of the provisions of the Debt to Adjusted EBITDA Ratio and Adjusted EBITDA to Interest Expense Ratio for the specified test periods.

Sepanjang tahun 2015 dan 2014, tidak ada transaksi yang material terkait dengan ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal, oleh karena itu tidak ada informasi yang material untuk dilaporkan untuk subjek tersebut di atas.

During the year 2015 and 2014, there was no material transactions in relation to expansion, divestment, merger, acquisition or debt/capital restructuring, therefore no material information to be reported for the aforementioned subjects.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Di tahun 2015, tidak ada transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION WHICH CONTAINS CONFLICT OF INTEREST AND/OR AFFILIATE TRANSACTION

In 2015, there was no material transaction containing conflict of interest and/or affiliate transaction.

PIHAK BERELASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sepanjang tahun 2015 dan 2014. Sifat dan hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

RELATED PARTIES

The Company conducted transactions with related parties in 2015 and 2014. The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi Related parties	Sifat dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi Nature of relationship with the related parties	Transaksi Transaction
Vale S.A.	Entitas pengendali utama tidak langsung Indirect ultimate parent entity	Penjamin dari pinjaman Perseroan dengan kompensasi biaya pinjaman Guarantor of loans of the Company in return for guarantee fee
Vale Canada Limited	Perusahaan Induk Parent entity	Penjualan barang jadi; Jasa manajemen, Lisensi dan Royalti Sale of finished goods; Management service, License and Royalty fees
Vale Europe Limited	Perusahaan Afiliasi Affiliated Company	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan Expense reimbursement of the Company
Vale Japan Limited	Pemegang saham Shareholder	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan Expense reimbursement of the Company
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	Pemegang saham Shareholder	Penjualan barang jadi Sale of finished goods
Vale Technology Development (Canada) Limited	Perusahaan Afiliasi Affiliated Company	Jasa Teknis Technical services
Manajemen kunci Key management	Personil manajemen kunci dari Perseroan Key management personnel of the Company	Kompensasi dan remunerasi; pinjaman rumah dan pinjaman pribadi; opsi setara saham Compensation and remuneration; housing and personal loans; share option equivalent

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

PENJUALAN DAN PIUTANG USAHA

Transaksi terbesar Perseroan dengan pihak yang berelasi adalah penjualan kami, karena seluruh produksi nikel dalam matte kami terikat pada komitmen untuk dijual kepada VCL dan SMM. Pengikatan ini ditetapkan dalam perjanjian penjualan bersifat jangka panjang, "harus ambil", dalam denominasi dolar AS, yang berakhir pada tahun 2025 mengikuti KK kami, kecuali diperpanjang, dimodifikasi atau diperbaharui. Harga jual adalah yang mana lebih tinggi antara nilai rata-rata realisasi harga bersih nikel Vale dengan nilai yang dihitung dengan formula berdasarkan harga tunai nikel di Bursa Logam London (LME). Per 31 Desember 2015, piutang usaha berjalan dari VCL dan SMM masing-masing sebesar AS\$50,0 juta (2014: AS\$73,6 juta) dan AS\$28,2 juta (2014: AS\$19,1 juta).

Berikut adalah tabel transaksi penjualan dengan pihak-pihak berelasi:

	2015	2014
<small>(Dalam ribuan AS\$) (US\$ in thousands)</small>		
Penjualan kepada Sales to Vale Canada Limited	632,954	830,507
Penjualan kepada Sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	156,791	207,575
Total	789,745	1,038,082
Persentase penjualan kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan Related party sales as a percentage of total revenue	100%	100%

BEBAN JASA MANAJEMEN, LISENSI DAN ROYALTI

Beban jasa manajemen dibayarkan kepada VCL berdasarkan waktu yang digunakan dengan memakai biaya perjam atas jasa administratif dan korporasi yang sebagian besar dilakukan di Toronto termasuk tapi tidak terbatas pada jasa konsultasi dan pengarahan, pajak, treasury, akuntansi, keuangan, hukum, asuransi, manajemen risiko, internal audit, pengendalian internal, sumber daya manusia, teknologi informasi, teknologi dan manajemen (termasuk proyek), dukungan perencanaan bisnis dan strategis, dan jasa korporasi dan administratif lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak dari waktu ke waktu.

Beban lisensi dan royalti dibayarkan kepada VCL atas hak yang diberikan oleh VCL kepada Perseroan terkait penggunaan properti intelektual yang dimilikinya, termasuk diantaranya penggunaan informasi-informasi rahasia, teknologi *know-how* sehubungan dengan

REVENUE AND TRADE RECEIVABLES

Our largest related party transactions are our sales, as all of our nickel in matte production is committed to be sold to VCL and SMM. These arrangements are set forth in long-term, "must-take", U.S.-dollar-denominated sales agreements that end in 2025 following terms of our CoW, unless extended, modified or renewed. The selling price is the greater of the value determined by a formula based on Vale's net average realized price for nickel and the value determined by a formula based on the LME cash price for nickel. Trade receivables outstanding from VCL and SMM on December 31, 2015, were US\$50.0 million (2014: US\$73.6 million) and US\$28.2 million (2014: US\$19.1 million), respectively.

The following is a table for revenue transactions with related parties:

MANAGEMENT SERVICE, LICENSE AND ROYALTY FEES

A management service fee is paid to VCL based on time spent with hourly rates of service provided for work mostly performed in Toronto on corporate and administrative services such as including without limitation for the following: consulting and advisory services, tax, treasury, accounting, finance, legal, insurance, risk management, internal audit, internal control, human resources, information technology, technology and management (including projects), strategic and business planning support, and other corporate and administrative services as the parties mutually agree from time to time.

License and royalty fee is paid to VCL on rights given by VCL to the Company to use VCL's intellectual property, including all confidential information, technological know-how rights in relation to proprietary inventions (whether patentable or not), invention disclosures,

penemuan-penemuan (baik yang telah dipatenkan maupun yang belum dipatenkan), pengungkapan penemuan, pengembangan, paten dan hak paten, riset dan pengembangan, data teknis, proses, metode dan teknik, desain (baik teregister ataupun tidak), gambar, perumusan dan pendaftaran, tata letak, serta komersial dan hak serta lisensi dari kekayaan intelektual VCL (ataupun dari afiliasi VCL).

improvements, patents and patent, research and development, technical data, processes, methods, techniques, designs (whether registered or not), drawings, formulations and registrations, circuit layouts, commercial and intellectual property rights and licences of VCL (or an affiliate of VCL).

Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti diklasifikasikan sebagai beban usaha pada Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain.

Management service, license and royalty fees are classified as operating expenses in the Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income.

Beban jasa manajemen dihitung berdasarkan biaya aktual ditambah dengan 10% biaya jasa, sedangkan beban lisensi dan royalti dihitung berdasarkan 0,8% dari pendapatan

The management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while the license and royalty fee is calculated at 0.8% of revenue.

Berikut adalah tabel beban jasa manajemen, lisensi dan royalti yang dibayarkan ke VCL:

The following is a table for management service, license and royalty fees incurred to VCL:

	2015	2014
(Dalam ribuan AS\$) (US\$ in thousands)		
Vale Canada Limited	6,766	9,171
Sebagai persentase terhadap jumlah beban usaha As a percentage of total operating expenses	58.52%	63.40%

BIAYA LAINNYA DAN BIAYA PENGEMBANGAN PROYEK

Biaya dibayarkan kepada Vale Canada Limited terutama untuk biaya yang dibayarkan untuk kepentingan PT Vale, Vale Europe Limited untuk tagihan asuransi global dan Vale Japan Limited untuk kantong nikel.

OTHER COSTS AND PROJECT DEVELOPMENT COSTS

Reimbursements are paid to Vale Canada Limited for costs paid on PT Vale's behalf, to Vale Europe Limited for global insurance charges and to Vale Japan Limited for nickel bags.

Berikut adalah tabel biaya lainnya yang dibayarkan kepada pihak berelasi:

The following is a table for other costs paid to related parties:

	2015	2014
(Dalam ribuan AS\$) (US\$ in thousands)		
Vale Canada Limited	6,154	4,703
Vale Europe Limited	-	6
Vale Japan Limited	29	45
Total	6,183	4,754
Sebagai persentase terhadap beban pokok pendapatan As a percentage of total cost of revenue	0.92%	0.65%

Biaya jasa juga dibayarkan kepada Vale Technology Development (Canada) Limited dan Vale Canada Limited untuk melakukan studi terhadap proyek-proyek besar PT Vale.

Fees are also paid to Vale Technology Development (Canada) Limited for studies on PT Vale's major projects.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Berikut adalah tabel biaya jasa yang dibayarkan ke pihak berelasi yang berkaitan dengan biaya pengembangan proyek:

The following is a table for fees paid to related parties in relation to project development costs:

	2015	2014
(Dalam ribuan AS\$) (US\$ in thousands)		
Vale Technology Development (Canada) Limited	743	599
Vale Canada Limited	167	-
Total	910	599
Sebagai persentase terhadap jumlah beban pengembangan proyek As a percentage of total project development costs	4.94%	1.41%

GAJI DAN TUNJANGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah AS\$2,3 juta pada tahun 2015, dan AS\$2,9 juta pada tahun 2014, yang merupakan 3,1% dan 3,2% dari total biaya karyawan masing-masing untuk tahun 2015 dan 2014.

SALARIES AND ALLOWANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Salaries and allowances of the Boards of Commissioners and the Board of Directors were US\$2.3 million in 2015 and US\$2.9 million in 2014, representing 3.1% and 3.2% of total employee costs in 2015 and 2014 respectively.

OPSI SETARA SAHAM

Perseroan juga memberi opsi kepada personil manajemen kunci untuk membeli "opsi setara saham" Perseroan dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu. "Opsinya setara saham" mempunyai nilai yang sama dengan saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pengeksekusian opsi biasanya dilakukan dengan pembayaran kas. Opsi yang dieksekusi dicatat sebagai biaya karyawan. Opsi yang dieksekusi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah nihil (31 Desember 2014: nihil).

SHARE OPTION EQUIVALENTS

The Company has also awarded key management personnel options to purchase "share option equivalents" of the Company at a predetermined exercise price. A "share option equivalent" has the same value as a common share of the Company traded on the Indonesia Stock Exchange. The exercise of such options is usually settled in cash. Options exercised are included in employee costs. Options exercised for the year ended December 31, 2015 were nil. (December 31, 2014: nil).

Sejak tahun 2010, opsi setara saham ini tidak lagi diberikan. Manfaat yang masih ada berasal dari manfaat yang diberikan sebelum tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2015 terdapat opsi yang belum dilaksanakan untuk membeli 561.400 (31 Desember 2014: 1.636.400) setara saham, dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu berkisar antara Rp2.971 sampai dengan Rp7.350 (31 Desember 2014: Rp2.971 sampai dengan Rp7.350) dalam nilai penuh. Penurunan jumlah opsi membeli yang belum dilaksanakan disebabkan karena habisnya masa berlaku opsi tersebut.

Since 2010, the share options benefit has no longer been granted. The outstanding benefits are carried forward from benefits given prior to 2010. As at December 31, 2015, there were outstanding options to purchase an aggregate of 561,400 (December 31, 2014: 1,636,400) share equivalents (full amount) with predetermined prices ranging from Rp2,971 to Rp7,350 (December 31, 2014: Rp2,971 to Rp7,350) in full amount. The decrease in the number of total outstanding options to purchase was due to the expiration of the options.

PINJAMAN KEPADA KARYAWAN KUNCI

Jumlah pinjaman yang diberikan PT Vale kepada karyawan-karyawan kunci per 31 Desember 2015 adalah sebesar AS\$0,4 juta.

LOANS TO KEY EMPLOYEES

PT Vale's outstanding loans to key employees on December 31, 2015, were US\$0.4 million.

UTANG USAHA

Kami membayarkan kembali kepada afiliasi kami di luar negeri biaya-biaya tertentu yang ditanggung dalam memberikan jasa atau bertindak atas nama PT Vale. Jumlah hutang usaha terkait dengan transaksi ini per 31 Desember 2015 adalah AS\$8,7 juta dan pada 31 Desember 2014 adalah AS\$6,1 juta.

BIAYA JAMINAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Sehubungan dengan pinjaman SEFA, PT Vale dan Vale S.A., entitas pengendali utama PT Vale, menandatangani perjanjian jaminan pinjaman, di mana Vale S.A. setuju untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar AS\$300,0 juta yang diperoleh Perseroan. Biaya jasa penjaminan sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dibayar wajib dibayarkan kepada Vale S.A. pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran bunga pertama adalah hari kerja terakhir pada bulan Februari 2010, dan selanjutnya hari kerja terakhir setiap bulan Agustus dan Februari). Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2015 adalah AS\$0,8 juta dan pada 2014 adalah AS\$1,0 juta.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SIGNIFIKAN

PERIHAL LINGKUNGAN HIDUP

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 yang mengubah PP No. 24/2010. Perubahan Kedua ini melakukan perubahan terhadap ketentuan dasar terkait penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Dua perubahan diatur dalam Perubahan Kedua ini dalam hal prosedur perizinan. Pertama, pemohon tidak lagi dipersyaratkan untuk mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri sebelum mereka diperbolehkan untuk mengajukan IPPKH. Kedua, Perubahan Kedua ini memungkinkan "masyarakat umum" untuk mengajukan IPPKH.

Perubahan Kedua juga menetapkan persyaratan baru yang harus dipenuhi oleh pemegang IPPKH yang bermaksud memanfaatkan Kawasan Hutan sebagai berikut: pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi, pemegang izin pinjam pakai disyaratkan

TRADE PAYABLES

We reimburse our other overseas affiliated companies for certain expenditures incurred in providing services or acting on behalf of PT Vale. Outstanding trade payables related to these transactions on December 31, 2015, were US\$8.7 million and on December 31, 2014, were US\$6.1 million.

ACCRUED GUARANTEE FEE

In connection with the SEFA loan, PT Vale and Vale S.A., the ultimate parent entity of PT Vale, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300.0 million debt facility obtained by the Company. A guarantee fee of 1.5% per annum on the outstanding loan amount is payable to Vale S.A. by PT Vale on each interest payment date (the first interest payment date was the last business day in February 2010, and thereafter, the last business day of each August and February). Accrued guarantee fees at December 31, 2015, were US\$0.8 million and, in 2014, were US\$1.0 million.

SIGNIFICANT CHANGES TO REGULATIONS

ENVIRONMENTAL MATTERS

On December 28, 2015, the Government issued Government Regulation No. 105 of 2015, which amends GR No. 24/2012. This Second Amendment makes changes to the basic provision relating to production within protected forest areas ("Forest Area") for non-forestry industry.

Two changes have been incorporated under the Second Amendment with regards to the licensing procedure. Firstly, applicants are no longer required to obtain principal approval from the Minister before they are allowed to apply for a Lend-Use License. Secondly, the Second Amendment is now allowing "general public" to apply for Lend-Use Licenses.

The Second Amendment also sets out new requirements that must be satisfied by holders of Lend-Use Licenses who are wishing to utilize the Forest Areas as follows: for provinces containing a total forested area equal to or less than 30% of the total River Flow Area (Daerah Aliran Sungai - DAS), island area, or provincial area, the holder of a Lend-Use permit is required to

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

untuk untuk mengalokasikan lahan untuk penggunaan komersial; dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial. Pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, pemegang izin pinjam pakai diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan; dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial; dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial.

Perubahan Kedua menambahkan satu kewajiban baru bagi pemegang izin pinjam pakai, yaitu kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai batas-batas dimanfaatkan Kawasan Hutan kepada Menteri paling lambat satu tahun setelah izin telah dikeluarkan. Setiap pemegang izin pinjam pakai yang tidak menyampaikan informasi tentang batas kepada Menteri, maka dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan IPPKH.

Pada tanggal 24 Desember 2014, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Per P.97/2014"). Per P.97/2014, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada dasarnya mendelegasikan kewenangan terkait kehutanan dan lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin lingkungan. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015, kewenangan sehubungan dengan izin lingkungan ditarik kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa proses penyelesaian perizinan secara teknis akan tetap dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

allocate certain area(s) for commercial utilization; and conduct reforestation in order to rehabilitate the DAS. For provinces containing a total forested area of more than 30% of the total DAS, island area, or provincial area, the holder of a Lend-Use permit is required to pay the necessary non-tax state revenue relating to the utilization of the forest area; and conduct reforestation in order to rehabilitate the DAS.

The Second Amendment adds one new obligation for holders of Lend-Use Licenses, namely the obligation to submit information on the boundaries of the utilized Forest Area to the Minister no later than one year after a license has been issued. Any license holder failing to submit information on the boundaries to the Minister will see their Lend-Use License being annulled.

On December 24, 2014, the Minister of Environment and Forestry issued Ministerial Regulation No. P.97/Menhut-II/2014 on Delegation of Licensing and Non-Licensing Authority in the field of Environment and Forestry in the framework of One Door Integrated Service Implementation to the Head of the Investment Coordinating Board/BKPM ("Reg P.97/2014"). Reg P.97/2014, which is an implementing regulation of Presidential Regulation No. 97 of 2014 on One Door Integrated Services Implementation. This basically delegates certain forestry and environmental-related authorities from the Minister to the Head of the Coordinating Investment Board, including forestry Lend-Use permits and environmental permits. However, based on Regulation of Minister of Environment and Forestry No. P.1/Menhut-II/2015, the authority related to environmental permits is returned to the Ministry of Environment and Forestry. In addition, the regulation explains that the technical review of the permitting process will still be conducted by the Ministry of Environment and Forestry.

PERATURAN KEMENTERIAN ESDM TENTANG TATA CARA EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pada tanggal 30 Desember 2015, KESDM menerbitkan Peraturan No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan parameter yang jelas termasuk izin usaha pertambangan yang tumpang-tindih dengan Kontrak Karya yang masih aktif dan sudah ada sebelumnya, sebagai dasar pencabutan izin usaha pertambangan oleh Menteri dan Gubernur. Berdasarkan peraturan ini, KESDM bermaksud untuk melaksanakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pertambangan sesuai amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dampak Peraturan 43 ini terhadap Perseroan dalam hal ini adalah netral.

PERATURAN EKSPOR

Pada akhir Desember 2015, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri No.119/M-DAG/PER/12/2015 ("Permendag 119/2015") mengenai Ketentuan Hasil Ekspor hasil Pengolahan dan Pemurnian. Permendag 119/2015 mengatur antara lain kewajiban untuk memperoleh Izin Ekspor bagi produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian, ekspor tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP/IUPK Operasi Produksi yang berstatus *Clean and Clear*, pemegang IUP khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Bagi Perseroan, yang produknya termasuk dalam Lampiran 1 dari Peraturan Menteri Perdagangan ini, kewajiban tambahannya adalah untuk melakukan verifikasi atas klasifikasi produk Perseroan dan untuk mendaftar sebagai eksportir resmi.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LETTER OF CREDIT

Pada tanggal 5 Januari 2015, Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan No.04/M-Dag/Per/I/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu ("Permendag 04/2015"). Peraturan tersebut mengatur, antara lain, bahwa ekspor atas barang tertentu, termasuk nikel matte, wajib menggunakan cara pembayaran *letter of credit*; dan pembayaran harus diterima melalui bank devisa di dalam negeri.

MEMR REGULATION ON EVALUATION PROCEDURES FOR ISSUANCE OF MINERAL AND COAL MINING BUSINESS LICENCES

On December 30, 2015 MEMR issued Regulation No. 43 of 2015 on the Evaluation Procedures for Issuance of Mineral and Coal Mining Business Licences ("Regulation 43"), which sets clear parameters, including overlapping mining business licenses with existing and active CoWs, as the basis for revocation of mining business licenses by the Minister or Governors. Based on this Regulation, the MEMR wished to implement the distribution of authority between central and local government on the mining sector, as mandated by Law No. 23 of 2014 on the Regional Government. The impact of Regulation 43 on the Company is neutral.

EXPORT REGULATION

At the end of December 2015, the Minister of Trade issued Ministerial Regulation No. 119/M-DAG/PER/12/2015 ("MoT Reg 119/2015") on the Provision of Export of the Processed and Refined Mining Product. MoT Reg 119/2015 regulates among others the obligation to obtain an Export License for processed and refined minerals. The export of processed and refined mining products can be conducted by Clean and Clear Operation Production IUP/IUPK, Operation Production IUP for the processing and refining.

For the Company, where our product falls under Attachment 1 of the Minister of Trade regulation, the additional obligations are to verify the classification of the Company's product and to register as an official exporter.

MINISTER OF TRADE REGULATION ON LETTER OF CREDIT

On January 5, 2015, the Minister of Trade issued Regulation No.04/M-Dag/Per/I/2015 on the Use of Letter of Credit for the Export of Certain Goods ("Regulation 04/2015"). The regulation stipulates, among others, that letter of credit payment must be used in export of certain goods, including nickel matte; and it must be received through a domestic foreign exchange bank.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Sehubungan dengan terbitnya Permendag 04/2015, Menteri Perdagangan kemudian mengeluarkan Peraturan No.26/M-Dag/Per/3/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* ("L/C") untuk Ekspor Barang Tertentu. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sejak bulan Mei 2015 Perseroan telah mulai mempergunakan L/C dalam ekspor nikel matte.

Pada tanggal 31 Agustus 2015, Menteri Perdagangan mengeluarkan amandemen terhadap Permendag 04/2015. Satu-satunya perubahan adalah dihapusnya sektor minyak dan gas bumi dari lampiran Permendag 04/2015. Dengan demikian, produk minyak dan gas bumi (kecuali minyak kelapa sawit) tidak lagi dikenakan persyaratan penggunaan L/C. Nikel matte, namun demikian, masih berada dalam daftar barang yang tunduk pada ketentuan penggunaan L/C.

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

Pada tanggal 31 Maret 2015, Bank Indonesia ("BI") menerbitkan Peraturan No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("PBI 17"). PBI 17 secara umum mewajibkan penggunaan Rupiah untuk transaksi dalam negeri mulai 1 Juli 2015, dengan beberapa pengecualian tertentu. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 2015, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai peraturan pelaksana dari PBI 17.

Setelah melakukan analisis hukum yang mendalam, pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan menyampaikan surat kepada Bank Indonesia untuk menjelaskan posisinya; yaitu tidak tunduk pada PBI berdasarkan Kontrak Karya. Namun demikian, dengan itikad baik dan tanpa mengesampingkan hak-haknya berdasarkan Kontrak Karya, Perseroan akan, atas diskresinya sendiri, mengidentifikasi dan menegosiasikan kontrak-kontrak yang secara wajar lebih tepat untuk dibayarkan dalam Rupiah.

Bank Indonesia telah menanggapi surat Perseroan melalui surat No. 17/2430/DKSP tanggal 30 Oktober 2015 yang pada intinya menyetujui usulan Perseroan untuk tetap menggunakan mata uang selain Rupiah dalam transaksi-transaksinya sampai dengan

In relation to the issuance of Regulation 04/2015, the Minister of Trade also issued Regulation No.26/M-Dag/Per/3/2015 regarding the Specific Requirements on the Implementation of Letter of Credit ("L/C") for the Export of Certain Goods. In compliance with prevailing regulation, as of May 2015 the Company started to use L/C in the export of nickel matte.

On August 31, 2015, the Minister of Trade issued an amendment to Regulation 04/2015. The only change is deletion of the oil and gas sector in the attachment to Regulation 04/2015. This means oil and gas products (except crude palm oil) are no longer subject to the L/C requirement. Nickel matte, however, remains in the list of goods that are subject to the L/C requirement.

BANK INDONESIA REGULATION ON OBLIGATION TO USE RUPIAH

On March 31, 2015, the Bank Indonesia ("BI") issued Regulation No. 17/3/PBI/2015 regarding the Obligation to Use Rupiah in the Territory of the Republic of Indonesia ("PBI 17"). PBI 17 generally calls for the use of Rupiah for domestic transactions beginning July 1, 2015, subject to certain exceptions. Further, on June 1, 2015, the Bank of Indonesia issued Circular Letter No.17/11/DKSP on Obligation to Use Rupiah Within the Territory of the Republic of Indonesia, as the implementing guidance of PBI 17.

After conducting detailed legal analysis, on June 30, 2015, the Company sent a letter to the Bank of Indonesia explaining its position; not to be subject to PBI 17 based on the CoW. In good faith, however, the Company will, at its own discretion and without prejudicing its rights under the CoW, identify and negotiate contracts that are reasonably more suitable to be paid in Rupiah.

Bank Indonesia has responded to our letter by their letter No. 17/2430/DKSP dated October 30, 2015 which essentially approved the Company's proposal to continue using currency other than Rp in its transactions until the expiry of the CoW. BI asked the Company to

berakhirnya Kontrak Karya. BI meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian kontrak-kontrak yang transaksinya dapat menggunakan Rupiah dan melaporkan hasil penyesuaian dimaksud kepada BI setiap 6 bulan.

PERATURAN KEMENTERIAN ESDM TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA DAN DAERAH TERTENTU

Pada tanggal 13 Mei 2015, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan No. 16 Tahun 2015 untuk menentukan kriteria dan/atau persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha dan daerah tertentu. Pengolahan dan pemurnian nikel (*smelter*) termasuk sebagai salah satu bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas ini. Selain itu, Sulawesi merupakan salah satu daerah yang dapat diberikan fasilitas ini. Perseroan berencana untuk mengajukan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan ini untuk rencana-rencana investasinya.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan telah berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015

- (i) Penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain
Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", Perseroan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.
- (ii) Imbalan kerja
Berlaku sejak 1 Januari 2015, Perseroan telah menerapkan PSAK No.24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Penerapan PSAK ini meniadakan mekanisme koridor dan menggantikannya dengan pengungkapan liabilitas kontijen dengan klarifikasi dan pengungkapan sederhana. Manajemen telah

adjust its contracts that can use Rp and to provide BI with a report on the adjustments every six months.

MEMR REGULATION ON INCOME TAX FACILITY FOR CAPITAL INVESTMENT IN CERTAIN BUSINESS AND AREA

On May 13, 2015, the MEMR issued Regulation No. 16 of 2015 to determine the criteria and/or requirement to obtain income tax facility for capital investment in certain business and area. Nickel processing and refining business (*smelter*) is included as one of the businesses that are eligible for the facilities. In addition, Sulawesi is one of the areas that are eligible for the facilities. The Company plans to apply for income tax facilities under this regulation for its investment plans.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

New standards, amendments and interpretations issued and effective for financial year beginning on or after January 1, 2015

- (i) Presentation of items of other comprehensive income
In connection with the adoption of PSAK No. 1 (2013 Revision), "Presentation of Financial Statements", the Company has modified the presentation of items of other comprehensive income in its statements of profit or loss and other comprehensive income, to present items that would be reclassified to profit or loss in the future separately from those that would never be reclassified to profit or loss. Comparative information has been represented on the same basis.
- (ii) Employee benefits
Effective January 1, 2015, the Company has implemented PSAK No.24 (2013 Revision), "Employee Benefits". The revised PSAK removed the corridor mechanism and replaced the contingent liability disclosure with simple clarifications and disclosures. Management has assessed the extent

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Management's Discussion and Analysis

menentukan sejauh mana dampak retrospektif dan menyimpulkan bahwa dampaknya tidak material. Oleh karena itu, penyajian kembali laporan keuangan secara retrospektif tidak diperlukan.

of the retrospective impact and concluded that the impact is not material. Therefore, retroactive restatement of financial statements was not required.

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, tetapi belum berlaku efektif

Beberapa standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi telah diterbitkan tetapi belum efektif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dan tidak diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini, namun mungkin relevan untuk Perseroan:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2016

- PSAK 16 (Amandemen 2015) – Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi;
- ISAK 30 – Pungutan
- PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi;
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap;
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 53 (Penyesuaian 2015): Pembayaran Berbasis Saham;
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar.

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2017

- PSAK 1 (Amandemen 2015) – Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini, manajemen telah mempelajari dampak yang timbul dari penerapan standar/interpretasi ini dan belum merefleksikannya pada laporan keuangan Perseroan.

New standards, amendments and interpretations issued but not yet

Certain new/revised accounting standards and interpretations have been issued that are not yet effective for the year ended 31 December 2015, and have not been applied in preparing these financial statements, but may be relevant to the Company:

Effective starting on or after January 1, 2016

- SFAS 16 (2015 Amendment) – Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization in Fixed Assets;
- ISFAS 30 – Levies;
- SFAS 7 (2015 Annual Improvement): Related Party Disclosures;
- SFAS 16 (2015 Annual Improvement): Fixed Assets;
- SFAS 25 (2015 Annual Improvement): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;
- SFAS 53 (2015 Annual Improvement): Share-Based Payments;
- SFAS 68 (2015 Annual Improvement): Fair Value Measurement.

Effective starting on or after January 1, 2017

- SFAS 1 (2015 Amendment) – Disclosure Initiatives in Presentation of Financial Statements.

As at the issuance of these financial statements, management has evaluated the impact of these revised standards/interpretations and has yet to reflect any impact on the Company's financial statements.

Penerapan dini revisi dan standar baru diatas sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan, kecuali PSAK No.1.

Early adoption of these new and revised standards prior to January 1, 2015 is not permitted, except for SFAS No.1.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG PERISTIWA BERSIFAT LANGKA DAN LUAR BIASA

Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit untuk Periode Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 tidak memiliki informasi keuangan yang mengandung peristiwa yang bersifat langka dan luar biasa.

FINANCIAL INFORMATION WHICH CONTAINS AN EXTRAORDINARY AND RARE EVENT

The Company's audited Financial Statements for The Years Ended December 31, 2015 and 2014 did not have any extraordinary and rare events.



Salah satu fasilitas di pabrik pengolahan Perseroan di Sorowako
A facility in the Company's processing plant in Sorowako

Proyek-proyek Pengembangan

Projects Development

Strategi pertumbuhan Perseroan sangat penting untuk masa depan kami. Kami yakin bahwa bisnis nikel kami adalah salah satu bisnis dengan prospek pertumbuhan terbaik di dunia karena kami memiliki bijih nikel kelas dunia dan memiliki kemampuan mendayagunakan infrastruktur yang tersedia. Strategi kami adalah untuk tumbuh di tiga wilayah geografis di tahun-tahun mendatang, mulai dari Sorowako di Sulawesi Selatan, kemudian berkembang ke Pomalaa di Sulawesi Tenggara dan Bahodopi, Sulawesi Tengah. Strategi pertumbuhan ini juga tertuang dalam KK 2014 sebagai komitmen investasi Perseroan. Dengan ditandatanganinya KK 2014, Perseroan telah mengamankan strategi bisnis Perseroan masa mendatang dan memberikan kepastian investasi sehubungan dengan hak dan kewajiban Perseroan.

Pengembangan di Sorowako merupakan suatu proyek besar yang akan dilakukan secara bertahap. Tahap 1 berupa peningkatan kapasitas produksi menjadi sekitar 90.000 ton nikel dalam matte per tahun, dan tahap 2 diharapkan dapat meningkatkan kapasitas menjadi antara 110.000 hingga 120.000 ton (tergantung hasil studi lanjutan, hasil eksplorasi dan kadar bijih). Studi kelayakan proyek Tahap 1 ini telah diselesaikan dan saat ini Perseroan sedang menunggu dikeluarkannya perizinan yang diperlukan. Di lain pihak Perseroan pun menyadari jika penurunan harga nikel terus berlanjut untuk beberapa tahun ke depan, hal ini tentunya dapat mempengaruhi kemampuan pendanaan Perseroan untuk proyek pengembangan ini. Jika hal tersebut terjadi, maka strategi Perseroan adalah membagi proyek tahap 1 ini menjadi beberapa fase sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan serta kondisi harga nikel.

Adapun untuk pengembangan di Pomalaa, strategi kami adalah mengembangkan operasi tambang limonit di blok Pomalaa, yang akan memberi umpan ke fasilitas pengolahan nikel baru, yang juga berada di daerah yang sama. Teknologi pengolahan yang sedang dikaji untuk fasilitas pengolahan adalah proses hidrometalurgi yang akan dikembangkan melalui usaha patungan dengan pihak ketiga yang dapat membawa teknologi hidrometalurgi yang terbukti dan mapan. Kami telah menyelesaikan studi pra-kelayakan. Pada tahun 2015,

Our growth strategy is critical to our future. We believe we have some of the best nickel growth prospects in the world, due to our world-class ore body and ability to leverage existing infrastructure. Our strategy is to grow in three geographical regions over the coming years, starting in Sorowako in South Sulawesi and then expanding to Pomalaa in Southeast Sulawesi and Bahodopi in Central Sulawesi. This growth strategy is outlined as investment commitments in our 2014 COW. With the signing of 2014 COW, the Company secures its future business strategy and provides investment certainty in respect of the Company's rights and obligations.

The Sorowako expansion is a major project that will be conducted in stages. Stage 1 will see production capacity grow to around 90,000 tonnes of nickel in matte per year, while stage 2 is currently anticipated to increase capacity to approximately 110,000 to 120,000 tonnes (subject to further study, exploration results and ore grades). We have completed the feasibility study of Stage 1 and at the moment, the Company is still pursuing the necessary permits. On the other hand, we also realize if nickel price continue to decline for the next few years, it will affect the Company's financing ability. If it indeed happens, our strategy is to deliver the stage 1 in several phases according to Company's financing ability and nickel price condition.

As for Pomalaa development, our strategy is to develop a limonite mining operation in the Pomalaa block, which would feed in to a new nickel processing facility, also in the same general area. The processing technology under consideration is a hydrometallurgy process, which would be developed through a joint venture with third parties that could bring established hydrometallurgy technology. We have completed the pre-feasibility study. In 2015 we continued the study to a laboratories testing on the ore sample

kami melanjutkan studi ke tahapan tes laboratorium atas karakteristik sampel bijih. Karakteristik bijih menjadi faktor penting dalam penentuan berbagai desain fasilitas pengolahan di Pomalaa. Pada saat yang bersamaan Perseroan juga melakukan studi optimalisasi tambang.

Saat ini rencana pengembangan Bahodopi sedang dievaluasi. PT Vale telah mengajukan dua strategi pengembangan secara umum kepada pemerintah dan saat ini sedang dalam proses pemilihan salah satunya. Bila keputusan telah diambil, Perseroan akan melanjutkan pekerjaan pembangunan proyek untuk bijih yang sangat baik ini secara berkelanjutan.

Waktu pelaksanaan setiap proyek sangat bergantung pada kesimpulan positif studi kelayakan kami, persetujuan pemegang saham, kondisi pendanaan Perseroan, izin-izin dan persetujuan pemerintah. Investasi pertama adalah perluasan Tahap 1 fasilitas produksi nikel matte di Sorowako yang diperkirakan butuh waktu sekitar tiga tahun untuk menyelesaikannya. Pengembangan lainnya di Pomalaa dan Bahodopi serta pengembangan Sorowako tahap 2 akan dimulai saat selesainya studi, perizinan dan persetujuan yang diperlukan.

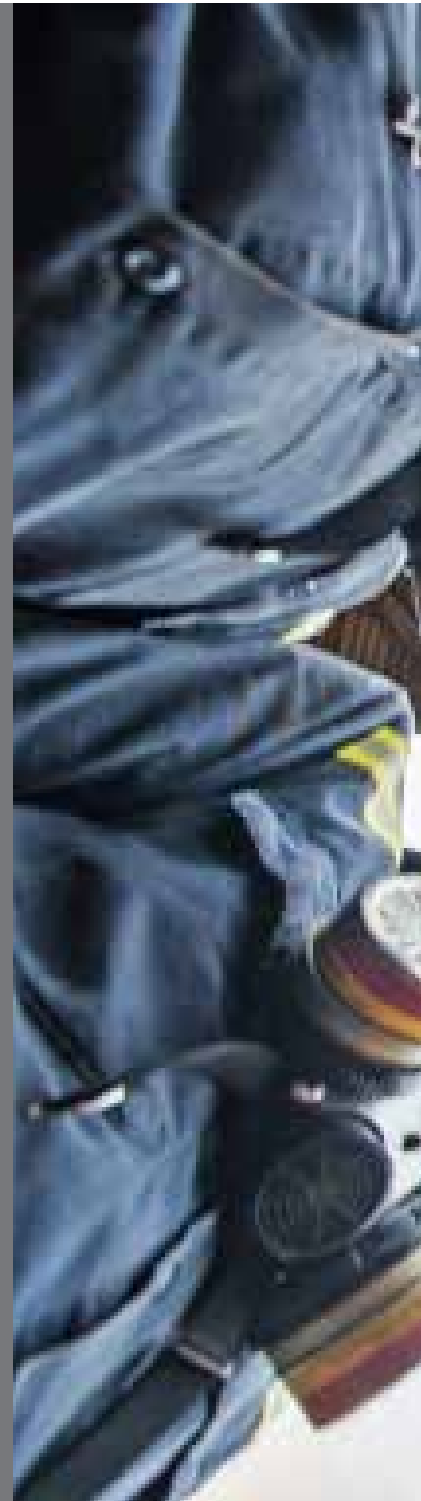
characteristic. The ore characteristic is an important factor in defining the design of the processing facilities related to development in Pomalaa. At the same time, the Company is also conducting the limonite mining optimization.

The Bahodopi development is still being assessed. PT Vale has submitted two broad development strategies to the government and is now in the process of selecting one of those strategies. Once a decision has been made, the Company will proceed with project development work to sustainably develop this excellent ore body.

The timing of each project is largely dependent on positive conclusion of our feasibility studies, shareholders' approval, Company's financing ability, permits and government approvals. The first investment is likely to be the Stage 1 expansion of nickel matte production facilities in Sorowako and will require approximately three years to complete. The other developments in Pomalaa and Bahodopi, as well as the Stage 2 Sorowako expansion would then proceed after completion of studies and when all permits and approvals are obtained.

Penunjang Usaha

Business Support



Daftar Isi

Contents



Sumber Daya Manusia Human Resources	184
Teknologi Informasi Information Technology	206



Karyawan Pabrik pengolahan kami di Sorowako
Our Process Plant employees in Sorowako

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Perseroan membutuhkan dukungan dari pekerja yang berkompeten yang dapat dipenuhi melalui rangkaian proses pengembangan pekerja yang terintegrasi dan terarah.

The Company needs the support of competent employees fulfilled through a series of an integrated and directed employee development processes.

MISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Untuk memanfaatkan potensi manusia dan membantu menciptakan nilai jangka panjang dengan menyediakan solusi manajemen sumber daya manusia yang terbaik

VISI PENGELOLAAN SDM 2016

Untuk diakui sebagai kelompok Sumber Daya Manusia yang mempromosikan budaya pengembangan dan kolaborasi dalam lingkungan kerja di mana semua karyawan ingin menjadi bagian dan setiap karyawan adalah tokoh utama dalam kisah Vale.

HUMAN RESOURCES (HR) MANAGEMENT MISSION

To leverage human potential and to help creating long term value by providing the best human resources management solutions.

2016 HR VISION

To be recognized as a Human Resources group that promotes a culture of development and collaboration in a working environment to which all employees wish to belong and where each employee is a lead character in Vale's story.

843

Jumlah pekerja PT Vale yang telah disertifikasi oleh LSP sejak 2013

Number of employees have been certified by LSP since 2013

PETA STRATEGI SDM 2016
2016 HR STRATEGY MAP



Sumber Daya Manusia

Human Resources

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI/PENDIDIKAN PEKERJA

Dalam melaksanakan kegiatan usaha secara efektif, efisien dan aman untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang, Perseroan membutuhkan dukungan dari pekerja yang kompeten, sesuai dengan peran dan akuntabilitasnya masing-masing di dalam organisasi. Pekerja yang kompeten dapat dipenuhi melalui rangkaian proses yang terintegrasi dan terarah berdasarkan kondisi internal dan situasi eksternal Perseroan. Pengembangan kompetensi pekerja adalah bagian dari pengelolaan kompetensi pekerja yang secara keseluruhan diawali dengan penilaian kompetensi pekerja.

Mekanisme penilaian pekerja di Perseroan dibagi menjadi dua proses utama, yaitu penilaian untuk pekerja level Non Staff, yang dilakukan melalui penilaian efektivitas individu dan penilaian untuk pekerja level Staff ke atas, yang dilakukan melalui metode penilaian mandiri, metode 360 derajat, penilaian atasan dan penilaian panel melalui suatu komite yang disebut Komite Karir dan Sukses (C&S *Committee*). Informasi yang diperoleh dari dua proses tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan yang sangat diperhitungkan dalam menyusun strategi pengembangan kompetensi pekerja lebih lanjut dan akan disampaikan ke pekerja terkait dalam proses umpan-balik agar diketahui oleh setiap pekerja dimana hasil diskusi dalam proses umpan-balik tersebut dituangkan dalam Rencana Pengembangan Individual/*Individual Development Plan* (IDP).

Selama kurun waktu tahun 2015, Perseroan melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi pekerja di semua jenjang dan bagian dengan total jam pelatihan sejumlah lebih dari 80 ribu jam pelatihan dan total biaya sebesar AS\$307 ribu. Dengan jumlah jam pelatihan yang lebih tinggi dan biaya pelatihan yang lebih rendah dibanding tahun 2014, proses pengembangan kompetensi di Perseroan tetap pada fokusnya dalam mencapai tujuan keberlanjutan Perseroan, dimana hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan koordinasi internal dalam melaksanakan program pengembangan kompetensi terkait kompetensi teknis maupun non-teknis dan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

TRAINING AND DEVELOPMENT OF EMPLOYEE COMPETENCE/EDUCATION

In conducting business activities effectively, efficiently and safely to achieve short-term and long-term goals, the Company needs the support of competent employees. In accord with the role and accountability of each within the organization also the internal and external situations, employee competency is achieved through a series of integrated and directed processes. Employee competence development is part of the overall employee competence management that begins with assessments of employee competence.

The employee assessment mechanism is divided into two main processes, namely the employee assessment for Non-Staff level which is conducted by assessing the effectiveness of individuals; and for Staff level and above which is done through a self-assessments method, 360 degrees method, supervisor evaluation and assessment panels called the Career and Succession Committee (C & S Committee). The information obtained from these two processes becomes one of key consideration in formulating further employee competence development strategies. This information is also conveyed to the respective employee for a feedback process which results is recorded in an Individual Development Plan (IDP).

During 2015, the Company implemented competence development programs for employees at all levels and departments with a total of more than 80 thousand hours of training at a total cost of US\$307 thousand. With a higher number of training hours and lower training costs compared to 2014, the competence development process in the Company remains focused in fulfilling the Company's sustainability objectives which is achieved through improved internal coordination in implementing the technical and non-technical competency development, as well as in occupational health and safety programs.

Pada tahun 2015, Perseroan mendukung proses peningkatan pendidikan pekerja untuk jenjang S-1, S-2 dan S-3 dengan detail sebagai berikut:

1. Perseroan mendukung kegiatan pendidikan pekerja di jenjang S-1 untuk dua jurusan, yaitu Teknik Mesin dan Teknik Industri dengan total peserta sebanyak 101 mahasiswa;
2. Untuk jenjang S-2, Perseroan mendukung berlangsungnya proses pendidikan untuk program Magister Manajemen yang diikuti oleh 41 orang pekerja;
3. Perseroan secara konsisten mendukung program S-3 Ilmu Ekonomi yang saat ini aktif diikuti oleh 13 orang pekerja.

In 2015, the Company supported the process of improving the education of employees for Bachelors (S-1), Masters (S-2) and Doctor of Philosophy (S-3) degrees with the following details:

1. For the Bachelors degree, the focus was on the two majors i.e. Mechanical Engineering and Industrial Engineering with total of 101 participants;
2. For the Masters degree, the focus was on the Master of Management program with 41 participants;
3. For the Doctor of Philosophy degree, the focus continued in Economics with 13 participants.

Perkuliahan yang di Fasilitas Perseroan – Jumlah Peserta

Lectures facilitated by the Company – Number of Participants

Keterangan	2013	2014	2015	Description
S-3 Doctor of Philosophy (Phd)	-	13	13	
S-2 Masters Degree	32	58	41	
S-1 Bachelors Degree	164	174	101	

Perkuliahan yang di Fasilitas Perseroan – Jumlah Kelas

Lectures facilitated by the Company – Number of Classroom

Keterangan	2013	2014	2015	Description
S-3 Doctor of Philosophy (Phd)	-	1	1	
S-2 Masters Degree	1	2	2	
S-1 Bachelors Degree	7	7	11	

Biaya Pelatihan (dalam AS\$)

Cost of Training (in US\$)

Keterangan	2013	2014	2015	Description
	735,267	642,849	306,501	

PENGEMBANGAN KARIR

Peluang pengembangan karir diberikan seluas-luasnya kepada seluruh pekerja untuk meniti karir di Perseroan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama ataupun kondisi fisik. Proses seleksi untuk menempati posisi manajerial maupun teknikal didasarkan sepenuhnya pada penilaian kompetensi.

CAREER DEVELOPMENT

The opportunities for career development are given extensively to all employees to pursue a career in the Company without any discrimination based on race, gender, religion or physical condition. The selection process for the managerial and technical positions is based entirely on the competency active assessment.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Untuk pengembangan karir manajerial, Perseroan mengacu pada rencana suksesi yang disusun berdasarkan potensi pekerja serta kompetensi pekerja di bidang manajerial. Kemampuan untuk memimpin, mengelola hasil, mengelola kualitas, kemampuan berinteraksi dalam organisasi serta kemampuan berpikir strategis menjadi aspek yang dinilai untuk menetapkan kandidat suksesor. Tidak ada aspek senioritas dalam penilaian untuk pengembangan karir.

Untuk pengembangan karir teknis, pelaksanaannya didasarkan sepenuhnya pada pemenuhan kualifikasi teknis yang telah ditetapkan. Departemen SDM bekerja sama dengan departemen teknis telah mengembangkan beberapa jenjang karir teknis, terutama untuk posisi insinyur di beberapa departemen teknis. Jenjang level insinyur junior sampai *master* dibedakan dengan kualifikasi teknis, pengalaman kerja dan pengalaman menangani permasalahan teknis terkait. Ketika seorang pekerja sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dia berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat.

UNIT PENUNJANG LAYANAN PENGEMBANGAN SDM

Untuk memberikan layanan ke seluruh pekerja, Departemen SDM didukung oleh beberapa fasilitas dan unit penunjang, yaitu:

PUSAT PELATIHAN

Dengan didukung oleh 15 kelas, Pusat Pelatihan mampu mencapai kapasitas terpakai penuh sebanyak 350 peserta yang diprioritaskan untuk aktivitas pengembangan kompetensi pekerja yang dilakukan dengan metode tutorial bagi pekerja PT Vale Indonesia dan pekerja kontraktor. Di tahun 2015, sebanyak 7.371 pekerja telah mengikuti beragam pelatihan di Pusat Pelatihan dengan total jam pelatihan sebanyak 81.010 jam pelatihan.

For managerial career development, the Company refers to a succession plan that is based on the employee potential, as well as managerial competence. Ability to lead, manage results, manage quality, and the ability to interact within the organization, as well as the ability to think strategically are the aspects being considered in establishing successor candidates. Seniority is not one of them.

For technical career development, implementation is based entirely on meeting the pre-determined technical qualifications. The HR department in collaboration with the technical department has developed several technical career paths, especially for engineers within the technical departments. The ladder of the junior engineer to master level is classified based on technical qualifications, work experience, and experience in dealing with the respective technical problems. When an employee has met the required qualifications, he or she is entitled to get a promotion.

HR DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES UNIT

To provide services to all employees, the HR Department is supported by a number of facilities and support units, namely:

TRAINING CENTER

Supported by 15 classrooms, the Training Center is able to achieve full capacity utilization of about 350 people, prioritized for competency development activities that is conducted based on tutorial method for both PT Vale Indonesia employees and contractor employees. In 2015, 7,371 employees participated in a training sessions at the Training Center with the total of 81,010 training hours.

Pengembangan Pekerja – Pelatihan
Employee Development – Training

Jenis Pelatihan	2014		2015		Type of Training
	Peserta Participant	Jam Pelatihan Hours of Training	Peserta Participant	Jam Pelatihan Hours of Training	
Pelatihan Teknikal	2,576	20,840	4,258	48,880	Technical Training
Pelatihan Manajemen dan Profesional	289	6,264	517	9,904	Management and Professional Training
Pelatihan Teknologi Informasi	168	2,728	173	2,960	Information Technology Training
Pelatihan Bahasa	87	5,461	203	1,218	Language Training
Pelatihan Keselamatan Kerja	5,134	30,734	2,220	18,048	Occupational Safety Training
Total	8,254	66,027	7,371	81,010	Total

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

Bagi PT Vale, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi kesempatan yang baik dimana dalam hal aspek ketenagakerjaan terdapat kesempatan yang sangat besar bagi Perseroan untuk membenahi infrastruktur mengingat akan banyak tersedia pekerja berstandar internasional. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan internal PT Vale dalam membuat perangkat asesmen jabatan dimana untuk selanjutnya, perangkat ini akan dikaitkan dengan proses rekrutmen tenaga kerja yang berbasis kompetensi.

Bisa dipastikan hampir semua perusahaan menginginkan tenaga kerjanya memiliki kualitas dan keahlian yang prima sehingga kegiatan usaha mereka dapat berumur panjang. Hal itulah yang menjadi dasar mengapa standarisasi ini diperlukan mengingat persaingan tenaga kerja di era MEA nanti. Di samping itu juga harus diintegrasikan dengan sistem rekrutmen yang berbasis kompetensi.

Dengan LSP PT Vale, Perseroan dan karyawan memiliki pemahaman yang jelas mengenai persyaratan profesional yang dibutuhkan setiap jenis pekerjaan atau jabatan serta jalur pengembangannya karena semuanya sudah terdokumentasi dengan baik sebagaimana disyaratkan dalam sertifikasi pekerjaan atau jabatan tersebut.

PROFESSIONAL CERTIFICATION (LSP)

For PT Vale, the ASEAN Economic Community (AEC) will be a good opportunity in terms of employment aspects, as there are tremendous opportunities for the Company to improve infrastructure, considering the many available employees at international standards. Therefore, the readiness of PT Vale's internal processes is necessary for formulating the position assessment tools which will be associated with the employee competency-based recruitment process.

It is certain that all companies desire their workforce to have excellent quality and expertise to generate sustainable operations. This matter is the basis of why standardization is necessary given the labor competition in the era of MEA. In addition, it also must be integrated within the competency-based recruitment system.

With the LSP, both the Company and employees have a clear understanding of the professional requirements that are needed for any employment or career and development path, as the LSP has well-documented the required certifications for jobs and positions.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Dalam perjalanannya, setelah diakreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) pada tanggal 21 Mei 2013, PT Vale telah mendaftarkan 923 unit standar kompetensi dimana jumlah kompetensi telah dilisensi adalah 886 unit standar kompetensi. Lebih lanjut LSP PT Vale saat ini berwenang untuk mensertifikasi 81 kelompok jabatan untuk 723 standar kompetensi dan memiliki 185 Asesor, 5 Master Asesor, 4 Lead Asesor dan 18 Asesor Lisensi yang kesemuanya telah disertifikasi oleh BNSP.

In its journey, once accredited by BNSP (National Professional Certification Board) on May 21, 2013, PT Vale has registered 923 competency standard units, of which the number of competencies that have been licensed is 886. Further, the LSP of PT Vale is now authorized to certify 81 groups for 723 competency standard positions and has 185 assessors, 5 Master Assessors, 4 Lead Assessors and 18 License Assessors all of whom have been certified by BNSP.

LSP – Unit Kompetensi

LSP – Competency Unit

Keterangan	2013	2014	2015	Description
Skema Unit Kompetensi	152	152	152	Competency Unit Scheme
Penambahan Skema Unit Kompetensi (ke-1)	0	418	418	Addition of Competency Unit Scheme (1st)
Penambahan Skema Unit Kompetensi (ke-2)	0	0	158	Addition of Competency Unit Scheme (2nd)
Revisi Skema	0	158	162	Revised Scheme

LSP – Sertifikasi Pekerja

LSP – Employee Certification

Keterangan	2013	2014	2015	Description
Sertifikasi Pekerja	239	237	367	Employee Certification

LSP – Unit Kompetensi per Departemen

LSP – Competency Unit per Department

Departemen	2013	2014	2015	Department
Process Plant	84	160	221	Process Plant
Mines & Exploration	1	30	12	Mines & Exploration
Medical	34	347	357	Medical
Maintenance	25	25	50	Maintenance
Security	5	5	50	Security
General Facility	3	3	3	General Facility

SISTEM PENCATATAN KEHADIRAN PEKERJA

Untuk memastikan adanya manajemen waktu, manajemen sistem informasi dan manajemen kehadiran pekerja di tempat kerja yang dapat diandalkan dalam menjaga tingkat produktivitas dan menyediakan informasi yang akurat bagi proses penilaian efektivitas individu, Perseroan menerapkan sistem pencatatan kehadiran pekerja yang terintegrasi yang ditempatkan di berbagai lokasi akses pekerja, sehingga memudahkan pekerja dalam melakukan pencatatan kehadirannya di tempat kerja.

EMPLOYEE ATTENDANCE RECORDING SYSTEM

To ensure effective workplace time management, information systems management and employee attendance management to maintain the level of productivity and provide accurate information on effectiveness of individual assessments, the Company introduced a an integrated employee attendance recording system, which, stationed at various locations makes it easier for employees to record their presence in the workplace.

LAYANAN E-KIOSK

Sebagai salah satu upaya untuk memberi kemudahan bagi pekerja level Non Staff dalam menerima layanan yang terkait dengan SDM, Perseroan menerapkan sistem *online*, dimana pekerja dapat mengakses layanan yang dibutuhkan melalui unit terminal yang ditempatkan di lokasi yang aman. Layanan yang dapat diterima melalui unit terminal *online* adalah yang terkait data pribadi pekerja, catatan dan status pengajuan cuti, pencetakan slip gaji, pengajuan dan status pinjaman yang diajukan, kebijakan perusahaan dan kabar mengenai organisasi, pengembangan karir, informasi posisi yang kosong di dalam organisasi serta sejarah pekerjaan dan hal lain yang terkait SDM.

AKADEMI TEKNIK SOROWAKO (ATS)

Pada usianya yang ke-24 tahun pada tahun 2015 ini, ATS menyelenggarakan program pendidikan vokasi jenjang Diploma 3 dengan program studi Perawatan dan Perbaikan Mesin yang menfokuskan pada lima konsentrasi keterampilan, yaitu Pemeliharaan Mesin; Gambar dan Perancangan; Pembuatan Suku Cadang Mesin; Las dan Fabrikasi Logam; dan Mekanik Otomotif Alat Ringan dengan jumlah keseluruhan 288 mahasiswa. ATS juga menyelenggarakan program pelatihan jangka pendek antara satu minggu hingga tiga bulan sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh pelanggan yang berasal dari industri sebanyak 16 orang, pemerintah daerah Kabupaten East Luwu sebanyak 22 orang, dan menyerap program magang siswa Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 33 orang.

Menghadapi tantangan yang lebih berat khususnya dengan diberlakukannya kebijakan MEA, ATS berbenah untuk menaikkan tingkat akreditasi program studinya dari status saat ini "Sangat Baik atau B" menjadi "Unggul atau A" pada tahun 2016 dan menggiatkan program-program penelitian dosen pada bidang teknologi terapan untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan mendapatkan pengakuan melalui penerbitan pada jurnal-jurnal nasional.

E-KIOSK SERVICES

As one of the efforts to provide convenience for Non-Staff level employees in receiving HR services, the Company implements an online system, in which employees can access the necessary services through terminals units located in secure locations. HR services that can be received via the online terminals include personal employee data, notes and leave application status, paycheck printing, filing and loan proposal status, Company policies and organization news, career development, vacant position information, employment history, and other information related to HR.

SOROWAKO ACADEMY OF ENGINEERING (ATS)

In its 24th year, ATS held vocational education programs for Diploma 3 with major in Maintenance and Repair Engineering, which focused on five concentration skills: Machinery Maintenance; Illustration and Design; Machine Parts Manufacture; Metal Welding and Fabrication; and Lightweight Tools Automotive Mechanic; with a total of 288 students. ATS also organizes short-term training programs from one week to three months according to the competencies required by customers who come from the industry as many as 16 people; local government of East Luwu Regency for 22 people; and internship program from Vocational High School for 33 people.

Facing severe challenges, especially with the policies enactment of MEA, ATS is preparing to raise the level of the study accreditation program from the current status of "Very Good or B" to "Superior or A" in 2016 and intensified academic research programs in the field of applied technology to produce scientific work that can be used to improve the quality of learning, dedication to the community, and to receive recognition through publication in national journals.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

ATS saat ini memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari dosen dan instruktur 50 orang, penyelia/pengawas logistik dan produksi 6 orang, teknisi dan pengadministrasi 16 orang, dan 37 orang pekerja pada divisi produksi. Dosen yang sedang mengikuti program magister sebanyak lima orang, terdiri dari dua orang di Institut Pertanian Bogor (IPB), satu orang di Universitas Gajah Mada (UGM), satu orang di Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan satu orang di Universitas Negeri Makassar (UNM).

Currently, ATS staffs consisting of 50 lecturers and instructors, 6 logistic and production supervisors, 16 technicians and administration staff, and 37 people working in the production division. There are five lecturers who are participating the masters program consisting of two people at the Bogor Institute of Agriculture (IPB), one person at Gajah Mada University (UGM), one person at Hasanuddin University (UNHAS), and one person at Makassar State University (UNM).

ATS - Jumlah Mahasiswa 5 tahun terakhir

ATS - The Number of Students in the last 5 years

Program D-3	Tahun Year					Diploma Program
	2011	2012	2013	2014	2015	
Pemeliharaan Mesin	74	74	73	72	72	Machinery Maintenance
Gambar dan Perancangan	42	45	44	51	52	Illustration and Design
Pembuatan Suku Cadang Mesin	70	71	75	74	76	Machine Parts Manufacture
Las dan Fabrikasi Logam	26	35	44	48	48	Metal Welding and Fabrication
Mekanik Otomotif Alat Ringan	0	16	31	40	40	Lightweight Tools Automotive Mechanic
Jumlah Total Mahasiswa	212	241	267	285	288	Total Number of Students
Jumlah Lulusan	68	60	71	72	90	Number of Graduates

ATS – Jumlah Peserta Pelatihan Jangka Pendek (PJP) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ATS – Number of Participants of East Luwu Regency Regional Government Vocational Short-term Training (VST)

Pelatihan Jangka Pendek	Tahun Year					Vocational Short-term Training
	2011	2012	2013	2014	2015	
PJP – Pengelas	16	22	21	29	11	VST – Welder
PJP – Mekanik	13	22	22	0	0	VST – Mechanic
PJP – Listrik	15	21	21	0	0	VST – Electricity
PJP – Otomotif	11	0	0	28	11	VST – Automotive
PJP – Perkayuan	0	0	0	9	0	VST – Carpenter
Jumlah Total Peserta	55	65	64	66	22	Total Participants

PROGRAM PELATIHAN INDUSTRI (PPI)

Program Pelatihan Industri didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan memberikan pembekalan kompetensi teknikal di bidang industri yang diprioritaskan kepada para pemuda-pemudi yang berdomisili di sekitar daerah operasi PT Vale (empat kecamatan) dan secara terbatas juga dialokasikan bagi masyarakat yang berdomisili di tujuh kecamatan lain di Kabupaten Luwu Timur.

INDUSTRIAL TRAINING PROGRAM (PPI)

The Industrial Training Program was established in 2004 with the aim of providing knowledge of technical competency in the industry, prioritized to young people who live around PT Vale's area of operation (four districts) and also allocated for the people who live in seven other districts in East Luwu Regency. Currently,

Jurusan yang diselenggarakan PPI saat ini terdiri dari Pemeliharaan Kendaraan dan Alat Berat; Operator Alat Berat; Operator Pabrik; dan *Logistic Storeman*. Hingga sekarang, PPI sudah meluluskan 927 peserta pelatihan yang sebagian besar sudah terserap di beberapa industri di berbagai daerah di Indonesia.

Tahun 2015 PPI menghasilkan 247 lulusan yang terdiri dari 2 angkatan. Setiap angkatan pelatihan berdurasi 3,5 bulan. Satu paket pelatihan terdiri dari kegiatan dalam kelas sebanyak 30% dan *on-the-job training* di PT Vale sebanyak 70%. Peserta pelatihan merupakan hasil seleksi dari 11 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pelatihan ini menekankan pada pemahaman konsep dasar dari setiap jurusan, perilaku-perilaku kerja standar termasuk kedisiplinan, prinsip 5S dan kesehatan keselamatan kerja serta latihan praktek mengoperasikan sejumlah peralatan tambang dan cara pemeliharaannya.

PPI mempunyai 15 instruktur dan 2 pekerja administrasi dan didukung *Maintenance Support Officer*, *Safety Officer*, *IT Support* dan Ketua Program Studi. Para instruktur seluruhnya dari para pensiunan pekerja PT Vale sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dalam menjalankan programnya PPI setiap saat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, mulai dari pencarian dan penyaringan calon peserta, pelaksanaan pelatihan dan evaluasinya.

PPI has programs that consist of Vehicles and Heavy Equipment Maintenance, Heavy Equipment Operator, Plant Operator, and Logistics Storeman. Until now, PPI has graduated 927 trainees who mostly been absorbed in industries across Indonesia.

In 2015, PPI shaped 247 graduates of two classes. Each training class lasts 3.5 months. One training package consists of activities in the classroom at 30% and on-the-job training at PT Vale at 70%. Trainees were selected from 11 districts in East Luwu Regency.

The training emphasizes understanding of basic concepts of each department, standard behaviors including self-discipline, 5S principles and occupational safety and health, as well as practice exercises to operate and maintain mining equipments.

PPI has 15 instructors and 2 administrative employees, as well as support from Maintenance Support Officer, Safety Officer, IT Support and the Chairman of the Program. The instructors are entirely retired employees of PT Vale within their respective areas of expertise. In conducting the program, PPI is always in coordination with the Local Government of East Luwu Regency, ranging from search and screening of potential participants, implementation and evaluation.

PPI – Alumni & Tingkat Kelulusan

PPI – Alumni & Passing Rates

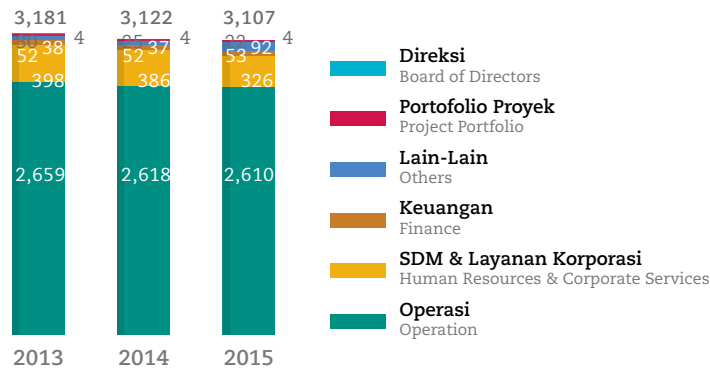
	2013		2014		2015	
	Alumni	% Lulus % Passing	Alumni	% Lulus % Passing	Alumni	% Lulus % Passing
Process Plant Operator	80	93%	61	95%	63	98%
Maintenance	88	98%	67	93%	68	100%
Logistics & Warehouse	39	98%	42	100%	45	98%
Heavy Equipment Operator	75	90%	69	95%	71	98%

Sumber Daya Manusia

Human Resources

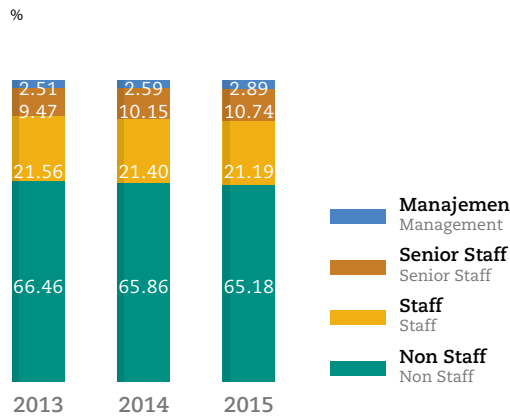
Jumlah Pekerja per Direktorat

Demographic by Directorate



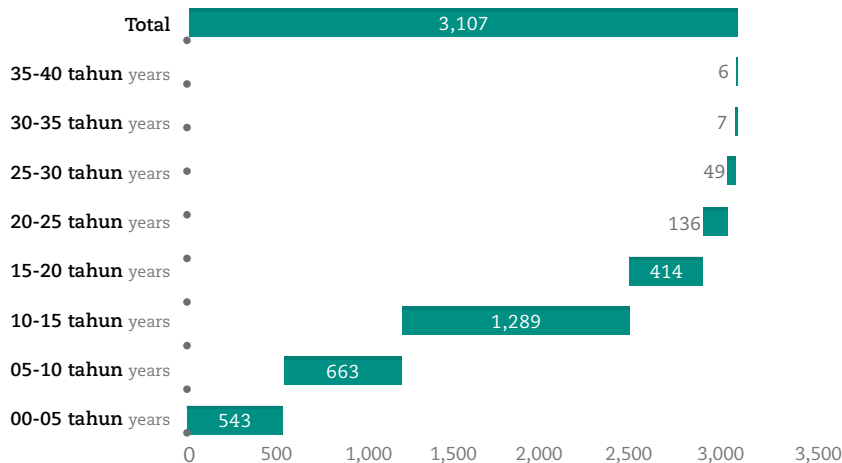
Demografi berdasarkan Tingkat Pekerjaan Pekerja

Demographics by Employee Job Level



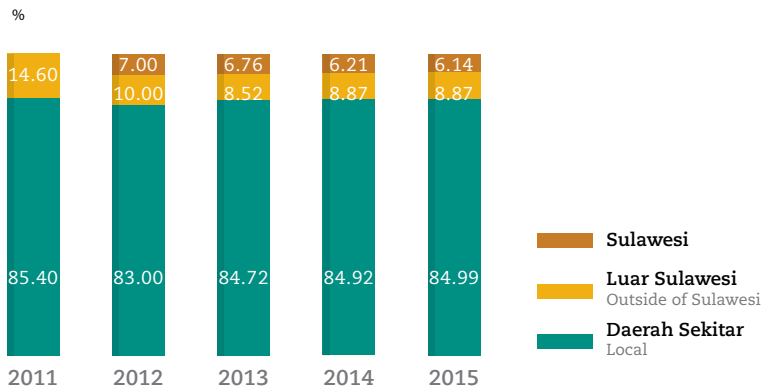
Jumlah Pekerja berdasarkan Masa Kerja

Number of Employees based on Years of Service



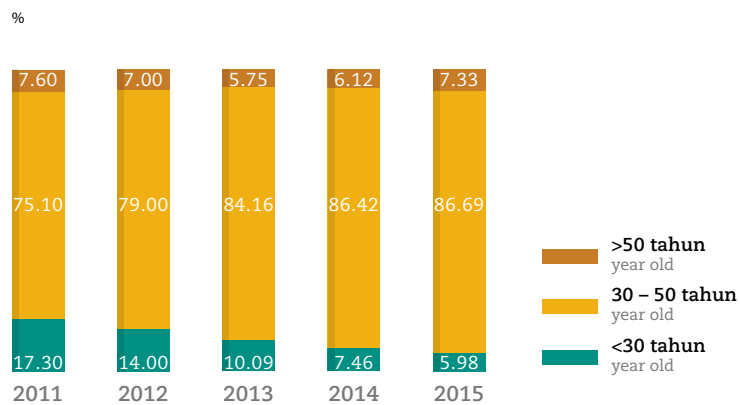
Demografi berdasarkan Tempat Penerimaan Pekerja

Demographics by Point of Hire



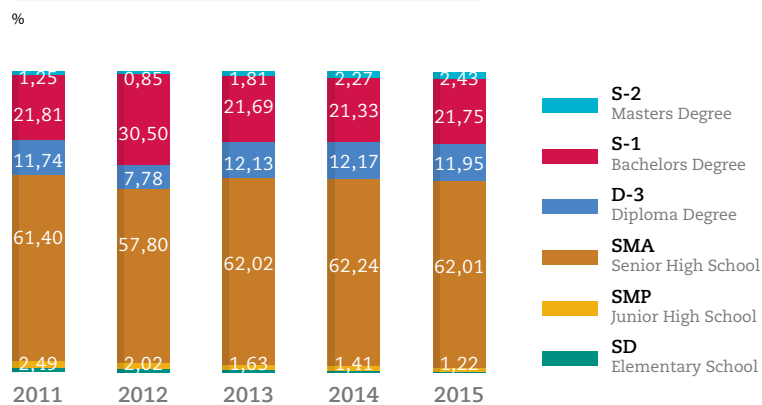
Demografi berdasarkan Usia Pekerja

Demographics by Age



Demografi berdasarkan Tingkat Pendidikan

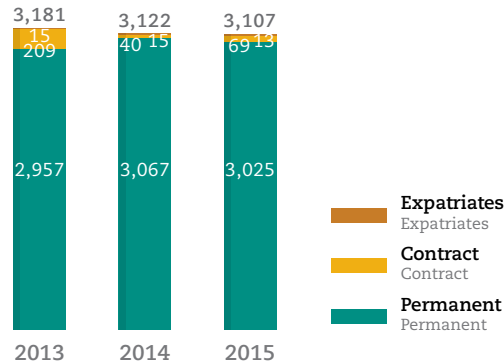
Demographics by Education Level



Sumber Daya Manusia

Human Resources

Demografi berdasarkan Status Kepegawaian Demographics by Employment Status



REKRUTMEN

Proses penerimaan tenaga kerja di PT Vale didasarkan pada perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang telah disetujui oleh Direksi. Setiap kebutuhan yang ada didiskusikan bersama antara departemen terkait dengan Departemen SDM.

Ada beberapa tahapan yang dilalui untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja. Tahapan-tahapan tersebut mencerminkan prinsip yang dianut oleh Perseroan dalam memberikan peluang terkait dengan penerimaan tenaga kerja tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras dan agama.

Untuk jabatan manajerial, Perseroan akan selalu mengacu kepada rencana suksesi yang disusun dua tahunan. Apabila ada kebutuhan kandidat suksesor untuk posisi yang telah ditetapkan dalam rencana suksesi, maka Perseroan akan mengacu pada daftar kandidat suksesor dan melakukan seleksi internal.

Jika tidak ada kandidat suksesor yang siap maka departemen SDM akan membuka peluang secara terbuka kepada para pekerja dengan persyaratan yang sesuai kebutuhan.

RECRUITMENT

The recruitment process at PT Vale is based on workforce planning needs approved by the Board of Directors. Each existing need is discussed by the respective department with the HR department.

There are several stages that must be passed in order to fulfill the need. These stages reflect the principles adopted by the Company to provide recruitment opportunities with no discrimination as to gender, race or religion.

For managerial positions, the Company refers to the succession plan drawn up bi-annually. If there is a need for a successor candidate for a position that is registered in the plan, the Company will refer to the list of successor candidates and conducts internal selections.

If there are no successor candidates identified, the HR department will open up opportunities to employees who meet the qualifications.

Untuk posisi yang termasuk dalam kategori teknikal profesional, posisi yang kosong akan diisi berdasarkan evaluasi kompetensi untuk mengetahui apakah kandidat yang ada telah memenuhi kompetensi teknikal yang ditetapkan.

For positions in the category of technical professionals, vacant positions are filled based on a competency evaluation to determine whether a candidate meets the specified level of technical competence.

Peluang akan dibuka untuk kandidat dari luar Perseroan apabila tidak didapatkan kandidat internal yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Perseroan akan memberikan peluang kepada kandidat di sekitar area operasi Perseroan dan regional Sulawesi sebelum membuka peluang secara umum atau nasional. Hal ini membuktikan komitmen Perseroan terhadap penyerapan tenaga kerja dari sekitar wilayah operasional Perseroan

Opportunities are opened to candidates outside the Company if internal candidates do not meet qualification requirements. The Company provides opportunities for candidates around the area of the Company's operations and the Sulawesi region first before opening them to the general public. This matter supports the Company's commitment to promoting employment around the Company's operational areas.

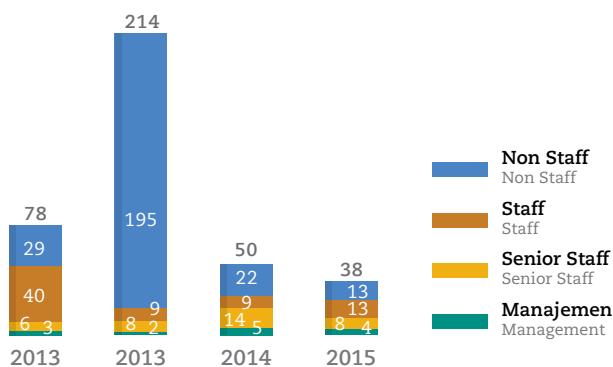
Untuk jabatan operator atau pekerja lapangan lainnya, Perseroan sepenuhnya menerima pekerja dari wilayah pemberdayaan Perseroan dan Kabupaten Luwu Timur. Komitmen ini telah diselaraskan dengan kriteria penerimaan PPI dan juga ATS sehingga para pemuda dari wilayah pemberdayaan bisa dididik terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja.

For operator or other field employee position, the Company fully accepts employees from the Company's area of empowerment and East Luwu Regency. This commitment is aligned with the PPI and ATS acceptance criteria so that youth from the area of empowerment can be educated before entering the workforce.

Pada tahun 2015 Perseroan telah mengisi 38 posisi kosong melalui seleksi internal maupun penerimaan tenaga kerja eksternal. Grafik di bawah ini menunjukkan proporsi penerimaan tenaga kerja melalui seleksi internal dan penerimaan tenaga kerja eksternal.

In 2015, the Company filled 38 vacant positions through a selection of internal and external recruitment. The graph below indicates the proportion of recruitment through a selection of internal and external recruitment.

Rekrutmen berdasarkan Jenjang Jabatan Recruitment by Job Level



Sumber Daya Manusia

Human Resources

PENGLOLAAN KINERJA

Kinerja pekerja yang tinggi dan sesuai target merupakan salah satu kunci keberhasilan perseroan dalam mencapai sasarannya. PT Vale Indonesia mendorong terciptanya iklim kinerja tinggi di antara pekerja. Hal ini dituangkan dalam strategi dan kebijakan penilaian kinerja dan juga kebijakan remunerasi. Setiap pekerja memiliki kartu penilaian (*scorecard*) tahunan dengan target yang ditetapkan di awal tahun dan diturunkan dari atasan masing-masing. Secara kolektif, target-target tersebut merepresentasikan tujuan yang akan dicapai Perseroan. Target-target yang diberikan kepada pekerja meliputi produksi, keselamatan kerja, biaya, manajemen risiko serta inisiatif-inisiatif departemen.

Selain hal-hal tersebut, ada satu aspek penilaian yang ditetapkan khususnya untuk pekerja yang menduduki posisi manajerial yaitu aspek perilaku. Meskipun tidak bisa diukur secara kuantitatif, kualitas perilaku para pekerja tersebut sangat penting dalam menciptakan iklim bekerja yang baik di Perseroan. Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, kemampuan untuk bekerja sama dengan bagian lain serta integritas menjadi beberapa hal yang mendasari penilaian perilaku.

Scorecard itu dievaluasi secara reguler oleh atasan untuk melihat perkembangan pencapaian target. Atasan wajib memberikan arahan dan bantuan yang diperlukan sehingga target pekerja bisa tercapai dengan baik. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan sekaligus memastikan bahwa tujuan Perseroan bisa dicapai dengan baik.

Setiap akhir tahun seluruh pekerja berkewajiban mengumpulkan bukti tentang hal-hal yang telah dicapainya sesuai target yang ditetapkan dalam satu tahun untuk mendukung penilaian. Penilaian akan dilakukan oleh atasan dengan terbuka dan berkeadilan. Setelah penilaian selesai akan dilakukan sesi ekuilibrasi di setiap departemen untuk melihat perbedaan

PERFORMANCE MANAGEMENT

Creating high performance employees and on targets are keys to the Company's success in achieving its objectives. PT Vale encourages the establishment of a high-performance culture among its employees. This commitment is stated in performance appraisal and remuneration policies. Employees have an annual performance scorecard with a target set at the beginning of the year, assigned by their respective superiors. Collectively, these targets represent the Company's objectives. The targets given to employees include production, safety, cost, and risk management targets, as well as individual departmental initiatives.

In addition, there is one other aspect of the assessment established specifically for employees who occupy managerial positions – the behavioral aspect. Although it cannot be measured quantitatively, the quality of an employee's behavior is critical to creating a healthy working climate within the Company. The behavioral assessment includes the ability to interact and communicate, ability to cooperate with other departments, and also integrity.

The supervisor monitors the employee's progress toward the target by evaluating the scorecards regularly. Supervisor must provides direction and necessary assistance to help employees achieve the target. This policy encourages good relations between superiors and subordinates while ensuring that the Company's goals can be soundly achieved.

At the end of the year, all employees are obliged to collect verification for the key performance indicators they have achieved according to the targets set throughout the year. This information is used to support the assessment that is carried out transparently and fairly by the supervisor. Once the assessment is completed, equilibration sessions are conducted in each

penilaian yang mungkin terjadi diantara berbagai area kerja. Nilai akhir setiap pekerja akan dikumpulkan oleh departemen SDM dan akan dijadikan acuan utama dalam penentuan besaran insentif kinerja tahunan pekerja.

Setelah sesi penilaian berakhir departemen SDM juga akan melakukan analisis terhadap nilai-nilai yang ada dengan penekanan pada pekerja dengan nilai di bawah target. Bekerja sama dengan atasan dan departemen terkait, pekerja-pekerja dengan kinerja rendah akan mendapatkan pengembangan untuk mengatasi kekurangannya baik dalam hal kompetensi ataupun perilaku.

Gambaran penilaian kinerja pekerja dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Penilaian Kinerja
Performance Appraisals

	2013 – 2014	2014 – 2015	
Di bawah target	0.14%	0.13%	Below target
Memenuhi target	52.94%	53.25%	Meet target
Di atas target	46.88%	46.60%	Above target
Melampaui target	0.03%	0.03%	Exceed target

BUDAYA KERJA

Implementasi penanaman budaya kerja di PT Vale memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku karyawan yang ada agar dapat meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Budaya keselamatan kerja menjadi suatu hal yang tidak terbantahkan di PT Vale dimana keselamatan jiwa menjadi lebih penting dari produksi atau keuntungan materi semata. Pada tahun 2015 Perseroan menggalakkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kepedulian pekerja terhadap keselamatan kerja. Program “*active genuine care*” dan juga “*safety week*” dilaksanakan secara konsisten dan melibatkan pekerja di semua direktorat.

department to assess the gap in the evaluation that may occur between various work areas. The final assessment of each employee is collected by the HR department and used as the main reference for determining the amount of an employee’s annual performance incentives.

After the assessment session has ended, HR analyzes existing values with an emphasis on employees performing below target. Working closely with supervisors and other relevant departments, employees with low performance receive enhanced development to address shortcomings in terms of competence or conduct.

An overview of performance appraisals in the past two years is as follows:

WORK CULTURE

The establishment and implementation of a positive work culture at PT Vale has the objective to change employee’s attitudes and behaviors in order to increase safety and productivity to meet all future challenges.

Safety has become an integral component of the PT Vale culture where the sanctity of life is more important than production or profits. In 2015, the Company promoted a variety of initiatives to raise employee awareness about safety. Programs such as “*active genuine care*” and “*safety week*” were conducted, and employees in all directorates were actively involved.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Di sisi kepemimpinan, Perseroan mengharuskan semua leader untuk mengembangkan "*personal safety action plan*" sebagai bagian dari program "*felt leadership*". Tak terkecuali dengan pekerja kontraktor PT Vale dimana implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor (*Contractor Safety Management System – CSMS*) menjadi fokus yang digalakkan.

Budaya keterbukaan ditanamkan melalui berbagai inisiatif dari *town hall meeting* setiap triwulan antara Direksi dan pekerja sampai pada kebijakan "*open-door*" untuk semua manajer di Perseroan di mana pekerja bisa berbicara dengan atasan mereka setiap saat. Keterbukaan ini juga tercermin dalam implementasi *coaching* dan *mentoring* antara atasan dan bawahan.

Budaya untuk peduli terhadap lingkungan juga dipupuk dan bahkan dijadikan obyektif bersama seluruh pekerja di tahun 2015, seperti halnya juga keselamatan kerja. Hal ini mendorong pekerja untuk turut peduli terhadap upaya-upaya dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Budaya integritas dan patuh hukum adalah salah satu hal terpenting yang digalakkan Perseroan. Tanpa adanya integritas, banyak risiko yang akan muncul dalam operasional perseroan. Perjanjian kerja bersama yang dinegosiasikan setiap dua tahun antara perwakilan manajemen dengan perwakilan pekerja membahas topik konflik kepentingan dan perilaku yang melanggar *code of business conduct*. Dua hal tersebut di uraikan dengan jelas dan tegas.

Budaya kerja sama dan kinerja tinggi juga didorong guna terciptanya iklim kerja yang baik, sinergi antar bagian yang harmonis demi tercapainya tujuan Perseroan. Upaya untuk mendorong dua budaya yang disebutkan terakhir bisa dilihat dalam cara Perseroan menetapkan target kinerja tahunan. Dengan mengaitkan pencapaian target dengan besaran insentif yang akan diterima oleh pekerja, diharapkan pekerja termotivasi untuk memberikan sumbangsih yang optimal terhadap keberhasilan perseroan yang berkelanjutan.

On leadership, the Company requires all leaders to develop a "*personal safety action plan*" as part of its "*felt leadership*" program. This includes contractors of PT Vale, where the implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS) has become a focus.

A culture of openness is fostered through initiatives such as town hall meetings – held every quarter between the Board of Directors and employees – and the "*open-door*" policy adopted by managers in the Company where employees can communicate with their supervisor at any time. This includes the implementation of coaching and mentoring between superiors and subordinates.

A culture of environmental concern is also fostered and was a shared objective for employees in 2015, as was safety. This encourages employees to participate in the efforts and commitment to environmental conservation.

Integrity and compliance to the law are characteristics of workplace culture and are among the most important aspects encouraged by the Company. Without integrity, many risks arise in the Company's operations. Our collective labor agreements, negotiated every two years between the representatives of the Company and the employees, address issues such as conflicts of interest and behaviors that violate the code of business conduct. These are discussed and formulated clearly and firmly.

A culture of cooperation and high performance is encouraged to create a good working environment and a harmonious synergy between departments in order to achieve the Company's objectives. Efforts to encourage these last two can be seen in the way the Company sets its annual performance targets. Linking the achievement of targets to the annual incentive package motivates employees to contribute fully to the sustainable success of the Company.

PT Vale telah mengadopsi 6 nilai-nilai sebagai pilar perilaku budaya kerja yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh pekerja yang dalam penerapannya sebagai berikut:

PT Vale has adopted six values that are embraced as pillars of our work culture. These have become a reference point for all employees. They are as follows:

Nilai-nilai Values	Budaya Kerja Work Culture
Kehidupan adalah hal yang terpenting Life matters most	Budaya Keselamatan Kerja Safety Culture
Menghargai pekerja Value our people	Budaya Keterbukaan dan Saling Menghargai antar Pekerja Culture of Openness and Mutual Respect among Employees
Menjaga kelestarian bumi Prize our planet	Budaya untuk Peduli terhadap Lingkungan Culture of Environmental Concern
Melakukan yang benar Do what is right	Budaya Integritas Perilaku Culture of Integrity
Bersama-sama menjadi lebih baik Improve together	Budaya Kerja Sama Culture of Cooperation
Mewujudkan tujuan Make it happen	Budaya Kinerja Tinggi High Performance Culture

STRATEGI RENUMERASI

PT Vale senantiasa mendorong terciptanya budaya kerja berkinerja tinggi. Oleh karenanya semua proses terkait dengan manajemen sumber daya manusia diselaraskan dengan tujuan tersebut termasuk dalam hal remunerasi.

Strategi remunerasi Perseroan dituangkan dalam beberapa kebijakan yang ditujukan untuk mendorong kinerja yang tinggi di antara para pekerja. Selain untuk memenuhi kompensasi dasar sesuai dengan aturan perundangan, Perseroan mengaitkan kajian remunerasi tahunan dengan kompetensi dan juga kinerja pekerja. Pesan yang ingin disampaikan kepada pekerja sangat jelas, bahwa mereka yang berupaya untuk senantiasa meningkatkan kompetensi serta kinerja akan mendapatkan kenaikan remunerasi yang baik.

Selain memberikan kompensasi yang diatur dalam peraturan perundangan dalam bentuk gaji bulanan, tunjangan hari raya serta kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Perseroan juga memberikan manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang kepada pekerja. Manfaat jangka pendek yang diberikan berupa tunjangan seperti tunjangan biaya hidup, tunjangan pendidikan anak, tunjangan cuti, tunjangan keterpencilan untuk pekerja yang bekerja di Sorowako serta insentif kinerja tahunan.

REMUNERATION STRATEGY

PT Vale continues to encourage the establishment of a high-performance work culture. For this reason, all HR management processes are aligned with that objective, including remuneration.

The Company's remuneration strategy is outlined in policies that are intended to encourage high performance among employees. In addition to meeting the basic compensation requirements in accordance with government rules and regulations, the Company links the annual remuneration assessment to competence and the employee's performance. The message is very clear to all employees so that those who are working to constantly improve their competence and performance will gain a better remuneration.

In addition to providing compensation as regulated by labor law in the form of a monthly salary, religious festive allowance, and membership in the BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan program, the Company also provides short-term benefits and long-term benefits to employees. The short-term benefits are presented in the form of allowances such as cost of living allowance, child education allowance, leave allowance, remoteness allowance for employees who work in Sorowako and annual performance incentives.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Manfaat jangka panjang yang diberikan berupa program dana pensiun dan program *saving plan* pekerja. Selain kompensasi dan manfaat berupa uang, Perseroan juga memberikan manfaat kesehatan kepada pekerja dan keluarganya.

PT Vale melakukan kajian tahunan terhadap keseluruhan remunerasi untuk setiap level pekerja untuk memastikan kesesuaian total remunerasi Perseroan terhadap pasar terutama dengan perseroan yang bergerak di bidang yang sama yaitu pertambangan atau jasa pertambangan. Hal ini ditujukan untuk menjaga daya saing Perseroan di pasar, baik untuk keperluan memikat calon pekerja ataupun untuk mempertahankan pekerja yang ada.

Perseroan juga melakukan kajian terhadap remunerasi individual pekerja setiap tahun. Untuk pekerja non-staff, penentuan besaran kenaikan gaji dan benefit lain dilakukan dalam negosiasi perjanjian kerja bersama antara perwakilan manajemen dan perwakilan pekerja setiap dua tahun. Sedangkan untuk pekerja staff ke atas, penentuan besaran kenaikan gaji dan benefit lain dilakukan secara berkala oleh departemen HR dan persetujuan dari atasan masing-masing pekerja. Dalam setiap kajian kenaikan gaji pekerja, faktor kompetensi dan kinerja menjadi pertimbangan utama. Pekerja yang menunjukkan peningkatan kompetensi yang baik serta mampu menunjukkannya dalam pekerjaan sehari-hari akan mendapatkan kenaikan gaji yang baik pula.

The long-term benefits are presented in the form of pension plans and an employee savings plan. In addition to compensation and monetary benefits, the Company also provides health benefits to employees and their families.

PT Vale conducts an annual review of its overall remuneration package for employees at all levels to measure its suitability and competitiveness to the market, particularly as it compares to companies engaged in the field of mining or mining services. This matter is intended to maintain the Company's competitiveness in the market to attract prospective employees and to retain existing employees.

The Company also conducts an individual employee remuneration review each year. For non-staff employees, salary increases and other benefits are negotiated during collective bargaining sessions between management representatives and employee representatives in every two years. For staff employees and above, determination of salary increases and other benefits are regularly considered by the HR department in consultation with each employee's supervisor. In any review of employee salary increases, competence and performance are the foremost consideration. Employees demonstrating good improvement in their competence and who are able to show it in their daily work will receive a good salary increase.

Jenis Type	Item	Keterangan Description
Kompensasi Dasar Basic Compensation	Gaji Salary	Diberikan bulanan. Dikaji setiap tahun berdasarkan kinerja dan tingkat kompetensi pekerja. Given monthly. Reviewed annually based on employee's performance and the level of competence.
Tunjangan-tunjangan Allowances	Tunjangan biaya hidup Cost of living allowance	Tunjangan ini diberikan kepada pekerja yang tidak tinggal di perumahan Perseroan. Besarannya dikaji dari tahun ke tahun. This allowance is given to employees who do not live in Company housing. The amount is assessed from year-to-year.
	Tunjangan Hari Raya Tunjangan Keterpencilan Religious Festive Allowance Remoteness Allowance	Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar 1,3 kali gaji bulanan. Sementara itu Tunjangan keterpencilan diberikan untuk pekerja yang bekerja di Sorowako dengan besaran 1,5 kali gaji bulanan. Religious Festive Allowance is given 1.3 times the monthly salary. Meanwhile Remoteness Allowance is granted to employees who work in Sorowako in the amount of 1.5 times the monthly salary.
	Tunjangan cuti Leave Allowance	Tunjangan cuti diberikan kepada semua pekerja dengan besaran 1 kali gaji bulanan. Leave benefits are provided to all employees in the amount of 1 time the monthly salary.
Insentif Kinerja Performance Incentives	Annual Incentive Plan (AIP)	Besaran AIP ditentukan oleh pencapaian target yang telah ditetapkan di awal tahun untuk setiap tahun. The amount of AIP is determined by the achievement of targets set at the beginning of the year for each year.
Benefit Jangka Panjang Long-term Benefits	BPJS Ketenagakerjaan	Setiap Pekerja didaftarkan sebagai peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Perseroan membayarkan iuran bulanan sesuai aturan undang-undang. Each employee is registered as a participant in BPJS Ketenagakerjaan program. The Company will pay the monthly fee according to rules and regulations.
	Jaminan Kesehatan Nasional	Setiap Pekerja didaftarkan sebagai peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Perseroan membayarkan iuran bulanan sesuai aturan undang-undang. Each employee is registered as a participant in the BPJS Kesehatan program. The Company will pay the monthly fee according to rules and regulations.
	Dana Pensiun Pension Fund	Setiap pekerja yang memenuhi syarat kepesertaan didaftarkan dalam program dana pensiun iuran pasti. Perseroan membayarkan 10% dari gaji pekerja sebagai iuran bulanan. Each employee is registered in the defined contribution pension fund program. The Company pays 10% of the employee's salary as monthly dues.
	Saving Plan Saving Plan	Setiap pekerja mengikuti program <i>saving plan</i> , dimana pekerja dan Perseroan akan mengiur setiap bulan dan iuran tersebut akan di investasikan dan akan bisa diambil saat pensiun. Dalam program <i>saving plan</i> ini juga ada manfaat jaminan kematian. Each employee participates in the savings plan program, where employees and the Company will contribute each month and the contribution will be invested and will be taken at retirement. Life insurance benefit is also provided by this program.
	Program Matching Matching Program	<i>Program Matching</i> adalah program yang diperuntukkan untuk eksekutif Perseroan dan juga manajer yang memiliki kinerja serta potensi sangat baik. Masing-masing pekerja yang berhak bisa membeli saham induk Perseroan dan dalam waktu tiga tahun jumlah saham tersebut akan digandakan apabila pekerja masih bekerja di Perseroan. Matching Program is a program that is intended for Company executives and managers who have a very good performance and potential. Each employee has the right to buy shares of the parent company and within three years the number of shares will be doubled if the employee is still working at the Company.
	Panthon Share Unit (PSU)	Program PSU adalah program yang diperuntukkan untuk eksekutif Perseroan. PSU program is a program intended for executives of the Company.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perseroan berkomitmen tinggi untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan para pemangku kepentingan termasuk pekerja, Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan Pemerintah. Hubungan industrial yang baik dan kondusif akan menunjang jalannya kegiatan operasional Perseroan. Departemen SDM bekerja sama dengan jajaran manajemen senantiasa mengupayakan suasana kerja yang baik dan harmonis dengan menjaga hubungan antara pekerja dan pekerja, pekerja dan atasan, serta pekerja dan manajemen Perseroan.

INDUSTRIAL RELATIONS

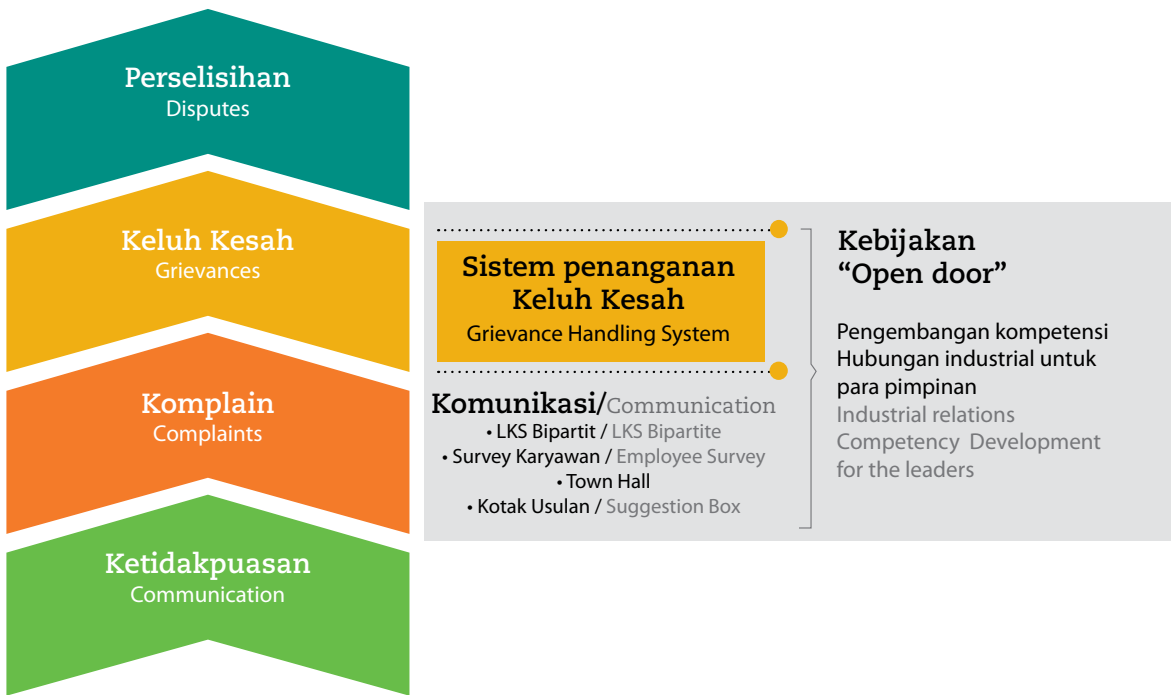
The Company is committed to creating harmonious industrial relations with stakeholders including workers, Trade Unions/Labor Unions and the Government. Sound industrial relations support the activities of the Company's operations. The HR department works closely with management to establish a working atmosphere that is healthy and harmonious by maintaining good relations with employees, between employees and supervisors, and between employees and management.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Perseroan telah menetapkan beberapa mekanisme untuk secara dini mengidentifikasi masalah yang berpotensi muncul dan akan berdampak pada hubungan industrial seperti tergambar pada bagan di bawah ini:

The Company has set up several mechanisms for the early identification of problems that may impact industrial relations as illustrated in the diagram below:



Keluh-kesah karyawan di tahun 2015 menurun menjadi 39 di mana 32 diantaranya (82%) berhasil diselesaikan dengan baik mengikuti mekanisme keluh-kesah yang tertuang dalam Kesepakatan Kerja Bersama (PKB).

In 2015, grievances received from employees declined to 39, 32 of which (82%) were successfully resolved through the existing complaints mechanism in the collective labor agreement (CLA).

Selain itu di PT Vale juga ada Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang beranggotakan perwakilan pekerja dan perwakilan manajemen juga turut berperan aktif dalam membicarakan serta memberikan rekomendasi terkait permasalahan yang dihadapi Perseroan dalam bidang hubungan industrial dan hubungan karyawan. Pada tahun 2015, program kerja LKS Bipartit menitikberatkan pada penyelesaian masalah terkait keselamatan dan kesejahteraan kerja, perbaikan koperasi pekerja, peningkatan fasilitas pekerja dan perbaikan fasilitas perumahan pekerja.

In addition, PT Vale also established The Cooperation Institution (LKS) Bipartite Meeting Forum, containing employee representatives and management representatives, which plays an active role in discussions related to issues faced by the Company and provides recommendations for solutions, where possible, in the field of industrial relations and employee relations. In 2015, the LKS Bipartite discussions focused on problem-solving related to health and safety in the workplace, improving employee cooperatives, increasing employee facilities, and the improvement of employees' housing facilities.

Sesuai mandat UU No. 21 tahun 2000, Perseroan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja. Pada tahun 2015, ada empat Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat di Perseroan: Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SP-KEP), Serikat Pekerja Buruh Indonesia (SPBI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik dengan serikat pekerja yang ada dan memandang mereka sebagai partner untuk mengupayakan terciptanya hubungan industrial yang sehat.

Negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) guna menentukan beberapa aturan dan panduan yang mengikat semua pekerja dilakukan setiap dua tahun sekali. Sampai dengan tahun 2015, telah dilakukan sebanyak 16 kali perundingan dan semuanya berhasil menghasilkan kesepakatan yang baik.

The Company provides the opportunity for employees to organize and form unions according to the mandate of Law No. 21 Year 2000. In 2015, there were four registered trade unions in the Company: the Chemical Energy and Mining Union (SP-KEP), the Indonesian Labor Union (SPBI), the Indonesian Prosperity Labor Union (SBSI) and the All Indonesian Employees Union (SPSI). The Company strives to maintain good relations with the existing unions and sees them as partners in the creation of healthy industrial relations.

Every two years, union and management representatives negotiate collective labor agreements that determine the rules and guidelines binding on all employees. Up to 2015, 16 such sets of negotiations had all concluded successfully and delivered good agreements.

Teknologi Informasi

Information Technology

Keberhasilan peranan teknologi informasi (TI) di PT Vale tidak diukur dari besarnya aset dan investasi TI semata, namun keberhasilan tersebut lebih diukur dari kemampuan solusi teknologi informasi dalam menciptakan nilai tambah bagi Perseroan baik dalam produksi, produktifitas dan efisiensi.

The success of the role of information technology (IT) in PT Vale is not only measured by the size of the IT assets and investments; rather, success is measured by the ability of information technology solutions to create added value for the Company in production, productivity and efficiency.

VISI DAN MISI

Keberhasilan peranan teknologi informasi (TI) di PT Vale tidak diukur dari besarnya aset dan investasi TI semata, namun keberhasilan tersebut lebih diukur dari kemampuan solusi teknologi informasi dalam menciptakan nilai tambah bagi Perseroan baik dalam produksi, produktifitas dan efisiensi.

Visi – Kami (TI) menjadi mitra mengembangkan bisnis Perseroan dalam mencapai potensinya.

Misi – Kami (TI) memungkinkan perusahaan memenuhi tujuannya secara efektif dan efisien dengan menyediakan kepemimpinan dalam penerapan teknologi informasi di dalam Perusahaan; melalui karyawan-karyawan yang cakap untuk memberikan solusi TI yang aman, inovatif, dan dapat diandalkan.

STRATEGI, PENCAPAIAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN TI

Tantangan pada industri komoditas di tahun 2015 adalah memantapkan strategi teknologi informasi untuk dapat memberdayakan Perseroan mencapai agenda-agenda strategis, termasuk aspek kesinambungan dan pertumbuhan, dengan tetap fokus pada penciptaan nilai tambah bagi Perseroan. Strategi TI tersebut disusun dengan menitikberatkan pada empat pilar, yaitu:

VISION AND MISSION

The success of the role of information technology (IT) in PT Vale is not only measured by the size of the IT assets and investments; rather, success is measured by the ability of information technology solutions to create added value for the Company in production, productivity and efficiency.

Visi – We in IT are partners for the business in reaching its potential.

Mission – We in IT enable the business to meet its goals effectively and efficiently by providing leadership in the application of information technology within the Company, through competent people delivering secure, innovative and reliable IT solutions.

IT STRATEGY, ACHIEVEMENT, AND DEVELOPMENT PLAN

The IT challenge within the commodity industry in 2015 was to establish an information technology strategy which enables the Company to achieve strategic agendas, including of sustainability and growth, while still focusing on creating added value to the Company. The IT strategy was prepared by emphasizing four pillars:

99.7%

Tingkat Ketersediaan Jaringan di tahun 2015

Network Availability in 2015

1. Kemitraan dengan bisnis – melalui penyelarasan prioritas bisnis, komunikasi yang jelas, pendekatan yang sederhana dan fokus pada portofolio yang memberikan nilai tambah.
2. Keunggulan dalam proyek – melalui pemanfaatan sistem yang ada, senantiasa mencari penyederhanaan proses dan mempercepat penyelesaian proyek.
3. Efisiensi operasional TI – melalui peningkatan layanan dan penerapan *best-practice* yang diseimbangkan dengan efisiensi biaya dan kestabilan sistem.
4. Inovasi dan arsitektur TI yang handal – melalui peta arah (*roadmap*) infrastruktur TI yang berkelanjutan serta inovasi teknologi yang memberikan nilai bagi bisnis.

Prioritas inisiatif yang berdasarkan pada fondamen strategi TI tersebut di atas telah dilaksanakan pada tahun 2015, antara lain yang berfokus pada aspek peningkatan ketahanan dan stabilitas operasional pada proses bisnis utama, penyelarasan sistem dan alur proses bisnis yang memastikan tercapainya target-target operasional.

Di tahun 2015 PT Vale juga telah berhasil melakukan peningkatan infrastruktur penting teknologi informasi yang memberikan kontribusi signifikan pada penurunan biaya operasional dan juga kepastian kesinambungan operasional.

PT Vale telah menyusun peta arah (*roadmap*) pengembangan TI ke depan dengan tetap berpatokan pada fondasi strategi TI dikombinasikan dengan tren teknologi di pasar dan kebutuhan bisnis yang akan menciptakan peluang baru sebagai berikut:

- Kemampuan analisa pintar (simulasi, optimalisasi, prediksi) untuk mendukung keputusan bisnis yang lebih baik;

1. Partnership with business – alignment of business priorities, clear communication, simple approaches, and pursuing a value-driven agenda
2. Excellence in projects – effective utilization of the existing system, always in pursuit of process simplification, and acceleration of project completion.
3. IT operational efficiency – improvement in services, application of best practices, balancing cost efficiency and system stability.
4. Reliable IT innovation and architecture – sustainable IT infrastructure as well as technological innovations to provide value to the business.

Priority initiatives based on the abovementioned IT strategy were implemented in 2015 by focusing on operational sustainability and stability improvements within the main business process, system alignments, and business process flows that ensure achievement of operational targets.

In 2015, PT Vale also improved its key IT infrastructure, providing a significant contribution to the reduction of operational costs as well as increasing operational sustainability.

PT Vale has prepared its IT development roadmap for the future by conforming with the IT strategy foundation combined with technology trends in the market and business needs, all to create new opportunities as follows:

- Intelligent analysis capability (simulation, optimization, prediction) to accommodate better business decisions;

Teknologi Informasi

Information Technology

- Otomatisasi untuk mengoptimalkan investasi dan meningkatkan nilai;
 - Mengupayakan penyederhanaan proses dengan penggunaan antar-muka yang modern dan solusi mobilitas;
 - Mendorong integrasi yang lebih luas melalui digitalisasi dan *internet of things*;
 - Melaksanakan peta arah TI untuk proyek ekspansi Perseroan.
- Automation to optimize investment and increase value;
 - Foster process simplification through utilization of up-to-date interface and mobility solutions;
 - Encourage greater integration through digitalization and the internet-of-things;
 - Implement the IT roadmap for the Company's expansion project.

PERKEMBANGAN SDM TI

Sumber daya manusia merupakan elemen yang penting dalam strategi teknologi informasi. Diperlukan usaha yang berkesinambungan untuk mendapatkan sumber daya yang kompeten dan selalu relevan dengan tantangan strategi Perseroan, termasuk di antaranya adalah struktur organisasi yang tepat dan juga nilai-nilai yang menekankan pada sikap transformasional yang selalu membangun budaya kerja "untuk selalu menjadi lebih baik" dengan melakukan hal yang benar. Selain itu juga senantiasa mencari solusi dari kondisi yang ada menuju perbaikan, rasa memiliki, peduli pada kesulitan yang dialami pengguna dan rekan kerja dan selalu meningkatkan kemampuan diri.

PT Vale di tahun 2015 telah melakukan pelatihan, pementapan kemampuan dan juga sertifikasi termasuk di antaranya *Financial Risk for Non-Banking*, *Project Management Profesional (PMP)*, *Strategic Initiative and Management Office*, *Problem Solving*, *Roadmap to Managerial Effectiveness* dan juga *Trust and Collaboration*.

Dengan komposisi sumber daya manusia yang ada Perseroan yakin dapat menjawab tantangan di masa depan terutama dengan diperlengkapinya kemampuan inti teknologi informasi dan juga taraf lanjut baik dalam kemampuan teknologi informasi dan juga proses bisnis strategis.

TATA KELOLA TI

Diperlukan tata kelola organisasi TI yang tepat untuk memastikan kesinambungan dan juga perkembangan Perseroan terutama terkait dengan investasi teknologi informasi.

Sejak 2007 organisasi TI PT Vale telah menerapkan tata kelola TI yang didasarkan pada konsep dan

IT HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Human resources is an important element within the information technology strategy. Continuous effort is required to obtain human resources who are competent and always on top of the Company's strategic challenges, including, accurate organizational structure, values that emphasize a transformational attitude, a mindset to build a "to always be better" work culture by doing the right things. In addition, IT HR prioritize exploration of solutions to the existing constraints, a sense of belonging, attention to difficulties experienced by users, and always improving.

In 2015, PT Vale conducted training, ability enhancements, as well as certifications, including *Financial Risk for Non-Banking*, *Project Management Professional (PMP)*, *Strategic Initiative and Management Office*, *Problem Solving*, *Roadmap to Managerial Effectiveness*, and *Trust and Collaboration*.

With the existing human resources composition, the Company is convinced that it will be able to respond to future challenges, especially with the support of the core capabilities of information technology as well as the advanced level in information technology abilities and strategic business processes.

IT GOVERNANCE

An accurate organizational IT governance is required to ensure the sustainability and development of the Company, specifically in regards to information technology investment.

Since 2007, the IT organization of PT Vale has implemented IT governance that is based on the

kerangka kerja yang baku yang sudah diterima secara internasional. Salah satu kerangka kerja yang diadopsi Perseroan adalah COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*).

Selain itu dalam aspek Manajemen Layanan kami menerapkan kerangka kerja *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL).

Di dalam tata kelola organisasi yang tepat, aspek-aspek struktur organisasi, kepemimpinan dan proses-proses dirancang secara menyeluruh untuk memberikan dukungan pada kepastian kesinambungan dan pertumbuhan Perseroan.

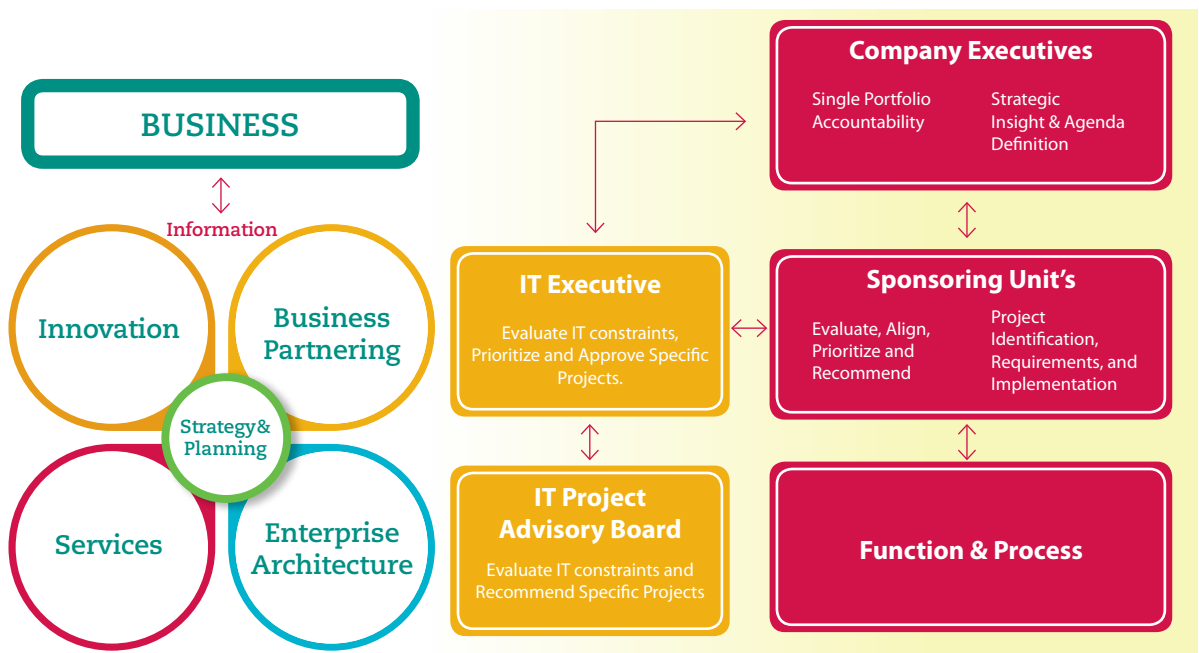
standard and internationally accepted concepts and work frames. One of the work frames adopted by the Company is the COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*).

In addition, in the Services Aspect, we implement the *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) work frame.

In proper organizational governance, organizational structures, leadership, and processes are arranged systematically to create sustainability and growth of the Company.

Organisasi Teknologi Informasi, Kepemimpinan dan Proses

Information Technology Organization, Leadership and Process



PORTOFOLIO INVESTASI TI

Tahun 2015 portofolio investasi TI Perseroan fokus pada lima aspek yaitu peningkatan kinerja bisnis yang dapat memaksimalkan efisiensi operasi, keselamatan kerja, pemenuhan asas kepatuhan (*compliance*), peningkatan layanan korporasi yang lebih terintegrasi dan perlindungan keberlangsungan masa guna aset TI.

IT INVESTMENT PORTFOLIO

In 2015, the IT investment portfolio of the Company focused on five aspects: improvement of business performance in order to maximize operational efficiency, occupational safety, compliance, more integrated corporate services, and protection to IT asset lifetime.

Teknologi Informasi

Information Technology

Berikut ini adalah portofolio investasi TI yang utama:

Efisiensi Operasi dan Keselamatan Kerja

- Pengembangan lebih lanjut sistem informasi manajemen peralatan tambang untuk meningkatkan efisiensi peralatan tambang;
- Implementasi sistem Manajemen Kecelakaan Kerja;
- Penerapan sistem Manajemen Kompetensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- Penguatan dan peremajaan infrastruktur jaringan dan komunikasi di jalur produksi untuk menunjang efektifitas dan aspek keselamatan kerja di area produksi;

Pemenuhan Asas Kepatuhan

- Penerapan Sistem Manajemen Perizinan yang mengatur dan mengelola proses pengurusan semua perizinan Perseroan secara terintegrasi;
- Penggantian teknologi komunikasi radio dari *analog ke digital* sebagaimana tercantum dalam peta arah untuk mematuhi peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Layanan Korporasi

- Penerapan otomatisasi sistem manajemen bahan bakar kendaraan agar pengelolaan proses pengisian bahan bakar kendaraan lebih efektif serta untuk mencegah pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai dengan penggunaannya;
- Penerapan sistem kehadiran karyawan untuk efektifitas pencatatan kehadiran dan kontrol waktu lembur;
- Efisiensi proses pembayaran tagihan Pengadaan Barang dan Jasa melalui peningkatan asas kepatuhan dan akses informasi untuk pengguna;
- Pengembangan sistem informasi yang berbasis swalayan untuk manajemen layanan kepegawaian.

Fondasi TI

- Migrasi SAP *hosting* – efisiensi biaya alih daya dan peningkatan kapasitas pemrosesan SAP;
- Peningkatan kapasitas *server operating system* (OS) dan migrasi ke VALENET – untuk menyederhanakan IT *environment* dan mengantisipasi risiko;
- Peremajaan infrastruktur jaringan utama TI.

The following are the main IT investments portfolio:

Operational Efficiency and Occupational Safety

- Further development of the mining equipment information system to improve the efficiency of mining equipment;
- Implementation of the Accident Management system;
- Implementation of the Health Competence and Occupational Safety system;
- Strengthening and rejuvenation of the network and communication infrastructure in the production line to support effectiveness and occupational safety in production;

Compliance

- Implementation of the Licensing Management System to govern and manage all licensing processes in an integrated manner;
- Substitution of radio communication technology from analog to digital as stated in the roadmap to comply with the regulation of the Ministry of Communication and Information Technology.

Corporate Services

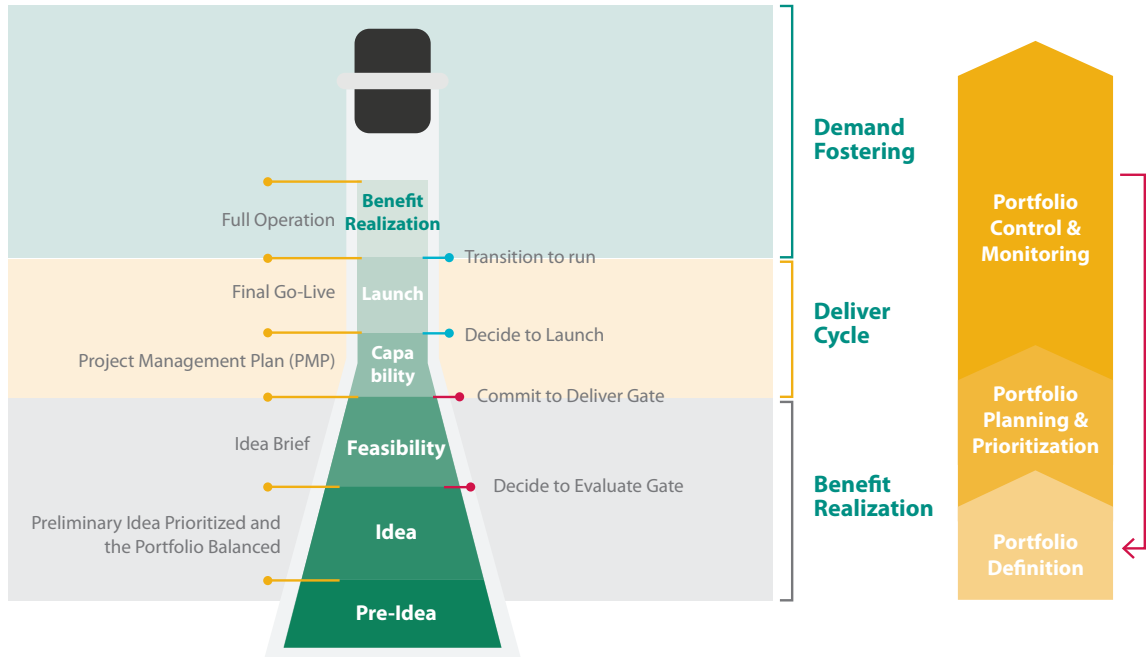
- Application of fuel management system automation so that the management of vehicle refueling is more effective as well as preventing inappropriate use of fuel;
- Implementation of employee attendance system for the effectiveness of attendance recording and overtime control;
- Efficiency of payment processes in the procurement of goods and services through increased compliance and information access for users;
- Development of a self-service based information system for employment service management.

IT Foundation

- SAP hosting migration – reducing the cost of outsourcing and improving the SAP processing capacity;
- OS server upgrade and VALENET migration – to simplify the IT environment and address risks;
- Rejuvenation of the IT main network infrastructure.

Proses Tabung Manajemen Portofolio

Funel Process of Portfolio Management



PELAYANAN DAN JARINGAN

PT Vale sadar bahwa pelayanan dan jaringan adalah kunci efisiensi operasi TI yang pada akhirnya mendukung efisiensi operasi Perseroan dan daya saingnya. Selama tahun 2015 IT melakukan beberapa inisiatif untuk mencapai itu semua.

- a. Upaya Peningkatan Pelayanan
 1. Migrasi infrastruktur aplikasi SAP dengan tujuan peningkatan kapasitas pemrosesan dan penyimpanan data transaksi proses bisnis.
 2. Optimalisasi layanan *Helpdesk* untuk mempercepat waktu respon dan penyelesaian masalah pengguna akhir (*end user*). Dengan upaya yang telah dilakukan di tahun 2015 tersebut waktu yang diperlukan untuk merespon dan menyelesaikan masalah mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah penyelesaian kasus yang sesuai dengan kesepakatan tingkat layanan (*Service Level Agreement – SLA*).

NETWORKS AND SERVICES

PT Vale is aware that networks and services are keys for IT operational efficiency to ultimately support operational efficiency and Company competitiveness. During 2015, IT carried out several initiatives to achieve this.

- a. Service Improvement Efforts
 1. Migration of SAP application infrastructure to increase business data processing capacity and storage.
 2. Helpdesk services optimization to speed up problem response and settlement time for the end user. Through this effort carried out in 2015, the time required to respond to and resolve problems has been reduced. This is demonstrated by the increasing number of completion cases in accordance with the SLA (*service level agreements*).

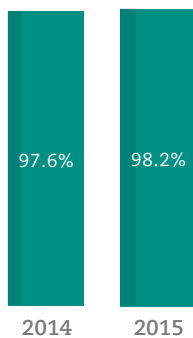
Teknologi Informasi

Information Technology

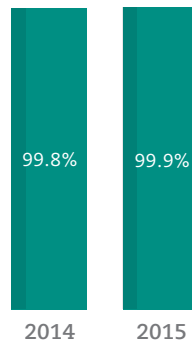
3. Penerapan *auto-dial routing* yang menyederhanakan proses panggilan suara bagi pengguna, serta memastikan jalur panggilan dilakukan dengan biaya yang paling efisien.

3. Implementation of *auto-dial routing* which simplifies voice call processes for the user, as well as ensures the call line is carried out with the most efficient cost.

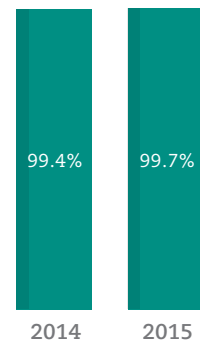
Tingkat Penyelesaian Permintaan Layanan dan Kasus TI yang Sesuai SLA IT Request and Incident Solved that Meet the SLA



Ketersediaan Sistem Aplikasi yang Penting Critical Application System Availability



Tingkat Ketersediaan Jaringan Network Availability



- b. Upaya Peningkatan Jaringan
 1. Peremajaan prasarana jaringan baik pada jaringan bisnis maupun produksi untuk meningkatkan stabilitas konektivitas jaringan.
 2. Menambah keberagaman jaringan untuk meningkatkan ketersediaan dan kinerja jaringan.
Dengan dua inisiatif di atas yang maka di tahun 2015 ketersediaan (*availability*) konektivitas di area produksi, *business offices* dan antar situs tetap terjaga bahkan meningkat hingga melampaui SLA yang disepakati.
 3. Mengembangkan cakupan konektivitas jaringan ke lokasi-lokasi sekunder yang terpencil.

- b. Network Improvement Effort
 1. Rejuvenation of the network infrastructure, both in the business and production network to enhance the stability of the network connectivity.
 2. Increase network diversity to improve network availability and performance.
Through the above initiatives, in 2015, the availability of connectivity in the production areas, business offices, and between sites has been maintained, even improved, exceeding the agreed SLA.
 3. Develop network connectivity coverage to remote and secondary sites.

Dengan upaya ini maka layanan komunikasi visual, suara dan data di area-area operasional Perseroan yang terpencil dan kecil sudah terintegrasi. Selain itu kinerja komunikasi radio di area tambang dan pabrik juga mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan berkurangnya gangguan intervensi frekuensi radio.

Through these efforts, the visual, voice and data communication services in Company's small and remote operational areas have been integrated. In addition, the performance of radio communication in the mining and process plant areas has also improved. This is noted with the reduction in radio frequency intervention interferences.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Daftar Isi Contents

Pernyataan Tata Kelola Perusahaan Statement of Corporate Governance	216	Sistem Whistleblower Whistleblower System	226
Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Assessment	217	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	227
Langkah-Langkah Perbaikan menuju Praktik Terbaik dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Actions Towards the Best GCG Practices	218	Tata Cara Pembayaran Dividen Dividend Payment Procedures	234
Dasar Pelaksanaan Kebijakan bagi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Policy Implementation Basis for Good Corporate Governance	221	Dewan Komisaris Board of Commissioners	236
Kebijakan Tata Kelola Governance Policy	223	Komisaris Independen Independent Commissioners	247
Nilai-Nilai Perusahaan Corporate Values	224	Penilaian Terhadap Dewan Komisaris Evaluation of the Board of Commissioners	249
Kode Etika dan Perilaku Code of Ethics and Conducts	225	Komite Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Committee	249
		Komite Audit Audit Committee	254



Ruang panel listrik
Electricity panel room

Direksi	260	Akses terhadap Informasi dan Data Perseroan	300
Board of Directors		Access to the Company's Information and Data	
Penilaian terhadap Direksi	272	Kode Etik dan Perilaku	303
Assessment of the Board of Directors		Code of Ethics and Conduct	
Sekretaris Perusahaan	274	Sistem Whistleblower	305
Corporate Secretary		The Whistleblower System	
Internal Audit	281	Laporan Komite Audit	324
Internal Audit		Audit Committee Report	
Akuntan Publik Independen	287		
Independent Public Accountants			
Sistem Pengendalian Internal	287		
Internal Control System			
Manajemen Risiko	291		
Risk Management			
Perkara Penting	299		
Important Case			

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance (GCG)

PT Vale memiliki komitmen untuk senantiasa menerapkan standar tata kelola perusahaan yang terbaik.

PT Vale is committed to continuously implementing the highest standards in corporate governance.

PERNYATAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT Vale tunduk pada berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yaitu UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Operasional Perseroan juga tunduk pada Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana terakhir kali amandemennya ditandatangani pada bulan Oktober 2014. Sebagai perusahaan publik, PT Vale juga harus mematuhi peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan mengadopsi berbagai standar maupun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, seperti ASEAN Corporate Governance Scorecard dari ASEAN *Capital Market Forum*, Bank Dunia, dan Prinsip Tata Kelola dari *Organisation for Economic Co-Operation and Development* ("OECD") dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 ("Pedoman Umum GCG Indonesia"). Dari waktu ke waktu, termasuk akhir-akhir ini, peraturan-peraturan OJK secara khusus mengadopsi prinsip-prinsip berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* sebagai ketentuan yang berlaku bagi perusahaan publik di Indonesia.

STATEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE

PT Vale is subject to various regulations relevant to corporate governance, including Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market, Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal, as well as other relevant laws and regulations. The Company's operations are also subject to the Contract of Work with the Government of the Republic of Indonesia as most recently amended in October 2014. As a public company, PT Vale is also subject to the Indonesian Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (BEI) regulations.

The Company adopts various standards and principles of good corporate governance, such as the ASEAN Corporate Governance scorecard of the ASEAN Capital Market Forum, World Bank and Organisation for Economic Co-Operation and Development ("OECD") Principles of Corporate Governance, and the Code of Good Corporate Governance as defined by the National Committee on Governance Policies (KNKG) in 2006 ("Indonesian GCG Code"). From time to time, including recently, OJK regulations specifically adopt principles under the ASEAN Corporate Governance Scorecard as requirements for Indonesian public companies.

Selain itu, sebagai anak perusahaan dari Vale Canada Limited, yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan oleh Vale S.A. (sebuah perusahaan tambang terkemuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil dan telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di New York Stock Exchange), PT Vale juga harus mengadopsi berbagai aturan dan norma yang berlaku di Grup Vale Global yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa tambahan ketentuan dan norma-norma diantaranya adalah Kebijakan Anti-Korupsi, Kode Etik dan Perilaku, Norma (Kebijakan) Pengadaan dan Sistem *Whistleblower*.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tercermin dalam Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan, Piagam Komite Audit, Piagam Internal Audit, Piagam Sekretaris Perusahaan dan berbagai kebijakan dan prosedur internal.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan menyadari bahwa masih akan terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan untuk mencapai praktik tata kelola perusahaan yang terbaik. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan dan Direksi berinisiatif untuk melakukan kajian atas praktik tata kelola perusahaan di Perseroan dengan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) mengenai praktik tata kelola perusahaan tahun 2015. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan standar referensi peraturan OJK dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*. Sebagai kelanjutan dari kajian tersebut, akan dihasilkan rekomendasi yang dihasilkan untuk penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan terbaik yang akan disampaikan kepada Komite Tata Kelola Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris untuk dilaksanakan dalam tahun 2016.

Beberapa hal yang telah diidentifikasi untuk perbaikan dan pelaksanaannya telah dilakukan pada tahun 2015, termasuk diantaranya, membuka saluran *whistleblower* (termasuk memberikan berbagai pilihan akses dan metode untuk melakukan pelaporan melalui saluran *whistleblower*, dimana pelaporan kini dapat dilakukan melalui nomor telephone bebas pulsa,

In addition, as a subsidiary of Vale Canada Limited, which is a wholly owned subsidiary of Vale S.A. (a leading mining company incorporated under the laws of the Federal Republic of Brazil and a public Company listed on the New York Stock Exchange), PT Vale has adopted rules and norms introduced by the Vale Global Group which further enhance principles of good corporate governance. Such additional rules and norms relate to, among others, Anti-Corruption Policy, the Code of Ethics and Conduct, Procurement Norms and the Whistleblower System.

Good corporate governance principles are reflected in the Company's Charter of the Board of Commissioners, Charter of the Board of Directors, Charter of the Corporate Governance Committee, Charter of the Audit Committee, Charter of the Internal Audit unit, Charter of Corporate Secretary as well as various internal policies and procedures.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

The Company recognizes that there will always be areas for improvement to achieve best corporate governance practices. In this regard, the Corporate Secretary and the Board of Directors initiated a review of the Company's corporate governance practices by conducting a self assessment reviews in 2015 regarding corporate governance practices. The review was performed by benchmarking against the OJK Regulations and ASEAN Corporate Governance Scorecard. Following the review, recommendations for continued excellence in best corporate governance practices will be put forth to the Corporate Governance Committee, Board of Directors and Board of Commissioners for implementation in 2016.

Among the areas identified for improvements and for which actions, were implemented in 2015 include the institution of a whistleblower channel including the provision of a variety of access and methods for reporting via the whistleblower channel - whereby reporting can now be performed by way of toll-free telephone number, email, fax, PO BOX mailing address

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

alamat email, faksimili, alamat surat kotak pos dan laman). Selanjutnya, perubahan terhadap Anggaran Dasar, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Komite Tata Kelola dan Piagam Sekretaris Perusahaan – telah diajukan dan disetujui dalam rangka penyesuaian dengan serangkaian peraturan OJK yang terbit pada bulan Desember 2014. Perseroan juga telah meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik melalui pembentukan Unit Manajemen Risiko, Unit Pengendalian Internal, perekrutan *Compliance Officer*, pembuatan dan penandatanganan Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan bagi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembuatan Program Induksi yang lebih terstruktur bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang baru ditunjuk Program Induksi.

Perbaikan-perbaikan yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2016 antara lain meliputi, penerapan skala penuh dari sistem dan prosedur *Whistleblower*, menformalkan prosedur penanganan konflik kepentingan, dan implementasi piagam-piagam secara penuh.

Sebagai ringkasan, di bawah ini adalah langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2015 sehubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

and website other area include various. Further, amendments to the Company's Articles of Associations, the Charter of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Good Corporate Governance and the Corporate Secretary were proposed and accepted – amendments were made to conform with a series of the OJK Regulations issued in December 2014. The Company also enhanced its good corporate governance practices through the establishment of a Risk Management Unit, an Internal Control Unit, the recruitment of a Compliance Officer, the issuance and execution of a Conflict of Interest Declaration Form for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the issuance of an Induction Protocol for newly appointed Board of Directors and Commissioners ("Induction Protocol").

The improvements that are targeted to be completed in 2016 include, among others, include the full-scale implementation of the systems and procedures of the Whistleblower, formalizing procedures for handling conflicts of interest and full implementation of the charters.

As a summary, the below table reflects the improvement measures instituted in 2015 in respect of corporate governance.

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN MENUJU PRAKTIK TERBAIK DARI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

ACTIONS TOWARDS THE BEST GCG PRACTICES

No.	Deskripsi Descriptions	Langkah-langkah yang telah dilakukan Steps that have been taken
1.	Indikator Kinerja Utama bagi Direksi dan Dewan Komisaris Key Performance Indicators for the Board of Directors and Board of Commissioners	Pada Tahun 2015 Perseroan telah memformalkan indikasi kinerja yang sebelumnya telah ada. Perseroan akan melakukan evaluasi tahunan terhadap parameter Indikator Kinerja Utama dan memberikan kriteria yang jelas untuk memudahkan Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengukur kinerja melalui <i>self assessment</i> dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama tersebut. In 2015, the Company formalized existing performance indicators. The Company will conduct annual evaluations of the parameters to review the Key Performance Indicators and set clear criteria to measure the Board of Directors' and the Board of Commissioners' performance through self-assessment.
2	Ketiadaan Komisaris Independen dengan latar belakang keuangan Independent Commissioners with Financial Background	Perseroan menyadari ketiadaan komisaris independen dengan latar belakang formal di bidang keuangan dalam komposisi saat ini, namun demikian, anggota independen dari Dewan Komisaris memiliki berbagai keahlian, termasuk berbagai faktor, seperti latar belakang di bidang industri, tata kelola, hukum dan memiliki pemahaman terhadap isu-isu lokal. Selain itu, kinerja dari Komisaris Independen sebagai bagian dari Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite Audit, yang mana anggotanya merupakan ahli-ahli keuangan. Kami akan mempertimbangkan latar belakang keuangan dalam seleksi anggota independen dari Dewan Komisaris berikutnya. The current independent members of the Board of Commissioners possess a range of other expertise (including, for example, background in the industry extractive, corporate governance, legal and understanding local issues). In addition, the performance of the Independent Commissioner as part of the Board of Directors member is assisted with the Audit Committee whose members are experts in finance. The Company will continue to consider financial background as an appointment factor in the future independent member selection to the Board of Commissioners.



Investor Summit and Capital Market Expo 2015

No.	Deskripsi Descriptions	Langkah-langkah yang telah dilakukan Steps that have been taken
3.	<p>Program induksi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru ditunjuk.</p> <p>Induction program for newly appointed members to the Board of Directors and Board of Commissioners.</p>	<p>Perseroan telah membuat program induksi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru ditunjuk berisi tentang paket informasi yang akan diberikan untuk membantu proses transisi terhadap peranan yang diembannya. Dalam program induksi juga telah diatur mengenai program induksi berupa pengenalan budaya lokal dan bahasa Indonesia untuk Direktur dan Komisaris asing, peninjauan lapangan dan pertemuan khusus dengan manajemen utama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bisnis dan operasi Perseroan. Perseroan akan melakukan evaluasi untuk terus meningkatkan program induksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris menyesuaikan pada kebutuhan Perseroan dari waktu ke waktu.</p> <p>The Company has established an Induction Protocol for newly appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors which contains the information package that will be provided to assist in transitioning to role. The Induction Protocol also provides guidance for introduction of local and Indonesian culture to foreign Directors and Commissioners, site visit and a special meeting with key management to gain a better understanding of the business and operations of the Company. The Company will conduct an annual evaluation to continuously improve the Induction Program to ensure the program is adjusted to reflect the Company's needs from time to time.</p>
4.	<p>Pembentukan Unit Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal</p> <p>Formalized Risk Management Unit and Internal Control Unit</p>	<p>Perseroan secara resmi telah membentuk Unit Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal pada tahun 2015. Unit Manajemen Risiko merupakan perwakilan dari anggota Direksi yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi proses manajemen risiko mencakup penilaian risiko, menyiapkan rencana mitigasi risiko, memonitor pelaksanaan rencana mitigasi, mengevaluasi proses manajemen risiko serta membuat laporan kepada Direksi dan Komite Audit terkait dengan perihal manajemen risiko. Unit Pengendalian Internal bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan kepastian yang memadai kepada Direksi sehubungan dengan pencapaian tiga tujuan berikut ini: (i) efektivitas dan efisiensi operasi; (ii) keandalan pelaporan keuangan; dan (iii) kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>The Company formally established a Risk Management Unit and Internal Control Unit in 2015. The Risk Management Unit represents members of the Board of Directors who are responsible for facilitating the risk management process, (which includes risk assessment, preparation of a risk mitigation plan, monitoring the implementation of the mitigation plan, evaluating the risk management process and reporting to the Board of Directors and Audit Committee). The Internal Control Unit is in charge and responsible to provide the Board of Directors reasonable assurance of achieving the following three objectives: (i) effectiveness and efficiency of operations; (ii) reliability of financial reporting; and (iii) compliance with applicable laws and regulations.</p>
5.	<p>Laporan Tahunan Sekretaris Perusahaan</p> <p>Corporate Secretary Annual Report</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Sekretaris Perusahaan yang mencerminkan ketentuan dalam peraturan OJK yang terkait, Sekretaris Perusahaan telah membuat Laporan Tahunan untuk melaporkan tugas dan tanggungjawab selaku sekretaris perusahaan perseroan terbuka serta informasi terkait kegiatan dan peningkatan yang telah dilakukan dalam hal tata kelola perusahaan. Laporan Tahunan Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi Perseroan.</p> <p>In accordance with the Corporate Secretary Charter, which reflects OJK regulation requirements, the Secretary of the Company has prepared the Annual Report in compliance with the reporting duties and responsibilities as Secretary of a publicly listed company. The Secretary has further ensured that information related to governance activities and improvements have been referenced in accordance with good corporate governance practices. The Corporate Secretary's report was submitted to the Board of Directors of the Company.</p>

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

No.	Deskripsi Descriptions	Langkah-langkah yang telah dilakukan Steps that have been taken
6	<p>Perubahan terhadap Anggaran Dasar, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Komite Tata Kelola dan Piagam Sekretaris Perusahaan sesuai dengan serangkaian peraturan OJK yang terkait dengan tata kelola perusahaan.</p> <p>Amendments to the Company's Articles of Associations, Board of Commissioners Charter, Board of Directors Charter, Corporate Governance Committee and Corporate Secretary Charter, in accordance with the latest OJK Regulations.</p>	<p>Perseroan telah melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Komite Tata Kelola dan Piagam Sekretaris Perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap serangkaian peraturan OJK yang diterbitkan pada bulan Desember 2014.</p> <p>The Company has made amendments to the Company's Articles of Association, Board of Commissioners Charter, Board of Directors Charter, Corporate Governance Committee Charter and Corporate Secretary Charter in compliance with OJK Regulations issued in December 2014.</p>
7	<p>Deklarasi Konflik Kepentingan</p> <p>Conflict of Interest Declaration</p>	<p>Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah mengisi dan menandatangani Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan, dimana melalui formulir tersebut masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendeklarasikan tidak terdapatnya konflik kepentingan dan memberikan komitmen untuk mendeklarasikan informasi yang memiliki potensi konflik kepentingan (jika ada) sehubungan dengan jabatan mereka sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di Perusahaan.</p> <p>The Board of Directors and Board of Commissioners have signed the Conflict Declaration Form, wherein each member of the Board of Directors and Board of Commissioners declares no conflict of interest and confirms commitment to declare information related to potential conflict of interest (if any) relevant to his/her position as member of the Board of Directors or Board of Commissioners in the Company.</p>
8	<p>Perekrutan <i>Compliance Officer</i></p> <p>Appointment of Compliance Officer</p>	<p>Perseroan merekrut dan menunjuk secara khusus <i>Compliance Officer</i> yang sudah berpengalaman untuk menangani perihal kepatuhan sehubungan dengan Kode Etik dan Perilaku dan pelaksanaannya.</p> <p>In 2015, the Company engaged an experienced Compliance Officer to attend to all matters related to the Code of Ethics and Conduct.</p>

Komitmen kami untuk perbaikan telah diakui sepanjang tahun 2015 sebagaimana dibuktikan dengan diterimanya berbagai penghargaan dan diuraikan lebih lanjut di bagian Penghargaan Laporan Tahunan ini. Dalam kesempatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sehubungan dengan ajang Annual Report Award 2014. Laporan Tahunan 2014 PT Vale memperoleh peringkat ke 4 dari 76 peserta untuk kategori *Private Non-Keuangan Listed Companies*. Penghargaan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami sebagaimana hal tersebut membuktikan komitmen Perseroan untuk senantiasa melakukan perbaikan guna mencapai tata kelola perusahaan terbaik. Laporan Tahunan 2013 Perseroan meraih peringkat 15 dari 75 peserta. Kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam proses tata kelola perusahaan kami.

Perseroan meyakini bahwa praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik:

- merupakan landasan ekonomi pasar yang penting untuk memperkuat dan meningkatkan kepercayaan para investor;
- akan mendorong persaingan yang sehat dan kondisi bisnis yang kondusif, sehingga pertumbuhan dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai;

Our commitment to improvements has been recognized throughout 2015, as demonstrated by the awards received and as detailed in the Awards section of this Annual Report. We take the opportunity here to share our pride in respect of the 2014 Annual Report Award event. PT Vale's 2014 Annual Report ranked 4 out of 76 participants in the Private Non-Financial Listed Companies category. We are proud of this recognition as it demonstrates the Company's commitment to continuous improvement in best corporate governance. The Company's 2013 Annual Report ranked 15 out of 75 participants. We remain committed to improve the quality of our corporate governance processes.

The Company believes that good corporate governance practices:

- are an important foundation of the market economy which strengthens and improves the confidence of investors;
- will encourage healthy competition and favorable business conditions, enabling the achievement of sustainable economic growth and stability;

- juga merupakan cara untuk memenuhi komitmen Perseroan terhadap para pemangku kepentingan, selain sangat penting bagi kesinambungan kegiatan operasional kami;
- akan mendukung pencapaian pertumbuhan dan hasil yang maksimal, yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan Perseroan dan akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya;
- akan mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pemangku kepentingan Perseroan;
- akan mendukung pengendalian internal dan pengelolaan sumber daya;
- akan meningkatkan pertanggungjawaban Perseroan kepada pemangku kepentingan;
- akan memperbaiki etos kerja dan meningkatkan kinerja, serta memberikan nilai tambah bagi Perseroan;
- akan meningkatkan kesejahteraan seluruh personil PT Vale sekaligus meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan Perseroan.

Keberadaan kebijakan serta praktik tata kelola perusahaan mendukung komitmen kami untuk melakukan hal yang benar, dengan memberikan kerangka bagi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, integritas dan kewajaran (TARIF) dalam seluruh kegiatan kami.

DASAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN BAGI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi berperan penting dalam pelaksanaan yang efektif atas tata kelola perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perusahaan terdiri dari tiga organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan organ Perseroan dengan wewenang tertinggi dan berperan dalam membantu para pemegang saham dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang terkait dengan investasi mereka di PT Vale. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, semua

- is also the way to fulfill the Company's commitment to its stakeholders, as well as being essential for the sustainability of our operations;
- will support maximum growth and achievement, which in turn will increase the Company's well-being and provide long term benefits to the shareholders without ignoring the interests of other stakeholders;
- will control and direct the relationships between the shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all stakeholders of the Company;
- will support the internal control and resource management divisions;
- will improve the Company's accountability to stakeholders;
- will improve the Company's working culture and performance as well as provide added value to the Company;
- will improve the welfare of all PT Vale personnel and increased benefits to the Company's stakeholders.

The existence of policies and practices of corporate governance will support our commitment to do what is right by providing a framework for implementing the principles of good corporate governance: transparency, accountability, responsibility, integrity and fairness (TARIF) in all areas of our business.

POLICY IMPLEMENTATION BASIS FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company's shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors all play an important role in implementing effective corporate governance. According to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the corporate governance structure consists of three organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The GMS is the organ of the Company with the highest authority given its role as a forum for shareholders to make important decisions related to their investment in PT Vale. As set out in the Articles of Association of the Company, as well as laws and regulations, important decisions shall be made in

Tata Kelola Perusahaan

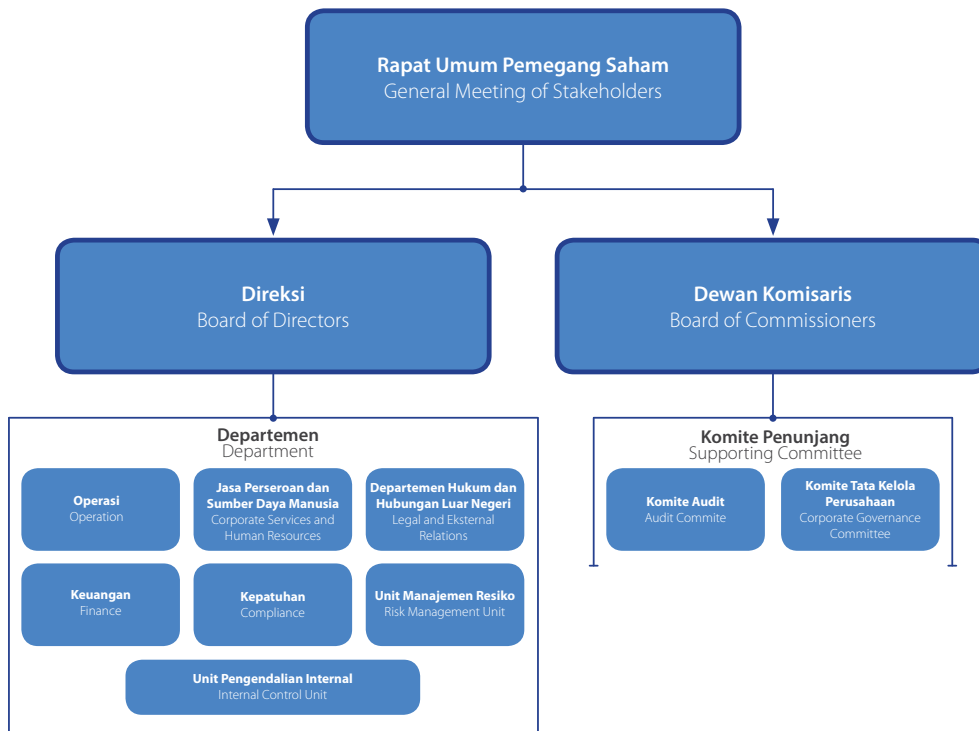
Good Corporate Governance

keputusan penting dilakukan di dalam RUPS, termasuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite pendukungnya sedangkan Direksi didukung oleh departemen internal Perseroan, termasuk didalamnya Unit Manajemen Risiko, Unit Pengendalian Internal dan Petugas Kepatuhan Compliance Officer. Semuanya diberi tugas untuk mengawasi internal organisasi Perseroan guna menjalankan komitmen untuk mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif dan efisien serta ketentuan-ketentuan mengenai manajemen risiko. Hal ini dilakukan agar Dewan Komisaris dan Direksi dapat memastikan bahwa Perseroan dikelola sesuai standar integritas tertinggi. Oleh karena itu, kami dapat memaksimalkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham sekaligus memberikan manfaat dan kesejahteraan yang berkesinambungan bagi masyarakat di daerah tempat kami beroperasi, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

the GMS, including the appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

The Board of Commissioners is assisted by supporting committees and the Board of Directors is supported by the Company's internal departments (including, the Risk Management Unit, the Internal Control Unit and the Compliance Officer), which are tasked to supervise the Company's internal organization and are committed to developing and implementing good corporate governance practices through effective and efficient internal controls as well as risk management provisions. This is done so that the BoC and the BoD can ensure the Company is managed in accordance with the highest standards of integrity. Therefore, we can maximize the value for shareholders in the long term and increase the welfare of the communities in the area of our operations, including environmental preservation.



Komite Audit, yang berfungsi untuk memperkuat akuntabilitas dari Dewan Komisaris, juga bertanggungjawab untuk mengkaji dan menilai praktik-praktik manajemen risiko Perseroan. Sedangkan, Komite Tata Kelola Perusahaan, antara lain, bertanggungjawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan, dan menjalankan proses nominasi dan remunerasi Perseroan.

PT Vale menyadari bahwa pentingnya upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, atas inisiatif Direksi Perseroan, dengan bantuan Sekretaris Perusahaan, dilakukan kajian yang komprehensif terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan dimulai pada tahun 2015 dan berlanjut pada tahun 2016. Hasil dari kajian ini kemudian secara berkelanjutan didiskusikan dengan Komite Tata Kelola yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN TATA KELOLA

Perseroan didukung oleh berbagai kebijakan internal yang menjadi pedoman dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa kebijakan internal tersebut, antara lain, Kode Etika dan Perilaku (*Code of Ethics and Conduct*), Norma Pengadaan (*Procurement Norm*), Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Komite Tata Kelola, Piagam Komite Audit, Piagam Internal Audit, Piagam Sekretaris Perusahaan dan berbagai kebijakan serta prosedur lainnya. Dokumen-dokumen tersebut dipublikasikan dalam laman dan portal internal PT Vale. Berbagai kebijakan ini disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan maupun perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik terbaik.

Sebagai gambaran, maka hubungan di antara masing-masing di atas adalah sebagai berikut:

The Audit Committee, which functions to strengthen accountability of the Board of Commissioners, is also responsible for reviewing and assessing the Company's risk management practices. The Corporate Governance Committee is responsible for, among other matters, the supervision of corporate governance implementation and implementation of the Company's nomination and remuneration processes.

PT Vale recognizes that continuous effort is needed to improve the performance of corporate governance. Therefore, based on the Board of Directors' initiatives, with the assistance of the Corporate Secretary, a comprehensive study on the implementation of good corporate governance in the Company was initiated in 2015 and continues in 2016. The results of the study continue to be discussed with the Corporate Governance Committee as part of the oversight function of the Board of Commissioners.

GOVERNANCE POLICY

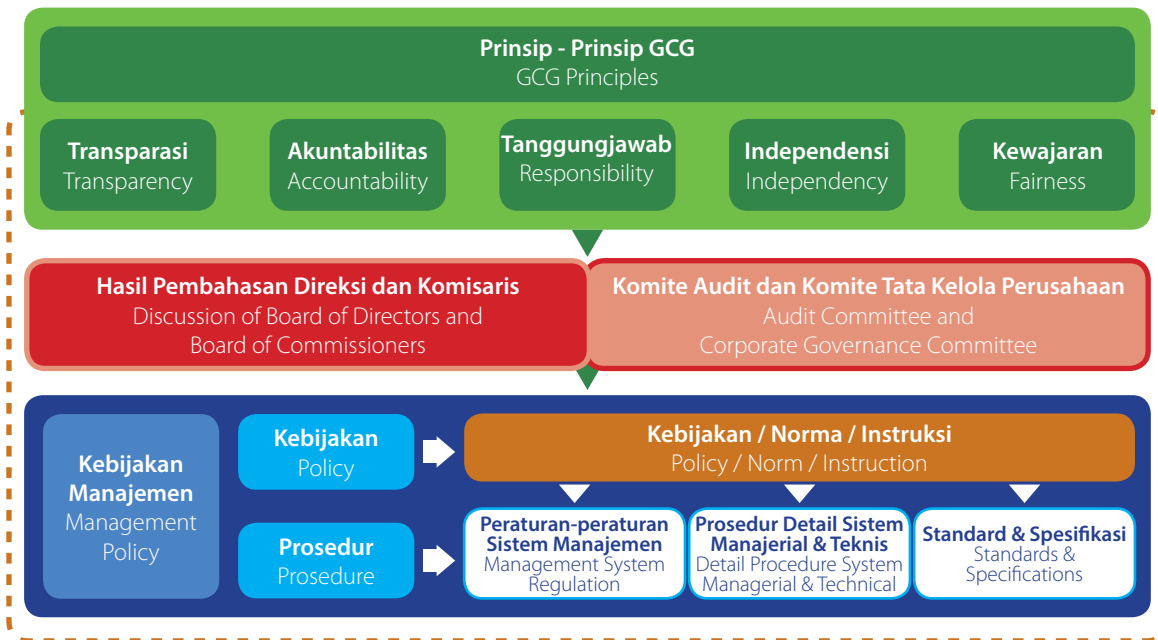
The Company is supported by various internal policies that provide guidance in applying the principles of good corporate governance. Some of the internal policies include Code of Ethics and Conduct, Procurement Norm, Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, the Corporate Governance Committee, the Audit Committee, Internal Audit unit, and of the Corporate Secretary and various internal policies and procedures. These documents are published on PT Vale's website and internal portal. These various policies are adjusted from time to time to suit the Company's needs as well as reflect developments in laws and regulations and best practices.

As an illustration, the relationship between each of the above is as follows:

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

HIRARKI KEBIJAKAN PERUSAHAAN THE COMPANY POLICY HIERARCHY



NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Misi dari PT Vale adalah untuk mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan, bertujuan untuk menjadi perusahaan sumber daya alam nomor satu di Indonesia dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam sesuai dengan standar-standar global.

Oleh karena itu, PT Vale melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan seperangkat nilai-nilai yang mencerminkan standar etika dan moral yang tinggi, guna menjamin kredibilitas dan memelihara citra perusahaan dalam lingkungan pasar dimana Perseroan secara rutin beroperasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Nilai-nilai tersebut antara lain adalah:

- Kehidupan adalah hal yang terpenting
- Menghargai karyawan
- Menjaga kelestarian bumi
- Melakukan hal yang benar
- Bersama-sama menjadi lebih baik
- Mewujudkan tujuan

CORPORATE VALUES

PT Vale's mission is to transform natural resources into prosperity and sustainable development, aiming to be the number one natural resources company in Indonesia in creating long-term value, through excellence and passion for people and the planet according to global standards.

To that end, PT Vale conducts its business activities guided by a set of values that reflect high ethical and moral standards, aimed at assuring credibility and preserving the Company's image in the markets in which it regularly operates, in the short and long term.

These values are:

- Life matters most
- Value our people
- Prize our planet
- Do what is right
- Improve together
- Make it happen

Reputasi dan citra Perseroan yang baik merupakan aset dari para pemegang saham, manajemen, dan karyawan, dan hal tersebut merupakan dampak langsung dari perilaku dan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang dicanangkan melalui Kode Etika dan Perilaku. Seluruh manajemen dan karyawan harus berkomitmen pada prinsip-prinsip kejujuran, kepercayaan dan saling menghormati, dan mereka bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan dan menjalankan nilai-nilai tersebut.

KODE ETIKA DAN PERILAKU

PT Vale telah menetapkan Kode Etika dan Perilaku (Kode Etik) sebagai salah satu bentuk komitmen PT Vale dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kode Etik merupakan sekumpulan aturan-aturan umum mengenai perilaku yang etis (baik etika usaha maupun etika kerja). Termasuk di antaranya adalah prinsip-prinsip dasar anti korupsi; menghindari situasi yang mungkin menyebabkan konflik kepentingan dengan PT Vale; tidak melakukan pelecehan dalam segala bentuk termasuk seksual ataupun moral; dan tidak mengonsumsi obat-obatan psikotropika yang terlarang di seluruh wilayah kerja PT Vale. Karyawan di setiap tingkatan diharapkan untuk berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai PT Vale dalam mewujudkan visi dan misinya.

Kode Etik harus dipatuhi, dicermati dan diberlakukan bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, manajemen, karyawan, karyawan magang, kontraktor dan seluruh pihak yang bekerja untuk PT Vale, anak-anak perusahaan, mengingat Kode Etik berlaku dan digunakan sebagai pedoman untuk seluruh kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan internal PT Vale.

Sebagai bagian dari sosialisasi Kode Etik pada karyawan, PT Vale meminta karyawan untuk menyatakan bisnis apapun yang mereka mungkin miliki dengan Perseroan atau kontraktor lainnya. PT Vale kemudian menganalisa informasi tersebut untuk menentukan apakah praktik yang dilakukan memiliki potensi untuk menjadi kasus konflik kepentingan. Dalam hal praktik tersebut memiliki potensi konflik kepentingan, maka PT Vale melalui mekanisme yang telah diatur

The Company's positive reputation and image are assets to its shareholders, management and employees, and they are the direct result of their behaviour and commitment to the principles set forth in the Company's Code of Ethics and Conduct. All members of the management team and all employees must be committed to the principles of honesty, trust and respect others, and be responsible for disseminating and practicing these values.

CODE OF ETHICS AND CONDUCTS

PT Vale has established its own Code of Ethics and Conduct (CoEC) as one of its commitments in implementing good corporate governance. The CoEC consists of general rules of ethical conduct – both business ethics and work ethics. Included in it are guidelines and position statements on the basic principles of anti-corruption; avoiding situations that may cause a conflict of interest with PT Vale; not partaking in harassment of any kind, including sexual or moral; and not consuming illegal drugs in all of PT Vale's work areas. Employees at all levels are expected to behave in a manner that reflects PT Vale's values in achieving its vision and mission.

The CoEC must be followed, observed by and applied to the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Audit Committee, management, employees, interns, contractors and any all people working for PT Vale, subsidiaries; considering that COEC is prevailing over and serving as a guideline for all of PT Vale's internal policies and rules.

As part of the CoEC socialization to the employees, PT Vale requests its employees to declare any possible business they had with the company or other contractor. PT Vale will then analyze the information to determine whether or not such information may have the potential to become a conflict of interest case. If such case has the potential for conflict of interest, then PT Vale through a regulated mechanism will instruct the employee to stop such activities. To follow up, PT Vale's Internal Audit team

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

akan menginstruksikan kepada karyawan untuk menghentikan praktik-praktik tersebut. Sebagai tindak lanjut, Internal Audit PT Vale akan melakukan audit dan menerapkan tindakan disipliner jika terdapat bukti atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.

SISTEM WHISTLEBLOWER

PT Vale sedang mengembangkan saluran whistleblowernya yang dikenal dengan Vale *Whistleblower Channel* (VWC) sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melaporkan dugaan atau sangkaan adanya pelanggaran dari hal-hal sebagaimana diatur dalam Kode Etik. Hal ini merupakan salah satu cara PT Vale dalam meningkatkan nilai-nilai etikanya serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan ketaatan pada hukum yang berlaku di tempat dimana PT Vale beroperasi atau dimana sahamnya diperdagangkan (terdaftar) pada bursa efek.

VWC kini telah aktif dengan berbagai pilihan akses dan metode untuk melakukan pelaporan, dimana pelaporan kini dapat dilakukan melalui nomor telepon bebas pulsa, email, faksimili, surat kotak pos dan situs laman. Sebagai langkah perbaikan selanjutnya, pada tahun 2016 Perseroan akan melakukan kampanye dan sosialisasi penggunaan berbagai akses dan metode pelaporan tersebut tidak hanya kepada karyawan, namun juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan Perseroan.

Kerahasiaan, kemandirian, ketidakberpihakan dan kekebalan akan dijamin dalam penanganan, penyelidikan dan penyimpanan informasi yang diterima melalui VWC. Hak-hak perorangan dalam membuat laporan dan kerahasiaan nama-namanya juga akan dilindungi. Tidak akan ada bentuk-bentuk pembalasan terhadap orang-orang yang menggunakan VWC dengan itikad baik.

will conduct regular audits and apply disciplinary action if there is evidence of violation by the employee.

WHISTLEBLOWER SYSTEM

PT Vale is developing its own whistleblowing system, known as the Vale Whistleblower Channel (VWC) that will serve as a channel that can be used to report allegations of violations or suspected violations of any of the provisions described in the CoEC. It is one of PT Vale's ways of enhancing its ethical values and corporate governance principles as well as ensuring compliance with prevailing laws in the jurisdictions where we operate or have our shares listed on a stock exchange.

VWC is now active with various options of reporting accesses and methods, in which reporting can be done by way of toll-free phone number, email, fax, PO BOX mailing address and website. As part of next improvement steps, in 2016, the Company will carry out a campaign and socialization of utilization of these various reporting accesses and methods, not only to the Company's employees, but also to the Company's stakeholders.

Confidentiality, independence, impartiality and immunities in the treatment, investigation and filing of information are promised in the VWC. The rights of people bringing allegations forward and the rights of people cited will be respected. There will be no repercussions against people using VWC in good faith.



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary General Shareholders Meeting

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham digolongkan menjadi dua jenis, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

RUPST wajib dilaksanakan satu kali dalam setahun sebelum akhir bulan Juni, sedangkan RUPSLB dapat dilaksanakan kapan saja oleh Direksi melalui permohonan tertulis yang disampaikan oleh:

- Satu atau lebih pemegang saham, baik individu maupun gabungan, yang mewakili sekurang-kurangnya 10% atau lebih dari total saham yang memiliki hak suara; atau
- Dewan Komisaris.

Selama tahun 2015, PT Vale telah mengadakan RUPST di bulan Maret dan dua RUPSLB di bulan Juni dan September.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and pursuant to Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies, the General Meeting of Shareholders is classified into two categories: the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

The AGMS shall be conducted once a year before the end of June, while an EGMS can be held at any time by the Board of Directors as required through a written request submitted by:

- One or more shareholders, either individually or jointly, who represent at least 10% or more of the total shares with voting rights; or
- The Board of Commissioners.

In 2015, PT Vale held the AGMS in March and two EGMS in June and September.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

RUPS TAHUNAN

RUPST 2015 dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2015 di Jakarta, Indonesia.

RUPST 2015 dihadiri oleh pemegang saham maupun perwakilannya, yang mewakili 8.291.611.090 lembar saham atau 83,45% dari total saham yang diterbitkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga memenuhi kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rincian kehadiran adalah sebagai berikut:

Pemegang saham yang hadir Shareholders in attendance	191
Jumlah saham Number of shares presented	8.291.611.090
Persentase dari total saham Percentage of total shares	83,45%
Jumlah total saham Perseroan Total company's total shares	9,936,338,720

RUPST 2015 dipimpin oleh Presiden Komisaris. Perseroan menunjuk Leolin Jayayanti selaku Notaris Publik untuk menangani dan mengesahkan pengambilan suara, dimana berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masing-masing saham dapat memberikan satu hak suara.

Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST 2015 adalah sebagai berikut

Agenda	Agree	Abstain	Against	Agenda
Menerima Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.	8,284,450,590	7,160,500	-	To accept the Report of the Board of Directors for the year ended December 31, 2014.
	99.91%	0.09%	0.00%	
Menerima Laporan Dewan Komisaris mengenai pengawasannya terhadap Manajemen Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.	8,284,450,590	7,160,500	-	To accept the Report of the Board of Commissioners on its supervision on the management of the Company for the year ended December 31, 2014.
	99.91%	0.09%	0.00%	
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor tanggal 26 Februari 2015, memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dari setiap kewajiban, dan meratifikasi sepenuhnya semua tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh mana tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.	8,284,450,590	7,160,500	-	To approve and ratify the audited financial statements of the Company as at and for the year ended December 31, 2014 as set forth in the Auditor's report dated February 26, 2015, and to fully release and discharge the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company from any liabilities and fully ratify all actions taken in the course of their management and supervision of the Company during the year ended December 31, 2014, to the extent such actions are reflected in the books of the Company.
	99.91%	0.09%	0.00%	
Menyetujui penyisihan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 6,6% atau setara dengan AS\$11,3juta sebagai dana cadangan.	8,287,098,990	4,512,100	-	To approve the allocation of 6,6% or equivalent to US\$11.3million of the Company's net profit for general reserve.
Menyetujui jumlah dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar AS\$0,01007 per saham, yang merupakan dividen interim yang telah dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 4 Desember 2014, dan tidak membayarkan dividen akhir untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.				To approve the total cash dividend for the financial year ending December 31, 2014 amounting US\$0.01007 per share, being the interim dividend already paid to shareholders of record as at December 4, 2014, and no final dividend will be declared in respect of the year ended December 31, 2014.
	99.95%	0.05%	0.00%	

ANNUAL GMS

The 2015 AGMS was held on 31 March 2015 in Jakarta, Indonesia.

The 2015 AGMS was attended by shareholders representing 8,291,611,090 shares, which represents 83.45% of the total shares issued by the Company with valid voting rights, thus meeting quorum as required by the Articles of Association of the Company. The details of the attendance are as follow:

The 2015 AGMS was chaired by the President Commissioner. The Company appointed Leolin Jayayanti, a Public Notary, to manage and certify the voting, in which, based on the Articles of Association of the Company, each share represents one vote.

Decisions made in the 2015 AGMS are as follows:

Agenda	Agree	Abstain	Against	Agenda
Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Josimar Pires sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak penutupan Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2017.	7,960,972,580	29,625,800	301,012,710	To approve the re-appointment of Josimar Pires as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in the year 2017.
	96.01%	0.36%	3.63%	
Susunan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat ini adalah sebagai berikut :				The composition of the members of the Board of Directors of the Company effective as of the closing of the Meeting is as follows:
Presiden Direktur		Nico Kanter		President Director
Wakil Presiden Direktur		Bernardus Irmanto		Vice President Director
Direktur		Josimar Pires		Director
Direktur		Febriany Eddy		Director
Menyetujui dan menerima pengunduran diri dari Bapak Peter Poppinga sebagai anggota Dewan Komisaris efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun 2015 ini, dan mengesampingkan persyaratan pemberitahuan 30 hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Bapak Peter Poppinga.	7,938,055,180	54,233,200	299,322,710	To approve and accept the resignation of Peter Poppinga as Commissioner, effective as of the closing of the 2015 AGMS; and the waiver of the 30 day notice requirement for Peter Poppinga's resignation.
	95.74%	0.65%	3.61%	
Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat adalah sebagai berikut:				The composition of the members of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of the Meeting is as follows:
Presiden Komisaris		Jennifer Anne Maki		President Commissioner
Wakil-Presiden Komisaris dan Komisaris Independen		Arief T. Surowidjojo		Vice-President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris		Kevin James Graham		Commissioner
Komisaris		Stuart Alan Harshaw		Commissioner
Komisaris		Nobuhiro Matsumoto		Commissioner
Komisaris		Mikinobu Ogata		Commissioner
Komisaris		Mark Travers		Commissioner
Komisaris Independen		Irwandy Arif		Independent Commissioner
Komisaris Independen		Idrus Paturusi		Independent Commissioner
Menyetujui remunerasi tahun 2015 untuk Komisaris Independen adalah mencakup pembayaran sebagai berikut: (a) AS\$12.500 per kuartal, (b) AS\$2.500 per kehadiran rapat.	8,264,547,790	4,512,100	22,551,200	To approve the amount of remuneration of the Independent Commissioners for 2015 which include the following payments: (a) US\$12,500 quarterly retainer, and (b) US\$2,500 per meeting.
	99.67%	0.05%	0.27%	
Menyetujui pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota Direksi, seperti yang direkomendasikan oleh Komite Tata Kelola.	8,262,795,490	4,512,100	24,303,500	To approve the delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine the amount of the Board of Directors salaries and/or other remuneration as recommended by the Corporate Governance Committee.
	99.65%	0.05%	0.29%	
Mengangkat Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG, sebagai auditor eksternal untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang auditor tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat pengikatan tugasnya.	8,212,577,923	29,711,700	49,321,467	To approve the appointment Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, member firm of KPMG as external auditor to audit the Company's books for the year ending December 31, 2015, subject to such member firm being fully in compliance at the time of its engagement with all applicable Indonesian regulatory requirements.
	99.05%	0.36%	0.59%	
Peretujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.	7,921,953,580	51,659,300	317,998,210	To approve that the Company's Articles of Association be proposed for amendment in an Extraordinary General Meeting of Shareholders.
	95.54%	0.62%	3.84%	

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST 2015 telah diumumkan pada tanggal 1 April 2015 di tiga surat kabar harian, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Media Indonesia* dalam Bahasa Indonesia dan *Jakarta Globe* dalam bahasa Inggris.

Hasil keputusan RUPST ini telah sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan dan tercantum dalam pemberitahuan RUPST. Selain itu, pemberitahuan hasil RUPST Tahunan 2015 juga memuat tata cara pembayaran dividen.

Dalam tahun 2015, Perseroan telah menyelesaikan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana dituangkan dalam hasil keputusan RUPS Tahunan; dan, pada tanggal 31 Desember 2015, tidak terdapat hal-hal yang masih belum dilaksanakan.

RUPS LUAR BIASA

PT Vale mengadakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 2015 di Jakarta Indonesia.

Agenda RUPSLB adalah menyetujui pengangkatan Ibu Andrea Marques De Almeida sebagai Komisaris Perseroan untuk mengisi jabatan yang lowong disebabkan oleh pengunduran diri Bapak Peter Poppinga untuk periode sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2016 dan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai bentuk kepatuhan kepada serangkaian peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan pada bulan Desember 2014.

Agenda tersebut telah disampaikan dalam pemberitahuan RUPSLB 2015 yang dipublikasikan pada tanggal 5 Juni 2015 dalam tiga surat kabar harian, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Media Indonesia* dalam Bahasa Indonesia dan *Jakarta Globe* dalam bahasa Inggris, disusul dengan undangan rapat yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2015 di surat kabar yang sama.

RUPSLB 29 Juni 2015 dihadiri para pemegang saham maupun perwakilannya yang mewakili 85,18% dari saham yang telah diterbitkan Perseroan dengan hak suara sah, sehingga memenuhi kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

The decisions made at the 2015 AGMS were announced on April 1, 2015 and were published in three daily newspapers, namely *Bisnis Indonesia* and *Media Indonesia* in Indonesian and the *Jakarta Globe*, in English.

The agenda of the AGMS was in accordance with the agenda which had been determined and stated in the notice of the AGMS. In addition, the notification of the 2015 AGMS results also contained procedures for dividend payments.

During 2015, the Company completed the necessary actions stipulated by decisions made in that AGMS; there were no outstanding actions to be completed as of 31 December 2015.

EXTRAORDINARY GMS

PT Vale conducted its first 2015 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on June 29, 2015 in Jakarta, Indonesia.

The EGMS agenda had been called to approve the appointment of Ms. Andrea Marques De Almeida as a Commissioner of the Company to fill the vacant position resulting from the resignation of Mr. Peter Poppinga for the period up to the close of the 2016 AGMS and to approve the Amendment to the Articles of Association of the Company to reflect regulations of the Financial Services Authority published in December 2014.

The agenda had been conveyed in the 2015 EGMS notification which was published on June 5, 2015 in three daily newspapers, namely *Bisnis Indonesia* and *Media Indonesia* in Indonesian language and the *Jakarta Globe*, in English, followed by the meeting invitation which was issued on June 5, 2015 in the same publications.

The June 29, 2015 EGMS was attended by shareholders or their representatives, representing 85.18% of the shares issued by the Company with valid voting rights, meeting quorum as required by the Company's Articles of Association.



Para pemegang saham menghadiri RUPSLB
Shareholders participating in EGMS

Pemegang saham yang hadir Shareholders in attendance	211
Jumlah saham Number of shares	8,463,419,520
Persentasi dari total saham Percentage of total shares	85.18%
Jumlah total saham Perseroan The Company's total shares	9,936,338,720

RUPSLB dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris Bapak Arief T. Surowidjojo. Keputusan-keputusan yang disahkan dalam RUPSLB 29 Juni 2015 dipublikasikan pada tanggal 1 Juli 2015 dalam dua harian berbahasa Indonesia yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia, dan satu harian dalam bahasa Inggris yaitu Jakarta Globe.

Perseroan telah menyelesaikan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana dituangkan dalam hasil keputusan RUPSLB 29 Juni 2015; dan, pada tanggal 31 Desember 2015, tidak terdapat hal-hal yang masih belum dilaksanakan.

The EGMS was chaired by the Vice-President Commissioner, Mr. Arief T. Surowidjojo. The Company published the decisions approved in the June 29, 2015 EGMS on July 1, 2015 in two Indonesian language daily newspapers, namely Bisnis Indonesia and Media Indonesia, and one English daily newspaper, namely the Jakarta Globe.

The Company completed the necessary actions as stipulated by the decisions made in the June 29, 2015 EGMS; there were no outstanding actions to be completed as of December 31, 2015.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Hasil keputusan RUPSLB 29 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

The decisions made in the June 29, 2015 EGMS were as follows:

Agenda	Agree	Abstain	Against	Agenda
Menyetujui pengangkatan Ibu Andrea Marques De Almeida sebagai Komisaris Perseroan untuk mengisi jabatan yang lowong disebabkan oleh pengunduran diri Bapak Peter Poppinga untuk periode sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2016.	8,027,560,560	5,023,500	430,835,460	To ratify the Approving the appointment of Ms. Andrea Marques De Almeida as Commissioner of the Company to fill the vacancy resulting from the resignation of Peter Poppinga for the term ending at the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2016.
	94.85%	0.06%	5.09%	
Susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan Rapat ini adalah sebagai berikut :				Accordingly, the composition of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of the Meeting is as follows:
Presiden Komisaris	Jennifer Maki			President Commissioner
Wakil-Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	Arief T. Surowidjojo			Vice-President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	Andrea Marques De Almeida			Commissioner
Komisaris	Kevin James Graham			Commissioner
Komisaris	Stuart Alan Harshaw			Commissioner
Komisaris	Nobuhiro Matsumoto			Commissioner
Komisaris	Mikinobu Ogata			Commissioner
Komisaris	Mark Travers			Commissioner
Komisaris Independen	Irwandy Arif			Independent Commissioner
Komisaris Independen	Idrus Paturusi			Independent Commissioner
Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai bentuk kepatuhan kepada serangkaian peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan pada bulan Desember 2014.	8,022,538,560	1,701,700	439,179,260	To ratify the amendments of the Company's Articles of Association as a form of compliance with series of regulations issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) in December 2014.
	94.79%	0.02%	5.19%	

PT Vale kembali mengadakan RUPSLB pada tanggal 30 September 2015 di Jakarta Indonesia.

PT Vale held its second EGMS on September 30, 2015 in Jakarta, Indonesia.

Agenda RUPSLB adalah menerima pengunduran diri Bapak Kevin James Graham dan Bapak Mikinobu Ogata sebagai Komisaris Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Robert Morris dan Bapak Akira Nozaki sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini untuk periode sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2016.

The EGMS had been called to approve the resignation of Mr. Kevin James Graham and Mr. Mikinobu Ogata as Commissioners of the Company and to approve the appointment of Mr. Robert Morris and Mr. Akira Nozaki as Commissioners of the Company effective from the close of the EGMS for the period up to the close of the 2016 AGMS.

Selanjutnya RUPSLB mengesampingkan persyaratan pemberitahuan 90 hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Kevin Graham dan Mikinobu Ogata.

The EGMS further proposed setting aside the 90 days notice in advance requirement in connection with the resignation of Mr. Kevin Graham and Mr. Mikinobu Ogata.

Agenda tersebut telah disampaikan dalam pemberitahuan RUPSLB 30 September 2015 yang dipublikasikan pada tanggal 8 September 2015 dalam tiga surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Jakarta Globe

The agenda was conveyed in the 2015 EGMS notification which was published on September 8, 2015 in three daily newspapers, namely Bisnis Indonesia and Media Indonesia, in the Indonesian language and the Jakarta Globe, in English, followed by the meeting invitation

dalam bahasa Inggris, disusul dengan undangan rapat yang diterbitkan pada tanggal 8 September 2015 di surat kabar yang sama.

RUPSLB 30 September 2015 dihadiri para pemegang saham maupun perwakilannya yang mewakili 86,64% dari saham yang telah diterbitkan Perseroan dengan hak suara sah, sehingga memenuhi kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham yang hadir Shareholders in attendance	222
Jumlah saham Number of shares	8,608,435,277
Persentase dari total saham Percentage of total shares	86.64%
Jumlah total saham Perseroan The Company's total shares	9,936,338,720

RUPSLB 30 September 2015 dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris Bapak Arief T. Surowidjojo. Keputusan-keputusan yang disahkan dalam RUPSLB 30 September 2015 dipublikasikan pada tanggal 1 Oktober 2015 dalam dua harian berbahasa Indonesia yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia, dan satu harian dalam bahasa Inggris yaitu Jakarta Globe.

Perseroan telah menyelesaikan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana dituangkan dalam hasil keputusan RUPSLB 30 September 2015; dan, pada tanggal 31 Desember 2015, tidak terdapat hal-hal yang masih belum dilaksanakan.

Hasil keputusan RUPS Luar Biasa 30 September 2015 adalah sebagai berikut:

Agenda	Agree	Abstain	Against	Agenda
Menerima pengunduran diri Bapak Kevin James Graham dan Bapak Mikinobu Ogata sebagai Komisaris Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Robert Morris dan Bapak Akira Nozaki sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini untuk periode sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2016.	8,232,631,820	3,321,800	372,481,657	To accept the resignation of Mr. Kevin James Graham and Mr. Mikinobu Ogata as Commissioner of the Company and approve the appointment of Mr. Robert Morris and Mr. Akira Nozaki as Commissioners of the Company, effective as at the closing of the EGMS, for the term ending at the close of the Company's 2016 AGMS.
Mengesampingkan persyaratan pemberitahuan 90 hari terlebih dahulu sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Kevin James Graham dan Mikinobu Ogata.				Waiver of the 90 days notice requirement for Kevin James Graham and Mikinobu Ogata's resignation respectively.
	97.27%	0.04%	4.40%	
Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan RUPSLB bulan September 2015 ini adalah sebagai berikut				Accordingly, the composition of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of the September EGMS was as follows:
Presiden Komisaris		Jennifer Maki		President Commissioner
Wakil-Presiden Komisaris dan Komisaris Independen		Arief T. Surowidjojo		Vice-President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris		Andrea Marques De Almeida		Commissioner
Komisaris		Stuart Alan Harshaw		Commissioner

which was issued on September 8, 2015 in the same publications.

The September 30, 2015 EGMS was attended by shareholders or their representatives, representing 86.64% of the shares issued by the Company with valid voting rights, meeting the quorum as required by the Company's Articles of Association.

The September 30, 2015 EGMS was chaired by the Vice-President Commissioner, Mr. Arief T. Surowidjojo. The Company published the decisions approved in the September 30, 2015 EGMS on October 1, 2015 in two Indonesian language daily newspapers, namely Bisnis Indonesia and Media Indonesia, and one English daily newspaper, namely the Jakarta Globe.

The Company completed the necessary actions as stipulated by the decisions made in the September 30, 2015 EGMS; there were no outstanding actions to be completed as of December 31, 2015.

The decisions made in the September 30, 2015 EGMS were as follows:

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Agenda	Agree	Abstain	Against	Agenda
Komisaris		Nobuhiro Matsumoto		Commissioner
Komisaris		Robert Morris		Commissioner
Komisaris		Akira Nozaki		Commissioner
Komisaris		Mark Travers		Commissioner
Komisaris Independen		Irwandy Arif		Independent Commissioner
Komisaris Independen		Idrus Paturusi		Independent Commissioner

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan, batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen ditetapkan oleh atau sesuai dengan otorisasi dari Rapat Umum Pemegang Saham (kecuali apabila diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan) dengan ketentuan bank kustodian dan perusahaan efek yang bersangkutan wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak memperoleh dividen saham.

Dalam hal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian dividen secara tunai, jangka waktu bagi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran kepada pemegang saham yang berhak adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pasar Modal.

Pajak penghasilan dipotong dari pembayaran dividen di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2014 pukul 16.15 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum menerima NPWP tersebut, maka pembayaran dividen interim tersebut akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%.

DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES

Based on prevailing law and the Company's Articles of Associations, the cut off date for the purposes of determining those securities account holders entitled to receive dividends, pertaining to the ownership of shares on Collective Deposit shall be decided by or pursuant to authorization from a General Meeting of Shareholders (except as otherwise provided in the Articles of Association) with the proviso that the custodian bank or securities company concerned shall submit a list of the securities account holders, including the total number of the Company's shares owned by each securities account holder, to the Depositary and Settlement Institution at the latest on the record date established for the dividend to be further submitted to the Company not later than 1 (one) business day after the record date established for the relevant dividend right .

In the event the General Meeting of Shareholders decide to distribute cash dividend, the timeline for the Company to make the payment to the entitled shareholders shall be in accordance prevailing laws and regulations, including Capital Market Regulations.

Income tax deducted from dividend payments above will be in accordance with applicable tax laws. Shareholders who are Indonesian taxpayers were required to submit a Tax Identification Number (known as an NPWP) no later than December 3, 2014 at 4.15 PM. If, up to that date, the Company or the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) had not received the NPWP, payment of the interim dividend will be subject to withholding tax of 30%.

Sesuai dengan Pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, semua pemegang saham yang bertempat tinggal di negara-negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh otoritas yang berkompeten atau wakilnya yang sah di negara-negara tersebut kepada Perseroan, sehingga dapat menjadi dasar bagi Perseroan dalam menerapkan tarif pemotongan PPh Pasal 26 yang sesuai. Surat Keterangan Domisili harus sesuai Peraturan Dirjen Pajak no. Per-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 dan harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2014 pukul 16.15 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili yang asli tersebut, maka pembayaran dividen dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Untuk para pemegang saham yang masih menggunakan warkat/sertifikat saham, persyaratan Surat Keterangan Domisili atau NPWP tersebut agar diserahkan kepada kantor administrasi saham Perseroan di alamat sebagaimana disebutkan pada awal dari laporan tahunan ini. Sedangkan para pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, harus menyerahkannya kepada KSEI melalui partisipan dimana pemegang saham terdaftar.

Pembayaran dividen hanya dilakukan melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing pemegang saham. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran akan dilakukan melalui KSEI, dimana pemegang saham tersebut akan kemudian menerima pembayaran dari KSEI.

In accordance with Article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008, all shareholders who are residents in countries that have a Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) with the Republic of Indonesia were required to submit a Certificate of Domicile issued by the relevant authority or authorized representative in these countries to the Company so that it could be the basis for the Company to deduct the rate of Income Tax in Article 26 accordingly. The Certificate of Domicile must be in accordance with the Regulation from the Directorate General of Taxation No. Per-61/PJ/2009 dated November 5, 2009 and must have been received no later than December 3, 2014 at 4.15 PM. If, up to that date, the Company or KSEI had not received the original Certificate of Domicile, then the payment of dividends will be subject to withholding tax of 20%.

For shareholders who still use script shares, the requirements for the Certificate of Domicile or NPWP are to be submitted to the Company's share administration whose address is listed at the beginning of this annual report. Meanwhile, the shareholders who are listed in collective custody of KSEI are to submit to KSEI through participants where the shareholders are registered.

Interim dividend payments will only be made by wire transfer to each shareholder's bank account. for those shareholders whose shares are listed with the collective custodian of ksei, the payment will be made through ksei, following which the shareholders will receive payment from KSEI.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

DEWAN KOMISARIS

URAIAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT Vale merupakan badan pengawas yang bertanggungjawab mengawasi Direksi dan manajemen Perseroan, serta memberikan pemantauan dalam penentuan strategi Perseroan. Dewan Komisaris, baik diminta ataupun tidak oleh Direksi, bertugas memberi nasihat kepada Direksi berkenaan dengan masalah atau topik tertentu. Namun demikian, Dewan Komisaris dilarang untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan operasional, kecuali dalam hal tidak adanya seluruh anggota Direksi secara permanen.

Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 telah dipresentasikan dan telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2015 pada bulan Maret 2015.

BOARD OF COMMISSIONERS

DESCRIPTION OF DUTIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners of PT Vale is a supervisory body responsible for overseeing the Board of Directors and management of the Company, and for providing overall stewardship in setting the business strategy. The Board of Commissioners advises the Board of Directors on some agenda items or topics, whether requested by the the Board of Directors or not. However, the Board of Commissioners is prohibited from participating in making any operational decisions, except in the case of permanent absence of all members of the Board of Directors.

The report of supervisory tasks of the Board of Commissioners for the fiscal year 2014 was presented and approved at the 2015 Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) in March 2015.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT Vale, bahwa susunan anggota Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 10 orang namun tidak melebihi 15 orang komisaris. Masa jabatan untuk setiap anggota Dewan Komisaris terhitung efektif sejak penutupan RUPST pada saat penunjukan mereka dan berakhir pada saat penutupan dua RUPST selanjutnya. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat ditunjuk kembali di masa akhir jabatannya, kecuali untuk komisaris independen dimana saat ini masa baktinya dibatasi menjadi tidak lebih dari dua periode berturut-turut berdasarkan peraturan OJK. Peraturan tersebut telah menjadi efektif sejak Desember 2014. Susunan anggota Dewan Komisaris saat ini terdiri dari 10 anggota, dengan tiga anggota menjabat sebagai Komisaris Independen.

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris President Commissioner	Jennifer Maki
Wakil-Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Vice-President Commissioner and Independent Commissioner	Arief T. Surowidjojo
Komisaris Commissioner	Robert Morris
Komisaris Commissioner	Stuart Harshaw
Komisaris Commissioner	Nobuhiro Matsumoto
Komisaris Commissioner	Akira Nozaki
Komisaris Commissioner	Andrea Marques De Almeida
Komisaris Commissioner	Mark Travers
Komisaris Independen Independent Commissioner	Irwandy Arif
Komisaris Independen Independent Commissioner	Idrus Paturusi

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

Secara umum, tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi dan memberi saran kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan, pengelolaan, dan operasional Perseroan oleh Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, teliti, dan penuh tanggungjawab, serta mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PT Vale's Articles of Association stipulate that the Board of Commissioners must consist of a minimum of 10 but not more than 15 commissioners. The tenure of each Commissioner is effective as of the close of the AGMS during which they are appointed and ends at the close of the second following AGMS. At the end of their tenure, Commissioners may be re-appointed, except for independent commissioners whose tenure is now limited by the OJK rule to be no more than two consecutive periods. This rule has been effective since Desember 2014. The current Board of Commissioners consists of 10 members, with three members as Independent Commissioners.

The composition of the Board of Commissioners is as follows:

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

In general, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are to oversee and provide advice to the Board of Directors, ensuring that the Board of Directors is implementing good corporate governance, and good management of the operations of the Company. Each Commissioner must perform his/her duties in good faith, with due care and full responsibility, and in accordance with the Company's Articles of Association, the Charter of the Board of Commissioners and prevailing laws and regulations.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Berikut adalah penjelasan tentang peran, tugas, tanggungjawab Dewan Komisaris:

1. Mengawasi Direksi dalam menjalankan manajemen Perseroan dengan cara (i) mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi serta (ii) atas permintaan Direksi memberikan pengarahan atau meneruskan permintaan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham.
2. Melaksanakan tugas-tugas, wewenang, serta tanggungjawab sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan kewajaran.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana didelegasikan oleh Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan Perseroan.
5. Mengesahkan RKAP selambat-lambatnya 30 hari sebelum awal tahun buku Perseroan yang baru.
6. Meninjau dan menyetujui setiap perubahan yang diajukan terhadap Kontrak Karya Perseroan.
7. Meninjau kinerja Perseroan dalam menjalankan rencana tanggungjawab sosial perusahaan serta memutuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh Direksi untuk pelaksanaannya.
8. Mengangkat, memindahtugaskan atau memberhentikan sementara anggota manajemen senior dengan tanggungjawab utama di bidang tanggungjawab sosial perusahaan, internal audit, serta kepatuhan. Mengkaji, menyetujui, serta menandatangani laporan tahunan yang dibuat oleh Direksi.
9. Mewakili Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan di antara satu atau semua anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan pasar modal tempat saham Perseroan dicatat dan/atau peraturan saham yang berlaku.
10. Melaporkan tugas pengawasan selama tahun berjalan kepada RUPST.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Direksi dengan itikad baik, teliti dan bertanggungjawab demi kepentingan dan keuntungan Perseroan.

The following are details of roles, duties and responsibilities of the Board of Commissioners:

1. Supervising the Board of Directors's management of the Company by (i) supervising and providing advice to the Board of Directors; and (ii) as requested by the Board of Directors, to provide recommendations or further referring such requests to the General Meeting of Shareholders for shareholders' approval.
2. Undertaking tasks, authorized actions and responsibilities in accordance with the Articles of Association, prevailing laws and regulations and/or the General Meeting of Shareholders to implement the good corporate governance principles of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.
3. Undertaking such other tasks delegated to it by the Articles of Association, prevailing laws and regulations and/or the General Meeting of Shareholders.
4. Approving the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP).
5. Ratifying the RKAP, at the latest, 30 days prior to the beginning of the Company's new financial year.
6. Reviewing and approving any proposed amendment to the Company's Contract of Work.
7. Reviewing the Company's performance in carrying out its corporate social responsibility plan and deciding on the steps the Board of Directors will take in further implementing it.
8. Appointing, transferring or temporarily discharging any member of senior management with primary responsibility in corporate social responsibility, internal audit and compliance. Review, approve and sign off the annual report prepared by the Board of Directors.
9. Represent the Company, when potential conflicts of interest between one or all members of the Board of Directors appear, with observance of the prevailing capital market and/or stock market regulations where the Company is listed.
10. Reporting its supervisory duties over the preceding financial year to the AGMS.
11. Each member of the Board of Commissioners must have good faith, due care and full responsibility in carrying supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the interest and benefit of the Company.

12. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Berikut adalah kewenangan yang dimiliki Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris memiliki akses pada informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasannya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk sewaktu-waktu menunjuk penasihat independen dengan biaya yang dibebankan pada Perseroan, sebagaimana diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasannya.
3. Berhak untuk merekomendasikan kepada Direksi tentang pelaksanaan perubahan atau tindakan korektif yang diperlukan berdasarkan tinjauan tahunan terhadap sistem pengelolaan risiko internal dan sistem pengendalian.
4. Membentuk komite atau pelaksana tugas dibawah Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan peran, tugas, dan tanggungjawabnya.
5. Dewan Komisaris dapat setiap saat memberhentikan sementara satu atau lebih anggota Direksi dan memberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan terkait pemberhentian sementara tersebut, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi tersebut telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, atau peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, atau melalaikan tugas mereka, atau alasan-alasan lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris.
6. Apabila terdapat kasus pemberhentian sementara terhadap anggota Direksi, maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam jangka waktu 45 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, untuk membuat keputusan apakah pemberhentian sementara tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemberhentian tetap atau pengembalian jabatan, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi tersebut untuk mengajukan pembelaan diri dalam rapat.

12. Each member of the Board of Commissioners would personally be liable for the Company's loss if found guilty of negligence in carrying out their duties.

Authorities of the Board of Commissioners are as follows:

1. The Board of Commissioners shall, in accordance with the Company's Articles of Association and policies, as well as the prevailing laws and regulations, have access to any information needed for the performance of its supervisory duties.
2. At any time and at the Company's expense can engage independent advisors as appropriate and necessary to fulfill its supervisory functions.
3. Can rightfully recommend to the Board of Directors the implementation of any necessary changes or corrective actions based on its annual review of the Company's internal risk management and control system.
4. To establish committees or task forces under the Board of Commissioners to assist it in performing its role, duties and responsibilities.
5. At any time, the Board of Commissioners can temporarily discharge any one or more member(s) of the Board of Directors and notify the respective member(s) of the Board of Directors, provided that such member has conducted any act contrary to the Articles of Association or any prevailing laws and regulations, or has neglected their duty, or for any other reasons deemed to be important by the Board of Commissioners.
6. In case any member of the Board of Directors is temporarily suspended, the Board of Commissioners must call an Extraordinary General Meeting of Shareholders within 45 days after the date of temporary suspension to decide whether such member of the Board of Directors will be permanently discharged or returned to their original position, while giving opportunity for the Director to present a defence at the meeting.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Vale, beberapa keputusan yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris adalah, antara lain:

1. Status korporasi, struktur saham, serta rencana bisnis dan strategi tahunan dan jangka panjang Perseroan.
2. Laporan keuangan triwulanan dan tahunan.
3. Akuisisi atau divestasi besar.
4. Kerjasama strategis dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar.
5. Penerapan kebijakan yang esensial bagi tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris, sebagai bagian dari perbaikan yang berkesinambungan, mengharuskan agar keterangan tentang peran, tugas, dan tanggungjawab tersebut di atas senantiasa diperbaharui dari waktu ke waktu untuk mencerminkan praktik terbaik.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

PROSEDUR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI

PT Vale tidak memberikan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen sebagaimana lazimnya praktik di Indonesia. Komite Tata Kelola Perusahaan merekomendasikan remunerasi tahunan untuk Komisaris Independen, kemudian rekomendasi tersebut disampaikan dalam RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

Struktur Remunerasi

Semua biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh Komisaris Independen sehubungan dengan kehadiran mereka pada rapat Dewan Komisaris, dan sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi tanggungjawab dari PT Vale.

Remunerasi yang diberikan pada Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Deskripsi Description	Jumlah (ribuan dolar AS) Amount (thousands US\$)	% dari jumlah biaya karyawan % of total employee costs
Gaji dan imbalan pekerjaan jangka pendek Salaries and short-term employee benefits	224.5	0.3%
Total	224.5	0.3%

PT Vale's Articles of Association specifically stipulate that certain decisions, such as the following, must be approved by the Board of Commissioners:

1. The Company's corporate status, capital structure, annual and long-term business and strategic plans.
2. Quarterly and annual financial statements.
3. Major acquisitions or divestitures.
4. Strategic alliances and other actions as required under the Articles of Association.
5. Implementation of policies essential to good corporate governance.

The Board of Commissioners expects that, as part of continuous improvement, the foregoing lists of roles, duties and responsibilities will be updated from time to time to reflect prevailing best practices.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PROCEDURE FOR REMUNERATION DETERMINATION

PT Vale does not remunerate members of the Board of Commissioners, except Independent Commissioners as per the common practice in Indonesia. The Corporate Governance Committee recommends annual remuneration for Independent Commissioners and the recommendations are presented at the AGMS for approval.

Remuneration Structure

All travel costs, accommodation and other expenses incurred by the Independent Commissioners in relation with their attendance at Board of Commissioners' meetings, and in relation of the Board of Commissioners duties and responsibilities as stated in the Company's Articles of Association shall be the responsibility of PT Vale.

Remuneration to the Independent Commissioners is shown below:

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, bahwa rapat Dewan Komisaris dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris, atas permintaan 50% atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% saham Perseroan. Bahan-bahan rapat Dewan Komisaris disiapkan untuk semua anggota Dewan Komisaris paling lambat tujuh hari sebelum tanggal rapat, baik dalam bentuk *hard copy* yang diserahkan maupun *soft copy* yang dikirimkan lewat email (atau alat komunikasi elektronik lainnya).

Selain komunikasi yang intensif antara anggota Dewan Komisaris maupun antara Dewan Komisaris dengan Direksi, selama tahun 2015, Dewan Komisaris tercatat telah menyelenggarakan 6 (enam) rapat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) rapat gabungan dengan mengundang Direksi pada tahun 2015. Lazimnya setiap rapat Dewan Komisaris PT Vale juga dihadiri oleh Direksi. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan meningkatkan koordinasi di antara keduanya. Hal ini dipertimbangkan sebagai praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Dari 6 (enam) rapat Dewan Komisaris, 3 (tiga) rapat Dewan Komisaris dilaksanakan melalui pertemuan secara langsung dan 3 (tiga) rapat Dewan Komisaris dilaksanakan melalui telepon (*conference call*). Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui pertemuan langsung dilakukan pada tanggal 30 Maret di Jakarta, 22 Juli di Toronto, Kanada dan 10 November di Jakarta. Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui telepon dilakukan pada tanggal 23 Juni, 4 September dan 8 Oktober.

Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan dengan mengundang Direksi pada tanggal 30 Maret, 22 Juli dan 10 November di Jakarta.

Tabel berikut menjelaskan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat Dewan Komisaris:

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Articles of Association stipulate that a Board of Commissioners meeting can be held when it is considered necessary by the President Commissioner, requested by more than 50% of the members of the Board of Commissioners, or based on a written request from the Board of Directors or holders of at least 10% of shares of the Company with voting rights. The Board of Commissioners meeting material must be made available to each member of the Board of Commissioners no less than seven days prior to the meeting, either by hand in hard copy or by email (or other electronic means of communication).

In addition to ongoing communication among Board of Commissioners members, and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors. The Board of Commissioners held 6 (six) Board of Commissioners meetings and 3 (three) of the 6 (six) meetings included joint Board of Directors and Board of Commissioners meetings in 2015. It is a common practice at PT Vale that the members of the Board of Directors are present at Board of Commissioners meetings for efficient communications and improved coordination by the Boards. This is considered a good corporate governance practice.

Of the 6 (six) Board of Commissioners meetings, 3 (three) meetings were conducted in person and 3 (three) meetings were conducted through conference call. The Board of Commissioners' meetings conducted in person were conducted on March 30 in Jakarta, July 22 in Toronto, Canada, and November 10 in Jakarta. The Board of Commissioners meetings held via conference calls were conducted on June 23, September 4, and October 8.

The Board of Commissioners also held joint Board of Commissioners and Board of Directors meetings on March 30, July 22, and November 10 in Jakarta.

Commissioner and Director attendance at the Board of Commissioners meetings is shown in the table below:

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Anggota Dewan Komisaris/Direksi Commissioners / Directors	Periode bekerja Term of Employment	March 30, 2015	June 23, 2015	July 22, 2015	Sept 4, 2015	Oct 8, 2015	Nov 10, 2015	Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners								
Jennifer Maki	March 26, 2008 – present	√	√	√	√	√	√	100%
Arief T. Surowidjojo	September 27, 2011 – present	√	√	√	√	√	√	100%
Mark Travers	August 27, 2009 – present	√	√	√	√	√	√	100%
Kevin James Graham	April 23, 2013 – RUPSLB September 30, 2015	√	x *)business travel	*) submitted resignation letter on 8 July 2015	x	x	x	50%
Mikinobu Ogata	April 25, 2012 – RUPSLB September 30, 2015	√	√	√	*)submitted resignation letter dated 31 July 2015	x	x	100%
Akira Nozaki	RUPSLB September 30, 2015 – present	*)Not yet appointed	*)Not yet appointed	*)Not yet appointed	*)Not yet appointed	√	x *)business travel	50%
Idrus Paturusi	April 25, 2012 – present	√	√	√	√	x *)business travel	√	83%
Irwandy Arief	April 16, 2010 – present	√	√	√	√	√	√	100%
Stuart Harshaw	September 25, 2014 – present	√	√	√	x *)business travel	√	√	83%
Nobuhiro Matsumoto	September 25, 2014 – present	√	√	√	√	√	x *)business travel	83%
Robert Morris	RUPSLB September 30, 2015 – present	*)Not yet appointed	*)Not yet appointed	*)Not yet appointed	*)Not yet appointed	√	√	100%
Andrea Marques De Almeida	RUPSLB June 29, 2015 – present	*)Not yet appointed	*)Not yet appointed	√	√	√	√	100%
Direksi Board of Directors								
Nicolas D. Kanter	September 27, 2011 – present	√	√	√	√	√	√	100%
Bernardus Irmanto	February 16, 2011 – present	√	√	x *)business travel	√	√	x *)business travel	66%
Josimar Pires	September 27, 2011 – AGMS 2016	√	√	√	√	√	√	100%
Febriany Eddy	April 23, 2013 – present	√	√	√	√	√	√	100%

Keputusan yang diambil pada rapat Dewan Komisaris dan juga melalui resolusi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Decisions made at the meetings and resolutions of the Board of Commissioners were as follows:

Rapat atau Resolusi Dewan Komisaris Meetings or Resolutions of BoC	Keputusan Decisions
Rapat Meetings March 30, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap risalah yang dibuat pada Rapat Dewan Komisaris tertanggal 11 November 2014. • Persetujuan terhadap revisi anggaran 2015. • Persetujuan terhadap dokumen sebagaimana diperlukan, sehubungan dengan izin Kehutanan Pomalaa. • Meningkatkan Cadangan Umum – Persetujuan terhadap penyisihan AS\$11,3 juta laba bersih PT Vale sebagai cadangan umum untuk memenuhi ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas. • Persetujuan terhadap Kebijakan dan Manual Anti Korupsi. • Persetujuan atas rekomendasi agar Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota firma KPMG, bertindak sebagai auditor eksternal untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. <ul style="list-style-type: none"> • Approval for Minutes of the Meeting made at the Board of Commissioners meeting dated 11 November 2014. • Approval of the 2015 budget revision. • Approval of the required document in relation to the Pomalaa Forestry permit. • General Reserves Increase – Approval in the appropriation of US\$11.3 million of PT Vale net profit as general reserves to comply with the Law on Limited Liability Companies. • Approval of the Anti Corruption Policy and Manual. • Approved the recommendation for" accounting firm Siddharta Widjaja & Rekan, member of the KPMG, as the external auditor to audit the company's books for the year ending 31 December 2015.
Rapat Meetings June 23, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan laporan informasi terkini kepada Dewan Komisaris terkait keadaan sosial, politik dan keamanan di Indonesia. • Laporan produksi di bulan Mei. • Laporan Keuangan, bahwa perseroan mencatat biaya yang lebih rendah. • Providing the latest information to the Board of Commissioners regarding the Indonesian social, politic, and security conditions. • Production report in May. • Finance- report that the company posted lower costs.
Rapat Meetings July 22, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap risalah rapat Dewan Komisaris pada tanggal 30 Maret 2015, • Persetujuan terhadap alokasi pembiayaan sehubungan dengan program-program community development. • Persetujuan perubahan Piagam Direksi, Piagam Dewan Komisaris, dan Piagam Komite Tata Kelola sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan OJK. • Laporan produksi – termasuk laporan terhadap hasil studi banding teknologi tungku pelebur (furnace) di lokasi operasional lain dari Vale. • Laporan keuangan – laporan terkait informasi keuangan perusahaan di triwulan kedua di tahun 2015 dan bulan Juni hingga Juli 2015. <ul style="list-style-type: none"> • Approval for Minutes of the Meeting made at the Board of Commissioners meeting dated 30 March 2015. • Approval for expenditure allocation for community development programme discretion. • Approval for the amendment to the Charter of the Board of Directors, Charter of the Board of Commissioners, and Charter of the Governance Committee in compliance with OJK regulations. • Production - report including report on the furnace technology comparative study in other location of Vale's operation. • Finance – report related to the Company's financial information in the second quarter of 2015 and June to July 2015.
Rapat Meetings September 4, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan laporan informasi terkini kepada Dewan Komisaris terkait keadaan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia, • Produksi, laporan mengenai tim produksi terus mencapai rekor produksi dimana pada bulan Juli 2015 produksi nikel adalah 7.604 nikel ton dan pada bulan Agustus 2015 produksi nikel telah mencapai 7.817 nikel ton. • Keuangan, laporan terkait performa keuangan perusahaan yang terpengaruh dengan menurunnya harga nikel dan keberhasilan PT Vale dalam memenangkan perkara pajak pada bulan Juli 2015. <ul style="list-style-type: none"> • Providing the latest information to the Board of Commissioners regarding the Indonesian social, political, and security conditions. • Production- report related to the production of nickel in which the production team is continuously achieving production target in which nickel production in July 2015 amounted to 7,604 tons of nickel and reaching 7,817 tons of nickel in August 2015. • Finance - report related to the Company's financial performance which was impacted by the decline in the price of nickel and the successful result of a PT Vale tax case in July 2015.
Rapat Meetings October 8, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap risalah yang dibuat pada Rapat Dewan Komisaris tertanggal 4 September 2015. • Keuangan, laporan terkait adanya kecenderungan penurunan Unit Cash Cost sebagai hasil dari efisiensi biaya di berbagai Departemen. • Ketenagakerjaan (HRD), laporan terkait rencana PT Vale untuk melakukan pembayaran premi jaminan sosial melalui BPJS kesehatan dan BPJS tenagakerja sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. • Persetujuan terkait penunjukan Bapak Akira Nozaki sebagai anggota Komite Tata Kelola menggantikan Bapak Mikinobu Ogata. <ul style="list-style-type: none"> • Approval for Minutes of the Meeting made at the Board of Commissioners meeting dated 4 September 2015. • Finance - report related to the tendency of lower cash cost per unit, as a result of cost efficiency in various Departments. • Employment (HRD) - report related to PT Vale's plan to make social security premium payments through health BPJS and labor BPJS as compliance to the prevailing regulations. • Approval related to the appointment of Mr. Akira Nozaki as a member of the Governance Committee replacing Mr. Mikinobu Ogata.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Rapat atau Resolusi Dewan Komisaris Meetings or Resolutions of BoC	Keputusan Decisions
Rapat Meetings November 10, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap risalah rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 22 Juli 2015, risalah rapat Dewan Komisaris tanggal 8 Oktober 2015, dengan mengakomodir saran dan komentar dari Ibu Jennifer Maki dan Mark Travers. • Produksi, presentasi terkait produksi nikel hingga bulan September 2015 sampai adalah 5% lebih rendah dari anggaran yang diantaranya disebabkan oleh pemeliharaan dan masalah operasi. • Keuangan, presentasi terkait kondisi keuangan di triwulan ketiga tahun 2015, rencana 5 tahun, presentasi budget 2016 yang mana persetujuannya akan diperoleh melalui keputusan di luar rapat Dewan Komisaris. • Presentasi terkait revisi panduan delegasi otoritas dan kontrak biodiesel jangka panjang yang persetujuannya akan diperoleh melalui keputusan diluar rapat Dewan Komisaris. • Presentasi terkait pendirian yayasan untuk pengelolaan rumah sakit.
Resolusi Resolution February 23, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap Laporan Tahunan periode yang berakhir pada 31 Desember 2014. • Approval of the Annual Report for the period ended 31 December 2014.
Resolusi Resolution April 28, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap Laporan Keuangan Triwulanan untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015. • Approval of the Quarterly Financial Report for the period ending 31 March 2015.
Resolusi Resolution July 3, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap Laporan Keuangan Triwulanan untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. • Approval of the Quarterly Financial Report for the period ending 30 June 2015.
Resolusi Resolution July 22, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap penandatanganan kontrak Global Freight Forwarding. • Approval for the signing of the Global Freight Forwarding contract.
Resolusi Resolution August 20, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan untuk mengganti peralatan terkait dengan partikel debu. • Approval to replace the existing equipment related to dust particel.
Resolusi Resolution October 19, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap Laporan Keuangan Triwulanan untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2015. • Approval of the Quarterly Financial Report for the period ending 30 September 2015.
Resolusi Resolution December 21, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap Anggaran Tahunan untuk Tahun Fiskal 2016. • Approval of the Annual Budget for the 2016 Financial Year.

PERTEMUAN KHUSUS DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN

Sebagai inisiatif tambahan, setiap bulan Direksi PT Vale melakukan pertemuan informal dengan Komisaris Independen. Pertemuan ini dilakukan agar Komisaris Indenden memperoleh informasi terkini sehubungan dengan kegiatan PT Vale. Komisaris Independen akan dimintakan saran dan masukannya. Hal ini dipertimbangkan sebagai praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Selama tahun 2015, pertemuan informal ini dilakukan secara rutin tiap bulan, dan pada umumnya dihadiri oleh seluruh Komisaris Independen.

SPECIAL MEETING WITH INDEPENDENT COMMISSIONERS

As an additional initiative, every month the Board of Directors of PT Vale holds an informal meeting with the Independent Commissioners. The meeting is conducted to update Independent Commissioners on the status of the activities of PT Vale. The Independent Commissioners are asked for any advise or input. This is considered as a good corporate governance practice.

During 2015, this informal meeting was conducted regularly every month, and generally was attended by all Independent Commissioners.

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

Pada Tahun 2015, PT Vale memulai program pengenalan/ induksi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk. Sekretaris Perusahaan memberikan paket dokumen dan informasi sebagai bahan orientasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk pada tahun 2015 dalam bentuk *soft copy* maupun cetak. Paket dokumen tersebut terdiri atas, antara lain, Anggaran Dasar Perseroan, Kontrak Karya, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan triwulanan. Hal ini dipertimbangkan sebagai praktik tata kelola perusahaan terbaik.

Selain itu, anggota baru Dewan Komisaris yang bukan merupakan warga negara Indonesia akan menerima penjelasan mengenai bahasa dan budaya Indonesia serta budaya masyarakat di Sorowako. Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk juga akan menerima rangkaian aktivitas kunjungan dan pengenalan kantor pusat, lokasi *plant site* dan *operation Site*. Tujuan dari pelaksanaan rangkaian program induksi dan rangkaian kunjungan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk untuk bertemu dengan staf, para eksekutif dan manajemen senior (seperti, Presiden Direktur, Direktur Keuangan, Direktur Legal, Direktur Hubungan Eksternal, Manager Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan serta manajer senior lainnya).

Sebagai bagian dari program induksi, anggota Dewan Komisaris juga akan diundang dalam pertemuan yang akan fokus pada penyediaan informasi mengenai (i) orientasi bisnis Perseroan; (ii) pedoman dan prosedur standar operasional Perseroan; (iii) orientasi terkait dengan kebijakan dan praktik kesehatan, keselamatan dan praktek dan kebijakan lingkungan pada PT Vale; dan (iv) informasi tentang pemangku kepentingan di PT Vale.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan peranan, tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris senantiasa mengacu pada Piagam Dewan Komisaris, sebagaimana terakhir kali diubah dan menjadi efektif sejak 22 Juli 2015. Piagam tersebut dibuat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan PT Vale; Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Otoritas

INDUCTION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2015, PT Vale initiated an induction program for newly appointed members to the Board of Commissioners. The Company's Corporate Secretary provides a package of documents and information as orientation materials for each member of the Board of Commissioners appointed in 2015 in the form of soft copy and hard copy. The document package consists of, among others, the Articles of Association of the Company, the Contract of Work, the Annual Report and quarterly Financial Statements. This is considered a best corporate governance practice.

In addition, the new members of the Board of Commissioners who are not citizens of Indonesia will receive an explanation on the Indonesian language and culture as well as the culture of the people in Sorowako. All newly appointed members of the Board of Commissioners will also receive a series of visit activities and introduction to the head office, plant site locations and operation site. The purpose of the induction program and series of visitations is to provide newly appointed members of the Board of Commissioners the opportunity to meet with staff, executives and senior management (e.g., Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Director of Legal, Director of External Relations, Manager of Environment, Health and Safety and other senior managers).

As part of the induction program, members of the Board of Commissioners will also be invited to meetings which will focus on providing information about (i) the Company's business orientation; (ii) the Company's standard operating guidelines and procedures; (iii) orientation on the policies and practices of health, safety and environment at PT Vale; and (iv) information on stakeholders of PT Vale.

CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its roles, duties and responsibilities, the Board of Commissioners is guided by the Charter of the Board of Commissioners, as most recently amended and effective as of July 22, 2015. The Charter was established based on PT Vale's Articles of Association; Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; OJK Regulation; Indonesia's Code of Corporate

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Jasa Keuangan (OJK); Ketentuan Tata Kelola Perusahaan Indonesia oleh Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan; ASEAN *Corporate Governance Score Card*; dan Prinsip OECD tentang Tata Kelola Perusahaan. Piagam Dewan Komisaris akan diperbaharui dari waktu ke waktu agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan merefleksikan perubahan yang dianggap perlu oleh Perseroan maupun Dewan Komisaris.

Piagam Dewan Komisaris meletakkan pedoman-pedoman terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Dewan Komisaris
2. Tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Fungsi pengawasan
4. Kewenangan Dewan Komisaris dalam memiliki akses informasi di Perusahaan
5. Kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham
6. Rapat Dewan Komisaris
7. Agenda dan Risalah Rapat Dewan Komisaris
8. Kewenangan dalam menunjuk penasehat independen dalam menjalankan fungsi pengawasan
9. Pengelolaan dan pengendalian risiko internal
10. Tanggungjawab sosial perusahaan
11. Kepemilikan dan perdagangan saham
12. Benturan kepentingan
13. Keterbukaan informasi
14. Hubungan dengan pemegang saham mayoritas
15. Laporan rutin dari Direksi
16. Pendidikan dan pelatihan
17. Jasa profesional atau bisnis oleh komisaris, untuk menghindari benturan kepentingan.
18. Nominasi dan remunerasi bagi Direksi
19. Evaluasi terhadap kinerja perusahaan

Tiap-tiap anggota Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sama, namun Presiden Komisaris memiliki tanggungjawab utama untuk mengawasi jalannya fungsi Dewan Komisaris. Agar dapat menjalankan kinerjanya dengan efektif, Dewan Komisaris telah menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Semua anggota Dewan Komisaris wajib bekerja sama agar dapat membuat keputusan yang efektif, tepat guna dan tepat waktu serta dapat bertindak secara independen;

Governance by National Committee on Governance; ASEAN Corporate Governance Scorecard; and OECD Principles of Corporate Governance. The Charter of the Board of Commissioners will be updated from time to time to ensure that it satisfies the requirements of prevailing laws and regulations and reflects changes deemed necessary by the Company and the Board of Commissioners.

The Charter of the Board of Commissioners sets out guidelines on the following matters:

1. Role of the Board of Commissioners
2. Responsibilities of the Board of Commissioners
3. Oversight function
4. The authorities of the Board of Commissioners in having access to information in the Company
5. Attendance in the General Meeting of Shareholders
6. Meetings of the Board of Commissioners
7. Agenda and minutes of meetings of the Board of Commissioners
8. The authority to appoint independent counsel in performing the oversight function
9. Management and control of internal risk
10. Corporate social responsibility
11. Share ownership and trades
12. Conflicts of interest
13. Information disclosures
14. Relationship with majority shareholders
15. Regular reporting from the Board of Directors
16. Education and training
17. Professional or business services by a commissioner, to avoid conflict of interest
18. Nomination and remuneration for the Board of Directors
19. Evaluation of the Company's performance.

Each member of the Board of Commissioners holds an equal position on the Board but the President Commissioner is primarily responsible for monitoring the proper functioning of the Board of Commissioners. To perform effectively, the Board of Commissioners has adopted the following principles:

1. All members of the Board of Commissioners must be able to work cooperatively to make effective, appropriate and timely decisions and to act independently;

2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memiliki integritas dan kemampuan untuk menjalankan kewajibannya dengan baik serta bekerja secara profesional untuk memastikan bahwa Direksi tetap mengutamakan keinginan seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Memiliki kemampuan sebagai pengawas dan penasihat bagi Direksi, termasuk mengusulkan tindakan-tindakan pencegahan, tambahan insentif, serta penangguhan sementara.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2015, tidak terdapat situasi yang secara aktual atau dianggap mengandung benturan kepentingan di antara anggota Dewan Komisaris dan/ atau diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam proses pengambilan keputusan. Selama masa jabatan, setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi karena tidak terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, ke atas maupun ke samping, ataupun hubungan karena perkawinan di antara mereka.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris beserta Keluarga

PT Vale selalu mencatat secara berkala kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarganya di dalam Perseroan atau perusahaan lain dalam Daftar Khusus.

KOMISARIS INDEPENDEN

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jumlah anggota Komisaris Independen adalah sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

PT Vale mengadakan penilaian terhadap Komisaris Independen setiap tahun untuk memastikan independensi mereka dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

2. Each member of the Board of Commissioners must have the integrity and capability to carry out his/ her role properly, working professionally to ensure that the Board of Directors is taking into account the interests of all shareholders and other stakeholders;
3. Must have supervisory and advisory capabilities for the Board of Directors, including recommending preventive actions, additional incentives and suspension.

AFFILIATED RELATIONS BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

During 2015, there were no situations of actual or perceived conflicts of interest between the members of the Board of Commissioners and/or between the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in any decision-making process. During their tenure, each Commissioner had no affiliation as there is no blood relationship up to the third degree, vertically, horizontally, or by marriage.

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and their Families

PT Vale maintains a Special Register, periodically updated, recording any share ownership in the Company or other companies by Commissioners and their families.

INDEPENDENT COMMISSIONERS

CRITERIA FOR INDEPENDENT COMMISSIONERS

As required by prevailing laws and regulations, the number of Independent Commissioners comprises 30% of the total membership of the Board of Commissioners.

PT Vale annually assesses Independent Commissioners to ensure their independence by referring to the following requirements under Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of a Company or Public Company, namely:

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Publik tersebut;
 3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
1. Not a person who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the Company within the last 6 (six) months;
 2. Does not own any shares either directly or indirectly in the Public Company;
 3. Does not have any affiliations with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or majority shareholder of the Company or the Public Company; and
 4. Does not have business relationship either directly or indirectly related to the business activities of the Company.

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Setiap tahun, PT Vale mewajibkan setiap anggota independen dari Dewan Komisaris untuk menandatangani surat pernyataan status independensi serta mengungkapkan kondisi apapun yang dianggap berpotensi menyebabkan benturan kepentingan dengan setiap tindakan yang diambil oleh Dewan Komisaris.

STATEMENTS OF THE INDEPENDENT COMMISSIONERS

Every year, PT Vale requires each Independent Commissioner to sign a statement confirming their independent status and disclosing any conditions that may be considered a potential conflict of interest in any actions taken by the Board of Commissioners.



Para peserta Investor Summit and Capital Market Expo 2015
Investor Summit and Capital Market Expo 2015 participants

PENILAIAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS

Indikator kinerja utama tersebut diperiksa setiap tahun untuk meyakinkan bahwa pemeriksaan telah mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik. Indikator kinerja utama akan terus dilihat dan diformalkan pada tahun 2016.

EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance of the Board of Commissioners is evaluated based on a set of key performance indicators. These key performance indicators are reviewed annually to ensure assessment reflects best corporate governance practices. The key performance indicators will continue to be reviewed and formalized in 2016.

Indikator Performa Utama Key Performance Indicator	Pencapaian Achievement
Efektifitas dalam mengawasi pelaksanaan roadmap untuk melaksanakan praktik-praktik terbaik dalam GCG Effectiveness in supervision of execution of roadmaps toward the best practices in GCG	Baik. Good.
Terlaksananya program-program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan Implementation of Health and Safety Programs for employees	Perlu perbaikan Mengingat adanya fatality pada tahun 2015. Needs improvement as there was a fatality during 2015.
Penentuan target bagi Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi serta evaluasi target tersebut pada setiap triwulan. Setting the targets for Sub-Committees under Board of Commissioners and Directors including evaluation of the targets on quarterly basis.	Baik. Good.
Terlaksananya rencana bisnis tahunan serta strategi jangka panjang. Execution of annual and long term strategic business plan	Baik. Good.
Memonitor pelaksanaan dari program-program CSR Monitor the implementation of CSR programs	Sangat Baik Mengingat upaya Perseroan dalam menunjang kelestarian lingkungan hidup mendapat penghargaan Aditama dan Best of Best untuk kategori perusahaan pemegang Kontrak Karya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Very Good Considering the Company's efforts in preservation of environment received recognition from Ministry of Energy and Mineral Resources with the awarding of Aditama and Best of Best award for Contract of Work Company.
Memonitor pelaksanaan dari program-program yang disepakati sebagai bagian dari rencana suksesi untuk calon-calon yang disiapkan untuk menggantikan anggota dari Direksi Monitor the implementation of programs to ensure the proper succession planning for successor of members of the Board of Directors.	Baik Namun proses monitoringnya perlu didokumentasikan secara formal Good However the documentation of the monitoring process shall be formalized.

KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait aspek tata kelola perusahaan, nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan yang bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan peran, tugas dan kewajibannya, Komite Tata Kelola Perusahaan berpedoman pada Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan dari Dewan Komisaris tanggal 22 Juli 2015 yang disusun untuk melengkapi, dan bukan untuk menggantikan, atau memberikan interpretasi atas Anggaran Dasar Perseroan; visi dan misinya; Piagam Dewan Komisaris;

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

To assist in its responsibilities regarding corporate governance and compensation, the Board of Commissioners established the Corporate Governance Committee (CGC), which reports directly to the Board of Commissioners.

In carrying out its roles, duties and responsibilities, the CGC is guided by the Charter of the Corporate Governance Committee as most recently amended, restated and approved by the Board of Commissioners dated July 22, 2015. The CGC Charter was established to complement, and not substitute or provide an interpretation of, PT Vale's Articles of Association;

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Piagam Direksi; atau hukum dan peraturan yang berlaku. Komite Tata Kelola Perusahaan bekerja dan bertukar informasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi, serta bekerja melalui Direksi, karyawan Perseroan dan pihak-pihak eksternal yang terkait.

Setiap anggota Komite Tata Kelola Perusahaan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, bertanggungjawab penuh dan sesuai dengan: (i) hukum dan perundang-undangan yang berlaku; (ii) seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia; (iii) Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan; (iv) Piagam Komite Tata kelola Perusahaan dan (v) instruksi yang diperoleh dari Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

KEANGGOTAAN DAN PERIODE JABATAN

Komite Tata Kelola Perusahaan terdiri tidak kurang dari empat anggota Dewan Komisaris dengan jangka waktu jabatan selama dua tahun. Dewan Komisaris menunjuk salah satu dari anggota komite sebagai Ketua Komite. Sesuai dengan Piagam Komite Tata Kelola dan peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Publik bahwa ketua Komite Tata Kelola haruslah seorang Komisaris Independen.

Pada akhir tahun 2015, Komite Tata Kelola Perusahaan memiliki empat anggota yang dipilih dari Dewan Komisaris termasuk dua perwakilan dari Vale Canada Limited, satu perwakilan dari Sumitomo dan satu Komisaris Independen.

Pada tanggal 31 Desember 2015, susunan anggota Komite Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua : Arief T. Surowidjojo, ditunjuk pada tahun 2009.

Anggota : Jennifer Maki, ditunjuk pada tahun 2014.

Anggota : Mark Travers, ditunjuk pada tahun 2012.

Anggota : Akira Nozaki, ditunjuk pada tahun 2015 menggantikan Mikinobu Ogata.

Biografi anggota Komite Tata Kelola Perusahaan telah dimuat dalam bab "Tentang Perusahaan" dalam Laporan Tahunan ini.

its mission and vision; the Charter of the Board of Commissioners; the Charter of the Board of Directors; or applicable laws and regulations. The CGC works with and exchanges information with the Board of Commissioners and the Board of Directors and, through the Board of Directors, the Company's employees and relevant external parties.

Members of the CGC are expected to perform their duties and responsibilities in good faith and with due care, having full responsibility and in accordance with: (i) all prevailing laws and regulations; (ii) all requirements of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) and the Indonesian Stock Exchange; (iii) the Company's Articles of Association and policies; (iv) the CGC Charter and (v) instructions received from the Board of Commissioners from time to time.

MEMBERSHIP AND TENURE

The CGC consists of no less than four members of the Board of Commissioners. All members of the CGC are eligible to serve for a two-year term. The Board of Commissioners appoints one of the members as a Chairman of the Committee. According to the Charter of the Corporate Governance Committee and OJK regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding Nomination and Remuneration Committee of Public Company that the chairman of the Corporate Governance Committee shall be an Independent Commissioner.

At the end of 2015, the CGC had 4 members appointed from the Board of Commissioners, including two nominees from Vale Canada Limited, one nominee from Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., and one Independent Commissioner.

As at December 31, 2015, members of the CGC were as follows:

Chairman : Arief T. Surowidjojo, appointed in 2009.

Member : Jennifer Maki, appointed in 2014.

Member : Mark Travers, appointed in 2012.

Member : Akira Nozaki, appointed in 2015 replacing Mikinobu Ogata

The biography of each member of the CGC can be found in the section "About the Company" in this Annual Report.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan tanggungjawab utama Komite Tata Kelola Perusahaan adalah untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, nominasi dan remunerasi.

Komite Tata Kelola Perusahaan bertanggungjawab pula untuk memantau secara tahunan perkembangan praktik terbaik, standar, maupun persyaratan tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bursa efek.

Komite Tata Kelola Perusahaan juga bertugas menetapkan prosedur untuk melakukan pengawasan atas evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta secara rutin melakukan penilaian atas kinerja dan efektivitas Dewan Komisaris maupun Direksi, secara terpisah maupun secara keseluruhan.

Komite Tata Kelola mengidentifikasi individu yang dianggap kompeten untuk jabatan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris sesuai dengan kriteria yang disetujui oleh Dewan Komisaris, serta memilih atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang dinominasikan untuk dipilih sebagai Komisaris Independen.

Selain itu Komite Tata Kelola juga bertugas mengkaji independensi anggota Dewan Komisaris, terutama pihak Komisaris Independen, serta mempertimbangkan kemungkinan adanya benturan kepentingan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Terkait dengan aspek remunerasi, Komite Tata Kelola bertanggungjawab untuk:

1. Mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk Komisaris Independen serta anggota komite-komite Dewan Komisaris.
2. Mengkaji dan memberikan pertimbangan mengenai kompensasi dan remunerasi bagi Direksi dan pejabat senior Perseroan.
3. Mengawasi administrasi program-program insentif kompensasi dan menyetujui pemberian penghargaan dalam program-program tersebut.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The main duties and responsibilities of the CGC are to assist the Board of Commissioners with respect to corporate governance, nomination and remuneration matters.

The CGC is also responsible for the annual monitoring of developments in corporate governance best practices, the standards and requirements of all applicable regulatory agencies and stock exchanges.

The CGC is also tasked to establish procedures on the supervisory activities over the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company and to assess on a regular basis, the performance and effectiveness of the Board of Commissioners and the Board of Directors separately and as a whole.

The CGC identifies candidates considered qualified to become Independent Commissioners on the Board of Commissioners according to criteria approved by the Board of Commissioners, and selects, or recommends to the Board of Commissioners, the candidates to be nominated as Independent Commissioners.

The CGC is also responsible for reviewing the independence of the members of the Board of Commissioners particularly, the Independent Commissioners, and considering any potential conflicts of interest involving the members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Regarding remuneration, the CGC is responsible for:

1. Reviewing and making recommendations to the Board of Commissioners on the compensation of the Independent Commissioners and committee members of the Board of Commissioners.
2. Reviewing and giving consideration the compensation and remuneration of the Board of Directors and senior officers of the Company.
3. Overseeing the administration of PT Vale's incentive compensation plans and approving rewards under such plans.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Tata Kelola Perusahaan diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan segala kegiatan yang diperlukan dalam lingkup tanggungjawabnya, termasuk untuk mencari dan meminta, pada setiap waktu, informasi yang sekiranya diperlukan dari Dewan Komisaris, Direksi, dan melalui Direksi, karyawan Perseroan serta pihak-pihak eksternal yang relevan.

Komite Tata Kelola Perusahaan bersama Dewan Komisaris menyiapkan dan mengkaji evaluasi kinerja tahunan Komite Tata Kelola Perusahaan, untuk diperbandingkan dengan persyaratan dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan. Evaluasi tersebut dapat juga mencakup rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perbaikan yang dianggap perlu oleh Komite Tata Kelola Perusahaan, atau yang sebaiknya dilakukan untuk menyempurnakan Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan sebagaimana dianggap perlu oleh Komite Tata Kelola Perusahaan.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE

Selama tahun 2015 Komite Tata Kelola Perusahaan mengadakan 3 (tiga) rapat dengan rincian sebagai berikut:

Rapat Pertama

Tanggal: Kamis, 26 Maret 2015

Waktu: 07.00 (WIB)

Tempat: Teleconference

Daftar hadir:

- Jennifer Maki
- Mark Travers
- Mikinobu Ogata
- Arief T. Surowidjojo
- Ratih Amri

Agenda:

- Pembahasan peraturan OJK terkait Tata Kelola Perusahaan
- Pembahasan masa jabatan anggota Komite Audit, Komite Tata Kelola Perusahaan dan Komisaris Independen
- Pembahasan terkait Direktur Independen dan Komisaris Independen
- Pembahasan rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan OJK

In performing its duties and responsibilities, the CGC is authorized by the Board of Commissioners to perform any activity within its scope of responsibilities and to seek and request, at any time, information it reasonably requires from the Board of Commissioners, Board of Directors and, through the Board of Directors, the Company's employees and relevant external parties.

The CGC prepares and reviews, together with the Board of Commissioners, an annual performance evaluation of the CGC, which compares the performance of the CGC with the requirements of the CGC Charter. The performance evaluation may also include recommendations to the Board of Commissioners of any improvements that are considered necessary by the CGC, or improvements to the CGC charter considered necessary by the CGC.

COMMITTEE ACTIVITY REPORT

During 2015, there were 3 (three) CGC meetings, as follows:

First Meeting

Date: Thursday, March 26, 2015

Time: 07:00 (Western Indonesian Time)

Venue: Teleconference

Attendees:

- Jennifer Maki
- Mark Travers
- Mikinobu Ogata
- Arief T. Surowidjojo
- Ratih Amri

Agenda:

- Discussion on OJK regulation associated with Corporate Governance
- Discussion on the term of office of members of the Audit Committee, the Governance Committee, and Independent Commissioner
- Discussion related to Independent Director and Independent Commissioner
- Discussion on drafts for the amendment of the Company's Articles of Association to comply with OJK regulations

- Pembahasan mengenai Direksi:
 - a) Remunerasi untuk anggota Direksi;
 - b) Kinerja dan Indikator Kinerja Utama untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - c) Rencana suksesi untuk anggota Direksi.
- Pembahasan mengenai rencana perbaikan terkait dengan peningkatan praktik tata kelola perusahaan
- Pembahasan mengenai perubahan Piagam Direksi, Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan sebagai bentuk kepatuhan pada peraturan OJK

Rapat Kedua

Tanggal: Kamis, 8 Oktober 2015

Waktu: 08.30 (WIB)

Tempat: Teleconference

Daftar hadir:

- Jennifer Maki
- Mark Travers
- Akira Nozaki
- Arief T. Surowidjojo
- Ratih Amri

Agenda:

- Persetujuan Notulen Rapat Komite Tata Kelola pada tanggal 26 Maret 2015
- Pembahasan Hasil Audit dari Internal Audit:
 - a) Dibuatnya Program Induksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b) Dibuatnya Formulir Konflik Kepentingan; dan
 - c) Indikator Kinerja Utama untuk Dewan Komisaris.
- Pembahasan agenda dan waktu untuk Rapat Komite Tata Kelola selanjutnya

Rapat Ketiga

Tanggal: Jumat, 18 Desember 2015

Waktu: 08.30 (WIB)

Tempat: Teleconference

Daftar hadir:

- Jennifer Maki
- Mark Travers
- Akira Nozaki
- Arief T. Surowidjojo
- Ratih Amri

- Discussion on the Board of Directors
 - a) Remuneration for members of the Board of Directors;
 - b) Performance and Key Performance Indicator of the Board of Directors; and
 - c) Succession plan of members of the Board of Directors.
- Discussion on action plans related to the improvement of corporate governance practices
- Discussion on amendments to the Charter of the Board of Directors, Charter of the Board of Commissioners, and CGC Charter as compliance to OJK regulations.

Second Meeting

Date: Thursday, October 8, 2015

Time: 08:30 (Western Indonesia Time)

Venue: Teleconference

Attendees:

- Jennifer Maki
- Mark Travers
- Akira Nozaki
- Arief T. Surowidjojo
- Ratih Amri

Agenda:

- Approval of the Minutes of the Meeting of the CGC held on March 26, 2015
- Discussion on the Audit Results of
 - a) Establishment of the Induction Protocol for the Board of Directors and the Board of Commissioners;
 - b) Establishment of Conflicts of Interest Form; and
 - c) Key Performance Indicators for the Board of Commissioners.
- Discussion on the agenda and time for the next Governance Committee Meeting.

Third Meeting

Date: Friday, December 18, 2015

Time: 08:30 (Western Indonesian Time)

Venue: Teleconference

Attendees:

- Jennifer Maki
- Mark Travers
- Akira Nozaki
- Arief T. Surowidjojo
- Ratih Amri

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Agenda:

- Pembahasan indikator untuk Indikator Kinerja Utama bagi Dewan Komisaris
- Pembahasan tentang laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan selama Tahun 2015
- Pembahasan rencana Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2016

Agenda:

- Discussion on indicators for Key Performance Indicator for the Board of Commissioners
- Discussion on the report of Corporate Governance implementation in 2015.
- Discussion on Corporate Governance plan for 2016.

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Selama tahun 2015 Komite Tata Kelola Perusahaan mengadakan rapat pada tanggal 26 Maret, 8 Oktober dan 18 Desember.

Semua anggota Komite Tata Kelola hadir pada seluruh rapat tersebut.

Anggota Komite Committee Member	26 Maret March, 26	8 Oktober October, 28	18 Desember December, 18	Kehadiran Attendance
Jennifer Maki	√	√	√	100%
Mikinobu Ogata*)	√	N.A	N.A	100%
Mark Travers	√	√	√	100%
Arief T. Surowidjojo	√	√	√	100%
Akira Nozaki*)	N.A	√	√	100%

*) Mikinobu Ogata mengundurkan diri dan digantikan oleh Akira Nozaki per 30 September 2015
Mikinobu Ogata resigned and was replaced by Akira Nozaki per September 30, 2015

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

During 2015, the CGC conducted meetings on March 26, October 8, and December 18.

All members of the CGC attended the meetings.

KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggungjawab pengawasan dengan menjaga integritas pelaporan keuangan, manajemen risiko dan audit keuangan untuk Perseroan. Komite Audit bertanggungjawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan peran, tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit bekerja secara independen dengan mengacu pada Piagam Komite Audit tanggal 22 Juli 2010, yang diperbaharui dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 11 November 2014. Piagam tersebut disusun untuk melengkapi, dan bukan menggantikan atau memberikan interpretasi tentang, Anggaran Dasar PT Vale; misi dan visi Perseroan; Piagam Dewan Komisaris; Piagam Direksi; atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris tersedia di laman Perseroan.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory responsibilities by attending to the integrity of financial reporting, risk management and financial audits for the Company. The Audit Committee reports directly to the Board of Commissioners.

In carrying out its roles, duties and responsibilities, the Audit Committee works independently and is guided by the Charter of the Audit Committee dated July 22, 2010, which was updated and approved by the Board of Commissioners on November 11, 2014. The Charter was established to complement, and not substitute or provide an interpretation of, PT Vale's Articles of Association; its mission and vision; the Charter of the Board of Commissioners; the Charter of the Board of Directors; or applicable laws and regulations.

The Audit Committee Charter is available on the Company's website.

Komite Audit bekerja dan bertukar informasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, Unit Manajemen Risiko, Internal Audit dan Auditor Eksternal.

Setiap anggota Komite Audit diharapkan melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, bertanggungjawab penuh dan sesuai dengan: (i) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (ii) semua ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia; (iii) Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan; (iv) Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris dan (v) instruksi dari Dewan Komisaris yang diterima dari waktu ke waktu.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Mengkaji dan menilai keandalan dan objektivitas laporan keuangan Perseroan yang akan diumumkan kepada publik dan pihak-pihak eksternal lain (termasuk institusi pemerintah dan badan pengawas).
2. Mengkaji dan menilai tindakan-tindakan Perseroan untuk mengidentifikasi dan memonitor risiko keuangan dan bisnis.
3. Mengkaji dan menilai semua rencana, kemajuan dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Internal Audit – termasuk laporan audit dan rekomendasi kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris; mengkaji dan menilai auditor eksternal Perseroan untuk menentukan apakah risiko-risiko utama telah dievaluasi dan ditangani dengan tepat; serta memastikan kebijakan pengendalian internal yang memadai.
4. Mengkaji dan menilai objektivitas dan independensi Internal Audit dan auditor eksternal Perseroan.
5. Mengkaji dan menilai kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan pasar modal dan peraturan-peraturan yang berlaku.
6. Mengawasi setiap perubahan yang signifikan atas prinsip-prinsip audit dan akuntansi Perseroan, kebijakan, pengendalian, prosedur dan praktik yang diusulkan atau dirundingkan oleh auditor eksternal Perseroan, Internal Audit atau manajemen.
7. Mengambil tindakan atas permasalahan-permasalahan yang dapat sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris.

The Audit Committee works with and exchanges information with the Board of Commissioners, Board of Directors, Risk Management Unit, Internal Audit and External Auditors.

Members of the Audit Committee are expected to perform their duties and responsibilities in good faith and with due care, having full responsibility in accordance with: (i) all prevailing laws and regulations; (ii) all requirements of the Indonesian Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange; (iii) the Company's Articles of Association and policies; (iv) the Audit Committee Charter and (v) instructions received from the Board of Commissioners from time to time.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Reviewing and assessing the reliability and objectivity of the Company's financial reports intended for issuance to the public and other external parties (including government entities and regulatory agencies).
2. Reviewing and assessing actions taken by the Company to identify and control financial and business risks.
3. Reviewing and assessing the plans, progress and results of activities conducted by the Internal Audit Unit – including its audit reports and recommendations to the President Director and the Board of Commissioners; reviewing and assessing the Company's external auditors to determine whether key risks are appropriately evaluated and addressed; and ensuring the adequacy of internal control policies.
4. Reviewing and assessing the objectivity and independence of the Internal Audit Unit and the Company's external auditors.
5. Reviewing and assessing the adequacy of the Company's compliance with capital market law and regulations.
6. Monitoring significant changes to the Company's auditing and accounting principles, policies, controls, procedures and practices proposed or contemplated by the Company's external auditor, the Internal Audit Unit, or management.
7. Taking action on such other matters as the Board of Commissioners may from time to time request.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komite Audit terdiri dari tidak kurang dari tiga anggota yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang setidaknya satu diantaranya adalah Komisaris Independen. Masa jabatan Anggota Komite Audit adalah dua tahun untuk satu periode dan dapat ditunjuk kembali untuk tambahan satu periode berikutnya. Setiap anggota Komite Audit diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit, termasuk dalam hal kompetensi dan independensi.

Selama tahun 2015, tidak terjadi perubahan keanggotaan Komite Audit PT Vale dengan komposisi anggota Komite Audit sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position
Irwandy Arif	Ketua dan Anggota Independen Chairman and Independent Member
Sidharta Utama	Anggota Independen Independent Member
Dedi Rudaedi	Anggota Independen Independent Member

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA



Irwandy Arif

Ketua dan Anggota Independen

Irwandy Arif diangkat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit sejak tanggal 1 April 2014 berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan pada tanggal 1 April 2014. Selain sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit, beliau juga bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Biografi Irwandy Arif dimuat dalam bab "Tentang Perusahaan" dalam Laporan Tahunan Ini.

MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee consists of not less than three members appointed by the Board of Commissioners, at least one of which is an Independent Commissioner. The term of office for Audit Committee members is two years. Members may be reappointed for one additional term. Each member of the Audit Committee is required to meet requirements that include competence and independence.

During 2015, there were no changes in the membership of the Audit Committee of PT Vale with the composition of the Audit Committee as follows:

EDUCATIONAL BACKGROUND AND WORK EXPERIENCE

Chairman and Independent Member

Irwandy Arif was appointed Chairman and Member of the Audit Committee based on Board of Commissioners meeting held on April 1, 2014. In addition to serving as Chairman and Member of the Audit Committee, he also serves as an Independent Commissioner of the Company.

The biography of Irwandy Arif can be found in the section "About the company" in that Annual Report.



Sidharta Utama

Anggota Independen

Sidharta Utama diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Juli 2012, dan dipilih kembali melalui keputusan rapat Dewan Komisaris tertanggal 1 April 2014, oleh karena itu beliau telah memenuhi satu periode jabatan dan saat ini dalam masa jabatan periode kedua, berdasarkan Piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris serta peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Sidharta Utama adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Sekretaris Majelis Universitas Indonesia. Selain jabatan akademisnya, beliau juga merupakan Komisaris Independen di PT Astra International Tbk dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk serta anggota Komite Audit di PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan PT Holcim Tbk.

Saat ini Sidharta Utama adalah anggota *International Accounting Education Standards Board*, Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Pengurus *Transparency International* Indonesia, Pembina *Indonesian Institute for Corporate Directorship* dan Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Beliau juga adalah *Chief Editor* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia dari Universitas Indonesia.

Sidharta Utama dikenal sebagai pakar di bidang tata kelola perusahaan dan akuntansi keuangan. Tulisan-tulisan beliau mengenai subyek-subyek tersebut telah banyak dipublikasikan secara internasional dalam berbagai jurnal akademik dan profesi.

Independent member

Sidharta Utama was appointed as a member of the Audit Committee on July 1, 2012 and re-appointed through meeting decision of the Board of Commissioners on April 1, 2014, and thus, has served the first tenure and is currently in the second period of his tenure according to the Charter of the Audit Committee of the Board of Commissioners and prevailing laws and regulations.

Sidharta Utama is a Full Professor and member of the University Academic Senate at University of Indonesia. In addition to his academic roles, he serves as an Independent Commissioner of PT Astra International Tbk and PT Saratoga Investama Sedaya Tbk; and as an Audit Committee member of PT Indo Tambangraya Megah Tbk and PT Holcim Tbk.

Sidharta Utama currently is a member of International Accounting Education Standards Board, a member of the National Council, The Indonesian Institute of Accountants, member of Transparency International Indonesia board, Adviser to Indonesian Institute for Corporate Directorship and Accounting Policy Constituent Committee of Bank Indonesia. He is also an editor-in-chief of Indonesian Accounting and Financial Journal of University of Indonesia.

Sidharta Utama has extensive expertise in the areas of corporate governance, financial accounting, corporate finance, investments and capital markets. He has written extensively on these subjects, and his work has been published in both academic and professional journals internationally.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Sidharta Utama adalah lulusan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, meraih gelar Master di bidang Administrasi Bisnis dari Indiana University dan gelar Doktor dari Texas A&M University. Beliau adalah seorang *Chartered Financial Analyst* (CFA) dan *Chartered Accountant* (CA).

Sidharta Utama holds a Bachelor's degree in accounting from the Faculty of Economics at the University of Indonesia, an MBA from Indiana University and a PhD from Texas A&M University. He is a Chartered Financial Analyst (CFA) and a Chartered Accountant (CA).



Dedi Rudaedi

Anggota Independen

Dedi Rudaedi diangkat menjadi anggota Komite Audit di bulan Januari 2015 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT Vale untuk menggantikan Erry Firmansyah yang telah menunaikan tugasnya hingga Oktober 2014.

Dedi Rudaedi memulai karirnya di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Setelah menempati berbagai pos penugasan, terakhir Dedi Rudaedi menjabat Sekretaris di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Sejak 2013, beliau ditunjuk menjadi Komisaris dan ketua Komite Audit di PT Perusahaan Pengelolaan Pengelolaan Aset (suatu badan usaha milik negara yang mengelola aset Pemerintah Indonesia).

Dedi Rudaedi adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan meraih *Master of Science in Professional Accounting* dari University of Hartford, USA. Selain itu Dedi Rudaedi juga aktif menulis berbagai makalah ilmiah di berbagai bidang akuntansi, audit, perpajakan, keuangan dan pendidikan.

Independent member

Dedi Rudaedi was appointed as an independent member of the Audit Committee by the Company's Board of Commissioners in January 2015 to replace Erry Firmansyah whose term of office ended in October 2014.

Dedi Rudaedi began his career at the Directorate General of Tax, the Ministry of Finance. After serving various assignments, he served as a Secretary of the Secretariat of the Directorate General of Taxation.

Since 2013 he was appointed as a Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Perusahaan Pengelolaan Asset (a state-owned Company that manages assets for the Government of Indonesia).

Dedi Rudaedi is a graduate of State Academy of Accounting Science (STAN) and earned a Master of Science degree in Professional Accounting from the University of Hartford, USA. He has written a variety of scientific papers in various fields of accounting, auditing, taxation, finance and education.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Dasar hukum penunjukkan anggota Komite Audit adalah keputusan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberhentikan anggota Komite Audit.

Anggota Komite Audit hanya dapat menjabat selama maksimum dua kali periode berturut-turut, dengan satu periode berjangka waktu dua tahun.

Periode Jabatan Anggota Komite

Periode jabatan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama Name	Periode Period
Irwandy Arif - Ketua dan Anggota Independen Chairman and Independent Member	April 2014 sampai sekarang April 2014 to present
Sidharta Utama - Anggota Independen Independent Member	Juli 2012 sampai sekarang July 2012 to present
Dedi Rudaedi – Anggota Independen Independent Member	Januari 2015 sampai sekarang January 2015 to present

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK NO. IX.1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tertanggal 7 Desember 2012 sebagaimana telah diubah oleh peraturan OJK No. 55/POJK. 04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.

Selama tahun 2015, Komite Audit telah mengadakan empat kali rapat berkala dengan pembahasan meliputi laporan keuangan, masalah hukum, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, proses pengendalian internal dan manajemen risiko, kegiatan audit internal, dan masalah audit lainnya. Selain rapat rutin, anggota Komite Audit, secara bersama-sama atau sendiri, juga bertemu dengan Kepala Audit Internal untuk membahas perkembangan terbaru maupun untuk memberikan dukungan teknis terkait proses audit internal.

LEGAL BASIS OF APPOINTMENTS

The legal basis for appointment of members of the Audit Committee is resolution of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also has authority to dismiss Audit Committee members.

Members of the Audit Committee are only eligible to serve a maximum of two consecutive two-year terms.

Committee Member Periods

The periods of membership of the Audit Committee are as follows:

COMMITTEE ACTIVITY REPORT

Pursuant to Bapepam-LK Regulation No. IX.1.5, attachment to the Decision of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012, dated December 7, 2012 as amended by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK. 04/2015 dated December 23, 2015, regarding Guidelines on Establishment and Working Implementations of Audit Committee, the Audit Committee shall hold regular meetings at least once every three months.

During 2015, the Audit Committee held four regular meetings with discussions covering topics such as financial statements, legal issues, the environment, health and safety, the process of internal control and risk management, internal audit activities, and other audit issues. Other than the regular Audit Committee meetings, members – either as a group or individually – met with the Head of Internal Audit to discuss any new developments and to provide technical support for the internal audit process.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Berikut ini adalah ringkasan aktivitas utama yang dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2015, termasuk kajian atas:

- Laporan keuangan triwulanan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 31 Maret 2015, 30 Juni 2015 dan 30 September 2015.
- Presentasi dari audit eksternal Perseroan mengenai audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk komentar mengenai perbaikan proses-proses pengendalian serta tanggapan manajemen.
- Penilaian dan perlakuan pajak yang berpotensi berdampak pada laporan keuangan Perseroan.
- Laporan audit internal serta status pelaksanaan rekomendasi auditor.
- Rencana Kerja Tahunan Unit Audit Internal untuk tahun 2015 dan pelaksanaannya, beserta penilaian risiko, lingkup serta metodologinya.
- Pembuatan prosedur kerja Komite Audit.

The following is a summary of the primary activities undertaken by the Audit Committee during 2015, with reviews of:

- The quarterly financial statements for the periods ended December 31, 2014, March 31, 2015, June 30, 2015 and September 30, 2015.
- Presentations given by the Company's external auditor with regard to the audit of annual financial statements of the Company for fiscal years 2014, including comments with respect to control improvements and management's responses.
- Tax assessments and treatments that potentially affect financial statements.
- Internal audit reports and the status of audit recommendations.
- Annual Work Plan of the Internal Audit Unit for 2015 and its implementation, along with risk assessment, scope and methodology.
- Establishment of the Audit Committee's working procedures.

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Berikut adalah data tingkat kehadiran anggota Komite Audit.

MEETING FREQUENCY AND ATTENDENCE

The following table contains data on the level of participation by members of the Audit Committee.

Anggota Komite Committee Member	Minimum jumlah rapat yang harus dihadiri Minimum meetings to attend	Jumlah rapat yang dihadiri Meetings attended
Irwandy Arif	5	5
Sidharta Utama	5	5
Dedi Rudaedi	5	5

DIREKSI

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Fungsi Direksi

Direksi bertanggungjawab untuk mengelola Perseroan secara efektif, efisien dan hati-hati untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan usahanya. Di bawah koordinasi Presiden Direktur, Direksi mengawasi fungsi operasional, korporasi, hukum dan keuangan Perseroan. Seluruh anggota Direksi bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur untuk memastikan bahwa Presiden Direktur mengetahui perkembangan seluruh aspek yang terkait dengan aktivitas operasi Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS

SCOPE OF WORK

Directors' Functions

The Board of Directors is responsible for the effective, efficient and prudent management of the Company, in the best interests of the Company, and in accordance with the Company's purposes, objectives and business activities. Under the coordination of the President Director, the Board of Directors oversees the operations, corporate affairs, legal and finance functions of the Company. All members of the Board of Directors report directly to the President Director to ensure that the President Director is well informed of all matters relating to the Company's operations.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berada dalam pengawasan serta mendapat pengarahannya langsung dari Dewan Komisaris. Direksi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

Direksi berperan selaku pemimpin dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh Perseroan dalam hal menghadapi kepentingan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan Perseroan.

Direksi diharapkan memenuhi tujuan-tujuan utama berikut ini:

1. Melaporkan secara komprehensif, akurat dan tepat waktu, mengenai kegiatan bisnis dan sosial PT Vale secara umum, ataupun mengenai hal-hal tertentu yang dianggap material atau dapat berdampak signifikan pada PT Vale, pemegang saham ataupun pemangku kepentingan Perseroan.
2. Bertindak secara tepat waktu dan mengambil segala keputusan yang diperlukan sehubungan dengan bisnis dan operasi PT Vale, sesuai dengan seluruh ketentuan ketentuan hukum dan perundang-undangan atau kewajiban lainnya yang berlaku, dalam kerangka kebijakan perusahaan terkini, dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.
3. Melakukan proses penetapan anggaran tahunan secara komprehensif dan memantau kinerja keuangan dan operasional PT Vale secara seksama sesuai dengan rencana bisnis tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Mengkaji secara berkesinambungan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pelaksanaannya dalam semua bidang kegiatan utama, dengan memperhatikan faktor-faktor penting seperti, antara lain, perkembangan kondisi pasar dan perubahan peraturan, hukum dan teknologi yang terkait.
5. Menerapkan kebijakan, prosedur dan proses-proses yang diperlukan guna memastikan standar integritas dan perilaku etika tertinggi di kalangan manajemen dan karyawan PT Vale.
6. Memastikan keberkelanjutan usaha Perseroan dengan meminimalisir dampak operasional terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

In performing its duties, the Board of Directors is supervised by, and may receive advice directly from, the Board of Commissioners. For certain actions, the Board of Directors has to secure prior approval from the Board of Commissioners.

The Board of Directors plays a leadership role in defining the tolerance for risk in the Company's dealings and relationships with its stakeholders.

The Board of Directors is expected to meet the following key objectives:

1. To report, in a comprehensive, accurate and timely manner, business operations and social affairs of PT Vale generally, and on any specific matters that are considered material or can bring significant consequence to PT Vale, its shareholders and other stakeholders.
2. To take timely actions and make all appropriate decisions necessary with respect to PT Vale's business and operations, in accordance with all applicable legal and other requirements or obligations and within the framework of corporate policies in effect, with a view to maximizing long-term shareholder value.
3. To conduct a comprehensive annual budgeting process and monitor PT Vale's financial and operating performance closely in conjunction with its annual business plan approved by the Board of Commissioners.
4. To review, on an on-going basis, near-term and long-term strategic plans and their implementation in all key areas of activity in light of, among other critical factors, evolving market conditions and changes in applicable laws, regulations and technology.
5. To implement policies, procedures and processes required to ensure management and employees of PT Vale meet the highest ethical standards.
6. To ensure sustainability of the business of the Company by minimizing operational impacts to community and surrounding environment.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Dalam rangka selalu mengedepankan praktik tata kelola perusahaan yang terbaik, anggota Direksi diharapkan untuk dapat terus secara dinamis menjalankan tugas dan peranan mereka dengan mengikuti perkembangan standar-standar praktik terkini.

Tanggungjawab Direksi Secara Umum

Direksi secara bersama-sama berwenang untuk mengambil keputusan Perseroan dan memiliki lima tugas utama, yaitu terkait manajemen operasional, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggungjawab sosial. Pembagian tugas dan tanggungjawab anggota Direksi ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah penjelasan umum tentang peran, tugas, dan tanggungjawab Direksi:

1. Bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan dengan didasarkan pada itikad baik dan tanggungjawab penuh untuk kepentingan terbaik bagi Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai manajemen Perseroan.
3. Mengawasi, memelihara serta mengelola aset - aset Perseroan.
4. Mempersiapkan dan memelihara daftar pemilik saham, daftar khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham serta risalah rapat Direksi.
5. Melaporkan setiap saham yang dimiliki anggota Direksi maupun keluarga mereka di Perseroan maupun di perusahaan lain dengan cara memasukkan informasi ke dalam daftar khusus.
6. Mempersiapkan laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk diserahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
7. Menyimpan semua catatan, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan.
8. Mempersiapkan RKAP Perseroan secara tepat waktu dan diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.

In keeping with the principle of continuous improvement in good corporate governance, Board of Directors members are expected to perform their tasks and roles dynamically following the latest developments in standards of practice.

Board of Directors Responsibility in General

The Board of Directors, as a collegial body, is authorized to make decisions for the Company and has 5 main tasks: operational management, risk management, internal control, communication and social responsibility. The distribution of duties and responsibilities for each member of the Board of Directors is determined in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

General description of roles, duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Responsible for managing the Company in good faith and with full responsibility for the best interests of the Company and in accordance with the objectives and purposes of the Company.
2. Applying good corporate governance principles in carrying out the day-to-day management of the Company.
3. Controlling, maintaining and managing the Company's assets.
4. Preparing and maintaining the shareholder register, special register, minutes of General Meetings of Shareholders and minutes of the meetings of the Board of Directors.
5. Reporting any shares that they or their families own in the Company, or in other companies, through entering such information in a special register for this purpose.
6. Preparing annual reports and financial statements for the Company in accordance with prevailing laws and regulations and presenting them to the General Meeting of Shareholders upon approval by the Board of Commissioners.
7. Maintaining all records, minutes and any financial documents of the Company.
8. Preparing RKAP for the Company on a timely basis and submitting it to the Board of Commissioners for approval.

9. Meninjau dan memberikan masukan untuk semua masalah yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar atau ketentuan yang berlaku.
10. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mewakili Perseroan pada tiap perkara dan dalam peristiwa apapun.
2. Mengikutsertakan dan mengikat Perseroan secara hukum dengan pihak-ketiga.
3. Menjalankan semua tindakan, baik yang terkait dengan manajemen maupun kepemilikan, dalam hal mengelola/melepaskan aset Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Anggaran Dasar atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengambil tindakan hukum untuk memindahkan atau menghilangkan hak atau penjaminan sejumlah lebih dari 50% dari total aktiva bersih Perseroan, baik dalam transaksi tunggal maupun beberapa transaksi yang berkaitan, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Tanpa mengurangi tanggung-jawabnya, Direksi melalui dua Direktur dapat mengangkat satu atau lebih karyawan atau pihak lain sebagai kuasanya sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar.
6. Mengangkat, mengakhiri atau menanggihkan jabatan perorangan di bawah, setingkat manajer atau di atasnya
7. Mengangkat, mengakhiri jabatan, atau memberhentikan dengan sementara Sekretaris Perusahaan dari Perseroan.
8. Mengangkat, mengakhiri jabatan, atau memberhentikan dengan sementara karyawan senior pada divisi hubungan investor.
9. Dengan tetap tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan amal, kontribusi masyarakat, kontribusi atau donasi lain (dalam bentuk uang maupun barang) dari atau atas nama Perseroan maupun anak perusahaan, sesuai dengan batasan yang digariskan oleh standar yang telah diberlakukan sebelumnya oleh Dewan Komisaris.

9. Reviewing and providing recommendations on any matter requiring approval from the Board of Commissioners and/or the General Meeting of Shareholders under the Articles of Association or prevailing laws and regulations.
10. Holding General Meetings of Shareholders in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Authorities of the Board of Directors:

1. Representing the Company in all judicial matters and at any events.
2. Engaging and legally binding the Company with third parties.
3. Performing all actions, whether regarding management or ownership, in managing/disposing of Company assets, except as stipulated otherwise in the Articles of Association or prevailing laws and regulations.
4. Taking legal action to transfer or dispose of any right or pledge of the Company's assets of more than 50% of total net assets of the Company, either in a single transaction or several related transactions, is subject to prior approval of the General Meeting of Shareholders.
5. Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors, through two directors, may appoint one or more employee(s) or other person(s) as proxy (ies) in accordance with the criteria and standards established by the Board of Commissioners and the Company's Articles of Association.
6. Appointing, removing or suspending any individual below, at, or higher than the manager level (or equivalent).
7. Appointing, removing or suspending the Company's corporate secretary.
8. Appointing, removing or suspending a senior employee responsible for investor relations.
9. Subject to the prevailing laws and regulations, making decisions on any charitable, community or other contribution or donation (in cash or in kind) by, or on behalf of, the Company or any Company subsidiary, to an extent based on standards previously established by the Board of Commissioners.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

10. Menata ulang organisasi pada departemen-departemen di bawah masing-masing anggota Direksi dan perubahan personil pada tingkat manajer atau di atasnya.
11. Menentukan kebijakan umum Perseroan mengenai sumber daya manusia serta menjalankan kebijakan yang telah disetujui.
12. Mematuhi pedoman umum dan kebijakan bisnis Perseroan sebagaimana disarankan oleh Dewan Komisaris.
13. Menentukan rencana strategis Perseroan, anggaran tahunan, serta kebijakan pengelolaan keuangan dan risiko Perseroan sebelum diserahkan kepada Dewan Komisaris, kemudian melaksanakan inisiatif-inisiatif tersebut
14. Bertanggungjawab atas operasional Perseroan yang material dan isi setiap laporan tertulis atau presentasi kepada Dewan Komisaris.
15. Mengidentifikasi dan mengevaluasi investasi, divestasi, dan peluang-peluang lain yang material bagi Perseroan.
16. Membuka dan menutup kantor-kantor cabang Perseroan atau anak perusahaan dari kantor cabang tersebut.
17. Melepaskan hak kontraktual yang dimiliki Perseroan (atau setiap anak perusahaannya), kecuali telah dibuat berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan.
18. Menetapkan kebijakan internal terkait batasan kewenangan setiap anggota Direksi dan seluruh jajaran organisasi Perseroan.
19. Mengatur strategi pengambilan suara yang akan didelegasikan Perseroan kepada perwakilannya di perusahaan, lembaga-lembaga dan organisasi lain yang pengelolaan atau hak suaranya dimiliki oleh Perseroan.
20. Menangani setiap permasalahan yang dianggap dapat memiliki atau memberikan dampak terhadap Kontrak Karya atau hak dan kewajiban Perseroan yang tercantum dalam Kontrak Karya.
21. Menangani setiap kegiatan akuisisi, divestasi, atau hibah atau hak atas tanah, termasuk tanpa pengecualian, hak atas air, kayu, atau akses.
10. Restructuring the organization of departments under each member of the Board of Directors and any changes in personnel at the manager level or higher.
11. Setting the Company's general policies on human resources and executing approved policies.
12. Complying with the general guidelines and business policies of the Company as recommended by the Board of Commissioners.
13. Setting the Company's strategic plan, annual budget, and finance and risk management policies, submitting them to the Board of Commissioners, and subsequently carrying out those initiatives.
14. Overseeing the Company's material operational matters and the content of any written report or presentation to the Board of Commissioners.
15. Identifying and evaluating investments, divestures and other material opportunities available to the Company.
16. Opening and closing of branch offices of the Company or subsidiaries of those offices.
17. Waiving of any proposed contractual right belonging to the Company (or any subsidiary), unless it has been made in accordance with criteria and standards previously established by the Board of Commissioners and the Company's Articles of Association.
18. Establishing internal policies regarding limits on the authority of each member of the Board of Directors and throughout the whole of the Company's organization.
19. Setting the voting strategy to be followed by its proxies in the companies, foundations and other organizations in which the Company has management or voting rights.
20. Attending to any matter which could reasonably be believed to have or result in an impact on the Contract of Work or the Company's rights and obligations under the Contract of Work.
21. Attending to any acquisition, divestiture or other grant or receipt of land or land-based rights including without limitation, rights related to water, timber or access.

22. Membentuk komite atau satuan tugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Tanggungjawab Masing-Masing Direksi

Anggaran Dasar PT Vale menetapkan bahwa Perseroan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari setidaknya tiga orang dan tidak lebih dari 10 orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut:

- Satu orang Presiden Direktur;
- Satu orang Wakil Presiden Direktur;
- Tidak lebih dari delapan Direktur.

Masa jabatan bagi masing-masing anggota Direksi berlaku sejak penutupan RUPS saat mereka diangkat dan berakhir pada penutupan dua RUPS Tahunan berikutnya. Di akhir masa jabatan, anggota Direksi dapat diangkat kembali.

Pada RUPST 2015, para pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali Josimar Pires sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak penutupan Rapat tersebut sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2017.

Lingkup tanggungjawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

22. Establishing committee(s) or task force(s) to assist in the performance of its duties and responsibilities.

Responsibilities of each Director

PT Vale's Articles of Association stipulate that the Company is managed by the Board of Directors consisting of a minimum of three but not more than 10 directors with the following composition:

- One President Director;
- One Vice-President Director;
- Not more than eight Directors.

The tenure of each is effective as of the close of the GMS during which they are appointed and ends at the close of the second following AGMS. At the end of their tenure, members of the Board of Directors may be re-appointed.

At the 2015 AGMS, the shareholders re-appointed Mr. Josimar Pires as a Director of the Company, effective as of the close of the GMS until the close of the Company's 2017 AGMS.

The scope of work for each member of the Board of Directors is as follows:

Direksi Director	Tanggungjawab Areas of Responsibilities
Nico Kanter Presiden Direktur President Director	Seluruh kegiatan usaha, dan juga bertanggungjawab khusus untuk tata kelola perusahaan, legal dan tanggungjawab sosial perusahaan Company-wide, and also specifically in corporate governance, legal and corporate social responsibility (CSR)
Bernardus Irmanto Wakil Presiden Direktur Vice President Director	Sumber daya manusia dan layanan korporasi Human resources and corporate services
Febriany Eddy Direktur/Director	Chief Operating Officer, Keuangan, akuntansi, perpajakan, hubungan investor, pengadaan strategis dan pembelian dan pengendalian internal Chief Financial Officer, Finance, accounting, taxation, investor relations, strategic procurement and purchasing as well as internal control
Josimar Pires Direktur/Director	Chief Operating Officer, Operasi dan produksi, eksplorasi, keselamatan & kesehatan karyawan, lingkungan hidup Operations and production, exploration, employee safety and health, environmental aspects

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT DIREKSI

Untuk melaksanakan mandatnya, Direksi mengadakan rapat sesuai keperluan. Pada umumnya, rapat Direksi dijadwalkan untuk membahas hasil-hasil keuangan triwulanan dan rekomendasi pembagian dividen.

ATTENDANCE OF DIRECTORS AT BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

In order to carry out its mandate, the Board of Directors holds meetings as required. Generally, meetings are scheduled to consider quarterly financial results and dividend recommendations.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Akan tetapi, rapat Direksi juga dapat diadakan untuk membahas permasalahan yang mungkin timbul dari waktu ke waktu.

However, the Board of Directors meetings can be called to deal with matters that may arise from time to time.

Pada tahun 2015, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Daftar kehadiran dalam rapat-rapat Direksi ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

During 2015, the Board of Directors conducted 26 (twenty six) meetings. The attendance of Directors in the Board of Directors meetings is presented in the following table:

No	Tanggal Dates	Nico Kanter	Bernardus Irmanto	Josimar Pires	Febriany Eddy
1	19 Januari January	√	√	x	√
2	28 Januari January	√	√	√	√
3	30 Januari January	√	√	√	√
4	17 Februari February	√	√	x	√
5	26 Februari February	√	√	√	√
6	9 Maret March	√	√	√	√
7	12 Maret March	√	√	√	√
8	24 Maret March	√	√	√	√
9	1 April April	√	√	√	√
10	14 April April	√	√	√	√
11	6 Mei May	√	√	√	√
12	13 Mei May	√	√	√	√
13	15 Juni June	√	√	√	√
14	22 Juni June	√	√	√	√
15	8 Juli July	√	√	√	√
16	6 Agustus August	√	√	√	√
17	18 Agustus August	√	√	√	√
18	9 September September	√	√	√	√
19	28 September September	√	√	√	√
20	15 Oktober October	√	√	√	√
21	22 Oktober October	√	√	√	√
22	5 November November	√	√	√	√
23	17 November November	√	√	x	√
24	23 November November	√	√	x	√
25	3 Desember December	√	√	x	√
26	23 Desember December	√	√	x	√
	Kehadiran Attendance	100%	100%	77%	100%

RINCIAN AGENDA RAPAT DIREKSI

Risalah rapat Direksi disiapkan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Daftar agenda untuk masing-masing rapat Direksi adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

DETAILS ON THE AGENDAS FOR BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Minutes of meeting of the Board of Directors are prepared and documented by the Corporate Secretary.

A list of agenda items for each meeting of the Board of Directors is outlined in the following table:

Tanggal Date	Agenda
19 Januari January	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai Nota Kesepahaman tentang Pengamanan Bersama, dan Naskah Perjanjian Hibah, terkait PT Vale sebagai Objek Vital Nasional. Discussion on Memorandum of Understanding on Joint Security and Grant Agreement related to PT Vale as a National Vital Asset.
28 Januari January	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai PTVI 2015 strategic Agenda dan persetujuan bahwa agenda tersebut akan di review oleh Direksi setiap bulan. Strategic agenda discussion and approval for the agenda to be reviewed by the Board of Directors on a monthly basis.
30 Januari January	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai konsekuensi apabila keadaan harga nickel sebagaimana Q4 2014 berlanjut. Discussion on the consequences if the nickel prices in 4th Quarter 2014 continues.
17 Februari February	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai Agenda Strategis 2015. Discussion on the 2015 Strategic Agenda.
26 Februari February	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai peningkatan kinerja sumber daya manusia dan perihal organisasi. Discussion on People Development and Organizational Matters.
9 Maret March	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan Rapat Dewan Komisaris, Direksi membahas agenda dan materi untuk Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 30 Maret 2015. Preparation for the Board of Commissioners Meeting, discussing the agenda and materials which will be discussed in the Board of Commissioners Meeting on March 30, 2015.
12 Maret March	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan Rapat Dewan Komisaris (lanjutan), Direksi membahas agenda rapat sebelum dikirimkan kepada Dewan Komisaris. Preparation for the Board of Commissioners Meeting (continued), the Board of Directors discussed the meeting agenda prior to sending it to the Board of Commissioners.
24 Maret March	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusia. Discussion on people development.
1 April April	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan IGP Research and Development budget 2015. Discussion on the 2015 IGP Research and Development Budget Pembahasan sehubungan dengan Research and Development. Discussion with respect to Internal Research and Development.
14 April April	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai peningkatan kepentingan nasional. Discussion on improvement of national interest. Pembahasan mengenai jalan alternatif sehubungan dengan pertimbangan safety pada fasilitas PLTA. Discussion on alternative roadbased on safety consideration related to the hydropower facility. Pembahasan mengenai persetujuan pengembangan sumber daya manusia, yaitu pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT) yang baru. Discussion on People Development, approval for the appointment of the new Mining Chief Engineer.
6 Mei May	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan tanggal pelaksanaan dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Discussion on the implementation date and the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
13 Mei May	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan agenda yang akan dibahas pada Rapat Dewan Komisaris. Preparation of agenda which will be discussed in the Board of Commissioners Meeting. Pembahasan mengenai anggaran program-program pembangunan masyarakat untuk diajukan persetujuannya dalam Rapat Dewan Komisaris. Discussions on the budget of community development to be proposed in the Board of Commissioners Meeting for approval.
15 Juni June	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Direksi mengenai impor peralatan. Approval of the Board of Directors related to imported equipment. Pembahasan sertifikasi lahan. Discussion on land certification.
22 Juni June	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan Rapat Dewan Komisaris, membahas agenda dan materi rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015 Preparation for the Board of Commissioners Meeting, discussing meeting agenda and materials which will be conducted on July 22, 2015. Pembahasan mengenai peningkatan kinerja sumber daya manusia di PT Vale. Discussion on the improvement of human resources performance at PT Vale.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Tanggal Date	Agenda
8 Juli July	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan untuk efisiensi penggunaan kendaraan dan lebih memprioritaskan kegiatan operasional. • Approval to efficient use of and prioritize them for the operational activities. • Persetujuan untuk memulai proses penawaran tender tanpa komitmen finansial. • Approval to commence the bid process in relation to tender with no financial commitments. • Update secara umum; (i) persetujuan untuk menjalankan program renovasi infrastruktur (ii) persetujuan untuk berkontribusi dalam acara perayaan budaya setempat dan menyediakan anggaran untuk acara olah raga lari di Sorowako; dan (iii) pengajuan izin lahan untuk diproses lebih lanjut oleh Tim External Relations. • General Updates: (i) approval to implement an infrastructure renovation program in Towuti; (ii) approval to contribute in the local cultural event and to provide the budget for running sports event in Sorowako; and (iii) application for land permit to be further processed by the External Relations Team.
6 Agustus August	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Nota Kesepahaman sehubungan dengan rencana kerjasama dengan pihak ketiga. • Discussion on the Memorandum of Understanding with a third party.
18 Agustus August	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Rapat Dewan Komisaris membahas agenda dan materi rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2015. • Preparation for the Board of Commissioners meeting, discussing the meeting agenda and materials, which will be held on September 4, 2015. • Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015. • Preparation for the General Meeting of Shareholders which will be held on September 30, 2015. • Pembahasan produktivitas di PT Vale. • Discussion on the productivity of PT Vale. • pembahasan permohonan persetujuan hal-hal yang terkait dengan community development. • Discussion on the proposed approvals for matters related to community development.
9 September September	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Rapat Dewan Komisaris, membahas agenda dan materi rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015 • Preparation for the Board of Commissioners meeting, discussing the meeting agenda and materials which will be held on November 10, 2015. • Persetujuan Direksi untuk pembelian aset tetap guna menunjang kegiatan/operasional PT Vale. • Approval of the Board of Directors for the purchase fixed assets to support the activities/operations of PT Vale. • Pembahasan pelaksanaan proyek sehubungan dengan konversi bahan bakar batubara. • Discussion on the project implementation in regard to the conversion of coal fuels.
28 September September	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Direksi untuk sehubungan dengan proyek Coal Firing • Approval of the Board of Directors with respect to the Coal Fire project
15 Oktober October	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Rapat Dewan Komisaris (lanjutan), membahas agenda dan materi rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015. • Preparation for the Board of Commissioners Meeting (continuation), discussing the meeting agenda and materials which will be held on November 10, 2015.
22 Oktober October	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan yang berlaku. • Discussion on interactions with various stakeholders based on the applicable provisions.
5 November November	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai proses audit oleh Internal Audit dan kendala yang dihadapi. • Discussion on the audit process by Internal Audit as well as issues faced.
17 November November	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan materi presentasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2016. • 2016 Work Plan and Budget (WP&B) presentation material discussion.
23 November November	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Direksi untuk alokasi dana untuk pelaksanaan acara perayaan budaya setempat yang melibatkan Pemerintah maupun masyarakat. • Approval of the Board of Directors to allocate funds for the implementation of the local cultural celebration event involving the Government and the community.
3 Desember December	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mengenai penggunaan air dari danau sebagaimana diatur dalam peraturan baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. • Discussion on the utilization of the lake water as governed in the new regulation of the Ministry of the Environment and Forestry.
23 Desember December	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan rencana perpanjangan runway bandara PT Vale di Sorowako. • Discussion on the runway extension plan for PT Vale's Airport in Sorowako. • Pembahasan mengenai pengamanan daerah operasional PT Vale. • Discussion on operational area security of PT Vale.

TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT GABUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

LEVEL OF ATTENDANCE IN THE JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Anggota Direksi Members of the BOD	Periode Jabatan Tenure Period	March 30	July 22	Nov 10	Kehadiran Attendance
Nicolas D. Kanter	27 September 2011 - present	√	√	√	100%
Bernardus Irmanto	16 February 2011 - present	√	x	x	33.3%
Josimar Pires	27 September 2011 - present	√	√	√	100%
Febriany Eddy	23 April 2013 - present	√	√	√	100%

PROGRAM PELATIHAN UNTUK DIREKSI

Perseroan telah membuat langkah perbaikan dalam praktik Tata Kelola Perusahaan dengan membuat protokol orientasi untuk mengatur mengenai ketentuan dan standard program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru ditunjuk. Bahan orientasi tersebut diberikan dalam bentuk *soft copy* maupun cetak. Paket dokumen tersebut terdiri atas, antara lain, anggaran dasar Perseroan, Kontrak Karya, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan triwulanan.

Selain itu, anggota baru Direksi yang bukan merupakan warga negara Indonesia akan menerima penjelasan mengenai bahasa dan budaya Indonesia serta budaya masyarakat di Sorowako. Anggota Direksi yang baru ditunjuk juga akan menerima rangkaian aktifitas kunjungan dan pengenalan kantor pusat, lokasi *plant site* dan *operation site*. Tujuan dari pelaksanaan rangkaian program induksi tersebut adalah untuk memberikan anggota Direksi yang baru ditunjuk dengan kesempatan untuk bertemu dengan staf, para eksekutif dan manajemen senior.

Sebagai bagian dari program induksi, Anggota Direksi juga akan diundang dalam pertemuan yang akan fokus pada penyediaan informasi mengenai (i) orientasi bisnis Perusahaan; (ii) pedoman prosedur standar operasional Perseroan; (iii) orientasi terkait kebijakan dan praktek kesehatan, keselamatan dan lingkungan; dan (iv) informasi tentang pemangku kepentingan di PT Vale. Hal ini dipertimbangkan sebagai praktik tata kelola perusahaan yang baik.

EDUCATION PROGRAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

In 2015, the Company initiated improvements in Corporate Governance practices by instituting orientation protocols which govern the provisions and standards of the induction program for newly appointed Directors. The orientation materials are provided in both soft and hard copy. The document package consists of, among others, Articles of Association of the Company, the Contract of Work, the Annual Report and quarterly Financial Statements.

In addition, newly appointed Directors who are not Indonesian citizens will be provided knowledge on the language and culture of Indonesia in general as well as the culture of the Sorowako community in particular. Newly appointed Directors will also receive a series of activities and introductions to the head office, plant site and operational site. The purpose of this program is to provide the opportunity for the newly appointed Directors to meet with the staff, executives, and senior management.

As part of the induction program, Directors are also invited to a meeting which will focus on information regarding: (i) business orientation of the Company; (ii) operational guidelines and standard procedures of the Company; (iii) health, safety, and environmental policy and practice; and (iv) information on the stakeholders of PT Vale. This is considered as a good corporate governance practice.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

PT Vale berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan dukungan bagi para anggota Direksi untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas profesional mereka untuk menjalankan praktik manajemen dengan standar tertinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengikuti dan berpartisipasi dalam berbagai program berikut ini pada tahun 2015:

1. Konferensi mengenai base metals
2. Konferensi mengenai pertambangan dan komoditas
3. Konferensi dan seminar keuangan, seperti treasury dan perbankan
4. Konferensi internasional mengenai sumber daya alam
5. Kuliah umum dan *certified coach*
6. Program MBA Eksekutif

PIAGAM DIREKSI

Dalam menjalankan peran, tugas, dan kewajibannya, Direksi berpedoman pada Piagam Direksi, sebagaimana terakhir kali diubah dan efektif sejak tanggal 22 Juli 2015 yang diterbitkan berdasarkan Anggaran Dasar PT Vale; Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; Pedoman Umum GCG Indonesia yang merupakan ekstraksi dari berbagai sumber, seperti Komite Nasional *Corporate Governance*; ASEAN *Corporate Governance Scorecard*; dan OECD *Principles of Corporate Governance*. Piagam Direksi akan diperbaharui dari waktu ke waktu untuk memastikan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau apabila terdapat perubahan yang dianggap perlu oleh Perseroan.

Piagam Direksi meletakkan pedoman-pedoman terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Direksi
2. Tanggungjawab Direksi
3. Pengambilan keputusan
4. Kewenangan Direksi dalam memiliki akses informasi di Perusahaan
5. Kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham
6. Rapat Direksi
7. Agenda dan risalah Rapat Direksi
8. Kewenangan dalam menunjuk penasehat independen dalam menjalankan fungsinya sebagai Direksi

PT Vale is committed to providing the opportunity and support for members of the Board of Directors to develop and enhance their professional capacity to perform management practices to the highest level. On that account, the Board of Directors of the Company attended and participated in the following programs in 2015:

1. Conference on base metals
2. Conference on mining and commodities
3. Financial conferences and seminars, such as on treasury and banking
4. International conferences on natural resources
5. General lectures and certified coaching
6. Executive MBA Program.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

In carrying out its roles, duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Board of Directors Charter as most recently amended and effective as of July 22, 2015, based on PT Vale's Articles of Association; Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; Regulations of the Indonesian Financial Services Authority, Indonesia's GCG Code as an extract of various sources, like the National Committee on Corporate Governance; ASEAN Corporate Governance Scorecard; and OECD Principles of Corporate Governance. The Board of Directors Charter will be updated from time to time to ensure that it satisfies the requirements of the prevailing laws and regulations, or according to changes deemed necessary by the Company.

PT Vale's Charter of the Board of Directors establishes guidelines for the following matters:

1. Roles of the Board of Directors
2. Responsibilities of the Board of Directors
3. Decision making
4. Authority of the Board of Directors in having access to information in the Company
5. Attendance in the General Meeting of Shareholders
6. Board of Directors Meeting
7. Agenda and Minutes of the Board of Directors Meeting
8. The authority to appoint independent counsel in performing its function as the Board of Directors

9. Pengelolaan dan pengendalian risiko internal
10. Tanggungjawab sosial perusahaan
11. Struktur pelaporan
12. Kebijakan Perseroan
13. Kepemilikan dan perdagangan saham
14. Benturan kepentingan
15. Keterbukaan informasi
16. Hubungan dengan pemegang saham mayoritas
17. Laporan rutin kepada Dewan Komisaris
18. Pendidikan dan pelatihan
19. Jasa layanan profesional atau bisnis oleh direktur, untuk menghindari benturan kepentingan
20. Rapat dengan Dewan Komisaris

Masing-masing dari anggota Direksi memiliki kedudukan yang sama, termasuk Presiden Direktur. Presiden Direktur mengkoordinasikan semua kegiatan Direksi. Dengan tujuan untuk dapat menjalankan tugas dengan efektif, Direksi telah menyusun prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Semua anggota Direksi wajib bekerja agar dapat membuat keputusan yang efektif, tepat guna, dan tepat waktu serta bertindak secara independen.
2. Setiap anggota Direksi wajib memiliki integritas, pengalaman dan kemampuan untuk menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan tugas masing-masing.
3. Direksi bertanggungjawab dalam mengelola Perseroan untuk memperoleh keuntungan serta memastikan keberlangsungan Perseroan.
4. Direksi wajib menyampaikan pertanggungjawabannya atas pengelolaan Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEBIJAKAN MENGENAI SUKSESI DIREKSI

Sukseksi Direksi diatur melalui sistem CSP (*career and succession planning*). Sistem CSP menyediakan program-program yang menunjang perencanaan karir dan suksesi, antara lain, proses evaluasi kinerja karyawan, aspirasi karir, program pelatihan dan pengembangan diri yang dibutuhkan. Di dalam sistem tersebut, masing-masing anggota Direksi PT Vale wajib menominasikan paling tidak seorang calon pengganti (*successor*) yang akan dikembangkan. Sistem CSP berlaku bagi seluruh bagian PT Vale.

9. Management and control of internal risk
10. Corporate social responsibility
11. Reporting structure
12. Company policies
13. Share trading and ownership
14. Conflicts of interest
15. Disclosure of information
16. Relationship with majority shareholder
17. Regular reporting to the Board of Commissioners
18. Education and training
19. Professional or business services by the Directors, to avoid conflicts of interest
20. Meetings with the Board of Commissioners.

Each of the members of the Board of Directors holds an equal position, including the President Director. The President Director coordinates the activities of the Board of Directors. For the purpose of carrying out its duties effectively, the Board of Directors has adopted the following principles:

1. All members shall cooperate to enable the Board of Directors to make effective, appropriate and timely decisions and to act independently;
2. Each member of the Board of Directors shall possess the integrity, experience and capability required for professionally carrying out their respective duties;
3. The Board of Directors shall be responsible for managing the Company to achieve profitability and ensure Company sustainability;
4. The Board of Directors shall be accountable for its management to the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and regulations.

SUCCESSION POLICY FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The succession of the Board of Directors is regulated through the CSP (*career and succession planning*) system. The CSP system provides programs which support career plans and succession, among others, employees' performance evaluation process, career aspirations, training and self-development programs. In the system, each member of the Board of Directors of PT Vale must nominate at least one replacement candidate (*successor*) to be developed. The CSP system is applied across PT Vale.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Saat ini, tiga dari empat anggota Direksi adalah warga negara Indonesia (WNI) dan satu diantaranya adalah wanita.

HUBUNGAN AFILIASI DENGAN DIREKSI LAINNYA, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM

Direksi membuat pernyataan bahwa selama tahun 2015 tidak terdapat situasi yang secara aktual maupun dianggap sebagai benturan kepentingan antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan dalam masa jabatannya.

Anggota indepen Direksi berkewajiban untuk melaporkan apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya.

Sekretaris Perusahaan bertugas memastikan apakah praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PENILAIAN TERHADAP DIREKSI

PROSES PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Setiap tahun, kinerja Perseroan dan Direksi dinilai oleh Dewan Komisaris.

Pada setiap awal tahun, Direksi dan Dewan Komisaris menentukan target-target Perseroan dan masing-masing Direksi untuk satu tahun ke depan. Pada akhir tahun, kinerja Direksi dilakukan dengan menilai pencapaian setiap target tersebut. Masing-masing anggota Direksi bertanggungjawab untuk memberi bukti-bukti pencapaian target kepada Dewan Komisaris.

Kinerja masing-masing Direksi juga dinilai oleh Dewan Komisaris pada rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

KRITERIA PENILAIAN

Penilaian Direksi dilakukan dengan metode perbandingan antara target dan pencapaian Perseroan secara aktual. Target Perseroan dibuat dalam beberapa kategori, termasuk:

Currently, three of the four members of the Board of Directors are Indonesian citizens and one of the Indonesian Directors is a female.

AFFILIATION BETWEEN DIRECTORS, COMMISSIONERS AND SHAREHOLDERS

The Board of Directors made a statement that during 2015 there were no actual or perceived conflicts of interest between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in any decision-making process and during their tenure.

Independent members of the Board of Directors are obliged to report any change in status that affects her/his independence.

It is the Corporate Secretary's duty to ascertain whether the practice has been carried out in accordance with principles of good corporate governance.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

THE PROCESS OF PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance of the Company and each of the Directors is assessed by the Board of Commissioners annually.

At the beginning of each year, the Board of Directors and the Board of Commissioners determine the targets for the Company and for each Director for the year ahead. At the end of the year, the collective and individual performance of the Board of Directors is assessed against the achievement of each of these targets. Each member of the Board of Directors is responsible for providing evidence of achievement to the Board of Commissioners.

The performance of an individual Director is also considered by the Board of Commissioners in joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors.

ASSESSMENT CRITERIA

The assessment of the Board of Directors is conducted by comparing the targets against the actual achievements of the Company. The Company's targets cover several categories, including:

- Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan;
- Strategi Perseroan;
- Produksi;
- Manajemen biaya;
- CSR dan pengembangan berkelanjutan; dan
- Sumberdaya manusia.

PELAKSANAAN PENILAIAN

Target Direksi dijelaskan pada tabel berikut ini. Seluruh Direksi diberi target yang sama, namun bobot penilaian disesuaikan dengan bidang tanggungjawab masing-masing anggota Direksi.

- Safety and health of employees;
- The Company's strategy;
- Production;
- Cost management;
- CSR and sustainable development; and
- Human Resources.

ASSESSMENT IMPLEMENTATION

Targets for the Board of Directors are described in the following table. The entire Board is given the same target but the weight of assessment is adjusted according to the area of responsibility for each member of the Board.

Target	COO	CFO	CEO	HRGS
Indikator K3L EHS Environmental indicators	10%	10%	10%	10%
Biaya Tunai per unit Unit cash cost	10%	10%	10%	10%
Arus Kas Free cash flows	10%	15%	15%	15%
EBITDA	15%	15%	10%	10%
Target produksi Production target	10%	5%	10%	5%
Amandemen Kontrak Karya Amendment of Contract of Work (CoW)	5%	15%	15%	5%
Produktivitas, kinerja dan kesejahteraan karyawan Productivity, performance and wealth of Employees	15%	15%	15%	25%
Praktik bisnis yang berkelanjutan dalam bidang lingkungan hidup, penggunaan tenaga dan interaksi sosial Sustainable business practice in environmental, use of social interaction	15%	10%	10%	10%
Implementasi proyek-proyek strategis Strategic project implementation	10%	5%	5%	10%
Total	100%	100%	100%	100%

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DIREKSI

Prosedur penetapan remunerasi

Serupa dengan kompensasi untuk Komisaris Independen, para pemegang saham menentukan remunerasi Direksi di dalam RUPST berdasarkan hasil saran dan tinjauan dari Komite Tata Kelola. Sebagaimana tahun yang lalu, pemegang saham juga mendelegasikan kewenangan untuk menentukan remunerasi Direksi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris kemudian akan menentukan jumlah remunerasi tahunan dan/atau paket remunerasi berdasarkan tinjauan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Perusahaan. Dalam melakukan peninjauan, Komite Tata Kelola Perusahaan akan menimbang beberapa faktor, antara lain, standar pasar, yaitu untuk menentukan insentif yang dibutuhkan agar dapat menarik dan mempertahankan manajemen unggul.

REMUNERATION POLICIES FOR BOARD OF DIRECTORS

Procedures for determining remuneration

Similar to the compensation for Independent Commissioners, shareholders determine the remuneration for the Board of Directors in the AGMS based on the review and recommendation results of the CGC. Similar to prior years, the shareholders delegate this authority to determine director remuneration to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners will then decide on the amount of annual salaries and/or other remuneration packages based on reviews and recommendations from the CGC. In conducting the review, the CGC considers several factors, among others, market standards to determine incentives necessary to attract and retain outstanding management talent.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Struktur Remunerasi

Remunerasi anggota Direksi pada tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Remuneration Structure

Remuneration for members of the Board of Directors in 2015 is presented in the following table:

Deskripsi Description	Jumlah (ribuan dolar AS) Amount (thousands US\$)	% dari jumlah biaya karyawan % of total employee costs
Gaji dan Imbalan pekerjaan jangka pendek Salaries and short-term employee benefits	1,911.4	2.7%
Imbalan pasca kerja Post-employment benefits	96.3	0.1%
Pembayaran berbasis saham Share-based payments	-	-
Total	2,007.7	2.8%

INDIKATOR KINERJA DIREKSI

Terdapat dua komponen dalam gaji dan imbalan Direksi, yaitu remunerasi tetap (*fixed*) dan remunerasi yang bervariasi (*variable*). Komponen remunerasi bervariasi ditentukan berdasarkan kinerja Perseroan dan kinerja Direksi.

Untuk menentukan kinerja Perseroan dan kinerja Direksi tersebut, PT Vale menggunakan hasil penilaian Direksi yang telah dijelaskan pada bagian Penilaian Terhadap masing-masing direktur.

DIRECTORS PERFORMANCE INDICATORS

There are two components included in the Board of Directors' salary and remuneration, i.e. fixed and variable components. The variable remuneration component is determined based on the Company's performance and the performance of each director.

To determine the performance of the Company and the performance of the Board of Directors, PT Vale follows the assessment process explained earlier in the section on Assessment of the Board of Directors.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.4 sebagaimana digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-E, PT Vale telah menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas berbagai fungsi terkait dengan kepatuhan dan pengungkapan informasi, khususnya yang menyangkut pasar modal, OJK, pemegang saham dan publik.

Setidaknya fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

CORPORATE SECRETARY

In accordance with Bapepam-LK Regulation No.IX.1.4 as replaced by the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 35/POJK.04/2014 and Indonesia Stock Exchange Regulation No. 1-E, PT Vale has appointed a Corporate Secretary, who acts as a liaison between the Company and its shareholders, the OJK and other stakeholders.

The Corporate Secretary is responsible for a variety of functions related to compliance and disclosure of information, particularly regarding the capital market, OJK, shareholders and public.

The minimum functions of the Corporate Secretary as structured in the OJK Regulation are as follows:

1. Monitoring the development of the capital market, especially applicable regulations in the capital market;
2. Providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners regarding compliance with laws and regulations in the field of capital markets;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan terutama dalam hal: (1) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada laman Perseroan, (2) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, (3) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, (4) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat komite-komite serta rapat-rapat komite di bawah Dewan Komisaris, (5) Pelaksanaan program pengenalan/ induksi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
4. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan hadir dalam rapat-rapat strategis Direksi sehingga memahami perkembangan terkini sehubungan dengan perencanaan strategis, operasional dan masalah-masalah penting yang dihadapi Perseroan. Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa seluruh rapat manajemen terdokumentasikan dengan baik dan mendokumentasikan tindakan-tindakan Direksi yang mencerminkan pelaksanaan yang semestinya atas tugas-tugas yang dipercayakan kepada Direksi.

Sekretaris Perusahaan juga memastikan bahwa Direksi telah mengikuti prosedur yang benar dalam tiap aksi korporasi, terutama yang bersifat signifikan, seperti dalam hal pembagian dividen sesuai dengan peraturan pasar modal.

Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa seluruh tindakan Perseroan telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk pedoman-pedoman otoritas pasar modal.

Sekretaris Perusahaan juga bertugas memberikan masukan mengenai aspek tata kelola perusahaan, terutama yang terkait dengan pemegang saham, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham. Secara internal, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas pedoman tata kelola perusahaan di Perseroan

3. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance, especially in terms of: (1) disclosure of information to the public, including the availability of information on the Company's website, (2) submission of reports to the Financial Services Authority in a timely manner, (3) implementation and documentation of the GMS, (4) the implementation and documentation of Board of Directors' meetings, Board of Commissioners' meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as committee meetings that come under the Board of Commissioners, (5) the implementation of orientation programs for the Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Act as a liaison between the Company and its shareholders, the OJK, and other stakeholders.

The Corporate Secretary is present at strategic meetings of the Board of Directors to comprehend the latest developments related to strategic planning, operations and important issues faced by the Company. The Corporate Secretary ensures that all management meetings are well documented and that documentation of the Directors' actions reflects the proper implementation of the tasks entrusted to the Board of Directors.

The Corporate Secretary also ensures that the Board of Directors has followed the appropriate procedures in all corporate actions, especially significant ones such as the distribution of dividends in accordance with capital market regulations.

The Corporate Secretary ensures that all actions by the Company are in accordance with all applicable regulatory provisions, including capital market authority guidelines.

The Corporate Secretary is also tasked with providing advice on aspects of corporate governance, particularly in relation to shareholders, including the General Meeting of Shareholders. Internally, the Corporate Secretary is responsible for the corporate governance guidelines in the Company.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

NAMA DAN RIWAYAT JABATAN SINGKAT



Ratih Amri

Sekretaris Perusahaan PT Vale saat ini dijabat oleh Ratih Amri sejak penunjukannya pada bulan Februari 2011.

Ratih Amri bergabung pada Perseroan pada bulan September 2005 dan telah menjabat sebagai Direktur Legal Perseroan sejak bulan April 2007.

Tanggungjawab beliau selaku Sekretaris Perusahaan adalah sebagaimana dikemukakan di atas. Sebagai Direktur Legal, beliau bertanggungjawab pula atas masalah-masalah hukum Perseroan, antara lain, masalah hukum strategis Perseroan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, litigasi, hubungan industrial serta aspek hukum sehubungan dengan operasional dan proyek. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, beliau memberikan laporan langsung kepada Presiden Direktur.

Ratih Amri memulai karirnya sebagai associate di salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia, Mochtar Karuwin Komar di tahun 1996. Beliau lulus dengan dua gelar sarjana, yaitu Sarjana Hukum dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, serta gelar Master di bidang hukum bisnis internasional dari Universitas Leiden, Belanda (September 1999 – September 2000). Setelah menyelesaikan gelar Masternya, Ratih Amri berkesempatan untuk bekerja pada suatu firma hukum internasional, Clifford Chance, di Amsterdam (Februari 2001 – Februari 2002) sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 2002.

NAME AND BRIEF BIOGRAPHY

Currently, the Corporate Secretary of PT Vale is Ratih Amri, who was appointed in February 2011.

Ms. Amri joined the Company in September 2005 and has served as its Legal Director since April 2007.

Her responsibility as the Corporate Secretary is as mentioned above. As the Legal Director, she is also responsible for the legal affairs of the Company, among other matters, the Company's strategic legal issues, compliance with applicable regulations, litigation, industrial relations as well as legal aspects in operations and projects. In performing her duties and responsibilities, Ms. Amri reports directly to the President Director.

Ms. Ratih Amri started her career as an associate in one of Indonesia's prominent law firms, Mochtar Karuwin Komar, in 1996. She holds double Bachelor degrees in Law and Economics from the Universitas Indonesia, and a Masters degree in International Business Law from the University of Leiden, the Netherlands (September 1999 – September 2000). After completing her Masters degree, Ms. Ratih Amri had the opportunity to join international law firm Clifford Chance, in Amsterdam (February 2001 – February 2002) prior to her return to Indonesia.

PROGRAM PELATIHAN

Sekretaris Perusahaan memperoleh pendidikan berkelanjutan, termasuk pendidikan khusus, pelatihan, workshop, seminar, konferensi, dan lain-lain, yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas peranannya sebagai Sekretaris Perusahaan.

Pada tahun 2015, Sekretaris Perusahaan menghadiri beberapa workshop dan seminar yang berkaitan dengan usaha Perseroan sebagaimana diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

- Pendidikan Profesi Konsultasi Hukum Pasar Modal Dasar I Angkatan XII
- Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
- Sukuk sebagai sumber Pendanaan Perusahaan
- Sosialisasi Peraturan OJK
- Transformasi Bisnis melalui Kepemimpinan yang berbasis Good Corporate Governance

HUBUNGAN INVESTOR

Departemen Hubungan Investor Perseroan secara aktif berkomunikasi dengan para investor dan pemegang saham, berpartisipasi dalam road-show dan pertemuan investor. Selain itu, Departemen Hubungan Investor Perseroan secara teratur mengadakan dialog dengan para analis dan secara internal bekerja secara intensif dengan Departemen Komunikasi dalam berinteraksi dengan media.

Departemen Hubungan Investor bertugas menyediakan akses terhadap informasi mengenai kinerja Perseroan kepada segenap komunitas investasi dan para pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini Perseroan menjelaskan tren dan strategi yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan para investor serta menjawab pertanyaan yang timbul.

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR

Hubungan Investor mendukung dan bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan memastikan pengungkapan informasi korporat yang bersifat wajib. Selain itu Hubungan Investor juga memastikan bahwa investor dan calon investor dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan terkini Perseroan maupun di industrinya. Fungsi ini memadukan aspek keuangan, komunikasi, pemasaran dan kepatuhan pada peraturan pasar saham, sehingga dapat tercipta

TRAINING PROGRAM

The Corporate Secretary receives continuing education, including special education, training, workshops, seminars, conferences, all of which is useful in enhancing the effectiveness of the Corporate Secretary's role.

In 2015, the Corporate Secretary attended several workshops and seminars related to the Company's business organized by the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange, as follows:

- Basic I Professional Education of Capital Market Legal Consultant, Batch XII
- Good Corporate Governance
- Sukuk as a source of corporate funding
- Socialization of OJK's regulations.
- Business Transformation through leadership on the basis of Good Corporate Governance.

INVESTOR RELATIONS

The Company's Investor Relations Department actively communicates with investors and shareholders, as well as participating in roadshows and investor meetings. In addition, the Company's Investor Relations Department holds regular dialogues with analysts and internally works closely with the Communications Department, which in turn interacts with the media.

The Investor Relations Department is in charge of providing access to information concerning the performance of the Company to the entire investment community and other stakeholders. Through this activity, the Company explains significant trends and strategies to keep investors informed and answers any questions that arise.

FUNCTIONS OF INVESTOR RELATIONS

The Investor Relations Department supports and cooperates with the Corporate Secretary to ensure the disclosure of mandatory corporate information. In addition, Investor Relations also ensures that investors and prospective investors are able to obtain information on the latest developments of the Company and the industry. These functions combine the aspects of finance, communications, marketing and compliance to the regulations in the stock market, creating an

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

komunikasi dua arah yang efektif antara Perseroan dengan komunitas finansial dan pihak-pihak lain, yang kemudian berujung pada terbentuknya valuasi yang wajar atas nilai saham Perseroan.

Tugas-tugas utama Hubungan Investor adalah:

- Membangun citra positif Perseroan dengan membina hubungan yang baik dengan investor dan analis secara interaktif, terutama melalui penyampaian informasi mengenai kinerja dan prospek Perseroan secara berkala. Informasi bagi investor dan analis disampaikan melalui *roadshow*, pertemuan dengan analis, *earning calls*, pertemuan dengan investor, dan media komunikasi lainnya.
- Mengamati perkembangan pasar modal dan memberikan saran kepada manajemen mengenai saham Perseroan.
- Melakukan korespondensi dan menanggapi permintaan informasi dari komunitas finansial.
- Sebagai perusahaan publik yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, PT Vale senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas informasi maupun akses terhadap informasi bagi masyarakat dan analis serta investor melalui laman Perseroan. Laman Perseroan menyajikan informasi terkini mengenai kemajuan operasional Perseroan, pergerakan harga saham, aksi korporasi dan informasi penting lainnya. Informasi perkembangan terkini juga disampaikan dalam format tertulis yang dikirim kepada pihak-pihak yang relevan.

Laman

Perseroan menyediakan layanan akses informasi dan data perusahaan melalui laman www.vale.com/indonesia. Laman tersebut menyediakan berbagai informasi, antara lain mengenai profil Perseroan, visi dan misi, model bisnis, informasi keuangan, berita terbaru, tanggungjawab sosial Perseroan, keterbukaan informasi, dan lain-lain. Selain sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, laman ini juga merupakan upaya Perseroan dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Laman Perseroan tersedia dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta diperbarui secara berkala untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai Perseroan kepada para pemangku

effective communications channel between the Company, the financial community, and other parties, which subsequently forms a reasonable valuation of the Company's share value.

The main tasks of Investor Relations are:

- Establishing a positive image of the Company by forging good relationships with investors and analysts in an interactive manner, primarily through conveying information concerning the Company's performance and prospects on a regular basis. Information for investors and analysts is delivered through roadshows, analyst meetings, earnings calls, investor meetings, and other communication media.
- Observing the development of the capital market and providing advice to management regarding the Company's shares.
- Maintaining correspondence and responding to requests for information from the financial community.
- As a public Company promoting the principles of disclosure, PT Vale constantly strives to improve the quality of and access to information available to analysts, investors and the public through the Company's website. This website presents the latest information on the progress of the Company's operations, the movement of stock prices, corporate actions and other important information. Information on the latest developments is also presented in a written format that is sent to relevant parties.

Website

The Company provides access to information and data about the Company through the website www.vale.com/indonesia. This website provides an abundance of information, including the Company profile, vision and mission, business model, financial information, the latest news; corporate social responsibility, and other information. More than simply a means of disseminating information to the public, the website is also an effort by the Company to apply its corporate governance practices and provide transparency to all stakeholders.

The Company's website is available in two languages, namely the Indonesian and English languages, and is updated regularly to deliver the latest Company information to stakeholders. The Company's website

kepentingan. Laman Perseroan juga menyediakan nomor kontak serta alamat email dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan.

Sebagaimana dirujuk di atas, efektif sejak 2015, laman tersebut juga merupakan akses untuk menggunakan saluran *whistleblower*.

Rilis Berita

Perseroan secara proaktif menyebarkan berita-berita terbaru terkait Perseroan dalam bentuk rilis berita kepada investor, analis, dan media pers yang telah berlangganan dan tersedia dalam *database* Perseroan. Berita tersebut berisi analisa rinci hasil keuangan dan pengungkapan berita terbaru mengenai Perseroan yang signifikan. Rilis berita juga menyediakan nomor kontak serta alamat email yang dapat dihubungi untuk komunikasi atau pembahasan secara rinci selanjutnya mengenai Perseroan. Sepanjang tahun 2015, Perseroan menerbitkan 8 (delapan) rilis berita dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Date	Judul Rilis Berita	News Release Titles
26-02-2015	Tahun 2014 tahun pencapaian PT Vale	2014 marks year of achievements for PT Vale
31-03-2015	PT Vale mengalokasikan kurang lebih sebesar 65% dari laba tahun 2014 untuk pemegang saham dan cadangan umum	PT Vale allocates approximately 65% of its profit for the year 2014 to shareholders and general reserve
30-04-2015	Biaya di triwulan pertama tahun 2015 tetap kompetitif; Memberikan dukungan di tengah penurunan harga	Costs in the first quarter of 2015 remained competitive; provided support as price declined further
29-06-2015	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris	Change of member of the Board of Commissioners
30-07-2015	Produksi triwulan kedua tahun 2015 mengalami peningkatan sementara biaya tetap kompetitif menopang penurunan harga	Production in 2Q15 increases and costs remain competitive providing support against lower prices
30-09-2015	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris	Change of member of the Board of Commissioners
22-10-2015	PT Vale kembali mencatat keuntungan meskipun harga nikel tetap rendah	Q3 marks another profitable quarter in 2015 despite low nickel price
12-11-2015	Paparan Publik 2015	Public Expose 2015

Media Massa

Perseroan selalu tepat waktu dalam menyerahkan laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Perseroan juga memuat laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan tersebut dalam surat kabar ternama di Indonesia sehari setelah pelaporan dilakukan sebagai bentuk transparansi dan sarana untuk mengakses informasi bagi para pemangku kepentingan.

Laporan-laporan maupun rilis berita tersebut di atas juga tersedia dalam laman Perseroan.

also provides contact numbers as well as email and postal addresses to facilitate further communication by stakeholders.

As referenced above, effective in 2015, the website also hosts access to the whistleblower channel.

News Releases

The Company proactively disseminates the latest news related to the Company in the form of news releases to investors, analysts, and the press who have subscribed and are listed in the Company's database. These news releases contain detailed analyses of the financial results and the latest significant disclosures about the Company. News releases also include a contact number and email address for communications or further detailed discussion regarding the Company. Throughout 2015, the Company issued 8 (eight) news releases with the following details:

Mass Media

The Company is remain punctual in submitting quarterly, bi-annual, and annual financial reports to the OJK. In addition, the Company also includes bi-annual and annual financial statements in Indonesia's leading newspapers the day after the submission, as a form of transparency and a means to communicate the information to stakeholders.

The above mentioned reports and press releases are also available on the Company's website.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Pertemuan dengan Analis dan Investor serta Roadshow

Departemen Hubungan Investor secara aktif dan rutin menemui investor bersama dengan manajemen Perseroan baik dalam pertemuan satu per satu yang diselenggarakan langsung oleh Perseroan, ataupun melalui kunjungan investor atas dasar permintaan dari perusahaan sekuritas terkemuka, partisipasi dalam konferensi investor atau *roadshow* yang diselenggarakan di Jakarta dan di Asia. Selama tahun 2015, Perseroan menghadiri beberapa konferensi investor sebagai berikut:

Meeting with Analysts and Investors and Roadshows

The Company's Investor Relations actively and regularly meets with investors collectively with the Company's management, both through one-on-one meetings held by the Company, or through investors visits based on a request from leading securities firms, earning calls, and participations in investor conferences or roadshows held in Jakarta and elsewhere in Asia. Throughout 2015, the Company attended several investor conferences as follows:

Tanggal Date	Acara Event	Jumlah Pertemuan Total of Meeting	Lokasi Location
December 3 – 5	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Site Visit		Sorowako, Indonesia
November 12	IDX Investor Summit and Capital Market Expo 2015		Jakarta, Indonesia
November 3 – 5	Macquarie & Clients Site Visit		Sorowako, Indonesia
September 21	Macquarie Indonesia Commodities Conference		Jakarta, Indonesia
June 11 – 12	CIMB 9th Annual Indonesia Conference 2015		Bali, Indonesia
March 10	UBS Indonesia Conference 2015		Jakarta, Indonesia
	Analyst Meeting 2015	25	Jakarta, Indonesia
	Investor Meeting 2015	30	Jakarta, Indonesia
	Quarterly Earnings Conference Call 2015	4	Global

Hubungan Investor di Masa Mendatang

Perseroan berkomitmen untuk memperkuat komunikasi dengan investor dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka tentang bisnis Perseroan dan pengembangannya. Hubungan Investor akan terus meningkatkan kualitas komunikasi dengan investor dengan memberikan informasi yang relevan dengan Perseroan secara tepat waktu dan transparan melalui berbagai sarana, mengkoordinasikan pertemuan investor, berpartisipasi dalam *roadshow*, memperbarui laman Perseroan secara berkala serta menanggapi pertanyaan para pemegang saham, analis dan para pemangku kepentingan.

Future Investor Relations

The Company is committed to strengthening communication with its investors in order to improve external understanding of the Company's business and its development plans. Investor Relations will continue to improve the quality of communications with investors by providing relevant information in a timely and transparent manner through various means, such as coordinating investor meetings, participating in roadshows, updating the Company's website regularly, and responding to questions from shareholders, analysts and other stakeholders.

Kontak Hubungan Investor

Saat ini Hubungan Investor Perseroan dikepalai oleh Novian Fitriawan dan bisa dihubungi melalui:

Telp : +6221 – 524 9000

Email : pti.investorrelations@vale.com

Investor Relations contact:

Currently, the Company's Investor Relations Department is headed by Novian Fitriawan, who can be contacted as follows:

By phone: +6221 - 524 9000

By email: pti.investorrelations@vale.com

INTERNAL AUDIT

Tugas dan Tanggungjawab Berdasarkan Piagam

Piagam Internal Audit PT Vale yang telah diperbaharui pada tahun 2011 merupakan pedoman bagi Internal Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara lebih independen. Piagam tersebut menetapkan bahwa Internal Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan secara administratif kepada Presiden Direktur Perseroan. Anggota Direksi dapat meminta Internal Audit untuk melakukan audit/kajian khusus tertentu, bersama dengan alokasi sumber daya yang diperlukan, dengan persetujuan Komite Audit dan Presiden Direktur.

Secara umum, Piagam Internal Audit menetapkan bahwa fungsi utama Internal Audit adalah untuk memberikan layanan kepastian dan konsultasi yang independen dan objektif dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan maupun efektivitas operasionalnya, melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perseroan.

Secara khusus, Internal Audit melakukan penilaian atas pengawasan, prosedur, dan sistem yang ada untuk memastikan:

1. Keandalan dan integritas dari informasi keuangan dan operasional, maupun dari cara - cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, memperoleh, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Keutuhan aset Perseroan.
3. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Perseroan maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dari sisi biaya.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Internal Audit bekerja sama dan memperoleh informasi dari Dewan Komisaris, Direksi, Unit Manajemen Risiko, Unit Pengendalian Internal, *Compliance Officer* dan Auditor Eksternal Perseroan.

Internal Audit bertanggungjawab atas hal- hal berikut:

1. Rencana Kerja Internal Audit – mengembangkan

INTERNAL AUDIT

Duties and Responsibilities According To Charter

The Internal Audit Charter of PT Vale, as updated in 2011, is a guideline for Internal Audit in performing their duties and responsibilities independently. The Charter stipulates that Internal Audit is responsible directly to the Board of Commissioners through the Audit Committee and administratively to the President Director. Any member of the Board of Directors may request Internal Audit to conduct a specific audit / assessment along with the necessary resource allocation, with the approval of the Audit Committee and the President Director.

In general, the Internal Audit Charter stipulates that the primary function of Internal Audit is to provide assurance and consultation services that are independent and objective in order to increase the value of the Company and its operational effectiveness, through a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management processes, internal control and corporate governance.

In particular, Internal Audit performs an assessment of controls, procedures, and systems to ensure:

1. Reliability and integrity of financial and operational information, as well as the methods used to identify, classify, acquire; and report such information.
2. The integrity of the Company's assets.
3. Compliance with the policies and procedures of the Company, as well as the applicable laws and regulations.
4. The effective and efficient use of resources from the cost perspective.

In the implementation of its duties and responsibilities, Internal Audit works together and obtains information from the Board of Commissioners, Board of Directors, Risk Management Unit, Internal Control Unit, Compliance Officer and the External Auditor.

Internal Audit is responsible for the following:

1. Internal Audit Work Plan – Developing a flexible

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

rencana kerja audit tahunan yang fleksibel dengan menggunakan metodologi berbasis risiko yang sesuai, termasuk terhadap risiko atau aspek pengendalian lain yang diidentifikasi oleh Direksi, serta menerapkan rencana kerja internal audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, termasuk, apabila dipandang perlu, penugasan atau proyek khusus sebagaimana diminta oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

2. Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko - mengkaji dan menilai sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, kepatuhan atau kesesuaiannya dengan kebijakan-kebijakan Perseroan;
3. Efisiensi dan Efektivitas - mengkaji dan menilai efisiensi dan efektivitas aspek keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan bagian-bagian lain Perseroan;
4. Langkah Perbaikan - memantau, menganalisa dan melaporkan implementasi serta dampak dari langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan oleh Internal Audit, Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Audit Khusus - melakukan penugasan audit khusus sebagaimana diperlukan dan diminta oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
6. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku - mengkaji dan menilai kecukupan dari kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan, termasuk undang-undang dan peraturan pasar modal;
7. Kepatuhan terhadap Standar Internasional bagi Praktik Profesi Audit Internal – memantau perubahan-perubahan yang signifikan pada prinsip, kebijakan, pengendalian, prosedur dan praktik internal audit di Perseroan sebagaimana diusulkan atau dipertimbangkan oleh auditor eksternal Perseroan, Komite Audit, atau Direksi;
8. Lain-Lain - melakukan penugasan atas hal-hal lain sebagaimana dapat diminta oleh Direksi dari waktu ke waktu.

Sebagai bagian dari tanggungjawabnya, Internal Audit mempersiapkan laporan-laporan berikut ini:

1. Laporan Internal Audit – Menyampaikan Laporan Internal Audit tahunan kepada Presiden Direktur, Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kecukupan

annual audit work plan by using appropriate risk-based methodology, including risks or other control aspects identified by the Board of Directors, as well as implementing an internal audit work plan which has been approved by the Board of Commissioners, including, if deemed necessary, assignments or special projects as requested by the Board of Directors and/or Board of Commissioners;

2. Internal Control and Risk Management System – Reviewing and assessing the internal control and risk management system, as adhering to or complying with the Company's policies;
3. Efficiency and Effectiveness – Reviewing and assessing the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, information technology, and other aspects of the Company;
4. Corrective Measures – Monitoring, analysing and reporting on the implementation and impacts of the corrective measures recommended by Internal Audit, the Board of Directors and the Board of Commissioners;
5. Special Audits – Conducting special audits as required and requested by the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
6. Compliance with laws and regulations – Reviewing and assessing the adequacy of the Company's compliance with the applicable rules and regulations that apply to it, including laws and regulations of the capital market;
7. Compliance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing – Monitoring the significant changes in the principles, policies, controls, procedures and practices of the Internal Audit Unit in the Company as proposed or considered by the Company's external auditors, the Audit Committee or the Board of Directors;
8. Miscellaneous – Conducting assignments on other matters as may be requested by the Board of Directors from time to time.

As part of its responsibilities, Internal Audit prepares the following reports:

1. Internal Audit Report – An annual Internal Audit report to the President Director, Board of Directors and Board of Commissioners on the adequacy

dan efektivitas proses-proses yang ada untuk mengendalikan kegiatan dan risiko Perseroan, termasuk rekomendasi dan informasi objektif mengenai temuan-temuan audit.

2. Kajian berkala atas tindakan yang direkomendasi
Memberikan kajian berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas hal-hal berikut:
 - i. Kecukupan dari tindakan-tindakan yang diambil atas hal-hal yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh Direksi atau Internal Audit yang memerlukan tindak lanjut;
 - ii. Permasalahan yang signifikan terkait dengan proses - proses yang ada untuk mengendalikan aktivitas Perseroan dan afiliasinya, termasuk potensi perbaikan atas proses-proses tersebut;
 - iii. Status dan hasil dari rencana kerja audit tahunan dan kecukupan sumber daya Internal Audit; dan
 - iv. Kemajuan yang dicapai menuju kinerja yang ditetapkan dalam matriks kinerja.

Internal Audit wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkaji dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris perbaikan yang dianggap perlu pada Piagam Internal Audit.
2. Mengevaluasi kinerjanya dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris secara berkala.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
4. Mematuhi seluruh kebijakan perseroan (termasuk, tanpa terbatas, pada Kebijakan Perdagangan Saham Perseroan dan Kebijakan Pengungkapan Informasi Perseroan), dan
5. Bekerja sama dengan Komite Audit Perseroan.

Laporan Pelaksanaan Tugas

Pada tahun 2015, Internal Audit telah melakukan 12 audit operasional sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan pada tahun tersebut dan 6 (enam) audit berdasarkan permintaan khusus.

and effectiveness of the Company's processes for controlling its activities and managing its risks, including recommendations and objective information on internal audit results.

2. Periodic assessment of recommended actions –
Periodic assessments to the Board of Directors and Board of Commissioners of:
 - i. The adequacy of actions taken regarding matters previously identified by the Board of Directors or Internal Audit as required actions;
 - ii. Significant issues relating to the Company's processes for controlling its activities and its affiliates, including potential improvements to those processes;
 - iii. The status and results of the annual audit plan and sufficiency of Internal Audit resources; and
 - iv. Progress towards achieving a defined performance matrix.

Internal Audit is obliged to do the following:

1. Review and recommend Internal Audit Charter, updating to the Board of Commissioners as appropriate;
2. Evaluate its performance and present this evaluation to the Board of Commissioners on a regular basis.
3. Maintain the confidentiality of all Company documentation, data, and information;
4. Comply with all Company policies (including, without limitation, the Company's Securities Trading Policy and Information Disclosure Policy); and
5. Cooperate with the Audit Committee.

Report Of Duty Implementation

In 2015, Internal Audit conducted 12 operational audits in accordance with the annual inspection plan for the year, and 6 (six) audits on special request.

	Audit Operasional Operational Audit	Audit Khusus Special Audit	TOTAL
Jumlah pemeriksaan sesuai Rencana Pemeriksaan Tahunan (RPT) yang disetujui The number of approved inspections in accordance with Annual Audit Plan	12	0	12
Jumlah pemeriksaan yang ditunda The number of pending inspections	0	0	0
Jumlah pemeriksaan yang dibatalkan The number of cancelled inspections	0	0	0
Jumlah pemeriksaan tambahan The number of additional inspections	0	6	6
Jumlah pemeriksaan yang dilakukan The number of inspections conducted	12	6	18

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah risiko sehubungan dengan proses bisnis dikelola dengan pengawasan internal yang efektif, termasuk menilai kepatuhan terhadap aturan Perseroan, peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2015, pemeriksaan dilakukan terhadap proses penggajian, pinjaman karyawan, hubungan industrial, pengelolaan pajak, pembelian tanah, hubungan dengan masyarakat (program sosial), hubungan dengan pemerintah, keamanan, pemeliharaan aset, pergudangan dan pengelolaan bandara dan penerbangan.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit

Internal Audit terdiri dari setidaknya satu auditor internal. Personil Internal Audit tidak diperkenankan menjabat posisi di departemen atau divisi operasional Perseroan, selain di Internal Audit. Personil Internal Audit bertanggungjawab kepada Kepala Internal Audit. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Direktur Perseroan, dengan persetujuan sebelumnya dari Dewan Komisaris Perseroan.

Sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Internal Audit bertanggungjawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris dan secara administratif kepada Presiden Direktur.

Personil Internal Audit

Tiap personil di Internal Audit diwajibkan untuk:

1. Memiliki integritas, profesionalisme, independensi, kejujuran dan objektivitas.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam praktik audit dan disiplin ilmu terkait lainnya.
3. Memiliki pengetahuan akan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal dan peraturan lain yang berlaku bagi Perseroan.
4. Berkomunikasi secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang relevan seperti dari *Institute of Internal Auditors*.
6. Mematuhi kode etik profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal Indonesia dan/ atau standar Kode Etik Audit Internal yang berlaku umum secara internasional.
7. Memahami praktik tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang ada di Perseroan.
8. Mematuhi Kode Etik Perseroan.

Inspections were conducted to assess whether risks associated with business processes were being managed with effective internal controls, and to assess compliance with the Company's policies and applicable laws and regulations. During 2015, inspections were conducted on the management of payroll, employee loans, industrial relations, tax, land acquisition, relationship with community (social program), relationship with government, security services, maintenance, warehouse, airport and aviation.

Structure and Position of Internal Audit

Internal Audit consists of at least one internal auditor. Members of Internal Audit are prohibited from holding any position in operational departments or divisions of the Company other than Internal Audit. The auditors of Internal Audit are responsible to the Internal Audit Head, who is appointed and discharged by the President Director of the Company, subject to prior approval from the Board of Commissioners.

As mentioned above, the Head of the Internal Audit Unit is functionally responsible to the Board of Commissioners and administratively responsible to the President Director.

Personnel of the Internal Audit

Each member of Internal Audit is required to:

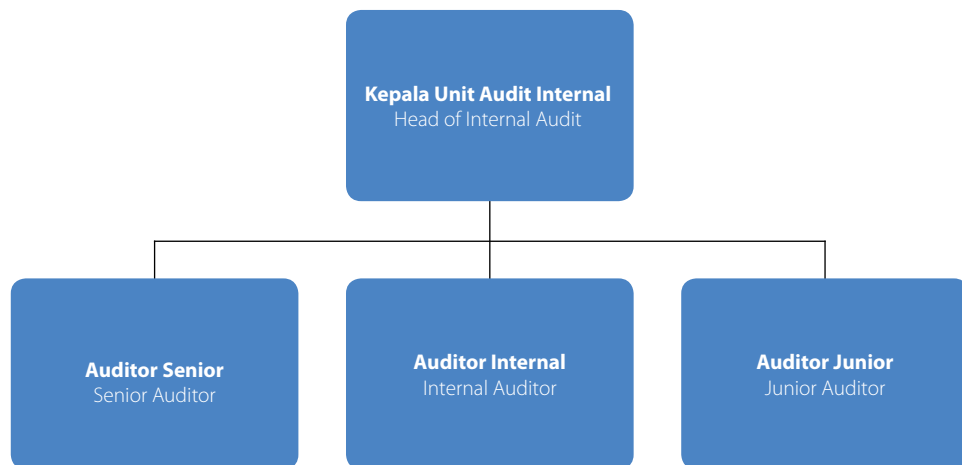
1. Display integrity, professionalism, independence, honesty and objectivity.
2. Be knowledgeable and experienced in audit practices and other relevant matters.
3. Have knowledge of laws and regulations related to capital markets and the Company.
4. Communicate effectively.
5. Comply with professional standards issued by applicable internal audit associations, such as the Institute of Internal Auditors.
6. Comply with the code of ethics established by the Indonesian Internal Audit Association and/or with generally and internationally acceptable Internal Audit Codes of Ethics.
7. Understand the Company's corporate governance practices and risk management plans.
8. Comply with the Company's Code of Ethics and Conduct.

9. Mengembangkan pengetahuan dan kompetensi audit internal yang dimiliki, antara lain dengan senantiasa mengikuti perkembangan terbaru serta praktik terbaik di profesi audit internal.

9. Maintain and build upon his/her knowledge and competence in the area of internal audit by, among other things, keeping abreast of new developments and best practices in the industry.

Setiap personil Internal Audit bertanggungjawab langsung kepada Kepala Internal Audit, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Every Internal Audit employee is directly responsible to the Head of Internal Audit, with the organizational structure as follows:



Internal Audit PT Vale saat ini memiliki tiga orang auditor internal dimana satu orang telah memiliki sertifikasi *Certified Internal Auditor* (CIA) dan dua orang lainnya dalam proses untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Ketiga auditor internal tersebut memiliki gelar sarjana Akuntansi, dimana seorang auditor telah memiliki gelar Magister Bisnis International dan seorang lagi memiliki gelar Magister Manajemen.

The Internal Audit unit of PT Vale is currently composed of three internal auditors. One auditor already has a Certified Internal Auditor (CIA) designation and two others are in the process of obtaining this certification. All three internal auditors have a Bachelor's Degree in Accounting; one also holds a Master's Degree in International Business, and another holds a Master Degree in Management.

Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Internal Audit sewaktu-waktu dengan persetujuan Dewan Komisaris apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan peraturan pasar modal, gagal atau tidak mampu dalam menjalankan fungsinya.

The President Director may dismiss the Head of the Internal Audit Unit at any time with the approval of the Board of Commissioners if the person concerned does not meet the requirements of capital market regulations, and/or fails or is unable to perform her/his functions.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Kepala Unit Audit Internal



Glorinophika

Glorinophika bergabung dengan PT Vale pada tahun 2003 dan memulai karirnya sebagai anggota Internal Audit. Beliau menjadi kepala Internal Audit sejak tahun 2014 setelah sebelumnya menjadi pejabat sementara kepala Internal Audit di tahun 2013.

Glorinophika lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 2002. Beliau kemudian memperoleh gelar Magister Psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2014.

Dasar Hukum Penunjukan

Berdasarkan Piagam Audit Internal yang diperbaharui pada tahun 2011, Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Direktur, dengan persetujuan sebelumnya dari Dewan Komisaris.

Penunjukan Kepala Internal Audit telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, dengan proses pengangkatan sebagai berikut:

1. SK Direksi No. 001/SK-DIR/X/2013 Perihal Penunjukan Glorinophika sebagai Pejabat Sementara Kepala Internal Audit, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2013 untuk menggantikan Kepala Internal Audit sebelumnya yang telah mengundurkan diri dari Perseroan.
2. Resolusi Dewan Komisaris yang menyetujui penunjukan Glorinophika sebagai Pejabat Sementara Kepala Internal Audit, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2013.

The Head of the Internal Audit Unit

Glorinophika joined PT Vale in 2003 and began her career as a member of Internal Audit. She became Head of Internal Audit since 2014, after serving as Acting Head of Internal Audit in 2013.

Glorinophika graduated from the Faculty of Economics at the University of Indonesia with a Bachelor's Degree in Accounting in 2002. She then obtained a Master's Degree in Psychology from the Faculty of Psychology at the University of Indonesia in 2014.

Legal Basis of Appointment

Based on the Internal Audit Charter, which was updated in 2011, the Head of Internal Audit shall be appointed to and dismissed from the office by the President Director, with prior approval from the Board Commissioners.

The appointment of the Head of the Internal Audit has been approved by the Board of Commissioners, following the appointment process as follows:

1. Decision of the Board of Directors No. 001/SK-DIR/X/2013 concerning the appointment of Glorinophika as Acting Head of the Internal Audit, effective September 1, 2013, to replace the previous Head of the Internal Audit who resigned from the Company.
2. Resolution of the Board of Commissioners that approved the appointment of Glorinophika as Acting Head of the Internal Audit, effective September 1, 2013.

- Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2014, yang menyetujui usulan Presiden Direktur untuk mengangkat Glorinophika sebagai Kepala Internal Audit yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2014.

Akuntan Publik Independen

Laporan keuangan PT Vale telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (anggota dari KPMG). Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah mendapat persetujuan dalam RUPS Tahunan tanggal 31 Maret 2015.

Audit Tahunan Laporan Keuangan

Tahun 2015 adalah tahun kedua PT Vale diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Registered Public Accountants	Akuntan Publik Public Accountant
2010	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Dwi Wahyu Daryoto, Ak., CPA
2011	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Dwi Wahyu Daryoto, Ak., CPA
2012	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA
2013	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA
2014	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Jongky Titus Lazuardi, S.E., CPA
2015	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Jongky Titus Lazuardi, S.E., CPA

Biaya Audit Untuk Jasa Yang Diberikan Oleh Akuntan Publik

Biaya audit tahun 2015 adalah AS\$338.000.

Jasa Akuntan Lainnya

Tidak ada jasa lainnya yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan kepada PT Vale selama tahun 2015.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Tujuan Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

Perseroan meyakini bahwa sistem pengendalian internal bertujuan untuk memberikan kepastian yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini:

- Efektivitas dan efisiensi operasi
- Keandalan pelaporan keuangan
- Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Decision of the Board of Commissioners on July 1, 2014 that approved the proposal of the President Director to appoint Glorinophika as the Head of Internal Audit, effective June 1, 2014.

Independent Public Accountants

The financial statements of PT Vale have been audited by Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member of KPMG). The appointment of the Certified Public Accountant and Registered Public Accountants was approved at the AGMS on March 31, 2015.

Annual Audits of Financial Statements

The year 2015 was the second year for PT Vale to be audited by Registered Public Accountants Siddharta Widjaja & Rekan.

Audit Fees For Services Rendered By the Public Accountants

Audit fees in 2015 amounted to US\$338,000.

Other Accounting Services

There were no other services provided to the Company by the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan in 2015.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Objectives of Internal Control and Compliance with Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

The Company believes that the Internal Control System aims to provide reasonable assurance of achieving the following three objectives:

- Effectiveness and efficiency of operations;
- Reliability of financial reporting; and
- Compliance with applicable laws and regulations.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

PT Vale merupakan anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung dari Vale S.A. (Vale), suatu perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil dan tercatat di Bursa New York Amerika Serikat. Oleh karenanya, PT Vale tunduk pada ketentuan dari Sarbanes-Oxley Act 2002, suatu peraturan Amerika Serikat mengenai kewajiban pelaporan bagi perusahaan.

Vale telah mengembangkan kerangka kerja pengendalian internal atas pelaporan keuangan berdasarkan *Standards of Internal Control - Integrated Framework* yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. Kerangka kerja ini diterapkan di seluruh anak perusahaan Vale termasuk PT Vale.

PENJELASAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal adalah proses yang terintegrasi yang mengatur tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan, yang mencakup pengawasan keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Langkah ini merupakan upaya Perseroan dalam meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang sejalan dengan pengelolaan kinerja bisnis Perseroan dan mampu mengantarkan Perseroan mencapai kinerja yang berkelanjutan. Kerangka kerja pengendalian internal tersebut mencakup:

1. Matriks Delegasi Kewenangan, yang mengatur tingkat persetujuan atas transaksi dan fungsi-fungsi.
2. Kajian dan pengelolaan risiko akibat perubahan bisnis yang signifikan.
3. Kebijakan, prosedur, dan panduan.
4. Aktivitas pengendalian atas pelaporan keuangan.
5. Manajemen perubahan untuk mengkomunikasikan informasi dan perubahan.

Matriks Delegasi Kewenangan

Dewan Komisaris telah menyetujui Matriks Delegasi Kewenangan yang mengatur bidang-bidang yang kompeten dengan limit persetujuan masing-masing agar terdapat pemisahan tugas yang jelas, serta merinci transaksi-transaksi ataupun fungsi-fungsi yang harus dimintakan persetujuan dari Presiden Komisaris dan/

PT Vale is an indirect subsidiary of Vale S.A. (Vale), a public Company incorporated under the laws of the Federal Republic of Brazil and listed on the New York Stock Exchange in the USA. Consequently, PT Vale subject to comply with the provisions of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, a regulation of the United States concerning the Company reporting obligations.

Vale has developed a framework of internal control over financial reporting based on the Standards of Internal Control – Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The framework is applicable to Vale subsidiaries, including PT Vale.

EXPLANATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The internal control system is an integrated process that regulates actions and activities conducted on an on-going basis by management and employees. These include matters of financial and operational control, as well as compliance with laws and regulations. The creation of the system represents the Company's efforts to improve the quality of Corporate Governance to bring it in line with the Company's business performance management to help the Company achieve sustainable performance. The Internal Control framework includes:

1. Implementing the Delegation of Authority Matrix, which regulates levels of approvals for transactions and functions.
2. Risk assessment and management due to significant changes in business.
3. Policies, procedures and guidelines.
4. Control activities over financial reporting.
5. Management of change for communicating information and changes.

Delegation of Authority Matrix

The Board of Commissioners has approved the Delegation of Authority Matrix, which regulates areas of competence with corresponding approval limits to ensure proper segregation of duties and indicates which transactions or functions would require prior approval from the President Commissioner and/or the Board

atau Dewan Komisaris. Matriks Kewenangan tersebut juga selaras dengan Anggaran Dasar yang menetapkan kewenangan dan tanggungjawab Direksi. Matriks Kewenangan diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.

Kajian dan Pengelolaan Risiko

PT Vale menyadari bahwa keberhasilan Perseroan juga bergantung pada seberapa baik pengelolaan risiko yang ada di setiap aspek operasional.

Kami telah memiliki standar dan sistem manajemen risiko, serta proses dan sumber daya manajemen risiko yang memungkinkan pencegahan dan mitigasi risiko secara proaktif dan sistematis.

Risiko terdapat di setiap tingkatan organisasi dan di sepanjang siklus usaha. Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan risiko strategis di tingkat perusahaan maupun pengelolaan risiko di tingkat operasional sehari-hari. Perbedaan karakteristik pengelolaan kedua aspek risiko tersebut membutuhkan sistem dan sumber daya manajemen risiko yang berbeda pula.

Pembahasan lebih mendalam mengenai pengelolaan risiko Perseroan bisa ditemukan setelah bagian Sistem Pengendalian Internal ini.

Kebijakan, Prosedur dan Panduan

PT Vale telah mengembangkan perangkat kebijakan dan prosedur formal bagi aspek keuangan maupun operasional. Kebijakan dan prosedur diformulasikan untuk memberikan standar-standar bagi pelaksanaan bisnis sesuai dengan Kode Etik dan Perilaku, peraturan dan perundang-undangan, serta standar akuntansi.

Pengendalian atas Pelaporan Keuangan

Direktur Keuangan bertanggungjawab memperbaharui kebijakan dan prosedur akuntansi saat terjadi perubahan atau pembaharuan yang signifikan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia atau saat ada pembaruan ketentuan International Financial Reporting Standards (IFRS) maupun ketentuan lainnya yang relevan.

Perseroan menerima informasi material terkini mengenai standar akuntansi ataupun peraturan baru

of Commissioners. The Delegation of Authority Matrix is also aligned with the Articles of Association, which define the authorities and responsibilities of the Board of Directors. The Delegation of Authority Matrix has been updated from time to time based on the evolving requirements of the Company's business.

Risk Assessment and Management

PT Vale acknowledges that the Company's success depends on how well it manages potential risks in all operational aspects.

We have a risk management system and standards, as well as multiple risk management processes and resources to support a proactive and systematic approach to risk prevention and mitigation.

Risks exist at all levels of our organization and throughout our entire business cycle. Therefore, it is necessary for the Company to manage strategic risks at the enterprise level as well as to manage operational risks at the day-to-day operational level. The different characteristics in managing the two types of risks require different management systems and resources.

More in-depth discussions regarding the Company's risk management can be found immediately after the Internal Control System section.

Policies, Procedures and Guidelines

PT Vale has developed a formal system of policies and procedures covering financial and operational areas. The policies and procedures are defined to set standards for business implementation in compliance with the Code of Ethics and Conduct, laws and regulations and accounting standards.

Control over Financial Reporting

The Director of Finance is responsible for updating accounting policies and procedures when there is a change or a significant renewal in Indonesia's Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) or when there is an update to International Financial Reporting Standards (IFRS) and other relevant provisions.

The Company receives updated technical material information regarding accounting standards or new

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

dalam pelaporan keuangan dari auditor eksternal, konsultan independen dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), informasi berlangganan, perwakilan pemegang saham serta Departemen Akuntansi Vale Canada Limited.

Manajemen Perubahan

Perseroan mengumumkan setiap perubahan Sistem Pengendalian Internal melalui memo kepada karyawan, pengumuman melalui intranet Perseroan dan didistribusikan dengan panduan interpretasi dan sosialisasi apabila diperlukan untuk mengevaluasi apakah perubahan tersebut telah dipahami oleh seluruh pihak.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Perseroan melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internalnya dengan melibatkan partisipasi dari manajemen senior Perseroan. Evaluasi atas sistem pengendalian internal tersebut dilakukan sehubungan dengan proses bisnis pada area sebagai berikut:

- Manajemen rantai pasokan
- Produksi
- Pengeluaran modal dan aset tetap
- Pengeluaran operasional
- Sumber Daya Manusia
- Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan
- Teknologi Informasi dan Sistem Informasi
- Hubungan Luar
- Hukum

Tahun 2015, Perseroan melalui fungsi pengendalian internal melakukan pembaharuan atas beberapa prosedur dan panduan yang mencakup:

- Proses belanja modal dan aset tetap
- Proses perhitungan dan pencatatan perpajakan Perseroan
- Proses manajemen rantai pasokan
- Proses keuangan secara umum, termasuk *treasury*, penjualan dan pencatatan piutang, pembayaran dan pengeluaran uang

regulations in financial reporting from its external auditors, independent consultants, the Indonesian Institute of Accountants (IAI), subscribed information, representatives of shareholders, and the Accounting Department of Vale Canada Limited.

Change Management

The Company announces any change of Internal Control Systems in a memo to employees, which passes through the Company's intranet and is forwarded with interpretations and socialization when necessary to evaluate whether the change has been understood by all parties.

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

PT Vale evaluated the effectiveness of the Internal Control System with the participation of the Company's senior management. Evaluation of the Internal Control System was conducted in relation to business processes in the following areas:

- Supply chain management
- Production
- Capital expenditures and fixed assets
- Operational expenditures
- Human Resources
- Environmental, Health, and Safety
- Information Technology and Information Systems
- External relations
- Legal

During 2015, the Company through the internal control function conducted updates on a number of guidelines and procedures which include on:

- Capital expenditure and fixed assets processes
- The Company's tax calculation and recording processes
- Supply chain management process
- General financial processes, including treasury, sales and receivables recording, payment and expenses.

Hasil Evaluasi Tata Kelola Perusahaan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan efektif dalam mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima (*acceptance level*) oleh Perseroan.

MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang efektif, PT Vale berkomitmen untuk mengimplementasikan sistem manajemen risiko dengan membentuk unit kerja manajemen risiko sebagai perwakilan dari anggota Direksi yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi proses manajemen risiko mencakup penilaian risiko, menyiapkan rencana mitigasi risiko, memonitor pelaksanaan rencana mitigasi, mengevaluasi proses manajemen risiko serta membuat laporan kepada Direksi dan Komite Audit terkait dengan Manajemen Risiko.

Pembentukan unit kerja manajemen risiko di sahkan oleh Direksi PT Vale melalui Piagam Unit Manajemen Risiko pada September 2015.

Sistem manajemen risiko yang diterapkan PT Vale dapat digambarkan dengan diagram berikut ini:

Outcome of The Corporate Governance Evaluation

Evaluation results showed the internal control system operating effectively in managing risk at an acceptable level to the Company.

RISK MANAGEMENT

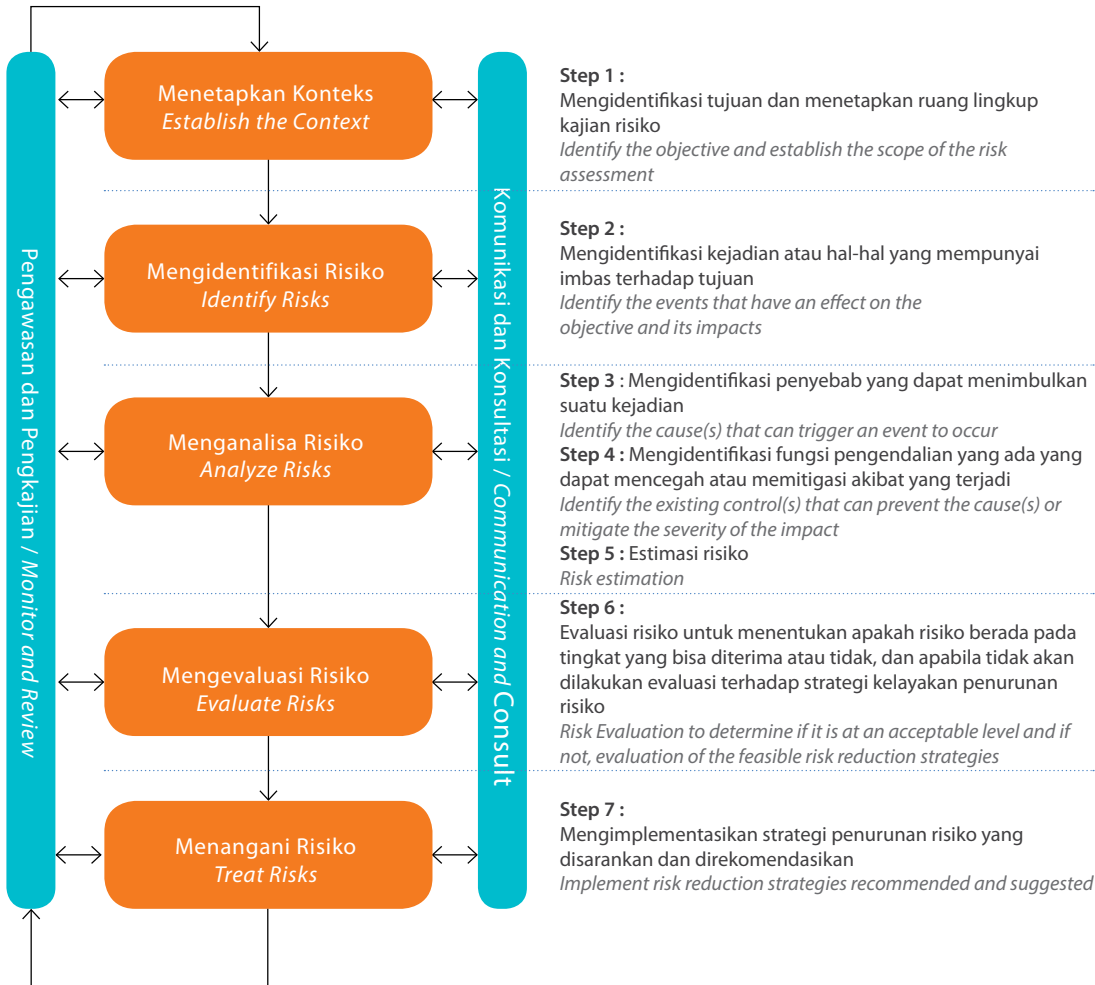
In an effort to realize the implementation of effective Corporate Governance, PT Vale is committed to implement its risk management system by establishing the risk management unit as a representative of the Board of Directors. This risk management unit is in charge of and responsible for the facilitation of the risk management process, including risk assessment, preparation for risk mitigation, oversight of the mitigation plan implementation, evaluation of the risk management process, as well as preparing reports to the Board of Directors and the Audit Committee related to Risk Management.

The establishment of the risk management unit was ratified by the Board of Directors of PT Vale through the Risk Management Unit Charter in September 2015.

The risk management system applied by PT Vale can be illustrated by the following diagram:

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO

Risiko Strategis

PT Vale memiliki sistem pengelolaan risiko strategis yang disebut *Framework for Integrated Risk Management (FIRM)* yang sesuai dengan standar ISO 31000. Sistem FIRM digunakan untuk risiko-risiko yang bersifat strategis, yang berpengaruh pada keseluruhan organisasi dan berdampak negatif terhadap tujuan-tujuan usaha kami.

Sistem FIRM memberikan panduan dan perangkat untuk mengevaluasi dan mengelola risiko bagi setiap Risk Event strategis yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebelumnya. Panduan ini mensyaratkan dikembangkannya *Maximum Foreseeable Loss (MFL)*, yaitu skenario terburuk yang mungkin terjadi dalam hal terjadi suatu *Risk Event*.

EFFORTS TO MANAGE RISK

Strategic Risk

PT Vale has a strategic risk management system called the Framework for Integrated Risk Management (FIRM), which is ISO 31000 compliant. The FIRM system is mainly used for risks that are strategic in nature, risks that impact the entire organization and risks that have a negative impact on our business objectives.

The FIRM system provides guidelines and tools to assess and manage risks after various strategic Risk Events have been identified and agreed. These guidelines require us to develop the Maximum Foreseeable Loss (MFL), which is the plausible worst-case scenario should a Risk Event occur.

Selain itu, sistem FIRM mensyaratkan adanya pemahaman akan faktor penyebab *Risk Event*, kemungkinan terjadinya faktor penyebab tersebut serta tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan jika *Risk Event* terjadi. Berbagai metode standar telah dikembangkan untuk menilai dan memilah kategori-kategori faktor penyebab, kemungkinan kejadian serta keseriusan dampak *Risk Event* sebagaimana yang dicontohkan dalam tabel-tabel di bawah ini yang diberlakukan secara seragam pada PT Vale dan pada sistem manajemen risikonya. Dengan demikian, risiko dapat dievaluasi dan dibandingkan di seluruh organisasi Perseroan

Proses Manajemen Risiko merupakan kerja sama kelompok dengan fungsi dan peranan masing masing pihak yang digambarkan dalam diagram berikut:



Process Management Role
They are responsible to manage the process ensuring that:
a) The execution of process roles fulfill its responsibilities
b) Consolidate, present and monitor the risks.
Peran sebagai Proses Manajemen
Bertanggungjawab mengelola untuk memastikan:
a) Peran pelaksana proses memenuhi tanggungjawabnya
b) Mengkonsolidasi, meyajikan, dan memonitor risiko.

Execution of Process Roles
They are responsible to ensure that controls, action plans or recommendations are effective, fulfilling its objectives. In the case of the risk owner he must coordinate all action plans and the management of the risk.
Peran sebagai Pelaksana Proses
Bertanggungjawab untuk memastikan rencana tindakan, pengendali dan rekomendasi yang efektif dan memenuhi tujuannya. Dalam hal ini sebagai pemilik risiko, dia harus mengkoordinasikan semua rencana tindakan dan pengelolaan risiko.

Risk Champion (RC) merupakan personil yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan (*empowering*) dan mempengaruhi (*influential*) bersama dengan pimpinan usaha. Bekerja bersama-sama dengan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan manajemen risiko (pengendalian risiko dan tindak lanjutnya) untuk menjaga agar indikator risiko tetap tervalidasi dengan baik. Merupakan tanggungjawabnya untuk secara triwulanan melaporkan mengenai indikator risiko tersebut kepada pimpinan usaha dan tim yang menangani risiko operasional.

In addition, the FIRM system requires us to have an understanding of Risk Event causes, the likelihood of these causes occurring, and the impact severity we can expect should a Risk Event occur. There are standardized methods to assess and categorize the likelihood of the cause and the severity of the Risk Event impact, as shown in the tables below. These methods are applied uniformly at PT Vale and across risk management systems. Thus, the risk can be evaluated and compared in the context of the Company as a whole.

The Risk Management process is a group collaboration with the function and roles of each parties can be illustrated in the following diagram:

Risk Champion (RC) Person empowered with influence strength to be the business leader. Works closely with the execution risk roles (risk, control and action plan owners) to ensure the risk dashboard is validated and precise. It is other Risk Champion's responsibility to make quarterly reports about the dashboard to the business leader and the operational risk team.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Implementasi sistem manajemen risiko dimulai dengan melakukan workshop tahunan *Enterprise Risk Assessment (ERA)* dimana tim manajemen inti PT Vale, termasuk Direksi, berpartisipasi untuk mendiskusikan *Risk Event*, penyebab, kemungkinan kejadian serta tingkat keseriusan dampaknya.

Workshop tersebut dipandu oleh *Risk Specialist* PT Vale dan seluruh *Risk Event* yang berada di atas ambang batas tertentu dievaluasi menggunakan salah satu perangkat utama dalam FIRM yaitu *Bowtie Analysis*. Perangkat ini digunakan untuk memahami suatu *Risk Event* melalui keterkaitan yang ada antara faktor penyebab, kemungkinan kejadian risiko, dampak risiko, serta faktor-faktor pengendali yang ada untuk pencegahan dan mitigasi risiko.

Bowtie Analysis juga digunakan untuk mengembangkan faktor-faktor pengendali di masa mendatang untuk pencegahan dan mitigasi risiko.

Proses *Bowtie Analysis* dilakukan untuk setiap *Risk Event* yang diidentifikasi, dan hasilnya adalah skor risiko residual. Besaran skor ini merupakan indikator akan signifikansi suatu *Risk Event* dalam hal *Risk Event* tersebut terjadi, setelah seluruh faktor pengendali yang ada saat ini maupun akan datang telah diterapkan dan berfungsi sebagaimana direncanakan.

Workshop ERA dan proses *Bowtie Analysis* harus diselesaikan sebelum dimulainya siklus anggaran PT Vale, agar dana yang diperlukan bagi seluruh faktor pengendalian yang ada maupun yang akan datang dapat dialokasikan guna menangani faktor-faktor risiko utama yang mungkin dihadapi oleh Perseroan. Faktor pengendalian yang akan datang dimasukkan dalam suatu rencana aksi, yang dikelola dan diperbaharui secara rutin oleh para *Risk Specialist* kami, dan dapat diakses oleh personil yang berwenang di PT Vale maupun Vale. Diagram di bawah ini menggambarkan siklus tahunan *Enterprise Risk Management* di PT Vale.

The implementation of the risk management system begins by conducting an annual Enterprise Risk Assessment (ERA) workshop, in which the core management team of PT Vale, including the Board of Directors, participates to discuss Risk Events, their origin, possibility of occurrence, as well as the level of impact.

The workshop is hosted by PT Vale's Risk Specialist and all Risk Events above a certain threshold will be evaluated using one of the main tools in FIRM, namely the Bowtie Analysis. This device is used to understand a Risk Event through the existing relations between the factors, possibility of risk occurrence, risk impact, as well as the existing controlling factors for risk prevention and mitigation.

The Bowtie Analysis is also utilized to develop future controlling factors for risk prevention and mitigation.

The Bowtie Analysis is performed for each identified Risk Event, the results is the residual risk score. The score number is a significance indicator of a Risk Event in the event should the Risk Event occur, after all the current and future controlling factors have been implemented and functions as planned.

The ERA Workshop and the Bowtie Analysis process must be completed prior to the budget cycle of PT Vale, therefore the funds acquired for all the current and future controlling factors can be allocated to handle the main risk factors that the Company may face. Future controlling factors will be included in an action plan, which is managed and updated regularly by our Risk Specialists, and can be accessed by authorized personnel of PT Vale and Vale. The following diagram illustrates the annual cycle of Enterprise Risk Management at PT Vale.

Siklus Enterprise Risk Manajemen PT Vale PT Vale Enterprise Risk Management Cycle



Rencana Tindakan

- Menetapkan dan menerapkan tindakan untuk memenuhi tujuan strategi risiko.
- Memastikan adanya dana untuk tindakan-tindakan yang membutuhkan anggaran
- Mengawasi dan mengelola pekerjaan yang sedang dilakukan

Risk Register

- Meninjau risiko-risiko sebelumnya
- Menambah risiko-risiko baru berdasarkan pada keadaan saat ini

ERA Workshop

- Menyetujui risiko-risiko dan MFL pada saat ini
- Menyetujui tingkat bahaya
- Menyetujui penyebab dan kemungkinan
- Menyiapkan Bowtie (apabila dibutuhkan)
- Memperbarui matrix risiko
- Dewan Direksi dan manajer

Komunikasi

- Menyajikan strategi pengelolaan risiko kepada Dewan Komisaris

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Risiko Operasional

Untuk mengelola risiko operasional, PT Vale juga memiliki sistem dan perangkat yang melekat dalam proses-proses operasional sehari-hari.

- HAZAN (*Hazard Analysis*) merupakan prosedur untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan dan pengoperasian proyek-proyek utama, sehingga risiko-risiko tersebut dapat ditangani semaksimal mungkin pada tahap desain dan rekayasa proyek.
- HAZOPS (*Hazard Operability Study*) merupakan prosedur untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi pada saat modifikasi yang signifikan pada suatu peralatan atau pemasangan peralatan baru, termasuk pengembangan rencana aksi untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko-risiko tersebut.
- JSA (*Job Safety Analysis*) merupakan prosedur untuk menganalisa risiko-risiko yang terkait dengan suatu pekerjaan lapangan yang spesifik sebelum pekerjaan tersebut dilakukan, dan kemudian mengembangkan prosedur operasi standar yang fokus kepada aspek keselamatan untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko-risiko tersebut. Prosedur-prosedur operasi standar tersebut diperbaharui secara rutin selama pekerjaan dilakukan dan juga dibahas dalam sesi-sesi *Safety Talks* sebelum giliran kerja.
- *Safety Talks* adalah sesi pertemuan seluruh personil operasional yang dilakukan sebelum dimulainya suatu giliran kerja untuk mengingatkan kembali pentingnya keselamatan kerja. Untuk fungsi-fungsi korporasi atau pendukung, pertemuan diadakan secara mingguan.
- RAC (*Critical Activity Requirements*) merupakan serangkaian standar keselamatan kerja yang dikembangkan melalui evaluasi atas aktivitas-aktivitas berisiko tinggi. Seluruh prosedur, peralatan, struktur dan aktivitas di PT Vale diwajibkan memenuhi standar-standar ini. RAC merupakan penyempurnaan dari perangkat sebelumnya yaitu *Major Hazard Standards* (MHS).
- GIP (*General Induction Program*) adalah program orientasi untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan kerja secara umum. SSIP (*Site Specific Induction Program*) adalah program orientasi untuk karyawan baru, kontraktor dan tamu yang

Operational Risk

PT Vale also has several tools and systems embedded in its day-to-day processes to manage operational risks.

- HAZAN (*Hazard Analysis*) is a procedure to identify the potential risks that could occur when major projects are constructed and operated, in order to address these risks as far as possible through project design and engineering.
- HAZOPS (*Hazard Operability Study*) is a procedure to identify potential risks that could occur when significant modification to equipment or installation is considered; this includes an action plan to reduce or eliminate the risks.
- JSA (*Job Safety Analysis*) is a procedure to analyse risks associated with a specific site work prior to the commencement of the work, and to develop standard operating procedures that focus on safety aspects to reduce or eliminate risks. The standard operating procedures are regularly modified during the work and also reviewed during *Safety Talks* sessions before a work shift starts.
- *Safety Talks* is a session attended by all operational personnel that takes place prior to a work shift to remind of the importance of safety at work. For corporate and supporting functions, the session is conducted once per week.
- RAC (*Critical Activity Requirements*) is a series of work safety standards that are developed through evaluations of high-risk activities. All procedures, equipments, structures and activities at PT Vale are required to satisfy these standards. RAC is a refinement of the previous standard, known as *Major Hazard Standards* (MHS).
- GIP (*General Induction Program*) is an orientation program to, in general, increase work safety awareness. SSIP (*Site Specific Induction Program*) is an orientation program for new employees, contractors and guests visiting the site – the

berkunjung mengenai aspek keselamatan kerja yang secara khusus terkait dengan kunjungannya tersebut.

- *Mandatory Audits/Inspections* adalah kegiatan audit/ inspeksi wajib yang harus dilakukan oleh setiap personil pemimpin di Soroako untuk menghentikan atau mencegah kondisi dan/atau perilaku yang membahayakan. Setiap personil pemimpin diharuskan menyelesaikan sejumlah tertentu audit/inspeksi setiap tahunnya untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran atas keselamatan.

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa risiko utama yang dihadapi PT Vale:

1. Risiko sehubungan dengan Kontrak Karya dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. Beberapa potensi risiko muncul sebagai bagian dari implementasi UU Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009. Secara umum, risiko ini telah teratasi dengan ditandatanganinya amendemen Kontrak Karya pada bulan Oktober 2014. Namun, dalam tahun 2015, Pemerintah mengumumkan rencananya untuk merubah UU Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009. Sampai dengan 31 Desember 2015, undang-undang tersebut belum mengalami perubahan. Terdapat wacana bahwa perubahan tersebut akan diterbitkan pada tahun 2016.
2. Risiko struktural. Seluruh operasi dan aset yang bersifat material bagi PT Vale berada di Indonesia. Kinerja PT Vale dapat dipengaruhi oleh risiko-risiko tertentu yang berada di luar kendali kami terkait dengan lokasi operasi kami. Beberapa contoh risiko tersebut mencakup ketidakstabilan sosial dan terorisme, ketidak-stabilan politik, ekonomi dan hukum yang disebabkan oleh terjadinya perubahan kebijakan pemerintah dan penerapan kebijakan yang tidak konsisten, peristiwa-peristiwa geofisika seperti banjir, semburan lumpur, atau gempa bumi, dan peristiwa-peristiwa geopolitik seperti resesi ekonomi dunia.
3. Risiko otonomi daerah. Selain kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di tingkat pemerintah pusat, PT Vale juga tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh

orientation is regarding work safety specifically related to the visit.

- *Mandatory Audits/Inspections* is a series of mandatory audit/inspection activities that have to be carried out by each lead personnel in Sorowako to stop or prevent any endangering conditions/ conduct. Each lead personnel is required to complete a certain number of audits/inspections every year to bolster safety and safety awareness.

RISKS FACED BY THE COMPANY

The following are some of the major risks faced by PT Vale:

1. Contract of Work and 2009 Mineral and Coal Mining Law risks. Some potential risks arise from the implementation of the 2009 Law on Mineral and Coal Mining. In general, the risk has been largely addressed by the signing of the amendment to the Contract of Work in October 2014. In 2015, however, the Government announced its intention to amend the 2009 Mineral and Coal Mining Law. As at December 31, 2015, the law has not been amended. The expectation is that amendments will be released in 2016
2. Structural risks. PT Vale's material assets and operations are located in Indonesia. The Company's performance could be affected by certain risks beyond our control that are associated with the location of our operations. Examples of these risks include social instability and terrorism; political, economic and legal instability caused by changes in government policies and the inconsistent application of governmental jurisdiction; geophysical events such as floods, mudflows, or earthquakes; and geopolitical events such as a global economic recession.
3. Regional autonomy risks. In addition to having to comply with laws and regulations at the central government level, PT Vale is also subject to regulations issued by regional authorities where

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

pemerintah daerah dimana lokasi penambangan dan operasional kami berada. Termasuk di dalamnya adalah kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, maupun pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Sementara kami terus berupaya memenuhi persyaratan-persyaratan setempat dan menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan Kontrak Karya, dari waktu ke waktu, permasalahan di tingkat daerah maupun lokal dapat timbul dan berdampak terhadap usaha dan operasi kami.

4. Risiko harga nikel. Harga nikel merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional kami. Harga nikel sangat berfluktuasi dan dipengaruhi oleh keseimbangan permintaan dan pasokan global maupun oleh ketersediaan dan harga produk substitusi nikel. Tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan juga akan menghadapi potensi risiko relaksasi larangan ekspor bijih oleh Pemerintah Indonesia (yang menyebabkan bertambahnya pasokan ketersediaan bijih nikel di pasaran global sehingga berdampak pada harga nikel). Karena harga nikel berada di luar kendali kami, maka kami terus mengupayakan praktik manajemen biaya yang hati-hati dan terus mencari kesempatan untuk meningkatkan efisiensi biaya guna memastikan daya saing kami.
5. Risiko operasional. Risiko operasional mencakup risiko terhadap karyawan, lingkungan hidup, produksi, aset, reputasi dan masyarakat sekitar wilayah dimana kami beroperasi. Kami memiliki program-program yang ditujukan untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut, seperti: Program Perbaikan Layanan Darurat dan Kebakaran, Program Persyaratan Keadaan Darurat Utama (program yang dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan fatal), Sistem Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan (HSMS), Sistem Pengelolaan Lingkungan (EMS), Kajian Dampak Danau (dilakukan oleh pakar *aquatic toxicology* internasional) untuk perlindungan danau di wilayah Kontrak Karya, *Golden Rules*, dan kebijakan nihil-kecelakaan.
6. Risiko bahan bakar minyak. Hingga 31 Desember 2015, salah satu bagian terbesar dari biaya produksi kami adalah biaya bahan bakar. Biaya terbesar yang

our mining and related operations are located.

This includes regulations issued by regional governments of the South, Central, and Southeast Sulawesi Provinces and the respective Regencies. While we continuously work to meet local requirements and resolve conflicts in relation to the Contract of Work, from time to time issues may arise at the regional or local levels that could have an effect on our business and operations.

4. Nickel price risks. Nickel price is a key factor that impacts our financial and operational conditions. Nickel price fluctuates and is impacted by global supply and demand for nickel as well as availability and price of substitute nickel products. There is a possibility that the Company will also face a potential risk of a relaxation of the Government's ore export policy (which will cause additional supply of nickel ore to the global market; which will impact nickel price). As nickel price is beyond our control, we continue to mitigate through efforts on best cost management practices and seek opportunities to increase cost efficiency to ensure we remain competitive.
5. Operational risks. Operational risk includes risks to our employees, the environment, production, assets, reputation and the local communities in which we operate. We have programs targeting the minimization of these risks, such as a Fire and Emergency Services Improvement Program, Critical Activity Requirement Program (designed to reduce the risk of serious accidents), Health and Safety Management System (HSMS), Environmental Management System (EMS), Lake Impact Studies (conducted by internationally recognized aquatic toxicologists) to address the protection of lakes in our CoW area, Golden Rules and a zero-accident policy.
6. Fuel cost risks. As at December 31, 2015, one of our main production expenses relate to fuel. The highest expense remains High Sulphur Fuel Oil

dikeluarkan masih untuk Minyak Bakar Bersulfur Tinggi (HSFO), walaupun di tahun 2015, biaya tersebut menunjukkan penurunan hingga 38% dari tahun sebelumnya. Angka ini termasuk biaya untuk HSFO yang digunakan di tanur pengering dan tanur pereduksi dalam proses pengolahan bijih nikel. Meskipun tren harga minyak cenderung mengalami penurunan, risiko harga minyak khususnya HSFO akan tetap melekat dan berpengaruh signifikan terhadap Perseroan. Oleh karena itu, kami akan terus mempelajari opsi untuk mengurangi ketergantungan kami setidaknya pada salah satu bahan bakar dalam operasi tanur pengering dan tanur pereduksi.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Efektivitas manajemen risiko pada PT Vale umumnya diukur berdasarkan hasil yang dicapai. Sebagai contoh, efektivitas sistem-sistem manajemen risiko operasional diukur dengan matriks kinerja keselamatan kerja seperti TRIFR (*Total Reporting Incident Frequency Rate*) dan *Environmental Exceedances*. Hasil-hasil yang tidak memuaskan ataupun berulangnya kejadian risiko yang signifikan akibat tidak memadainya pengendalian merupakan indikator untuk melakukan peninjauan terhadap sistem-sistem manajemen risiko yang ada.

PERKARA PENTING

Pada awal bulan Desember 2015, Perseroan menerima informasi bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusannya sehubungan dengan Perkara No. 1279 K/Pid.Sus/2012 mengenai dugaan pelanggaran UU Kehutanan 1999. Putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa keempat mantan karyawan PT Vale bersalah dan menghukum keempatnya atas alasan telah melakukan, untuk dan atas nama Perseroan, tindakan bertentangan hukum yaitu melanggar UU Kehutanan tahun 1999. Masing-masing individu dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Perseroan dijatuhi hukuman denda sebesar Rp5 miliar serta sita terhadap 4 (empat) kendaraan milik Perseroan. Faktanya, Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa dalam perkara ini.

Perseroan meyakini bahwa Majelis Hakim di Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan keempat mantan karyawan tersebut bersalah dan

(HSFO) despite, in 2015, the expense decreasing by up to 38% compared to the previous year. This figure includes HSFO expense used for the dryers and kilns in nickel ore processing. Regardless of this downward trend in fuel price, fuel price risk, particularly HSFO, significantly impacts the Company. The Company continues to study options to reduce fuel dependency in dryers and kilns.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The effectiveness of PT Vale's risk management system is generally measured by results. For example, the effectiveness of the operational risk management system is based on the safety performance matrix and measures such as Total Reporting Incident Frequency Rate (TRIFR) and Environmental Exceedances. Poor results or occurrences of significant Risk Events due to inadequate controls are the primary triggers to review our various risk management systems.

IMPORTANT CASE

In early December 2015, the Company received information that the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued its decision with respect of Case No. 1279 K/Pid.Sus/2012 on alleged violations of the 1999 Forestry Law. The decision provides that four (4) former PT Vale employees are guilty for having committed, on behalf of the Company, unlawful conduct contrary to the 1999 Forestry Law. Each of the 4 individuals are sentenced to 2 (two) years imprisonment. The Company has been ordered to pay a fine of Rp5 billion and 4 (four) of the Company's vehicles are to be seized. In fact, the Company has neither been named a defendant or suspect in this case.

The Company believes that the Supreme Court judges have erred in finding the individuals guilty and penalizing both the individuals and the Company.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

menghukum baik keempat karyawan tersebut maupun Perseroan. Oleh karena itu, persiapan untuk menyampaikan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ("PK") atas putusan Mahkamah Agung tersebut tengah dilakukan.

AKSES TERHADAP INFORMASI DAN DATA PERSEROAN

AKSES EKSTERNAL

Sebagai perusahaan terbuka, penting bagi Perseroan untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. Kami menyadari bahwa para pemangku kepentingan memerlukan informasi tentang kondisi dan kinerja korporasi secara langsung, cepat dan terpercaya. Oleh karenanya, kami menyediakan informasi yang transparan dan konsisten melalui berbagai sarana komunikasi meliputi beragam informasi terkini mengenai Perseroan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan yang memungkinkan mereka untuk dapat memberikan masukan bagi Perseroan.

Untuk memastikan tingkat keterbukaan informasi kami dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, Hubungan Investor senantiasa menjalankan strategi dan kegiatan untuk membina hubungan dan menyampaikan informasi kepada investor dan publik. Secara berkala, Sekretaris Perusahaan bersama Hubungan Investor melakukan pelaporan kepada Pemerintah, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama Perseroan. Pelaporan kepada otoritas pasar modal dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selain hubungan dengan pemerintah, Hubungan Investor juga menjalin komunikasi dengan komunitas pasar modal melalui *email*, *conference call*, dan pertemuan rutin. Dengan praktik keterbukaan informasi, Hubungan Investor juga menjadi media untuk mengkomunikasikan tanggapan, pertanyaan serta kritik dan saran dari investor kepada manajemen.

Communications & External Affairs memetakan peluang komunikasi serta menjaga kesinambungan penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Untuk memperluas jangkauan informasi kepada publik, *Communications & External*

Therefore, preparation is ongoing to submit a request for Reconsideration (Peninjauan Kembali – "PK") to appeal the decision of the Supreme Court.

ACCESS TO THE COMPANY'S INFORMATION AND DATA

EXTERNAL ACCESS

As a public company, it is important for the Company to fulfil its public disclosure obligations. We recognize that stakeholders need information regarding the conditions and performance of the Company in a direct, fast and reliable manner. Therefore, we provide transparent and consistent information through various means of communication concerning the latest news on the Company, which can be used by stakeholders for their consideration, enabling them to provide inputs to the Company.

To ensure our level of disclosure meets applicable requirements, Investor Relations continuously implements strategies and activities to foster relationships and convey information to investors and the public. Periodically, the Corporate Secretary and Investor Relations report to the Government, as one of the key stakeholders of the Company. Reporting to the capital market authorities is conducted through the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX).

In addition to managing the Company's relationship with the government, Investor Relations also establishes communication with the capital market community through emails, conference calls and regular meetings. Through its information disclosure practices, Investor Relations also becomes a means for communicating feedback, questions, as well as criticisms and suggestions from investors to management.

The Communications and External Affairs Departments have been mapping communication opportunities and maintaining continuity in providing information required by the stakeholders. To extend the reach of information to the public, Communications and External

Affairs juga secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi melalui rilis kepada media massa dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Affairs actively share news of any corporate actions through releases to the media in two languages, the Indonesian and English languages.

Media Komunikasi Communication Media	Pemangku Kepentingan Terkait Respective Stakeholders	Informasi yang dimuat Information Published
Laman Website	Pemegang Saham Institusi Pemerintah RI Lembaga Pendidikan Media Massa Publik Shareholders Government Institution of the Republic of Indonesia Educational Institutions Mass Media Public	Profil Perusahaan Visi, Misi, Nilai dan Strategi Informasi kinerja operasional Informasi kinerja keuangan Informasi kinerja sosial Informasi kebijakan dan regulasi Informasi praktik dan standard operasional (Tata kelola perusahaan, praktik pertambangan yang baik, Kode Etik dan Perilaku) Praktik pembangunan berkelanjutan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Hasil liputan penting kegiatan Company Profile Vision, Mission, Values and Strategy Operational Performance Information Financial Performance Information Social Performance Information Policy and Regulatory information Practices and Operational Standards Information (Good Corporate Governance, Good Mining Practice, Code of Ethics and Conduct) Sustainable Development Practices Annual Report and Sustainability Report Coverage of important events
Portal Intranet Intranet portal	Karyawan dan Kontraktor PT Vale Employees and Contractors of PT Vale	Informasi kegiatan Perusahaan Informasi kebijakan Perusahaan Informasi regulasi Perusahaan Kode Etik dan Perilaku Saluran mekanisme whistleblower Information on the activities of the Company Information on the policy of the Company Corporate Regulatory Information Code of Ethics and Conduct Mechanism channel for whistleblowers
Buletin Program Sosial Bulletin of Social Programs	Institusi Pemerintah Media Massa Publik Government institutions Mass Media Public	Kinerja program sosial Perusahaan Performance of the Company's social programs
Majalah Internal Internal magazine	Karyawan dan Kontraktor PT Vale Employee and Contractor of PT Vale	Kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan Perusahaan Informasi perkembangan Perseroan Liputan kegiatan penting Economic, social and environmental Performance of the Company Information on the development of the Company Coverage of important activities

Untuk menjangkau publik yang lebih luas, kami juga memanfaatkan media digital berupa laman Perseroan yaitu www.vale.com/indonesia. Melalui media ini kami menyampaikan informasi tentang model tata kelola perusahaan yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan kewajaran untuk menempatkan Perseroan pada pertumbuhan yang baik dan penciptaan nilai.

For broader public reach, we also utilize digital media via the Company's website, namely www.vale.com/indonesia. Through this media, we convey information concerning the governance model that is based on principles of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness to position the Company for good growth and value creation.

Di dalam website kami juga menyampaikan standar etika dan perilaku yaitu *Code of Ethics and Conduct* (Kode Etik dan Perilaku) yang berisi prinsip fundamental yang mengarahkan setiap tindakan korporasi. Prinsip-prinsip

Our website also provides our standards of ethical behaviour in the form of our *Code of Ethics and Conduct* (CoEC) that contains the fundamental principles that direct every corporate action. These principles must

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

ini wajib diikuti oleh semua orang yang bertindak atas nama perusahaan, mulai dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, pihak internal, kontraktor dan para mitra Perseroan. Penerapan standar ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran beretika di kalangan PT Vale dan menjamin kesempatan bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal atas adanya wadah komunikasi yang proaktif, transparan dan independen dalam menyampaikan tuntutan atau keluhan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi atas kinerja sosial dan lingkungan Perseroan, kami juga senantiasa menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan, terutama pemangku kepentingan lokal yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Informasi ini kami sampaikan melalui buletin program sosial yang terbit setiap bulan. Selain itu kami juga secara berkala membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan lokal melalui pertemuan musyawarah desa, musyawarah tingkat kecamatan, dan musyawarah tingkat kabupaten.

Akses Internal

Perseroan juga memiliki portal intranet yang dapat diakses oleh seluruh karyawan PT Vale. Melalui portal tersebut karyawan dapat mengakses berbagai macam informasi baik itu yang terkait dengan dirinya maupun juga terkait dengan Perseroan. Beberapa contoh informasi yang terkait dengan karyawan adalah remunerasi dan hari cuti.

Informasi yang terkait dengan Perseroan dapat berupa pengumuman, kebijakan, aturan, pedoman-pedoman baik yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik maupun aktivitas operasional Perseroan yang lainnya.

be followed by all persons acting on behalf of the Company, ranging from members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, employees, internal parties, contractors, and partners of the Company. The application of this standard is intended to enhance ethical awareness within PT Vale and to ensure that internal and external stakeholders have the opportunity to access a communication medium that is proactive, transparent and independent in conveying their demands or complaints.

To meet the demands of providing information on the Company's social and environmental performance, we foster communication with the stakeholders, especially the local stakeholders, the government and the community. This information is conveyed through a social bulletin that is published every month. In addition, we periodically establish communications with the local stakeholders through village assemblies, sub district level dialogues, and district level dialogues.

Internal Access

The Company also has an intranet portal that is accessible to all PT Vale employees. Through the portal, employees are able to access a range of information related to themselves and the Company. Examples of information related to employees could include remuneration and vacation.

Information related to the Company could be in the form of announcements, policies, rules and guidelines relating to corporate governance or other operational activities of the Company. Information related to the Company can be in the form of announcement, policies, guidelines related to corporate governance or other operational activities of the Company.

KODE ETIK DAN PERILAKU

ISI KODE ETIK DAN PERILAKU

Pada akhir tahun 2014 PT Vale telah menetapkan dan memberlakukan Kode Etik dan Perilaku yang baru (Kode Etik).

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Perilaku Vale adalah:

- Menghargai kehidupan, dengan fokus pada tindakan pencegahan, perhatian terhadap kesejahteraan di tempat kerja, kesehatan dan keselamatan, fasilitas, dan rutinitas dalam sistem PT Vale, menghargai para karyawannya;
- Mengamati tata kelola perusahaan yang baik, pembukuan, dan prinsip serta praktik manajemen, serta kejelasan, obyektif, dan ketepatan waktu dalam berkomunikasi dengan para pemegang saham, investor, dan pasar modal;
- Perlindungan, dukungan, dan kesadaran akan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan perusahaan dan diseluruh rantai pasokan sesuai dengan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Mencapai tujuan bisnis sesuai dengan kewajiban sosial perusahaan, bertindak secara sadar dan bertanggungjawab dengan menghargai aspek sosial-ekonomi dan lingkungan diseluruh kegiatan perusahaan, dan berkontribusi kepada pengembangan masyarakat dimana perusahaan beroperasi, serta mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.

Selain itu Kode Etik PT Vale memuat contoh-contoh perilaku yang diharapkan dan contoh-contoh perilaku yang tidak dapat ditolerir. Hal ini merupakan pedoman yang mencakup antara lain tentang: prinsip-prinsip dasar anti korupsi, benturan kepentingan, pelecehan, obat-obatan terlarang dan lain-lain.

PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU DI SELURUH ORGANISASI PERSEROAN SECARA GLOBAL

Setiap karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik yang berlaku dengan menandatangani suatu pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan terhadap ketentuan yang tertera di dalam Kode Etik.

CODE OF ETHICS AND CONDUCT

CONTENTS OF THE CODE OF ETHICS AND CONDUCT

In 2014, PT Vale established and enforced a new Code of Ethics and Conduct (CoEC).

The basic principles of the Code of Ethics and Conduct are as follows:

- Respecting life, with a focus on accident prevention, attention to well-being in the workplace, health and safety, safe and well-maintained facilities, routines in the PT Vale system, and appreciating our employees;
- Observing good corporate governance, accounting and management principles and practices, as well as providing clarity, objectivity and timeliness in communicating with shareholders, investors and the capital market;
- Protecting, supporting, and promoting awareness of human rights in the activities of the Company and throughout the supply chain in accordance with the principles of the Universal Declaration on Human Rights;
- Achieving business goals in accordance with the Company's social obligation, acting conscientiously and responsibly with respect to socio-economic and environmental activities throughout the company, and contributing to the development of the communities where we operate and encouraging active community participation.

In addition, the CoEC contains examples of expected behaviour and examples of behaviour that won't be tolerated. These serve as guidelines covering, among other things, the basic principles of anti-corruption; conflicts of interest; harassment; illegal drug use and more.

THE COEC STATEMENT APPLIES TO ALL LEVELS OF THE GLOBAL ORGANIZATION

Every employee and every member of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall abide by and implement the CoEC through signing a statement confirming compliance with the requirements under the CoEC.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

PENYEBARLUASAN, PENERAPAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERUSAHAAN

Pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015, para pemimpin di lingkup PT Vale telah melakukan sosialisasi Kode Etik kepada karyawan. Sosialisasi yang dimaksud berupa pembagian informasi dan diskusi aktif mengenai contoh-contoh nyata dan praktik perilaku etis yang bisa diterima atau tidak dapat diterima oleh perusahaan sebagai interpretasi atas Kode Etik tersebut. Selanjutnya, seluruh elemen perusahaan diminta memberikan komitmen untuk menerapkan Kode Etik tersebut terutama dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Salah satu kegiatan kampanye terbesar terhadap penegakan Kode Etik di tahun 2015 adalah dengan diwajibkannya seluruh karyawan PT Vale untuk menyelesaikan pernyataan konflik kepentingan, yang merupakan situasi yang seharusnya dihindari sebagaimana diatur di dalam Kode Etik.

PT Vale akan menganalisa information yang diserahkan oleh karyawan dan akan diputuskan praktek-praktek bisnis yang dianggap berpotensi menjadi konflik kepentingan. Setelah keputusan dibuat, diharapkan karyawan bisa mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut dengan baik.

Internal Audit akan secara berkala melakukan audit secara menyeluruh terhadap praktik bisnis yang ada di PT Vale untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap Kode Etik.

BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-nilai Perseroan yaitu: Kehidupan adalah hal yang terpenting, Menghargai karyawan, Menjaga kelestarian bumi, Melakukan hal yang benar, Bersama-sama menjadi lebih baik, Mewujudkan tujuan.

- Kehidupan adalah hal yang terpenting: Keselamatan jiwa lebih penting daripada materi semata.
- Menghargai karyawan: Membimbing dan membuka peluang bagi perkembangan individu, memberikan penghargaan terhadap prestasi seseorang tanpa memandang latar belakang mereka, mendukung keberagaman dan mengakui aspirasi serta kebutuhan individu.

DISSEMINATION, IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF CORPORATE ETHICS

In late 2014 and early 2015, the senior management of PT Vale initiated a program to socialize the CoEC with employees. This involved sharing information and generating discussion on what behaviours were acceptable and what behaviours were unacceptable using real-life examples. All Company employees are asked to follow the spirit and guidance of the Code in their day-to-day interactions especially during business activities.

One of the biggest campaigns with regards to the enforcement of CoEC in 2015 is the obligation for all PT Vale's employees to complete a conflict of interest declaration; a condition of which must be avoided based on the CoEC.

PT Vale will analyze the information submitted by the employees and will decide which business practices may constitute a potential actual or perceived conflict of interest. Once the decision has been made, the employee is expected to comply and implement the decision accordingly.

Internal Audit will periodically conduct a thorough audit of existing business practices within PT Vale to ensure employees comply with the CoEC.

CORPORATE CULTURE

The values of the Company are: Life matters most, Value our people, Prize our planet, Do what is right, Improve together and Make it happen.

- Life matters most: Life is more important than results or material goods.
- Value our people: Nurture and enable personal growth, reward accomplishments without judging his/her background, promote diversity and recognize individual aspirations and needs.

- Menjaga kelestarian bumi:
Komitmen terhadap perkembangan masyarakat, lingkungan hidup dan perekonomian dalam berbagai keputusan bisnis.
 - Melakukan hal yang benar:
Mendukung kepercayaan yang didasarkan pada komunikasi yang terbuka dan jelas, bertindak adil, penuh integritas dan patuh terhadap aturan hukum.
 - Bersama-sama menjadi lebih baik:
Berjuang untuk terjalannya kerja sama, peningkatan dan inovasi yang terus-menerus, penegakan disiplin kerja dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan nilai jangka panjang.
 - Mewujudkan tujuan:
Menyukai tantangan, kemampuan beradaptasi, bangga atas prestasi dan apa yang telah dilakukan dan membantu menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik.
- Prize our planet:
Commit to social, environmental and economic development in business decisions.
 - Do what is right:
Promote trust-based, open and clear communication, acting fairly, with integrity and in compliance with the law.
 - Improve together:
Strive for collaboration, continuous improvement, innovation and discipline in the way we work to generate long-term value.
 - Make it happen:
Thrill of challenges, maintain the ability to adapt, take pride in our results and help shape the world to be a better place.

Kami menyadari bahwa untuk tumbuh lebih kuat, kami harus tumbuh dengan berkelanjutan. Itu sebabnya kami terus berinvestasi dalam bisnis, karyawan kami dan masyarakat sekitar kami, agar kami dapat memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham kami dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang mendasari perilaku karyawan dan perusahaan kami.

SISTEM WHISTLEBLOWER

PT Vale telah memiliki saluran *whistleblower* yang dikenal sebagai *Vale Whistleblower Channel* atau VWC yang dibuat sebagai sarana yang dapat digunakan sebagai akses pelaporan alternatif terkait dugaan atau sangkaan adanya pelanggaran atas Kode Etik dan Perilaku PT Vale. Hal ini merupakan salah satu cara PT Vale dalam meningkatkan nilai-nilai etikanya, termasuk prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

VWC merupakan layanan pelaporan yang dikelola secara independen dan profesional oleh suatu perusahaan penyedia jasa whistleblowing di Indonesia. Laporan dapat dilakukan menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris, dan akan direspon serta diinvestigasi lebih lanjut dengan prosedur yang melindungi hak dari pelapor dan yang dilaporkan, serta sesuai hukum yang berlaku.

We recognize that in order to grow stronger, we must grow sustainably. That is why we continue to invest in our business, our employees and our neighbouring community; to provide the best results for our shareholders by sticking to the values that guide our employees and our Company.

THE WHISTLEBLOWER SYSTEM

PT Vale has established a whistleblower system, known as the Vale Whistleblower Channel or VWC to serve as an alternative channel for reporting alleged or suspected violations of the CoEC. It is one way in which PT Vale is enhancing its ethical values, together with sound corporate governance principles and adherence to prevailing laws.

VWC is a reporting service that is managed independently and professionally by a whistleblowing service provider company in Indonesia. Reports can be made in Bahasa Indonesia or English, and will be responded to and investigated further by procedures that protect the rights of the complainant and reported according to the law.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Hal-hal yang dapat dilaporkan sesuai dengan yang ditentukan antara lain: penggelapan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan PT Vale, konflik kepentingan, kecurangan laporan keuangan, penyogokan, pelecehan, diskriminasi, pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

PT Vale mempromosikan budaya yang terbuka dan transparan di dalam Perseroan. Dengan demikian, diharapkan pelanggaran dapat dihindari sebelum terjadi. Semua karyawan dihimbau untuk menyampaikan semua kekhawatiran, termasuk mengenai keselamatan, kesehatan, lingkungan ataupun etik.

SISTEM PERLINDUNGAN PELAPOR

PT Vale tidak memiliki toleransi terhadap tindakan pembalasan atau retaliasi. Tindakan pembalasan dianggap sebagai suatu pelanggaran (*misconduct*). Seluruh karyawan dihimbau untuk melaporkan setiap kasus pembalasan.

PT Vale menjamin kerahasiaan, kemandirian (tanpa intervensi), ketidakberpihakan dan kekebalan dalam penanganan, penyelidikan dan penyimpanan informasi yang diterima melalui VWC. Hak-hak perorangan dalam membuat laporan dan kerahasiaan nama-namanya juga akan dilindungi. Tidak akan ada bentuk-bentuk pembalasan atau retaliasi terhadap orang-orang yang menggunakan VWC dengan itikad baik.

SARANA DAN PENANGANAN PENGADUAN MELALUI VWC

Laporan ke VWC dapat dilakukan melalui media-media di bawah ini:

- 1) Telepon nomor 0 800 100 2233
Ini merupakan telepon bebas pulsa. Pelapor akan dilayani tanpa harus menyampaikan identitasnya.
- 2) Faksimili nomor +62 21 2993 8456
Formulir pelaporan dapat diunduh di <http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info>.
- 3) Surat elektronik ke vwv@tipoffs.info
- 4) Laman VWC dengan alamat <http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info>

Examples of possible reports include: fraud, corruption, theft, violation of PT Vale's policies, conflict of interest, financial statement fraud, bribery, harassment, discrimination, violation of environmental, health and safety.

SUBMISSION OF VIOLATION REPORTS

PT Vale promotes an open and transparent culture within the Company. Therefore, violations are expected to be avoided before incidents occur. Employees, who do have concerns, be it related to safety, health, environment or ethics, are encouraged to bring them forward.

WHISTLE BLOWER PROTECTION SYSTEM

PT Vale will not tolerate retaliation. Retaliation is regarded as misconduct. All employees are encouraged to file reports on any and all cases of retaliation.

PT Vale promises confidentiality, independence (no intervention), impartiality and immunities in the handling, investigation and filing of information received through VWC. The rights of the rapporteur and those who are reported will both be respected. No retaliation will be tolerated against those who use the VWC in good faith.

AVENUES AND HANDLING OF REPORTS THROUGH VWC

Report can be made through the following options to contact VWC:

- 1) Telephone number: 0 800 100 2233
This is a toll-free telephone number. A report through this toll-free telephone number can be made without giving any credentials.
- 2) Facsimile: +62 21 2993 8456
Reporting form can be downloaded at <http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info>.
- 3) Email: vwv@tipoffs.info
- 4) Website VWC: <http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info>

- 5) Surat ke alamat: *Vale Whistleblower Channel*, PO Box 3035, JKP 10030
Kirimkan formulir pelaporan yang diunduh dari <http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info>.
- 6) *Short Message Service* (SMS) ke nomor +62 812 8040 0622

Seluruh pengaduan yang masuk melalui VWC akan dikirimkan ke *Ethics and Conduct Office* yang selanjutnya akan ditentukan apakah perlu ditindaklanjuti dengan suatu investigasi atas pengaduan tersebut. Investigasi dapat dilakukan secara internal maupun oleh pihak eksternal yang ditunjuk, tergantung dari bentuk pengaduan yang diterima.

JUMLAH PENGADUAN

VWC secara resmi mulai dapat digunakan sejak bulan Desember 2015 dan hingga 31 Desember 2015 belum menerima pengaduan.

Program Antikorupsi

Manual Kepatuhan Antikorupsi Global yang mengatur kebijakan dan prosedur Vale S.A. serta anak perusahaan dan afiliasi di bawah kendalinya langsung ataupun tidak langsung berkenaan dengan hukum dan perundang-undangan internasional yang berlaku tentang antisuap, ditetapkan oleh Vale pada tahun 2014. Manual Vale dibuat berdasarkan serta memberikan panduan wajib sehubungan dengan unsur-unsur antikorupsi dari Kode Etik dan Perilaku Vale dan Kebijakan Kepatuhan Antikorupsi Global Vale.

Program Global di atas berlaku untuk semua pekerja (termasuk pekerja kontrak dan alih daya), peserta magang, pejabat Vale, serta anggota direksi Vale ketika bertindak atas nama Vale. Kontraktor, pemasok, vendor dan distributor, serta konsultan, perwakilan, agen, broker atau perantara lainnya yang dibayar untuk mewakili Vale, ketika mereka bertindak atas nama Vale, juga harus mematuhi Program Global. Wakil-wakil Vale juga harus melakukan upaya beritikad baik untuk menggunakan pengaruh mereka guna memastikan agar perusahaan afiliasi dimana Vale memegang 10 (sepuluh) persen atau lebih dari hak suara (misalnya, usaha patungan) menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang sebanding dengan yang dipersyaratkan dalam Program Global.

- 5) Send a letter to: *Vale Whistleblower Channel*, PO Box 3035, JKP 10030
The report form is downloadable from <http://valewhistleblowerchannel.tipoffs.info>.
- 6) Short Message Service (SMS): +62 812 8040 0622

All submitted reports via VWC will be sent to the Ethics and Conduct Office for further determination on whether or not an investigation is required to be undertaken. Investigation may be conducted internally or by an appointed external party, it will depend on the nature of the report.

NUMBER OF REPORTS

VWC was officially launched in December 2015 and as at 31 December 2015 has not received any reports.

Anti-corruption Program

A Global Anti-Corruption Compliance Manual setting forth the policies and procedures of Vale S.A. and its direct and indirect subsidiaries and controlled affiliates with respect to applicable international anti-bribery laws and regulations was adopted by Vale in 2014. The Vale Manual builds on and provides mandatory guidance in relation to the anti-corruption elements of the Vale Code of Ethics and Conduct and Vale's Global Anti-Corruption Compliance Policy.

The above Global Program applies to all employees (including temporary and agency employees), trainees, officers of Vale, as well as to members of Vale's board of directors when acting on behalf of Vale. Contractors, suppliers, vendors and distributors, and consultants, representatives, agents, brokers or other intermediaries paid to represent Vale, when they are acting on behalf of Vale, also need to comply with the Global Program. Vale representatives must also make a good faith effort to use their influence to cause affiliated companies in which Vale holds 10 (ten) percent or more of the voting power (e.g., joint ventures) to establish and maintain a system of internal controls comparable to those required under the Global Program.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Sebagai anak perusahaan Vale S.A., PT Vale menetapkan Manual Kepatuhan Antikorupsi PT Vale ("Manual PT Vale") di tahun 2015 guna mengatur kebijakan dan prosedur PT Vale berkenaan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tentang antikorupsi dan antisuap. Manual PT Vale, yang didasarkan pada Manual Vale namun telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dibuat berdasarkan serta memberikan panduan wajib sehubungan dengan unsur-unsur antikorupsi dari Kode Etik dan Perilaku PT Vale ("Kode Etik PT Vale"), Perjanjian Kerja Bersama dan Kebijakan Kepatuhan Antikorupsi PT Vale ("Kebijakan PT Vale"). Manual PT Vale, Perjanjian Kerja Bersama dan Kebijakan PT Vale secara bersama-sama disebut sebagai "Program Kepatuhan Antikorupsi PT Vale" atau "Program PT Vale".

Program PT Vale berlaku untuk semua pekerja (termasuk pekerja kontrak dan alih daya), peserta magang, pejabat PT Vale, serta anggota dewan komisaris dan direksi PT Vale ketika bertindak untuk dan atas nama PT Vale. Kontraktor, pemasok, vendor dan distributor, serta konsultan, perwakilan, agen, broker atau perantara lainnya yang dibayar untuk mewakili PT Vale, ketika mereka bertindak untuk dan atas nama PT Vale, juga harus mematuhi Program PT Vale. Wakil-wakil PT Vale juga harus melakukan upaya beritikad baik untuk menggunakan pengaruh mereka guna memastikan agar perusahaan afiliasi dimana PT Vale memegang 10 persen atau lebih dari hak suara (misalnya, usaha patungan) menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang sebanding dengan yang dipersyaratkan dalam Program PT Vale.

Kepatuhan terhadap Program PT Vale merupakan tanggungjawab penting. Jika tidak dipatuhi, PT Vale dapat mengalami konsekuensi-konsekuensi perdata, administrasi dan pidana seperti tanggungjawab, denda, rusaknya reputasi, penyitaan aset dan penutupan perusahaan. Pekerja dan manajer yang tidak patuh juga dapat memikul risiko hukum pribadi serta dikenakan tindakan disiplin oleh PT Vale, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

PT Vale adopted the PT Vale Anti-Corruption Compliance Manual (the "PT Vale Manual") in 2015 to set forth the policies and procedures of PT Vale with respect to applicable anti-bribery laws and regulations. The PT Vale Manual, has been aligned with prevailing laws and regulation in Indonesia, builds on and provides mandatory guidance in relation to the anti-corruption elements of the PT Vale Code of Ethics and Conduct (the "PT Vale Code"), Collective Labor Agreement and PT Vale's Anti-Corruption Compliance Policy (the "PT Vale Policy"). The PT Vale Manual, the Collective Labor Agreement and the PT Vale Policy are referred to jointly as the "PT Vale Anti-Corruption Compliance Program" or "PT Vale Program".

The PT Vale Program applies to all employees (including temporary and agency employees), trainees, officers of PT Vale, as well as to members of PT Vale's board of commissioners and board of directors when acting on behalf of PT Vale. Contractors, suppliers, vendors and distributors, and consultants, representatives, agents, brokers or other intermediaries paid to represent PT Vale, when they are acting on behalf of PT Vale, also need to comply with the PT Vale Program. PT Vale representatives must also make a good faith effort to use their influence to cause affiliated companies in which PT Vale holds 10 (ten) percent or more of the voting power (e.g., joint ventures) to establish and maintain a system of internal controls comparable to those required under the PT Vale Program.

Compliance with the PT Vale Program is an important responsibility. Failure to comply may expose PT Vale to civil, administrative and criminal consequences such as liability, fines, reputational damage, asset confiscation and closure of the company. Employees and managers who fail to comply may also be exposed to personal legal risk as well as disciplinary action by PT Vale, up to and including termination.

Pekerja, manajer, pemasok, konsultan, usaha patungan, dan mitra usaha dapat berkonsultasi dengan *Compliance Officer* PT Vale jika mereka memiliki pertanyaan tentang kewajiban mereka berdasarkan Program PT Vale.

Fungsi *Compliance Officer* pada PT Vale diperkenalkan pertama kali pada tahun 2015. *Compliance Officer* PT Vale merupakan suatu jabatan yang dibentuk berdasarkan Program PT Vale. Sejak September 2015, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh *Compliance Officer* mengenai Program PT Vale telah mencakup sekitar 1.500 pekerja PT Vale dari berbagai tingkatan jabatan, melalui kekhususan pendidikan dan pelatihan bagi setiap pekerja dengan menyesuaikan antara tugas atau jabatan yang diemban dan pendidikan serta pelatihan antikorupsi yang diberikan.

Pertemuan-pertemuan secara informal juga telah dilakukan dengan pejabat-pejabat pemerintahan terkait guna menginformasikan mengenai keberadaan Program PT Vale. Penyempurnaan proses persetujuan dalam berhubungan dengan pejabat pemerintah dan pihak ketiga terkait hadiah, keramahtamahan, donasi, pemberian sponsor, pengembangan masyarakat sekitar dan perekrutan pekerja juga dilakukan secara seksama guna mensukseskan terselenggaranya Program PT Vale.

Employees, managers, suppliers, consultants, joint ventures, and business partners may consult the PT Vale *Compliance Officer* if they have any questions about their obligations under the PT Vale Program.

The role *Compliance Officer* at PT Vale was established in 2015. PT Vale's *Compliance Officer* role was created under the PT Vale Program. As of September 2015, training and education regarding the PT Vale Program was conducted by the *Compliance Officer* to almost 1,500 PT Vale employees; this training and education was designed to relate to the task or role of the employees receiving the anticorruption training and education.

Informal meetings have also been conducted with relevant government officials to convey details regarding the PT Vale Program. Improved approval processes with regards to relations with government officials and third parties in connection with gifts, hospitality, donations, sponsorships, community development and employment recruitment is conducted accordingly to support the successful implementation of the PT Vale Program.

Unit Manajemen Risiko

Risk Management Unit



Avino Dhani

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 2002.

Bergabung dengan PT Vale tahun 2005 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- Internal Auditor sejak tahun 2005 hingga 2007
- Senior Financial Analyst sejak tahun 2007 hingga 2011
- Senior Financial Evaluation Analyst sejak tahun 2012 hingga 2015
- Internal Control and Compliance sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Earned Bachelor of Economics degree major in Accounting from Trisakti University in 2002.

Joined PT Vale in 2005 and held key positions including:

- Internal Auditor from 2005 to 2007
- Senior Financial Analyst from 2007 to 2011
- Senior Financial Evaluation Analyst from 2012 to 2015
- Internal Control and Compliance from 2015 to now.



Budi Handoko

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Gajah Mada tahun 2003.

Bergabung dengan PT Vale tahun 2007 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

- VPS Senior Coordinator sejak tahun 2011 hingga 2013
- Senior Coordinator Human Resources Business Partner (HRBP) sejak tahun 2013 hingga 2015
- Senior Coordinator Production Plan, Control & Optimization sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Earned Mechanical Engineering degree from Gajah Mada University in 2003.

Joined PT Vale in 2007 and held key positions including:

- VPS Senior Coordinator from 2011 to 2013
- Snr Coord. HRBP: 2013 – 2015
- Snr Coord. Production Plan, Control & Optimization: 2015 – now.



Iqbal Reza

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Sumatera Utara di tahun 1998.

Earned Electrical Engineering degree from University of North Sumatera in 1998.

Bergabung dengan PT Vale tahun 2006 dan menempati berbagai posisi kunci, yaitu:

Joined PT Vale in 2006 and held key positions including:

- Project Manager sejak tahun 2008 hingga 2009
- Superintendent IT Production System Support sejak tahun 2009 hingga 2010
- Senior IT SME & Project Manager (SAP Implementation) sejak tahun 2010 hingga 2013
- Senior Coordinator Planning, Performance & Compliance sejak tahun 2013 hingga sekarang.

- Project Manager from 2008 to 2009
- Superintendent of IT Production System Support from 2009 to 2010
- Senior IT SME & Project Manager (SAP Implementation) from 2010 to 2013
- Senior Coordinator Planning, Performance & Compliance from 2013 to now.

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		

BAGIAN I: MEMASTIKAN DASAR UNTUK SEBUAH KERANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG EFEKTIF DI INDONESIA PART I: ENSURING THE BASIS FOR AN EFFECTIVE CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK IN INDONESIA

GCG diperlukan untuk meningkatkan penciptaan sebuah pasar yang efisien dan transparan yang sejalan dengan ketentuan hukum, peraturan dan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling terkait, yaitu: pengaturan, pengawasan dan penegakan kewenangan-kewenangan sebagai pembuat kebijakan, komunitas bisnis selaku pelaku pasar, dan masyarakat selaku para pengguna produk-produk dan jasa-jasa dari komunitas bisnis.

GCG is necessary to enhance the creation of an efficient and transparent market that is consistent with prevailing laws and regulations. Hence, the implementation of GCG needs to be supported by three inter-related pillars, namely the regulatory, supervisory and enforcement authorities as regulator/policy makers, the business community as market participants, and the public as users of products and services of the business community.

1.1.	<p>Peran Pelaku Pasar Role of Market Participants</p> <p>Melaksanakan etika bisnis dengan konsisten, patuh kepada hukum, peraturan dan perundang-undangan, dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dan etika bisnis yang baik. Sebuah perusahaan juga harus meningkatkan kualitas struktur manajemen dan mekanisme kerja dan memiliki peran ombudsman untuk menangani keluhan dan/atau informasi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan.</p> <p>Implementing consistent business ethic, compliance with laws, rules and regulations, and preventing corruption, collusion and nepotism, and good business ethics. A company should also enhance the quality of management structure and working mechanism, and has the ombudsman role to accommodate complaints and/or information regarding deviation occurring within a Company.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Dasar dan Prosedur Perusahaan • Kode Etik dan Perilaku • Articles of Association (AOA) • Company's policies and procedure • Code of Ethics and Conduct 		<p>√</p> <p>√</p>		<p>Perusahaan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai bentuk kepatuhan pada peraturan OJK yang diterbitkan pada akhir tahun 2014.</p> <p>The Company has amended its Articles of Association in compliance to OJK regulation issued in late 2014.</p>
------	--	---	--	-------------------	--	--

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		

BAGIAN II: PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN PART II: GOOD CORPORATE GOVERNANCE GENERAL PRINCIPLES

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Each company must ensure that the GCG general principles are implemented on each business facets and within the entire company. GCG general principles which include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness are necessary to attain a company's sustainability by also considering the interests of shareholders and other stakeholders.

2.1.	<p>Transparansi Transparency</p> <p>Untuk melestarikan dan menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga informasi lain yang dianggap perlu oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk keputusan</p> <p>To preserve and maintain the objectivity in practicing business, a company must provide material and relevant information that are easily accessible and understandable by stakeholders. A company must take the initiative to disclose not only the issues mandated by laws and regulations, but also other information as reasonably required by shareholders, creditors and other stakeholders to form a decision.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan Kebijakan Perusahaan Website Perusahaan Annual Report Company Policies Company's Website 		√	<p>Perlu perbaikan dalam menampilkan informasi bagi investor pada website perusahaan. Several improvements were required in the information display on the Company's website.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah melakukan perbaikan dengan menyediakan informasi Anggaran Dasar Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Piagam Direksi, Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Sekretaris Perusahaan pada website Perusahaan. The Company made improvements by providing information on the Company's Articles of Association, Corporate Social Responsibility, Charter of the Board of Directors, Charter of the Board of Commissioners, and Charter of the Corporate Secretary on its website.
------	---	---	--	---	---	--

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia
Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		
2.2.	<p>Akuntabilitas Accountability</p> <p>Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan dalam sedemikian rupa sehingga sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.</p> <p>A company must be accountable for its performance transparently and fairly. Thus, a company must be managed in a proper and measurable manner, such that it is aligned with the interest of a company by also considering the interest of shareholders and other stakeholders. Accountability is a prerequisite to achieve sustainable performance.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam Unit Manajemen Risiko • Deskripsi pekerjaan karyawan dan KPI • Audit Internal Charter • Piagam Komite Audit • Laporan Triwulan dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris • Kebijakan Perusahaan • Matriks Delegasi Kewenangan (DOA) • Kode Etik dan Perilaku • Employees' job descriptions and KPI • Internal Audit Charter • Audit Committee Charter • Quarterly report of the Audit Committee to the BOC • Company policies • Delegation of Authority Matrix (DOA) • Code of Ethics and Conduct 		√	<p>Meningkatkan fungsi dan manajemen risiko dengan membentuk tim yang didedikasikan untuk bertanggungjawab atas pembuatan dokumen mencakup kebijakan manajemen risiko dan tugas-tugas yang jelas dalam mengidentifikasi dan memonitor bisnis dan operasional perusahaan.</p> <p>Increase function and risk management by establishing a dedicated team to be responsible on document production including risk management policy and clear tasks to identify and monitor the Company's business and operations.</p>	<p>Perseroan secara resmi telah membentuk Unit Manajemen Risiko pada bulan September tahun 2015 sebagai representasi dari Direksi yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi proses manajemen risiko mencakup penilaian risiko, menyiapkan rencana mitigasi risiko, memonitor pelaksanaan rencana mitigasi, mengevaluasi proses manajemen risiko serta membuat laporan kepada Direksi dan Komite Audit</p> <p>The Company has officially established a Risk Management Unit in September 2015 representing members of the Board of Directors who are responsible for facilitating the risk management process, (which includes risk assessment, preparation of a risk mitigation plan, monitoring the implementation of the mitigation plan, evaluating the risk management process and reporting to the Board of Directors and Audit Committee).</p>
2.3.	<p>Tanggungjawab Responsibility</p> <p>Perusahaan harus mematuhi hukum, undang-undang dan peraturan serta memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat dan lingkungan untuk tujuan menjaga keberlanjutan jangka panjang dari bisnis dan untuk diakui sebagai warga korporasi yang baik.</p> <p>A company shall abide by laws, rules and regulations and fulfil its responsibility to the communities and environment for the purpose of maintaining long term sustainability and to be recognized as a good corporate citizen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Dasar (AOA) • Kebijakan dan prosedur Perusahaan • Strategi CSR dan perencanaan • Laporan CSR • Kerangka CSR • Article of Association (AOA) • Company's policies and procedures • CSR strategy and planning • CSR Report • CSR Framework 	√			

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia

Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		
2.4.	<p>Kebebasan Independency</p> <p>Untuk mempercepat pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan yang tepat kekuasaan, sedemikian rupa sehingga organ perusahaan tidak saling mendominasi yang lain dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain.</p> <p>To accelerate the implementation of the GCG principles, a company must be managed independently with an appropriate balance of power, in such a manner that no single company's organ shall dominate the other and there is no intervention from other organs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik dan Perilaku • Deklarasi Benturan Kepentingan • Matriks Delegasi Kewenangan • Penunjukan Komisaris Independen dan anggota Independen Komite Audit • Code of Ethics and Conduct • Declaration of Conflict of Interest • Delegation of Authority Matrix • Appointment of Independent Commissioners and Independent Audit Committee members 	√			
2.5.	<p>Keadilan Fairness</p> <p>Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip keadilan.</p> <p>In conducting its activities, a company must always consider the interests of shareholders and other stakeholders based on a fairness principle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Dasar • Prosedur Perusahaan yang terkait dengan pemegang saham • Laporan Saham • Risalah rapat umum pemegang saham tahunan (RUPS) • Pemberitahuan perusahaan • Pengumuman RUPS • Keterbukaan informasi terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi • Kebijakan Perusahaan terkait dengan perekrutan, kemajuan karir, evaluasi kinerja dan rotasi pekerjaan. • Articles of Association • Company's procedure related to shareholder • Share reports • Minutes of annual general meeting of shareholders (GMS) • Company notice GMS • Announcement • Disclosures in relation to material and/or affiliated transactions • Company policies related to recruitment, career progression, performance evaluation and job rotation. 	√			

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia
Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		

BAGIAN III: ETIKA BISNIS DAN KODE ETIK DAN PERILAKU
PART III: BUSINESS ETHICS AND CODE OF ETHICS AND CONDUCT

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, kode etik yang dapat digunakan sebagai acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis diperlukan sehingga dapat menjadi bagian dari budaya perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus mempekerjakan prinsip-prinsip berikut:

1. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
2. Mewujudkan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Implementasi etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
3. Nilai-nilai dan etika bisnis harus dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar pemahaman yang benar dan aplikasi.

To attain success in the long term, GCG implementation needs to be based on high integrity. Hence, a code of conduct that can be used as a reference for a company's organs and its employees in applying the values and business ethics is required so that it may become a part of the company's culture. For that reason, a company must employ the following principles:

1. Each company must have company values describing morals of the company in conducting its business.
2. Materialize the moral attitude in conducting business, a company must formulate its business ethics that has been agreed by company's organs and all employees. A continuous implementation of business ethics will constitute a company culture which is a manifestation of the company's values.
3. The values and business ethics shall be further elaborated in a code of conduct to enable proper understanding and application.

3.1.	<p>Nilai-nilai Perusahaan Company Values</p> <p>Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu bagi perusahaan untuk merumuskan visi dan misinya. Company values constitute the moral basis in achieving the company's vision and mission. Therefore, before formulating the company values, it is necessary for the company to formulate its vision and mission.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Perusahaan • Company's value 	√			
3.2.	<p>Etika Bisnis Business Ethics</p> <p>Etika bisnis akan berfungsi sebagai referensi bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Business ethics shall serve as a reference for a company in conducting business including in interacting with its shareholders and other stakeholders.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik dan Perilaku • Code of Ethics and Conduct 		√		

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia

Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		
3.3.	<p>Kode Etik dan Perilaku Code of Ethics and Conduct</p> <p>Fungsi Kode Etik dan Perilaku:</p> <p>a. Kode Etik dan Perilaku adalah terjemahan dari nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis yang berguna sebagai pedoman bagi organ perusahaan dan semua karyawan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha.</p> <p>b. Kode Etik dan Perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan perilaku yang tidak etis.</p> <p>Function of Code of Ethics and Conduct</p> <p>a. Code of Ethics and Conduct is a translation of the company values and business ethics that is useful as guidance for the company organs and all employees of the company in conducting business activities.</p> <p>b. Code of Ethics and Conduct covers guidance regarding conflicts of interest, presenting and receiving gifts and donations, compliance with laws and regulations, confidentiality of information, and reporting of unethical behavior.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam Dewan Komisaris • Piagam Direksi • Anggaran Dasar • Deklarasi Benturan Kepentingan • Kontrak Kerja Karyawan • Laporan Tahunan • Kebijakan Whistleblower • Piagam Komite Tata Kelola • BOC Charter • BOD Charter • Articles of Association • Declaration of Conflict of Interest • Employees' contract employment • Annual report • Whistle-blower policy • Corporate Governance Committee Charter 		√	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi yang jelas perlu lengkap dalam masing-masing Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi • Saluran whistleblower lokal telah diformalkan dalam kuartal pertama 2015 dan Perusahaan telah melakukan langkah perbaikan dengan memberikan berbagai pilihan akses dan metode untuk melakukan pelaporan, dimana pelaporan kini dapat dilakukan melalui nomor telepon bebas pulsa, alamat email, faksimili, alamat surat PO BOX dan website. • Formalisasi Pernyataan Benturan kepentingan • Clear role and responsibility of BOC and BOD should be stated in each Charters • A local whistleblower channel was formalized in the first quarter of 2015 and the Company has performed improvements by providing options of access and methods for reporting. Reporting can now be done through a toll free phone number, email address, fax, PO BOX mailing address, and website. • Conflict of Interest Statement Formalization 	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan telah melakukan revisi terhadap masing-masing Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi dengan memberikan detail informasi yang jelas terkait peran dan tanggungjawab dan perubahan lain sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan OJK. • Perseroan akan melanjutkan sosialisasi dan kampanye penggunaan whistleblower channel di tahun 2016. • Kami telah memformalisasi Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris / Direksi, eksekutif kunci dan seluruh karyawan • The Company has revised the Charters of Board of Commissioners and Board of Directors which provide more clarity on roles and responsibilities as well as other charges for compliance with the OJK regulation. • The Company will continue the socialization and campaign of whistleblower channel in 2016.) • We have formalized the Conflict of Interest Statement of the Boards of Commissioners/ Directors, key executives, and all personnel.

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		

BAGIAN IV: ORGAN PERUSAHAAN PART IV: ORGANS OF THE COMPANY

Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus melaksanakan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip bahwa setiap organ independen dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

The organs of a company, consisting of the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors, have an important role in implementing the GCG effectively. The organs of a company shall carry out their respective functions in accordance with an applicable provision based on the principle that each organ is independent in carrying out its duty, function and responsibility in the sole interest of the company

4.1	<p>Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders</p> <p>Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan hal-hal yang mempertimbangkan diperlukan untuk menjaga kepentingan jangka panjang perusahaan Decisions made in General Meetings of Shareholders must be conducted properly and transparently by considering matters necessary to safeguard the long term interests of a company</p>	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Laporan Tahunan Surat Penunjukan Auditor Eksternal Berita Acara RUPS Anggaran Dasar Pemberitahuan dan agenda RUPS Minutes of appointment of BOC and BOD Annual Report Appointment letter of External Auditor Minutes of GMS AOA Notice and agenda of GMS 	√			
4.2	<p>Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors</p> <p>Manajemen sebuah perseroan terbatas di Indonesia mengadopsi sistem dua dewan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing dari keduanya memiliki otoritas dan tanggungjawab yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh anggaran dasar, hukum dan peraturan yang berlaku (tanggungjawab). Namun demikian keduanya memiliki tanggungjawab untuk menjaga kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki persepsi yang sama mengenai visi, misi dan nilai-nilai. The management of a limited liability company in Indonesia is adopting a two board system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors, each of which has a clear authority and responsibility based on their respective functions as mandated by the articles of association and laws and regulations (fiduciary responsibility). Yet, they both have the responsibility to maintain the company sustainability in the long term. Accordingly, the Board of Commissioners and the Board of Directors must have the same perception regarding the company's vision, mission and values.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Agenda dan risalah rapat Direksi Piagam Direksi Piagam Dewan Komisaris Piagam Komite Audit Rencana jangka panjang, strategi, anggaran tahunan Perusahaan kebijakan dan prosedur Perusahaan yang terkait dengan evaluasi kinerja Agenda and minutes of BOD meeting BOD Charter BOC Charter Audit Committee Charter Company's long term plan, strategy, annual budget Company's policies and procedures related to performance evaluation 	√		<p>Peningkatan peranan dan tanggungjawab Dewan Komisaris dinyatakan dalam Piagam Direksi, dimana telah dilakukan perubahan terhadap Piagam Dewan Komisaris sebagai bagian dari bentuk kepatuhan terhadap peraturan OJK. Improvement of role and responsibility of BOC stated in its Charters of the Board of Commissioners as the form of compliance with the OJK regulations.</p>	

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia

Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		
4.3	<p>Dewan Komisaris Board of Commissioners</p> <p>Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun, Dewan Komisaris dilarang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional kecuali dalam keadaan tertentu, misalkan ketidakhadiran seluruh anggota Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua, memiliki posisi yang sama. Tugas Ketua Dewan Komisaris sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners as an organ of the company shall function and be responsible collectively for overseeing and providing advice to the Board of Directors and ensuring that the Company implements GCG. However, the Board of Commissioners is prohibited from participating in any operational decision except in very limited conditions, i.e. absence of all members of the BOD. Each of the members of the Board of Commissioners, including the Chairman, has equal standing. The duty of the Chairman of the Board of Commissioners as primus inter pares is to coordinate the activities of the Board of Commissioners.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam Dewan Komisaris • Laporan Tahunan • Risalah Rapat Dewan Komisaris • Berita Acara RUPS • Notulen rapat Komite Tata Kelola • Piagam Komite Audit • Notulen rapat Komite Audit • Piagam Komite Tata Kelola • Notulen rapat Komite Tata Kelola • BOC Charter • Annual report • Minutes of BOC meeting • Minutes of GMS • Minutes of Corporate Governance Committee meeting • Audit Committee Charter • Minutes of Audit Committee meeting • Corporate Governance Committee Charter • Minutes of Corporate Governance Committee meeting 	Lihat sub. point 4.3 Refer to sub. point 4.3			
4.3.1	<p>Komposisi, Penunjukan dan Pengakhiran Composition, Appointment and Termination</p>			√	<p>Tidak adanya Komisaris Independen dengan latar belakang keuangan / akuntansi Absence of Independent Commissioner with finance/accounting background</p>	<p>Kami akan tetap mengupayakan untuk memperoleh Komisaris Independen dengan berbagai latar belakang keahlian keuangan, namun dalam hal Komisaris Independen dengan latar belakang Keuangan belum dapat diperoleh, maka hal tersebut tidak akan menghambat kinerja karena kami memiliki Komite Audit yang memiliki latar belakang di bidang keuangan/akuntansi yang akan mendukung kinerja dari Komisaris Independen.</p> <p>We will continue to put efforts to get an Independent Commissioners with financial expertise background, however, in case such an Independent Commissioners is not yet with us, it does not set a hurdle for our performance as we have Audit Committee members with financial/ accounting background who will support the performance of our Independent Commissioners.</p>

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia
Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		
4.3.2	Kapabilitas dan Integritas Capability and Integrity		√		Program induksi formal untuk anggota Dewan Komisaris baru Formalized induction program for new BOC member	Perseroan telah membuat langkah perbaikan dengan membuat protokol orientasi yang mengatur mengenai ketentuan dan standar program induksi bagi anggota dan Dewan Komisaris yang baru ditunjuk. Bahan orientasi tersebut diberikan dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Anggota Direksi yang baru ditunjuk juga akan melakukan aktifitas kunjungan dan pengenalan kantor pusat, lokasi plant site dan Operational Site. The Company has made improvement by providing induction protocol which governs terms and standard of induction program for newly appointed members of Board of Director and Board of Commissioners. Induction materials will be provided in the form of soft copy as well as hard copy. The new members will also conduct a site visit and introduction visit to headquarter, plant location and operational site.
4.3.3.	Fungsi dan Peranan Role and Function		√	√	Perbaikan peran Dewan Komisaris tertulis dalam Piagam Improvement of the role of BOC stated in its Charter	
4.3.4.	Komite-komite Committees		√		Perbaikan Piagam Komite Tata Kelola Improvement of the Corporate Governance Committee Charter	Piagam Komite Tata Kelola telah direvisi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di triwulan pertama 2015. The Corporate Governance Committee charter will be revised in accordance with the prevailing laws and regulations in first quarter 2015.
4.3.5.	Laporan Akuntabilitas dari Dewan Komisaris Accountability Report of the Board of Commissioners		√			

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia

Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		
4.4	<p>Direksi Board of Directors</p> <p>Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Setiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas masing-masing dan pihak berwenang. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap menjadi tanggungjawab bersama. Posisi masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter Pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.</p> <p>The Board of Directors as a company organ shall function and be responsible collegially for the management of the company. Each member of the Board of Directors can carry out its duty and take decisions in accordance with their respective assignments and authorities. However, the execution of tasks by each member of the Board of Directors remains to be a collective responsibility. The position of each respective member of the Board of Directors including President Director is equal. The duty of the President Director as primus inter pares is to coordinate the activities of the Board of Directors.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Dasar • Piagam Dewan Komisaris • Risalah pertemuan Komite Tata Kelola • Berita Acara RUPS • Domisili anggota Direksi • Struktur Organisasi • Deskripsi pekerjaan Direksi dan manajemen • Surat penunjukan Sekretaris Perusahaan • Laporan Direksi • Laporan Tahunan • Article of Association • BOC Charter • Minutes of Corporate Governance Committee meetings • Minutes of GMS • Domicile of BOD members • Organization Chart • Job descriptions of BOD and management • Corporate Secretary appointment letter • BOD reports • Annual Report 	Lihat sub. point 4.4 Refer to sub. point 4.4			
4.4.1	Komposisi, Penunjukan dan Pengakhiran Composition, Appointment and Termination		√			
4.4.2	Kapabilitas dan Integritas Capability and Integrity		√		Program induksi formal untuk anggota Direksi yang baru ditunjuk Formal induction program for new appointed BOD member	
4.4.3.	Peran dan Fungsi Role and Function		√		<p>Membuat sebuah kebijakan manajemen risiko dan struktur manajemen risiko Formalized risk management policy and risk management structure</p> <p>Membuat Piagam Sekretaris Perusahaan Formalized Corporate Secretary charter and appointment letter</p>	<p>Perseroan secara resmi telah membuat Piagam Sekretaris berdasarkan ketentuan OJK. The Company has formally established the Corporate Secretary Charter based on OJK provisions</p>
4.4.4.	Laporan Akuntabilitas Direksi Accountability Report of the Board of Directors		√			

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		

BAGIAN V: HAK DAN PERAN PEMEGANG SAHAM PART V: THE RIGHTS AND ROLE OF SHAREHOLDERS

Pemegang Saham sebagai pemilik modal harus memiliki hak dan tanggungjawab tertentu dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab mereka, para pemegang saham harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
Shareholders shall have certain rights and responsibilities within the Company in accordance with laws and regulations and the articles of association of the company. In exercising their rights and responsibilities, the shareholders shall observe the following principles:

Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab mereka, mereka juga harus mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan.
The shareholders must be aware that, in exercising their rights and responsibilities, they shall also consider the sustainability of the company.

Perusahaan harus menjamin pelaksanaan hak kepemilikan dan tanggungjawab pemegang saham berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
The company shall facilitate the exercise of ownership rights and responsibilities of the shareholders based on the principle of fairness and in accordance with laws and regulations and the articles of association.

5.1	Hak Pemegang Saham dan Fungsi dari Kunci Kepemilikan Rights of Shareholders and Key Ownership Function Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. The rights of shareholders shall be protected and exercised in accordance with laws and regulations and the articles of association of the company.	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Dasar Perseroan • Pemberitahuan GMS • Laporan Keuangan yang telah di audit • Article of Association • Notice of GMS • Audited financial statements 	√			
5.2	Tanggungjawab Perusahaan terhadap pemegang Saham Responsibility of the Company against Shareholders Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar A company shall protect the rights of its a shareholders in accordance with laws and regulations and the articles of association	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Dasar Perseroan • Pemberitahuan dan Agenda RUPS • AOA • Notice and agenda of GMS 	√			

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia

Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		

BAGIAN VI: HAK DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN PART VI: THE RIGHTS AND ROLE OF OTHER STAKEHOLDERS

Stakeholder - selain dari pemegang saham - adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan secara langsung dipengaruhi oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama di mana perusahaan beroperasi. Harus ada hubungan yang adil dan setara antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berdasarkan hukum dan atau melalui kesepakatan bersama yang berlaku bagi masing-masing pihak. Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan:

Stakeholders - aside from the shareholders - are those having an interest in a company and are directly affected by the strategic and operational decisions of the company, including employees, resource providers, and communities particularly in which the company operates. There should be a fair and equal relationship between a company and its stakeholders based on law and or through mutual agreements applicable to each respective party. For a sound relationship between a company and its stakeholders, the following principles shall be observed:

- sebuah perusahaan harus memastikan bahwa tidak akan ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, kelompok, dan jenis kelamin dan perlakuan yang adil dan jujur dalam mempromosikan pengembangan karyawan sesuai dengan kompetensi masing-masing, kemampuan, pengalaman dan keterampilan adalah dibuat; a company shall ensure that there shall be no discrimination exists based on ethnic, religion, race, group, and gender and that a fair and honest treatment in promoting the development of employees in accordance with their respective competencies, capabilities, experience and skills is created;
- perusahaan dan penyedia sumber daya yang harus saling bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling menguntungkan; a company and its resource providers shall cooperate with each other in the interest of both parties based on a mutual benefit principle;
- perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat di mana perusahaan beroperasi, dan pengguna produk dan jasa perusahaan. a company shall consider the public interest, particularly those of the communities in which the company operates, and the users of products and services of the company.

6.1.	Karyawan Employees	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Perusahaan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen karyawan dan kesehatan, keselamatan dan lingkungan (HSE) • Perjanjian Kerja Bersama (PKB) • Company's policies and procedures related to employees management and health, safety and environment (HSE) • Collective Labor Agreement (CLA) 		√		
6.2.	Penyedia Sumber Daya Resource Providers	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan dalam Perjanjian dengan Pihak Ketiga • Contract Agreements with third parties 	√			
6.3	Masyarakat dan Pengguna Produk dan Jasa Community and User of Products and Services	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Penjualan Sales • Kerangka kerja CSR • Laporan CSR • Laporan Keberlanjutan • agreement • Framework • CSR report • Sustainability report 	√			

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia
Adoption of Indonesian GCG Code

No.	Prinsip-prinsip Principles	Referensi References	Pelaksanaan Implementation		Area Perbaikan Area for Improvements	Rencana Kerja dan Target Action Plan and Target
			Penuh Full	Sebagian Partial		

BAGIAN VII: PELAKSANAAN TERHADAP PERNYATAAN YANG TERDAPAT PADA PERATURAN
PART VII: IMPLEMENTATION STATEMENT OF THE CODE

Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan Pedoman GCG dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus didukung oleh laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Pernyataan ini diperlukan agar para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Pedoman GCG dalam perusahaan.

Each company shall make a statement regarding the conformance of its GCG implementation with the GCG Code in its annual report. The statement shall be supported by a report outlining the structure and work mechanism of the company organs as well as other important information relevant to the implementation of GCG. This statement is necessary to enable the shareholders and other stakeholders, including the regulator, to evaluate the extent of the application of the GCG Code within the company.

7.1.	Pelaksanaan terhadap pernyataan yang terdapat pada peraturan Implementation Statement of the Code	<ul style="list-style-type: none"> Laporan GCG Laporan Tahunan GCG report Annual Report 		√	<p>Dewan Komisaris dan pengukuran kinerja Komitennya BOC and its Committees performance measurement</p> <p>Efektivitas pengendalian internal The effectiveness of internal controls system</p>	<p>Pada Tahun 2015 Perseroan telah memformalkan evaluasi performa yang ada. Perseroan akan melakukan evaluasi tahunan terhadap parameter Indikator Performa Utama dan memberikan kriteria yang jelas untuk memudahkan Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengukur performa melalui self-assessment dengan menggunakan Indikator Performa Utama tersebut.</p> <p>Perseroan telah melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internalnya dengan melibatkan partisipasi dari manajemen senior Perseroan. Informasi ini telah disampaikan pada halaman 290 di Laporan Tahunan 2015</p> <p>In 2015 the Company formalized the existing performance evaluation. The Company will conduct annual evaluation on the Key Performance Indicators parameters and provide clear criteria to facilitate the Board of Directors and the Board of Commissioners in measuring performance through self-assessment using the Key Performance Indicators.</p> <p>The Company has evaluated the effectiveness of its internal control system by participation of the senior management. This information has been presented on page 290 of the 2015 Annual Report</p>
------	--	---	--	---	--	--

Laporan Komite Audit

Audit Committee Report

Dewan Komisaris memiliki Komite Audit yang terdiri dari Irwandy Arif sebagai Ketua, serta Sidharta Utama dan Dedi Rudaedi sebagai anggota independen. Ketua Komite Audit juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit diatur dalam Piagam Audit yang diperbaharui dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada 11 November 2014. Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris dan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk memantau proses serta keakuratan pelaporan keuangan, pengelolaan risiko dan audit Perseroan.

Sepanjang tahun 2015, Komite Audit telah mengadakan 5 (lima) kali rapat dengan manajemen dan Unit Audit Internal Perseroan. Rapat-rapat tersebut membahas laporan keuangan, permasalahan hukum dan lingkungan hidup, pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko, serta kegiatan dan permasalahan audit internal.

Selain rapat rutin Komite Audit, anggota-anggota komite, baik secara kelompok maupun individual, juga mengadakan rapat dengan Kepala Unit Audit Internal untuk membahas kemajuan proses audit dan memberi bantuan teknis dalam menjalankan audit internal.

Untuk memastikan para anggota Komite Audit dapat bekerja dengan efisien dan efektif, maka pada tahun 2015 dibuatlah prosedur kerja serta rencana kerja tahunan sebagai panduan bagi anggotanya dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya.

Berikut rangkuman dari kegiatan utama yang dilakukan di dalam rapat-rapat Komite Audit, termasuk peninjauan terhadap:

- Laporan keuangan triwulanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014, 31 Maret 2015, 30 Juni 2015 dan 30 September 2015.
- Presentasi dari audit eksternal Perseroan mengenai audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk komentar mengenai perbaikan proses-proses pengendalian serta tanggapan manajemen.

The Audit Committee of the Board of Commissioners consists of Mr. Irwandy Arif as Chairman, and Mr. Sidharta Utama and Mr. Dedi Rudaedi as independent members. The Chairman of the Audit Committee is also an Independent Commissioner.

The Audit Committee's roles and responsibilities are governed by the Audit Committee Charter, dated November 11, 2014. The Audit Committee reports directly to the Board of Commissioners and assists the Board in fulfilling its oversight responsibilities with regard to the process and integrity of financial reporting, risk management and audit of the Company.

In 2015, the Audit Committee has met with the Company's management and Internal Audit Unit on 5 (five) different occasions. In these Audit Committee meetings, financial reports, potential legal and environmental issues, internal control and risk management processes, internal audit activities and audit issues were discussed.

In addition to the regular Audit Committee meetings, members, both as a group or individually, met with the Head of Internal Audit Unit to discuss new developments and to provide technical support for the internal audit process.

To ensure that the Audit Committee members can work efficiently and effectively, in 2015, the working procedures as well as the annual work plan were established as guidelines for its members in carrying out their roles and responsibilities.

The following is a summary of the main activities undertaken in the Audit Committee meetings, including reviews on:

- The quarterly financial statements for the period ended December 31, 2014, March 31, 2015, June 30, 2015 and September 30, 2015.
- Presentations given by the Company's external auditor with regard to the audit of the annual financial statements of the Company for the 2014 fiscal year, including comments on control processes improvement as well as management's responses.

- Penilaian dan perlakuan pajak yang berpotensi berdampak pada laporan keuangan Perseroan.
- Kasus hukum, keselamatan kerja dan lingkungan yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap Perseroan.
- Laporan audit internal serta status pelaksanaan rekomendasi auditor.
- Status pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Unit Audit Internal untuk tahun 2014 dan 2015, dan dukungan yang dibutuhkan Unit Audit Internal untuk melaksanakan tugasnya.
- Rencana kerja Unit Audit Internal untuk tahun 2016, beserta penilaian risiko, lingkup serta metodologinya.
- Prosedur kerja Komite Audit
- Rencana kerja Komite Audit tahun 2015 dan 2016
- Tax assessments and treatments that potentially affect financial statements.
- Legal, occupational safety and environmental issues with potential significant impact to the Company.
- Internal audit reports as well as implementation status of auditors' recommendations.
- Status of 2014 and 2015 Internal Audit Plan and support required by the Internal Audit Unit to perform their duties.
- 2016 Internal Audit Plan and its risks assessment, scope and methodology.
- Audit Committee Operating Procedures
- Audit Committee working plan for 2015 and 2016

Pendapat utama yang disampaikan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan 2015 telah dibuat secara wajar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
- Telah diambil tindakan untuk mengatasi permasalahan yang dibahas oleh Auditor Eksternal.
- Mengetahui bahwa manajemen telah mengambil langkah penting untuk meningkatkan pengendalian internal Perseroan untuk meminimalkan kelemahan pada pengendalian internal baik pada desain maupun pelaksanaannya.
- Pengendalian internal telah dilakukan untuk mengelola risiko pada tingkat yang wajar.

Key opinions expressed by the Audit Committee include:

- The financial statements of the Company for the fiscal years of 2014 and 2015 have been prepared and fairly presented in accordance with the Indonesian Accounting Principles (PSAK).
- Action has been taken to address issues noted by the External Auditor.
- Acknowledgement that management has taken significant effort in improving the Company's internal controls to minimize the gaps of controls in design and/or in practice.
- Internal controls have been implemented to manage risks in an acceptable level.

Februari 2016 / February 2016



Irwandy Arif
Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Daftar Isi Contents



Program Sosial Terpadu Integrated Social Program	328	PTPM Bidang Sarana Umum PTPM in Public Facility	336
Kegiatan Program Sosial Social Program Activities	329	Dampak Kegiatan Program Sosial Terpadu Impact of Integrated Social Program Activities	337
Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) Community Action Plan (PMDM)	330	Pencapaian Program Sosial Tahun 2015 Social Program Achievement In 2015	338
PTPM Bidang Kesehatan Community Empowerment in Health	331	Lingkungan Hidup Environment	345
PTPM Bidang Pendidikan Community Empowerment in Education	333	Pelaksanaan Program Pengendalian Dampak Lingkungan Implementation of The Environmental Impact Management Program	347
PTPM Bidang Sosial-Budaya dan Olahraga PTPM In Socio-Culture and Sports	334	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety (OHS)	350
PTPM Bidang Ekonomi dan Pengembangan Kapasitas Community Empowerment in the Field of Economics and Capacity Development	335	Tanggungjawab Terhadap Konsumen Responsibility to Consumers	356



Danau Matano
Matano Lake

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

PT Vale terus memprioritaskan penerapan pengelolaan lingkungan dan program pengembangan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan prinsip kerja sama dan keberlangsungan PT Vale.

PT Vale continues to prioritize the implementation of environmental management and community development programs that are accountable and that adhere to Vale's partnership and sustainability principles.



Pelatihan *life skill* dengan memanfaatkan sampah anorganik oleh warga Desa Ledu-Ledu, Wasuponda, sebagai bagian dari Program Mitra Desa Mandiri (PMDM)
Life skill training in utilizing anorganic waste participated by villagers in Ledu-Ledu Village as part of Community Action Plan (PMDM) program

PROGRAM SOSIAL TERPADU

KEBIJAKAN

Menindaklanjuti kegiatan tahun sebelumnya, PT Vale dengan dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat terus mewujudkan sejumlah program sosial terpadu Perseoran yang telah digagas sejak 2012 untuk ikut berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pra-sejahtera dan kelompok rentan di wilayah sekitar operasi PT Vale sehingga menjadi mandiri dan siap memasuki ekonomi pasca tambang. Program sosial terpadu PT Vale difokuskan pada peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemitraan, serta kegiatan seni dan budaya. Program sosial ini

INTEGRATED SOCIAL PROGRAM

POLICY

Following up previous year's activities, PT Vale - with the support from Regional Government and communities - continue realizing several integrated social programs of the Company that have been initiated since 2012 as efforts to improve public welfare, especially for the underprivileged and vulnerable groups in the areas around PT Vale's operation, independent and economically prepared after mine closure. Integrated social program of PT Vale are focused on education, health, economy and partnerships as well as art and culture. The social program involves three elements within a three way partnership, namely the public, the

dilaksanakan dalam bentuk kemitraan tiga pihak, yaitu masyarakat, pemerintah dan Perseroan, dan menjadi bagian dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Program sosial terpadu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang merupakan kewajiban Perseroan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 47/2012. Kebijakan ini juga sejalan dengan Visi, Misi dan Kebijakan sosial Perseroan yang diimplementasikan secara menyeluruh oleh Departemen Komunikasi dan Hubungan Luar yang dipimpin langsung seorang direktur.

Bagi PT Vale, kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di sekitar wilayah operasi Perseroan merupakan bagian dari kinerja Perseroan secara keseluruhan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Penutupan Tambang Perseroan. Harapan kami, PT Vale dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

KEGIATAN PROGRAM SOSIAL

Pelaksanaan Program Sosial PT Vale di wilayah operasi Perseroan di Blok Sorowako yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dilakukan melalui Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) yang meliputi tiga program inti yaitu Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), program Kemitraan Strategis, dan program Kontribusi Strategis. Ketiga program ini mencakup bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, peningkatan kapasitas kelembagaan, sosial budaya dan olahraga serta pembangunan sarana umum.

Tahun 2015 adalah tahun ketiga PT Vale mengimplementasikan PTPM. Sebelum pelaksanaan PTPM, PT Vale telah melakukan serangkaian kajian yaitu yang berupa Studi Kebutuhan Masyarakat (*Community Needs Assessment*), Pemetaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Mapping*), dan Studi Komoditas Pertanian Unggulan untuk memastikan PTPM tepat sasaran dan sesuai dengan kearifan dan budaya lokal. Hasil studi ini dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan Strategi Pengelolaan Sosial (SPS) dan Rencana Pengelolaan Sosial (RPS) 2013-2017.

government and the Company, together achieving goals of sustainable development.

The integrated social programs are carried out as a form of social and environmental responsibility as the obligation of the Company, as mandated by the Limited Liability Company Act No. 40/2007 and Government Regulation No. 47/2012. This policy is also in line with the Vision, Mission and social policies of the Company and thoroughly implemented by the Communications & External Affairs Department, which is chaired by a director.

For PT Vale, public welfare, especially for those located around the areas of operations of the Company is part of the Company's overall performance and inseparable from the Company's mine closure plan. PT Vale hope is to substantially grow and evolve with the community.

SOCIAL PROGRAM ACTIVITIES

The implementation of PT Vale's Social Program in the operation areas at the Sorowako block in East Luwu Regency, South Sulawesi, is conducted through the Integrated Community Development Program (PTPM) which includes three core programs, namely the Community Action Plan (PMDM) program, the Strategic Partnerships program, and the Strategic Contributions program. These three programs cover the areas of health, education, economic, institutional capacity building, socio-cultural and sports as well as the construction of public facilities.

2015 is the third year PT Vale implemented the PTPM. Prior to execution of the PTPM, PT Vale had conducted a series of studies, namely Community Needs Assessment, Stakeholder Mapping and studies of selected agricultural produce to ensure that PTPM is on target and in accordance with local wisdom and culture. Results of these studies are used as the basis for formulating the Social Management Strategy (SPS) policies and the 2013-2017 Social Management Plan (RPS).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Strategi Pengelolaan Sosial (SPS) memuat rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, tata nilai, kebijakan, strategi operasional, program dan kegiatan pengembangan masyarakat yang selaras dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, RPS lima tahunan mengintegrasikan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan masyarakat, kebutuhan kelompok masyarakat pra-sejahtera dan rentan, serta kontribusi pada prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

Prinsip utama PTPM adalah sinergi pembangunan melalui alokasi sumber daya, baik oleh Perseroan, masyarakat, maupun Pemerintah Daerah. Pada tingkat kabupaten, dibentuk tim koordinasi yang dikepalai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kemitraan menjamin terjadinya sinergi program pengembangan masyarakat oleh Perseroan dan prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

Pelaksanaan PTPM di Blok Sorowako telah memberikan manfaat bagi lebih dari 43 ribu pemanfaat di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Malili. Keseluruhan kecamatan ini meliputi 38 desa yang secara langsung terdampak oleh operasi Perseroan.

Kegiatan pengembangan masyarakat PT Vale dalam jangka panjang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat Luwu Timur memasuki ekonomi pasca tambang. Prioritas kegiatan pengembangan ini adalah pengembangan pertanian berkelanjutan dan komoditas pertanian, serta pembangunan kemandirian masyarakat melalui tumbuhnya kewirausahaan, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

PROGRAM MITRA DESA MANDIRI (PMDM)

Fokus program pemberdayaan masyarakat dalam PTPM adalah pembangunan desa. Hal ini mencakup Program Mitra Desa Mandiri (PMDM). Untuk memastikan manfaat yang maksimal, bantuan PMDM diberikan kepada perorangan, melalui kelompok yang telah ditunjuk dan disepakati. Prioritas bantuan ditentukan oleh masyarakat desa yang memiliki keleluasaan untuk memilih program yang dirasa tepat untuk memajukan desanya. Usulan kegiatan dari masyarakat dibicarakan dalam musyawarah desa, sedangkan

The Social Management Strategy (SPS) contains formulation of the vision, mission, goals, objectives, values, policies, operational strategies, programs and community development activities that are in line with the regional development plans of East Luwu Regency. Meanwhile, the five-year RPS integrates the determined objectives in the development of the society, the needs of underprivileged and vulnerable groups, as well as contributions to the development priorities of the East Luwu Regency.

The main principle of PTPM is development synergy through the allocation of resources, by the Company, the community, and the local government. At the regency level, a coordination team headed by the Chairman of the Regional Development Planning Board (Bappeda) was established. The partnership ensures a synergy of community development programs by the Company and development priorities of the East Luwu Regency.

The implementation of PTPM at the Sorowako block has provided benefits to over 43 thousand beneficiaries in four districts, namely the Nuha District, the Wasuponda District, the Towuti District, and the Malili District. These districts include 38 villages that are directly affected by the operations of the Company.

The community development activities of PT Vale in the long-term have the objective to prepare the East Luwu community for the post-mining economy. The priority of the activities are the development of sustainable agriculture and agricultural commodities, as well as the development of the self sufficiency of the community through the growth of entrepreneurship, particularly micro, small and medium enterprises (SMEs).

COMMUNITY ACTION PLAN (PMDM)

The focus of community empowerment in PTPM program is the rural development. This includes the Community Action Plan (PMDM). To ensure maximum benefit, PMDM assistance is given to individuals, through a group that has been appointed and agreed upon. The priority of the assistance is determined by the community who has the flexibility to choose the programs that seems suitable to promote their village. The proposed activities of the community are discussed in a village meeting, while the decisions are made based

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan desa yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Prinsip-prinsip PMDM meliputi:

1. Keberpihakan kepada masyarakat rentan dan pra-sejahtera;
2. Keberpihakan kepada perempuan, melalui pemberian akses, kesempatan dan peran dalam setiap tahapan program;
3. Bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia dan tidak hanya pada infrastruktur fisik;
4. Partisipasi dalam setiap tahapan program;
5. Akuntabilitas; memastikan bahwa setiap tahapan program harus dikelola secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, baik secara moral, teknis, administratif dan ketentuan yang berlaku;
6. Transparansi; tersedianya akses publik terhadap seluruh informasi dan pengambilan keputusan secara terbuka;
7. Kemandirian; adanya wewenang bagi masyarakat untuk mengatur diri sendiri, berkontribusi dan secara mandiri menentukan pilihan kegiatan sesuai dengan permasalahan, kapasitas dan kebutuhan pembangunan di desanya; dan
8. Kemitraan antara masyarakat, pemerintah daerah dan PT Vale.

PTPM BIDANG KESEHATAN

Pelaksanaan PTPM bidang kesehatan merujuk pada pencapaian *Millennium Development Program* (MDGs) dan persiapan mendukung *Sustainable Development Program* (SDGs). Secara khusus, keberhasilan program ini berdasarkan pada indikator kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV AIDS, penyakit malaria dan penyakit lainnya, serta mengembangkan kemitraan global. Selama 2015, PT Vale telah memberikan dana kesehatan sebesar Rp12,8 miliar atau setara dengan AS\$1.012.006 (nilai penuh).

Prioritas pembangunan bidang kesehatan yang dilakukan oleh PT Vale mengutamakan pada upaya preventif dan promotif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitasi. Dengan demikian, masyarakat

on the rural development priorities contained in the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes) document.

PMDM principles include:

1. Inclination towards the vulnerable and underprivileged communities;
2. Preference to women, through the provision of access, opportunities, and roles in every phase of the program;
3. Focus on the development of human resources and not only physical infrastructure;
4. Participation in each phase of the program;
5. Accountability; ensuring that each phase of the program is properly managed and accountable to all parties, both morally, technically, administratively, and in compliance to the applicable regulations;
6. Transparency; availability of public access to all information and decision makings openly;
7. Self-sufficiency; the authority of the community to organize themselves, to contribute, and the independence to determine the activities in accordance with the issues, capacity, and needs for the development in their village; and
8. Partnership between the community, the local government, and PT Vale.

COMMUNITY EMPOWERMENT IN HEALTH

PTPM implementation in the health sector refers to the achievement of the Millennium Development Program (MDGs) and the preparation to support the Sustainable Development Program (SDGs). In particular, the success of this program is based on indicators of public health in the East Luwu Regency, namely reducing the child mortality rate, improving maternal health, combating HIV/ AIDS, malaria and other diseases, as well as developing a global partnership. Throughout 2015, PT Vale provided health funds amounting to Rp12.8 billion, equivalent to US\$1,012,006 (full amount).

The priority in health development conducted by PT Vale emphasizes preventive and promotional efforts without leaving the curative and rehabilitation efforts. Therefore, the community is expected to obtain a better

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

diharapkan dapat memperoleh tingkat kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka pembangunan kesehatan lebih diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, serta pemerataan sarana dan prasarana kesehatan.

PT Vale mendorong perubahan fokus layanan kesehatan dari kuratif menuju pola pencegahan dengan mendorong kesadaran untuk mengubah sikap dan perilaku gaya hidup. Melalui upaya ini, diharapkan terjadi perubahan paradigma sakit menuju paradigma sehat, sehingga masyarakat lebih mengutamakan upaya pencegahan, pemeliharaan kesehatan daripada pengobatan penyakit.

Pada tahun 2015, PT Vale sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk sejumlah fasilitas dan izin-izin yang diperlukan menjelang pelaksanaan pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Perseroan yang rencananya akan dimulai pada kuartal I tahun 2016.

Selain pemberian subsidi bantuan biaya pengobatan di Rumah Sakit INCO PT Vale bagi masyarakat umum, Perseroan juga melaksanakan berbagai kegiatan kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, yaitu:

- Pelayanan kesehatan gigi bagi 800 anak sekolah dasar,
- Pelayanan kesehatan mata bagi 300 orang anak,
- Seminar kesehatan ibu dan anak,
- Survei standar pelayanan kesehatan.

Selain itu, PT Vale juga melaksanakan PMDM bidang kesehatan sesuai dengan usulan desa dan kecamatan, melalui:

- Kegiatan pelatihan Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD) kasus jantung dan trauma,
- Sosialisasi dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) (melalui kerja sama Rumah Sakit INCO PT Vale dan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur),
- Peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), pemetaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada 8 puskesmas di wilayah pemberdayaan bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin.

health level. In line with these objectives, the priority of health development emphasizes improving the quality of basic health services, as well as the equal distribution of health facilities and infrastructure.

PT Vale encourages the change of focus in health services from curative towards preventive schemes by encouraging awareness to change lifestyle, attitudes and behaviors. Through these efforts, a shift from a sickness paradigm to healthfulness paradigm is expected; therefore, people will prefer prevention and health conservation rather than treatment of diseases.

In 2015, PT Vale has prepared all requirements, including facilities and permits before providing BPJS health services at the Company's hospital which planned to start in the first quarter of 2016.

In addition to the provision of medical services at INCO Hospital PT Vale for the general public, the Company also carries out various activities in collaboration with the University of Hasanuddin, namely:

- Dental care services for 800 elementary school students,
- Eye health services for 300 children,
- Mother and children health seminar,
- Health services standards survey.

In addition to that, PT Vale also carries out PMDM in health sector that are in accordance with the proposals of villages and districts, through:

- Training for Handling of Emergency Patient (PPGD) activities in cardiac and trauma cases,
- Socialization and control of Dengue Hemorrhagic Fever (DBD) (through cooperation of INCO Hospital of PT Vale with the Health Office of the East Luwu Regency)
- Improving the effectiveness of health services in the Community Health Center (PKM), mapping of Standards of Minimum Services on 8 health clinics in the empowerment areas in collaboration with the University of Hasanuddin.



Aktivitas guru magang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di TK Benteng, Sorowako
Internship PAUD (early childhood education) teacher activity at Kindergarten Benteng, Sorowako

PTPM BIDANG PENDIDIKAN

Dalam bidang pendidikan, PT Vale menitikberatkan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan. Secara umum, program pendidikan mencakup peningkatan mutu pendidikan, dukungan terhadap relevansi dan daya saing pendidikan, serta dukungan terhadap penguatan manajemen dan akuntabilitas pelaksana pendidikan. Dana yang digunakan di bidang pendidikan pada 2015 sebesar Rp7,3 miliar atau setara dengan AS\$568.440 (nilai penuh).

Sepanjang 2015, kegiatan bidang pendidikan yang dilakukan di antaranya adalah:

- Bantuan renovasi dua ruang kelas SMP 1 Towuti,
- Renovasi dan serah terima Laboratorium IPA SMP 1 Wasuponda,
- Penyediaan 27 orang guru magang yang ditugaskan di empat area kecamatan pemberdayaan PT Vale,
- Bantuan bagi siswa untuk fasilitas pendidikan dengan menyediakan bus sekolah di Desa Balambano (Kecamatan Wasuponda) dan empat desa lainnya di Kecamatan Malili,

COMMUNITY EMPOWERMENT IN EDUCATION

In the field of education, PT Vale emphasizes the contribution towards improving the quality of education services. In general, the education program includes improving the quality of education, support for the relevance and competitiveness of education, as well as support for management strengthening and accountability of education practitioners. Funds used in the field of education in 2015 amounted to Rp7.3 billion, equivalent to US\$568,440 (full amount).

Throughout 2015, activities carried out in the field of education were, among others:

- Renovation assistance of two classrooms of SMP 1 Towuti,
- Renovation and handover of Science Laboratory of SMP 1 Wasuponda,
- Provision of 27 intern teachers who are assigned in four empowerment districts of PT Vale,
- Education transport assistance for students by providing a school bus in the Balambano Village (Wasuponda District) and 4 other villages in the Malili District,

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

- Program Beasiswa Prestasi bagi 47 mahasiswa (termasuk jenjang S2 dan S3) asal Kabupaten Luwu Timur, beasiswa anak asuh bagi 70 pelajar Sorowako, beasiswa bagi dua orang mahasiswa lokal yang sedang menempuh pendidikan kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sembilan mahasiswa lokal yang sedang menempuh pendidikan S1 lulusan Akademi Teknik Sorowako di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya,
- Pelatihan pengembangan karakter (*character building*) bagi 500 tenaga pendidikan setempat seperti guru, kepala sekolah dan komite sekolah serta pengawas pendidikan dan dewan pendidikan Kabupaten Luwu Timur,
- Program magang dan studi banding bagi sekitar 500 pendidik PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Taman Kanak-kanak (TK) binaan PT Vale yang diikuti secara bergantian sejak September 2015,
- Memberi kesempatan bagi siswa/mahasiswa untuk melakukan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di PT Vale.
- Achievement scholarship program for 47 university students (including Masters and Doctoral degree) from East Luwu Regency, foster children scholarship program for 70 students from Sorowako, scholarship for 2 local students who are studying at the Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) in Jakarta, nine local students graduated from the Sorowako Engineering Academy who are studying at Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) in Surabaya,
- Character building training for 500 local educators such as teachers, principals and school committees as well as education superintendent and the board of education of the East Luwu Regency,
- Internship program and comparative study for 500 early childhood educators in kindergartens near PT Vale interchangeably since September 2015,
- Providing opportunities for students to perform the Industry Job Training (PRAKERIN) at PT Vale.

PTPM BIDANG SOSIAL-BUDAYA DAN OLAHRAGA

Dukungan PT Vale dalam pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk meningkatkan budaya lokal melalui upaya pelestarian nilai-nilai, karakter, serta pengembangan seni dan olahraga. Jumlah dana dukungan pada 2015 adalah sebesar Rp573 juta atau setara dengan AS\$45.182 (nilai penuh).

Kegiatan yang dilakukan dalam bidang sosial budaya di antaranya adalah:

- Partisipasi dalam peringatan hari-hari besar umat beragama serta bantuan bagi rumah-rumah ibadah lokal,
- Dukungan untuk pelaksanaan kegiatan pameran benda pusaka termasuk di Bentara Budaya Jakarta,
- Bantuan terhadap korban bencana kebakaran di Kabupaten Luwu Timur,
- Bantuan fasilitas pada beberapa acara budaya setempat, termasuk perayaan panen dan Festival Danau Matano,
- Dukungan dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan turnamen olah raga seperti futsal, tenis, basket, sepeda, serta voli.

PTPM IN SOCIO-CULTURE AND SPORTS

The support of PT Vale in the development of arts and culture is conducted to improve the local culture through efforts to conserve the values, character, as well as the development of the arts and sport. The amount of funding support in 2015 amounted to Rp573 million, equivalent to US\$45,182 (full amount).

Activities conducted in the field of socio-culture are, among others:

- Participation in religious holidays as well as assistance for local houses of worship,
- Support for the implementation of heritage exhibitions including at the Bentara Budaya, Jakarta,
- Assistance for fire victims in East Luwu Regency,
- Facilities assistance for several local cultural events, including harvesting celebration and Matano Lake Festival,
- Support in organizing several sport tournaments, such as, indoor soccer, tennis, basketball, cycling, as well as volley ball.

PTPM BIDANG EKONOMI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, PT Vale kembali berupaya membantu pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja dengan cara meningkatkan kegiatan ekonomi dan menyediakan mata pencaharian baru. Fokus program ekonomi ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat pra-sejahtera dan kelompok rentan di sekitar wilayah operasi Perseroan. Hingga Desember 2015, PT Vale telah mengeluarkan biaya sebesar Rp9,6 miliar atau setara dengan AS\$741.938 (nilai penuh) untuk kegiatan ini di Luwu Timur.

Program berfokus pada aktivitas pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, pengembangan ekonomi dan pengembangan kapasitas. Selain itu, PT Vale juga melakukan kerja sama dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Luwu Timur dalam kegiatan-kegiatan bidang ekonomi dan pengembangan kapasitas, di antaranya:

- Pembentukan dan pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Model di Kecamatan Nuha,
- Program pertanian berkelanjutan,
- Penguatan kelembagaan kelompok tani,
- Implementasi *System of Rice Intensification* (SRI),
- *Training of Trainers* (ToT) penyuluh pertanian kakao dan lada,
- Sekolah lapang kakao, dan
- Pelatihan kepemimpinan.

Dalam program SRI, petani dilatih untuk mengurangi ketergantungan pada kebutuhan sarana produksi melalui pemanfaatan potensi yang ada di lingkungan sekitar, misalnya penggunaan pestisida nabati dan mikro organisme lokal (mol) sebagai nutrisi nabati serta kompos sebagai pupuk organik. Pada 2015, fokus kegiatan SRI ini adalah pengenalan ekologi tanah, implementasi dan pendampingan.

Selain itu, PT Vale juga menyelenggarakan program pengembangan kapasitas SDM melalui:

- Dukungan operasional pendampingan program,
- Supervisi program,

COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE FIELD OF ECONOMICS AND CAPACITY DEVELOPMENT

PT Vale, like in the previous year, seeks to assist the local government to expand employment opportunities by increasing economic activity and providing new livelihoods. The focus of this economic program is to increase the income of the underprivileged and vulnerable community in the surrounding of the Company's operation area. Up to December 2015, PT Vale has spent Rp9.6 billion or equivalent to US\$741,938 (full amount) for these activities in East Luwu Regency.

Programs were focused on the activities of agriculture and plantations, fisheries, animal husbandry, economic development and capacity building. In addition, PT Vale also collaborates with the Executing Agency of Agriculture Fisheries and Forestry Counseling (BP4K) of the Luwu Timur Regency in economics and capacity development activities, among others:

- Establishment and development of the Counseling Center for Agriculture, Fisheries and Forestry (BP3K) Model in the Nuha District,
- Sustainable agriculture program,
- Farmer group institutional empowerment,
- Implementation of the System of Rice Intensification (SRI),
- Training of Trainers (ToT) of cocoa and pepper agricultural counselor,
- Cocoa field school, and
- Scout training.

In the SRI program, farmers are trained to reduce dependency on the need for extra production facilities through utilization of the surrounding environment potentials, such as the use of vegetable pesticides and local micro-organisms (mol) as plant nutrients as well as the utilization of compost as organic fertilizer. In 2015, the focus of SRI activities is the introduction to soil ecology, implementation and accompaniment.

In addition, PT Vale also organized human resources capacity building program through:

- Mentoring operational support program,
- Program supervision,

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

- Pendampingan teknis,
- Pelatihan fasilitator komite dan kader pemberdayaan masyarakat desa,
- *Monitoring-evaluasi* program PMDM.
- Technical mentoring,
- Training of committee facilitators and community empowerment cadres,
- Monitoring-evaluation of PMDM programs.

Untuk pengembangan kapasitas SDM ini, PT Vale mengeluarkan dana sebesar Rp5,8 miliar atau setara dengan AS\$449.047 (nilai penuh).

For human resources capacity development, PT Vale disbursed Rp5.8 billion, equivalent to US\$449,047 (full amount).

PTPM BIDANG SARANA UMUM

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, PT Vale juga ikut berkontribusi dalam berbagai aktivitas pembangunan dan perbaikan fasilitas publik berupa sarana dan prasarana umum. Pada 2015, total dukungan untuk peningkatan sarana prasarana umum adalah Rp13,4 miliar atau setara dengan AS\$1.061.894 (nilai penuh).

PTPM IN PUBLIC FACILITY

To support economic growth and improving the quality of life, PT Vale also contributed in various construction and improvement of public amenities activities such as public facilities and infrastructure. In 2015, total support for the improvement of public facilities and infrastructure amounted to Rp13.4 billion or equivalent to US\$1,061,894 (full amount).

Sepanjang tahun 2015, bantuan pembangunan fasilitas publik meliputi pengadaan air bersih bagi warga di Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha, serta penyediaan akses listrik dan penerangan jalan bagi masyarakat lokal.

Throughout 2015, public facilities development assistance include the provision of clean water for residents in the Towuti and Nuha Districts, as well as the provision of electricity access and street lighting for local communities.

Sementara itu, di area Bahodopi di Sulawesi Tengah, PT Vale terus melanjutkan sejumlah program sosial di bidang sarana umum seperti tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya untuk ikut meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah konsesi Kontrak Karya Perseroan. Beberapa kegiatan pembangunan yang telah dilakukan antara lain di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi adalah pembangunan dan perbaikan tujuh gedung serbaguna, perbaikan kantor desa, pos kesehatan desa, gedung PAUD, serta pembuatan saluran drainase. Selain itu, Perseroan juga mulai melakukan kajian dan pemetaan untuk merumuskan rencana program strategis lima tahun. Dana yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan ini mencapai Rp3,28 miliar atau setara dengan AS\$253.068 (nilai penuh).

Meanwhile, in the Bahodopi area in Central Sulawesi, PT Vale continued to implement several social programs in public facilities like in the previous years as part of its effort to improve community's economic activities in the Company's surrounding CoW areas. Several numbers of development activities are being carried out in, among others, the East Bungku and Bahodopi Districts are the construction and improvement of seven multipurpose buildings, improvement of village offices, village health posts, early childhood education building, as well as the construction of drainage channels. The Company also began to perform studies and mapping to formulate a strategic five year plan program. Funds spent on these activities reached Rp3.28 billion, equivalent to US\$253,068 (full amount).

Di area Pomalaa, Sulawesi Tenggara, PT Vale terus ikut berkontribusi membangun sejumlah sarana dan prasarana publik di beberapa lokasi sebagai upaya bersama-sama Pemerintah Daerah Kabupaten setempat untuk melancarkan kegiatan perekonomian masyarakat. Perseroan juga telah melaksanakan kajian

In the Pomalaa area, Southeast Sulawesi, PT Vale continued to contribute in developing several public facilities and utilities in several locations as part of aligned effort with the regency government to accelerate community economic activities. The Company have also been carrying out studies and

dan pemetaan untuk merumuskan rencana program sosial strategis lima tahunan. Selain itu, pada tahun 2015 pimpinan PT Vale memberikan kuliah umum terkait kepemimpinan dihadapan ratusan mahasiswa Universitas 19 Nopember di Kolaka. Dana yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan di Kabupaten Kolaka tersebut mencapai lebih dari Rp3 miliar atau setara dengan AS\$224 ribu.

DAMPAK KEGIATAN PROGRAM SOSIAL TERPADU

Dari sisi finansial, total kontribusi PT Vale selama kurun waktu tahun 2015 mencapai Rp53,95 miliar atau setara dengan AS\$4.202.728 (nilai penuh) dalam pelaksanaan program sosial terpadu melalui sejumlah kegiatan PMDM, Kemitraan Strategis dan Kontribusi Strategis. Program-program tersebut dilaksanakan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan olahraga, ekonomi dan pengembangan kapasitas, serta sarana-prasarana umum.

Secara umum, dampak positif dari kegiatan PTPM ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan masyarakat pada perusahaan ekstraktif seperti PT Vale dan terjalinnya hubungan yang berkualitas antara Perseroan dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Kami berpendapat bahwa, selama 2015, kehadiran PT Vale, khususnya di

mapping to formulate a strategic five year social program plan. In addition, in 2015 PT Vale's President Director delivered general lecture on leadership before hundreds of University 19 November students in Kolaka. Fund spent for these activities in Kolaka Regency was more than Rp3 billion, equivalent to US\$224 thousand.

IMPACT OF INTEGRATED SOCIAL PROGRAM ACTIVITIES

Financially, PT Vale has contributed Rp53.95 billion or equivalent to AS\$4,202,728 (full amount) in 2015 in the implementation of the integrated social program through a number of PMDM activities, Strategic Partnerships, and Strategic Contributions. These programs are carried out in the region of South Sulawesi, Central Sulawesi and Southeast Sulawesi, covering the fields of health, education, socio-culture and sporting, economic and capacity building, as well as public facilities and infrastrucrue.

In general, the positive impact of the PTPM activity is the increased welfare of the community, and limiting dependency to extractive company like PT Vale more harmonious relations with the community and the Local Government. In our opinion, throughout 2015, the presence of PT Vale, particularly in the East Luwu Regency will continue to be part of the people who live



Aktivitas pembuatan kompos
Composting activity

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Kabupaten Luwu Timur, terus mampu menjadi bagian dari masyarakat yang hidup dan tumbuh bersama. Selain itu, sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas dari program sosial Perseroan telah secara perlahan-lahan ikut membentuk pola pikir masyarakat atas peran Pemerintah, swasta dan masyarakat secara partisipatif dan transparan dalam upaya bersama untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri.

Namun demikian, kami harus mengakui masih terdapat keterbatasan dalam kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan untuk membantu Pemerintah dan masyarakat. Demikian pula halnya dalam menyediakan lapangan kerja di mana tidak semua pelamar kerja yang berasal dari masyarakat sekitar dapat kami terima karena adanya standar kompetensi minimal yang harus dipenuhi. Kedua hal ini menjadi perhatian kami, dan oleh karenanya PT Vale selalu berkomunikasi dengan pemuka masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab sosial yang tepat guna dan tepat sasaran.

PENCAPAIAN PROGRAM SOSIAL TAHUN 2015

Menuju Pertanian Berkelanjutan

Di Kabupaten Luwu Timur, sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah di luar sektor tambang. Pengembangan agroindustri di Kabupaten Luwu Timur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan sektor pertanian diharapkan dapat menjadi penopang (*leading sector*) perekonomian setempat.

Program Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) yang dilakukan oleh PT Vale memiliki tujuan jangka panjang yaitu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga petani di wilayah terdampak operasi Perseroan. Tujuan Program Pertanian Berkelanjutan adalah tercapainya perbaikan budi daya pertanian pada komoditas unggulan Kabupaten Luwu Timur dengan menerapkan atau mendorong teknologi budi daya yang maju dan ramah lingkungan.

Salah satu kegiatan PTPM Program Pertanian Berkelanjutan adalah penerapan konsep *System of Rice Intensification* (SRI) Organik di Desa Mahalona,

and grow together. Other than that, several capacity improvement activities from the Company's social program have gradually formed community's mindset about the rules of government, private and community in participative and transparent way as part of aligned effort to create wealthy and independent community.

However, the community development activities that we have carried out in helping the government and the whole community were still limited. Similarly, in providing employment opportunities we are not able to accept all job applicants coming from the surrounding community because of the minimum competency standards which must be met. Both these matters have become our attention, therefore, PT Vale is in constant communication with the community leaders and the Local Governments in implementing the appropriate and well-targeted social responsibility activities

SOCIAL PROGRAM ACHIEVEMENT IN 2015

Sustainable Agriculture

After mining, the agriculture sector is one of the largest revenue contributors in the East Luwu Regency. The agricultural industry in the East Luwu Regency plays a strategic role in the economic growth of the area. Moreover, the agricultural sector is expected to become the leading sector in the local economy within the next few years.

Sustainable Agriculture Program, which is a part of PT Vale's Integrated Community Development Program (PTPM), has a long-term goal of contributing to an increase in the income of farmers in the regions of the Company's operations. The objective of the Sustainable Agriculture Program is the improvement of agricultural cultivation of selected produce in the East Luwu Regency by utilizing advanced and environmentally friendly technology.

One of the activities of the Sustainable Agriculture Program is the application of the Organic System of Rice Intensification (SRI Organic) in the Mahalona Village

Kecamatan Towuti, dan Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda. Metode SRI Organik telah menekan ketergantungan petani pada produk pabrikan seperti pupuk dan pestisida. Kebutuhan terhadap pupuk dan pestisida kimia yang mahal membuat para petani selalu menunggu bantuan dari pemerintah ataupun perseroan. Setelah menjalani pelatihan SRI Organik, para petani sudah bisa membuat kompos sekaligus racun hama dari bahan alami yang jauh lebih murah dan tentunya lebih ramah lingkungan.

Setelah menjalani masa tanam selama sekitar empat bulan, petani merasakan panen padi yang bebas bahan kimia. "Sudah enam tahun saya bertani tapi hasil masih jauh dari memuaskan. Saya berharap, SRI Organik menjadi jalan bagi saya dan anggota kelompok tani untuk bisa sukses," kata Paimin, Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya, Desa Libukang Mandiri. Setelah gagal panen selama tiga musim, pada Desember 2015 sebanyak 36 petani yang mempraktikkan pola tanam SRI Organik di desa tersebut merasakan kembali manisnya hasil panen. Sementara di Desa Ledu-Ledu, produktivitas lahan padi organik sebesar 5,1 ton per hektar, sedangkan tanaman padi konvensional menunjukkan angka produktivitas 3,6 ton per hektar. Padi organik disukai konsumen karena harum dan tidak mudah basi. Saat ini gabah kering hasil panen petani di Towuti dan Wasuponda dipasarkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Luwu Timur.

Meskipun merupakan program pertama dan hanya menggunakan lahan para petani di Mahalona seluas 18 hektar, program SRI perdana di tahun 2015 tersebut menghasilkan panen padi organik dengan jumlah dua kali lipat dibandingkan pola konvensional yang selama ini mereka terapkan. Dan diluar rencana semula, produk perdana padi organik petani binaan PT Vale tersebut mampu menerobos pasar hingga di ibukota provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, berkat inisiatif dan peran sungguh-sungguh dari pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Usaha Milik Daerah setempat. Tidak pernah terbayangkan oleh para petani jika produk mereka mampu bersaing dengan beras unggulan lainnya di supermarket ternama di Makassar. Para petani mengakui pendapatan bersih mereka melonjak sedikitnya tiga kali lipat berkat pelatihan dari PT Vale dan kemudian dukungan dari Pemda dan BUMD.

in the District of Towuti and the Ledu-Ledu Village in the District of Wasuponda. This method has reduced the farmers' dependence on manufactured products such as fertilizers and pesticides. In the past, the need for expensive chemical fertilizers and pesticides forced farmers to rely on assistance from the government or the Company. After undergoing the SRI Organic training, farmers have learnt how to make compost as well as pesticides from natural ingredients that are much cheaper and more environmentally friendly.

After a planting period of about four months, farmers were able to harvest pesticide free rice. "I have been farming for six years, but the results have been far from satisfactory. I hope that SRI Organic will help me, as well as other farmers to become successful," said Paimin, the Chairman of the Harapan Jaya Farmers Group in the Libukang Mandiri Village. Following three failed harvests, a total of 36 farmers who implemented the SRI Organic program were able to enjoy a successful harvest in December 2015. In the Ledu-Ledu village, organic rice farmers were able to harvest 5.1 tonnes of rice per hectare, while farmers who relied on conventional pesticides were only able to harvest 3.6 tonnes of rice per hectare. Furthermore, consumers prefer organic rice because it smells better and it doesn't go stale as fast as rice that has been cultivated using chemical fertilizers and pesticides. Currently, grain grown by farmers in Towuti and Wasuponda is marketed through the Regency Owned Enterprise (BUMD) of East Luwu.

Despite first time program and only used 18 hectares of farmers' land in Mahalona, the initial SRI program in 2015 produced organic harvests twice as many as the conventional planting system. And without any plan, that produced penetrated markets up to the capital city of the South Sulawesi province, Makassar, as the initiatives and committed efforts from East Luwu Regency regional leaders via regional owned enterprise. The farmers did not expect that their produced can compete with other rice produces in the prominent supermarket in Makassar. The farmers admitted that their net income increased at least three times because of the training provided by PT Vale and with the support from regional government and regional owned enterprise.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Program Magang dan Studi Banding Guru PAUD

Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) meluncurkan Program Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) se-Kabupaten Luwu Timur pada September 2015. Program tersebut terbagi atas dua kegiatan yaitu magang dan studi banding yang diikuti oleh 504 tenaga pendidik PAUD dari 187 sekolah di Luwu Timur.

Kegiatan magang dan studi banding dilaksanakan mulai 14 September 2015 hingga 26 Februari 2016 di TK Yayasan Pendidikan Sorowako (YPS) Lawewu dan TK Sorowako, Kecamatan Nuha. Selama mengikuti program magang satu minggu atau studi banding dua hari, guru-guru mengamati proses pembelajaran, melihat administrasi kelas, mengikuti rapat pembahasan rencana kegiatan harian (RKH) dan rencana kegiatan mingguan (RKM), praktik membuat alat peraga, *sharing* persiapan ujian kompetensi guru (UKG) dan melakukan evaluasi program.

"Saya berharap bisa menggali cara-cara kreatif untuk mendidik siswa, terutama cara komunikasi dan pendekatan ke anak didik. Apalagi sekolah kami masih baru berdiri dan letaknya terpencil. Kegiatan belajar seperti ini sangat perlu untuk menambah wawasan," kata Setyowati, guru TK Tunas Harapan SP3 Mahalona, Kecamatan Towuti.

Layanan Kesehatan untuk Masyarakat Pesisir

Akses ke prasarana publik, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan, merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Keterbatasan akses bisa berakibat pada pelayanan kesehatan yang tidak maksimal dan sulit menjangkau wilayah terpencil. Kendala itulah yang dialami oleh masyarakat pesisir di Kecamatan Towuti dan Malili.

Untuk mengatasi kendala akses, warga di desa-desa pesisir mengajukan pengadaan perahu ambulans untuk didanai Program Mitra Desa Mandiri (PMDM). Perahu tersebut akan difungsikan sebagai sarana transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan lanjutan ke pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) maupun ke rumah sakit terdekat.

Di desa Pasi-Pasi, perahu ambulans digunakan oleh staf puskesmas, bidan desa, dan petugas kesehatan lain

Internship and Comparative Study for PAUD Teachers

The Integrated Community Development Program (PTPM) launched the East Luwu PAUD (Early Childhood Education) Teacher Capacity Building Program in September 2015. The program, which is divided into internships and comparative study programs, was attended by 504 PAUD teachers from 187 schools in East Luwu.

The internship and comparative study activities were conducted from September 14, 2015 to February 26, 2016 in the Sorowako Education Foundation (YPS) of Lawewu and Sorowako Kindergarten, Nuha District. During the one week internship or the two day comparative study program, the teachers observed class activities, involved in daily and weekly activity plan (RKH and RKM) discussions, learnt to prepare class-demo apparatus, shared experience in teacher competence tests (UKG) preparation and were able to evaluate the program.

"I am hoping to learn how to prepare more creative lessons for my students, especially when it comes to methods of communication. Our school is still new and in a remote location. This learning program has been important as it has broadened our horizons," said Setyowati, a teacher at the Tunas Harapan SP3 Mahalona Kindergarten in the Towuti District.

Health Services for Coastal Communities

All citizens should have access to public facilities, particularly to health and education facilities. Limited access may cause health services can not be optimized nor reach remote areas. Such situation occurred in the remote coastal communities of the Towuti and Malili Districts.

To address this issue, these people requested Program Mitra Desa Mandiri (Community Action Plan – PMDM) to fund ambulance boat. The ambulance boat will be used to transport patients who require urgent medical attention to health centers and nearby hospitals.

In the Pasi-Pasi village, the ambulance boat has been used by the health center's staff, midwives and other

untuk menjangkau 40 kepala keluarga (KK) di daerah pesisir. Di hari Posyandu yang biasanya dilakukan pada tanggal 24 setiap bulan, warga pesisir berkumpul di salah satu rumah warga untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti penimbangan bayi dan balita, imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan pemeriksaan kesehatan bagi orang dewasa, wanita hamil dan lansia.

“Dulu sebelum ada perahu ambulans bantuan PMDM, petugas kesehatan harus menyewa perahu sendiri. Yang paling sulit kalau ada warga yang mengalami kondisi darurat, misalnya jatuh atau kecelakaan, dan dia tidak punya perahu pribadi. Dengan adanya bantuan perahu, masyarakat bisa cepat mendapat pertolongan,” kata Sarli Asuti, bidan Desa Pasi-Pasi. Jarak dari desa pesisir ke dermaga terdekat adalah 30 menit perjalanan menggunakan perahu motor.

health workers to reach 40 families (KK) in the coastal areas. During Posyandu Day, which is usually held on the 24th of each month, coastal residents gather at one of the houses in the village to access health services, such as baby and toddler weighing, immunization, supplementary feeding advice as well as health checks for adults, pregnant women and the elderly.

“Back before we received the ambulance boat from PMDM, health workers had to hire a boat. This was not always possible when an emergency, such as a trip or an accident, occurred. Now, if there is an accident, people can receive assistance relatively fast,” said Sarli Asuti, a midwife from the Pasi Pasi village. It takes approximately 30 minutes by motorboat from the coastal village to the nearest pier.



Pelatihan padi System of Rice Intensification (SRI) organik
System of organic Rice Intensification (SRI) training

Memandirikan Pebisnis Rumahan

Sektor ekonomi yang mendapat dukungan pendanaan dari Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) menyentuh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri kreatif. Usaha rumahan seperti produk kayu dan olahan pangan menjadi andalan di sektor UMKM. Sementara

Self Sufficient Home Businesses

PMDM provided funding for micro, small and medium enterprises (SMEs) as well as the creative industry. Home-based businesses such as wood production and food processing are the leading businesses within the SME sector. The leading creative industry in four

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

industri kreatif yang ditekuni masyarakat di empat wilayah terdampak operasi PT Vale mayoritas berbentuk usaha kerajinan tangan.

Usaha pembuatan tas berbahan tali kur misalnya, bisa dikategorikan sebagai industri kreatif. Setiap penjual yang umumnya ibu rumah tangga bisa menjual 4 – 5 tas per bulan dengan harga jual ratusan ribu rupiah. Keterampilan membuat tas berbahan tali kur mereka dapatkan dari pelatihan yang didukung PMDM. Selain mendapat penghasilan, kaum perempuan punya kesempatan mengembangkan keterampilan dan mencari kesibukan tanpa meninggalkan kewajiban mengurus rumah tangga.

Salah seorang pengrajin tali kur dari Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, menjadi nominator peraih PMDM Award 2015 kategori Penerima Manfaat Terbaik. Fatma Kadang terpilih sebagai nominator karena usahanya memberi dampak besar bagi kegiatan ekonomi keluarga. "Dari PMDM, saya menerima manfaat berupa pelatihan pembuatan tas berbahan tali kur. Sejak pelatihan itu, saya telah menyelesaikan sekitar 50 tas dan sudah berhasil saya jual. Harganya macam-macam, mulai Rp200 ribu sampai Rp600 ribu," kata Fatma. Tas tali kur buatan Fatma bahkan telah menjangkau konsumen di Kecamatan Bungku Barat, Sulawesi Tengah.

Melahirkan Petani yang Partisipatif

Sektor pertanian merupakan salah satu implementasi PMDM PT Vale di daerah pemberdayaan bidang ekonomi. Di Dusun Molindowe, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan misalnya. Kehadiran PMDM mampu mengajak petani untuk berpartisipasi dalam memberikan usulan pembangunan desa bidang pertanian juga kesadaran untuk kemandirian.

Hal ini tampak pada aktivitas pembangunan bendungan dan rehabilitasi saluran irigasi untuk areal persawahan petani Molindowe seluas 30 hektar. "Proyek ini dikerjakan sendiri oleh warga. Ada 27 orang yang kerja. Karena mereka semangat sekali, lima hari bisa selesai semua. Tenaga dan biaya makan tidak dibayar, sehingga bisa dibilang swadaya masyarakat di proyek ini besar. Petani ingin proyek ini cepat selesai dan bagus kualitasnya," ungkap Aliasar, Kepala Dusun Molindowe.

regions around PT Vale's operations is the production of handicrafts.

One of such home-based creative businesses is the production of macrame bags. PMDM has trained housewives to produce such bags out of rope. Now, each woman is able to sell 4 – 5 bags per month for hundreds of thousands of Rupiah. In addition to the earnings, these women have gained the opportunity to develop their skills and an occupation they can pursue in the comfort of their homes.

One of such craftswomen from the Wawondula Village in the Towuti District was nominated the Best Beneficiaries category of the 2015 PMDM Awards. Fatma Kadang was nominated for the award for having a huge impact on her household's economic situation. "PMDM taught me how to make macrame bags. Since the training, I have made and sold around 50 bags. The price of the bags varies from Rp200 thousand to Rp600 thousand," said Fatma. Fatma's macrame bags have reached consumers as far as the West Bungku District in Central Sulawesi.

Fostering Active Farmer

PT Vale's PMDM also targets the agricultural sector. In the Molindowe settlement in the Lioka Village, Lowuti District, East Luwu Regency, South Sulawesi, farmers were invited to talk about and provide input on agricultural development and self-sufficiency awareness.

This reflected in the construction of a dam and the rehabilitation of irrigation canals in the 30-hectare Molindowe rice cultivation area. "The project was undertaken by 27 participants on voluntary basis. They were enthusiastic and completed the whole project in mere five days. They completed the project by themselves and still they provided meals and snacks. The farmers wanted to complete the project quickly and to the best of their abilities," said Aliasar, the Chief of the Molindowe Settlement.

Swadaya masyarakat petani juga tampak pada kegiatan pembangunan jalan tani dan saluran irigasi di Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti. Jalan tani sepanjang satu kilometer dan lebar empat meter itu dibangun di atas lahan pribadi warga. "Mereka lepaskan lahannya untuk dijadikan jalan tani tanpa kompensasi. Mereka sadar betul kalau kegiatan ini manfaatnya besar," ujar M. Tajarianto, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Langkea Raya.

Revitalisasi Balai Penyuluhan Pertanian

Direalisasikan melalui skema PTPM, PT Vale bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merevitalisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Nuha untuk dijadikan model percontohan BP3K di Kabupaten Luwu Timur sejak September 2015.

Pusat penyuluhan pertanian seluas dua hektar ini kini dilengkapi beragam fasilitas dan sarana penunjang pusat informasi dan pelatihan petani, seperti *green house*, gedung pertemuan (Baruga), kebun tanaman obat keluarga, kebun buah dan sayuran, kolam ikan, persawahan, dan pembibitan tanaman perkebunan. Di tempat ini pula sebagai pusat pengembangan teknologi pertanian ramah lingkungan dan non pestisida (organik). "BP3K Model Nuha diusung menjadi pusat komunikasi, informasi, tempat belajar, ekowisata termasuk kebun bibit masyarakat, lumbung pangan, pusat kesehatan pertanian masyarakat," ujar Koordinator BP3K Nuha, Burhanuddin.

Untuk merealisasikan proyek ini, PT Vale juga melibatkan konsultan CSR A+ Indonesia dan kelompok tani berpengalaman di bidang pertanian organik, yakni Joglo Tani dari Sleman, Yogyakarta.

Membuka Akses Kesehatan bagi Masyarakat Rentan

Aspek kesehatan warga merupakan salah satu perhatian Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) PT Vale di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dalam realisasi program kesehatan, PMDM diarahkan mengutamakan unsur edukasi, promotif dan preventif. Beragam aktivitas dengan nuansa tersebut digulirkan sepanjang tahun 2015 dengan sasaran utama yakni para kaum ibu dan anak-anak.

The farmers were also very active in the construction of a farm road and irrigation channels in the Langkea Raya village, Towuti District. The one kilometer long and four meter wide road was built on the residents' private land. "They knew that the road would bring big benefits and didn't want any compensation for the land," said M. Tajarianto, the Village Community Empowerment Cadre of the Langkea Raya Village.

Upgrade of the Agriculture Counseling Center PT Vale, along with the government of the East Luwu Regency, upgraded the Counseling Center for the Nuha Agriculture, Fisheries and Forestry (BP3K). The project, which was completed as a part of the PTPM scheme, has been a BP3K pilot model in the East Luwu Regency since September 2015.

The two-hectare agricultural counseling center is now equipped with various facilities such as a training center, green house, conference hall (Baruga), family medicinal plant garden, orchards, vegetables gardens, fish ponds, rice fields and a nursery. The center also serves as a base for the development of environmentally friendly (organic) agricultural technology. "BP3K Model Nuha is a center for communication, training, eco-tourism and the distribution of information. It also serves as the community's gardens and barns," said Nuha BP3K coordinator, Burhanuddin.

To realize this project, PT Vale sought the assistance of A+ Indonesia CSR consultants and farmer groups experienced in the field of organic farming, namely Joglo Tani of Sleman, Yogyakarta.

Provision of Health Access for Vulnerable Communities

PT Vale's Integrated Community Development Program (PTPM) in the East Luwu Regency, South Sulawesi, among several focal points, focuses on health. To realize its health program, PMDM has prioritized education and prevention. In 2015, the Company launched various activities that targeted mothers and children.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

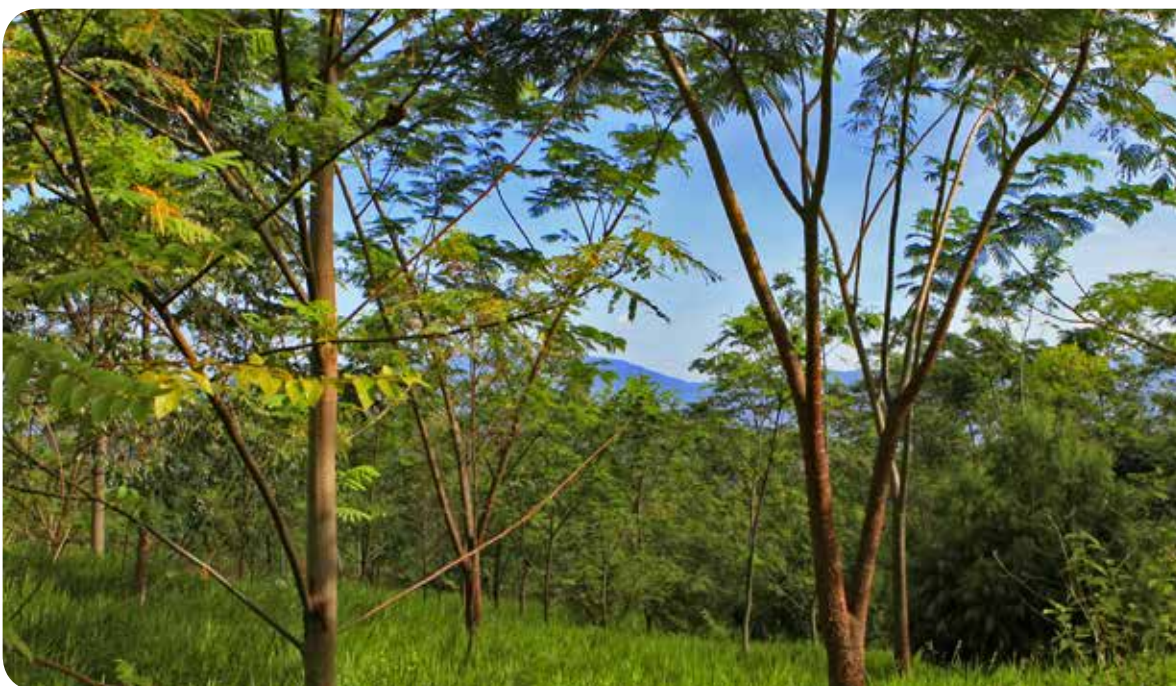
Corporate Social Responsibility

Misalnya pelaksanaan Program Kampung Sehat dan Sekolah Sehat yang digelar hampir di seluruh desa di daerah pemberdayaan PT Vale. Program tersebut diisi kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, aksi pemberantasan jentik nyamuk dan pelatihan untuk melahirkan kader-kader kesehatan. Program ini dimotori masyarakat sendiri dan didukung petugas puskesmas/posyandu (pos pelayanan kesehatan terpadu) dan ibu-ibu anggota PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) kecamatan/desa setempat. Pelaksana PTPM Bidang Kesehatan juga membidik anggota masyarakat miskin dan kelompok rentan sebagai target utama.

Sedangkan bagi anak-anak, misalnya digelar kegiatan pelatihan "dokter cilik" serta sosialisasi kesehatan mulut, gigi dan mata. Kegiatan ini dilakukan di empat kecamatan pemberdayaan PT Vale (Malili, Wasuponda, Towuti dan Nuha) dengan merangkul puluhan sekolah dasar dan ribuan siswa. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang kesehatan dasar, PHBS, pencegahan penyakit menular dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Lebih besar lagi adalah membentuk kesadaran kolektif masyarakat.

PT Vale implemented the Healthy Village and Healthy School Program in almost all villages associated with its operations. The program focused on activities related to health education, clean and healthy living (PHBS), exclusive breastfeeding, eradication of mosquito larvae and training of health cadres. The program has been led by the villagers and supported by health center/Posyandu officers and PKK members of the local villages and districts. PT Vale's PTPM health program also targets the vulnerable and the poor.

Furthermore, the Company conducted "young doctor" training for children to teach them about oral, dental and eye health. The training took place in PT Vale's four empowerment districts (Malili, Wasuponda, Towuti and Nuha) and involved dozens of primary schools and thousands of students. The program aims to enhance children's understanding of basic health, PHBS, prevention of infectious diseases and the importance of a clean environment. This is a part of the Company's goal of shaping the society's collective identity.



Revegetasi lahan tambang
Mining area revegetation

LINGKUNGAN HIDUP

PT Vale beroperasi di wilayah yang sangat sensitif terhadap perubahan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan utama operasi Perseroan di Sorowako berada di antara tiga danau yang indah dengan ekosistem yang sangat unik. Oleh karenanya, perlindungan ekosistem ini menjadi salah satu prioritas Perseroan.

Kebijakan

Kebijakan Lingkungan PT Vale diperbarui dan diresmikan pada tahun 2012. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan dan prinsip-prinsip dalam mewujudkan salah satu nilai Perseroan yaitu "MENJAGA KELESTARIAN BUMI." Nilai ini adalah dasar dari komitmen dan hasil kepemimpinan yang berfokus untuk mencapai keunggulan di bidang perlindungan lingkungan, yang sejalan dengan Kode Etik Perilaku.

Lingkup kebijakan tersebut melingkupi semua karyawan dan karyawan kontraktor yang bekerja untuk PT Vale.

Untuk mencapai keunggulan di bidang lingkungan, PT Vale Indonesia Tbk berkomitmen untuk:

- Melaksanakan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan – Pemimpin Unit Bisnis harus menerapkan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Vale di antara karyawan dan pihak ketiga, untuk mencapai prinsip, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan yang spesifik dan disesuaikan dengan Unit Bisnis tersebut;
- Memahami pentingnya aspek lingkungan dan dampak aktivitas setiap orang – Setiap karyawan atau pihak ketiga harus mengetahui aspek lingkungan dan dampak yang terkait dengan produksi dan proses manajemen, serta langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan dampak kerusakan lingkungan;
- Mematuhi peraturan hukum yang berlaku untuk setiap Unit Bisnis Operasional – Memastikan kepatuhan atas peraturan hukum lingkungan yang berlaku termasuk memenuhi kewajiban dan persyaratan hukum dalam pola kerja serta melaksanakan dan memperkuat tindakan dan praktik yang harus dilakukan seluruh karyawan dan pihak ketiga dalam melakukan kegiatan mereka sesuai dengan seluruh persyaratan yang ditetapkan;

ENVIRONMENT

PT Vale operates in environmentally sensitive areas. The majority of the Company's activities take place in Sorowako, between three lakes that support a very unique ecosystem. Therefore, protection of this ecosystem is one of the Company's main priorities.

Policy

PT Vale's environmental policy was updated and ratified in 2012. This policy provides guidelines and principles in implementing one of the Company's values, "PRIZE OUR PLANET". This value serves as the base of Company's commitment and as the result of leadership that focusing in achieving excellence in environmental protection, which are in line with PT Vale's Code of Conduct.

The policy applies to all of the Company's employees and the employees of the Company's contractors.

To achieve excellence in the field of environmental protection, PT Vale is committed to:

- Implementing Sustainable Development Policy – Business Unit Leaders must implement the Company's Sustainable Development Policy when it comes to both the employees and third parties, and reaching the objectives and targets of environmental management specifically and to be aligned with the respective Business Units' objectives;
- Understanding how the Company's activities affect the environment – Each employee or third party must recognize how the Company's production and management processes affect the environment, as well as the measures required to prevent or minimize any adverse environmental impacts;
- Complying with all applicable legal requirements for each Operational Business Unit – The Company must ensure compliance with the applicable environmental regulations and include legal obligations in its work plan as well as conducting and reinforcing measures and practices to be conducted by all employees and third parties in carrying out their activities in accordance with the specified requirements;

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam – Memastikan pertimbangan efisiensi penggunaan sumber daya utama untuk kegiatan pemrosesan, termasuk sumber daya lingkungan dan energi yang diperlukan untuk kegiatan dan, apabila mungkin, mengembangkan dan menggunakan rencana untuk meminimalkan konsumsi sumber daya utama tersebut;
- Menerapkan pengumpulan sampah selektif, baik di unit operasional dan daerah administratif – Memisahkan limbah yang dihasilkan dari operasi, untuk memungkinkan daur ulang, penggunaan kembali atau pembuangan yang benar atas masing-masing limbah;
- Meminimalkan produksi, emisi dan pembuangan semua jenis polutan atau limbah – Memastikan tindakan untuk menghindari dan meminimalkan timbulnya polutan dan limbah, serta melakukan pembuangan limbah dan pengendalian emisi dengan benar;
- Mencegah dampak terhadap flora dan fauna yang timbul dari kegiatan Perseroan – Melakukan perencanaan kegiatan untuk meminimalkan kebutuhan yang berakibat hilangnya vegetasi, mencegah kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan flora dan fauna dan memulihkan daerah yang penggunaannya telah selesai untuk kegiatan tersebut;
- Mengidentifikasi penyimpangan seluruh proses yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan – Setiap karyawan dan pihak ketiga harus mengetahui dan mampu mengidentifikasi peristiwa yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga dapat melakukan inventarisasi dan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian lingkungan;
- Melaporkan insiden lingkungan ke bagian Environment dan mengadopsi langkah-langkah untuk memperbaiki dan mencegah kejadian menjadi lebih buruk – Semua karyawan dan pihak ketiga harus mengetahui peran masing-masing dalam mengidentifikasi setiap insiden lingkungan dan melaporkannya ke bagian Environment sehingga langkah-langkah untuk perbaikan dan pencegahan dapat segera dilakukan;
- Mengusulkan ide untuk membuat proyek-proyek baru yang mengembangkan teknologi eko-efisien – Memastikan pemahaman atas aspek dan dampak lingkungan yang terkait dengan proyek-proyek baru,
- Optimizing the use of natural resources – PT Vale must be efficient in the use of key resources, which include environmental resources and energy needed for the Company's activities and if possible, the Company develop and implement a plan to minimize key resource consumption;
- Practicing selective waste collection, both in the operational unit and administrative areas – Separating waste generated from operations, to enable recycling, reuse or proper disposal of each type of waste product;
- Minimizing the generation, emission and disposal of all types of pollutants or waste – Ensure action to avoid and minimize the generation of pollutants and waste, as well as performing proper waste disposal and emissions control;
- Preventing any negative impact on flora and fauna due to the Company's activities – Plan activities to minimize loss of vegetation, damage to flora and fauna. It also conducts rehabilitation and re-vegetation activities in the areas that have been mined;
- Identifying any deviations from standard processes that could cause damage to the environment – Every employee and all third parties should be able to recognize and identify any process that might damage the environment so that improvements can be made to alleviate any environmental impact;
- Reporting environmental incidents to the Environment Section and adopting measures to minimize the damage associated with the incident – All employees and third parties must recognize their respective roles in identifying environmental incidents and report those to the Environment Section so that measures to minimize the impact can be taken immediately;
- Proposing ideas for new eco-friendly technology projects – Ensure adequate understanding of environmental issues and impacts associated with new projects, changes to existing projects, and

perubahan proyek yang ada, dan mengusulkan/
mengembangkan ide-ide untuk membuat proyek-
proyek dengan teknologi eko-efisien.

propose/develop ideas to create projects that
utilizes eco-friendly technology.

PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Perlindungan Danau

Sistem Danau Malili terdiri dari tiga danau di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dalam program pengendalian dampak lingkungan PT Vale, sistem perlindungan Danau Malili menjadi prioritas. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, PT Vale beroperasi di wilayah yang sangat sensitif terhadap perubahan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan utama kami di Sorowako berada di antara tiga danau dengan ekosistem yang sangat unik.

Sistem Danau Malili dianggap sebagai sistem danau yang sangat penting karena merupakan danau purba dan memiliki tingkat endemisme yang sangat tinggi. Terdapat sejumlah spesies yang hanya bisa hidup di ketiga danau ini, bahkan ada beberapa yang hanya hidup di salah satu dari ketiga danau. Spesies-spesies yang unik ini memerlukan air dengan kualitas tertentu yang harus dijaga dengan baik.

IMPLEMENTATION OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT MANAGEMENT PROGRAM

Lake Protection

The Lake Malili system consists of three lakes in the Regency of East Luwu, South Sulawesi. The protection of the Lake Malili system is a priority in PT Vale's environmental impact management program. As mentioned above, PT Vale operates in a region that is environmentally sensitive. The majority of the Company's activities take place in Sorowako, between three lakes that support a unique ecosystem.

The Lake Malili system is considered to be an ancient lake with a very high level of endemism, and as such is very important. There are numerous species that can only live in these three lakes, and there are some that can only live in one of the three lakes, as they require water of a very specific quality that needs to be maintained properly.



Pengukuran parameter padatan tersuspensi air tambang
Measuring the mine water total suspended solids parameter

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Kualitas air di Sistem Danau Malili termasuk yang paling bersih di dunia. Tingkat padatan terlarut (*total dissolved solids*) di Danau Matano adalah sekitar 155 - 166 mg/l, jauh di atas baku mutu air minum (500 mg/l). Kebersihan air danau ini menunjukkan bahwa PT Vale telah berhasil melindungi danau selama masa operasinya lebih dari 40 tahun.

Untuk melindungi danau-danau tersebut PT Vale melaksanakan tiga kebijakan yang penting:

- Membatasi luas wilayah yang terbuka untuk penambangan, dan melakukan rehabilitasi dan revegetasi secepatnya setelah penambangan;
- Mengelola kualitas air tambang dan air dari pabrik pengolahan bijih nikel, terutama untuk parameter padatan tersuspensi (*total suspended solids*); dan
- Menurunkan kadar Cr^{6+} dan total Cr dengan instalasi pengolahan air tambang yang dikembangkan oleh PT Vale sendiri untuk memenuhi baku mutu.

Program Kepatuhan (*Compliance*)

Program kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup di PT Vale terdiri dari beberapa butir yang penting:

- Pengelolaan emisi udara;
- Pengelolaan air;
- Pengelolaan limbah;
- Reklamasi lahan pasca tambang; dan
- Pengelolaan dampak sesuai dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Setiap tahun PT Vale mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup).

Pada tahun 2015 PT Vale dinilai dengan sistem penilaian mandiri untuk periode Juli 2014 sampai Juni 2015 dan meraih Peringkat Biru. Ini artinya kegiatan PT Vale dinyatakan telah mematuhi seluruh peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Peringkat PROPER Biru ini merupakan pencapaian yang keempat secara berturut-turut sejak tahun 2012. Dengan demikian PT Vale secara konsisten dapat mempertahankan kinerja ketaatan pada peraturan lingkungan hidupnya.

Water in the Lake Malili system is among the cleanest in the world. The level of total dissolved solids in Lake Matano stands at approximately 155 - 166 mg/l, which is well above the drinking water quality standard of 500 mg/l. The water cleanliness in the lake indicates that PT Vale has managed to protect the lake throughout its 40 years of operations.

In order to protect these lakes, PT Vale has implemented three important policies:

- Limiting the mining area, and conducting rehabilitation and re-vegetation activities in the areas that have been mined;
- Managing the quality of mine water and water from the nickel ore processing plant, especially for total suspended solids parameter; and
- Lowering the levels of Cr^{6+} and total Cr through PT Vale's mine water processing plant to meet the required quality standard.

Compliance Program

PT Vale's environmental compliance program consists of the following:

- Management of air emissions;
- Water management;
- Waste management;
- Post mining land reclamation; and
- Management of impact in accordance with the Environmental Impact Analysis (EIA) documents.

Each year, PT Vale participates in a Performance Rating Program (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan or PROPER) organized by the Ministry of Environment and Forestry (previously called the Ministry of Environment).

In 2015, PT Vale was evaluated by a self-assessment system for the period of July 2014 to June 2015, and was ranked at the Blue Level, which means that the Company's activities complied with all the applicable environmental regulations.

This is the fourth year in a row that PT Vale has earned the PROPER Blue ranking since 2012. This shows the Company's continual commitment to maintain its compliance performance of the environmental regulations.

Selain PROPER, PT Vale juga mengikuti penilaian pengelolaan lingkungan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada tahun 2015 PT Vale kembali memperoleh Penghargaan Aditama dan trofi sebagai perusahaan Kontrak Karya Mineral terbaik setelah tahun 2014 lalu mendapat peringkat yang serupa.

Uji Coba Instalasi Pengolahan Air Tambang Baru

Terkait dengan program kepatuhan dan perlindungan danau, pada tahun 2014 PT Vale melakukan uji coba instalasi pengolahan air tambang baru, yaitu *Lamella Gravity Settler* (LGS). LGS ini berpotensi menurunkan kadar padatan tersuspensi (*total suspended solids*) dalam air tambang.

Uji coba dilakukan dalam skala pilot project di dua lokasi di wilayah pertambangan PT Vale dan hasilnya menunjukkan bahwa instalasi LGS ini dapat menurunkan padatan tersuspensi dari 4.000 mg/l lebih menjadi di bawah 10 mg/l. Perseroan telah menyelesaikan pengerjaan proyek LGS di tahun 2015 dan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan pengujian pada skala operasi lapangan.

Dampak Keuangan

Biaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di PT Vale di tahun 2015 mencapai AS\$10,2 juta. Biaya ini melebihi anggarannya, yaitu AS\$9.461.398.

Sertifikasi dan Sistem Manajemen Lingkungan

PT Vale telah mengembangkan sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem ini telah dibuat sesuai dengan ISO 14001, namun pada saat ini belum memiliki tersertifikasi.

Secara regular PT Vale melakukan audit terhadap sistem manajemen lingkungan tersebut. Berdasarkan hasil audit pada Desember 2015, pemenuhan terhadap sistem manajemen tersebut mencapai 64%.

In addition to PROPER, PT Vale's environmental management has also been assessed by the Ministry of Energy and Mineral Resources, which awarded the Company the Aditama Award and trophy as the best CoW Company in 2015. The Company received the same award the previous year.

Water Treatment Installation Trial at a New Mining Location

In relation to the compliance and lake protection program, in 2014, PT Vale conducted a trial of a water treatment installation called *Lamella Gravity Settler* (LGS). The LGS has the potential to reduce total suspended solids in the water where the mining activities are taking place.

Tests were performed in a pilot project scale at two locations within PT Vale's mining area, and the results showed that the LGS installation can reduce suspended solids in water from more than 4,000 mg/l to under 10 mg/l. The Company has completed the LGS project in 2015 and is currently in the checking and testing phase at field operation scale.

Financial Impact

In 2015, PT Vale's cost of environmental protection and management amounted to US\$10.2 million. These exceeded the initial budget which was set at US\$9,461,398.

Certification and Environmental Management System

PT Vale's environmental management system is linked to its occupational health and safety management system. This system has been developed in accordance with ISO 14001 and is currently awaiting certification.

PT Vale regularly conducts audits of its environmental management system. Based on December 2015 audit results, compliance with the management system reached 64%.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Kebijakan

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Vale diperbaharui dan diresmikan pada tahun 2012.

Memprioritaskan taraf hidup dan keselamatan para karyawan dan kontraktor merupakan nilai utama bagi Perseroan. PT Vale berkomitmen untuk mencapai kesempurnaan di bidang Kesehatan, dan Keselamatan, melalui pengelolaan K3 yang terintegrasi penuh meliputi semua tahapan operasi. Untuk mencapai tujuan ini semua tahapan dari eksplorasi, proses pertambangan sampai penutupan pertambangan harus diperhatikan.

Dalam rangka menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja yang unggul, Perseroan berkomitmen untuk:

- Mengelola risiko yang berhubungan dengan kegiatan, proses, tugas, fasilitas, produk dan layanan untuk menyediakan lingkungan kerja yang memberi kesempatan kepada para karyawan untuk bekerja tanpa risiko terluka atau jatuh sakit.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

Policy

PT Vale's Occupational Health and Safety (OHS) Policy was updated and launched in 2012.

Prioritizing the lives and safety of its employees and contractors' employees is primary value for the Company. PT Vale is committed to achieving excellence in Health and Safety, fully recognizing that OHS management must be fully integrated throughout all operations. For this goal to be achieved, all stages from exploration, mining, processing through to mine closure must be included.

To achieve excellence in the field of occupational health and safety, we commit ourselves:

- To manage risk associated with activities, processes, tasks, facilities, products and services to provide a work environment which enable employees to perform their duties without the risk of injuries or illness.



Uji kebisingan di area Pabrik Pengolahan
Noise parameter testing at Process Plant

- Fokus pada pencegahan polusi dan kecelakaan serta penyakit melalui pengelolaan risiko, strategi dan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Mematuhi peraturan Pemerintah dan Perseroan juga sejalan dengan international *best practice*.
- Mengupayakan perbaikan terus-menerus dalam menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja melalui Sistem Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan yang fokus pada solusi inovatif, pengembangan sumber daya manusia dan saling keterkaitan.
- Menyediakan Perlengkapan Pelindung yang standar (Kolektif atau Perorangan) untuk seluruh karyawan dan kontraktor PT Vale yang disesuaikan dengan risiko dari lingkungan kerja masing-masing.
- Mendukung para kontraktor dan pemasok untuk melanjutkan perbaikan performa dan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja milik mereka sendiri.
- To focus on the prevention of pollution, accidents, and occupational disease through Health and Safety risk management of the employees, strategies and facilities.
- To comply with government regulations and corporate requirements as well as to align with international best practices.
- To seek continuous improvement in Health and Safety performance through the development of the Health and Safety Management System, by focusing on innovative solutions, people development and engagement.
- To provide standard Protective Equipment (Collective or Personal) for all employees of PT Vale and its contractors in line with the risks of differing work environments.
- To encourage contractors and suppliers to continue their own Health and Safety performance and program improvements.

Prinsip PT Vale di bidang K3 mengatur bagaimana komitmen terhadap kebijakan diubah menjadi tindakan. Prinsip ini bila diterapkan dengan seksama akan memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan memperlihatkan secara jelas komitmen Perseroan terhadap K3. Prinsip tersebut meliputi:

- K3 merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemimpin, karyawan, pemasok dan kontraktor. Para pemimpin memberikan contoh yang baik untuk menciptakan kerja sama yang saling peduli. Karyawan berhak menolak melakukan suatu kegiatan apabila terdapat risiko yang tidak dapat diterima.
- Mendukung K3 berarti menghargai sumber daya manusia dan memahami bahwa karyawan berada di tahap awal, tengah dan akhir program K3 yang unggul. Karena itu, kualitas pengelolaan K3 memperlihatkan kualitas pengelolaan karyawan secara keseluruhan.
- Perbaikan performa K3 yang konsisten dan berkelanjutan harus diukur dan diawasi secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian dibandingkan terhadap tujuan dan target yang disesuaikan untuk memenuhi perubahan standar perbandingan dengan ketentuan peraturan perbandingan yang minimum. Jika tidak terdapat perbandingan
- PT Vale's principles of action in OHS set out how policy commitments are translated into action. These principles, if applied correctly, will provide added value to the Company and clearly demonstrate our commitment to OHS. These principles include:
- OHS is everyone's responsibility, of every leader, employee, supplier, and contractor. The leaders provide good examples, creating teamwork with care. Employees have the right to refuse to perform an activity if there is an unacceptable risk.
- Promoting OHS means valuing people and recognizes that employees are at the beginning, middle and end of having OHS excellence. Therefore, a quality OHS management implies overall quality employee management;
- Consistent and continuous improvement within OHS performance should be measured and controlled, both quantitatively and qualitatively. This is compared against set objectives and targets, targets which are adjusted to meet changing benchmarking standards with minimum benchmark regulation.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

- berdasarkan undang-undang, penerapan berdasarkan standar internasional menjadi syarat minimum performa seperti yang didokumentasikan pada audit, penilaian dan laporan rutin K3, beserta tindakan koreksi terhadap ketidakpatuhan
- Perseroan yang fokus terhadap K3, berarti mencatatkan 'Zero Harm'. Semua tindakan harus berorientasi pada pencapaian K3 yang unggul dengan 'Zero harm' sebagai tujuan akhir. Zero harm berarti perbaikan pengelolaan risiko secara terus menerus sehingga tidak terdapat kematian dan kecelakaan atau penyakit serius yang disebabkan oleh kerja yang terjadi pada karyawan dan kontraktor, serta tidak terjadi kerusakan terhadap properti Perseroan atau masyarakat.
 - Pengelolaan risiko mendapatkan hasil tersendiri. Semua risiko terkait dengan kegiatan, proses, pekerjaan, fasilitas, produk atau jasa dalam operasi harus diidentifikasi, dievaluasi dan diawasi pada tingkat terendah yang dapat diterima. Pencegahan kecelakaan dan penyakit yang timbul dari risiko-risiko tersebut membawa manfaat. Sebagai tambahan, adalah penting bahwa semua program pengelolaan pencegahan dan risiko demikian pula rencana keadaan darurat dan mitigasi diterapkan secara tepat.
 - Pengelolaan K3 berjalan dengan baik apabila diterapkan sistem distribusi tanggung jawab. Pengelolaan K3 harus selalu ditempatkan sebagai prioritas utama pada setiap tahapan operasional proyek yang akan mempengaruhi rantai produksi secara keseluruhan.
 - Pengelolaan K3 melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan harus diawasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan. Perhatian khusus harus diberikan berkaitan hubungan dengan penyedia layanan.

Perseroan mengharuskan seluruh karyawan dan kontraktor yang bekerja untuk PT Vale mematuhi Kebijakan K3 yang berlaku. Perseroan akan mendorong perkembangan budaya kesehatan dan keselamatan kerja yang berlangsung di mana setiap karyawan dilibatkan dan berkomitmen terhadap performa Kesehatan dan Keselamatan yang berkualitas. Sebagai tambahan, PT Vale berkomitmen menyiapkan kepemimpinan, komitmen, dan semua sumber daya yang mungkin untuk mencapai tujuan ini.

- Should there be no statutory provisions, application of international standards will be considered as a minimum level of performance as documented in OHS audit, assessment and regular reports along with corrective action against non-compliance;
- Company focus on OHS means "zero harm". Actions must be oriented towards achieving OHS excellence with zero harm as the ultimate goal. Zero harm means continually improving the management of risks so that there are no fatalities, no serious injuries or occupational diseases for employees and contractors as well as no damage to Company or community properties;
 - Risk management brings its own rewards. All risks associated with activities, processes, jobs, facilities, products or services in operations should be identified, evaluated and controlled at the lowest reasonable level. The prevention of injuries and illnesses arising from such risks is always beneficial. In addition, it is important that all prevention and risk management programs as well as emergency and mitigation plans be implemented properly.
 - OHS management works best as a distributed system of responsibility. OHS management should always be in top-of-mind throughout the project operational cycles, further influencing the production chain as a whole.
 - OHS management involves all stakeholders and should be assessed with regard to all stakeholders. Special attention should be given to its relationship to the service provider.

The Company requires that all employees and contractors working for PT Vale comply with the stated OHS Policy. We will strive to promote the on-going development of a health and safety culture where each employee is involved and committed to a quality Health and Safety performance. In addition, PT Vale is committed to providing the leadership, commitment, and all resources necessary to achieve these results.

Penerapan Program

Segegap upaya untuk optimisasi dan efisiensi produksi sepanjang tahun 2015 dilakukan dengan ketaatan penuh terhadap prinsip-prinsip K3. PT Vale memahami bahwa seluruh karyawan berhak bekerja dalam kondisi kerja yang aman. Walaupun demikian, Perseroan bekerja keras tanpa henti untuk menciptakan kondisi kecelakaan kerja nihil (*zero harm*).

Pemenuhan kebijakan K3 merupakan bagian penting dari perjanjian kerja bersama (PKB), mengingat kegiatan-kegiatan Perseroan berada di area pertambangan bijih besi dan produksi nikel yang mempunyai risiko tinggi.

Untuk mencapai tujuan *Zero Harm*, PT Vale menerapkan Sistem Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan meliputi Zero Harm dan Program Pencegahan Kematian serta meliputi penerapan *Major Hazard Standard* dengan *Contractor Safety Management System* (CSMS) sebagai kunci utama. Sebagai tambahan, program kunci lainnya untuk menjaga penerapan sebagai upaya yang terus menerus untuk mencapai tujuan Perseroan adalah *Golden Rules*, Pengembangan Kompetensi Pribadi, Program Kesadaran dan Komunikasi Keselamatan Kerja, *Engineering Risk Control* dan *Felt Leadership*. Yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan program Observasi, Inspeksi dan *Job Cycle Check* (JCC) di mana program tersebut memastikan kepatuhan terhadap seluruh standar kerja yang menjadi tanggung jawab setiap manajer lini dan senior. Hal ini dilakukan juga oleh Direksi pada setiap sesi *Safety Day*.

Untuk meningkatkan pengelolaan EHS berbasis kompetensi, PT Vale mengembangkan Sistem Manajemen Kompetensi EHS. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan program pelatihan EHS.

Dalam hal kesehatan, untuk mencegah penyakit akibat kerja, Perseroan akan terus menerapkan program pemantauan kesehatan kerja, program ergonomis dan pemeriksaan serta penilaian kesehatan karyawan, menyediakan sertifikat kesehatan untuk kegiatan kritis tertentu, serta peningkatan kualitas konselor psikologis.

Program Implementation

Efforts for optimization and production efficiency throughout 2015 were conducted with full adherence to OHS principles. PT Vale acknowledges that all employees are entitled to work in safe conditions. Therefore, the Company unceasingly works hard to create a zero injury condition (*zero harm*).

The fulfillment of the OHS policy is an important part of the collective labor agreement (CLA), given that the Company's activities are in the field of ore mining and nickel production, which have a high accident risk.

To achieve the Zero Harm objective, PT Vale implements an Environment Health & Safety Management System, encompassing for the Zero Harm and Fatality Prevention programs and involving Major Hazard Standard implementation with the Contractor Safety Management System (CSMS) as a key element. In addition, other key programs to keep implementation as a continuous effort to achieve the Company's goals are the Golden Rules, Personal Competency Development, Safety Awareness and Communication Program, Engineering Risk Control and Felt Leadership. Equally important, the execution of the Observation and Inspection program and Job Cycle Check (JCC) help ensure adherence to all field work standards by each line and senior manager. This is also been conveyed by Directors on each Safety Day session.

To improve our competency-based EHS management, PT Vale developed the EHS Competencies Management System. This system will increase efficiency in setup planning, execution, assessment, and reporting of the EHS training program.

In terms of health, to prevent occupational disease, the Company will continue to implement occupational health monitoring programs, ergonomic programs and employee health screening and assessments, providing also health certificates for specific critical activities and improving psychologist counselor engagement.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Untuk mendukung reaksi kesiapan operasional dalam menghadapi situasi darurat, tim Emergency Response Group (ERG) menjunjung tinggi kesiapan respon dan profesionalisme, fokus terhadap pencegahan, pemeliharaan peralatan pemadam api dan latihan keadaan darurat dengan beberapa skenario keadaan bahaya darurat.

To support operational reaction for emergency situations, the Emergency Response Group (ERG) Team upholds response readiness and professionalism, focusing also on prevention, fire protection equipment maintenance and emergency drilling for several vulnerable scenarios.

Topik K3	Bagian Dalam PKB Part of GLA	OHS Topics
Alat perlindungan diri	PKB 10.2 PKB 10.1.a PKB 10.4 PKB Bagian Pedoman Hubungan Industrial (BPHI) Bab I	Personal protective equipment
Golden Rules	PKB BPHI	Golden Rules
Komite bersama K3	PKB 10.1.c	OHS management joint committee
Pendidikan dan pelatihan K3	PKB 8.4 PKB 10.1.a	OHS education and training
Mekanisme penanganan keluhan	PKB 11.9	Complaint handling mechanism
Penyediaan ruangan istirahat/ruang makan, tempat cuci badan dan kakus	PKB 10.3.a	Provision of rest areas/canteen, wash facilities and toilets
Peningkatan kualitas kantin sehingga memenuhi standar kesehatan	PKB 10.3.a	Canteen improvements to meet health standards
Pencegahan "Penyakit Akibat Kerja"	PKB 10.3.b	Prevention of work-related diseases
Ijin mengemudi	BPHI Pasal 2	Driver's licenses



Aksi tanggap panggilan darurat
Response to emergency call

Dalam tahun 2015, kinerja K3 PT Vale adalah sebagai berikut (termasuk Kontraktor):

OHS performance in 2015 is as follows (including Contractors):

Tingkat Kecelakaan Kerja	Jumlah Total				Level of Working Accident
	2012	2013	2014	2015	
Ringan**	21	20	9	31	Medical Treatment Cases
Berat***	3	5	4	3	Lost Work Cases & Restricted Work Cases
Fatal	1	0	1	1	Fatality
Jumlah	25	25	14	35	Total

Catatan:
 ** Jumlah Kecelakaan Tambang kategori Ringan di tahun 2015 adalah 1 kecelakaan
 *** Jumlah Kecelakaan Tambang kategori Berat di tahun 2015 sebanyak 3 kecelakaan

Note :
 ** Number of Working Accidents in the Minor Category in 2015 was 1 accident
 *** Number of Working Accidents in the Major Category in 2015 was 3 accidents

Uraian	Jumlah Total				Description
	2012	2013	2014	2015	
Tingkat Kekerapan Kecelakaan Tercatat	1.25	1.38	0.81	0.67	Level of Recordable Injury Frequency Rate
Tingkat Kekerapan Kasus Kehilangan Jam Kerja	0.15	0.22	0.14	0.11	Lost Work Cases Frequency Rate
Kehilangan Hari Kerja	6,010	172	6,000	6,011	Lost Working Days

Jumlah karyawan di bidang K3 (tidak termasuk Kontraktor)	Unit Kerja	Periode Pelaporan/Reporting Period						Working Unit	Number of employees in OHS (excluding Contractors)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Keselamatan Kerja	98	91	105	62	86	64	Occupational Safety	
	Kesehatan Kerja	96	96	99	89	93	87	Occupational Health	
	Total	194	187	204	151	179	151		

Tingkat kekerapan terjadinya kecelakaan (TRIFR) (PT Vale & Kontraktor)	Tahun Year	Jumlah Terjadinya Kecelakaan Number of recordable injuries (TRI)	TRIFR	Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR) (PT Vale & Contractors)
	2010	28	1.55	
	2011	26	1.62	
	2012	25	1.25	
	2013	25	1.38	
	2014	14	0.81	
	2015	11	0.67	

TRIFR = jumlah terjadinya kecelakaan / total man hour x 1,000,000
 TRIFR = number of reportable injuries / total man hour x 1,000,000

Dampak Keuangan

Pada tahun 2015, PT Vale mengeluarkan biaya sejumlah Rp4,6 miliar untuk program K3. Jumlah tersebut tidak termasuk biaya keamanan, yang merupakan bagian dari proyek perbaikan Perseroan.

Financial Impact

In 2015, OHS costs for PT Vale employees amounted to Rp4.6 billion. This figure does not include the cost of safety, which is part of the Company's improvement projects.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Informasi lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial PT Vale terdapat dalam Laporan Keberlanjutan 2015 yang diterbitkan terpisah dari Laporan ini, namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai Laporan Tahunan Perseroan. Di samping itu, informasi terkini selalu dapat diunduh melalui laman: <http://www.vale.com/indonesia/EN/aboutvale/sustainability/>.

Additional information relating to the corporate social responsibility activities of PT Vale are contained in the Sustainability Report 2015, which is published separately from this report but has become an integral part of the company's Annual Report. In addition, the latest information can always be downloaded via the website: <http://www.vale.com/Indonesia/EN/aboutvale/sustainability/>.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP KONSUMEN

Kebijakan

Seluruh produksi PT Vale dijual kepada pemegang saham pendiri (*founding shareholders*) yaitu Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Penjualan tersebut dilakukan berdasarkan kontrak jangka panjang.

Di dalam kontrak penjualan tersebut ditentukan bahwa produk nikel matte produksi PT Vale harus memenuhi beberapa persyaratan dan spesifikasi teknis. Apabila terjadi pengiriman produk yang tidak memenuhi persyaratan dan spesifikasi, para pembeli harus mencari kesempatan untuk tetap menggunakan produk tersebut. Apabila pembeli tetap tidak bisa menggunakan produknya, maka PT Vale wajib mengganti produk yang tidak sesuai dengan persyaratan dengan produk yang memadai.

Pelaksanaan Program Tanggungjawab Terhadap Konsumen

Selama tahun 2015, seluruh pengiriman produk nikel matte dari PT Vale memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis.

Dampak Keuangan

Tidak ada dampak keuangan dari tanggungjawab Perseroan terhadap konsumen.

RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

Policy

The entire production of PT Vale is sold to the founding shareholders, who are Vale Canada Limited and Sumitomo Metal Mining. The sale is based on long-term contracts.

In the sales contract, it is determined that the nickel matte product that is produced by PT Vale must meet several requirements and technical specifications. In the event of the delivery of products that do not meet the requirements and specifications, the buyer should look for other opportunities to continue to use these products. If the buyer still cannot use the products, then PT Vale shall replace any product that does not comply with the requirements of the appropriate product.

Implementation of the Responsibility Program for the Consumer

During 2015, all of the shipments of nickel matte products from PT Vale met the requirements and technical specifications.

Financial impact

There is no financial impact on the company's responsibility to the consumer.

MANAJEMEN RISIKO

Sistem Manajemen Risiko

Penjelasan sistem manajemen risiko yang diterapkan di perseroan dapat dilihat pada Bab GCG, Bagian Sistem Pengendalian Intern.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penjelasan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan di perseroan dapat dilihat pada Bab GCG, Bagian Sistem Pengendalian Intern.

Risiko-risiko yang Dihadapi Perusahaan

Penjelasan risiko yang dihadapi perseroan dapat dilihat pada Bab GCG, Bagian Sistem Pengendalian Intern.

Upaya Pengelolaan Risiko

Penjelasan upaya mengelola risiko yang diterapkan di perseroan dapat di lihat pada Bab GCG, Bagian Sistem Pengendalian Intern.

RISK MANAGEMENT

Risk Management System

Explanation of the risk management system implemented in the company can be seen in Chapter GCG, Internal Control System Section.

Evaluation of Risk Management System

Effectiveness

Explanation of the evaluation of risk management system effectiveness can be seen in Chapter GCG, Internal Control System Section.

Risks Challenged by the company

Explanation of the risks challenged by the Company can be seen in Chapter GCG, Internal Control System Section.

Risk Management Procedures

Explanation of the risk management procedures of the Company can be seen in Chapter GCG, Internal Control System Section.

Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2015

Responsibility for the 2015 Annual Report

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab penuh atas ketepatan dari Laporan Tahunan ini berikut laporan-laporan keuangan dan informasi lainnya yang terkait.

Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for the correctness of this Annual Report and the accompanying financial statements and related financial information.

7 Maret 2016/March 7, 2016

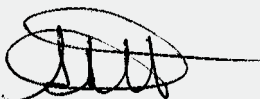
Dewan Komisaris Board of Commissioners



Jennifer Maki
Presiden Komisaris
President Commissioner



Arief T. Surowidjo
Wakil Presiden Komisaris dan
Komisaris Independen
Vice President Commissioner
and Independent Commissioner



**Andrea Marques
De Almeida**
Komisaris
Commissioner



Mark Travers
Komisaris
Commissioner



Robert Morris
Komisaris
Commissioner



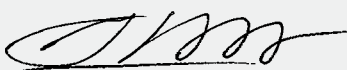
Stuart Harshaw
Komisaris
Commissioner



Akira Nozaki
Komisaris
Commissioner



Nobuhiro Matsumoto
Komisaris
Commissioner



Irwandy Arif
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Idrus A. Paturusi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

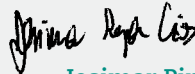
Direksi Board of Directors



Nico Kanter
Presiden Direktur
President Director



Bernardus Irmanto
Wakil Presiden Direktur
Vice President Director



Josimar Pires
Direktur
Director



Febriany Eddy
Direktur
Director

Laporan Keuangan

Financial Statements

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

**DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT AND FOR
THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**

PT VALE INDONESIA Tbk

Atas nama Direksi, yang bertanda tangan di bawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1.	Nama	Nicolas D. Kanter	Name
	Alamat	Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190	Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Cikatomas II No. 5	Address of Domicile (as per Identity Card)
	Nomor Telepon	+62 21 524 9001/524 9000	Telephone
	Jabatan	Presiden Direktur/President Director	Position
2.	Nama	Febriany	Name
	Alamat	Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190	Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Senopati Raya, RT/RW 008/003 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
	Nomor Telepon	+62 21 524 9002/524 9000	Telephone
	Jabatan	Direktur Keuangan/Chief Financial Officer	Position

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Vale Indonesia Tbk (the "Company"); |
| 2. Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner; |
| b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | b. The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts, and |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perseroan. | 4. We are responsible for the Company's internal control systems. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi

For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 25 Februari 2016/February 25, 2016

Presiden Direktur/President Director

Direktur Keuangan/Chief Financial Officer

(Nicolas D. Kanter)

(Febriany)



PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: Plaza Bapindo - Citibank Tower 22nd Floor, Jl. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9020

Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90001, Indonesia. T. (62) 411 873 731 F. (62) 411 856 157

Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Sulawesi Selatan, Indonesia. T. (62) 21 524 9100 F. (62) 21 524 9565

valeindonesia.co.id

PT Vale Indonesia Tbk

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.3, 5a	194,754	302,256	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2.3, 5b	90,154	-	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.3, 5c	32,863	16,389	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	2.4, 2.22, 6, 31e	78,200	92,706	- Related parties
Persediaan, bersih	2.5, 8	104,066	139,287	Inventories, net
Pajak dibayar dimuka	2.13, 14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		-	9,913	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		91,137	50,841	- Other taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2.6, 9	5,045	5,745	Prepayments and advances
Aset keuangan lancar lainnya	7, 31e	3,742	4,297	Other current financial assets
Jumlah aset lancar		599,961	621,434	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Pajak dibayar dimuka	2.13, 14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		28,976	647	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		43,578	87,523	- Other taxes
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	2.4, 2.22, 31e	263	211	- Related parties
Aset tetap, bersih	2.7, 2.8, 2.9, 10, 11	1,603,302	1,608,523	Fixed assets, net
Aset keuangan tidak lancar lainnya	12	13,081	15,852	Other non-current financial assets
Jumlah aset tidak lancar		1,689,200	1,712,756	Total non-current assets
JUMLAH ASET		2,289,161	2,334,190	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA 31 DECEMBER 2015 DAN 2014**
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
- Pihak-pihak berelasi	2.20, 2.22, 13, 31f	8,712	6,147	- Related parties
- Pihak ketiga	2.20, 13	76,924	68,067	- Third parties
Akrual	2.12, 15a, 31f	16,802	32,030	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.14, 16	5,600	20,910	Short-term employee benefit liabilities
Utang pajak	2.13, 14b	1,806	41,845	Taxes payable
Bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang	2.19, 17	36,219	35,979	Current portion of long-term bank borrowings
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	2.14	176	346	Share-based payment liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	15b	2,260	3,066	Other current financial liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		148,499	208,390	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka panjang	2.19, 17	109,858	146,617	Long-term bank borrowings
Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang	2.14, 18	14,383	10,909	Long-term post-employment benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan, bersih Provisi atas penghentian pengoperasian aset	2.13, 14d	124,780	133,644	Deferred tax liabilities, net
	2.11, 26	57,684	49,277	Provision for asset retirement
Jumlah liabilitas jangka panjang		306,705	340,447	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		455,204	548,837	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
- Modal dasar - 39.745.354.880 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham (nilai penuh) pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014				- Authorized capital - 39,745,354,880 shares with par value Rp25 per share (full amount) as at December 31, 2015 and December 31, 2014
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.936.338.720 saham pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	19	136,413	136,413	- Issued and fully paid capital - 9,936,338,720 shares as at December 31, 2015 and December 31, 2014
Tambahan modal disetor	21	277,760	277,760	Additional paid-in capital
Saldo Laba	2.11, 22a, 22b			Retained earnings
- Dicadangkan		27,283	45,534	- Appropriated
- Belum dicadangkan		1,392,501	1,325,646	- Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		1,833,957	1,785,353	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2,289,161	2,334,190	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Pendapatan	2.12, 2.22, 31a	789,745	1,038,082	Revenue
Beban pokok pendapatan	2.12, 23	(671,389)	(731,420)	Cost of revenue
LABA BRUTO		118,356	306,662	GROSS PROFIT
Pendapatan lainnya	2.12, 25a	1,357	913	Other income
Beban usaha	2.12, 24	(11,562)	(14,464)	Operating expenses
Beban lainnya	2.12, 25b	(28,400)	(43,666)	Other expenses
LABA USAHA		79,751	249,445	OPERATING PROFIT
Biaya keuangan	2.11, 2.19, 17, 26	(9,923)	(12,514)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		69,828	236,931	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	2.13, 14c	(19,327)	(64,660)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		50,501	172,271	PROFIT FOR THE YEAR
RUGI KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:	2.14, 18			Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja		(2,530)	(1,500)	- Remeasurement of post- employment benefit liabilities
- Pajak penghasilan terkait rugi komprehensif lain		633	375	- Income tax on other comprehensive loss
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF LAIN		(1,897)	(1,125)	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE LOSS
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		48,604	171,146	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
- Dasar dan dilusian (dalam Dolar AS)	2.15, 29	0.005	0.017	- Basic and diluted (in US Dollars)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DECEMBER 2015 DAN 2014**
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	804,251	1,011,278	Receipts from customers
Pembayaran kas ke pemasok	(499,397)	(551,857)	Payments to suppliers
Pembayaran pajak penghasilan badan	(56,427)	(40,391)	Payments of corporate income tax
Pengembalian pajak, bersih	6,298	10,214	Refunds of taxes, net
Pembayaran ke karyawan	(76,167)	(86,965)	Payments to employees
Penempatan jaminan reklamasi	(16,612)	-	Placement of reclamation guarantee
Penerimaan lainnya	1,357	913	Other receipts
Pembayaran lainnya	(29,407)	(19,864)	Other payments
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	<u>133,896</u>	<u>323,328</u>	Net cash flows from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran untuk pembelian aset tetap	(106,390)	(76,846)	Payments for acquisition of fixed assets
Penempatan investasi jangka pendek	(90,154)	-	Placement of short-term investments
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(196,544)</u>	<u>(76,846)</u>	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen	(36)	(99,552)	Payments of dividends
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(40,704)	(41,228)	Placement of restricted cash
Penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya	40,843	41,561	Usage of restricted cash
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(37,500)	(37,500)	Payments of long-term borrowings
Pembayaran beban keuangan	(6,044)	(7,331)	Payments of finance costs
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(43,441)</u>	<u>(144,050)</u>	Net cash flows used in financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	<u>(106,089)</u>	<u>102,432</u>	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>302,256</u>	<u>200,020</u>	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	<u>(1,413)</u>	<u>(196)</u>	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>194,754</u>	<u>302,256</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1. Umum

PT Vale Indonesia Tbk, ("Perseroan") didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan akta No.121 tanggal 29 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 29 Juni 2015. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015. Sekitar 58,73% saham Perseroan dimiliki oleh Vale Canada Limited, sekitar 20,49% oleh masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia, sekitar 20,09% oleh Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., dan oleh lainnya sekitar 0,69% (lihat Catatan 19).

Entitas induk langsung Perseroan adalah Vale Canada Limited dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.

Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor yang terdaftar berlokasi di Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

Kewenangan operasi Perseroan awalnya didasarkan atas Kontrak Karya yang ditandatangani pada 27 Juli 1968 ("Kontrak Karya 1968") oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan Perseroan, yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu lainnya di daerah yang sudah ditentukan di pulau Sulawesi. Kontrak Karya 1968 berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pada tanggal 15 Januari 1996, Perseroan dan Pemerintah menandatangani Persetujuan Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya 1968 ("KK 1996"), yang memperbaharui masa operasi Perseroan sampai tahun 2025.

Pada 17 Oktober 2014, Pemerintah dan Perseroan kembali menandatangani amandemen Kontrak Karya 1996 sebagai hasil kesepakatan renegotiasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pertambangan 2009 ("KK 2014").

Perubahan-perubahan dalam KK 2014 utamanya berfokus kepada enam butir strategis sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah: (1) luas wilayah Kontrak Karya; (2) keberlanjutan operasi usaha; (3) penerimaan negara; (4) kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; (5) kewajiban divestasi; dan (6) kewajiban pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri.

KK 2014 yang telah ditandatangani telah mengamankan strategi bisnis Perseroan masa mendatang; KK 2014 memberikan kepastian investasi sehubungan dan hak dan kewajiban Perseroan. Berdasarkan ketentuan KK 2014, Kontrak Karya Perseroan akan berakhir pada tahun 2025 dan Perseroan dapat mengajukan untuk melanjutkan operasinya dalam bentuk izin usaha untuk jangka waktu perpanjangan dua kali sepuluh tahun, setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah.

KK 2014 mengatur secara rinci mengenai wilayah (Perseroan setuju untuk mengurangi wilayah kontraknya dari 190.510 hektar menjadi 118.435 hektar), peningkatan kewajiban divestasi dan perubahan tarif royalti.

Selain itu, KK 2014 juga mengatur mengenai komitmen Perseroan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri, serta mengenai komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Dengan ditandatanganinya KK 2014, kesanggupan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam KK 1996 telah digantikan dengan komitmen investasi baru di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara (lihat Catatan 36e).

1. General

PT Vale Indonesia Tbk, ("the Company") was established on July 25, 1968 by deed No. 49 dated July 25, 1968 drawn up before Eliza Pondaag, a public notary in Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968 and published in Supplement No. 93 to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968. These Articles of Association have been amended several times with the latest amendment made by deed No. 121, dated June 29, 2015, drawn up before Leolin Jayayanti S.H., a public notary in Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association as approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on June 29, 2015. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0938647.AH.01.02 Year 2015 dated July 3, 2015 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0948078 Year 2015 dated July 3, 2015. Approximately 58.73% of the Company's shares are currently owned by Vale Canada Limited, approximately 20.49% by the public through the Indonesia Stock Exchange, approximately 20.09% by Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., and approximately 0.69% by others (refer to Note 19).

The Company's immediate parent company is Vale Canada Limited and the ultimate parent entity is Vale S.A., a company established under the laws of the Federal Republic of Brazil.

The Company's plant is located in Sorowako, South Sulawesi and the registered office is located in Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

The Company's authority to operate was originally granted pursuant to a Contract of Work ("CoW") dated July 27, 1968 ("the 1968 CoW") entered into by the Government of the Republic of Indonesia ("the Government") and the Company, which granted the Company the right to develop and operate a project for nickel and certain other minerals in defined areas within the island of Sulawesi. The 1968 CoW expired on March 31, 2008. On January 15, 1996, the Company and the Government signed the Agreement on Modification and Extension of the 1968 Contract ("the 1996 CoW"), renewing the term of the Company's operations to 2025.

On October 17, 2014, the Government and the Company signed an amendment of the 1996 CoW marking the conclusion of the renegotiation process, as required by the 2009 Mining Law ("The 2014 CoW").

Amendments in the 2014 CoW primarily focused on six Government-identified strategic items: (1) size of the Contract of Work area; (2) continuity of business operations; (3) state revenues; (4) domestic processing and refining obligations; (5) divestment obligations; and (6) the obligation to prioritize use of domestic manpower, goods and services.

The executed 2014 CoW secures the Company's future business strategy; it provides investment certainty in respect of the Company's rights and obligations. Under the terms of the 2014 CoW, the Company's Contract of Work is set to expire in 2025 and the Company may apply to continue its operations by way of business license for a period of two consecutive ten-year extensions upon approval of the Government.

The 2014 CoW details the Company's land package (the Company agreed to reduce its contract area from 190,510 hectares to 118,435 hectares), increased divestment obligation and changes in the royalty rate.

Further, the 2014 CoW reflects the Company's commitment to prioritize domestic manpower, goods and services and outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy. By the signing of the 2014 CoW, the Company's undertakings as set out in the 1996 CoW are replaced by new investment commitments in South Sulawesi, Central Sulawesi, and Southeast Sulawesi (refer to Note 36e).

1. Umum (lanjutan)

Sehubungan dengan kewajiban keuangan, berikut adalah perubahan-perubahan prinsip dalam KK 2014:

- Perseroan akan membayar royalti atas penjualan nikel *matte* sebesar 2%; akan meningkat menjadi 3% apabila harga nikel di pasar Bursa Logam London ("*the London Metal Exchange*" atau "LME") mencapai AS\$21.000/MT;
- Luran tetap akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penerimaan negara bukan pajak;
- Pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri yang ditetapkan setelah 1 April 2010 dan sampai dengan 31 Desember 2014 akan tetap dikenakan pemotongan pajak penghasilan dengan tarif 7,5%; dan setelahnya, akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perseroan akan terus membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan dalam KK 1996 dan setuju untuk mengikuti perubahan atas peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan pada sektor pertambangan (yang saat ini tengah dikaji) dengan persyaratan tertentu; dan
- Perseroan akan membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air ("PLTA") Perseroan yang ada pada saat ini dibangun dan beroperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah tahun 1975. Keputusan ini, yang secara efektif juga mencakup pembangkit listrik Karebbe dan Balambano (yang merupakan tambahan dari fasilitas pembangkit listrik awal Larona), memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas listrik tenaga air tersebut, dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dua tahun sebelum pengambilalihan. Tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh Perseroan sampai saat ini. Apabila hak tersebut digunakan, fasilitas tersebut akan dialihkan sebesar nilai bukunya dan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau harga pasar masing-masing untuk aset tetap PLTA dan aset lainnya, dengan syarat Pemerintah menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi Perseroan, yang tarifnya ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan pada Keputusan Pemerintah tahun 1975 tersebut.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1978.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 49,7 juta lembar saham atau 20% dari 248,4 juta lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), pada tanggal 16 Mei 1990.

Saham yang diterbitkan oleh Perseroan terdiri atas saham biasa, dimana setiap satu saham memberikan satu hak suara bagi pemegang saham ataupun kuasanya yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan, dan hak atas dividen dan pembagian sisa aset Perseroan dalam hal Perseroan dibubarkan, proporsional terhadap jumlah saham yang dimiliki.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada 6 Juli 2004, para pemegang saham menyetujui dilakukannya pemecahan saham biasa dari satu saham menjadi empat saham. Hal ini berlaku efektif mulai 3 Agustus 2004.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 17 Desember 2007, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi sepuluh saham, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Hal ini berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia mulai 15 Januari 2008.

1. General (continued)

With respect to financial obligations, the following are the principal changes in the 2014 CoW:

- The Company shall pay a royalty rate of 2% of sales for nickel *matte*; which will increase to 3% when the London Metal Exchange ("LME") nickel price reaches US\$21,000/MT;
- Land lease shall be in accordance with prevailing laws and regulations in respect of non-tax state revenue;
- Payments of dividends to original shareholders declared after April 1, 2010 up to December 31, 2014 shall continue to be subject to withholding for income tax at the rate of 7.5%; and thereafter, shall be in accordance with prevailing laws and regulations;
- The Company shall continue to pay land and building tax in accordance with the 1996 CoW and agree to transition to the amended land and building tax regulation on mining sector (that is currently being reviewed) subject to certain conditions; and
- The Company shall pay regional taxes and regional retributions in accordance with prevailing laws and regulations.

The Company's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operating pursuant to the Governmental Decree of 1975. This decree, which effectively covers the Karebbe and the Balambano power plants (which are additions to the original Larona facility), provides the Government with the right to acquire the hydroelectric facilities, with two years' prior written notice to the Company. No such notice has been given to date. If this right is exercised, the facilities will be transferred at their net book value and lower of cost or market price for hydro dam fixed assets and other assets respectively, under the condition that the Government shall supply the Company with sufficient electrical power for its operations, at a rate based on formula stated in the Governmental Decree of 1975.

As stated in Article 3 of its Articles of Association, the Company's main activities are exploration and mining, processing, storage, transportation and marketing of nickel and associated mineral products. The Company started its commercial operations in 1978.

In 1990, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 49.7 million shares or 20% of the 248.4 million shares issued and fully paid. The shares offered to the public in the IPO were registered on the Jakarta Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) on May 16, 1990.

The Company's shares consist of common shares, where the holder of one share or his proxy is entitled to one vote at the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), and to dividends and the proceeds upon winding up of the Company in proportion to the number of the shares held.

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on July 6, 2004, the shareholders approved a four-for-one stock split of the Company's common shares. This became effective on August 3, 2004.

At the EGMS held on December 17, 2007, the shareholders approved a ten-for-one stock split of the Company's common shares, with the objective of increasing the liquidity of the Company's shares. This became effective on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2008.

1. Umum (lanjutan)

Per 31 Desember 2015 dan 2014, komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
Presiden Komisaris	Jennifer Anne Maki	Jennifer Anne Maki	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	Arief T. Surowidjojo*)	Arief T. Surowidjojo *)	Vice President Commissioner
Komisaris	Stuart Alan Harshaw Andrea Marques De Almeida Mark James Travers Akira Nozaki Nobuhiro Matsumoto Robert Morris Irwandy Arif *) Idrus Paturusi *)	Stuart Alan Harshaw Gerd Peter Poppinga Mark James Travers Mikinobu Ogata Nobuhiro Matsumoto Kevin James Graham Irwandy Arif *) Idrus Paturusi *)	Commissioners
Ketua Komite Audit	Irwandy Arif	Irwandy Arif	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit	Sidharta Utama Dedi Rudaedi	Sidharta Utama -	Audit Committee Members
Presiden Direktur	Nicolas D. Kanter	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	Bernardus Irmanto	Bernardus Irmanto	Vice President Director
Direktur	Febriany Eddy Josimar Souza Pires	Febriany Eddy Josimar Souza Pires	Directors

*) Komisaris Independen

Perseroan mengadakan RUPST pada 31 Maret 2015 yang menyetujui antara lain, nilai total dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar AS\$0,01007 per saham, yang merupakan dividen interim yang telah dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 4 Desember 2014, penyisihan laba Perseroan sebagai dana cadangan sebesar 6,6% atau setara dengan AS\$11,3 juta dari laba bersih Perseroan sebagai dana cadangan umum, penunjukan kembali Direksi Perseroan, penerimaan pengunduran diri Komisaris Perseroan dan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Terkait dengan susunan Dewan Direksi, pemegang saham menyetujui penunjukan kembali Josimar Souza Pires sebagai Direktur, efektif sejak penutupan RUPST 2015 sampai dengan penutupan RUPST 2017. Terkait dengan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Gerd Peter Poppinga sebagai Komisaris efektif sejak penutupan RUPST 2015.

Perseroan mengadakan RUPSLB pada 29 Juni 2015 yang menyetujui antara lain, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Terkait dengan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui penunjukan Andrea Marques De Almeida sebagai Komisaris, efektif sejak penutupan RUPSLB 2015 sampai dengan penutupan RUPST 2016.

Perseroan mengadakan RUPSLB kembali pada 30 September 2015 yang menyetujui antara lain, perubahan komposisi dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Terkait dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Mikinobu Ogata dan Kevin James Graham sebagai anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham menyetujui penunjukan Akira Nozaki dan Robert Allan Morris sebagai anggota Dewan Komisaris, efektif sejak penutupan RUPSLB 2015 sampai dengan penutupan RUPST 2016.

1. General (continued)

As at December 31, 2015 and 2014, the composition of the Company's Board of Commissioners, Audit Committee and Board of Directors were as follows:

2014	December 31
Jennifer Anne Maki	President Commissioner
Arief T. Surowidjojo *)	Vice President Commissioner
Stuart Alan Harshaw Gerd Peter Poppinga Mark James Travers Mikinobu Ogata Nobuhiro Matsumoto Kevin James Graham Irwandy Arif *) Idrus Paturusi *)	Commissioners
Irwandy Arif	Chairman of Audit Committee
Sidharta Utama -	Audit Committee Members
Nicolas D. Kanter	President Director
Bernardus Irmanto	Vice President Director
Febriany Eddy Josimar Souza Pires	Directors

*) Independent Commissioners

The Company held an AGMS on March 31, 2015, which approved, among others, the total dividend for the financial year ending December 31, 2014 in the amount of US\$0.01007 per share, being the interim dividend already paid to shareholders of record as at December 4, 2014, the appropriation of 6.6% or equal to US\$11.3 million of the Company's net profit to the general reserve, the re-appointment of the Directors of the Company, the resignation of a Commissioner of the Company and appointment of the public accountant who will audit the Company's financial statements for the year ending December 31, 2015.

With regard to composition of the Board of Directors, the shareholders approved the re-appointment of Josimar Souza Pires as Director, effective as at the closing of the 2015 AGMS until the closing of the AGMS in 2017. With regard to composition of the Board of Commissioners, the shareholders approved the resignation of Gerd Peter Poppinga as Commissioner, effective as at the closing of the 2015 AGMS.

The Company held an EGMS on June 29, 2015 which approved among others, the appointment of a member of the Board of Commissioners and the approval of amendments to the Company's Articles of Association.

With regard to the composition of the Board of Commissioners, the shareholders approved the appointment of Andrea Marques De Almeida as a Commissioner, effective as at the closing of the 2015 EGMS until the closing of the AGMS in 2016.

The Company held another EGMS on September 30, 2015 which approved, among others, the amendment and appointment of members of the Board of Commissioners.

With regard to the amendment to the Board of Commissioners composition, the shareholders approved the resignation of Mikinobu Ogata and Kevin James Graham as members of the Board of Commissioners and the shareholders approved the appointment of Akira Nozaki and Robert Allan Morris as members of the Board of Commissioners, effective as at the closing of the 2015 EGMS until the closing of the AGMS in 2016.

1. Umum (lanjutan)

Masa jabatan Erry Firmansyah sebagai anggota Komite Audit berakhir pada bulan Oktober 2014. Perseroan telah menandatangani surat pengikatan, sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan Dedi Rudaedi yang menggantikan Erry Firmansyah terhitung sejak Januari 2015.

Jumlah seluruh karyawan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 3.107 (31 Desember 2014: 3.122) (tidak diaudit).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan

Ikhtisar kebijakan akuntansi Perseroan yang signifikan berikut ini disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan terlampir. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten dalam semua hal yang material untuk tahun yang tercakup oleh laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan lain. Laporan keuangan Perseroan dibuat dan disetujui oleh Dewan Direksi pada tanggal 25 Februari 2016.

2.1. Penyajian laporan keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kontrak Karya dengan Pemerintah, pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") dan dalam Bahasa Inggris.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Laporan keuangan disusun berdasarkan pada konsep harga perolehan historis kecuali asset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi merupakan hal yang signifikan dalam laporan keuangan, diungkapkan dalam Catatan 4.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi ribuan Dolar AS yang terdekat, yang merupakan mata uang penyajian dan fungsional, kecuali dinyatakan lain.

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

2.2. Penjabaran mata uang

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada akhir periode. Penjabaran dari aset dan liabilitas lainnya umumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Selama tahun berjalan, transaksi-transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku selama bulan berjalan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan transaksi dalam mata uang asing dibukukan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2.3. Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank, dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari pada saat ditempatkan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Investasi likuid jangka pendek lainnya yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari tiga bulan tapi kurang dari dua belas bulan pada saat ditempatkan disajikan secara terpisah sebagai investasi jangka pendek.

1. General (continued)

Erry Firmansyah's term of office as Audit Committee member ended in October 2014. The Company entered into an engagement letter, as approved by the Board of Commissioners, with Dedi Rudaedi who replaced Erry Firmansyah as of January 2015.

The total number of employees as at December 31, 2015 was 3,107 (December 31, 2014: 3,122) (unaudited).

2. Summary of significant accounting policies

The following summary of the significant accounting policies of the Company is presented to assist the reader in evaluating the accompanying financial statements. These policies have been followed consistently in all material respects for the years covered in the financial statements, unless otherwise stated. The Company's financial statements were prepared and approved by the Board of Directors on February 25, 2016.

2.1. Presentation of financial statements

As required by its CoW with the Government, the Company maintains its books in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$") and in English.

The financial statements are prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, and the Regulations and Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosure Guidance issued by the Financial Service Authority ("FSA"). The financial statements are prepared based on the historical cost concept except for financial assets and liabilities at fair value through statements of profit or loss and other comprehensive income, and using the accrual basis except for the statement of cash flows.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. The Indonesian Financial Accounting Standards also require management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of US Dollars, which is the presentation and functional currency, unless otherwise stated.

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates.

2.2. Translation of currencies

At each statement of financial position date, monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at period-end exchange rates. The translation of all other assets and liabilities are generally recognized at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions.

During the year, transactions in currencies other than US Dollars are translated at rates prevailing during each month. Gains or losses resulting from the translation and from foreign exchange transactions are included in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2.3. Cash and cash equivalents, short-term investments, and restricted cash

Cash and cash equivalents include cash in hand, cash in banks, and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Other short-term highly liquid investments with original maturities of more than three months but less than twelve months at the time of placement are presented separately as short-term investments.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.3. Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan.

2.4. Piutang usaha dan non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang masih harus dibayar oleh pelanggan untuk nikel dalam *matte* yang dijual dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perseroan.

Piutang usaha dan non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Penyisihan untuk penurunan nilai dari piutang usaha dan non-usaha dibuat ketika terdapat bukti objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih keseluruhan nilai yang terdapat pada ketentuan awal dari piutang tersebut. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, kemungkinan bahwa debitur mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan terhadap pembayaran dipertimbangkan sebagai indikator bahwa piutang usaha dan non-usaha mengalami penurunan nilai. Nilai dari penyisihan adalah selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai kini dari perkiraan arus kas dimasa datang, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif awal. Nilai tercatat dari aset dikurangi pos cadangan, dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketika piutang usaha dan non-usaha tidak dapat tertagih, piutang usaha dan non-usaha dihapus terhadap pos cadangan untuk piutang usaha dan non-usaha. Pemulihan jumlah tertagih yang sebelumnya dihapus dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2.5. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai dari persediaan barang jadi nikel dan nikel dalam proses dinilai dengan dasar biaya produksi rata-rata dan persediaan bahan pembantu (*supplies*) dinilai dengan metode harga pembelian rata-rata. Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan pembantu, tenaga kerja serta alokasi biaya overhead yang terkait secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel.

2.6. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

2.7. Aset tetap

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan historis, dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengembangan tambang merupakan biaya-biaya yang terjadi di area penambangan sebelum aktivitas penambangan dimulai. Termasuk ke dalam biaya ini adalah biaya-biaya untuk pembuatan jalan yang memberikan akses ke area-area tambang.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.3. Cash and cash equivalents, short-term investments, and restricted cash (continued)

Cash and cash equivalents which are restricted for use, are presented separately as "restricted cash".

The statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents are presented net of overdrafts.

2.4. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for nickel in *matte* sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Non-trade receivables from related parties are receivables reflecting loans given to related parties of the Company.

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less provision for impairment. A provision for impairment of trade and non-trade receivables is established when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Significant financial difficulties of the debtor, the probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganization, and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade and non-trade receivable is impaired. The amount of the provision is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account, and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. When a trade and non-trade receivable is uncollectible, it is written off against the allowance account for trade and non-trade receivables. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2.5. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost of finished nickel inventory and nickel in process is determined using an average production cost basis and supplies at an average purchase cost basis. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories, if any, is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.

Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and the estimated selling expenses.

Cost of finished goods and work in progress is comprised of supplies, labor and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads.

2.6. Prepayments

Prepaid expenses are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the expected period of benefits.

2.7. Fixed assets

Fixed assets are stated at historical cost, less accumulated depreciation. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Mine development costs represent expenditures incurred in a mining area before mining activities commence. Included in these costs is construction of roads providing access to mining areas.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.7. Aset tetap (lanjutan)

Biaya-biaya selanjutnya diikutsertakan kedalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika memadai, hanya ketika besar kemungkinan masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang terkait dengan aset tetap akan mengalir ke dalam Perseroan dan biaya dari aset tetap tersebut dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Keseluruhan perbaikan dan perawatan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode keuangan dimana hal tersebut terjadi.

Biaya eksplorasi dibebankan pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2.8. Aset tetap dalam penyelesaian

Akumulasi biaya dari konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke dalam aset tetap ketika konstruksi telah selesai. Depresiasi dibebankan sejak tanggal dimana aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Biaya keuangan dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang seluruh biaya pinjaman atas seluruh pinjaman yang belum dibayarkan, di luar pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset dalam penyelesaian tertentu yang memenuhi syarat.

2.9. Penyusutan, depleksi dan amortisasi

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus yang didasarkan atas taksiran masa manfaat suatu aset, estimasi masa produksi cadangan bijih, atau selama masa berlakunya Kontrak Karya yang mana yang lebih dulu. Pengecualian terhadap kebijakan ini adalah untuk fasilitas bendungan air yang penyusutannya dilakukan selama masa manfaat 40 tahun berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975, seperti yang dijelaskan pada Catatan 1 atas laporan keuangan ini.

Estimasi masa manfaat untuk penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	5 - 40
Jalan dan jembatan	5 - 30
Bangunan	5 - 30
Pengembangan tambang	5 - 30
Pabrik dan mesin	5 - 30
Perabotan dan peralatan kantor	5

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Perseroan mengalokasikan komponen dari aset tetap yang biaya perolehannya signifikan dan mendepresiasi komponen tersebut secara terpisah jika komponen tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda.

Amortisasi biaya pemugaran dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.7. Fixed assets (continued)

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of a replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance are charged to statement of profit or loss and other comprehensive income during the financial period in which they are incurred.

Exploration costs are expensed as incurred.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2.8. Construction in progress

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Finance and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expended on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset under construction.

2.9. Depreciation, depletion and amortization

Depreciation of fixed assets is calculated on a straight-line method based on the earlier of the estimated useful life of the asset, the estimated period of production from ore reserves, or the period of the CoW. An exception to this policy is the hydroelectric dam facilities, which are depreciated over a 40-year useful life based on the 1975 Decree of the Indonesian Government, as referred to in Note 1 to these financial statements.

The estimated useful lives of fixed assets used for depreciation are as follows:

	Years
Hydroelectric dam buildings and facilities	5 - 40
Roads and bridges	5 - 30
Buildings	5 - 30
Mine development	5 - 30
Plant and machinery	5 - 30
Furniture and office equipment	5

The assets' residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

The Company allocates significant components of the fixed asset costs and depreciates separately each significant component if those components have different useful lives.

Amortization of refurbishment costs is calculated on the estimated economic useful life of the refurbishment using a straight-line method.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.10. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas - sebagai contoh, *goodwill* atau aset tak berwujud - tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan. Aset ditelaah untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan standar akuntansi lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

2.11. Pengeluaran untuk lingkungan hidup

Operasi Perseroan telah, dan di masa akan datang mungkin akan dipengaruhi secara berbeda dari waktu ke waktu perubahan-perubahan dalam peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup. Kebijakan Perseroan adalah memenuhi semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut, dengan menerapkan langkah-langkah yang secara teknis telah teruji dan layak secara ekonomis.

Pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan program lingkungan hidup dan reklamasi yang sedang berjalan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, atau dikapitalisasi dan disusutkan tergantung pada masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang. Cadangan jaminan reklamasi, yang kemudian diubah dengan suatu mekanisme garansi bank, juga telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 22a). Disamping itu, provisi atas penghentian pengoperasian aset telah diakui sebesar taksiran biaya penutupan area tambang, penghentian dan pembongkaran fasilitas.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset dicatat untuk mengakui kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian penggunaan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penghentian penggunaan aset tetap ini adalah penarikan selain penghentian sementara pemakaian termasuk penjualan, penelantaran, pendaur-ulangan/penghapusan dengan cara lainnya.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset diakui sebagai liabilitas pada saat kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian sebuah aset timbul, dan pada awalnya diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Di samping itu, biaya penghentian pengoperasian aset dalam jumlah yang sama dengan jumlah liabilitasnya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset yang berkaitan yang kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan. Kewajiban ini dibebankan pada lebih dari satu periode pelaporan, jika kejadian yang menimbulkan kewajiban itu timbul dalam lebih dari satu periode pelaporan. Misalnya, bila ada sebuah fasilitas yang ditutup untuk selamanya tetapi rencana penutupan ditetapkan lebih dari satu periode pelaporan, biaya penutupan tersebut akan diakui selama periode pelaporan sampai rencana penutupan selesai.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.10. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill or intangible assets - are not subject to amortization and are tested annually for impairment. Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income, except for assets measured using the revaluation model as required by other accounting standards. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

2.11. Environmental expenditures

The operations of the Company have been, and may in the future be affected from time to time to varying degrees by changes in environmental regulations. The Company's policy is to meet the requirements of all applicable regulations issued by the Government by the application of technically proven and economically feasible measures.

Expenditures that relate to ongoing environmental and reclamation programs are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred, or capitalized and depreciated depending on their future economic benefits. A reclamation guarantee reserve which subsequently was changed to a bank guarantee mechanism has also been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 22a). In addition, a provision for asset retirement has been recognized for the estimated costs of mine closure, decommissioning and dismantling of facilities.

The provision for asset retirement is provided for legal or constructive obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset is its other than temporary removal from service including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

Provisions for asset retirement are recognized as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial measurement of the obligation measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects the current market assessment of the time value of money and the risks specific to the obligation. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalized as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to passage of time is recognized as finance costs. These obligations are incurred over more than one reporting period when the events that create the obligation occur over more than one reporting period. For example, if a facility is permanently closed but the closure plan is developed over more than one reporting period, the cost of the closure of the facility is incurred over the reporting periods when the closure plan is finalized.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.11. Pengeluaran untuk lingkungan hidup (lanjutan)

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Perseroan akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Perseroan akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana Perseroan merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasi adanya suatu liabilitas serta jumlahnya dapat diukur, maka Perseroan akan mencatat estimasi liabilitas tersebut. Dalam menentukan keberadaan liabilitas yang berkaitan dengan lingkungan, Perseroan mengacu pada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2.12. Pengakuan pendapatan dan beban

Penjualan merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk Perseroan. Penjualan diakui sebagai penghasilan ketika terjadi pengalihan risiko kepada pelanggan berdasarkan ketentuan dalam kontrak penjualan, dan:

- Produk tersebut berada dalam kondisi yang layak untuk dikirimkan dan tidak diperlukan proses lebih lanjut oleh, atau atas nama, Perseroan;
- Besar kemungkinan Perseroan memperoleh manfaat ekonomis dari transaksi tersebut;
- Produk telah diserahkan kepada pelanggan dan secara fisik sudah tidak berada dalam pengendalian Perseroan (atau kepemilikan atas produk telah terlebih dahulu beralih ke pelanggan); dan
- Harga dan serta biaya penjualan dapat ditentukan dengan tingkat akurasi yang memadai.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan metode akrual.

2.13. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan perseroan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut berkaitan dengan transaksi yang langsung diakui dalam ekuitas atau dalam pendapatan komprehensif lain.

Pajak kini merupakan pajak terutang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan kena pajak atau rugi pajak tahun berjalan, menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada saat tanggal pelaporan, dan mencakup penyesuaian periode sebelumnya baik untuk keperluan rekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan, atau untuk mencatat perbedaan yang timbul dari penilaian pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan atas manfaat pajak di masa yang akan datang, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*).

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.11. Environmental expenditures (continued)

The changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flows) required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Company will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is such an indication, the Company will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for the impairment loss incurred, if any.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Company is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Company accrues the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Company applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

2.12. Revenue and expense recognition

Sales represent revenue earned from the sale of the Company's products. Sales are recognized as revenue when risk of ownership has passed to the customer, based on the terms of the contract, and:

- The product is in a form suitable for delivery and no further processing is required by, or on behalf of, the Company;
- Economic inflows related to the transaction is probable;
- The product has been dispatched to the customer and is no longer under the physical control of the Company (or ownership in the product has previously been passed to the customer); and
- The selling price and expenses can be determined with reasonable accuracy.

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

2.13. Income taxes

Income tax expense comprises of current and deferred corporate income tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable or refundable on the taxable income or loss for the year, using tax rates substantively enacted as of the reporting date, and includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.13. Pajak penghasilan (lanjutan)

Dalam menentukan besarnya jumlah pajak kini dan tanggungan, Perseroan memperhitungkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan setiap tambahan pajak dan denda.

Aset dan liabilitas pajak tanggungan disajikan secara saling hapus di laporan posisi keuangan sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan Perseroan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan banding, pada saat keputusan banding tersebut ditetapkan.

2.14. Liabilitas imbalan kerja

a. Imbalan pensiun

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang berlaku semenjak akhir 2012. Sebelumnya Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti. Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan dengan metode iuran tetap kepada pengelola dana pensiun baik yang wajib, berdasarkan kontrak maupun sukarela. Namun, dikarenakan Undang-undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 mewajibkan Perseroan untuk memberikan imbalan kepada karyawan dalam usia pensiun dengan jumlah manfaat tertentu berdasarkan masa kerjanya, ada kemungkinan bahwa Perseroan harus melakukan pembayaran imbalan tambahan apabila jumlah akumulasi dana iuran pensiun pada program pensiun iuran pasti lebih kecil dari jumlah imbalan pensiun yang diharuskan berdasarkan UU Ketenagakerjaan (lihat Catatan 18).

Perseroan mengakui kelebihan pembayaran (jika ada) yang akan diperlukan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, atas program pensiun iuran pasti, sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan, akun liabilitas imbalan pascakerja.

Perhitungan kewajiban atas imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris independen menunjukkan bahwa perkiraan imbalan pensiun yang disediakan oleh program pensiun Perseroan yang ada akan memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

Termasuk di dalam liabilitas imbalan pensiun ini adalah bonus masa kerja yaitu tambahan imbalan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan yang mencapai usia pensiun normal (55 tahun). Imbalan ini merupakan tambahan dari program pensiun reguler. Besarnya imbalan ini dihitung oleh Perseroan berdasarkan golongan dan usia karyawan.

Perseroan mengadopsi PSAK No. 24 (Revisi 2013), Imbalan Kerja, dimana pengukuran ulang dari kewajiban imbalan pasti (sebagai contoh, keuntungan dan kerugian aktuarial) diakui langsung di penghasilan komprehensif lain. Sebelumnya, Perseroan mengakuinya di dalam laba rugi menggunakan pendekatan koridor yang memperbolehkan penundaan pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial.

Sebagai tambahan, saat manfaat suatu program diganti atau saat suatu program mengalami kurtailmen, dampak perubahannya yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian kurtailmen diakui langsung di laba rugi. Sebelumnya, biaya jasa lalu *non-vested* diamortisasi di laba rugi dengan metode garis lurus sepanjang periode rata-rata sisa masa kerja ekspektasian (lihat Catatan 3).

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.13. Income taxes (lanjutan)

In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statements of financial position in the same manner as the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to the Company's taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is determined.

2.14. Employment benefit liabilities

a. Pension benefits

The Company maintained a defined contribution pension plan starting from the end of 2012. Prior to this, the Company maintained a defined benefit plan. The defined contribution pension plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions to trustee-administered pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labor Law No. 13/2003 requires the Company to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount, as required by the Labor Law, in particular when the cumulative contributions are less than that amount (refer to Note 18).

The Company recognizes the excess (if any) of the payments that would be required under the Labor Law, over the defined contributions paid, as a liability in the statements of financial position, accounted for as post-employment benefit liabilities.

The calculation of the pension benefit obligation, performed by the independent actuary, shows that the expected pension benefits provided by the Company's pension plan will meet the minimum requirements of the Labor Law.

Included in the liabilities recognized for pension benefits is an additional benefit provided by the Company, referred to as a service bonus, which is provided to employees who reach normal retirement age (55 years). This benefit is in addition to the regular pension benefit provided under the plan. The Company has calculated this benefit based on the grade and age of employees.

The Company adopts the provision of PSAK No. 24 (2013 Revision), Employee Benefits, where remeasurements of the net defined benefit liability (for example, actuarial gains and losses) are recognized immediately in other comprehensive income. Previously, the Company recognized it in profit or loss using the corridor approach which allowed for deferred recognition of actuarial gains/losses.

In addition, when the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognized immediately in profit or loss. Previously, non-vested past service cost was amortized to profit or loss on a straight-line basis over the estimated average remaining vesting period (refer to Note 3).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.14. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

2.14. Employment benefit liabilities (continued)

b. Imbalan kesehatan pascakerja

b. Post-retirement medical benefits

Perseroan memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk para karyawan yang telah pensiun. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan dipekerjakan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") yang ditandatangani pada bulan Januari 2011 dan memilih untuk mengikuti program ini. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang berkualifikasi. Sejak tahun 2014, Perseroan mengubah metode pembiayaan atas program ini dengan menggunakan program asuransi.

The Company provides post-retirement healthcare benefits to eligible retirees. The entitlement to these benefits is usually given to those employees who remain in service up to retirement age and were hired prior to the signing of the Collective Labor Agreement ("CLA") in January 2011 and opted to enroll into this program. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that for defined benefit pension plans. A qualified independent actuary values this liability annually. Starting from 2014, the Company has changed its method to fund this program through an insurance program.

c. Imbalan pesangon

c. Termination benefits

Pesangon adalah pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja pada saat Perseroan menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kininya.

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan with low possibility of withdrawal. Termination benefits payable more than 12 months after the financial position date are discounted to reflect present value.

d. Program bagi laba dan bonus

d. Profit sharing and bonus plans

Perseroan mengakui liabilitas dan beban untuk bonus dan pembagian laba, berdasarkan rumus-rumus tertentu yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja Perseroan. Perseroan mengakui adanya provisi ini apabila terdapat kewajiban kontraktual atau apabila praktik di masa lalu telah menimbulkan kewajiban ini.

The Company recognizes a liability and an expense for bonuses and profit sharing, based on the applicable formulas which consider various aspects of the Company's performance. The Company recognizes a provision where it is contractually obligated or when a past practice has created a constructive obligation.

e. Pembayaran berbasis saham

e. Share-based payments

Perseroan memberikan imbalan opsi saham kepada karyawan tertentu yang besarnya setara dengan kas, sebesar selisih antara harga pasar saham dengan harga opsi saham pada tanggal jatuh tempo. Biaya imbalan ini dicatat ketika harga pasar melebihi harga opsi saham, sebesar selisih antara kedua harga tersebut. Perubahan yang terjadi pada harga pasar saham antara tanggal pemberian imbalan dan tanggal pencatatan akan dicatat sebagai perubahan estimasi biaya imbalan tersebut dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Company awards certain employees share option equivalents to receive cash, equal to the excess of the market price of the Company's shares at the exercise date over the option price. The cost is measured as the amount by which the quoted market value of the vested shares covered by the grant exceeds the option price. The changes in the quoted market value of the shares between the date of the grant and the measurement date result in a change in the estimate of the compensation and are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

2.15. Laba per saham dasar

2.15. Basic earnings per share

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia untuk pemegang saham dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding for the relevant year.

2.16. Pelaporan segmen

2.16. Segment reporting

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of an enterprise:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to the transactions with different components within the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by the enterprise's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.17. Aset keuangan

2.17. Financial assets

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori berikut (i) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, (ii) pinjaman dan piutang, dan (iii) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Pengklasifikasian tergantung kepada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangannya saat pengakuan awal. Pengakuan atas pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan – tanggal dimana Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

The Company classifies its financial assets into the categories of (i) financial assets at fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income, (ii) loans and receivables, and (iii) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. Recognition of regular purchases and sale of financial assets are recognized on the trade-date – the date on which the Company commits to purchase or sell the asset.

(i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(i) Financial assets at fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah aset keuangan yang diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan. Aset keuangan akan diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan apabila tujuan utama perolehannya adalah untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti aktual akan adanya pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai diperdagangkan kecuali jika mereka ditujukan dan berlaku efektif sebagai instrumen lindung nilai. Aset pada kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, aset tersebut diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Financial assets at fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income are financial assets classified as held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments. Assets in this category are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada aset keuangan yang dikategorikan sebagai diperdagangkan (31 Desember 2014: nihil).

As at December 31, 2015 there are no financial assets categorized as held for trading (December 31, 2014: nil).

(ii) Pinjaman dan piutang

(ii) Loans and receivables

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap dan dapat ditentukan dan tidak diperdagangkan pada pasar aktif. Piutang dan pinjaman awalnya diakui pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman dan piutang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, piutang pihak berelasi non-usaha dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed and determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. They are included in current assets, except for maturities greater than 12 months after the end of reporting period. These are classified as non-current assets. Loans and receivables consist of cash and cash equivalents, short-term investments, restricted cash, trade receivables, other current financial assets, non-trade receivables from related parties and other non-current assets.

(iii) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

(iii) Available-for-sale financial assets

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual merupakan aset keuangan yang diperoleh dan disimpan untuk periode tidak dapat ditentukan, dimana dapat dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai tukar atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo maupun aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud melepasnya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Available-for-sale financial assets are financial assets that are intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity investments or financial assets at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income. They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of them within 12 months of the end of the reporting period.

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual (31 Desember 2014: nihil).

As at December 31, 2015, there were no financial assets classified as available-for-sale financial assets (December 31, 2014: nil).

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Company classifies its financial liabilities into the categories of (i) financial liabilities at fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.17. Aset keuangan (lanjutan)

2.17. Financial assets (continued)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Financial liabilities (continued)

(i) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(i) Financial liabilities at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income

Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan akan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk diperdagangkan apabila pada saat perolehan awalnya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti aktual akan adanya pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai diperdagangkan kecuali jika mereka ditujukan dan berlaku efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Financial liabilities at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income are financial liabilities classified as held for trading. A financial liability is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Financial liabilities carried at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income are initially recognized at fair value and subsequently carried at fair value, with gains and losses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (31 Desember 2014: nihil).

As at December 31, 2015, there are no financial liabilities classified as liabilities at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income (December 31, 2014: nil).

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

(ii) Financial liabilities measured at amortized cost

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain akan masuk ke dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah utang lainnya, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman.

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through the statement of profit or loss and other comprehensive income fall into this category and are measured at amortized cost. Financial liabilities measured at amortized cost are other payables, accrued expenses and borrowings.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai aset menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Amortized cost is measured by discounting the asset amounts using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest method are recognized in profit or loss.

Pada saat pengakuan awal, utang lainnya, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Other payables, accrued expenses and borrowings are initially measured at fair value less any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, these financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak legal untuk melakukan saling hapus dan terdapat intensi untuk menyelesaikan berdasarkan nilai bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realized and the liability settled simultaneously.

2.18. Penurunan nilai aset keuangan

2.18. Impairment of financial assets

Pada setiap tanggal posisi keuangan Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

The Company assesses at each balance sheet date whether there is an objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

2.18. Impairment of financial assets (continued)

Kriteria yang Perseroan gunakan untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

The criteria that the Company uses to determine if there is objective evidence of an impairment loss include:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak meminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak meminjam, memberikan keringanan pada pihak meminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak meminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak meminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - memburuknya status pembayaran pihak meminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

- significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- the lenders, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider, if the borrower did not experience such difficulty;
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:
 - adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 - national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the carrying amount of the asset and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the original effective interest rate of the financial asset. The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss will be reversed either directly or by adjusting an allowance account. The reversal will not result in the carrying value of the financial asset exceeding what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date of the impairment reversal. The reversal amount will be recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2.19. Pinjaman

2.19. Borrowings

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income over the period of the borrowings, using the effective interest rate method.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Fees paid on establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until draw-down occurs. To the extent there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perseroan mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran untuk paling tidak 12 bulan setelah tanggal posisi keuangan.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the balance sheet date.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.20. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam transaksi bisnis pada umumnya. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

2.20. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Utang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Trade payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2.21. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan Perseroan pada periode dimana dividen tersebut dideklarasikan.

2.21. Dividends

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognized as a liability in the Company's statements of financial position in the period in which the dividends are declared.

2.22. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Seorang individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut akan berelasi dengan entitas pelapor ketika individu bersangkutan:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (iii) merupakan manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2.22. Related party transactions

A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

- (i) has control or joint control over the reporting entity;
- (ii) has significant influence over the reporting entity; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh individu berelasi seperti didefinisikan diatas.
- (vii) Orang yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a related person as identified above.
- (vii) A person that has control or joint control over the reporting entity that has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

3. Perubahan kebijakan akuntansi

3. Changes in accounting policies

3.1. Standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2015

3.1. New standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2015

- (i) Penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain.

- (i) Presentation of items of other comprehensive income.

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", Perseroan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

In connection with the adoption of PSAK No. 1 (2013 Revision), "Presentation of Financial Statements", the Company has modified the presentation of items of other comprehensive income in its statements of profit or loss and other comprehensive income, to present items that would be reclassified to profit or loss in the future separately from those that would never be reclassified to profit or loss. Comparative information has been represented on the same basis.

3. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

3.1. Standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2015 (lanjutan)

(ii) Imbalan kerja

Berlaku sejak 1 Januari 2015, Perseroan telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Penerapan PSAK ini meniadakan mekanisme koridor dan menggantikannya dengan pengungkapan liabilitas kontingen dengan klarifikasi dan pengungkapan sederhana. Manajemen telah menentukan sejauh mana dampak retrospektif dan menyimpulkan bahwa dampaknya tidak material. Oleh karena itu, penyajian kembali laporan keuangan secara retrospektif tidak diperlukan.

3.2. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan namun belum efektif

Beberapa standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi telah diterbitkan tetapi belum efektif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dan tidak diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini, namun mungkin relevan untuk Perseroan:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2016

- PSAK 16 (Amandemen 2015) – Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi;
- ISAK 30 – Pungutan
- PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi;
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap;
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 53 (Penyesuaian 2015): Pembayaran Berbasis Saham;
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar.

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2017

- PSAK 1 (Amandemen 2015) – Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini, manajemen telah mempelajari dampak yang timbul dari penerapan standar/interpretasi ini dan belum merefleksikannya pada laporan keuangan Perseroan.

Penerapan dini revisi dan standar baru diatas sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan, kecuali PSAK No.1.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontingen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan berdasarkan kondisi yang ada.

Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut di mana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan di mana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam periode mendatang.

Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan.

3. Changes in accounting policies (continued)

3.1. New standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2015 (continued)

(ii) Employee benefits

Effective January 1, 2015, the Company has implemented PSAK No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". The revised PSAK removed the corridor mechanism and replaced the contingent liability disclosure with simple clarifications and disclosures. Management has determined the extent of the retrospective impact and conclude that the impact is not material. Therefore, the restatement of financial statements retrospectively is not required.

3.2. New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective

Certain new/revised accounting standards and interpretations have been issued that are not yet effective for the year ended 31 December 2015, and have not been applied in preparing these financial statements, but may be relevant to the Company:

Effective starting on or after January 1, 2016

- PSAK 16 (2015 Amendment) – Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization in Fixed Assets;
- ISAK 30 – Levies;
- PSAK 7 (2015 Annual Improvement): Related Party Disclosures;
- PSAK 16 (2015 Annual Improvement): Fixed Assets;
- PSAK 25 (2015 Annual Improvement): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;
- PSAK 53 (2015 Annual Improvement): Share-Based Payments;
- PSAK 68 (2015 Annual Improvement): Fair Value Measurement.

Effective starting on or after January 1, 2017

- PSAK 1 (2015 Amendment) – Disclosure Initiatives in Presentation of Financial Statements.

As at the issuance of these financial statements, management have evaluated the impact of these revised standards/interpretations and has yet to reflect on the Company's financial statements.

Early adoption of these new and revised standards prior to January 1, 2015 is not permitted, except for SFAS No.1.

4. Critical accounting estimates and judgments

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgments, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

Further details of the nature of these assumptions and conditions may be found in the relevant notes to the financial statements.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4. Critical accounting estimates and judgments (continued)

4.1. Estimasi cadangan

4.1. Reserve estimates

Cadangan adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari aset Perseroan. Untuk memperkirakan cadangan bijih nikel, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga-harga komoditas, biaya modal dan nilai tukar mata uang.

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Company's properties. In order to estimate nickel ore reserves, assumptions are required about a range of geological, technical, capital costs and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratios, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Memperkirakan jumlah dan/atau kadar cadangan membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman lapisan bijih atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Estimating the quantity and/or grade of reserves requires the size, shape and depth of ore bodies or fields to be determined by analyzing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perseroan dalam berbagai cara, diantaranya:

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Company's financial results and financial position in a number of ways, including:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat berubah jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi untuk aktivitas purna operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

- Carrying values of assets may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- Depreciation and amortization charged in the statement of profit or loss and other comprehensive income may change where the useful economic lives of assets change.
- Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

4.2. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

4.2. Provision for asset retirement

Kebijakan akuntansi Perseroan atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dan penghentian dan pembongkaran fasilitas membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti: persyaratan kerangka hukum dan peraturan yang relevan; besarnya kemungkinan kontaminasi atau kerusakan serta waktu, luas dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan perbedaan antara jumlah pengeluaran aktual di masa depan dari jumlah yang disisihkan pada saat ini. Provisi yang telah diakui di tinjau secara berkala dan diperbaharui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu.

The Company's accounting policy for the recognition of provisions for environmental reclamation and mine closure and decommissioning and dismantling of facilities requires the use of significant estimates and assumptions such as: requirements of the relevant legal and regulatory framework; the magnitude of possible contamination or disturbance and the timing, extent and costs of required environmental reclamation and mine closure activities. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The recognized provision is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

4.3. Pajak penghasilan

4.3. Income taxes

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi provisi pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Perseroan. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Judgment and assumptions are required in determining capital allowances and the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Company. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, these differences will have an impact on the current income tax and deferred income tax provisions in the period in which the determination was made.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kumulatif rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas dimasa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi tambang, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditure, dividends and other capital management transactions.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4. Critical accounting estimates and judgments (continued)

4.4. Penurunan nilai aset non-keuangan

4.4. Impairment of non-financial assets

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat kembali dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

In accordance with the Company's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated at every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss is recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai membutuhkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan' di atas), biaya operasi, biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserve estimates' above), operating costs, environmental reclamation and mine closure costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja

4.5. Pension benefits and post-retirement medical benefits

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) bersih untuk imbalan dimaksud termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

The present value of the pension benefits and post-retirement medical benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for the pension benefits and post-retirement medical benefits include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension benefits and post-retirement medical benefits.

Perseroan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Perseroan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi Pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the retirement benefits and post-retirement medical benefits. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of high-quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which those benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related retirement benefits and post-retirement medical benefits.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for the pension benefit and post-retirement medical benefit obligations are based in part on current market conditions.

5a. Kas dan setara kas

5a. Cash and cash equivalents

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Kas	13	19	Cash on hand
Bank:			Cash in bank:
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
JP Morgan Chase Bank N.A.	38,153	83,965	JP Morgan Chase Bank N.A.
Citibank N.A.	8,732	6,944	Citibank N.A.
Dalam mata uang Rupiah			Denominated in Rupiah
Citibank N.A.	4,721	10,194	Citibank N.A.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,870	1,005	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	422	106	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
	53,898	102,214	
Deposito berjangka:*)			Time deposits:*)
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
BNP Paribas	65,129	70,000	BNP Paribas
ANZ Bank	50,085	60,010	ANZ Bank
Standard Chartered Bank	20,000	70,013	Standard Chartered Bank
Dalam mata uang Rupiah			Denominated in Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	5,629	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
	140,843	200,023	
Jumlah	194,754	302,256	Total

*) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan dari pada saat ditempatkan.

*) Time deposits with a maturity period of less than three months at the time of placement.

Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

The average interest rates on the above time deposits are as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
Deposito Dolar AS	0.5%	0.3%	US Dollar deposits
Deposito Rupiah	8.1%	-	Rupiah deposits

Tidak ada kas dan setara kas pada pihak-pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents held with related parties.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana dijabarkan diatas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

5b. Investasi jangka pendek

5b. Short-term investments

Investasi jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari tiga bulan tapi kurang dari enam bulan dari pada saat ditempatkan adalah sebagai berikut:

Short-term investments with a maturity period of more than three months but less than six months at the time of placement are as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Deposito berjangka:			Time deposits:
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
Standard Chartered Bank	50,077	-	Standard Chartered Bank
ANZ Bank	30,049	-	ANZ Bank
BNP Paribas	10,028	-	BNP Paribas
Jumlah	90,154	-	Total

Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

The average interest rates on the above time deposits are as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
Deposito Dolar AS	0.6%	-	US Dollar deposits

5c. Kas yang dibatasi penggunaannya

5c. Restricted cash

31 Desember	2015	2014	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
MUFG Union Bank N.A	16,251	16,389	MUFG Union Bank N.A
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11,551	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	5,061	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Jumlah	32,863	16,389	Total

Rekening pada MUFG Union Bank N.A. ditujukan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhutang. Rekening ini dibuka untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior ("SEFA") antara Perseroan dengan Mizuho Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. untuk Proyek Karebbe (lihat Catatan 17).

The account with MUFG Union Bank N.A. is intended for payment of loan principal and interest payable. This account was established to fulfill the requirement of the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") between the Company and Mizuho Bank, Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. for the Karebbe Project (refer to Note 17).

Penempatan deposito berjangka pada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia ditujukan sebagai jaminan atas penerbitan bank garansi oleh bank sehubungan dengan jaminan reklamasi Perseroan (lihat Catatan 22a) dan bea cukai.

The time deposits placement with bank Mandiri and Bank Rakyat Indonesia was intended as a collateral in relation to the bank guarantee issued by the bank in relation to the Company's reclamation guarantee (refer to Note 22a) and customs.

6. Piutang usaha

6. Trade receivables

31 Desember	2015	2014	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Pihak-pihak berelasi	78,200	92,706	Related parties

Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah tercatat piutang usaha kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

Due to the short-term nature of trade receivables, their carrying amount approximates their fair values.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan diatas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

Pada tanggal 31 Desember 2015, piutang usaha sebesar AS\$78,2 juta (31 Desember 2014: AS\$92,7 juta) (nilai penuh) belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Piutang tersebut akan jatuh tempo dalam 30 hari.

As at December 31, 2015, trade receivables of US\$78.2 million (December 31, 2014: US\$92.7 million) (full amount) are not yet past due nor impaired. Those receivables will be due within 30 days.

Pada tanggal 31 Desember 2015, piutang usaha sebesar nihil (31 Desember 2014: nihil) (nilai penuh) telah lewat jatuh tempo sampai dengan 60 hari namun tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2015, trade receivables of nil (December 31, 2014: nil) (full amount) were past due up to 60 days but not impaired.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Based on a review of the status of each customer's receivable accounts at the end of the period, the Company's management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2015 and 2014.

Tidak ada piutang usaha yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: nihil).

There were no trade receivables pledged as collateral as at December 31, 2015 (December 31, 2014: nil).

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

7. Aset keuangan lancar lainnya

7. Other current financial assets

31 Desember	2015	2014	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Pinjaman kepada karyawan	3,614	4,248	Loans to employees
Tagihan kepada kontraktor	128	49	Receivables from contractors
Jumlah	3,742	4,297	Total

Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah nilai tercatat atas aset keuangan lancar lainnya kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of other current financial assets approximates their fair values.

7. Aset keuangan lancar lainnya (lanjutan)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan diatas.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, aset keuangan lancar lainnya belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Analisis umur aset keuangan lancar lainnya adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Sampai dengan 3 bulan	1,032	1,111	Up to 3 months
3 bulan sampai 1 tahun	2,710	3,186	3 months to 1 year
Jumlah	3,742	4,297	Total

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan setiap akun pada akhir periode, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya nilai di atas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

7. Other current financial assets (continued)

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

As at December 31, 2015 and 2014, other current financial assets were not yet past due nor impaired. The aging analysis of these other current financial assets is as follows:

Based on a review of the status of each account at the end of the period, the Company's management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2015 and 2014.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

8. Persediaan

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Nikel			Nickel
Dalam proses	31,621	35,836	In process
Barang jadi	8,909	16,034	Finished
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai persediaan	(12,940)	-	Less: Provision for decline in inventory value
	27,590	51,870	
Bahan pembantu	78,079	90,525	Supplies
Dikurangi: Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(1,603)	(3,108)	Less: Provision for obsolete supplies
	76,476	87,417	
Jumlah	104,066	139,287	Total

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal – 1 Januari	-	-	Beginning balance – January 1
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(12,940)	-	Provision for decline in inventory value
Saldo akhir	(12,940)	-	Ending balance

Movement in the provision for decline in inventory value is as follows:

Mutasi penyisihan bahan pembantu usang adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal – 1 Januari	(3,108)	(2,224)	Beginning balance – January 1
Pemulihan/(Penyisihan) untuk bahan pembantu usang	1,505	(884)	Recovery/(Provision) for obsolete supplies
Saldo akhir	(1,603)	(3,108)	Ending balance

Movement in the provision for obsolete supplies is as follows:

Manajemen Perseroan yakin bahwa penyisihan untuk bahan pembantu usang telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari bahan pembantu usang. Tidak ada persediaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: nihil).

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan" sebesar AS\$671 juta (31 Desember 2014: AS\$731 juta) (nilai penuh).

The Company's management believes that the provision for obsolete supplies is adequate to cover possible losses from obsolete supplies. There were no inventories pledged as collateral as at December 31, 2015 (December 31, 2014: nil).

The cost of inventories recognized and included in "cost of revenue" amounted to US\$671 million (December 31, 2014: US\$731 million) (full amount).

8. Persediaan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, semua persediaan Perseroan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri berikut, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau elektrik dan termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungungan untuk aset Perseroan dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2015 adalah AS\$6.499 juta (31 Desember 2014: AS\$6.235 juta), dengan batasan sebesar AS\$800 juta per kejadian (31 Desember 2014: AS\$800 juta) (nilai penuh). Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu atas biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam *matte* sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksinya kembali. Menurut pendapat manajemen, pertanggungungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

9. Biaya dibayar dimuka dan uang muka

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Asuransi dibayar dimuka	3,060	3,389	Prepaid insurance
Uang muka ke kontraktor dan pemasok	1,985	2,356	Advance to contractors and suppliers
Jumlah	5,045	5,745	Total

8. Inventories (continued)

As at December 31, 2015, all of the Company's inventories were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by industrial all risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value of the Company's assets and related business interruption exposure as at December 31, 2015 was US\$6,499 million (December 31, 2014: US\$6,235 million), with policy limits of US\$800 million per occurrence (December 31, 2014: US\$800 million) (full amount). Supplies are insured at replacement cost, nickel in process at the cost of ore raw materials and labor expended plus a proper proportion of overhead charges, while nickel in *matte* finished goods are insured at the regular net cash selling price or at reproduction cost, whichever is higher. In management's opinion, the insurance is adequate to cover possible losses from such risks.

9. Prepayments and advances

10. Aset tetap

10. Fixed assets

	1 Januari/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2015	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Harga perolehan						Cost
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	927,983	-	4,274	-	932,257	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	62,600	-	149	-	62,749	Roads and bridges
Bangunan	617,030	-	3,795	-	620,825	Buildings
Pabrik dan mesin	1,483,846	-	71,631	(2,021)	1,553,456	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	33,674	-	28	-	33,702	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	29,672	6,154	4,687	-	40,513	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian *)	160,717	110,011	(84,564)	-	186,164	Construction in progress *)
Jumlah	3,315,522	116,165	-	(2,021)	3,429,666	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(290,388)	(25,528)	-	-	(315,916)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(23,330)	(3,831)	7	-	(27,154)	Roads and bridges
Bangunan	(426,954)	(17,150)	-	-	(444,104)	Buildings
Pabrik dan mesin	(920,233)	(72,995)	(7)	2,003	(991,232)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(32,659)	(223)	-	-	(32,882)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(13,435)	(1,641)	-	-	(15,076)	Mine development
Jumlah	(1,706,999)	(121,368)	-	2,003	(1,826,364)	Total
Nilai buku bersih	1,608,523				1,603,302	Net book value

*) Lihat Catatan 11 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 11 for details of construction in progress.

10. Aset tetap (lanjutan)

10. Fixed assets (continued)

	1 Januari/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2014	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Harga perolehan						Cost
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	929,826	-	(1,843)	-	927,983	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	40,011	-	22,589	-	62,600	Roads and bridges
Bangunan	601,395	-	15,635	-	617,030	Buildings
Pabrik dan mesin	1,429,434	-	57,007	(2,595)	1,483,846	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	32,889	-	785	-	33,674	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	29,670	-	2	-	29,672	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian *)	175,817	79,075	(94,175)	-	160,717	Construction in progress *)
Jumlah	3,239,042	79,075	-	(2,595)	3,315,522	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(264,569)	(25,764)	(55)	-	(290,388)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(18,888)	(4,442)	-	-	(23,330)	Roads and bridges
Bangunan	(409,484)	(17,299)	(171)	-	(426,954)	Buildings
Pabrik dan mesin	(850,082)	(72,811)	226	2,434	(920,233)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(32,555)	(104)	-	-	(32,659)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(11,702)	(1,733)	-	-	(13,435)	Mine development
Jumlah	(1,587,280)	(122,153)	-	2,434	(1,706,999)	Total
Nilai buku bersih	1,651,762				1,608,523	Net book value

*) Lihat Catatan 11 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 11 for details of construction in progress.

Seluruh biaya penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dibebankan ke biaya produksi.

All depreciation expenses for the years ended December 31, 2015 and 2014 were allocated to production costs.

Pada tanggal 31 Desember 2015, semua aset tetap Perseroan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri dan, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk aset Perseroan dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2015 adalah AS\$6.499 juta (31 Desember 2014: AS\$6.235 juta), dengan batasan sebesar AS\$800 juta per kejadian (31 Desember 2014: AS\$800 juta) (nilai penuh). Seluruh aset tetap diasuransikan sebesar biaya penggantian. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As at December 31, 2015, all of the Company's fixed assets were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by all industrial risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value for the Company's assets and related business interruption exposure as at December 31, 2015 was US\$6,499 million (December 31, 2014: US\$6,235 million), with policy limits of US\$800 million per occurrence (December 31, 2014: US\$800 million) (full amount). The fixed assets are insured at replacement cost. In management's opinion, the insurance is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: nihil).

There were no fixed assets pledged as collateral as at December 31, 2015 (December 31, 2014: nil).

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar AS\$282,3 juta (31 Desember 2014: AS\$241,6 juta). Nilai buku bersih aset tetap yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Desember 2015 adalah nihil (31 Desember 2014: AS\$0,2 juta) (nilai penuh).

The gross carrying value of each fixed asset that is fully depreciated and still in use was US\$282.3 million (December 31, 2014: US\$241.6 million). Net book value of temporary idle fixed assets as at December 31, 2015 were nil (December 31, 2014: US\$0.2 million) (full amount).

Perseroan telah melakukan pengkajian atas masa manfaat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 dan berdasarkan pengkajian tersebut, Perseroan tidak mengidentifikasi adanya perubahan atas masa manfaat aset tetap yang ada.

The Company has performed a review of the useful lives of the Company's fixed assets as at December 31, 2015 and based on that review, the Company did not identify any changes in the useful lives of the fixed assets.

Pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah AS\$2,0 juta (31 Desember 2014: AS\$2,6 juta) (nilai penuh). Rugi atas pelepasan aset tetap ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah AS\$0,02 juta (31 Desember 2014: AS\$0,2 juta) (nilai penuh).

Disposals of fixed assets for the year ended December 31, 2015 were US\$2.0 million (December 31, 2014: US\$2.6 million) (full amount). Loss on disposals of fixed assets for the year ended December 31, 2015 were US\$0.02 million (December 31, 2014: US\$0.2 million) (full amount).

11. Aset tetap dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari proyek yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

11. Construction in progress

Construction in progress represents capital projects that have not been completed at the statements of financial position dates.

The construction in progress is as follows:

31 Desember	2015	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date		December 31
				(Dalam ribuan Dolar AS)	(US Dollars, in thousands)
Pembangunan kembali tanur listrik #1	35,776	49	2018	Electric furnace #1 rebuild	
Lainnya di bawah AS\$10 juta	150,388	-	-	Others below US\$10 million	
Jumlah	186,164			Total	

31 Desember	2014	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date		December 31
				(Dalam ribuan Dolar AS)	(US Dollars, in thousands)
Pembangunan kembali tanur listrik #1	34,809	48	2017	Electric furnace #1 rebuild	
Lainnya di bawah AS\$10 juta	125,908	-	-	Others below US\$10 million	
Jumlah	160,717			Total	

12. Aset keuangan tidak lancar lainnya

12. Other non-current financial assets

31 Desember	2015	2014		December 31	
				(Dalam ribuan Dolar AS)	(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada karyawan	16,695	20,100	Loans to employees		
Dikurangi: Bagian jangka pendek (Catatan 7)	(3,614)	(4,248)	Less: Current portion (Note 7)		
Bagian jangka panjang	13,081	15,852	Non-current portion		

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

13. Utang usaha

13. Trade payables

31 Desember	2015	2014		December 31	
				(Dalam ribuan Dolar AS)	(US Dollars, in thousands)
Pihak-pihak berelasi			Related parties		
Dalam mata uang Dolar AS	8,700	6,123	Denominated in US Dollars		
Dalam mata uang Yen Jepang	12	24	Denominated in Japanese Yen		
	8,712	6,147			
Pihak ketiga			Third parties		
Dalam mata uang Rupiah Indonesia	39,769	5,210	Denominated in Indonesian Rupiah		
Dalam mata uang Dolar AS	32,498	57,744	Denominated in US Dollars		
Dalam mata uang Poundsterling	1,253	159	Denominated in British Pounds		
Dalam mata uang Euro	1,168	668	Denominated in Euro		
Dalam mata uang Dolar Australia	796	1,538	Denominated in Australian Dollars		
Dalam mata uang Dolar Kanada	771	1,521	Denominated in Canadian Dollars		
Dalam mata uang lainnya (di bawah AS\$1 juta)	669	1,227	Denominated in other currencies (below US\$1 million)		
	76,924	68,067			
Jumlah	85,636	74,214	Total		

13. Utang usaha (lanjutan)

Utang usaha timbul dari pembelian barang dan jasa. Jumlah yang disebutkan di atas adalah lancar sesuai dengan ketentuan pembayaran seperti yang tertuang dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga nilai wajar utang usaha sama dengan nilai tercatatnya.

Tidak ada pemasok dengan saldo melebihi 10% dari jumlah utang usaha, selain saldo pihak-pihak berelasi yang dijelaskan di Catatan 31f per 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: Kuo Oil (S) Pte Ltd. senilai AS\$9.532).

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas utang usahanya pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: nihil).

14. Perpajakan

a. Pajak dibayar dimuka

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pajak Penghasilan ("PPH")			Corporate income tax ("CIT")
- PPh Badan 2015	28,976	-	- CIT 2015
- PPh Badan 2013	-	9,913	- CIT 2013
	28,976	9,913	
Pajak lainnya			Other taxes
- Pajak dalam proses banding *)	71,732	86,643	- Taxes in dispute *)
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	61,613	50,841	- Value added tax ("VAT")
- Pajak impor	1,370	1,527	- Import tax
	134,715	139,011	
Jumlah	163,691	148,924	Total
Bagian jangka pendek	(91,137)	(60,754)	Current portion
Bagian jangka panjang	72,554	88,170	Non-current portion

*) Lihat Catatan 14e untuk rincian pajak dalam proses banding.

*) Refer to Note 14e for details of taxes in dispute.

b. Utang pajak

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
- PPh pasal 21	1,025	573	- Withholding Tax ("WHT") article 21
- PPh pasal 4(2), 15, 23 dan 26	471	3,844	- WHT articles 4(2), 15, 23 and 26
- PPN terhutang	310	3,746	- VAT payable
- PPh Badan 2014	-	33,682	- CIT 2014
Jumlah	1,806	41,845	Total

c. Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Kini	27,451	72,433	Current
Tanggung	(8,231)	(11,369)	Deferred
Penyesuaian tahun sebelumnya	107	3,596	Previous year adjustment
Jumlah	19,327	64,660	Total

b. Taxes payable

c. Income tax expense

The income tax expense for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

14. Perpajakan (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan kini adalah berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Jumlah tersebut menjadi dasar dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak tahunan yang disampaikan ke kantor pajak.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Laba sebelum pajak penghasilan	69,828	236,931	Profit before income tax
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Perbedaan antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	33,219	37,148	Difference between commercial and tax depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	945	(2,493)	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dan bahan pembantu usang	11,435	884	Provision for decline in inventory value and obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	8,407	3,435	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(170)	(84)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(20,912)	6,588	Other accruals/provisions
	102,752	282,409	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Pendapatan keuangan kena pajak final	(288)	(138)	Finance income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	7,341	7,459	Non-deductible expenses
	7,053	7,321	
Penghasilan kena pajak	109,805	289,730	Taxable income
Pajak penghasilan – kini, pada tarif 25%	27,451	72,433	Income tax – current, at 25%
Pembayaran pajak dimuka Perseroan	(56,427)	(38,751)	Prepayment of income taxes of the Company
(Lebih)/kurang bayar pajak	(28,976)	33,682	(Over)/under payment of tax

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan teoritis dari laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

14. Taxation (continued)

c. Income tax expense (continued)

Current income tax calculations are based on estimated taxable income. The amounts is the basis used in the preparation of the annual tax return to be filed to the tax authority.

The reconciliation between profit before income tax as shown in these financial statements and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2015 and 2014 is as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Laba sebelum pajak penghasilan	69,828	236,931	Profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung pada tarif 25%	17,457	59,233	Income tax calculated at 25%
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1,835	1,865	Non-deductible expenses
Penyesuaian tahun sebelumnya	107	3,596	Previous year adjustment
Pendapatan keuangan kena pajak final	(72)	(34)	Finance income subject to final tax
Beban pajak penghasilan	19,327	64,660	Income tax expense

The reconciliation of income tax expense to the theoretical tax amount on the Company's profit before income tax for the years ended December 31, 2015 and 2014 is as follows:

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

Perubahan liabilitas pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

Changes in the deferred tax liabilities for the years ended December 31, 2015 and 2014 are shown below:

	1 Januari/ January 1, 2015	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ (Credited)/ Charged to Statements of Profit or loss and other comprehensive income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Penyesuaian fiskal/Fiscal depreciation adjustment	31 Desember/ December 31, 2015	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Penyusutan dan amortisasi	156,227	(8,305)	-	-	147,922	Depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	(2,728)	(236)	(633)	-	(3,597)	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan penurunan nilai persediaan dan bahan pembantu usang	(777)	(2,859)	-	-	(3,636)	Provision for decline in inventory and obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(12,319)	(2,102)	-	-	(14,421)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(87)	43	-	-	(44)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(6,672)	5,228	-	-	(1,444)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	133,644	(8,231)	(633)	-	124,780	Deferred tax liabilities, net

	1 Januari/ January 1, 2014	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ (Credited)/ Charged to Statements of Profit or loss and other comprehensive income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Penyesuaian fiskal/Fiscal depreciation adjustment	31 Desember/ December 31, 2014	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Penyusutan dan amortisasi	177,428	(9,287)	-	(11,914)	156,227	Depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	(2,976)	623	(375)	-	(2,728)	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan penurunan nilai persediaan dan bahan pembantu usang	(556)	(221)	-	-	(777)	Provision for decline in inventory and obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(11,461)	(858)	-	-	(12,319)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(108)	21	-	-	(87)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(5,025)	(1,647)	-	-	(6,672)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	157,302	(11,369)	(375)	(11,914)	133,644	Deferred tax liabilities, net

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006

Tax audit results for 2004 and 2006 fiscal years

Sehubungan dengan kasus PPh Badan tahun pajak 2004 dan 2006 masing-masing secara berurutan sebesar AS\$3,5 juta dan AS\$5,9 juta (nilai penuh), saat ini masih dalam proses *Mutual Agreement Procedure* ("MAP") antara otoritas pajak Kanada dengan Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), yang ditujukan untuk menilai lebih lanjut koreksi atas *Management Assistance Agreement* ("MAA") yang dianggap oleh Pemeriksa Pajak sebagai beban yang tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan PPh Badan Perseroan.

The 2004 and 2006 fiscal year CIT cases in the amount of US\$3.5 million and US\$5.9 million (full amount), respectively, are currently under process through the Mutual Agreement Procedure ("MAP") in accordance with Double Tax Avoidance Agreement between Indonesian and Canadian Tax Authorities, to further review Non-Deductible Expense treatment of Management Assistance Agreement ("MAA") expense in the Company's CIT calculation.

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006 (lanjutan)

Tax audit results for 2004 and 2006 fiscal years (continued)

Pada tanggal 23 Desember 2013, Pengadilan Pajak telah mengabulkan sebagian banding Perseroan sehubungan dengan sengketa banding PPN atas barang dan jasa tahun pajak 2006, senilai IDR5,3 miliar (nilai penuh) dari total banding yang diajukan sebesar IDR35,5 miliar (nilai penuh). Perseroan telah menerima pengembalian dari Kantor Pajak atas nilai yang dikabulkan pada tanggal 12 Februari 2014. Perseroan telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk nilai banding yang ditolak pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar IDR30,2 miliar (nilai penuh).

On December 23, 2013, the Tax Court accepted a portion of the Company's appeal related to the tax dispute of VAT on goods and services for fiscal year 2006, in the amount of IDR5.3 billion (full amount) from the total appealed amount of IDR35.5 billion (full amount). This accepted amount was received by the Company on February 12, 2014. The Company submitted a Reconsideration Letter to the Supreme Court for the rejected amount on March 21, 2014 in the amount of IDR30.2 billion (full amount).

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perseroan belum menerima keputusan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut oleh karena itu, atas selisih tersebut, tetap dicatat sebagai bagian dari pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a).

The Company has not received any decision related to this Reconsideration Letter as of the date of this financial statements and therefore the amount is still recognized under prepaid taxes (refer to Note 14a).

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perseroan telah menerima hasil putusan Pengadilan Pajak sehubungan dengan banding Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPN Jasa Luar Negeri tahun 2006. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding Perseroan senilai IDR6,7 miliar (nilai penuh) dari total banding yang diajukan senilai IDR10,3 miliar (nilai penuh). Perseroan menerima hasil putusan Pengadilan Pajak ini dan telah membukukan IDR3,6 miliar (nilai penuh) sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2014.

On June 13, 2014, the Company received the Tax Court decision related to the Company's appeal on the Tax Underpayment Letter on VAT for Offshore service for fiscal year 2006. The Tax Court accepted a portion of the Company's appeal in the amount of IDR6.7 billion (full amount) from the total appealed amount of IDR10.3 billion (full amount). The Company accepted the Tax Court decision and has accordingly recorded the amount of IDR3.6 billion (full amount) under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2014.

Pada tanggal 15 Desember 2014, Perseroan telah menerima putusan Pengadilan Pajak atas banding sehubungan PPN Pemungutan tahun 2006 sebesar IDR5,8 miliar (nilai penuh). Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding Perseroan senilai IDR3,2 miliar (nilai penuh). Perseroan telah menerima pengembalian atas nilai tersebut pada tanggal 27 Januari 2015 dan telah membukukan nilai yang tidak disetujui IDR2,6 miliar sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2015.

On December 15, 2014, the Company received the Tax Court decision on the Company's appeal related to VAT Collector year 2006 case in the amount of IDR5.8 billion (full amount). The Tax Court accepted a portion of the Company's appeal in the amount of IDR3.2 billion (full amount). The Company has received this accepted amount on January 27, 2015 and has accordingly recorded the rejected amount of IDR2.6 billion under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2015.

Pada tanggal 9 Januari 2015, Perseroan telah menerima hasil putusan Pengadilan Pajak atas Banding PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2004 dan 2006 dengan nilai sengketa masing-masing sebesar IDR12,5 miliar (nilai penuh) dan IDR21,3 miliar (nilai penuh). Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding perseroan untuk tahun 2004 dan 2006 masing-masing sebesar IDR5,4 miliar (nilai penuh) dan IDR13,2 miliar (nilai penuh). Perseroan telah menerima pengembalian atas masing-masing nilai tersebut pada tanggal 27 Februari 2015. Atas pengembalian nilai tersebut Perseroan juga menerima imbalan bunga masing-masing sebesar IDR2,6 miliar dan IDR6,3 miliar, dan telah membukukan pada penghasilan lain-lain. Atas nilai yang tidak disetujui masing IDR7,1 miliar dan IDR8,1 miliar telah dibukukan sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2015.

On January 9, 2015, the Company received the Tax Court decision on the Company's appeal related to WHT article 21 for fiscal years 2004 and 2006 in total amount IDR12.5 billion (full amount) and IDR21.3 billion (full amount), respectively. The Tax Court accepted a portion of the Company's appeal for years 2004 and 2006 in the amount of IDR5.4 billion (full amount) and IDR13.2 billion (full amount), respectively. The Company has received these accepted amounts on February 27, 2015 as well as the interest compensation of IDR2.6 billion and IDR6.3 billion and has accordingly recorded to other income. For the rejected amount of IDR7.1 billion and IDR8.1 billion has been recorded under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2015.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perseroan telah menerima hasil Putusan Pengadilan Pajak atas Banding PPh Pasal 26 untuk tahun 2004 sebesar IDR85,6 miliar (nilai penuh) yang mengabulkan sebagian banding perseroan sebesar IDR71,1 miliar (nilai penuh). Pada tanggal 15 Juli 2015, Perseroan telah menerima pengembalian sejumlah nilai tersebut di atas dan IDR14,5 miliar (nilai penuh) telah dibukukan sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2011, 2013 dan 2015.

On June 9, 2015, the Company received the Tax Court decision on the Company's appeal against assessment on WHT article 26 fiscal year 2004 in the amount of IDR85.6 billion (full amount) which for the accepted a portion of the Company's appeal in the amount of IDR71.1 billion (full amount). On July 15, 2015 the Company has received the refund of such amount and IDR14.5 billion (full amount) has been recorded under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2011, 2013 and 2015.

Pada tanggal 15 Desember 2015, Perseroan telah menerima Putusan Pengadilan Pajak yang menyetujui sebagian besar atas banding PPh Pasal 26 untuk tahun 2006 sebesar IDR145,1 miliar atau setara dengan AS\$10,5 juta (nilai penuh). Atas putusan tersebut, Perseroan telah menyampaikan permohonan restitusi beserta permohonan imbalan bunga sebesar IDR69,7 miliar atau setara dengan AS\$5,0 juta (nilai penuh) kepada Kantor Pajak pada tanggal 7 Januari 2016. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perseroan masih belum menerima restitusi tersebut beserta imbalan bunganya, oleh karena itu IDR164,4 miliar atau setara dengan AS\$11,9 juta (nilai penuh) masih diakui sebagai pajak dibayar dimuka. Atas nilai yang ditolak sebesar IDR19,3 miliar (nilai penuh), Perseroan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

On December 15, 2015, the Company received the Tax Court decision on the Company's appeal of WHT article 26 for the fiscal year of 2006 which approved a partial amount of IDR145.1 billion or equal to US\$10.5 million (full amount). On this decision, the Company has submitted a transfer application letter for the restitution and interest compensation in the amount of IDR69.7 billion or equal to US\$5.0 million (full amount) to Tax Office on January 7, 2016. As of the date of these financial statements, the Company has not received the restitution and the interest compensation, therefore the IDR164.4 billion or equal to US\$11.9 million (full amount) is still recognized under prepaid taxes. For the rejected amount of IDR19.3 billion (full amount), the Company is considering the possibility for reconsideration to Supreme Court.

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2008

Tax audit results for 2008 fiscal year

Pada tanggal 26 Februari 2013, Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Perseroan atas tagihan lebih bayar PPh Badan tahun pajak 2008 sebesar AS\$1,9 juta (nilai penuh). Atas keputusan Pengadilan Pajak tersebut, Perseroan telah mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 12 Juni 2013. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perseroan masih belum menerima hasil keputusan dari Peninjauan Kembali tersebut dan oleh karena itu jumlah pajak untuk PPh Badan ini masih dicatat pada akun pajak dalam proses banding di bagian pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a).

On February 26, 2013 the Tax Court rejected the Company's appeal on the portion of CIT overpayment for the 2008 fiscal year in the amount of US\$1.9 million (full amount). The Company submitted a Reconsideration Letter to the Supreme Court on June 12, 2013 for this Tax Court decision. The Company has not received any decision related to this Reconsideration Letter as of the date of this financial statements and therefore this objected amount is still recognized as part of the tax in dispute account under prepaid taxes (refer to Note 14a).

Pada tanggal 12 Desember 2013, Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding Perseroan atas pengenaan PPh pasal 26 sehubungan dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri. Atas putusan tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Perseroan telah menerima pengembalian pajak senilai IDR139 miliar (nilai penuh).

On December 12, 2013, the Tax Court accepted all of the Company's appeal to the WHT article 26 imposed on the dividend paid to the Company's founding shareholders. Based on this decision, on March 28, 2014, the Company received the tax refund in the amount of IDR139 billion (full amount).

Terkait dengan sengketa banding PPh pasal 26 sehubungan dengan pembayaran MAA, Pengadilan pajak memutuskan menolak permohonan banding Perseroan melalui putusan Pengadilan Pajak tertanggal 29 November 2013. Putusan atas sengketa banding PPh pasal 26 ini sejalan dengan putusan atas sengketa PPh Badan yang sudah diputus terlebih dahulu. Perseroan telah menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2014. Tidak terdapat sengketa nilai atas banding ini yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka, karena lebih terkait sengketa jenis objek transaksi, dimana Direktorat Jendral Pajak ("DJP") menganggap sebagai pembayaran dividen, sementara Perseroan menganggap sebagai pembayaran royalti.

With regard to the tax dispute of WHT article 26 related to the MAA payment, the Tax Court decision dated November 29, 2013 rejected the Company's appeal. The decision on the tax dispute of WHT article 26 is in line with the decision on the dispute on CIT that previously has been concluded. The Company submitted a Reconsideration Letter to the Supreme Court on February 27, 2014. No disputed amounts were recorded as prepaid taxes since the dispute is more related to the nature of transaction treated as dividends by the Directorate General of Tax ("DGT") while the Company views them as royalties.

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2010

Tax audit results for 2010 fiscal year

Pada tanggal 12 Agustus dan 18 Agustus 2014, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") dari Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Pratama Palopo untuk hasil pemeriksaan tahun pajak 2010.

On August 12 and August 18, 2014, the Company received Tax Assessments from the Large Tax Office I and the Palopo Tax Office for tax audit fiscal year 2010.

Atas SKP-SKP tersebut, Perseroan telah melakukan pembayaran atas jumlah yang disetujui masing-masing sebesar AS\$3,2 juta untuk SKPKB PPh Badan dan IDR14,4 miliar atau setara dengan AS\$1,1 juta (nilai penuh) untuk SKP-SKP lainnya.

With regard to the above assessments, the Company paid the agreed amount of corporate tax and other taxes of US\$3.2 million and IDR14.4 billion or equal to US\$1.1 million (full amount), respectively.

Sementara atas bagian yang tidak disetujui, Perusahaan telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak dan membayarkan kepada Kas Negara. Perseroan telah mencatat jumlah tersebut dalam pembukuan Perusahaan sebagai pajak dibayar di muka. Nilai sengketa pajak tahun 2010 terdiri dari keberatan atas (nilai penuh):

For the disputed amount, the Company has filed objection letters to the Tax Offices and made a payment to the State Treasury. The Company recorded these amounts as prepaid tax. The tax disputes for fiscal year 2010 consist of objection against (full amount):

- a. SKPKB PPh Badan sebesar AS\$19,7 juta;
- b. SKPKB PPh Pasal 23 sebesar IDR909 juta atau setara dengan AS\$66 ribu;
- c. SKPKB PPh Pasal 26 atas transaksi dengan wajib pajak luar negeri sebesar IDR13,1 miliar atau setara dengan AS\$0,9 juta;
- d. SKPKB PPh Pasal 26 sehubungan koreksi penjualan yang dianggap sebagai dividen sebesar IDR79 miliar atau setara dengan AS\$5,8 juta;
- e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ("SKPKBT") PPN Jasa Luar Negeri sebesar IDR2,1 miliar atau setara dengan AS\$155 ribu;
- f. SKPKBT PPN sebesar IDR345 juta atau setara dengan AS\$25 ribu; dan
- g. Surat Tagihan Pajak ("STP") PPN sebesar IDR6 miliar atau setara dengan AS\$434 ribu.

- a. Tax underpayment on CIT in the amount of US\$19.7 million;
- b. Tax underpayment on WHT article 23 in the amount of IDR909 million or equivalent to US\$66 thousand;
- c. Tax underpayment on WHT article 26 with regard to transaction with offshore service provider in the amount of IDR13.1 billion or equivalent to US\$0.9 million;
- d. Tax underpayment on WHT article 26 in relation to sales correction treated as dividend in the amount of IDR79 billion or equivalent to US\$5.8 million;
- e. Additional tax underpayment on offshore service VAT in the amount of IDR2.1 billion or equivalent to US\$155 thousand;
- f. Additional tax underpayment on VAT in the amount of IDR345 million or equivalent to US\$25 thousand; and
- g. Tax collection letter on VAT in the amount of IDR6 billion or equivalent to US\$434 thousand.

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2010 (lanjutan)

Tax audit results for 2010 fiscal year (continued)

Atas keberatan-keberatan yang diajukan Perseroan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak kemudian menerbitkan keputusan-keputusan keberatan sebagai berikut:

On above objections submitted by the Company, Director General of Tax has issued objection decisions as follow:

Keputusan Keberatan tanggal 28 Oktober 2015 yang menyatakan menolak Keberatan PPh Badan sebesar AS\$19,7 juta (nilai penuh), sehubungan atas:

Objection decision on October 28, 2015 which stated rejection on objection of CIT in the amount of US\$19.7 million (full amount), in relation to:

- Koreksi positif nilai penjualan nikel *matte* sebesar AS\$10,9 juta (nilai penuh), sehubungan dengan *quotation period* harga rata-rata nikel dan harga jual kobalt;
- Koreksi positif penghasilan dari luar usaha atas penjualan barang *scrap* sebesar AS\$0,3 juta (nilai penuh); dan
- Koreksi positif biaya *Management Fee* dan *Technical Fee* sebesar AS\$8,5 juta (nilai penuh).

- Positive correction on nickel *matte* sales in the amount of US\$10.9 million (full amount), in relation with quotation period of average nickel price and cobalt selling price;
- Positive correction on other income of scrap sales in the amount of US\$0.3 million (full amount); and
- Positive correction on Management Fee and Technical Fee in the amount of US\$8.5 million (full amount).

Atas keberatan PPh Badan tersebut, Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

On this objection, the Company is in consideration to file an appeal to the Tax Court.

Keputusan Keberatan tanggal 28 Oktober 2015 yang menyatakan menolak Keberatan SKPKBT PPN Jasa Luar Negeri sebesar IDR2,1 miliar atau setara dengan AS\$155 ribu (nilai penuh). Atas keputusan keberatan ini Perseroan sedang mempertimbangkan untuk melakukan banding.

Objection decision on October 28, 2015 which stated rejection on additional tax underpayment on offshore service VAT in the amount of IDR2.1 billion or equivalent to US\$155 thousand (full amount). On this decision, the Company is considering filing an appeal.

Keputusan Keberatan tanggal 4 November 2015 atas PPh pasal 26 berkenaan transaksi penjualan nikel *matte* dengan Vale Canada Ltd. sebesar IDR79 miliar (nilai penuh) yang menolak seluruhnya keberatan Perseroan tersebut. Atas nilai yang belum disetujui tersebut, Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding.

Objection decision on November 4, 2015 regarding to WHT article 26 on nickel *matte* sales to Vale Canada Ltd. ("VCL") for the amount of IDR79 billion (full amount), which rejected entirely the Company's objection. On this rejection decision, the Company is considering filing an appeal.

Pada tanggal 5 November 2015, Perseroan menerima surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menerima keberatan Perseroan atas SKPKBT PPN sebesar IDR345 juta atau setara dengan AS\$25 ribu (nilai penuh). Atas putusan tersebut, Perseroan telah menyetujui dan menyampaikan permohonan restitusi kepada Kantor Pajak pada tanggal 6 November 2015.

On November 5, 2015, the Company received the Director General of Tax decision which accepted Company's objection on Additional Tax Underpayment on VAT in the amount of IDR345 million or equivalent to US\$25 thousand (full amount). On this decision, the Company has agreed and submitted a transfer application letter for the restitution to Tax Office on November 6, 2015.

Keputusan Keberatan tanggal 18 November 2015 atas PPh pasal 23 berkenaan transaksi dalam negeri sebesar IDR909 juta (nilai penuh) yang menyatakan menyetujui sebagian keberatan Perseroan sebesar IDR247 juta (nilai penuh) dan menolak sebagian sebesar IDR662 juta sehubungan dengan hasil equalisasi buku besar dengan SPT Masa PPh Pasal 23 yang dianggap masih terdapat obyek Pajak PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan. Perseroan telah mengajukan permohonan restitusi kepada KPP Pratama Palopo pada tanggal 27 November 2015 yang hingga tanggal laporan keuangan ini Perseroan belum menerima restitusi tersebut. Sedangkan atas nilai yang belum disetujui Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding.

Objection decision on November 18, 2015 regarding to WHT article 23 on onshore services for the amount of IDR909 million, which partially approved the Company's objection with the amount IDR247 million (full amount) and rejected IDR662 million (full amount) that was assessed as underpayment due to equalization variance between general ledger and withholding tax return article 23. The Company has submitted a transfer application letter for refund to the Palopo Tax Office on November 27, 2015 and until the date of these financial statements, the Company has not received the refund. On the rejected amount, the Company is considering filing appeal.

Keputusan Keberatan tanggal 18 November 2015 atas PPh pasal 26 berkenaan transaksi dengan wajib pajak luar negeri sebesar IDR13,1 miliar (nilai penuh) yang menolak seluruhnya keberatan Perseroan sebesar IDR13,1 miliar tersebut (nilai penuh). Atas nilai yang belum disetujui tersebut, Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding.

An objection decision on November 18, 2015 regarding to WHT article 26 on offshore services for the amount of IDR13.1 billion (full amount), which rejected entirely the Company's objection with the amount IDR13.1 billion (full amount). On this rejection decision, the Company is considering filing an appeal.

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2011

Tax audit results for 2011 fiscal year

Pada tanggal 10 April 2013, Perseroan menerima SKP dari KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk hasil pemeriksaan tahun pajak 2011. Berdasarkan SKP tersebut, nilai yang menjadi kelebihan pembayaran PPh Badan Perseroan adalah sebesar AS\$40,2 juta (nilai penuh) dari jumlah yang diajukan oleh Perseroan senilai AS\$45,3 juta (nilai penuh). Koreksi-koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak berkaitan dengan MAA, biaya bunga dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pinjaman SEFA.

On April 10, 2013, the Company received a Tax Assessment Letter from the Large Tax Office I in relation to the tax audit results for the fiscal year 2011. Based on the Tax Assessment Letter, the amount of CIT overpayment for fiscal year 2011 amounted to US\$40.2 million (full amount) of US\$45.3 million (full amount) submitted by the Company. The corrections made by the tax auditor related to the MAA, interest expenses, and other costs related to the SEFA loan.

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2011 (lanjutan)

Tax audit results for 2011 fiscal year (continued)

Jumlah koreksi PPh Badan yang terkait dengan MAA adalah sebesar AS\$2,7 juta (nilai penuh), dan biaya bunga serta biaya-biaya lain yang terkait pinjaman SEFA sebesar AS\$2,2 juta (nilai penuh). Perseroan telah mengajukan keberatan kepada DJP pada tanggal 1 Juli 2013. DJP telah mengeluarkan Keputusan Hasil Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan keberatan Perseroan terkait atas koreksi biaya bunga pinjaman SEFA pada tanggal 16 Juni 2014. Nilai yang dikabulkan adalah sebesar AS\$0,5 juta (nilai penuh). Perseroan menerima pengembalian atas nilai yang dikabulkan pada tanggal 22 Juli 2014.

The CIT correction related to the MAA amounted to US\$2.7 million (full amount), and the interest expense and costs related to the SEFA loan amounted to US\$2.2 million (full amount). The Company has filed an objection letter to the DGT on July 1, 2013. The DGT has issued a decision on the Company's objection dated June 16, 2014 which partially accepted the Company's objection related to interest expense for the SEFA Loan. The accepted amount was US\$0.5 million (full amount). The Company received the accepted amount on July 22, 2014.

Atas nilai yang tidak dikabulkan sehubungan dengan koreksi biaya bunga dan biaya lain-lain terkait pinjaman SEFA, Perseroan telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 9 September 2014. Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki dasar yang kuat bahwa upaya banding akan diterima.

The Company has filed an appeal to the Tax Court for the rejected amount in relation to the interest expense and other costs related to the SEFA Loan on September 9, 2014. Management believes it has strong grounds that the appeals will be accepted.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perseroan belum menerima hasil putusan banding terkait sengketa di atas.

The Company has not received any decision related to the appeal as of the date of this financial statement.

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2012

Tax audit results for 2012 fiscal year

Pada tanggal 28 April 2014, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk hasil pemeriksaan tahun pajak 2012, yang menyatakan bahwa jumlah lebih bayar Perseroan untuk tahun 2012 adalah sebesar AS\$76,1 juta dari jumlah lebih bayar yang diajukan sesuai SPT PPh Badan 2012 sebesar AS\$83,8 juta (nilai penuh). Berdasarkan SKPLB ini, Perseroan telah menerima pengembalian pajak sebesar AS\$76,1 juta tersebut pada tanggal 28 Mei 2014 dan AS\$7,7 juta (nilai penuh) telah dibukukan sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2014. Atas selisih AS\$0,6 juta (nilai penuh), saat ini masih dalam proses Mutual Agreement Procedure ("MAP") antara otoritas pajak Kanada dengan Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B").

On April 28, 2014, the Company received a Tax Overpayment Assessment Letter of Corporate Income Tax year 2012 from Large Tax Office I on tax audit results of fiscal year 2012, stating that the 2012 tax overpayment was US\$76.1 million of the overpayment amount claimed by the Company in the Corporate Tax Return in the amount of US\$83.8 million (full amount). Based on the assessment, the Company received the tax refund in the amount of US\$76.1 million on May 28, 2014 and US\$7.7 million (full amount) has been recorded under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2014. The difference of US\$0.6 million, is currently under process through the Mutual Agreement Procedure ("MAP") in accordance with Double Tax Avoidance Agreement between Indonesian and Canadian Tax Authorities.

Selain SKP PPh Badan tersebut, Perseroan juga menerima beberapa SKP atas kurang bayar PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sebesar masing-masing IDR137 miliar (setara dengan AS\$9,9 juta) dan IDR76 miliar (setara dengan AS\$5,5 juta) (nilai penuh) yang diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Palopo. Perseroan tidak setuju atas SKP tersebut dan mengajukan keberatan pada 21 Agustus 2014. Perseroan juga telah membayar seluruh SKP sebelum mengajukan keberatan. SKP PPh Pasal 21 dan 23 yang tidak disetujui tersebut sehubungan dengan penerapan Undang-Undang (UU) PPh tahun 1994 oleh Pemeriksa Pajak atas Penghasilan yang diperoleh oleh karyawan dan penyedia jasa dalam negeri yang memberikan jasa kepada Perseroan. Perseroan meyakini bahwa koreksi ini tidak tepat karena karyawan dan penyedia jasa dalam negeri tersebut bukanlah pihak yang berkontrak dalam Kontrak Karya Perseroan, sehingga seharusnya menggunakan tarif UU PPh no. 36 tahun 2008 yang berlaku saat ini.

In addition to the CIT Assessment Letter, the Company also received Tax Assessment Letters for underpayment on WHT article 21 and WHT article 23 in the amount of IDR137 billion (equivalent to US\$9.9 million) and IDR76 billion (equivalent to US\$5.5 million) (full amount), respectively, issued by Large Tax Office I and Palopo Tax Office. The Company did not agree with those Tax Assessment Letters and filed an objection on August 21, 2014. The Company has also paid all tax assessments prior to filing the objection. Those Tax Assessment Letters were related to the application of Income Tax Law 1994 by the tax auditor on the income earned by the employees and domestic service providers providing services to the Company. The Company believes that this correction is inappropriate because employees and service providers were not parties involved in the CoW of the Company, and therefore they should be subject to the rates of prevailing Income Tax Law no. 36/2008.

Perseroan juga telah menerima SKP-SKP PPN, PPh pasal 4(2), PPh pasal 21 dan PPh pasal 26, sebagai akibat ekuivalensi dengan biaya, dan telah melakukan pembayaran sebesar IDR8,5 miliar atau setara dengan AS\$0,6 juta (nilai penuh).

The Company also accepted the Tax Assessment Letters on VAT, WHT article 4 (2), WHT article 21 and WHT Article 26, as a result of income tax equalization with expenses, and made payments of IDR8.5 billion, or equivalent to US\$0.6 million (full amount).

Pada tanggal 13 Juli 2015, Perseroan telah menerima hasil keputusan keberatan atas SKPKB PPh pasal 21 dan 23 yang diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu yang mengabulkan seluruhnya keberatan Perseroan dengan nilai masing-masing sebesar IDR3,8 miliar (nilai penuh) dan IDR3,2 miliar (nilai penuh). Atas hasil tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan restitusi pada tanggal 15 Juli 2015 dan telah menerima pengembalian pada tanggal 10 Agustus 2015.

On July 13, 2015, the Company received a decision of objection result on Tax Assessment of WHT article 21 and 23 issued by Large Tax Office I, which accepted all the Company's objection in the amount of IDR3.8 billion (full amount) and IDR3.2 billion (full amount), respectively. Based on the decision, the Company submitted a refund request on July 15, 2015 and received the refund on August 10, 2015.

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2012 (lanjutan)

Tax audit results for 2012 fiscal year (continued)

Sehubungan dengan keberatan atas SKPKB PPh pasal 21 dan 23 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Palopo, pada tanggal 22 Mei 2014, Kantor wilayah Pajak Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat telah menerbitkan surat keputusan keberatan yang isinya menerima sebagian permohonan keberatan Perseroan sebesar IDR202 miliar (nilai penuh) dari total IDR208 miliar (nilai penuh). Atas keputusan keberatan ini, Perseroan telah mengajukan permohonan pengembalian restitusi pada tanggal 9 September 2015. Permohonan restitusi ini ditindaklanjuti dengan mekanisme kompensasi. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perseroan telah melakukan kompensasi sebesar IDR14,5 miliar (nilai penuh) terhadap PPh Pasal 21 terhutang masa Oktober dan November 2015. Atas nilai yang ditolak, sebesar IDR6 miliar terdiri dari PPh Pasal 21 sebesar IDR2,8 miliar, Perseroan setuju dan nilai tersebut telah dibukukan sebagai beban lainnya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2014 dan 2015, dan sisanya sebesar IDR3,2 miliar atas PPh Pasal 23, telah diajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 18 November 2015. Atas IDR14,5 miliar (nilai penuh) dari total restitusi sebesar IDR202 miliar (nilai penuh) telah dikompensasikan sebagai pengurang atas hutang PPh Pasal 21 Perseroan.

With regard to the objection against Tax Assessments of WHT article 21 and 23 issued by Palopo Tax Office, on May 22, 2014, Regional Tax Office of South, Southeast, and West Sulawesi issued objection decisions which accepted a portion of Company's objection in the amount of IDR202 billion (full amount) out of a total amount of IDR208 billion. On such decisions, the Company has submitted a restitution request on September 9, 2015. The restitution was converted into compensation mechanism. As of the date of these financial statements, the Company has compensated IDR14.5 billion (full amount) to WHT article 21 payable for October and November 2015 period. For the rejected amount of IDR6 billion which consist of WHT article 21 for the amount of IDR2.8 billion, the Company agreed and the amount was recorded under other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2014 and 2015, and for the remaining IDR3.2 billion regarding on WHT article 23 was appealed to the tax court on November 18, 2015. On the IDR14.5 billion (full amount) from total restitution of IDR202 billion (full amount) has been compensated as deduction of the Company's WHT article 21.

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2013

Tax audit results for 2013 fiscal year

Perseroan menerima SKPLB tertanggal 26 Juni 2015 dari KPP Wajib Pajak Besar Satu terkait hasil pemeriksaan SPT PPh Badan Lebih Bayar tahun pajak 2013. Berdasarkan SKPLB PPh Badan tersebut, jumlah lebih bayar ditetapkan adalah sebesar AS\$9,8 juta (nilai penuh) dimana nilai tersebut lebih rendah dari jumlah lebih bayar yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2013 sebesar AS\$9,9 juta (nilai penuh). Perseroan setuju atas hasil pemeriksaan tersebut dan nilai lebih bayar sebesar AS\$9,8 juta (nilai penuh) telah diterima pada tanggal 31 Juli 2015 serta telah membukukan selisihnya AS\$0.1 juta (nilai penuh) ke beban pajak penghasilan.

The Company received a Tax Assessment Letter on 2013 Corporate Income Tax overpayment dated June 26, 2015 from the Large Tax Office I in relations to the tax audit results. Based on the assessment, the Company's overpayment was US\$9.8 million (full amount) which was slightly lower than US\$9.9 million (full amount) overpayment filed. The Company agreed on this assessment and the amount of the overpayment for US\$9.8 million (full amount) was received on July 31, 2015, and also booked for the corrected amount of US\$0.1 million (full amount) under income tax expense.

15a. Akrual

15a. Accruals

31 Desember	2015	2014	December 31
(US Dollars, in thousands)			
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Barang dan jasa	12,071	19,921	Goods and services
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	2,025	9,217	Royalties, water levy, land rent and others
Barang modal	854	723	Capital items
Biaya keuangan	1,852	2,169	Finance costs
Jumlah	16,802	32,030	Total

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari akrual diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of accruals approximates their fair value.

Lihat Catatan 31f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31f for details of related party balances and transactions.

15b. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

15b. Other current financial liabilities

31 Desember	2015	2014	December 31
(US Dollars, in thousands)			
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Utang dividen	1,255	1,291	Dividends payable
Utang non-operasional lainnya	1,005	1,775	Other non-operational payable
Jumlah	2,260	3,066	Total

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka pendek lainnya diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of other current financial liabilities approximates their fair value.

16. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

16. Short-term employee benefit liabilities

31 Desember	2015	2014	December 31
-------------	------	------	-------------

(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)

Gaji, upah, dan manfaat karyawan lainnya	5,600	20,910	Salaries, wages and other employee benefits
--	-------	--------	---

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of short-term employee benefit liabilities approximates their fair value.

Lihat Catatan 31f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31f for details of related party balances and transactions.

17. Pinjaman bank jangka panjang

17. Long-term bank borrowings

31 Desember	2015	2014	December 31
-------------	------	------	-------------

(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)

Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.	100,000	125,000	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.
Mizuho Bank, Ltd.	50,000	62,500	Mizuho Bank, Ltd.
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(3,923)	(4,904)	Unamortized debt issuance costs

146,077 182,596

Bagian lancar:			Current portion:
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.	(25,000)	(25,000)	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.
Mizuho Bank, Ltd.	(12,500)	(12,500)	Mizuho Bank, Ltd.
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	1,281	1,521	Unamortized debt issuance costs

(36,219) (35,979)

Bagian jangka panjang	109,858	146,617	Non-current portion
------------------------------	----------------	----------------	----------------------------

Nilai wajar pinjaman bank jangka panjang saat ini mendekati nilai tercatatnya.

The fair value of the long-term bank borrowings approximates the carrying amount.

Biaya keuangan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar AS\$7,7 juta (31 Desember 2014: AS\$9,1 juta) (nilai penuh).

Finance costs charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income during the year ended December 31, 2015 amounted to US\$7.7 million (December 31, 2014: US\$9.1 million) (full amount).

Pada tanggal 30 November 2009, Perseroan ("Peminjam") menandatangani SEFA dengan Mizuho Bank, Ltd. (sebelumnya bernama Mizuho Corporate Bank, Ltd.) sebagai *Facility Agent*, MUFG Union Bank, N.A. (sebelumnya bernama Union Bank, N.A.) sebagai *Collateral Agent* dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. dan Mizuho Bank, Ltd. sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("Pemberi Pinjaman"), dengan Vale S.A. (entitas pengendali utama Perseroan) bertindak sebagai penjamin ("Penjamin").

On November 30, 2009, the Company (the "Borrower") entered into the SEFA with Mizuho Bank, Ltd. (formerly known as Mizuho Corporate Bank, Ltd.) as Facility Agent, MUFG Union Bank, N.A. (formerly known as Union Bank, N.A.) as Collateral Agent and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. and Mizuho Bank, Ltd., as Mandated Lead Arrangers (the "Lenders"), with Vale S.A. (the Company's ultimate parent entity) acting as the guarantor (the "Guarantor").

Fasilitas sebesar AS\$300 juta (terdiri dari pinjaman dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. sebesar AS\$200 juta dan Mizuho Bank, Ltd. sebesar AS\$100 juta) (nilai penuh) dibebani tingkat bunga LIBOR ditambah 1,5% per tahun untuk tiap periode pembayaran bunga yang di mulai dari tanggal 19 Februari 2010. Pokok utang akan dibayar dalam 16 kali tengah tahunan mulai tanggal 19 Februari 2012.

The facility of US\$300 million (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. of US\$200 million and from Mizuho Bank, Ltd. of US\$100 million) (full amount) is subject to interest at LIBOR plus 1.5% per annum for the relevant interest period; interest is payable commencing February 19, 2010. The principal will be repaid in 16 semi-annual instalments commencing February 19, 2012.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga berkisar antara 1,88% - 2,03% pada tahun 2015 (2014: 1,83% - 1,89%).

This loan facility bore an interest rate at a range between 1.88% - 2.03% in 2015 (2014: 1.83% - 1.89%).

Pada saat penarikan pinjaman pada tahun 2009, Peminjam telah membayar biaya dimuka dan biaya agen sebesar AS\$4,5 juta; premi asuransi yang terikat kepada perjanjian ini sebesar AS\$5,7 juta; dan biaya-biaya lainnya sebesar AS\$240 ribu (nilai penuh).

On draw-down of the facility in 2009, the Borrower paid upfront fees and agency fees of US\$4.5 million; insurance premium tied to the agreement of US\$5.7 million; and other fees of US\$240 thousand (full amount).

Biaya-biaya berikut merupakan biaya yang harus dibayar sepanjang umur pinjaman:

The following fees are to be paid over the life of the loan by the Company:

- Biaya agen kepada *Facility Agent* sebesar AS\$20 ribu (nilai penuh) per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 30 November sampai seluruh pinjaman dilunasi.
- Agency fee to the Facility Agent, amounting to US\$20 thousand (full amount) per annum, paid on every November 30, until all loans have been paid in full.

17. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

- Biaya jaminan kepada Penjamin dihitung dari 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi (lihat Catatan 31f).

Fasilitas tersebut terikat pada persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain:

- Untuk menyerahkan kepada *Facility Agent* dalam jangka waktu masing-masing 180 hari dan 90 hari pada setiap akhir tahun dan setiap kuartal, laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan kuartalan yang tidak diaudit.
- Dana dari pinjaman akan digunakan hanya untuk membiayai konstruksi, pembangunan dan pengoperasian dari Proyek Karebbe.
- Memastikan paling tidak perlakuan *pari passu* dengan semua pinjaman senior lain yang dimiliki Penjamin baik yang tidak dijamin maupun yang bersifat *unsubordinated* yang ada saat ini maupun di masa datang (Peminjam dan Penjamin).
- Sehubungan dengan Periode Penilaian (setiap enam bulan), nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* (setiap perjanjian ekspor awal dan setiap perjanjian ekspor lainnya yang dibentuk oleh Peminjam dari waktu ke waktu) tidak kurang dari 110% *debt service* (bunga ditambah dengan pokok angsuran).
- Selalu menjaga agar nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* tidak kurang dari 110% jumlah komitmen ditambah dengan jumlah pokok pinjaman dan jumlah *debt service coverage*.
- Peminjam akan memerintahkan JP Morgan Chase Bank, N.A. untuk mentransfer cicilan sebagai berikut :
 - Periode bulan kalender pertama bunga 20%
 - Periode bulan kalender kedua bunga 40%
 - Periode bulan kalender ketiga bunga 60%
 - Periode bulan kalender keempat bunga 80%
 - Periode bulan kalender kelima bunga 100%
- Peminjam tidak akan memberikan hak atas penjaminan asetnya kepada Pemberi Pinjaman lain selain dari Pemberi Pinjaman yang disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan.
- Peminjam dan Penjamin tidak akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain atau memindahkan keseluruhan atau bagian signifikan dari asetnya ke pihak lain, tanpa ijin dari Pemberi Pinjaman.
- Tidak diperbolehkan menghapus aset yang berkaitan dengan Proyek Karebbe tanpa mendapat ijin terlebih dahulu.
- Penjamin akan menjaga beberapa rasio, seperti rasio Utang terhadap Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi ("LBPDA") yang telah disesuaikan dan rasio LBPDA yang telah disesuaikan terhadap Biaya Bunga, sebagai persyaratan posisi keuangan pada setiap akhir periode semester fiskal dari Penjamin.

Kejadian *default*: tidak membayar pokok pinjaman; tidak membayar *fee* atau bunga; tidak memenuhi persyaratan perjanjian; kebangkrutan atau tidak solven.

Pada tanggal 25 Maret 2011, Peminjam melakukan penarikan tambahan atas sisa fasilitas kredit sebesar AS\$150 juta (nilai penuh) (tidak ada biaya pinjaman tambahan yang harus dibayar oleh Peminjam untuk penarikan tersebut). Sehingga, pada tanggal 31 Desember 2015, Peminjam telah melakukan penarikan atas keseluruhan SEFA sebesar AS\$300 juta (nilai penuh).

17. Long-term bank borrowings (continued)

- Guarantee fee to the Guarantor of 1.5% per annum on the outstanding loan amount (refer to Note 31f).

The facility is subject to certain covenants, among others:

- To furnish to the Facility Agent within 180 days and 90 days of the end of each fiscal year and quarter, respectively, the audited financial statements with an unqualified opinion and the unaudited quarterly financial statements.
- Proceeds of the loan will be used solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe Project.
- Ensure at least *pari passu* ranking with all other present and future senior unsecured and unsubordinated indebtedness of the Obligor (Borrower and Guarantor).
- With respect to each Measurement Period (six-month basis), the market value of the Designated Off-take Agreements (each of the initial Export Agreements and each other Export Agreement from time to time designated by the Borrower) will be not less than 110% of the debt service amount (interest plus principal installment).
- At all times the market value of the Designated Off-take Agreements will be not less than 110% of the sum of the commitments plus the outstanding principal amount of the loans together with the debt service coverage amount.
- The Borrower will instruct JP Morgan Chase Bank, N.A. to transfer the installment portion as follows:
 - in the 1st calendar month of the interest period 20%
 - in the 2nd calendar month of the interest period 40%
 - in the 3rd calendar month of the interest period 60%
 - in the 4th calendar month of the interest period 80%
 - in the 5th calendar month of the interest period 100%
- The Borrower will not create or permit to exist any lien on any collateral, except for the lien created by the Security Agreement.
- The Borrower and Guarantor will not consolidate with or merge into any other corporation or convey or transfer all or a significant part of its assets to any other parties, without the consent of the Lenders.
- No disposal of assets related to Karebbe Project without prior consent.
- The Guarantor will maintain certain ratios, such as Debt to Adjusted Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ("EBITDA") ratio and Adjusted EBITDA to Interest Expense ratio, as financial covenants for each financial test period ending on last day of each fiscal semester of the Guarantor.

Events of default: non-payment of principal; non-payment of fee or interest; failure to satisfy any covenant; involuntary proceedings for bankruptcy or insolvency.

On March 25, 2011, the Borrower made an additional drawdown of the remaining credit facility of US\$150 million (full amount) (there was no additional borrowing cost to be paid by the Borrower for the drawdown). Therefore, as at December 31, 2015, the Borrower has fully drawn down the SEFA of US\$300 million (full amount).

17. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Fasilitas kredit diatas digunakan untuk mendanai Proyek Karebbe. Pada tanggal 31 Desember 2015, Peminjam telah mematuhi persyaratan-persyaratan perjanjian fasilitas kredit ini.

SEFA telah diubah pada November 2012 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/20/PBI/2011 mengenai Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri melalui Bank Devisa dimana penempatan dana dilakukan melalui sistem perbankan Indonesia.

Pada tanggal 30 November 2015, Perjanjian Persetujuan atas SEFA ditandatangani untuk menyesuaikan, antara lain, persyaratan posisi keuangan dengan efek terbatas. Para pihak setuju bahwa Perjanjian Persetujuan ini terbatas pada penelaahan atas rasio Utang terhadap LBPDA yang telah disesuaikan dan rasio LBPDA yang telah disesuaikan terhadap Biaya Bunga untuk periode tes yang ditentukan.

18. Liabilitas imbalan pascakerja

Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. Kep-434/KM.17/1997, tertanggal 31 Juli 1997 seperti diumumkan dalam Berita Negara No. 73/1997 tanggal 12 September 1997 untuk mendirikan DPI, suatu dana pensiun yang dikelola secara tersendiri, dimana karyawan tertentu yang diterima sebagai karyawan sebelum 1 Januari 2011 yang telah memenuhi persyaratan masa kerja yang disyaratkan berhak untuk memperoleh tunjangan pensiun berdasarkan manfaat pasti, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia.

Pada tanggal 17 Desember 2012, Perseroan menerima surat dari Menteri Keuangan No.733/KM.10/2012 mengenai persetujuan untuk likuidasi DPI.

Dengan dilikuidasinya DPI, program dana pensiun karyawan Perseroan telah dipindahkan dan dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu DPLK Bumiputera. Hal ini termasuk dana pensiun yang telah ada yang sebelumnya dikelola oleh DPI maupun dana pensiun yang akan datang yang dibayarkan berdasarkan program defined contribution ("DC"). Jumlah kontribusi yang disetor oleh Perseroan adalah sebesar 10% dari gaji karyawan. Seluruh karyawan Perseroan yang sebelumnya merupakan peserta DPI dalam program DB diikutsertakan dalam program DC yang dikelola oleh DPLK tersebut. Proses likuidasi ini saat ini telah selesai.

Liabilitas atas imbalan kerja 31 Desember 2015 dan 2014 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen pada laporannya tertanggal 12 Februari 2016 dan 20 Februari 2015. Liabilitas pada laporan posisi keuangan terdiri dari:

31 Desember	2015	2014	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	5,971	5,475	Pension and Labor Law benefits
Imbalan kesehatan pascakerja	8,412	5,434	Post-retirement medical benefit
Jumlah	14,383	10,909	Total
Bagian lancar	-	-	Current portion
Bagian jangka panjang	14,383	10,909	Non-current portion

17. Long-term bank borrowings (continued)

The above credit facilities were utilized for financing the Karebbe Project. As at December 31, 2015, the Borrower was in compliance with the covenants under this facility.

The SEFA was amended on November 2012 in accordance with the Bank Indonesia Regulation No. 13/20/PBI/2011 concerning Receipt of Export Proceeds and Withdrawal of Foreign Exchange from External Debt through Foreign Exchange Banks in which placement of funds are conducted through the Indonesian banking system.

On November 30, 2015, the Consent Agreement to SEFA (the "Consent") was signed to adjust, among others, the financial covenant with limited effect. The parties agree that the consent is limited to the review of the provisions of the Debt to Adjusted EBITDA Ratio and Adjusted EBITDA to Interest Expense Ratio for the specified test periods.

18. Post-employment benefit liabilities

The Company obtained the approval from the Minister of Finance ("MoF") of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. Kep-434/KM.17/1997 dated July 31, 1997, as published in the State Gazette No. 73/1997 dated September 12, 1997, to establish DPI, a separate trustee established to administer the pension fund, whereby certain employees hired prior to January 1, 2011 after serving for a certain period, are entitled to a defined benefit ("DB") pension fund upon retirement, disability or death.

On December 17, 2012, the Company received a letter from The MoF No.733/KM.10/2012 regarding the approval for the liquidation of DPI.

As a consequence of liquidating DPI, the pension plan funds of the Company's employees have been transferred and managed by a pension fund financial institution ("DPLK") that has been appointed by the Company that DPLK Bumiputera. This will include the current pension funds previously managed by DPI and future pension funds paid based on a defined contribution ("DC") approach. The contribution paid by the Company is 10% of the employees' salaries. All of the Company's employees who were previously participants of DPI DB plan are included in the DC plan managed by the DPLK. The liquidation process is already completed.

The employee benefit liabilities as at December 31, 2015 and 2014 were calculated by PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary with its reports dated February 12, 2016 and February 20, 2015, respectively. The liability in the statements of financial position consists of:

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

The principal actuarial assumptions used were as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
Asumsi ekonomi:			Economic assumptions:
Tingkat diskonto (IDR)	9.00%	8.00%	Discount rate (IDR)
Pengembalian yang diharapkan dari aset program	N/A	N/A	Expected return on plan assets
Kenaikan gaji di masa depan (IDR)	8.00%	8.00%	Future salary increases (IDR)
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Tingkat mortalita	TMI 2011	TMI 2011	Rates of mortality
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate	10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate	Disability rate
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age

Pada 31 Desember 2015, durasi rata-rata tertimbang atas kewajiban iuran pasti adalah 11,55 tahun (December 31, 2014: 10,84 tahun).

As of December 31, 2015, the weighted – average duration of the defined contribution obligation was 11.55 years (December 31, 2014: 10.84 years).

Perseroan mengakui keuntungan/(kerugian) aktuarial secara keseluruhan melalui pendapatan komprehensif lain pada laporan keuangan tahunan.

The Company recognizes actuarial gains/(losses) in its annual financial statements in other comprehensive income.

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in post-employment benefits obligation over the year is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Pada awal tahun	5,475	3,487	5,434	8,415	10,909	11,902	At beginning of the year
Diakui di laba rugi							Recognized in profit or loss
- Biaya jasa kini	569	350	8	12	577	362	- Current service cost
- Biaya jasa lalu	1,256	119	197	31	1,453	150	- Past service cost
- Biaya bunga	490	344	388	783	878	1,127	- Interest cost
- Biaya penyelesaian	-	-	-	(3,526)	-	(3,526)	- Cost of settlements
Diakui di penghasilan komprehensif lain							Recognized in other comprehensive income
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari:							Actuarial losses/(gain) arising from:
- Asumsi demografi	(80)	-	(32)	-	(112)	-	- Demographic assumptions
- Asumsi keuangan	(792)	1,782	(1,194)	650	(1,986)	2,432	- Financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman	(10)	(319)	4,638	(613)	4,628	(932)	- Experience adjustment
Lain-lain							Others
- Pembayaran benefit	(238)	(201)	(286)	(184)	(524)	(385)	- Benefit paid
- Pengaruh perbedaan dalam pelaporan mata uang	(699)	(87)	(741)	(134)	(1,440)	(221)	- Effect on difference in reporting currency
Kewajiban imbalan pascakerja, akhir tahun	5,971	5,475	8,412	5,434	14,383	10,909	Post-employment benefit obligation, end of year

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Pada awal tahun	-	-	-	290	-	290	At beginning of the year
Hasil aktual aset program	-	-	-	(2)	-	(2)	Actual return on plan assets
luran pemberi kerja	-	-	-	-	-	-	Employer's contributions
Imbalan yang dibayarkan	-	-	-	184	-	184	Benefits paid
Penyesuaian lainnya	-	-	-	(472)	-	(472)	Other adjustments
	-	-	-	-	-	-	

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan atas dasar pengembalian yang diharapkan tersedia oleh aset yang berasal dari kebijakan investasi masa kini. Tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi atas bunga tetap didasarkan oleh pengembalian kotor di akhir periode pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas menggambarkan tingkat pengembalian oleh pasar yang bersangkutan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets' underlying current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the end of the reporting period. Expected returns on equity investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

Karena likuidasi DPI, tidak terdapat aset program untuk program manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Due to the liquidation of DPI, there are no plan assets for the defined benefit plan as at December 31, 2015 and 2014.

Penyesuaian pengalaman dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

The five year history of experience adjustments is as follows:

	2015	2014	2013	2012	2011	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(14,383)	(12,558)	(12,217)	(22,991)	(74,123)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	-	-	290	726	49,956	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(14,383)	(12,558)	(11,927)	(22,265)	(24,167)	Funded status
Penyesuaian pengalaman pada aset program	-	2	26	2,711	5,568	Experience adjustments on plan assets
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	2,530	1,499	5,715	3,908	8,932	Experience adjustments on plan liabilities

Jika tingkat diskonto yang digunakan berbeda 1% dari estimasi manajemen, pada tanggal 31 Desember 2015 nilai tercatat kewajiban pensiun diestimasi sebagai berikut:

If the discount rate differed by 1% from management's estimates, as at December 31, 2015 the carrying amount of pension obligations would be as follows:

31 Desember	2015		December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)	Naik/ Increase	Turun/ Decrease	(US Dollars, in thousand)
Tingkat diskonto (1% pergerakan)	1,860	1,551	Discount rate (1% movement)
Tingkat kenaikan gaji masa depan (1% pergerakan)	597	525	Future salary increase rate (1% movement)
Tingkat kenaikan klaim masa depan (1% pergerakan)	1,147	959	Future claim increase rate (1% movement)

19. Modal saham

Pemegang saham Perseroan, jumlah kepemilikan saham dan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	
Vale Canada Limited	5,835,607,960	80,115	58.73	Vale Canada Limited
Publik	2,036,346,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

Tidak ada pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

No public shareholder owned more than 5% of the total shares issued and fully paid.

Berdasarkan RUPST 2015, Perseroan membentuk cadangan 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar IDR248.408.468.000 (nilai penuh) atau setara dengan AS\$136.4 juta sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia (lihat catatan 22b).

Based on the 2015 AGMS, the Company established a statutory reserve of 20% of the issued and paid-up share capital amounting to IDR248,408,468,000 (full amount) or equivalent to to US\$136.4 million in accordance with the Indonesian Limited Liability Company Law (see note 22b).

20. Deklarasi dividen

Perseroan tidak mendeklarasikan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Dividen yang telah diumumkan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

20. Dividends declared

The Company did not declare any dividend for the year ended December 31, 2015. Dividends declared during the year ended December 31, 2014 were as follows:

	Tanggal dideklarasikan/ Date declared	Tanggal pembayaran/ Date paid	Dividen per lembar saham AS\$ (nilai penuh)/ Dividend per share US\$ (full amount)	Jumlah AS\$, dalam ribuan/ Amount US\$, in thousands	
Dividen interim 2014	11 November/ November 11, 2014	17 Desember/ December 17, 2014	0.01007	100,059	Interim dividend for 2014

Berdasarkan hasil keputusan RUPST pada 31 Maret 2015 yang menyetujui antara lain, nilai total dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar AS\$0,01007 per saham, yang merupakan dividen interim yang telah dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 4 Desember 2014, dan tidak membayarkan dividen final untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Based on AGMS decision on March 31, 2015, which approved, among others, the total dividend for the financial year ending December 31, 2014 in the amount of US\$0.01007 per share, being the interim dividend already paid to shareholders of record as at December 4, 2014, and not to pay final dividend for the year ended December 31, 2014.

21. Tambahan modal disetor

Perseroan mempunyai saldo Tambahan Modal Disetor senilai AS\$277,76 juta (31 Desember 2014: AS\$277,76 juta) (nilai penuh) merupakan sisa atas surplus yang terjadi akibat penerbitan saham di atas nilai nominal dan penurunan nilai nominal saham yang terjadi di tahun 1983. Di tahun 1983, Perseroan melakukan restrukturisasi modal (kuasi-reorganisasi) sehingga terjadi alokasi bersih sebesar AS\$205,9 juta (nilai penuh) ke Akumulasi Defisit pada saat itu.

21. Additional paid-in capital

The Company has an Additional Paid-in Capital balance of US\$277.76 million (December 31, 2014: US\$277.76 million) (full amount) representing the remaining surplus arising from the issuance of shares in excess of par value and a reduction in the par value of its shares in 1983. In 1983, the Company underwent a capital restructuring (quasi-reorganization) that resulted in the allocation of a net amount of US\$205.9 million (full amount) to the Accumulated Deficit at the time.

a. Cadangan jaminan reklamasi

a. Reclamation guarantee reserve

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	29,577	35,622	Beginning balance
Ditransfer ke saldo laba ditahan yang belum dicadangkan pada tahun berjalan	(29,577)	(6,045)	Transferred to unappropriated retained earnings during the year
Jumlah	-	29,577	Total

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 ("PP 78/2010") mengharuskan Perseroan menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Peraturan tersebut mengharuskan setiap perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan studi tahunan yang diperkirakan besarnya jumlah biaya reklamasi dan melaporkan rencana reklamasinya kepada Pemerintah. Rencana tersebut mencakup perkiraan biaya dari pekerjaan untuk pemulihan lahan tambang bila dikerjakan oleh kontraktor luar. Untuk setiap pekerjaan yang tidak dilaksanakan sendiri oleh Perseroan sesuai dengan rencana pada periode tersebut, Pemerintah dapat menuntut pembayaran atas pekerjaan yang masih harus dikerjakan untuk dilakukan oleh kontraktor. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi atau, pada kondisi tertentu yang menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan akuntansi yang dicatat dalam buku Perseroan (lihat catatan 36b).

A financial surety, or reclamation guarantee, is required under Government Regulation No. 78 of 2010 ("GR 78/2010"). The regulation requires that an annual study be undertaken by a mining company operating in Indonesia to estimate its reclamation costs and that a plan be submitted to the Government. The plan includes an estimate of the cost of performing the rehabilitation work by an outside contractor. For any work a company does not carry out in the period pursuant to the plan, the Government can require payment for the outstanding work to be carried out by the contractor. The surety can be in the form of a joint account, time deposit, bank guarantee or, in certain circumstances involving public companies, an accounting reserve recorded in the accounts of the Company (see note 36b).

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Perseroan memindahkan sejumlah AS\$6,05 juta dari Cadangan Jaminan Reklamasi ke Saldo Laba Ditahan untuk merefleksikan pengurangan cadangan seperti yang diharuskan dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral Mineral dan Batubara No. 401/30/DJB/2014 dan No. 2039/30/DJB/2014.

During the year ended December 31, 2014, the Company transferred US\$6.05 million from the Reclamation Guarantee Reserve to Retained Earnings to reflect the reduction in the reserve as required in the Decision Letter of The Directorate General of Mineral and Coal No. 401/30/DJB/2014 and No. 2039/30/DJB/2014.

Guna memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 telah melakukan penyesuaian bentuk jaminan reklamasi dari cadangan akuntansi menjadi bank garansi sebesar AS\$16,6 juta (nilai penuh). Atas penyesuaian ini, Perusahaan memindahkan cadangan jaminan reklamasi sebesar AS\$29,6 juta (nilai penuh) ke saldo laba yang belum dicadangkan.

In order to fulfill the obligations under Ministerial Regulation No. 07/2014, as of December 31, 2015 the Company has conducted the adjustment of its reclamation guarantee to become a bank guarantee in the amount of US\$16.6 million (full amount). As a result of this adjustment, the Company transferred the reclamation guarantee reserve of US\$29.6 million (full amount) to unappropriated retained earnings.

b. Cadangan umum

b. General reserve

Sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Perseroan wajib membentuk cadangan umum, sebesar minimum 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jumlah modal ditempatkan dan disetor dari Perseroan adalah sebesar IDR248.408.468.000 (nilai penuh) atau setara dengan AS\$136,4 juta; sehingga, minimum cadangan umum yang disyaratkan bagi Perseroan adalah sebesar AS\$27,3 juta.

In accordance with Indonesian Limited Company Law No. 40/2007, the Company shall set up a general reserve in the amount of minimum 20% of the issued and paid up capital of the Company. The Company's issued and paid up capital is IDR248,408,468,000 (full amount) or equivalent to US\$136.4 million; therefore, the minimum required general reserve for the Company is US\$27.3 million.

Jumlah cadangan umum Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar AS\$12,1 juta. Pada tanggal 1 April 2014, pemegang saham menyetujui untuk mengalokasikan sebagian dari laba bersih Perseroan tahun 2013 sebagai tambahan cadangan umum sebesar AS\$3,9 juta (nilai penuh). Dengan demikian, jumlah cadangan umum Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar AS\$16,0 juta.

The Company's general reserve as of December 31, 2013 was US\$12.1 million. On April 1, 2014 the shareholders approved the allocation of US\$3.9 million (full amount) of Company's net profit in 2013 as an additional general reserve. Therefore, Company's general reserve as of December 31, 2014 was US\$16.0 million.

Pada RUPST 2015, pemegang saham menyetujui penyisihkan 6,6% atau sebesar AS\$11,3 juta (nilai penuh) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku 2014 sebagai dana cadangan umum. Dengan demikian, jumlah cadangan umum Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar AS\$27,3 juta. Dengan pengalokasian ini maka Perseroan telah memenuhi minimal dana cadangan umum yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas.

During the 2015 AGMS, the shareholders approved the allocation of 6.6% or equal to US\$11.3 million (full amount) of the Company's net profit for fiscal year 2014 to general reserve. Therefore, Company's general reserve as of December 31, 2015 is US\$27.3 million. This will be the final appropriation to meet the minimum threshold for general reserve as required by the Company Law.

23. Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

23. Cost of revenue

Cost of revenue for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bahan pembantu	154,740	150,515	Supplies
Bahan bakar minyak dan pelumas	153,043	223,070	Fuels and lubricants
Depresiasi, amortisasi, dan deplesi	121,368	122,153	Depreciation, amortization and depletion
Kontrak dan jasa	97,773	89,521	Services and contracts
Biaya karyawan	67,498	88,798	Employment costs
Pajak dan asuransi	26,271	27,645	Taxes and insurance
Royalti	15,795	15,784	Royalties
Penyisihan penurunan nilai persediaan	12,940	-	Provision for decline in inventory value
Lainnya	10,621	14,112	Others
	660,049	731,598	
Persediaan dalam proses			In process inventory
Persediaan awal	35,836	40,699	Beginning balance
Persediaan akhir	(31,621)	(35,836)	Ending balance
Beban pokok produksi	664,264	736,461	Cost of production
Barang jadi			Finished goods
Persediaan awal	16,034	10,993	Beginning balance
Persediaan akhir	(8,909)	(16,034)	Ending balance
Beban pokok pendapatan	671,389	731,420	Cost of revenue

Lihat Catatan 31d untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31d for details of related party balances and transactions.

Rincian pemasok dengan transaksi pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian:

Details of suppliers having transactions representing more than 10% of total purchases:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pihak ketiga			Third parties
Kuo International (Pte) Ltd.	90,801	158,124	Kuo International (Pte) Ltd.

24. Beban usaha

Rincian beban usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

24. Operating expenses

The components of operating expenses for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti	6,766	9,171	Management service, license and royalty fees
Biaya jasa profesional	2,279	2,328	Professional fees
Biaya karyawan	853	1,398	Employee costs
Lainnya	1,664	1,567	Others
Jumlah	11,562	14,464	Total

Lihat Catatan 31c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31c for details of related party balances and transactions.

25a. Pendapatan lainnya

Rincian pendapatan lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pendapatan keuangan	1,357	913	Finance income

25b. Beban lainnya

Rincian beban lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya pengembangan proyek	18,432	42,438	Project development costs
Rugi selisih kurs	13,573	248	Loss on currency translation adjustments
Lainnya	(3,605)	980	Others
Jumlah	28,400	43,666	Total

Lihat Catatan 31d untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

The components of other income for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

25b. Other expenses

The components of other expenses for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

Refer to Note 31d for details of related party balances and transactions.

26. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Beban akresi diakui sebagai bagian dari beban keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pergerakan di saldo provisi atas penghentian pengoperasian aset adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Saldo awal	49,277	45,842	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	6,215	-	Provisions made during the year
Beban akresi	2,192	3,435	Accretion expense
Saldo akhir	57,684	49,277	Ending balance

26. Provision for asset retirement

Accretion expense is recognized as part of finance costs in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Movement in the provision for the asset retirement balance is as follows:

27. Pengeluaran untuk lingkungan hidup lainnya

Pada tahun 1993, Perseroan memperoleh persetujuan Pemerintah atas Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Laporan-laporan tersebut memberikan informasi dan rencana-rencana pendahuluan kepada Pemerintah mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan Perseroan saat ini. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2015, sejumlah inisiatif, yang merupakan sebagian dari komitmen Perseroan di dalam rencana-rencana tersebut, telah diselesaikan, sementara yang lainnya masih sedang berlangsung. Inisiatif-inisiatif yang kini sedang terus berlangsung termasuk penghijauan daerah purna tambang untuk menyeimbangkannya dengan tingkat pembukaan wilayah tambang yang baru.

Pengeluaran untuk lingkungan hidup yang dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebesar AS\$4,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: AS\$5,3 juta) (nilai penuh). Pengeluaran barang modal yang berhubungan dengan proyek lingkungan hidup berjumlah AS\$4,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: AS\$2,4 juta) (nilai penuh).

28. Biaya karyawan

Jumlah biaya karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar AS\$71,0 juta (31 Desember 2014: AS\$94,2 juta) (nilai penuh).

27. Other environmental expenditures

In 1993, the Company received approval from the Government for its Environmental Evaluation Study, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan. These reports provided the Government with information and preliminary plans regarding the Company's current environmental programs. During the year ended December 31, 2015, a number of initiatives, representing part of the Company's commitments under these plans, were completed while others were still in progress. Ongoing initiatives include the revegetation of mined-out areas to match the stripping rates of new mining areas.

Environmental expenditures charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income were US\$4.3 million for the year ended December 31, 2015 (December 31, 2014: US\$5.3 million) (full amount). Capital expenditures for environmental projects were US\$4.6 million for the year ended December 31, 2015 (December 31, 2014: US\$2.4 million) (full amount).

28. Employee costs

Total employee costs for the year ended December 31, 2015 amounted to US\$71.0 million (December 31, 2014: US\$94.2 million) (full amount).

29. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba yang diperuntukkan kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan. Tidak ada laba per saham yang terdilusi.

29. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing total profit attributable to the shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the period.

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai laba per saham dasar)			(US Dollars, in thousands, except basic earnings per share)
Jumlah laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham	50,501	172,271	Total profit for the year attributable to the shareholders
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar (dalam ribuan)	9,936,339	9,936,339	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousands)
Laba per saham dasar dan dilusi (dalam AS\$)	0.005	0.017	Basic and diluted earnings per share (in US\$)

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusi sama dengan laba per saham dasar.

As at December 31, 2015 and 2014, there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share are equivalent to basic earnings per share.

30. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan

Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting seperti disebutkan di bawah ini :

30. Significant commitments and agreements

The Company has entered into various significant agreements as mentioned below :

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jenis perjanjian/ Agreement type	Periode perjanjian/ Agreement period
Kuo International (Pte) Ltd.	Pembelian Minyak Berkadar Sulfur Tinggi/ <i>Purchase of High Sulphur Fuel Oil (HSFO)</i>	1 Agustus 2014 - 31 Juli 2018/ <i>August 1, 2014 - July 31, 2018</i>
PT Pertamina Patra Niaga	Pembelian Solar Berkecepatan Tinggi/ <i>Purchase of High Speed Diesel (HSD)</i>	1 Oktober 2015 - 28 Februari 2016/ <i>October 1, 2015 - February 28, 2016</i>
PT Marunda Graha Mineral	Pembelian batu bara/ <i>Purchase of coal</i>	1 Juli 2015 - 31 Desember 2015/ <i>July 1, 2015 - December 31, 2015</i>
PT Trubaindo Coal Mandiri	Pembelian batu bara/ <i>Purchase of coal</i>	1 Maret 2015 - 31 Desember 2016/ <i>March 1, 2015 - December 31, 2016</i>
PT Trakindo Utama	Pembelian suku cadang/ <i>Purchase of spare parts</i>	1 Agustus 2014 - 30 April 2020/ <i>August 1, 2014 - April 30, 2020</i>
PT Cipta Krida Bahari	Jasa <i>freight forwarding</i> global/ <i>Global freight forwarding</i>	1 Mei 2015 - 30 April 2018/ <i>May 1, 2015 - April 30, 2018</i>

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perseroan memiliki komitmen pembelian barang dan jasa yang terkait dengan biaya operasi dan biaya capital dengan pemasok pihak ketiga, yang harus dilunasi dalam periode sebagai berikut:

As at December 31, 2015 and 2014, the Company had purchase commitments for goods and services related to operating expenses and capital expenses with third party suppliers, which are payable within the periods as follow:

30. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan (lanjutan)

30. Significant commitments and agreements (continued)

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Tidak lebih dari 1 tahun	89,573	62,852	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	60,569	38,201	Later than 1 year and no later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	390	407	Later than 5 years
Jumlah	150,532	101,460	Total

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi

31. Related party information

Perseroan berada di bawah pengendalian Vale Canada Limited. Perusahaan pengendali utama Perseroan adalah Vale S.A. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Company is controlled by Vale Canada Limited. The ultimate parent company is Vale S.A. Transactions with related parties are as follows:

a. Pendapatan

a. Revenue

Seluruh penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS, di mana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan atas harga tunai nikel di LME dan harga realisasi rata-rata nikel Vale Canada Limited. Pasal 6 dari Kontrak Karya 1968 menyatakan bahwa Perseroan harus menjual hasil produksinya dengan harga dan syarat-syarat yang sesuai dengan keadaan pasar dunia. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah berhak untuk meninjau setiap perubahan atas perumusan harga. Semua penjualan merupakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

The Company's sales are made based on long-term, "must take", US Dollar-denominated sales contracts, with prices determined by a formula that is based on the LME cash price for nickel and Vale Canada Limited's average net realized price for nickel. Article 6 of the 1968 CoW states that the Company is obliged to sell its product at prices and on terms compatible with world market conditions. The article also states that the Government has the right to review adjustments in the pricing formula. All amounts represent sales to related parties.

Pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

Revenue for the years ended December 31, 2015 and 2014 consist of:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Penjualan kepada Vale Canada Limited	632,954	830,507	Sales to Vale Canada Limited
Penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	156,791	207,575	Sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Jumlah	789,745	1,038,082	Total
(Persentase penjualan kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan)	100%	100%	(Related party sales as a percentage of total revenue)

b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi

b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors

Dewan Komisaris dan Direksi adalah personil manajemen kunci Perseroan.

The Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company.

Kompensasi yang dibayar atau terutang kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to the Board of Commissioners and Directors are shown below:

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015/ For the year ended December 31, 2015			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
(Dalam ribuan Dolar AS) / (US Dollars, in thousands)	% ¹⁾	Amount	% ¹⁾	Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.3%	224.5	2.7%	1,911.4
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	0.1%	96.3
Pembayaran berbasis saham/ Share-based payments	-	-	-	-
	0.3%	224.5	2.8%	2,007.7

¹⁾ % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors (continued)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014/ For the year ended December 31, 2014			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
(Dalam ribuan Dolar AS) / (US Dollars, in thousands)	% ¹⁾	Amount	% ¹⁾	Amount
Gaji dan imbalan pekerjaan jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.3%	261.0	2.8%	2,580.1
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	0.1%	62.1
Pembayaran berbasis saham/ Share-based payments	-	-	-	-
	0.3%	261.0	2.9%	2,642.2

¹⁾ % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

Perseroan juga memberi opsi kepada personil manajemen kunci untuk membeli "opsi setara saham" Perseroan dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu. "Opsinya setara saham" mempunyai nilai yang sama dengan saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pengekseskuan opsi biasanya dilakukan dengan pembayaran kas. Opsi yang dieksekusi dicatat sebagai biaya karyawan. Opsi yang dieksekusi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah nihil (31 Desember 2014: nihil).

The Company has also awarded key management personnel options to purchase "share option equivalents" of the Company at a predetermined exercise price. A "share option equivalent" has the same value as a common share of the Company traded on the Indonesia Stock Exchange. The exercise of such options is usually settled in cash. Options exercised are included in employee costs. Options exercised for the year ended December 31, 2015 were nil (December 31, 2014: nil).

Pada tanggal 31 Desember 2015 terdapat opsi yang belum dilaksanakan untuk membeli 561.400 (31 Desember 2014: 1.636.400) setara saham, dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu berkisar antara IDR2.971 sampai dengan IDR7.350 (31 Desember 2014: IDR2.971 sampai dengan IDR7.350) dalam nilai penuh. Penurunan jumlah opsi membeli yang belum dilaksanakan disebabkan karena habisnya masa berlaku opsi tersebut.

As at December 31, 2015, there were outstanding options to purchase an aggregate of 561,400 (December 31, 2014: 1,636,400) share equivalents (full amount) with predetermined prices ranging from IDR2,971 to IDR7,350 (December 31, 2014: IDR2,971 to IDR7,350) in full amount. The decrease in total outstanding options to purchase was due to expiration of the options.

c. Beban Jasa Manajemen, Lisensi dan Royalti

c. Management Service, License and Royalty fees

Di tahun 2013, Perseroan telah melakukan pembaharuan atas perjanjian bantuan manajemen dan teknis yang merupakan bantuan Vale Canada Limited untuk merealisasikan proyek-proyek Perseroan, mekanisme pembiayaannya, konstruksi dan operasi dari fasilitas Perseroan, dan pemasaran produk Perseroan. Pembaharuan perjanjian ini dilakukan untuk mencerminkan kondisi praktik bisnis yang umum digunakan saat ini untuk jasa-jasa yang sifatnya serupa. Perjanjian bantuan manajemen dan teknis dengan Vale Canada Limited diganti dengan perjanjian jasa manajemen dan perjanjian lisensi dan royalti yang secara substansi mengatur jenis dan ruang lingkup yang sama.

In 2013, the Company decided to amend the management and technical assistance agreements which previously represented Vale Canada Limited's assistance for realization of the Company's projects, its financing scheme, the construction and operation of the Company's facilities, and the marketing of the Company's products. The amendment is applied to reflect the prevailing business practice for these types of service arrangements. The management and technical assistance agreement with Vale Canada Limited was changed with the management service arrangements and license and royalty agreement which substantively sets a similar type and scope of work.

Beban untuk jasa manajemen dan lisensi dan royalti digolongkan sebagai beban usaha (lihat Catatan 24) di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Berdasarkan pembaharuan perjanjian, beban jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah biaya jasa 10%, sementara beban lisensi dan royalti dihitung dari 0,8% dari nilai pendapatan kotor.

Management service, license and royalty fees are classified as operating expenses (refer to Note 24) in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Based on the amendment, the management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while the license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross proceeds.

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) Vale Canada Limited	6,766	9,171	Vale Canada Limited (US Dollars, in thousands)
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban usaha)	58.52%	63.40%	(As a percentage of total operating expenses)

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

d. Beban lainnya

d. Other costs

31 Desember	2015	2014		December 31
				(US Dollars, in thousands)
(Dalam ribuan Dolar AS)				
Vale Canada Limited	6,154	4,703	Vale Canada Limited	
Vale Japan Limited	29	45	Vale Japan Limited	
Vale Europe Limited	-	6	Vale Europe Limited	
Jumlah	6,183	4,754	Total	
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan)	0.92%	0.65%	(As a percentage of total cost of revenue)	

31 Desember	2015	2014		December 31
				(US Dollars, in thousands)
(Dalam ribuan Dolar AS)				
Vale Technology Development (Canada) Limited	743	599	Vale Technology Development (Canada) Limited	
Vale Canada Limited	167	-	Vale Canada Limited	
Jumlah	910	599	Total	
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pengembangan proyek)	4.94%	1.41%	(As a percentage of total project development costs)	

e. Aset

e. Assets

i) Piutang usaha

i) Trade receivables

31 Desember	2015	2014		December 31
				(US Dollars, in thousands)
(Dalam ribuan Dolar AS)				
Vale Canada Limited	50,038	73,569	Vale Canada Limited	
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	28,162	19,137	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	
Jumlah	78,200	92,706	Total	
(Sebagai persentase terhadap piutang usaha)	100%	100%	(As a percentage of trade receivables)	

ii) Aset keuangan lancar lainnya

ii) Other current financial assets

31 Desember	2015	2014		December 31
				(US Dollars, in thousands)
(Dalam ribuan Dolar AS)				
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di atas IDR1 miliar*)	399	255	Loans to key management personnel above IDR1 billion*)	
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di bawah IDR1 miliar	-	41	Loans to key management personnel below IDR1 billion	
Jumlah pinjaman kepada personil manajemen kunci	399	296	Total loans to key management personnel	
Dikurangi: Bagian jangka panjang	(263)	(211)	Less: Non-current portion	
Bagian jangka pendek	136	85	Current portion	
(Sebagai persentase terhadap aset keuangan lancar lainnya)	3.63%	1.98%	(As a percentage of other current financial assets)	

*) Personil manajemen kunci yang mempunyai saldo pinjaman lebih dari IDR1 miliar (nilai penuh) per 31 Desember 2015 adalah Febriany Eddy dan Nicolas D. Kanter (31 Desember 2014: Febriany Eddy).

*) Key management personnel with a loan balance of more than IDR1 billion (full amount) as at December 31, 2015 are Febriany Eddy and Nicolas D. Kanter (December 31, 2014: Febriany Eddy).

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

e. Aset (lanjutan)

iii) Piutang pihak berelasi non-usaha

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci – jangka panjang	263	211	Loans to key management personnel – non-current
(Sebagai persentase terhadap piutang pihak berelasi non-usaha)	100%	100%	(As a percentage of non-trade receivables from related parties)
Jumlah aset yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	78,599	93,002	Total assets associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	3.43%	3.98%	(As a percentage of total assets)

f. Liabilitas

i) Utang usaha

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Vale Canada Limited	5,558	3,724	Vale Canada Limited
Vale Technology Development (Canada) Limited	3,142	2,399	Vale Technology Development (Canada) Limited
Vale Japan Limited	12	24	Vale Japan Limited
Jumlah	8,712	6,147	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah utang usaha)	10.17%	8.28%	(As a percentage of total trade payables)

ii) Akrual

Berkaitan dengan SEFA (lihat Catatan 17), Perseroan dan Vale S.A., entitas pengendali utama dari Perseroan, melakukan perjanjian jaminan dimana Vale S.A. setuju untuk menjamin AS\$300 juta fasilitas utang yang diterima Perseroan. Biaya jaminan sebesar 1,5% per tahun dari setiap jumlah pinjaman yang diambil oleh Perseroan dari SEFA akan terhutang kepada Vale S.A. Selanjutnya, biaya sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi harus dibayar sepanjang umur pinjaman. Biaya tersebut akan terhutang oleh Perseroan pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran jaminan pertama adalah hari kerja terakhir pada Februari 2010, dan selanjutnya pada hari kerja terakhir pada Agustus dan Februari).

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya garansi yang masih harus dibayar	788	977	Accrued guarantee fee
(Sebagai persentase terhadap jumlah akrual)	4.69%	3.05%	(As a percentage of total accruals)
Jumlah liabilitas yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	9,500	7,124	Total liabilities associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)	2.09%	1.30%	(As a percentage of total liabilities)

31. Related party information (continued)

e. Assets (continued)

iii) Non-trade receivables from related parties

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci – jangka panjang	263	211	Loans to key management personnel – non-current
(Sebagai persentase terhadap piutang pihak berelasi non-usaha)	100%	100%	(As a percentage of non-trade receivables from related parties)
Jumlah aset yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	78,599	93,002	Total assets associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	3.43%	3.98%	(As a percentage of total assets)

f. Liabilities

i) Trade payables

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Vale Canada Limited	5,558	3,724	Vale Canada Limited
Vale Technology Development (Canada) Limited	3,142	2,399	Vale Technology Development (Canada) Limited
Vale Japan Limited	12	24	Vale Japan Limited
Jumlah	8,712	6,147	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah utang usaha)	10.17%	8.28%	(As a percentage of total trade payables)

ii) Accruals

In connection with the SEFA (refer to Note 17), the Company and Vale S.A., the ultimate parent entity of the Company, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300 million debt facility obtained by the Company. A guarantee fee of 1.5% per annum on each loan drawdown made by the Company under the SEFA is payable to Vale S.A. Subsequently, the fee of 1.5% per annum on the outstanding loan amount is to be paid over the life of the loan. The fee is payable by the Company on each interest payment date (the first guarantee payment date was the last business day in February 2010, and thereafter the last business day of each August and February).

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

g. Pihak-pihak berelasi

g. Related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi/ <i>Nature of relationship with the related parties</i>	Transaksi/ <i>Transaction</i>
Vale S.A.	Entitas pengendali utama/ <i>Ultimate parent entity</i>	Penjamin dari pinjaman Perseroan dengan kompensasi biaya jaminan/ <i>Guarantor of loans of the Company in return for guarantee fee</i>
Vale Canada Limited	Perusahaan induk/ <i>Parent entity</i>	Penjualan barang jadi; Jasa profesional; Jasa manajemen, lisensi dan royalti/ <i>Sale of finished goods; Professional services; Management service, license and royalty fees</i>
Vale Europe Limited	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Expense reimbursement of the Company</i>
Vale Japan Limited	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Expense reimbursement of the Company</i>
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penjualan barang jadi/ <i>Sale of finished goods</i>
Vale Technology Development (Canada) Limited	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Jasa teknis/ <i>Technical services</i>
Manajemen kunci/ <i>Key management</i>	Personil manajemen kunci dari Perseroan/ <i>Key management personnel of the Company</i>	Kompensasi dan remunerasi; pinjaman rumah dan pinjaman pribadi; opsi setara saham/ <i>Compensation and remuneration; housing and personal loans; share option equivalent</i>

Kebijakan Perseroan terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Company's pricing policies related to the transactions with related parties are as follows:

- Penjualan barang jadi:
Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan penentuan harga jual berdasarkan harga tunai nikel di Pasar Bursa Logam London ("*the London Metal Exchange*") dan harga realisasi rata-rata nikel Vale Canada Limited (lihat Catatan 31a).
- Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti:
Pembayaran jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah jasa 10%. Untuk lisensi dan royalti dihitung dari 0.8% dari penjualan kotor (lihat Catatan 31c).
- Pembayaran jasa teknis, dihitung dari biaya aktual ditambah 10% jasa, sedangkan tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan dibayarkan sesuai biaya aktualnya.
- Biaya jaminan terhadap pinjaman jangka panjang sebesar AS\$300 juta dihitung dari 1,5% dari setiap utang yang diambil oleh Perseroan berdasarkan perjanjian jaminan pinjaman antara Perseroan dan Vale S.A. (lihat Catatan 31f).
- Sale of finished goods:
Based on long-term, "must take" US Dollar denominated sales contracts, with price determined based on the London Metal Exchange cash price for nickel and Vale Canada Limited's average net realized price for nickel (refer to Note 31a).
- Management service, license and royalty fees:
The fee for management service is calculated at actual cost plus a service fee of 10%. The license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross proceeds (refer to Note 31c).
- The fee for technical service is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while reimbursement of expenses and expenditures on the Company's behalf are charged at cost.
- Guarantee fee on US\$300 million long-term borrowings is 1.5% of each loan drawdown by the Company based on a loan guarantee agreement between the Company and Vale S.A. (refer to Note 31f).

32. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah pada 31 Desember 2015 telah dikonversikan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs AS\$1 (nilai penuh) = IDR13.796.

Pada 25 Februari 2016 kurs bergerak dari AS\$1 (nilai penuh) = IDR13.796 menjadi AS\$1 (nilai penuh) = IDR13.432. Ada kemungkinan bahwa Rupiah akan makin berfluktuasi di masa yang akan datang, dan mungkin akan terdepresiasi atau terapresiasi secara signifikan.

Tidak terdapat pergerakan aset moneter bersih dalam mata uang asing yang signifikan apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2015 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 25 Februari 2016.

32. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars

As at December 31, 2015 monetary assets and liabilities denominated in Rupiah have been translated into US Dollars using an exchange rate of US\$1 (full amount) = IDR13,796.

As at February 25, 2016 the exchange rate has moved from US\$1 (full amount) = IDR13,796 to US\$1 (full amount) = IDR13,432. It is possible that the Indonesian Rupiah may become more volatile in the future, and may depreciate or appreciate significantly.

There is no significant movement in net foreign currency monetary assets if assets and liabilities in foreign currency as at December 31, 2015 was translated using the exchange rate at February 25, 2016.

31 Desember	2015		December 31
	Mata Uang Asing (Jutaan)/ Foreign Currencies (Millions)	Setara AS\$ (Ribuan)/ US\$ Equivalent (Thousands)	
Aset			Assets
Kas dan setara kas	IDR 174,475	12,647	Cash and cash equivalents
Aset keuangan lancar lainnya	IDR 49,858	3,614	Other current financial assets
Pajak dibayar dimuka	IDR 1,367,013	99,089	Prepaid taxes
Piutang pihak berelasi non-usaha	IDR 3,628	263	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR 180,462	13,081	Other non-current financial assets
Jumlah aset moneter dalam mata uang asing		128,694	Total monetary assets in foreign currencies
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha			Trade payables
Pihak-pihak yang berelasi	JPY (1)	(12)	Related parties
Pihak ketiga	IDR (548,644)	(39,769)	Third parties
	GBP (1)	(1,253)	
	EUR (1)	(1,168)	
	AUD (1)	(796)	
	CAD (1)	(771)	
	Others (3)	(669)	
Utang pajak	IDR (24,915)	(1,806)	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR (63,309)	(4,589)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR (29,785)	(2,159)	Other current financial liabilities
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing		(52,992)	Total monetary liabilities in foreign currencies
Aset moneter bersih dalam mata uang asing		75,702	Net monetary assets in foreign currencies

Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah karena seluruh penjualan dan sebagian besar biaya Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (lihat Catatan 35).

The Company does not hedge the risk of fluctuations in the exchange rate of Rupiah since all sales and majority of the Company's expenses are transacted in US Dollars which indirectly represents a natural hedge (refer to Note 35).

33. Informasi segmen

Perseroan beroperasi hanya dalam satu segmen usaha dan geografis, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Seluruh produk Perseroan dijual berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang (lihat Catatan 31a).

33. Segment information

The Company operates in only one business and geographical segment: nickel mining and processing in Indonesia. All of the Company's products are delivered under long-term sales contracts (refer to Note 31a).

34. Aset dan liabilitas keuangan

Informasi di bawah ini berkaitan dengan aset dan liabilitas keuangan berdasarkan kategori akun:

34. Financial assets and liabilities

The information given below relates to the Company's financial assets and liabilities by category:

31 Desember 2015	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang/ Loans and receivables	Nilai wajar diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Fair value through statements of profit or loss and other comprehensive income	Aset keuangan lainnya/ Other financial assets	December 31, 2015
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	194,754	194,754	-	-	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	90,154	90,154	-	-	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	32,863	32,863	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	78,200	78,200	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	3,742	3,742	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	263	263	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	13,081	13,081	-	-	Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	413,057	413,057	-	-	Total financial assets
31 Desember 2014					December 31, 2014
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	302,256	302,256	-	-	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	-	-	-	-	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	16,389	16,389	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	92,706	92,706	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	4,297	4,297	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	211	211	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	15,852	15,852	-	-	Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	431,711	431,711	-	-	Total financial assets

34. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

34. Financial assets and liabilities (continued)

31 Desember 2015	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Fair value through statements of profit or loss and other comprehensive income	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	December 31, 2015
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Liabilitas keuangan:				Financial liabilities:
Utang usaha	(85,636)	-	(85,636)	Trade payables
Akrual	(16,802)	-	(16,802)	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(5,600)	-	(5,600)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(2,260)	-	(2,260)	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(146,077)	-	(146,077)	Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	(256,375)	-	(256,375)	Total financial liabilities

31 Desember 2014	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Fair value through Statements of profit or loss and other comprehensive income	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	December 31, 2014
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Liabilitas keuangan:				Financial liabilities:
Utang usaha	(74,214)	-	(74,214)	Trade payables
Akrual	(32,030)	-	(32,030)	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(20,910)	-	(20,910)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,066)	-	(3,066)	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(182,596)	-	(182,596)	Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	(312,816)	-	(312,816)	Total financial liabilities

35. Pengelolaan risiko keuangan

Aktivitas Perseroan terpengaruh oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara umum, program pengelolaan risiko keuangan Perseroan berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Direksi Perseroan. Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatur risiko keuangan, sesuai keperluan. Direksi menyediakan prinsip-prinsip keseluruhan untuk pengelolaan risiko, termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Manajemen risiko permodalan

Tujuan Perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal dan mengurangi untuk mengurangi biaya modal.

35. Financial risk management

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the financial performance of the Company.

Risk management is carried out by the Company's Board of Directors. The Board identifies, evaluates and manages financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors provides principles for overall risk management, including market risk, credit risk and liquidity risks.

Capital risk management

The Company's objective when maintaining capital is to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko permodalan (lanjutan)

Konsisten dengan entitas lain dalam industri yang sama, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing*. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang neto dengan jumlah modal. Utang neto dihitung dari jumlah pinjaman dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan ditambah utang neto.

Strategi Perseroan selama tahun 2015 dan 2014 adalah mempertahankan rasio *gearing* tidak lebih dari 15%. Rasio *gearing* pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman bank (Catatan 17)	146,077	182,596	Bank borrowings (Note 17)
Dikurangi:			Less:
Kas dan setara kas (Catatan 5)	(194,754)	(302,256)	Cash and cash equivalents (Note 5)
Utang neto	(48,677)	(119,660)	Net debt
Jumlah ekuitas	1,833,957	1,785,353	Total equity
Jumlah modal	1,785,280	1,665,693	Total capital
Rasio <i>gearing</i>	(2.7%)	(7.2%)	Gearing ratio

Perubahan atas rasio *gearing* selama 2015 terutama disebabkan karena perubahan kas dan setara kas dan pengurangan pada pinjaman yang mengakibatkan perubahan dalam utang neto.

Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar

Penjualan, pendanaan dan mayoritas pengeluaran operasional Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Perseroan tidak terespos secara signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Pada 31 Desember 2015, jika mata uang Dolar AS melemah/menguat sebesar 7% dibandingkan dengan mata uang Rupiah dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba sesudah pajak untuk periode berjalan akan menjadi AS\$4,0 juta (31 Desember 2014: AS\$3,3 juta) (nilai penuh) lebih tinggi/rendah, terutama disebabkan oleh penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang Rupiah seperti dijelaskan pada Catatan 32.

(ii) Risiko harga

Perseroan terpengaruh oleh fluktuasi dalam harga nikel dan bahan bakar. Operasi dan kinerja keuangan dapat terpengaruh negatif dari harga nikel, dimana akan ditentukan lebih lanjut oleh permintaan dan penawaran nikel dunia, harga minyak dan faktor lainnya seperti curah hujan yang cukup untuk menjamin keberlanjutan operasi PLTA. Perseroan mengelola secara aktif risiko-risiko ini dengan melakukan penyesuaian seperlunya atas jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, jika harga rata-rata nikel meningkat/menurun sebesar 10%, dengan semua variabel lain tetap, pendapatan Perseroan meningkat/menurun sebesar AS\$79.0 juta (31 Desember 2014: AS\$103,8 juta) (nilai penuh).

Pada 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat instrumen keuangan yang nilainya terkait langsung dengan pergerakan harga nikel dunia. Sehingga, fluktuasi harga nikel dunia tidak akan berdampak terhadap nilai buku dari instrumen keuangan Perseroan.

(iii) Risiko suku bunga

Paparan suku bunga dimonitor untuk meminimalkan akibat negatifnya terhadap Perseroan. Pinjaman yang diterima pada suku bunga variabel membuat arus kas Perseroan terpengaruh oleh risiko suku bunga.

35. Financial risk management (continued)

Capital risk management (continued)

Consistent with others in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total borrowings as shown in the statements of financial position less cash and cash equivalents excluding restricted cash. Total capital is calculated as "equity" as shown in the statements of financial position plus net debt.

The Company's strategy, during 2015 and 2014, was to maintain the gearing ratio of not more than 15%. The gearing ratios as at December 31, 2015 and 2014 were as follows:

The change in the gearing ratio during 2015 resulted primarily due to a change in cash and cash equivalents and reduction in borrowings which resulted in the change in net debt.

Market risk

(i) Foreign exchange risk

The Company's sales, financing and the majority of its operating expenditures are denominated in US Dollars, and as such the Company does not have a significant exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

As at December 31, 2015, if the US Dollar had weakened/strengthened by 7% against the Rupiah with all other variables held constant, post-tax profit for the period would have been US\$4.0 million (December 31, 2014: US\$3.3 million) (full amount) higher/lower, mainly as a result of foreign exchange translation of the Rupiah denominated monetary assets and liabilities as detailed in Note 32.

(ii) Price risk

The Company is exposed to fluctuations in nickel and fuel prices. The operations and financial performance may be adversely affected by the price of nickel, which in turn will be determined by worldwide nickel supply and demand, oil price and other factors such as sufficient rainfall to maintain hydroelectric operations. The Company actively manages these risks by adjusting production schedules and mining operations as necessary to reduce the impact of volatility.

For the year ended on December 31, 2015, if the average price of nickel had increased/decreased by 10%, with all variables held constant, the Company's revenue would have increased/decreased by US\$79.0 million (December 31, 2014: US\$103.8 million) (full amount).

At December 31, 2015 and 2014, there were no financial instruments whose value was directly linked to movement of the world nickel price. Therefore, fluctuation of world nickel price will have no impact on the carrying amount of the Company's financial instruments.

(iii) Interest rate risk

Interest rate exposure is monitored to minimize any negative impact to the Company. Borrowings issued at variable rates expose the Company to cash flow interest rate risk.

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

35. Financial risk management (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(iii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(iii) Interest rate risk (continued)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang terpengaruh oleh suku bunga.

The following table presents a breakdown of the Company's financial assets and liabilities which are impacted by interest rates.

31 Desember/December 31, 2015						
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>		
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Aset						Assets
Kas dan setara kas	53,898	-	140,843	-	13	194,754
Investasi jangka pendek	-	-	90,154	-	-	90,154
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	16,612	-	16,251	32,863
Piutang usaha	-	-	-	-	78,200	78,200
Aset keuangan lancar lainnya	-	-	-	-	3,742	3,742
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	263	263
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	13,081	13,081
Jumlah aset keuangan	53,898	-	247,609	-	111,550	413,057
						Total financial assets

31 Desember/December 31, 2015						
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>		
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	(85,636)	(85,636)
Akrual	-	-	-	-	(16,802)	(16,802)
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	-	-	(5,600)	(5,600)
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(2,260)	(2,260)
Pinjaman bank	(36,219)	(109,858)	-	-	-	(146,077)
Jumlah liabilitas keuangan	(36,219)	(109,858)	-	-	(110,298)	(256,375)
						Total financial liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2015 jika suku bunga lebih tinggi/rendah 0,25% dengan semua variabel lain tetap, maka laba periode berjalan akan menjadi lebih tinggi/rendah AS\$0,21 juta (31 Desember 2014: AS\$0,26 juta) (nilai penuh) yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi/rendah atas pinjaman jangka panjang.

As at December 31, 2015, if the interest rates had been 0.25% higher/lower with all other variables held constant, profit for the period would have been US\$0.21 million (December 31, 2014: US\$0.26 million) (full amount) lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on borrowings.

Risiko kredit

Credit risk

Risiko kredit cukup rendah karena produk nikel dalam *matte* Perseroan, yang merupakan produk setengah jadi, dijual di pasar ekspor menggunakan kontrak "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan Vale Canada Limited (induk Perseroan) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. yang merupakan salah satu pemegang saham mayoritas Perseroan. Risiko kredit juga muncul dari kas dan setara kas, terutama kas di bank dan deposito berjangka. Untuk bank, Perseroan hanya menyimpan dana di bank lokal maupun internasional yang bereputasi bagus untuk memperkecil risiko kredit (lihat Catatan 5a).

Credit risk is minimal as the Company's nickel in *matte*, an intermediate product, is sold in export markets pursuant to long-term, US Dollar denominated "must take" contracts with Vale Canada Limited (parent company) and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., one of the Company's major shareholders. Credit risk also arises from cash and cash equivalents, specifically from cash in banks and time deposits. The Company has a policy to select reputable local and overseas banks to minimize credit risk (refer to Note 5a).

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Tidak terdapat piutang yang melebihi batasan kredit selama tahun pelaporan ini dan manajemen percaya tidak terdapat kerugian dari buruknya kinerja pelanggan.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dollar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Piutang dagang: Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal:			Trade receivables: Counterparties with external credit rating:
<i>Fitch</i>			<i>Fitch</i>
BBB (2014: BBB+)	50,038	73,569	BBB (2014: BBB+)
<i>Japan Credit Rating Agency</i>			<i>Japan Credit Rating Agency</i>
AA-	28,162	19,137	AA-
Berperingkat	78,200	92,706	Rated

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dollar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bank, deposito berjangka dan investasi berjangka (Moody's):			Cash in bank, time deposits and short-term investments (Moody's):
P-1	276,974	301,126	P-1
P-2	-	-	P-2
P-3	7,921	1,111	P-3
Berperingkat	284,895	302,237	Rated
Tidak berperingkat	-	-	Not rated

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Pengelolaan risiko likuiditas dengan kehati-hatian mengimplikasikan pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan melakukan pengawasan berkala atas arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual dan memasangkan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini mengklasifikasikan liabilitas keuangan yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang disajikan adalah arus kas kontraktual dan tidak didiskontokan.

35. Financial risk management (continued)

Credit risk (continued)

There are no receivables exceeding their credit limit during the reporting period, and management does not expect any losses from non-performance by these counterparties.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates:

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dollar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Piutang dagang: Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal:			Trade receivables: Counterparties with external credit rating:
<i>Fitch</i>			<i>Fitch</i>
BBB (2014: BBB+)	50,038	73,569	BBB (2014: BBB+)
<i>Japan Credit Rating Agency</i>			<i>Japan Credit Rating Agency</i>
AA-	28,162	19,137	AA-
Berperingkat	78,200	92,706	Rated

31 Desember	2015	2014	December 31
(Dalam ribuan Dollar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bank, deposito berjangka dan investasi berjangka (Moody's):			Cash in bank, time deposits and short-term investments (Moody's):
P-1	276,974	301,126	P-1
P-2	-	-	P-2
P-3	7,921	1,111	P-3
Berperingkat	284,895	302,237	Rated
Tidak berperingkat	-	-	Not rated

Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below classifies the Company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

35. Financial risk management (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

31 Desember 2015	Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ <i>Between 3 months and 1 year</i>	Antara 1 dan 2 tahun/ <i>Between 1 and 2 years</i>	Antara 2 dan 5 tahun/ <i>Between 2 and 5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>Over 5 years</i>	December 31, 2015
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Utang usaha	(85,636)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(16,802)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(1,377)	(4,223)	-	-	-	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(2,260)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(23,618)	(29,995)	(39,338)	(63,895)	-	Bank borrowings
31 Desember 2014						December 31, 2014
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Utang usaha	(74,214)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(32,030)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(16,446)	(4,464)	-	-	-	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,066)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(19,774)	(21,671)	(42,243)	(119,127)	-	Bank borrowings

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana aset dapat dipertukarkan atau liabilitas dibayarkan antara pihak-pihak mengetahui dan ikut serta dalam transaksi pada tingkat yang wajar.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar pada 31 Desember 2015 dan 2014. Realisasi atau penyelesaian aset dan liabilitas Perseroan diharapkan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, nilai bukunya mendekati nilai wajarnya.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi

a. Perihal lingkungan hidup

Kehutanan

Pada tanggal 4 Februari 2008, Peraturan Pemerintah No. 2/2008 ("PP No. 2/2008") mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dikeluarkan. Penerimaan negara bukan pajak tersebut dihitung berdasarkan suatu formula tertentu atas tarif-tetap tergantung pada maksud, rencana, penggunaan dan jenis kawasan hutan yang digunakan dikalikan dengan luasnya kawasan hutan yang digunakan. Tarif tersebut berkisar antara IDR1,2 juta sampai IDR3,0 juta per hektar per tahun. Pada tanggal 19 Mei 2014, PP No. 2/2008 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 33/2014 ("PP No. 33/2014"). Berdasarkan PP No. 33/2014, tarif penerimaan negara bukan pajak meningkat menjadi berkisar antara IDR1,6 juta sampai IDR4,0 juta per hektar per tahun.

Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arms's length transaction.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at December 31, 2015 and 2014. The Company's financial assets and liabilities are expected to be realized, or settled in the near term. Therefore, their carrying amount approximate their fair value.

36. Contingent assets and liabilities

a. Environmental matters

Forestry

On February 4, 2008 Government Regulation No. 2/2008 ("GR No. 2/2008") regarding the type and tariff of non-tax state revenue from the use of forestry land for non-forestry development was issued. The non-tax state revenue is calculated based on a specific formula of fixed tariff depending on the purpose of the proposed use and type of forest area being used, multiplied by the size of forest area being used. The tariffs range from IDR1.2 million to IDR3.0 million per hectare per annum. On May 19, 2014, GR No. 2/2008 was revoked and replaced by Government Regulation No. 33/2014 ("GR No. 33/2014"). Based on GR No. 33/2014, the tariff for the non-tax state revenue increases to the range of IDR1.6 million to IDR4.0 million per hectare per annum.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

36. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

a. Environmental matters (continued)

Kehutanan (lanjutan)

Forestry (continued)

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008, (yang terakhir kali digantikan dengan Peraturan No. P. 16/Menhut-II/2014 tanggal 13 Maret 2014), mewajibkan 13 pemegang ijin atau perjanjian pertambangan perusahaan tambang (termasuk Perseroan) untuk mengajukan ijin pinjam pakai. Oleh karena itu, Perseroan telah mengajukan permohonan ijin pinjam pakai bagi kawasan hutan di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan, tetapi dengan penegasan bahwa hak-hak Perseroan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Karya Perseroan tidak diabaikan. Kontrak Karya telah memberikan Perseroan semua lisensi dan ijin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan perusahaannya serta kewenangan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pertambangan di dalam area yang tercakup dalam Kontrak Karya.

Regulation of the Minister of Forestry No. P.43/Menhut-II/2008 dated July 10, 2008, (which was most recently replaced by Regulation No. P.16/Menhut-II/2014 dated March 13, 2014), requires 13 holders of permits or contract mining companies (including the Company) to apply for a lend-use permit. Therefore, the Company has applied for a lend-use permit for forest areas within its CoW area, but with strong reservation that its rights as provided in the CoW are not abrogated. The CoW provides the Company with all licenses and permits to construct and operate the enterprise as well as all authorizations needed to conduct mining activities in the areas covered by the CoW.

Perseroan telah menerima ijin pinjam-pakai untuk kawasan hutan untuk Proyek Karebbe di luar wilayah Kontrak Karya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.299/Menhut-II/2007 (yang diperpanjang dengan Surat Keputusan SK.436/Menhut-II/2013). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.02/2009 tanggal 8 Mei 2009 penerimaan negara bukan pajak terhutang berdasarkan area hutan yang tercantum dalam ijin pinjam-pakai. Oleh karena itu per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR278 juta (setara dengan AS\$27 ribu) (nilai penuh) untuk periode bulan Juni 2014 – Juni 2015. Per 30 Juni 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR450 juta (setara dengan AS\$35 ribu) (nilai penuh) untuk periode bulan Juni 2015 – Juni 2016.

The Company has received a lend-use permit only for the forestry areas for the Karebbe Project that are outside of the CoW area under Decision Letter of the Minister of Forestry No. SK.299/Menhut-II/2007 (which was further extended under Decision Letter SK.436/Menhut-II/2013). Based on Regulation of the Minister of Finance No. 91/PMK.02/2009 dated May 8, 2009 the non-tax state revenue is payable for forest areas covered by a valid lend-use permit. Therefore as at December 31, 2014, the Company made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR278 million (equivalent to US\$27 thousand) (full amount) for the June 2014 – June 2015 period. As at June 30, 2015, the Company made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR450 million (equivalent to US\$35 thousand) (full amount) for the June 2015 – June 2016 period.

Pada tanggal 11 Juni 2014, Perseroan menerima ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi untuk kawasan Kontrak Karya Perseroan di blok Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, pada tanggal 5 Agustus 2014, Perseroan menerima ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi untuk kawasan Kontrak Karya Perseroan di blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena ijin pinjam pakai tersebut hanya untuk kegiatan eksplorasi, maka Perseroan belum memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam PP No. 33/2014.

On June 11, 2014, the Company received a lend-use permit for exploration activities within the Company's CoW area in the Bahodopi block, Morowali Regency, Central Sulawesi Province. Further, on August 5, 2014, the Company received a lend-use permit for exploration activities within the Company's CoW area in the Pomalaa block, Kolaka and East Kolaka Regencies, South East Sulawesi Province. Since the above mentioned lend-use permits only cover exploration activities, the Company does not have the obligation to pay the non-tax state revenue as stipulated in GR No. 33/2014.

Belum terdapat akrual atas pembayaran untuk pendapatan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam PP No. 33/2014 untuk area dalam wilayah Kontrak Karya dikarenakan ijin pinjam pakai untuk kegiatan operasi produksi untuk area tersebut belum dikeluarkan. Hal ini konsisten dengan perlakuan yang diterapkan pada kebanyakan perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

No accrual has been made for the non-tax state revenue regulated by GR No. 33/2014 for areas within the CoW area, as lend-use permits for production operations activities have not been issued. This is consistent with the treatment being adopted by many mining companies in Indonesia.

Berdasarkan permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi di dalam wilayah Kontrak Karya yang telah diajukan kepada Kementerian Kehutanan, Perseroan berkeyakinan bahwa pendapatan negara bukan pajak tahunan untuk area hutan yang ijin pinjam pakainya belum diterbitkan adalah sekitar AS\$1,5 juta per tahun (nilai penuh).

Based on the Company's application for lend-use permits for production operation activities within the CoW area that have been submitted to the Ministry of Forestry, the Company believes the annual non-tax state revenue payable for forest areas for which lend-use permits have not yet been issued would be approximately US\$1.5 million per annum (full amount).

Pada tanggal 1 Februari 2010, Peraturan Pemerintah No. 24/2010 ("PP No. 24/2010") terkait dengan penggunaan area kehutanan diterbitkan, yang kemudian diubah melalui PP No. 61/2012. Peraturan tersebut mengatur penggunaan area kehutanan (baik untuk tujuan komersial maupun non komersial) harus dilakukan berdasarkan ijin pinjam pakai. Untuk penggunaan kawasan dimana luas kawasan hutan adalah 30% atau kurang, pemegang ijin pinjam pakai diharuskan untuk menyediakan kompensasi lahan dengan rasio 1:1 untuk tujuan non komersial dan 1:2 untuk tujuan komersial. Untuk penggunaan kawasan dimana luas kawasan hutannya adalah lebih dari 30%, pemegang ijin pinjam pakai diharuskan membayar pendapatan negara bukan pajak dan melakukan rehabilitasi untuk area yang terganggu dengan rasio 1:1 untuk tujuan non komersial dan sedikitnya 1:1 untuk tujuan komersial. Pemegang ijin pinjam pakai dapat melakukan aktivitas pembukaan lahan namun, selain itu, harus membayar kompensasi dalam bentuk iuran tetap, provisi sumber daya hutan dan /atau dana reboisasi.

On February 1, 2010, Government Regulation No. 24/2010 ("GR No. 24/2010") regarding the use of forestry areas was issued, as amended by GR No. 61/2012. The regulation requires that any use of forestry areas (whether it is for commercial or non-commercial usage) must be based on a lend-use permit. For the use of an area where 30% or less is covered by forest, the holder of a lend-use permit is required to provide land compensation in a ratio of 1:1 for non commercial use and 1:2 for commercial use. For the use of an area with more than 30% covered by forest, the holder of a lend-use permit is required to pay non-tax state revenue and perform rehabilitation of the affected area in a ratio of 1:1 for non-commercial use and at least 1:1 for commercial use. The holder of a lend-use permit may perform deforestation activities but, in addition, must pay compensation in the form of a fixed fee, a charge for forest resources and/or reforestation funds.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

36. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

a. Environmental matters (continued)

Kehutanan (lanjutan)

Forestry (continued)

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 yang mengubah PP No. 24/2010. Perubahan Kedua ini melakukan perubahan terhadap ketentuan dasar terkait penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

On 28 December 2015, the Government issued Government Regulation No. 105 of 2015, which amends GR No. 24/2012. This Second Amendment makes changes to the basic provision relating to production within protected forest areas ("Forest Area") for non-forestry industry.

Dua perubahan diatur dalam Perubahan Kedua ini dalam hal prosedur perizinan. Pertama, pemohon tidak lagi dipersyaratkan untuk mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri sebelum mereka diperbolehkan untuk mengajukan IPPKH. Kedua, Perubahan Kedua ini memungkinkan "masyarakat umum" untuk mengajukan IPPKH.

Two changes have been incorporated under the Second Amendment with regards to the licensing procedure. Firstly, applicants are no longer required to obtain principal approval from the Minister before they are allowed to apply for a lend-use license. Secondly, the Second Amendment is now allowing "general public" to apply for Lend-Use Licenses.

Perubahan Kedua juga menetapkan persyaratan baru yang harus dipenuhi oleh pemegang IPPKH yang bermaksud memanfaatkan Kawasan Hutan sebagai berikut: pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi, pemegang izin pinjam pakai disyaratkan untuk mengalokasikan lahan untuk penggunaan komersial; dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial. Pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, pemegang izin pinjam pakai diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan; dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial; dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial.

The Second Amendment also sets out new requirements that must be satisfied by holders of Lend-Use Licenses who are wishing to utilize the Forest Areas as follows: for provinces containing a total forested area equal to or less than 30% of the total River Flow Area (*Daerah Aliran Sungai - DAS*), island area, or provincial area, the holder of a lend-use permit is required to allocate certain area(s) for commercial utilization; and conduct reforestation in order to rehabilitate the DAS. For provinces containing a total forested area of more than 30% of the total DAS, island area, or provincial area, the holder of a lend-use permit is required to pay the necessary non-tax state revenue relating to the utilization of the forest area; and conduct reforestation in order to rehabilitate the DAS.

Perubahan Kedua menambahkan satu kewajiban baru bagi pemegang izin pinjam pakai, yaitu kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai batas-batas dimanfaatkan Kawasan Hutan kepada Menteri paling lambat satu tahun setelah izin telah dikeluarkan. Setiap pemegang izin pinjam pakai yang tidak menyampaikan informasi tentang batas kepada Menteri, maka dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan IPPKH.

The Second Amendment adds one new obligation for holders of Lend-Use Licenses, namely the obligation to submit information on the boundaries of the utilized Forest Area to the Minister no later than one year after a license has been issued. Any license holder failing to submit information on the boundaries to the Minister will see their Lend-Use License being annulled.

Kewajiban mengenai rehabilitasi atas daerah aliran sungai diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2011 mengenai pedoman penanaman bagi pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai ("PerMen P.63/2011"), yang diterbitkan tanggal 5 September 2011 untuk menerapkan GR No. 24/2010. PerMen P.63/2011 menentukan lokasi dan prosedur untuk rehabilitasi. Luas wilayah rehabilitasi ditentukan berdasarkan ijin pinjam pakai terkait apakah digunakan untuk keperluan komersial atau non komersial. Untuk keperluan non komersial, luas wilayah minimum adalah dengan rasio minimum 1:1. Untuk keperluan komersial, luas yang diwajibkan adalah dengan rasio minimum 1:1 ditambah dengan area yang terkena dampak dari kategori L3 (area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak mungkin direhabilitasi).

The requirement to conduct rehabilitation of river watershed area is governed by Minister of Forestry Regulation No. P.63/Menhut-II/2011 regarding rehabilitation guidelines for the holders of lend-use permits in the framework of the rehabilitation of watershed ("Reg P.63/2011"), which was issued on September 5, 2011 to implement GR No. 24/2010. Reg P.63/2011 determines rehabilitation locations and procedures. The size of the area of rehabilitation depends on whether the relevant permit is for commercial or non-commercial purposes. For non-commercial purposes, the size is in a minimum ratio of 1:1. For non-commercial use, the size is in a minimum ratio of 1:1 plus the planned affected area of L3 category (disturbed area due to permanent usage of the forestry area which technically is not possible to be rehabilitated).

Untuk ijin pinjam pakai kawasan hutan di wilayah Proyek Karebbe (yang sebagian areanya berada di luar wilayah Kontrak Karya), Perseroan telah membayar sebesar AS\$62 ribu untuk dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan ("PSDH") sebesar IDR157 juta (setara dengan AS\$17 ribu) (nilai penuh) sehubungan dengan kawasan hutan yang terganggu pada tanggal 30 Juni 2006 ketika Perseroan pertama kali memperoleh ijin pinjam pakai. Untuk kawasan hutan dalam area Kontrak Karya yang belum diterbitkan ijin pinjam pakai kawasan hutan, sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, perusahaan belum melakukan pencatatan biaya accrual atas PSDH dan Dana Reboisasi. Untuk ijin pinjam pakai kawasan hutan di wilayah Kontrak Karya Perseroan blok Bahodopi untuk kegiatan eksplorasi, berdasarkan estimasi, Perseroan harus melakukan pembayaran sebesar AS\$87 ribu untuk dana reboisasi, PSDH dan nilai tegakan. Sedangkan untuk ijin pinjam pakai kawasan hutan di wilayah Kontrak Karya Perseroan blok Pomalaa untuk kegiatan eksplorasi, berdasarkan estimasi, Perseroan harus melakukan pembayaran sebesar AS\$62 ribu untuk dana reboisasi, PSDH dan nilai tegakan.

As the Company has received a lend-use permit only for the forestry areas for the Karebbe Project (half of the area being located outside the CoW area), the Company paid US\$62 thousand in reforestation funds and forest resource charges for the affected forest area in the amount of IDR157 million (equivalent to US\$17 thousand) (full amount) on June 30, 2006 when the Company first obtained the lend-use permit. As at the date of these financial statements, no accrual has been made for the charge for forest resource and reforestation funds for the affected forest area within the Company's CoW area as lend-use permits have not yet been issued for these areas. For the lend-use permit for exploration activities in the CoW Area in the Bahodopi block, the Company estimates it will need to make a payment in the amount of US\$87 thousand for a reforestation fund, forest resource charges and timber value. As for the lend-use permit for exploration activities in the CoW Area in the Pomalaa block, the Company estimates it will need to make payment in the amount of US\$62 thousand for reforestation fund, forest resource charges and timber value.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

36. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

a. Environmental matters (continued)

Kehutanan (lanjutan)

Forestry (continued)

Untuk blok Pomalaa, pada bulan Mei 2015, Perseroan menempatkan bank garansi sejumlah IDR1,6 miliar untuk periode Oktober 2014 sampai Oktober 2015 untuk menjamin pembayaran dana reboisasi, PSDH dan nilai tegakan. Penempatan tersebut dilakukan sesuai dengan ijin pinjam pakai kawasan hutan Perseroan di blok Pomalaa serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

For the Pomalaa block, in May 2015, the Company placed a bank guarantee in the amount of IDR1.6 billion for the period of October 2014 to October 2015 to secure the payments of reforestation fund, forest resource charges and timber value. The placement was made in accordance with the Company's lend-use permit for exploration activities in the Pomalaa block and Minister of Forestry Regulation No. P.20/Menhut-II/2013 on Timber Utilization Permit.

Peraturan pelaksanaan PP No. 24/2010 dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 4 April 2011, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 ("PerMen P.18/2011") (yang mencabut P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008), yang mengatur mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pada dasarnya PerMen P.18/2011 mengatur tentang prosedur ijin pinjam pakai secara umum dan jangka waktu mendapatkan ijin pinjam pakai, termasuk untuk 13 perusahaan-perusahaan tambang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004. Suatu ijin pinjam pakai dapat diberikan untuk tahap eksplorasi atau tahap eksploitasi (produksi). Apabila untuk tahap eksplorasi (kecuali untuk contoh ruah), persyaratan-persyaratannya lebih lunak, dimana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") dan gambar satelit tidak diwajibkan. Durasinya juga lebih pendek, yakni dua tahun, namun dapat diperpanjang. Untuk tahap eksploitasi (produksi), durasinya adalah lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan durasi pemegang ijin untuk beroperasi (misalnya Kontrak Karya).

An implementing regulation for GR No. 24/2010 was issued by the Minister of Forestry on April 4, 2011, i.e. Regulation of the Minister of Forestry No. P.18/Menhut-II/2011 ("Reg P.18/2011") (which revoked P.43/Menhut-II/2008 dated July 10, 2008), regulating the use of forest areas for non-forestry development purposes and timeline of obtaining the lend-use permit. Reg P.18/2011 basically regulates the general lend-use permit procedure, including for the holders of 13 mining licenses stipulated under Presidential Decree No. 41 of 2004. A lend-use permit can be given for the exploration phase or the exploitation (production) phase. For the exploration phase (except for bulk sampling), the requirements are more lenient, and an Environmental Impact Assessment ("AMDAL") and satellite imaging are not required. The duration is also shorter, namely two years, but is extendable. For the exploitation (production) phase, the duration is five years and can be extended in accordance with the duration of the holder's permit to operate (e.g. a CoW).

Pada 2 Oktober 2012, PerMen P.18/2011 diubah dengan Peraturan No. P.38/Menhut-II/2012 ("PerMen P.38/2012"). PerMen P.38/2012 menambahkan beberapa kewajiban kepada pemegang ijin pinjam pakai, termasuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar area pinjam pakai. Pada 25 Februari 2013, PerMen P.18/2011 kembali diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2013 ("PerMen P.14/2013"). Berdasarkan PerMen P.14/2013, masa berlaku ijin pinjam pakai untuk kegiatan operasi produksi adalah sama dengan jangka waktu perizinan operasionalnya.

On October 2, 2012, Reg P.18/2011 was amended by Regulation No. P.38/Menhut-II/2012 ("Reg P.38/2012"). Reg P.38/2012 adds more obligations to lend-use permit holders, including conducting empowerment of the community surrounding the lend-use permit area. On February 25, 2013, Reg P.18/2011 was further amended by Minister of Forestry Regulation No. P.14/Menhut-II/2013 ("Reg P.14/2013"). Based on Reg P.14/2013, the validity of the lend-use permit for production is in accordance with the terms of the operational license.

Pada 13 Maret 2014, Menteri Kehutanan menerbitkan peraturan baru tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan, yaitu P.16/Menhut-II/2014 ("PerMen P.16/2014"), yang mencabut PerMen P.18/2011, PerMen P.38/2012 dan PerMen P.14/2013. PerMen P.16/2014 mengkonsolidasi peraturan-peraturan sebelumnya terkait izin pinjam pakai. Perubahan signifikan dalam PerMen P.16/2014 yaitu pengurangan jangka waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin pinjam pakai. Dalam prakteknya, proses untuk memperoleh izin pinjam pakai seringkali lebih lama daripada jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan sebelumnya.

On March 13, 2014, the Minister of Forestry issued a new regulation on lend-use permits, i.e. P.16/Menhut-II/2014 ("Reg P.16/2014"), which revokes Reg P.18/2011, Reg P.38/2012 and Reg P.14/2013. Reg P.16/2014 simply consolidates the previous regulations on lend-use permit. One major change in the Reg P.16/2014 is a reduction in the theoretical timeline to obtain lend-use permits. In practice, the process to obtain lend-use permits took longer than contemplated timeline under the previous regulations.

Pada 14 Mei 2012, Kementerian Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atas nama Perseroan. Surat Keputusan ini diterbitkan untuk menetapkan area rehabilitasi daerah aliran sungai atas ijin pinjam pakai Karebbe. Luas area rehabilitasi berdasarkan keputusan ini ditetapkan seluas 250 hektar (Ha). Perseroan akan mengeluarkan IDR15 juta/Ha untuk memenuhi kewajiban reboisasi ini (setara dengan perkiraan AS\$0,4 juta). Sampai dengan 31 Desember 2015, jumlah yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban rehabilitasi ini adalah sebesar IDR828 juta (nilai penuh).

On May 14, 2012, the Ministry of Forestry issued Decree No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 regarding stipulation on Forestation Location in the Framework of Watershed Rehabilitation under the name of the Company. This Decree is issued to determine the watershed forestation area with respect to the Karebbe lend-use permit. The size of the forestation area based on this decree is 250 hectares (Ha). The Company shall incur IDR15 million/Ha to fulfill this forestation obligation (equivalent to approximately US\$0.4 million). As of December 31, 2015, the amount incurred by the Company to fulfill the rehabilitation obligation is IDR828 million (full amount).

Lingkungan Hidup

Environment

Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Ijin Lingkungan dikeluarkan pada bulan Februari 2012 sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan ini, seluruh perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Ijin Lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh ijin usaha.

Government Regulation No. 27/2012 on Environmental Licenses was issued in February 2012 as an implementation to Law No. 32/2009 on Environmental Management and Protection. Under the regulation, all companies are required to obtain an Environmental License as a pre-requisite for their business license.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

36. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

a. Environmental matters (continued)

Lingkungan Hidup (lanjutan)

Environment (continued)

Perseroan telah memperoleh persetujuan AMDAL dari Pemerintah pada tahun 2008 yang mencakup seluruh area yang saat ini diusahakan di wilayah KK Sulawesi Selatan, termasuk blok Sorowako dan sekitarnya. Oleh karena persetujuan AMDAL tersebut diperoleh sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 (peraturan yang mengatur izin lingkungan), maka, berdasarkan ketentuan peralihan, dokumen AMDAL tersebut secara otomatis dianggap sebagai Izin Lingkungan bagi Perseroan. Untuk Blok Bahodopi yang berada di wilayah Sulawesi Tengah, Perseroan telah mendapatkan izin lingkungan bersamaan dengan disetujuinya dokumen AMDAL Bahodopi pada September 2013. Untuk Blok Pomalaa, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dokumen AMDAL pada tahun 2005 dengan lingkup penambangan terbatas sebagaimana dimaksudkan untuk mendukung program *Co-operative Resources Agreements* ("CRA") dengan PT. ANTAM.

The Company already has obtained an approved AMDAL from the Government in 2008 covering all areas that are currently being operated in the COW area in South Sulawesi, including Sorowako block and surrounding areas. As the approval pre-dates the issuance of Government Regulation No. 27 of 2012 (regulation on environmental license), therefore, based on the transitional provision, the AMDAL approval is automatically deemed as the Company's Environmental License. For Bahodopi Block which is located in Central Sulawesi, the Company has obtained the environmental license at the same time as the Bahodopi AMDAL was approved in September 2013. For the Pomalaa Block, the Company has obtained the AMDAL approval in 2005 with a limited mine scope as designed to support the Co-operative Resources Agreements ("CRA") program with PT. ANTAM.

Selanjutnya sebagai bagian dari persiapan proyek pertumbuhan di Indonesia (IGP), Perseroan telah memulai melakukan revisi (addendum) dan penyusunan AMDAL baru. Untuk kebutuhan proyek pertumbuhan di Sorowako (IGP South Sulawesi Tahap 1), Perseroan telah memulai melakukan revisi (adendum) AMDAL Sorowako di tahun 2015, dengan target penyelesaian di tahun 2016. Perseroan juga tengah dalam proses mempersiapkan studi AMDAL sehubungan dengan Blok Pomalaa. Proses penyusunan AMDAL baru telah dimulai sejak 2014 dan, pada awalnya, ditargetkan selesai di tahun 2015. Namun karena adanya perubahan rencana, tata letak dan penyesuaian dengan rencana tata ruang daerah, proses AMDAL tersebut mengalami penundaan dan diharapkan dapat selesai di tahun 2016.

Further, as part of the Indonesian growth project preparation (IGP), the Company has started the AMDAL revisions (addendum) and new AMDAL preparation. For the purpose of growth project in Sorowako (IGP South Sulawesi Phase 1), the Company has started the revisions (addendum) of the Sorowako AMDAL in 2015, with a target of completion in 2016. The Company is also in the process of preparing an AMDAL study for the Pomalaa Block. The process of a new AMDAL preparation has been started since 2015 and, originally, the target of completion was set in 2015. However, since there are changes of plans, changes of location and adjustments to the local spatial zoning, the AMDAL process experienced a delay; it is now expected to be completed in 2016.

Pada tanggal 24 Desember 2014, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Per P.97/2014"). Per P.97/2014, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada dasarnya mendelegasikan kewenangan terkait kehutanan dan lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin lingkungan. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015, kewenangan sehubungan dengan izin lingkungan ditarik kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa proses penyelesaian perizinan secara teknis akan tetap dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

On December 24, 2014, the Minister of Environment and Forestry issued Ministerial Regulation No. P.97/Menhut-II/2014 on Delegation of Licensing and Non-Licensing Authority in the field of Environment and Forestry in the framework of One Door Integrated Service Implementation to the Head of the Investment Coordinating Board/BKPM ("Reg P.97/2014"). Reg P.97/2014, which is an implementing regulation of Presidential Regulation No. 97 of 2014 on One Door Integrated Services Implementation, basically delegates certain forestry and environmental-related authorities from the Minister to the Head of Coordinating Investment Board, including forestry land-use permits and environmental permits. However, based on Regulation of Minister of Environment and Forestry No. P.1/Menhut-II/2015, the authority related to environmental permits is returned to the Ministry of Environment and Forestry. In addition, the regulation explains that the technical review of the permitting process will still be conducted by the Ministry of Environment and Forestry.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("PP No.101/2014"), menggantikan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999. Berdasarkan PP No. 101/2014, nikel slag diklasifikasikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3"). Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perseroan disarankan untuk mengajukan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3, yaitu untuk memanfaatkan nikel slag sebagai bahan dasar pembuat jalan. Pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa ketentuan mengenai nikel slag untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan jalan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan akan dilengkapi dengan petunjuk teknisnya. Sesuai dengan saran tersebut di atas, Perseroan telah mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3. Selain itu, Perseroan juga menyampaikan rencananya untuk mengajukan permohonan agar terak nikel dikecualikan dari Limbah B3, setelah melakukan studi-studi yang dipersyaratkan oleh PP No. 101/2014. Hasil dari studi-studi tersebut akan dipergunakan sebagai bukti pendukung dalam pengajuan permohonan pengecualian. Perseroan juga tengah melengkapi persyaratan-persyaratan administratif yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

On October 17, 2014, the Government issued Government Regulation No. 101 of 2014 on Toxic and Hazardous Material Waste Management ("GR No. 101/2014"), replacing Government Regulation No. 18 of 1999. GR No. 101/2014 stated that nickel slag is classified as Toxic and Hazardous Material Waste ("B3"). Based on discussions with the Ministry of Forestry and Environment, the Company was advised to submit an application to obtain management of B3 waste permit for the B3 waste utilization activity, in order to utilize nickel slag as road base materials. The Ministry of Forestry and Environment advised that provision on the utilization of nickel slag for the road base materials will be communicated to the Ministry of Public Works and will be equipped with technical guidelines. In accordance with the above suggestion, the Company has submitted an application to obtain B3 waste management permit. In addition, the Company has conveyed its plan to file for an exemption so that nickel slag shall be excluded as B3 waste, after conducting studies required by GR No. 101/2014. The results of the studies will be used as supporting evidence in the application for exemption. The Company is currently also completing the administrative requirements as requested by the Ministry of Environment and Forestry.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

36. Contingent assets and liabilities (continued)

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

b. Mine reclamation and mine closure

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah mengumumkan peraturan pelaksanaan bagi UU Pertambangan Mineral dan Batubara No.4/2009 ("UU Pertambangan 2009"), yaitu Peraturan Pemerintah No.78/2010 ("PP No.78") yang mengatur reklamasi dan kegiatan pasca penambangan baik untuk pemegang Ijin Usaha Pertambangan-Eksplorasi ("IUP")-Eksplorasi maupun Ijin usaha Pertambangan-Operasi Produksi ("IUP-Operasi Produksi"). Peraturan ini memperbaharui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") pada tanggal 29 Mei 2008. Pemegang IUP-Eksplorasi diwajibkan antara lain untuk menyertakan rencana reklamasi dalam rencana kerja dan anggaran eksplorasi dan menyediakan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik pemerintah.

On December 20, 2010, the Government released an implementing regulation for Law No.4/2009 on Mineral and Coal Mining ("2009 Mining Law"), i.e. Government Regulation No.78/2010 ("GR 78") that deals with reclamation and post-mining activities for both "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")-Exploration and "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")-Production Operation holders. This regulation updates Ministerial Regulation No. 18/2008 issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MEMR") on May 29, 2008. An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

Pemegang IUP-Operasi Produksi diwajibkan antara lain untuk mempersiapkan (1) rencana reklamasi lima tahun; (2) rencana pasca tambang; (3) jaminan reklamasi yang dapat dalam bentuk rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi atau cadangan akuntansi (jika memenuhi syarat); dan (4) garansi pasca tambang dalam bentuk deposito berjangka pada bank milik pemerintah. Kewajiban untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak membebaskan pemegang IUP dari kewajiban untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Provisi transisi dalam PP No. 78 menetapkan bahwa pemegang Kontrak Karya juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini.

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee or an accounting reserve (if eligible); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank. The requirement to provide reclamation and post-mine guarantees does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities. The transitional provisions in GR 78 make it clear that CoW holders are also required to comply with this regulation.

Penempatan (deposito) tersebut tidak disebutkan atau dipersyaratkan dalam Kontrak Karya. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan telah atau akan mengambil tindakan-tindakan berikut:

No such placement (deposit) is contemplated or required under the CoW. In view of the foregoing, the Company has taken, or will take, the following actions:

- Untuk reklamasi tambang, Perseroan membentuk cadangan akuntansi sesuai dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (lihat Catatan 22a).
- Untuk penutupan tambang, Perseroan telah beberapa kali berkorespondensi dengan KESDM untuk membahas revisi rencana penutupan tambang. Menyusul keputusan KESDM berdasarkan surat tanggal 13 Oktober 2009, Perseroan harus membentuk deposito berjangka untuk penyediaan penutupan tambang. Sesuai ketentuan tersebut, setelah beberapa korespondensi, pada awal Juli 2011 Perseroan mengajukan rencana revisi rencana pasca penutupan tambang yang meliputi jaminan pasca penutupan tambang yang diusulkan untuk persetujuan KESDM tersebut.
- Pada tanggal 10 Oktober 2013, Perseroan menerima surat keputusan mengenai pembentukan cadangan jaminan reklamasi untuk area Sorowako periode 2013 hingga 2017 dan area Pomalaa periode 2013 hingga 2017. Berdasarkan surat-surat tersebut, Perusahaan telah memindahkan AS\$28 juta dari laba ditahan ke cadangan jaminan reklamasi (lihat Catatan 22a).

- For mining reclamation, the Company established an accounting reserve through decision letters from Directorate General of Minerals and Coal (refer to Note 22a).
- For mine closure, the Company has corresponded with MEMR on several occasions for discussion of the revised mine closure plan. Following the decision of the MEMR, based on the letter dated October 13, 2009, the Company should establish a time deposit for the mine closure provision. In compliance thereof, after several correspondences, in early July 2011 the Company submitted a revised post mine closure plan which includes the proposed post mine closure guarantee for the MEMR's approval.
- On October 10, 2013 the Company received a decision letter regarding the establishment of a reclamation guarantee reserve for the Sorowako area for the period from 2013 to 2017 and also for the Pomalaa area for the period from 2012 to 2016. Based on those letters, the Company transferred US\$28 million from retained earnings to the reclamation guarantee reserve (refer to Note 22a).

Pada tanggal 28 Februari 2014, KESDM menerbitkan Peraturan No. 07/2014 ("Peraturan Menteri No.07/2014"), yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri No.18/2008. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, salah satu persyaratan untuk dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi adalah terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% dari total saham yang dimiliki. Mengingat saham Perseroan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat ini belum mencapai 40%, maka dalam jangka waktu satu tahun, Perseroan wajib menyesuaikan bentuk jaminan reklamasi kedalam salah satu opsi berikut ini: rekening bersama, deposito berjangka atau bank garansi.

On February 28, 2014, the MEMR issued Regulation No. 07/2014 ("Ministerial Regulation No.07/2014"), which revokes and replaces Ministerial Regulation No.18/2008. Based on Ministerial Regulation No. 07/2014, one of the requirements for placing a reclamation guarantee in the form of accounting reserve is registering at the Indonesia Stock Exchange and has registered 40% of the Company's shares. Considering that the Company's shares that are registered at the Indonesia Stock Exchange has not reached 40%, in one year period, the Company must adjust its reclamation guarantee into one of the following options: joint account, time deposit or bank guarantee.

Guna memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, Perseroan telah melakukan penyesuaian bentuk jaminan reklamasi dari cadangan akuntansi menjadi bank garansi (yaitu salah satu bentuk jaminan sebagaimana disebutkan di atas). Bank garansi sebesar AS\$11,4 juta (nilai penuh) untuk jaminan reklamasi wilayah Sorowako dan Pomalaa telah disampaikan kepada KESDM pada tanggal 27 Februari 2015.

In order to fulfill the obligations under Ministerial Regulation No. 07/2014, the Company has adjusted its reclamation guarantee to become a bank guarantee (which is one of the options mentioned above). Bank guarantees in the amount of US\$11.4 million (full amount) for reclamation guarantee for Sorowako and Pomalaa areas were submitted to the MEMR on February 27, 2015.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang (lanjutan)

Tidak terdapat perubahan atas ketentuan mengenai jaminan penutupan tambang selain penjelasan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang relevan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 18/2008.

Pada tanggal 6 Januari 2015, KESDM menerbitkan persetujuan atas rencana penutupan tambang Perseroan. Biaya penutupan tambang disetujui sebesar AS\$69,9 juta (nilai penuh), yang akan ditempatkan secara bertahap sebagai deposito jaminan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Dengan pelaksanaan komitmen investasi berdasarkan KK 2014, rencana penutupan tambang Perseroan akan berubah secara signifikan dibanding dengan rencana penutupan tambang yang telah diajukan dan disetujui oleh KESDM, baik dari aspek jumlah jaminan yang dibutuhkan maupun waktu penempatan. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk mengajukan permohonan perubahan rencana penutupan tambang setelah memperoleh persetujuan dari KESDM atas laporan studi kelayakan sehubungan dengan rencana ekspansi Perseroan. Selain itu, mengingat bahwa Perseroan akan menyediakan pendanaan yang sangat besar untuk melaksanakan komitmen investasi sebagaimana diuraikan di atas, saat ini Perseroan tengah berdiskusi dengan Pemerintah mengenai kemungkinan ditematkannya jaminan penutupan tambang dalam bentuk cadangan akuntansi.

Selama tahun 2015, Perseroan menerima beberapa surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengenai hal yang terkait dengan jaminan reklamasi sebagai berikut:

- Area Sorowako: persetujuan pelepasan jaminan reklamasi tahun 2014 dan sisa jaminan reklamasi tahun 2010 – 2013;
- Area Pomalaa: persetujuan pelepasan jaminan reklamasi tahun 2014 dan sisa jaminan reklamasi tahun 2010 – 2013 serta penempatan jaminan reklamasi tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas, total jaminan reklamasi Perseroan mengalami perubahan. Perseroan telah mengirimkan surat tanggapan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas hal tersebut diatas dan penyesuaian nilai dan jangka waktu bank garansi dilakukan efektif mulai 1 Januari 2016.

c. Tumpang tindih IUP

Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan menetapkan bahwa terdapat IUP pihak ketiga atau kegiatan pertambangan yang tumpang tindih di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Untuk mengatasi masalah perambahan di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan, Perseroan terus bekerja dengan instansi pemerintah terkait, termasuk dengan Kementerian ESDM, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah (misalnya, Gubernur dan Bupati). Perseroan ini siap untuk mengambil tindakan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada, mengajukan laporan polisi, mengajukan gugatan perdata dan pengajuan gugatan tata usaha negara.

Berkenaan dengan masalah tumpang tindih IUP dalam wilayah Kontrak Karya di Sulawesi Tengah, pada 26 Juli 2012, Perseroan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali. Salah satu poin penting dari Nota Kesepahaman adalah bahwa Bupati bertanggung jawab atas penyelesaian masalah tumpang tindih IUP di Kabupaten Morowali. Namun demikian, sampai dengan saat ini, komitmen Bupati berdasarkan Nota Kesepahaman untuk menyelesaikan masalah perambahan ini belum dipenuhi.

Tidak terdapat perambahan pertambangan pihak ketiga di Pomalaa, namun, mungkin terdapat beberapa masyarakat atau perambahan individu. Pada saat ini, perambahan tidak menimbulkan risiko material terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan dengan strategi pertumbuhan di Sulawesi Tenggara.

Sampai dengan 31 Desember 2015, Perseroan terus bekerja dengan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk mengatasi masalah perambahan ini, dan beberapa pihak berwenang telah melakukan penyelidikan mengenai hal ini.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

b. Mine reclamation and mine closure (continued)

There are no changes to the provisions on post mine closure guarantee other than further explanations on the relevant provisions that have been previously covered under Ministerial Regulation No. 18/2008.

On January 6, 2015, the MEMR issued its approval of the Company's mine closure plan. The total cost for the mine closure is in the amount of US\$69.9 million (full amount), which will be placed gradually in guarantee deposits starting from 2017 up to 2023. By the implementation of investment commitments under the 2014 CoW, the Company's mine closure plan will change significantly compared to the mine closure plan that has been submitted to and approved by the MEMR, both in the amount and the period for the guarantee placement. Therefore, the Company plans to apply for changes to the mine closure plan after obtaining the MEMR's approval for the Company's feasibility study report for its expansion plan. In addition, considering that the Company will provide significant funding for the implementation of its investment commitments as described above, the Company is currently discussing with the Government the possibility of placing the mine closure plan in the form of accounting reserves.

During 2015, the Company received several letters from Directorate General Mineral and Coal relating to reclamation guarantees as follows:

- Sorowako area: approval of the release of reclamation guarantee 2014 and the remaining reclamation guarantee 2010 – 2013;
- Pomalaa area: approval of the release of reclamation guarantee 2014 and the remaining reclamation guarantee 2010 – 2013, and placement of reclamation guarantee 2016.

As a result of the above, the total amount of reclamation guarantee has changed. The Company has sent a response letter to Director General Mineral and Coal on the above matters and adjustment to the amount and period of bank guarantee will be made effective on January 1, 2016.

c. Overlapping IUP

Based on the Company's field verifications, the Company determined that there are third party IUPs or mining activities that overlap the Company's CoW area in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi. To address the issue of encroachment of the Company's CoW area, the Company continues to work with the relevant government institutions, including the MEMR, the State Ministry of Environment and Forestry and local governments (e.g., Governors and Regents). The Company is prepared to take legal action including, but not limited to, filing a police report, filing a civil tort claim and filing an administrative court claim.

With regard to the issue of overlapping IUPs within the CoW areas in Central Sulawesi, on July 26, 2012, the Company signed a MoU with the Governor of Central Sulawesi and the Regent of Morowali. One of the key points of the MoU is that the Regent shall be responsible for settlement of the IUP overlapping issues in the Morowali Regency. To date, however, the local Regent's commitment under the MoU to settle the encroachment issue has not been fulfilled.

While there has not been third party mining encroachment in Pomalaa, there may have been some community or individual encroachment. At this time, the encroachment does not pose any material risk to the Company's ability to proceed with its growth strategy in Southeast Sulawesi.

As of December 31, 2015, the Company continues to work with the local governments in Central Sulawesi to have the encroachment issue resolved, and some authorities have conducted investigations into this matter.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

c. Tumpang tindih IUP (lanjutan)

Per tanggal laporan keuangan ini, kami memperoleh bukti bahwa Bupati Morowali telah mencabut 35 IUP yang tumpang tindih dalam wilayah Kontrak Karya di Sulawesi Tengah; 22 diantaranya tumpang tindih dengan Kontrak Karya Perseroan. Kami juga memperoleh informasi bahwa Bupati Morowali telah mencabut 50 IUP lain di Kabupaten Morowali. Perseroan terus memantau perkembangan di lapangan dan mempersiapkan tindakan hukum yang tepat apabila dianggap perlu.

d. UU Pertambangan 2009

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Undang-undang"), yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 Januari 2009 dan menjadi UU Pertambangan 2009. UU Pertambangan 2009 tersebut mengindikasikan bahwa walaupun Kontrak Karya yang ada sekarang, seperti yang dimiliki oleh Perseroan, akan tetap berlaku namun ketentuan peralihan dalam Undang-undang memuat substansi yang tidak jelas. Ada beberapa hal yang dikaji oleh para pemegang Kontrak Karya, antara lain:

- Ketentuan peralihan sehubungan dengan Kontrak Karya. UU Pertambangan 2009 menyatakan bahwa Kontrak Karya yang ada pada saat ini akan tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya. Namun UU Pertambangan 2009 juga menyatakan bahwa Kontrak Karya harus disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (selain dari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara – yang tidak dijelaskan, tetapi mungkin termasuk royalti dan pajak). Pada tanggal 16 Juni 2009, Perseroan bersama-sama dengan perusahaan tambang lainnya menghadiri rapat yang diadakan oleh KESDM dimana KESDM untuk pertama kalinya tentang rancangan usulan penyesuaian atas struktur Kontrak Karya yang berlaku saat ini pada seluruh pemegang Kontrak Karya. Perseroan telah mengirimkan tanggapan resminya ke Kementerian yang menjelaskan maksudnya untuk berdialog lebih lanjut mengenai rancangan usulan penyesuaian dimaksud. Diskusi renegotiasi Kontrak Karya kemudian terus berlangsung secara intensif mulai sejak September 2013 sampai dengan ditandatanganinya KK 2014 ini sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah;
- Kewajiban para pemegang Kontrak Karya yang telah memulai aktivitasnya, dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UU Pertambangan 2009, untuk menyerahkan rencana aktivitas penambangannya di seluruh wilayah kontrak. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka wilayah kontrak karyanya akan disesuaikan, sesuai dengan UU Pertambangan 2009 (yang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU tersebut). Sehubungan dengan hal ini, Perseroan menyampaikan Rencana Kegiatan pada Seluruh Wilayah Kontrak Karya ("RKSWK") pada tahun 2010. RKSWK tersebut menjelaskan rencana kegiatan Perseroan di dalam wilayah Kontrak Karya sampai dengan periode 2045 (sampai lebih dari masa berakhirnya Kontrak Karya pada Desember 2025), termasuk penjelasan mengenai rencana kegiatan di wilayah Bahodopi. Kegiatan yang dijelaskan dalam RKSWK Perseroan terkait dengan Bahodopi secara material berbeda dengan apa yang dimuat dalam Kontrak Karya. RKSWK telah beberapa kali direvisi, terakhir pada bulan Oktober 2014 sebagaimana ringkasannya dimuat pula dalam KK 2014. Perseroan telah mematuhi UU Pertambangan 2009 dengan telah direnegosiasikannya Kontrak Karya Perseroan (yaitu KK2014) dan telah disampaikannya RKSWK.

Lebih lanjut, pada tanggal 1 Februari 2010, Presiden Republik Indonesia menandatangani dua Peraturan Pemerintah ("PP"), yaitu PP No. 22/2010 dan PP No. 23/2010 (sebagaimana terakhir kali diubah melalui PP No. 77/2014), yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang – Undang Pertambangan baru ini. PP No.22/2010 pada dasarnya mengatur tentang pembentukan area pertambangan di Indonesia. PP No. 23/2010 menjelaskan lebih rinci beragam tipe perijinan pertambangan yang dapat diperoleh dalam hubungannya dengan Undang-undang ini, dan menjelaskan syarat dan kondisi yang wajib dipenuhi oleh pihak yang mengajukan maupun pihak berwenang mengeluarkan ijin pertambangan. Pada tanggal 5 Juli 2010, PP No. 55/2010 dikeluarkan. PP ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2010, PP No. 78/2010 dikeluarkan. PP ini mengatur mengenai reklamasi dan pasca-tambang.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

c. Overlapping IUP (continued)

As at the date of this report, we have obtained evidence that the Regent of Morowali has revoked 35 overlapping IUPs within the Company's CoW in Central Sulawesi; 22 of which are overlapping with the Company's CoW. We also obtained information that the Regent of Morowali has revoked another 50 IUPs in Morowali Regency. The Company is monitoring the developments on the field and preparing for appropriate legal actions should they be deemed necessary.

d. The 2009 Mining Law

On December 16, 2008, the Indonesian Parliament passed a Law on Mineral and Coal Mining (the "Law"), which received the assent of the President on January 12, 2009, becoming the 2009 Mining Law. While the 2009 Mining Law indicates that existing CoWs, such as the Company's, will be honoured, the transitional provisions contain areas that are unclear. There are a number of issues that existing CoW holders analyzed. Among others these are:

- The transitional provisions related to CoWs. The 2009 Mining Law notes that existing CoWs will be honoured until their expiration. However, it also states that existing CoWs must be adjusted within one year to conform with the provisions of the 2009 Mining Law (other than terms related to State Revenue – which is not defined, but presumably includes royalties and taxes). On June 16, 2009 the Company, together with other mining companies, attended a meeting held by the MEMR in which the Ministry for the first time announced the proposed adjustments to the current CoW structure applicable to all CoW holders. The Company has submitted a formal response to the Ministry explaining its intention to conduct further dialogue to discuss the best solution in response to the proposed changes. Discussions of CoW renegotiation then continued intensively from September 2013 up to the signing of the 2014 CoW as further described below;
- The requirement for CoW holders that have already commenced some form of activity to, within one year of enactment of the 2009 Mining Law, submit a mining activity plan for the entire contract area. If this plan is not fulfilled, the contract area may be adjusted in accordance with the 2009 Mining Law (which is not further explained in the law). In this regard, the Company submitted its Activity Plan on the Entire CoW Area (the "RKSWK") in 2010. The RKSWK sets out the Company's planned activities in the CoW area covering the period up to 2045 (beyond the expiration of the CoW in December 2025), including a discussion of activities planned for the Bahodopi area. The activities set out in the Company's RKSWK relating to Bahodopi are materially different than those set forth in the CoW. The Company's RKSWK has been revised several times, most recently in October 2014, a summary of which is also reflected in the 2014 CoW. The Company is in compliance with the 2009 Mining Law as its CoW has been renegotiated (as per 2014 CoW) and its RKSWK has been submitted.

Furthermore, on February 1, 2010, the President of the Republic of Indonesia signed two implementing regulations for the new Law, i.e. Government Regulation ("GR") No. 22/2010 and GR No. 23/2010 (as lastly amended by GR No. 77/2014). GR No.22/2010 deals with the establishment of mining areas in Indonesia. GR No.23/2010 offers further details of different types of mining licenses which may be made available under this Law, and sets out the basic terms and conditions which need to be satisfied by license applicants and issuing authorities. On July 5, 2010, GR No. 55/2010 was issued. This GR regulates the guidance and supervision of mineral and coal mining business in Indonesia. On December 20, 2010, GR No. 78/2010 was issued. This GR regulates the reclamation and post-mining.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

36. Contingent assets and liabilities (continued)

d. UU Pertambangan 2009 (lanjutan)

d. The 2009 Mining Law (continued)

Perseroan terus memonitor rilis peraturan pelaksanaan dari UU Pertambangan 2009 ini dan mengkaji pengaruhnya terhadap operasional Perseroan.

The Company continues to monitor the release of implementing regulations to the 2009 Mining Law and assess the impact on its operations.

e. Amandemen Kontrak Karya

e. CoW Amendment

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah dan Perseroan menandatangani amandemen kontrak karya sebagai hasil kesepakatan renegotiasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Pertambangan 2009. Pihak Pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pelaksana Tugas Menteri ESDM, Chairul Tanjung, sementara pihak Perseroan diwakili oleh Presiden Direktur dan CEO Perseroan, Nico Kanter, dan CFO Perseroan, Febriany Eddy. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar, dan Direktur Eksekutif Vale Base Metals, Peter Poppinga.

On October 17, 2014, the Government and the Company signed an amendment of CoW marking the conclusion of the renegotiation process, as required by the 2009 Mining Law. The Government was represented by Indonesian Coordinating Minister of Economy and acting Minister of Energy and Mineral Resources (MEMR), Chairul Tanjung, while the Company was represented by President Director and CEO, Nico Kanter, and CFO Febriany Eddy. The signing was witnessed by Vice Minister of MEMR, Susilo Siswoutomo, Director General of Mineral and Coal, R. Sukhyar, and Executive Director of Vale, Base Metals, Peter Poppinga.

KK 2014 meliputi perubahan-perubahan prinsip sebagai berikut:

The 2014 CoW includes the following principal changes:

- Pengurangan wilayah Kontrak Karya dari seluas 190.510 hektar menjadi 118.435 hektar. Pada akhir Kontrak Karya tanggal 28 Desember 2025, Perseroan dapat mempertahankan 25.000 hektar zona bijih yang akan diusulkan Perseroan untuk dieksploitasi. Selain zona bijih tersebut, Perseroan tetap dapat mempertahankan lahan yang diperlukan untuk kegiatan operasional dan keperluan lainnya. Luasan lahan hasil renegotiasi ini mencerminkan luasan lahan yang memadai untuk keperluan investasi dan rencana pertumbuhan jangka panjang Perseroan.
- Royalti yang disepakati sebesar 2% dari penjualan dan naik menjadi 3% dari penjualan jika harga rata-rata nikel LME bulan sebelumnya sama atau lebih besar dari AS\$21.000/ton.
- Kewajiban bagi Perseroan untuk mendivestasikan tambahan 20% saham kepada peserta Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pemerintah bagi perusahaan pertambangan dan pengolahan terintegrasi dimana harus mendivestasikan 40% sahamnya kepada peserta Indonesia dan mengakui 20% saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh pemegang saham publik melalui Bursa Efek Indonesia sebagai peserta Indonesia. Proses divestasi ini akan dilakukan bulan Oktober 2019.
- Perseroan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasinya setelah Kontrak Karya berakhir sebanyak dua kali 10 tahun dalam bentuk izin operasi, dan tunduk pada persetujuan Pemerintah. Persetujuan Pemerintah ini akan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban Perseroan yang tercantum dalam KK 2014.

- An immediate reduction in the size of the Company's total CoW area from 190,510 hectares to 118,435 hectares. At the expiry of the CoW on December 28, 2025, the Company will maintain 25,000 hectares as ore zones that the Company proposes to exploit. In addition to the ore zones, the Company can retain areas required to support its operations and other needs. This represents a renegotiated land package that is sufficient to support the Company's investments and long-term growth plans.
- An agreed royalty rate of 2% of sales escalating to 3% if the average LME price for nickel is greater than or equal to US\$21,000/ton in the prior month.
- A requirement for the Company to divest a further 20% of the Company's shares to Indonesian participants. This is consistent with the Government's requirement for integrated mining and processing companies that 40% of shares be held by Indonesian participants and recognizes 20% of the Company's shares are currently owned by public shareholders through the Indonesia Stock Exchange as Indonesian participants. The process of divestment will be conducted by October 2019.
- The Company can submit a request to continue its operations beyond the CoW expiry for two additional 10-year periods, in the form of an operating license, subject to the Government's approval. The Government's approval shall consider the Company's fulfillment of its requirements under the 2014 CoW.

Selain perubahan-perubahan utama di atas, KK 2014 juga mengatur komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Komitmen investasi tersebut menggantikan kesanggupan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam KK 1996. Di bawah ini adalah komitmen investasi Perseroan berdasarkan KK 2014.

In addition to the above mentioned major changes, the 2014 CoW also outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy. Such investment commitments replaced the Company's undertakings as set out in the 1996 CoW. Below are the Company's investment commitments under the 2014 CoW.

Komitmen Investasi Sulawesi Selatan

South Sulawesi Investment Commitments

Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan suatu program investasi untuk memperluas kapasitas pengolahan dan pemurnian bijih di fasilitas Perseroan di Sorowako dan untuk meningkatkan produksi ("Indonesian Growth Project ("IGP") Sulawesi Selatan"). Perluasan ini akan dicapai melalui beberapa tahapan pengeluaran modal yang signifikan, antara lain dengan inisiatif sebagai berikut:

The Company commits to implement an investment program to expand the ore Processing and Refining capacity at the Company's facility in Sorowako and increase production (the "Indonesian Growth Project ("IGP") South Sulawesi"). The expansion will be achieved through a series of significant capital expenditures including, among other initiatives:

- Pemutakhiran tungku pelebur (furnace) serta membangun kapasitas tanur pengering (dryer) dan tanur pereduksi (kiln) baru sesuai kebutuhan;
- Perluasan tambang (melalui pengembangan tambang baru di wilayah luar Sorowako (Sorowako outer area) dan Bahodopi Blok 1); dan
- Optimalisasi tambang (yang secara berkelanjutan mendukung keekonomian proyek).

- Upgrades to furnaces and the installation of new dryer and kiln capacity as necessary;
- Mine expansion (though the development of new mines in the Sorowako outer areas and Bahodopi Block 1); and
- Mine optimization (which sustainably supports the project economics).

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

e. Amendemen Kontrak Karya (lanjutan)

Komitmen Investasi Sulawesi Selatan (lanjutan)

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait IGP Sulawesi Selatan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Komitmen Investasi Sulawesi Tengah

Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan program investasi di Bahodopi, Sulawesi Tengah sesuai dengan Opsi #1 atau Opsi #2 sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Opsi #1 (komponen Tahap I dan Tahap II)

Tahap I:

- (i) Pembangunan suatu fasilitas Pengolahan dan Pemurnian hilir ("Fasilitas Hilir Bahodopi"); dan
- (ii) Investasi infrastruktur (seperti pelabuhan, jalan, dll) ("Infrastruktur Bahodopi").

(bersama-sama disebut sebagai "IGP Sulawesi Tengah").

Fasilitas Hilir Bahodopi akan memiliki kapasitas nominal untuk memproses sekitar 18.000 ton produk bernilai tambah lebih tinggi (seperti nikel oxide) per tahun. Selain itu, akan terdapat operasi penambangan di Bahodopi Blok 1 yang terkait dengan IGP Sulawesi Selatan.

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait Infrastruktur Bahodopi dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait dengan IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait Fasilitas Hilir Bahodopi dalam jangka waktu dua puluh empat bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait dengan IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Tahap II:

Sebagai Tahap 2, Perseroan mengusulkan untuk membangun atau meningkatkan kapasitas fasilitas Pengolahan dan Pemurnian utama masa mendatang di Bahodopi untuk menghasilkan produk nikel (kemungkinan, ferronikel) ("Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi"). Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi dapat dipertimbangkan oleh Perseroan secara independen atau sebagai bagian dari suatu joint venture (dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pertambangan dan/atau pengolahan di Indonesia) sepanjang Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi tersebut mengolah bijih dari Bahodopi Blok 2 dan 3, Sulawesi Tengah.

Perseroan berkomitmen untuk menyerahkan kepada Pemerintah proposal investasi untuk Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi selambat-lambatnya 2020 dan untuk memulai pembangunan selambat-lambatnya 2023.

Opsi #2

Perseroan akan memulai kegiatan konstruksi terkait Infrastruktur Bahodopi dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

e. CoW Amendment (continued)

South Sulawesi Investment Commitments (continued)

The Company will start construction activity in relation to the IGP South Sulawesi within twelve months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

Central Sulawesi Investment Commitments

The Company commits to implement an investment program in Bahodopi, Central Sulawesi pursuant to either Option #1 or Option #2 as described below:

Option #1 (Phase I and Phase II components)

Phase I:

- (i) The construction of a downstream Processing and Refining facility (the "Bahodopi Downstream Facility"); and
- (ii) Infrastructure investments (such as port, roads, etc) (the "Bahodopi Infrastructure").

(together referred to as the "IGP Central Sulawesi").

The Bahodopi Downstream Facility will have nominal capacity to produce approximately 18,000 tonnes of a higher value-added product (such as nickel oxide) per year. Additionally, there will be a mining operation in Bahodopi Block 1 which is linked to IGP South Sulawesi.

The Company will start construction activities in relation to the Bahodopi Infrastructure within eighteen months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Company will start construction activities in relation to the Bahodopi Downstream Facility within twenty four months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

Phase II:

In Phase 2, the Company proposes to develop or expand the capacity of a future primary Processing and Refining facility in Bahodopi to produce a nickel product (potentially ferronikel) (the "Bahodopi Primary Processing and Refining Facility"). The Bahodopi Primary Processing and Refining Facility may be considered by the Company independently or as part of a joint venture (with a third party with mining and/or processing capacity in Indonesia) provided that the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility processes ore from Central Sulawesi Bahodopi Blocks 2 and 3.

The Company commits to submit to the Government an investment proposal for the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility no later than 2020 and to start construction by 2023.

Option #2

The Company will start construction activity in relation to the Bahodopi Infrastructure within eighteen months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

e. Amandemen Kontrak Karya (lanjutan)

Komitmen Investasi Sulawesi Tengah (lanjutan)

Perseroan berkomitmen untuk menyampaikan kepada Pemerintah suatu proposal investasi dan studi kelayakan awal, apabila diperlukan, untuk Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi dalam jangka waktu dua puluh empat bulan setelah menerima semua perizinan/persetujuan yang diperlukan terkait IGP Sulawesi Selatan dan IGP Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi dapat dipertimbangkan oleh Perseroan secara independen atau sebagai bagian dari suatu joint venture (dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pertambangan dan/atau pengolahan di Indonesia) sepanjang Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi mengolah bijih dari Bahodopi Blok 2 dan 3, Sulawesi Tengah.

Apabila Perseroan memilih Opsi #2 ini, Perseroan tidak disyaratkan untuk berkomitmen terhadap pembangunan Fasilitas Hilir Bahodopi; namun, pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Utama Bahodopi akan dipercepat.

Komitmen Investasi Sulawesi Tenggara

Perseroan berkomitmen terhadap pengembangan dan pembangunan (sebagai bagian dari usaha patungan dengan Sumitomo Metal Mining Co., Limited) suatu fasilitas Pengolahan dan Pemurnian high pressure acid leach ("HPAL"), bersama dengan infrastruktur pendukungnya, di Sulawesi Tenggara ("Fasilitas HPAL Pomalaa"). Fasilitas HPAL Pomalaa ini dimaksudkan untuk memiliki perkiraan kapasitas untuk menghasilkan minimal 15.000 ton (dalam bentuk produk mixed sulfide precipitate).

Perusahaan berkomitmen terhadap penyelesaian rekayasa dasar (basic engineering) terkait Fasilitas HPAL Pomalaa dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah diterimanya semua perizinan/persetujuan, dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Lebih lanjut, Perseroan berkomitmen untuk memulai kegiatan konstruksi di Pomalaa, mana yang lebih lama:

- (i) Dua belas bulan setelah diterimanya semua perizinan/ persetujuan yang diperlukan; dan
- (ii) Dua belas bulan setelah selesainya rekayasa dasar (basic engineering), dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan.

Fasilitas HPAL Pomalaa dapat dipertimbangkan oleh Perseroan sebagai independen atau sebagai bagian dari suatu joint venture (dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pertambangan dan/atau pengolahan di Indonesia).

Upaya Perbaikan

Dalam hal Perseroan tidak memenuhi komitmen investasi sebagaimana diuraikan di atas, upaya satu-satunya Pemerintah (sole remedy) atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Komitmen investasi Sulawesi Selatan: Perseroan setuju untuk melepaskan sebagian dari Sorowako (yaitu, sebagian dari Sorowako outer area) atau Blok 1 Bahodopi yang tidak dapat dijustifikasikan tanpa adanya IGP Sulawesi Selatan. Pemerintah dan Perseroan sepakat bahwa area pelepasan yang spesifik tersebut (Sorowako outer area atau Blok 1 Bahodopi) akan dinegosiasikan sesuai dengan proses yang akan disepakati kemudian;
- Komitmen investasi Sulawesi Tengah: Perusahaan setuju untuk melepaskan Blok 2 dan 3 Bahodopi;
- Komitmen investasi Sulawesi Tenggara: Perusahaan setuju untuk melepaskan Blok Pomalaa dan Blok Suasua.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

e. CoW Amendment (continued)

Central Sulawesi Investment Commitments (continued)

The Company commits to submit to the Government an investment proposal and pre-feasibility study, if applicable, for the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility within twenty four months of receiving all requisite licenses/approvals in relation to the IGP South Sulawesi and the IGP Central Sulawesi, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Bahodopi Primary Processing and Refining Facility may be considered by the Company independently or as part of a joint venture (with a third party with mining and/or processing capacity in Indonesia) provided that the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility processes ore from Central Sulawesi Bahodopi Blocks 2 and 3.

If the Company elects Option #2, it means that the Company is not required to commit to the development and construction of the Bahodopi Downstream Facility; instead, the development of the Bahodopi Primary Processing and Refining Facility is accelerated.

Southeast Sulawesi Investment Commitments

The Company is committed to the development and construction (as part of a joint venture with Sumitomo Metal Mining Co., Limited) of a high pressure acid leach ("HPAL") Processing and Refining facility, together with supporting infrastructure, in Southeast Sulawesi (the "Pomalaa HPAL Facility"). The Pomalaa HPAL Facility is intended to have an approximate capacity to produce at least 15,000 tonnes (in the form of a mixed sulfide precipitate product).

The Company commits to the completion of basic engineering in relation to the Pomalaa HPAL Facility within eighteen months of receiving all requisite licenses/approvals, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Company further commits to start construction activity in Pomalaa by the later of:

- (i) Twelve months of receiving all requisite licenses / approvals; and
- (ii) Twelve months after completion of basic engineering, by considering the feasibility study and the environmental study.

The Pomalaa HPAL Facility may be considered by the Company as independent or as part of a joint venture (with a third party with mining and/or processing capacity in Indonesia).

Remedies

In the event that the Company does not fulfill the investment commitments as set out above, the sole remedies of the Government in this respect are as follows:

- South Sulawesi investment commitment: the Company agrees to relinquish a part of Sorowako (that is, a part of the Sorowako outer area) or Bahodopi Block 1 that cannot be justified without the IGP South Sulawesi. The Government and the Company agree that the specific relinquishment area (in the Sorowako outer area or Bahodopi Block 1) is to be negotiated pursuant to an agreed upon process;
- Central Sulawesi investment commitment: the Company agrees to relinquish Bahodopi Blocks 2 and 3;
- Southeast Sulawesi investment commitment: the Company agrees to relinquish the Pomalaa Block and the Suasua Block.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

36. Contingent assets and liabilities (continued)

f. Peraturan Menteri No. 17/2010

f. Ministerial Regulation No. 17/2010

Pada tanggal 23 September 2010, Peraturan KESDM No. 17 tahun 2010 telah disahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan ini, terdapat kewajiban dari seluruh pemegang Ijin Usaha Pertambangan ("IUP")/Ijin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") untuk menggunakan harga patokan dalam penjualan mineral (atau batubara), baik penjualan kepada pasar domestik maupun ekspor, termasuk kepada afiliasi. Dalam peraturan peralihan, semua pemegang Kontrak Karya diwajibkan untuk menaati peraturan ini dan persyaratan kontrak yang sudah ada sebelum diimplementasikannya peraturan ini harus disesuaikan agar memenuhi persyaratan peraturan ini (sebagai contoh, formula harga jual) dalam waktu duabelas bulan.

On September 23, 2010, MEMR Regulation No. 17 of 2010 was issued. Pursuant to this regulation, there is an obligation on all "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")/"Ijin Usaha Pertambangan Khusus" ("IUPK") holders to refer to prescribed benchmark prices for the sale of minerals (or coal), whether sales are being made to domestic users or are for export, including to affiliates. Under the transitional provision, all CoW holders are obligated to comply with the regulation and any term contracts existing prior to the implementation of this regulation must be adjusted to comply with the terms (i.e., the selling price formula) of this regulation within twelve months.

Selain itu, sebagai kewajiban berkelanjutan dalam peraturan ini, penerapan harga dalam persyaratan kontrak harus disesuaikan setiap dua belas bulan. Karena formula harga yang digunakan Perseroan telah sesuai dengan peraturan KESDM ini (LME dapat dikualifikasikan sebagai "pasar internasional"), Perseroan berpendapat bahwa tidak diperlukan penyesuaian terhadap kontrak penjualan jangka panjang Perseroan terhadap ketentuan ini. Meskipun demikian, peraturan ini tidak mengecualikan kontrak penjualan jangka panjang Perseroan dari lingkup keberlakuan peraturan ini.

In addition, as an ongoing obligation under the regulation, pricing in term contracts must be adjusted every twelve months. As the Company's selling price formula is in line with the MEMR regulation (LME qualifies as an "international market"), the Company does not believe that any adjustment will be necessary to the Company's long-term sales agreements under either provision. Notwithstanding the foregoing, the regulation does not grandfather the Company's long-term sales contracts.

Harga patokan akan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau sejalan dengan harga yang berlaku pada pasar internasional. Harga patokan untuk mineral logam (misalnya nikel dalam matte) akan ditentukan oleh Direktur Jenderal setiap bulannya. Peraturan ini mengharuskan harga patokan digunakan sebagai referensi penjualan.

Benchmark prices will be determined pursuant to market mechanisms or in accordance with prices generally applicable in the international market. Benchmark price for metal minerals (e.g. nickel in matte) will be established by the Director General on a monthly basis. The regulation requires that the benchmark prices be used as a reference for sales.

Penyesuaian harga yang diatur di dalam peraturan ini termasuk biaya angkutan dengan menggunakan tongkang, biaya surveyor, biaya perpindahan kapal, biaya pengolahan, biaya pemurnian, biaya logam terhutang dan/atau biaya asuransi. Referensi metal terhutang mengacu kepada harga yang akan dibayar oleh pembeli berdasarkan kandungan metal dalam produk; terdapat kesan adanya pengakuan harga pasar internasional untuk produk nikel setengah jadi (berupa persentase harga LME).

The "cost adjustments" set out in the regulation include barging cost, surveyor cost, transshipment cost, treatment cost, refinery cost, metal payable and/or insurance cost. The reference to "metal payable" refers to the price which the customer will pay on the contained metal of the product; it arguably recognizes the international market price practice for nickel intermediate products (i.e., a percentage of LME price).

Penilaian awal Perseroan adalah bahwa peraturan ini mengakui atau memperbolehkan penyesuaian terhadap standar harga pasar internasional (misalnya sejumlah persentase tertentu dari harga LME). Saat ini, pada level minimum, peraturan ini akan menggunakan harga LME sebagai referensi dalam menghitung harga patokan.

Management's initial assessment is that this regulation recognizes or permits adjustments to the international market price standard (e.g. a percentage of LME price). At the present time, at a minimum, it appears that the regulation will set LME price as a reference point in calculating the benchmark price.

Pada tanggal 27 April 2015, Direktur Jenderal Mineral dan batubara menerbitkan Peraturan No. 630.K/32/DJB/2015 tentang Formula untuk Penetapan Harga Patokan Mineral Logam ("PerDirJen No. 630/2015"), yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan KESDM No. 17/2010. PerDirJen No. 630/2015 mengatur formula untuk penetapan harga patokan mineral logam untuk komoditi pertambangan tertentu, termasuk nikel. Formula harga patokan mineral logam tersebut mengacu pada mekanisme pasar, seperti London Metal Exchange, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, dan Asian Metal. Pemegang IUP dan kontrak karya diwajibkan untuk patuh terhadap seluruh ketentuan dalam PerDirJen No. 630/2015. Harga patokan dalam peraturan tersebut telah sesuai dengan formula penjualan Perseroan, jadi dampaknya adalah netral.

On April 27, 2015, the Director General of Mineral and Coal issued Regulation No. 630.K/32/DJB/2015 on the Formula to Determine the Metal Mineral Reference Price ("DirGen Reg No. 630/2015"), which is the implementing regulation of MEMR Regulation No. 17/2010. DirGen Reg No. 630/2015 provides the formula to determine the metal mineral reference price for certain mining commodities, including nickel. The formula of metal mineral reference price refers to the metal mineral price in accordance with market mechanism, such as, London Metal Exchange, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange, and Asian Metal. Holders of IUP and COW are required to comply with all provisions in DirGen Reg No.630/2015. The reference price in the regulation is in line with the Company's sales formula, so the impact is neutral.

g. Peraturan KESDM mengenai Peningkatan Nilai Tambah

g. MEMR Regulation on Domestic Added Value

Pada tanggal 6 Februari 2012, KESDM mengeluarkan Peraturan No. 07 tahun 2012 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan Mineral dan Proses Pemurnian ("PerMen No. 7/2012"). Peraturan ini dikeluarkan untuk penerapan Pasal 96 dan 111 dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No.23/2010, telah diubah melalui PP No. 24/2012, yang telah diubah lebih jauh melalui PP No. 77/2014").

On February 6, 2012, the MEMR issued Regulation No. 07 of 2012 on Increase in Added Value from Minerals through Mineral Processing and Refining ("Reg No. 7/2012"). This Regulation was issued to further implement Articles 96 and 111 of Government Regulation No. 23 of 2010 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Activities ("GR No. 23/2010, as amended by GR No. 24/2012, and further amended by GR No. 77/2014").

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

g. Peraturan KESDM mengenai Peningkatan Nilai Tambah (lanjutan)

Berdasarkan PP No. 23/2010 dan PerMen No. 7/2012, logam mineral tertentu, termasuk nikel, dianggap sebagai komoditas pertambangan, nilai yang dapat ditambahkan melalui pengolahan dan/atau kegiatan pemurnian. Dengan demikian, nikel harus diproses dan/atau dimurnikan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum yang ditetapkan dalam PerMen No. 7/2012.

Pemegang Kontrak Karya yang telah melakukan produksi sebelum Peraturan ini diterbitkan diwajibkan untuk:

- melakukan penyesuaian terhadap batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan batas yang ditentukan diatas dalam waktu lima tahun setelah UU Pertambangan 2009 ini dikeluarkan; dan
- menyampaikan laporan berkala mengenai penyesuaian terhadap batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian kepada Direktur Jenderal Batubara dan Pertambangan untuk evaluasi.

Dalam hal pemegang Kontrak Karya tidak dapat membuat penyesuaian tersebut di atas atau tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, mereka harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal.

Manajemen berpendapat bahwa produk Perseroan telah memenuhi ketentuan ini.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait bea ekspor, yaitu, antara lain, Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 of 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan, Peraturan Direktur Jenderal Batubara dan Pertambangan No. 574.K/30/DJB/2012 tentang Ketentuan Tata Cara dan Persyaratan Ekspor Produk Pertambangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar. Manajemen berpendapat bahwa secara keseluruhan peraturan-peraturan ini tidak berlaku terhadap Perseroan. Produk Ni dalam Matte yang dihasilkan oleh Perseroan masuk dalam kategori HS 7501.10.00.00 (tidak termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut).

KK 2014 yang ditandatangani pada 17 Oktober 2014 mengkonfirmasi bahwa Perseroan telah memenuhi kewajiban mengenai peningkatan nilai tambah dalam negeri.

h. Peraturan KESDM tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada tanggal 30 Desember 2015, KESDM menerbitkan Peraturan No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan parameter yang jelas termasuk izin usaha pertambangan yang tumpang-tindih dengan Kontrak Karya yang masih aktif dan sudah ada sebelumnya, sebagai dasar pencabutan izin usaha pertambangan oleh Menteri dan Gubernur. Berdasarkan peraturan ini, KESDM bermaksud untuk melaksanakan pembagian lewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pertambangan sesuai amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dampak Peraturan 43 ini terhadap Perseroan dalam hal ini adalah netral.

i. PP No. 77/2014

Pada tanggal 14 Oktober 2014, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2014 ("PP No.77/2014"), yang merupakan amandemen ketiga terhadap PP No.23/2010. Ketentuan PP No.77/2014 akan memiliki dampak terhadap pemegang kontrak karya dan IUP, pada khususnya, kontrak atau izin yang dimiliki oleh pemegang saham asing. PP No.77/2014 mengatur antara lain sebagai berikut:

- bahwa perpanjangan kontrak karya akan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); dan

36. Contingent assets and liabilities (continued)

g. MEMR Regulation on Domestic Added Value (continued)

Pursuant to GR No. 23/2010 and Reg No. 7/2012, certain metal minerals, including nickel, are regarded as mining commodities, the value of which can be added to through processing and/or refining activities. As such, nickel must be processed and/or refined within the country in accordance with the minimum threshold provided in Reg No. 7/2012.

CoW holders that have been producing prior to the issuance of the Regulation must:

- make adjustments to the processing and/or refining minimum threshold plan to be in accordance with the limit set out above within five years of the issuance of the 2009 Mining Law; and
- submit periodic reports on the development of the adjustments to the processing and/or refining minimum limit plan to the Director General of Minerals and Coal for evaluation.

In the event that CoW holders cannot make the above mentioned adjustment or cannot do so through cooperation with other parties, they must consult with the Director General.

Management believes that the Company's products have satisfied the requirement.

The Government has issued an export duty regulations package, consisting of, amongst others, the Minister of Trade Regulation No. 29 of 2012 on Export Control and Clearance Scheme, Director General of Minerals and Coal Regulation No. 574.K/30/DJB/2012 on Procedures and Requirements for Mining Product Export Recommendation, and Minister of Finance Regulation No. 75/PMK.011/2012 on Stipulation of Export Products which are Subject to Export Duty and Tarrif. Overall, management believes that these regulations do not apply to the Company. The Company's Nickel in Matte product is HS 7501.10.00.00 (i.e., different from what is covered in the regulations).

The 2014 CoW executed on October 17, 2014 confirms that the Company has fulfilled the domestic value-adding obligations.

h. MEMR Regulation on Evaluation Procedures for Issuance of Mineral and Coal Mining Business Licences

On December 30, 2015 MEMR issued Regulation No. 43 of 2015 on the Evaluation Procedures for Issuance of Mineral and Coal Mining Business Licences ("Regulation 43"), which sets clear parameters, including overlapping mining business licenses with existing and active COWs, as the basis for revocation of mining business licenses by the Minister or Governors. Based on this Regulation, the MEMR sought to implement the distribution of authority between central and local government on the mining sector, as mandated by Law No. 23 of 2014 on the Regional Government. The impact of Regulation 43 on the Company is neutral.

i. GR No. 77/2014

On October 14, 2014, the Government issued Government Regulation No.77 of 2014 ("GR No.77/2014") being the third amendment to GR No.23 of 2010. The provisions under GR No.77/2014 will affect the holders of CoW as well as the holders of IUP, in particular, those owned by foreign shareholders. GR No.77/2014 sets out, among other things:

- that the form of extension of contracts of work will be a special mining business permit (IUPK); and

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

i. PP No. 77/2014 (lanjutan)

- bahwa pemegang izin pertambangan (baik IUP maupun IUPK) dengan modal asing yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurniannya sendiri (pemegang IUP atau IUPK terintegrasi) diwajibkan untuk melakukan divestasi saham sekurangnya sebesar 40% kepada peserta Indonesia dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak ditetapkannya PP No.77/2014.

j. Peraturan KESDM tentang Divestasi

Pada 13 September 2013, KESDM menerbitkan Peraturan No.27 Tahun 2013 ("PerMen No. 27/2013"). PerMen No.27/2013, yang merupakan salah satu peraturan pelaksana penting dari PP No. 23/2010, PP No. 24/2012 dan PP No. 77/2014, menjelaskan tata cara dan penetapan harga divestasi saham, serta perubahan penanaman modal di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.

PerMen No. 27/2013 menjelaskan bahwa seluruh pemegang Kontrak karya wajib mengikuti tata cara divestasi, tata cara pembayaran, dan mekanisme penetapan harga yang diatur dalam PerMen No. 27/2013 sejak tanggal berlakunya peraturan ini. Mengingat bahwa divestasi merupakan salah satu butir dalam amendemen Kontrak Karya, Perseroan akan merujuk pada PerMen No. 27/2013 hanya apabila KK 2014 tidak mengatur hal dimaksud.

k. Peraturan Ekspor

Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 sebagai perubahan kedua atas PP No. 23/2010, telah diubah melalui PP No. 24/2012 ("PP No. 1/2014"). Untuk melaksanakan PP No. 1/2014, pada tanggal yang sama, Menteri ESDM juga mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2014 ("PerMen ESDM 1/2014") untuk menggantikan PerMen No. 7/2012 dan PerMen No. 20/2013. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pada prinsipnya, setiap bijih mentah tidak diperbolehkan untuk diekspor terhitung sejak 12 Januari 2014. Konsentrat didefinisikan sebagai produk olahan. Berdasarkan PerMen ESDM 1/2014, pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUP Operasi Produksi non-logam harus melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sesuai dengan batas minimum sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan tersebut. Sebagai bagian dari peraturan larangan ekspor, produk Perseroan saat ini, yaitu nickel in matte, memenuhi batas minimum yang ditetapkan dalam PerMen ESDM 1/2014.

Selain itu, Menteri Keuangan menerbitkan pajak ekspor produk mineral melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 tanggal 11 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Peraturan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Pajak dan Tarif Pajak. Tarif ekspor ini hanya berlaku untuk konsentrat. Konsentrat didefinisikan sebagai produk olahan.

Untuk memperjelas ketentuan dalam PP No. 1/2014 dan PerMen ESDM 1/2014 yang menyatakan "jumlah tertentu", terdapat juga Peraturan Menteri No. 04/M-DAG/PER/1/2014 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan. Peraturan tersebut mengatur kewajiban untuk memverifikasi klasifikasi dari produk mineral, kewajiban untuk mendaftar sebagai eksportir resmi pada Kementerian Perdagangan dan kewajiban untuk memperoleh persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan. Persyaratan ini berlaku untuk konsentrat.

Pada akhir Desember 2015, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri No.119/M-DAG/PER/12/2015 ("Permendag 119/2015") mengenai Ketentuan Hasil Ekspor hasil Pengolahan dan Pemurnian. Permendag 119/2015 mengatur antara lain kewajiban untuk memperoleh Izin Ekspor bagi produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian, ekspor tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP/IUPK Operasi Produksi yang berstatus *Clean and Clear*, pemegang IUP khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

i. GR No. 77/2014 (continued)

- that mining permit holders (IUP holders and IUPK holders) with foreign capital which perform its own processing and/or refining (integrated IUP or IUPK holder) are required to divest at least 40% of its shares to Indonesian participants within, at the latest, five years as of enactment of GR No.77/2014.

j. MEMR Regulation on Divestment

On September 13, 2013, MEMR issued Regulation No.27 of 2013 ("Reg No. 27/2013"). Reg No. 27/2013, which is one of the important implementing regulations of GR No. 23/2010, GR No. 24/2012 and GR No. 77/2014, outlines the procedures and determination of share divestment prices and also changes of investment particulars in the mineral and coal mining business.

Reg No. 27/2013 provides that all CoW holders must follow the divestment procedure, payment procedure, and pricing mechanism provided in Reg No. 27/2013 from its issuance date. As divestment is one of the CoW amendment items, the Company shall refer to Reg No.27/2013 only if the 2014 CoW is silent on the matter.

k. Export Regulations

On January 11, 2014, the Government issued Government Regulation No. 1 of 2014 as the second amendment to GR No.23 as amended by GR No.24/2012 ("GR No. 1/2014"). To implement GR No.1/2014, on the same date, the MEMR also issued Regulation No. 1 of 2014 ("MEMR Reg 1/2014") to replace Reg No. 7/2012 and Reg No. 20/2013. Based on these regulations, in principle, any raw material is prohibited to be exported as from January 12, 2014. Concentrate is defined as processed product. Under MEMR Reg 1/2014, metal mineral IUP Operation Production holders and non-metal mineral IUP Operation Production holders must conduct domestic processing and refining in accordance with the minimum threshold as provided in the attachment to this regulation. As part of the export ban regulations, the Company's current product, i.e. nickel in matte, satisfies the minimum thresholds set out in the MEMR Reg 1/2014.

In addition, the Minister of Finance issued an export tax of mineral products through Minister of Finance Regulation No. 6/PMK.011/2014 dated January 11, 2014 on the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 75/PMK.011/2012 on the Stipulation of Export Goods Subject to Tax and Tax Tariff. This export tariff only applies to concentrate. Concentrate is defined as processed product.

To clarify provisions in GR No. 1/2014 and MEMR Reg 1/2014 stating "certain amount", there is also Ministerial Regulation No. 04/M-DAG/PER/1/2014 issued by the Minister of Trade. It regulates obligations to verify classification of mineral products, obligation to register as an official exporter and obligations to obtain export approval from the Minister of Trade. These requirements apply to concentrate.

At the end of December 2015, the Minister of Trade issued Ministerial Regulation No. 119/M-DAG/PER/12/2015 ("MoT Reg 119/2015") on the Provision of Export of the Processed and Refined Mining Product. MoT Reg 119/2015 regulates among other the obligation to obtain Export License for the processed and refined minerals, the export of the processed and refined mining products can be conducted by Clean and Clear Operation Production IUP/IUPK, Operation Production IUP for the processing and refining.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

36. Contingent assets and liabilities (continued)

k. Peraturan Ekspor (lanjutan)

k. Export Regulations (continued)

Bagi Perseroan, yang produknya termasuk dalam Lampiran 1 dari Peraturan Menteri Perdagangan ini, kewajiban tambahannya adalah untuk melakukan verifikasi atas klasifikasi produk Perseroan dan untuk mendaftar sebagai eksportir resmi.

For the Company, which its product falls under Attachment 1 of the Minister of Trade regulation, the additional obligations are to verify the classification of the Company's product and to register as an official exporter.

Pada tanggal 8 Februari 2014, Perseroan memperoleh surat pengakuan dari Menteri Perdagangan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sesuai surat No.5/DAGLU/ET-PPHPP/2/2014.

On February 18, 2014, the Company obtained the recognition letter from the Minister of Trade as a Registered Exporter for Processed and Refined Mining Products as stated in its letter No.5/DAGLU/ET-PPHPP/2/2014.

l. Tuntutan hukum

l. Litigation

Pada pertengahan bulan Desember 2015, Perseroan memperoleh kutipan putusan Mahkamah Agung RI mengenai Perkara No. 1279 K/Pid.Sus/2012 sehubungan dengan dugaan pelanggaran UU Kehutanan 1999 dan UU Lingkungan Hidup 1997. Putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa keempat mantan karyawan Perseroan bersalah dan menghukum keempatnya dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan bahwa Perseroan dijatuhi hukuman denda sebesar IDR5 miliar (nilai penuh). Putusan juga menghukum agar kendaraan-kendaraan sebagaimana tersebut di bawah ini disita oleh Negara:

In December 2015, the Company obtained an excerpt of the Supreme Court decision regarding Case No. 1279 K/Pid.Sus/2012 with respect to the alleged violations of the 1999 Forestry Law and the 1997 Environmental Law, on September 2015. The decision particularly stated that four (4) former employees of the Company are guilty as charged and therefore, sentenced them with imprisonment of two (2) years; and that the Company is ordered to pay a fine of IDR5 billion (full amount). The decision also ordered that vehicles of the Company are to be seized by the State:

- 1 (satu) unit mobil *double handle* merek Ford Everest 2.5 L MT warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Kerangka Dozer merek Komatsu tipe D85 SS;
- 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper;
- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu D-Max 4WD Pick Up.

- 1 (one) unit of double handle car namely Ford Everest 2.5 L MT in grey color;
- 1 (one) unit Dozer Frame of Komatsu type D85 SS;
- 1 (one) unit of Toyota Land Cruiser 4WD Longbase Trooper;
- 1 (one) unit of Isuzu D-Max 4WD Pick Up.

Faktanya, Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau dijadikan terdakwa dalam perkara, akan tetapi Mahkamah Agung RI justru menghukum Perseroan untuk membayar denda dan menyerahkan kendaraan-kendaraan sebagaimana tersebut di atas. Perseroan meyakini bahwa Majelis Hakim di Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan dengan menghukum Perseroan; dan karenanya Perseroan (dan keempat individual) tengah mempersiapkan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ("PK") atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Namun demikian, Perseroan perlu untuk mengemukakan kewajiban untuk membayar denda sebesar IDR5 miliar (nilai penuh), meskipun Perseroan akan mengajukan Permohonan PK dalam perkara ini.

In fact, the Company has actually neither been named as a suspect nor determined as a defendant in the case, but the Supreme Court punished the Company to pay a fine and surrender the above mentioned vehicles. The Company believe that it is actually an error made by the Panel of Judges in the Supreme Court by punishing the Company; and therefore the Company (and the four individuals) are preparing to submit a Reconsideration (Peninjauan Kembali - "PK") against the Supreme Court decision. However, the Company still needs to disclose the obligation to pay fine of IDR5 billion, even though the Company will submit PK application on the case.

m. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Letter of Credit

m. Minister of Trade Regulation on Letter of Credit

Pada tanggal 5 Januari 2015, Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan No.04/M-Dag/Per/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu ("Permendag 04/2015"). Peraturan tersebut mengatur, antara lain, bahwa ekspor atas barang tertentu, termasuk nikel matte, wajib menggunakan cara pembayaran letter of credit; dan pembayaran harus diterima melalui bank devisa di dalam negeri.

On January 5, 2015, the Minister of Trade issued Regulation No.04/M-Dag/Per/1/2015 on the Use of Letter of Credit for the Export of Certain Goods ("Regulation 04/2015"). The regulation stipulates, among others, that letter of credit payment must be used in export of certain goods, including nickel matte; and it must be received through a domestic foreign exchange bank.

Sehubungan dengan terbitnya Permendag 04/2015, Menteri Perdagangan kemudian mengeluarkan Peraturan No.26/M-Dag/Per/3/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* ("L/C") untuk Ekspor Barang Tertentu. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sejak bulan Mei 2015 Perseroan telah mulai mempergunakan L/C dalam ekspor nikel *matte*.

In relation to the issuance of Regulation 04/2015, the Minister of Trade also issued Regulation No.26/M-Dag/Per/3/2015 regarding the Specific Requirements on the Implementation of Letter of Credit ("L/C") for the Export of Certain Goods. In compliance with prevailing regulation, as of May 2015 the Company started to use L/C in the export of nickel matte.

Pada tanggal 31 Agustus 2015, Menteri Perdagangan mengeluarkan amandemen terhadap Permendag 04. Satu-satunya perubahan adalah dihapusnya sektor minyak dan gas bumi dari lampiran Permendag 04. Dengan demikian, produk minyak dan gas bumi (kecuali minyak kelapa sawit) tidak lagi dikenakan persyaratan penggunaan L/C. Nikel *matte*, namun demikian, masih berada dalam daftar barang yang tunduk pada ketentuan penggunaan L/C.

On August 31, 2015, the Minister of Trade issued an amendment to Regulation 04. The only change is deletion of the oil and gas sector in the attachment to Regulation 04. This means oil and gas products (except crude palm oil) are no longer subject to the L/C requirement. Nickel matte, however, remains in the list of goods that are subject to the L/C requirement.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

n. Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah

Pada tanggal 31 Maret 2015, Bank Indonesia ("BI") menerbitkan Peraturan No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("PBI 17"). PBI 17 secara umum mewajibkan penggunaan Rupiah untuk transaksi dalam negeri mulai 1 Juli 2015, dengan beberapa pengecualian tertentu. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 2015, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai peraturan pelaksana dari PBI 17.

Setelah melakukan analisis hukum yang mendalam, pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan menyampaikan surat kepada Bank Indonesia untuk menjelaskan posisinya; yaitu tidak tunduk pada PBI berdasarkan Kontrak Karya. Namun demikian, dengan itikad baik dan tanpa mengesampingkan hak-haknya berdasarkan Kontrak Karya, Perseroan akan, atas diskresinya sendiri, mengidentifikasi dan menegosiasikan kontrak-kontrak yang secara wajar lebih tepat untuk dibayarkan dalam Rupiah.

Bank Indonesia telah menanggapi surat Perseroan melalui surat No. 17/2430/DKSP tanggal 30 Oktober 2015 yang pada intinya menyetujui usulan Perseroan untuk tetap menggunakan mata uang selain Rupiah dalam transaksi-transaksinya sampai dengan berakhirnya Kontrak Karya. BI meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian kontrak-kontrak yang transaksinya dapat menggunakan Rupiah dan melaporkan hasil penyesuaian dimaksud kepada BI setiap enam bulan.

o. Peraturan ESDM tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha dan Daerah Tertentu

Pada tanggal 13 Mei 2015, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan No. 16 Tahun 2015 untuk menentukan kriteria dan/atau persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha dan daerah tertentu. Pengolahan dan pemurnian nikel (smelter) termasuk sebagai salah satu bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas ini. Selain itu, Sulawesi merupakan salah satu daerah yang dapat diberikan fasilitas ini. Perseroan berencana untuk mengajukan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan ini untuk rencana-rencana investasinya.

37. Informasi tambahan untuk Laporan Arus Kas

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

31 Desember	2015	2014	December 31
		(US Dollars, in thousands)	
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang	131	(949)	Acquisition of fixed assets through incurrence of payables

38. Informasi setelah tanggal neraca

Bapak Josimar Pires, sebagai Direktur Perseroan, menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Direksi Perseroan pada tanggal 4 Januari 2016. Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi akan terdiri dari 3 Direktur hingga RUPST menerima pengunduran diri Bapak Josimar dan menunjuk Direktur baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Bapak Josimar Pires tersebut.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

n. Bank Indonesia Regulation on Obligation to Use Rupiah

On March 31, 2015, the Bank Indonesia ("BI") issued Regulation No. 17/3/PBI/2015 regarding the Obligation to Use Rupiah in the Territory of the Republic of Indonesia ("PBI 17"). PBI 17 generally calls for the use of Rupiah for domestic transactions beginning July 1, 2015, subject to certain exceptions. Further, on June 1, 2015, the Bank of Indonesia issued Circular Letter No.17/11/DKSP on Obligation to Use Rupiah Within the Territory of the Republic of Indonesia, as the implementing guidance of PBI 17.

After conducting detailed legal analysis, on June 30, 2015, the Company sent a letter to the Bank of Indonesia explaining its position; not to be subject to PBI 17 based on the CoW. In good faith, however, the Company will, at its own discretion and without prejudicing its rights under the CoW, identify and negotiate contracts that are reasonably more suitable to be paid in Rupiah.

Bank Indonesia has responded to our letter by their letter No. 17/2430/DKSP dated October 30, 2015 which essentially approved the Company's proposal to continue using currency other than IDR in its transactions until the expiry of the CoW. BI asked the Company to adjust its contracts that can use IDR and to provide BI with the report on the adjustments every six months.

o. MEMR Regulation on Income Tax Facility for Capital Investment in Certain Business and Area

On May 13, 2015, the MEMR issued Regulation No. 16 of 2015 to determine the criteria and/or requirement to obtain income tax facility for capital investment in certain business and area. Nickel processing and refining business (smelter) is included as one of the businesses that are eligible for the facilities. In addition, Sulawesi is of the areas that are eligible for the facilities. The Company plans to apply for income tax facilities under this regulation for its investment plans.

37. Supplementary information for Statement of Cash Flows

Significant activities not affecting cash flows:

31 Desember	2015	2014	December 31
		(US Dollars, in thousands)	
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang	131	(949)	Acquisition of fixed assets through incurrence of payables

38. Subsequent event

Mr. Josimar Pires, as the Director of the Company, tendered his resignation from the Board of Directors of the Company on January 4, 2016. In accordance to the Company's Articles of Association, the Board of Directors consists of three directors until the AGMS accept Mr. Josimar's resignation and appoint a new director to fill the vacant position left by Mr. Josimar Pires.



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia

Telephone +62 (0) 21 574 2333
+62 (0) 21 574 2888
Fax +62 (0) 21 574 1777
+62 (0) 21 574 2777

Laporan Auditor Independen

No.: L.15 - 3886 - 16/II.25.001

Para Pemegang Saham,
Komisaris dan Direksi
PT Vale Indonesia Tbk:

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report

No.: L.15 - 3886 - 16/II.25.001

The Shareholders,
Commissioners and Directors
PT Vale Indonesia Tbk:

We have audited the financial statements of PT Vale Indonesia Tbk, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2015, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini


Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Vale Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Vale Indonesia Tbk as of 31 December 2015, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Siddharta Widjaja & Rekan



Jongky Titus Lazuardi, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 1082

Jakarta, 25 Februari 2016

Jakarta, 25 February 2016

Daftar istilah

Glossary

ISTILAH PERTAMBANGAN DAN PROSESNYA		GLOSSARY OF MINING AND PROCESSING TERMS
Area yang secara operational sudah berjalan sustain sudah memiliki infrastruktur dan pabrik pengolahan.	Brownfield	A sustained operational area equipped with infrastructure and processing plants.
Area yang masih baru yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan pabrik pengolahan	Greenfield	A new area that still requires development in infrastructure and processing plants.
Kalsin adalah produk yang dihasilkan tanur pereduksi dan berfungsi sebagai bahan untuk tanur peleburan listrik.	Kalsin Calcine	The output of a reduction kiln. Calcine serves as the feed material for our electric smelting furnaces.
Jenis bijih yang banyak terdapat di blok pertambangan Sorowako Timur dan juga di daerah pertambangan Petea. Kandungan mineral dari tipe bijih ini lebih seragam bila dibandingkan dengan tipe bijih di Sorowako Barat, karena bijih itu berada dalam batu-batuan peridotite yang mengandung mineral serpentine dan tanah liat saprolite dengan kandungan serpentine.	Bijih Dari Timur East-Type Ore	The type of ore prevalent in our Sorowako East mining block and also in our Petea mining location. Mineralization in this type of ore is more uniform than in West-type ore, since it is contained within serpentinized peridotite boulders and serpentine saprolite clay.
Matte tanur adalah hasil dari proses peleburan, dan digunakan sebagai umpan untuk alat pengubah.	Matte Tanur Furnace Matte	The product of the smelting process, used as the feed product for the converters.
Tanah merah yang terdiri dari tanah liat yang diperkaya dengan kandungan nikel, sebagai bahan untuk membuat bijih nikel. Laterite juga mengandung banyak besi, magnesium dan kobalt. Laterite merupakan hasil dari proses laterisasi batu yang terbentuk oleh panas, peridotite. Laterite terdiri dari dua lapisan, lapisan bawah yang mengandung saprolite dan lapisan di atasnya yang mengandung limonite.	Laterite	A red-colored soil composed of clay that is sufficiently enriched in nickel to make nickel ore. Laterite is also enriched in iron, magnesium and cobalt. It results from the laterization (a weathering process) of a type of igneous rock called peridotite. Laterite consists of two layers: a lower layer of saprolite and an overlying zone of limonite.
Bursa Logam London adalah pasar komoditas untuk perdagangan bahan dasar dan logam, termasuk nikel. Setiap hari, produsen, pembeli dan penjual menggunakan LME sebagai akses ke harga nikel di pasar terbuka yang banyak digunakan di industri sebagai harga acuan dalam transaksi.	Bursa Logam London London Metal Exchange	The London Metal Exchange (LME) is a terminal market for the trading of materials and metals, including nickel. Producers, consumers and traders use the LME to reach, on a daily basis, open market prices for nickel, which are widely used throughout the industry as reference prices for physical transactions.
1.000.000 watt, ukuran untuk tenaga.	Megawatt (MW)	1,000,000 watts; a measure of power.
Kumpulan mineral dengan kandungan logam secara alami yang memiliki nilai jual.	Endapan Mineral Mineral Deposit	A naturally occurring concentration of minerals containing metals of economic interest.
Produk setengah jadi yang dapat dijual secara komersial yang berasal dari bijih yang mengandung nikel. Nikel dalam matte adalah produk utama kami.	Nikel Dalam Matte Nickel In Matte	An intermediate product in the production of commercially saleable nickel, made from nickel containing ores. Nickel in matte is our principal product.

Daftar istilah

Glossary

ISTILAH PERTAMBANGAN DAN PROSESNYA		GLOSSARY OF MINING AND PROCESSING TERMS
Jenis pertambangan dimana seluruh kegiatan penambangannya dilakukan di permukaan tanah.	Tambang Terbuka Open Pit Mining	A type of mining where all activity occurs on surface.
Bagian dari endapan mineral yang diekstraksi.	Bijih Ore	The economic portion of a mineral deposit that is extracted and processed.
Lapisan sisa bernilai rendah yang harus dibuang untuk mencapai bijih di daerah pertambangan kami.	Lapisan Sisa Overburden	The low-value waste layer that must be removed at a mining site in order to access ore.
Tabung panjang berputar dengan diameter besar yang digunakan untuk memanaskan bijih sampai 750 derajat Celcius dan pada titik tersebut, bijih bereaksi secara kimiawi dan sudah siap untuk dimasukkan ke dalam tanur peleburan listrik.	Tanur Pereduksi Reduction Kiln	A long, large diameter rotating cylinder that is used to heat ore to about 750 degrees Celsius. At this temperature the ore undergoes a chemical reaction, making it suitable for introduction into the electric smelting furnace.
Persiapan dan pembentukan permukaan tanah dari daerah purna tambang untuk mengatur erosi dan memungkinkan revegetasi.	Reklamasi Reclamation	The preparation and landscaping of formerly mined-out areas in order to control erosion and allow revegetation.
Penanaman dengan tanaman penutup dan pelopor pada daerah paska reklamasi.	Revegetasi Revegetation	The planting with cover crops and pioneer trees of areas post-reclamation.
Penanaman tanaman lokal di daerah revegetasi setelah satu sampai dua tahun untuk mengembalikan daerah ke bentuk alaminya.	Rehabilitasi Rehabilitation	Planting of native trees in areas one to two years after revegetation in order to return each area to its original state.
Lokasi pada pertambangan kami, dimana bahan mentah dimasukkan ke dalam proses pengolahan awal, termasuk pembersihan dari batu-batuan dan lain lainnya.	Stasiun Penyaring Screening Station	A location at a mining site where mineralized material is brought for initial processing, including removal of low-grade boulders and other waste material.
Proses pengolahan kalsin, sebagai hasil dari tanur pereduksi, dilebur dengan tanur listrik untuk memisahkan terak dari campuran nikel-sulfur-besi yang terdapat dalam kalsin. Proses ini menghasilkan matte tanur listrik.	Smelting	A process whereby calcine, the output of the reduction kiln, is melted through the use of an electric arc furnace, separating slag from the denser nickel-sulphur-iron mixture. This process produces electric furnace matte.
Jenis bijih ini banyak terdapat di blok tambang Sorowako Barat. Mineralisasi bijih dari jenis ini terkonsentrasi di tanah liat saprolite yang kaya dengan goethite; batu-batuan peridotite yang tidak mengandung mineral serpentine di dalam bijih jenis ini termasuk berkadar nikel sangat rendah.	Bijih Dari Barat West-Type Ore	The type of ore prevalent in our Sorowako West mining block. Mineralization in this type of ore is concentrated in goethite-rich saprolite clay. The unserpentinized peridotite boulders present in this ore type has a very low nickel content.
Satu ton material, termasuk berat air yang terkandung di dalamnya.	Ton Basah Wet Ton	One ton of material and the free water associated with it.

Referensi silang Peraturan Bapepam-LK No X.K.6

Cross Reference of BAPEPAM-LK Regulation No X.K.6

No.	Peraturan	Halaman Page	No.	Regulation
A. Ketentuan Umum			A. General Provisions	
1)	Laporan Tahunan wajib memuat:		1)	The Annual Report should contain:
a.	ikhtisar data keuangan penting;	112-113	a.	Summary of Key Financial Information;
b.	laporan Dewan Komisaris;	88-97	b.	report from the BOC;
c.	laporan Direksi;	98-111	c.	report from the BOD;
d.	profil perusahaan;	18-87	d.	company profile;
e.	analisis dan pembahasan manajemen;	114-181	e.	management analysis and discussion;
f.	tata kelola perusahaan;	214-325	f.	corporate governance;
g.	tanggung jawab sosial perusahaan;	326-357	g.	corporate social responsibilities;
h.	laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	360-436	h.	audited financial statements; and
i.	surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.	358-359	i.	statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the Annual Report.
2)	Laporan Tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka Laporan Tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah Laporan Tahunan dalam bahasa Indonesia.	√	2)	The Annual Report must be in the Indonesian language. If the Annual Report is also presented in another language, either in the same or separate documents, the documents must be available at the same time and contain the same material information. In cases where there is any different interpretation due to the transfer of language, the financial statement in the Indonesian language shall become the reference.
3)	Laporan Tahunan wajib dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Gambar, grafik, tabel, dan diagram disajikan dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas.	√	3)	The Annual Report should be prepared in a form that is easy to read. Images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and / or clear description.
4)	Laporan Tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.	√	4)	The Annual Report must be printed on light colored paper of high quality, in A4 size, bound, and in a format that permits reproduction by photocopy.
B. Ikhtisar Data Keuangan Penting			B. Summary of Key Financial Information	
1)	Ikhtisar data keuangan penting disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya. Jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, yang memuat paling kurang:	112-113	1)	Summary of Key Financial Information is presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business of the company, at least contain:
a.	pendapatan;	√	a.	income;
b.	laba bruto;	√	b.	gross profit;
c.	laba (rugi);	√	c.	profit (loss);
d.	jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	d.	total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
e.	total laba (rugi) komprehensif;	√	e.	total comprehensive profit (loss);
f.	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	f.	total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
g.	laba (rugi) per saham;	√	g.	earning (loss) per share;
h.	jumlah aset;	√	h.	total assets;
i.	jumlah liabilitas;	√	i.	total liabilities;
j.	jumlah ekuitas;	√	j.	total equities;
k.	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	√	k.	profit (loss) to total assets ratio;
l.	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	√	l.	profit (loss) to equities ratio;
m.	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;	√	m.	profit (loss) to income ratio;
n.	rasio lancar;	√	n.	current ratio;

Referensi silang Peraturan Bapepam-LK No X.K.6

Cross Reference of BAPEPAM-LK Regulation No X.K.6

No.	Peraturan	Halaman Page	No.	Regulation
	o. rasio liabilitas terhadap ekuitas;	√		o. liability to equity ratio;
	p. rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	√		p. liability to total assets ratio; and
	q. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya.	√		q. other information and financial ratios relevant to the company and type of industry.
2)	Laporan Tahunan wajib memuat informasi mengenai saham yang diterbitkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling kurang meliputi:	68-71	2)	The Annual Report should contain information with respect to shares issued for each three-month period in the last two (2) fiscal years (if any), at least covering:
	a. jumlah saham yang beredar;	68		a. number of outstanding shares;
	b. kapitalisasi pasar;	69-70		b. market capitalization;
	c. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan	69		c. highest share price, lowest share price, closing share price; and
	d. volume perdagangan.	68		d. share volume.
3)	Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, maka informasi harga saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2), wajib ditambahkan penjelasan antara lain mengenai:	71	3)	In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and decrease in par value of shares, then the share price referred to in point 2), should be added with explanation on:
	a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	√		a. date of corporate action;
	b. rasio stock split, reverse stock, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai saham;	√		b. stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and reduce par value of shares;
	c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	√		c. number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
	d. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	√		d. share price prior to and after corporate action.
4)	Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (suspension) dalam tahun buku, maka Laporan Tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut.	n.a	4)	In the event that the company's shares were suspended from trading during the year under review, then the Annual Report should contain explanation on the reason for the suspension.
5)	Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 4) masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.	n.a	5)	In the event that the suspension as referred to in point 4) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the issue.
C.	Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:	88-89	C.	The Board of Commissioners Report The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
	1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan;	91		1) assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company.
	2) pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi; dan	95		2) view on the prospects of the company's business as established by the Board of Directors, and
	3) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).	96		3) changes in the composition of the Board of Commissioners (if any).
D.	Laporan Direksi Laporan Direksi paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:	98-111	D.	The Board of Directors Report The Board of Directors Report should at least contain the following items:
	1) kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;	100-105		1) the company's performance, i.e. strategic policies, comparison between achievement of results and targets, and challenges faced by the company;
	2) gambaran tentang prospek usaha;	109-110		2) business prospects;
	3) penerapan tata kelola perusahaan; dan	105-107		3) implementation of Good Corporate Governance by the company; and
	4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).	111		4) changes in the composition of the Board of Directors (if any).

No.	Peraturan	Halaman Page	No.	Regulation
E.	Profil Perusahaan Profil perusahaan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:	19-87	E.	Company Profile The Company Profile should at least contain the following:
	1) nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat eletronik (e-mail), dan laman (website) perusahaan dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan, yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan;	20-22		1) name, address, telephone and/or facsimile, email, website of the company and/or branch offices or representative office, which enable public to access information about the company;
	2) riwayat singkat perusahaan;	23		2) brief history of the company.
	3) kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir, serta jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan;	30		3) line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced.
	4) struktur organisasi perusahaan dalam bentuk bagan, paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	54-55		4) structure of organization in chart form, at least one level below the Board of Directors, with the names and titles;
	5) visi dan misi perusahaan;	38		5) vision and mission of the company:
	6) profil Dewan Komisaris, meliputi:	74-83		6) the Board of Commissioners profiles include:
	a. nama;	√		a. name;
	b. riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS;	√		b. history of position, working experience, and legal basis for first appointment to the Issuer or Public company, as stated in the minutes of GMS resolutions.
	c. riwayat pendidikan;	√		c. history of education;
	d. penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√		d. short description on the competency enhancement training programs for members of the Board of Commissioners during the year under review (if any); and
	e. pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);	247		e. disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and shareholders (if any);
	7) profil Direksi, meliputi:			7) the Board of Directors profiles include:
	a. nama dan uraian singkat tentang tugas dan fungsi yang dilaksanakan;	84-87		a. name and short description of duties and functions;
	b. riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS;	84-87		b. history of position, working experience, and legal basis for first appointment to the Issuer or Public Company, as stated in the minutes of GMS resolutions.;
	c. riwayat pendidikan;	84-87		c. history of education;
	d. penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	269-270		d. short description on the competency enhancement training programs for members of the Board of Commissioners during the year under review (if any); and
	e. pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan pemegang saham (jika ada);	272		e. disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and shareholders (if any);
	8) dalam hal terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terakhir dan sebelumnya;	√		8) in the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted as refer to in point 1 letter a, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report.
	9) jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya dalam tahun buku misalnya, aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dilakukan;	184-205		9) number of employees and description of competence building during the year under review, for example education and training of employees.
	10) uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku yang terdiri dari:	66-67		10) information on names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
	a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	66-67		a. shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
	b. Komisaris dan Direktur yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	67		b. Commissioner and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and
	c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	66-67		c. groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% ownership shares of the Issuers or Public Company.

Referensi silang Peraturan Bapepam-LK No X.K.6

Cross Reference of BAPEPAM-LK Regulation No X.K.6

No.	Peraturan	Halaman Page	No.	Regulation
11)	informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram;	64-65	11)	information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
12)	nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada). Untuk entitas anak, agar ditambahkan informasi mengenai alamat;	n.a	12)	name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, business, and operating status of the company (if any). For subsidiaries, include the addresses;
13)	kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan (jika ada);	71	13)	chronology of share listing and changes in the number of shares from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the company shares are listed.
14)	kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada);	71	14)	chronology of securities listing and rating of the securities (if any);
15)	nama dan alamat perusahaan pemeringkat Efek (jika ada);	72-73	15)	name and address of the securities rating company (if any);
16)	nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal. Terhadap profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, fee, dan periode penugasan yang telah dilakukan; dan	72-73	16)	name and address of capital market supporting institutions and/or professionals. For professionals providing services regularly for the Issuer or Public Company, it is required to disclose the services, fees, and periods of assignment; and
17)	penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada).	52-53	17)	awards and certifications of national and international scale bestowed on the company during the last fiscal year (if any).
F.	Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan wajib memuat uraian yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling kurang mencakup:	114-181	F.	Management Analysis and Discussion Annual Report should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1)	tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai:	116-149	1)	operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a.	produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	118-119	a.	production, including process, capacity, and growth;
b.	pendapatan; dan	119	b.	income; and
c.	profitabilitas;	149	c.	profitability;
2)	analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, antara lain mengenai:	119-149	2)	comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a.	aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	134-143	a.	current assets, non-current assets, and total assets;
b.	liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	143-148	b.	short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c.	ekuitas;	148	c.	equity
d.	pendapatan, beban, laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; serta	119-131	d.	sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit(loss); and
e.	arus kas;	131-133	e.	cash flows;
3)	kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	149-152	3)	the capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4)	tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	152	4)	accounts receivable collectability, including the computation of the relevant ratios;
5)	struktur permodalan dan kebijakan manajemen atas struktur permodalan tersebut;	152-153	5)	capital structure and management policies concerning capital structure;
6)	bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	154-157	6)	discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on the purpose of such ties, source of funds expected to fulfill the said ties, currency of denomination, and steps taken by the company to protect the position of a related foreign currency against risks;

No.	Peraturan	Halaman Page	No.	Regulation
7)	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan;	157	7)	material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (subsequent events);
8)	prospek usaha dari perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	157-159	8)	information on company prospects in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
9)	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan;	159	9)	comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning income, profit, capital structure, or others that deemed necessary for the company;
10)	target/proyeksi yang ingin dicapai perusahaan paling lama untuk satu tahun mendatang, mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur modal, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan;	160	10)	target/projection at most for the next one year, concerning income, profit, capital structure, dividend polixy, or others that deemed necessary for the company;
11)	aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar;	160-161	11)	marketing aspects of the company's products and services, among others marketing strategy and market share;
12)	kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir;	161-162	12)	Description regarding the dividend policy and the date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years;
13)	realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum:	162	13)	Use of proceeds from public offerings:
a.	dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka wajib diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	√	a.	during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b.	dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4, maka Emiten wajib menjelaskan perubahan tersebut;	n.a	b.	in the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in Rule No. X.K.4, then Issuer should explain the said changes;
14)	informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku (jika ada), yang antara lain memuat:	162-169	14)	Material information, among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review,among others include:
a.	tanggal, nilai, dan obyek transaksi;	√	a.	transaction date, value, and object;
b.	nama pihak yang bertransaksi;	√	b.	names of transacting parties;
c.	sifat hubungan afiliasi (jika ada);	√	c.	nature of related parties (if any);
d.	penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	√	d.	description of the fairness of the transaction;
e.	pemenuhan ketentuan terkait;	√	e.	compliance with related rules and regulations;
15)	perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	173-177	15)	changes in regulation which have a significant effect on the company and impacts on the company (if any):
16)	perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	177-178	16)	changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any).
G.	Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Tata kelola perusahaan memuat uraian singkat, yang paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut:	215-325	G.	Corporate Governance Corporate Governance contains short descriptions of at least the following items:
1)	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	236-249	1)	Board of Commissioners, including:
a.	uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;	237-240	a.	description of the responsibility of the Board of Commissioners;
b.	pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; dan	240-241	b.	disclosure of the procedure and basis determining remuneration, and amount of remuneration for members of the Board of Commissioners.
c.	pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;	241-244	c.	disclosure of the company's policy and its implementation, frequency of Board of Commissioners meetings including joint meetings with the Board of Directors, and attendance of the members of Board of Commissioners in the meetings.
2)	Direksi, mencakup antara lain:	260-274	2)	Board of Directors, including:
a.	ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	260-265	a.	scope of duties and responsibilities of erach member of the Board of Directors;

Referensi silang Peraturan Bapepam-LK No X.K.6

Cross Reference of BAPEPAM-LK Regulation No X.K.6

No.	Peraturan	Halaman Page	No.	Regulation
	b. pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan;	273-274		b. disclosure of the procedure and basis determining remuneration, and amount of remuneration for members of the Board of Directors, and the relation between remuneration and performance of the company;
	c. pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	265-269		c. disclosure of the company's policy and its implementation, frequency of Board of Commissioners meetings including joint meetings with the Board of Commissioners, and attendance of the members of Board of Commissioners in the meetings;
	d. keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	227-236		d. resolutions from the GMS of the previous fiscal year and its realization in the year under review, and explanation for the unrealized resolution; and
	e. pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi (jika ada);	272-273		e. disclosure of company policy concerning assessment on the performance of the member of the Board of Directors (if any);
3)	Komite Audit, mencakup antara lain:	254-260	3)	Audit Committee, includes among others:
	a. nama;	256-258		a. name;
	b. riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan;	256-258		b. history of position title, work experience and legal basis for appointment;
	c. riwayat pendidikan;	256-258		c. history of education;
	d. periode jabatan anggota Komite Audit;	259		d. tenure of members of Audit Committee;
	e. pengungkapan independensi Komite Audit;	256		e. disclosure of independence of the members of the Audit Committee;
	f. pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	260		f. disclosure of the company's policy and its implementation, frequency of Audit Committee meetings, and attendance of the members of Audit Committee in the meetings;
	g. uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) Komite Audit;	259-260; 323-325		g. brief report on the activities carried out by the Audit Committee during the year under review in accordance with the charter of the Audit Committee.
4)	komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi, yang mencakup antara lain:	249-254	4)	other committees owned by Issuer or Public Company supporting the functions and duties of the Board Directors and/or the Board of Commissioners, such as nomination and remuneration, including:
	a. nama;	74-83; 250		a. name;
	b. riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;	74-83		b. history of position title, work experience and legal basis for appointment;
	c. riwayat pendidikan;	74-83		c. history of education;
	d. periode jabatan anggota komite;	250		d. tenure of members of the committee;
	e. pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite;	251		e. disclosure of the company's policy concerning the independence of the committee;
	f. uraian tugas dan tanggung jawab;	251		f. description of duties and responsibilities;
	g. pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	254		g. disclosure of the company's policy and its implementation, frequency of committee meetings, and attendance of the members of committee in the meetings;
	h. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	252-254		h. brief report on the committee activities carried out during the year under review;
5)	uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;	274-277	5)	description of tasks and function of the Corporate Secretary;
	a. nama;	276		a. name;
	b. riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;	276		b. history of position title, work experience and legal basis for appointment;
	c. riwayat pendidikan;	276		c. history of education;
	d. periode jabatan sekretaris perusahaan;	276		d. tenure of the corporate secretary;
	e. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	274-275		e. brief report on Corporate Secretary activities carried out during the year under review;
6)	uraian mengenai unit audit internal meliputi:	281-287	6)	description of the company's internal audit unit;
	a. nama;	286		a. name;

No.	Peraturan	Halaman Page	No.	Regulation
	b. riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan;	286		b. history of position title, work experience and legal basis for appointment;
	c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	285		c. Qualification/certification of internal audit professionals (if any);
	d. struktur dan kedudukan unit audit internal;	285		d. structure or position of the internal audit unit;
	e. tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) unit audit internal; dan	281-283		e. duties and responsibilities of the internal audit unit according to the internal audit unit charter; and
	f. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku;	283-284		f. brief report on the committee activities carried out during the year under review;
7)	uraian mengenai sistem pengendalian interen (internal control) yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:	287-291	7)	description of the company's internal control, at least contains:
	a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	287-288		a. financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules;
	b. reviu atas efektivitas sistem pengendalian interen;	290		b. review the effectiveness of internal control systems;
8)	sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:	291-299	8)	risk management system implemented by the company, at least includes:
	a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan;	291		a. general description about the company's risk management system;
	b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	292-299		b. types of risk and the management; and
	c. reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan;	299		c. review the effectiveness of the company's risk management system;
9)	perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, antara lain meliputi:	299-300	9)	important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and Board of Directors, among others include:
	a. pokok perkara/gugatan;	√		a. substance of the case/claim;
	b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan	√		b. status of settlement of case/claim; and
	c. pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.	√		c. potential impacts on the financial condition of the company.
10)	informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada);	n.a	10)	Information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
11)	informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada) meliputi:	302-305	11)	information about codes of conduct and corporate culture (if any) includes:
	a. pokok-pokok kode etik;	302-303		a. key points of the code of conduct;
	b. pokok-pokok budaya perusahaan (corporate culture);	304-305		b. key points of the corporate culture;
	c. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	303-304		c. socialization of the code of conduct and enforcement; and
	d. pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan;	303		d. disclosure that the code of conduct is applicable for Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the company;
12)	uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise (jika ada); dan		12)	description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others are number, period, requirement for eligible employee and/or management, and exercised price (if any); and
13)	uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (jika ada), antara lain meliputi:	305-306	13)	description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company in reporting violations that may adversely affect the company and stakeholders (if any), including:
	a. cara penyampaian laporan pelanggaran;	√		a. mechanism for violation reporting;
	b. perlindungan bagi pelapor;	√		b. protection for the whistleblower;
	c. penanganan pengaduan;	√		c. handling of violation reports;
	d. pihak yang mengelola pengaduan; dan	√		d. unit responsible for handling of violation report; and
	e. hasil dari penanganan pengaduan.	n.a		e. results from violation report handling.

Referensi silang Peraturan Bapepam-LK No X.K.6

Cross Reference of BAPEPAM-LK Regulation No X.K.6

No.	Peraturan	Halaman Page	No.	Regulation
H.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)	326-355	H.	Corporate Social Responsibility
	1) Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:			1) discussion of corporate social responsibility covers policies, types of programs, and cost, among others related to:
	a. lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain;	345-349		a. environment, such as the use of environmentally friendly materials and energy, recycling, and the company's waste treatment systems, the company's environmental certifications, and others;
	b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (turnover) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain;	350-355		b. employment practices, occupational health and safety, including gender equality and equal work opportunity, work and safety facilities, employee turnover, work incident rate, training, etc;
	c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain; dan	328-344		c. social and community development, such as the use of local work force, empowerment of local communities, aid for public social facilities, social donations, etc; and
	d. tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	345-346		d. consumer protection related activities, such as consumer health and safety, product information, facility for consumer complaints, number and resolution of consumer complaint cases, etc.
	2) Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada Laporan Tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (sustainability report) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility report).	√		2) Issuers or the Public Company may impart information as referred to in point 1) in the Annual Report or in separate report submitted along with the Annual Report to Bapepam-LK, such as sustainability report, or corporate social responsibility report.
I.	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan Keuangan Tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor VIII.G.11 atau Peraturan Nomor X.E.1.	356-357	I.	Audited Annual Financial Statements Audited Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for Annual Reporting as stipulated in Rule No. VIII.G.11 or Rule No. X.E.1.
J.	Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi		J.	Board of Commissioners and Board of Directors Signatures
	1) Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.	√		1) Annual Report should be signed by all members of the current Board of Commissioners and Board of Directors.
	2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dibubuhkan pada lembaran tersendiri dalam Laporan Tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib mencantumkan pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan, sesuai dengan Formulir Nomor X.K.6-1 Lampiran Peraturan ini.	√		2) The signature as refer to in point 1) should be appended on separate sheet of the Annual Report, where the said sheet should contain a statement that all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are fully responsible for the accuracy of the Annual Report, in accordance with the Form No. X.K.6-1 of the Attached Rules.
	3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.	n.a		3) In the event that members of the Board of Commissioners or the Board of Director refused to sign the Annual Report, the said person should provide a written explanation in separate letter attached to the Annual Report.
	4) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang menandatangani Laporan Tahunan wajib menyatakan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.	n.a		4) In the event that a member of the Board of Commissioners and the Board of Directors refused to sign the Annual Report and failed to provide written explanation, then a member of the Board of Commissioners or Board of Directors who signed the Annual Report should provide a written explanation in a separate letter attached to the Annual Report.

Keterangan/ Note: N/A = Not Applicable



Rising to the Challenge

PT Vale Indonesia Tbk

Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor
Jalan Jendral Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 524 9000
Fax: +62 21 524 9020
www.vale.com/indonesia

PT Vale Indonesia Tbk

THE ENERGY Building, 31st Floor
SCBD Lot 11A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 524 9000
www.vale.com/indonesia

PT Vale Indonesia Tbk

